



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. landasan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS untuk penyusunan rancangan APBD tahun 2026.

Pasal 3

Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RKPD tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan

c. evaluasi...

c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.

- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Perubahan RKPD tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 Juli 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 13.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR **13** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-6
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-12
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1 KONDISI UMUM DAERAH	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.1.2 Aspek Geologi	II-13
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-14
2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah	II-25
2.1.1.5 Aspek Demografi	II-28
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-34
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-34
2.1.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial	II-47
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-68
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-72
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-150
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-150
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II-166
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi	II-169
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-177
2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II-180
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun 2024	II-180
2.2.1.1 Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024	180
2.2.1.2 Indikator Kinerja Utama	II-181



2.2.1.3 Prioritas dan Program Pembangunan	II-189
2.2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Daerah	II-201
2.2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu	II-217
2.2.2 Capaian Kinerja RPD	II-336
2.2.2.1 Capaian Kinerja Indikator Makro RPD	II-336
2.2.2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPD	II-336
2.2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama RPD	II-338
2.2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SPM	II-339
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	II-348
2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ..	II-356
2.3.3 Penentuan Isu Strategis	II-363
2.3.3.1 Isu Pembangunan Manusia	II-363
2.3.3.2 Isu Tata Kelola Pemerintahan yang dilihat dari Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi ..	II-367
2.3.3.3 Isu Pembangunan Ekonomi	II-369
2.3.3.4 Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	II-373
2.3.3.5 Isu Kualitas Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup	II-377
2.4 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024	II-379
2.5 CAPAIAN SDGs TAHUN 2024	II-387

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1
3.1.2 Perkembangan Global	III-2
3.1.3 Kondisi Perekonomian Regional	III-3
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026	III-5
3.1.5 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 (KEM PPKF 2026)	III-7
3.1.6 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2026	III-9
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-17
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-18
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-20



b) Pendapatan Transfer	III-20
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-21
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-25
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-33
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026	IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	IV-4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026	IV-10
4.2 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	IV-12
4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-12
4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026	IV-15
4.2.3 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang dan Belanja Bersifat Mengikat	IV-26
4.2.4 Tema, Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026	IV-28
4.2.5 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026	IV-30
4.3 DUKUNGAN RKPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026 TERHADAP RKP TAHUN 2026 DAN RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026	IV-35
4.3.1 Dukungan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 Terhadap Prioritas RKP Tahun 2026	IV-35
4.3.2 Dukungan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 Terhadap Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat	IV-37
4.4 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	IV-40
4.5 INOVASI DAERAH	IV-44
4.5.1 Urgensi Inovasi Daerah	IV-44
4.5.2 Permasalahan Inovasi Daerah	IV-45
4.5.3 Perkembangan Inovasi Daerah	IV-45



4.5.4 Rencana Tindak Lanjut	IV-48

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1

6.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO	VI-1

6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	VI-2

6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH	VI-4

BAB VII PENUTUP	1



BAB I

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 260 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa daerah, sesuai dengan kewenangannya, harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional serta berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, menjadi arah kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab program kegiatan.
2. Secara normatif, menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara, serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



3. Secara operasional, berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Secara faktual, berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Pendekatan politis berfungsi untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD PKota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045.

RKPD Tahun 2026 tidak lagi berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya tapi telah mengacu kepada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang secara simultan juga sedang disusun serta mengakomodir visi dan misi dari Hendri Arnis dan Allex Saputra sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Keduanya dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan 2025–2030. Sementara itu RPD Kota Padang Panjang Tahun 2023-2026 hanya menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang nanti akan diurai capaiannya di Bab II



Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup beberapa tahap penting sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD.
 - a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
 - d. Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPD;
 - g. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
 - h. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - i. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - j. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rancangan Awal RKPD ini akan ditindaklanjuti dengan proses Konsultasi Publik untuk mendapat masukan dalam sebagai pedoman untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026.

3. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026

Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Padang Panjang.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026.

Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Padang Panjang merupakan rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat Kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026.



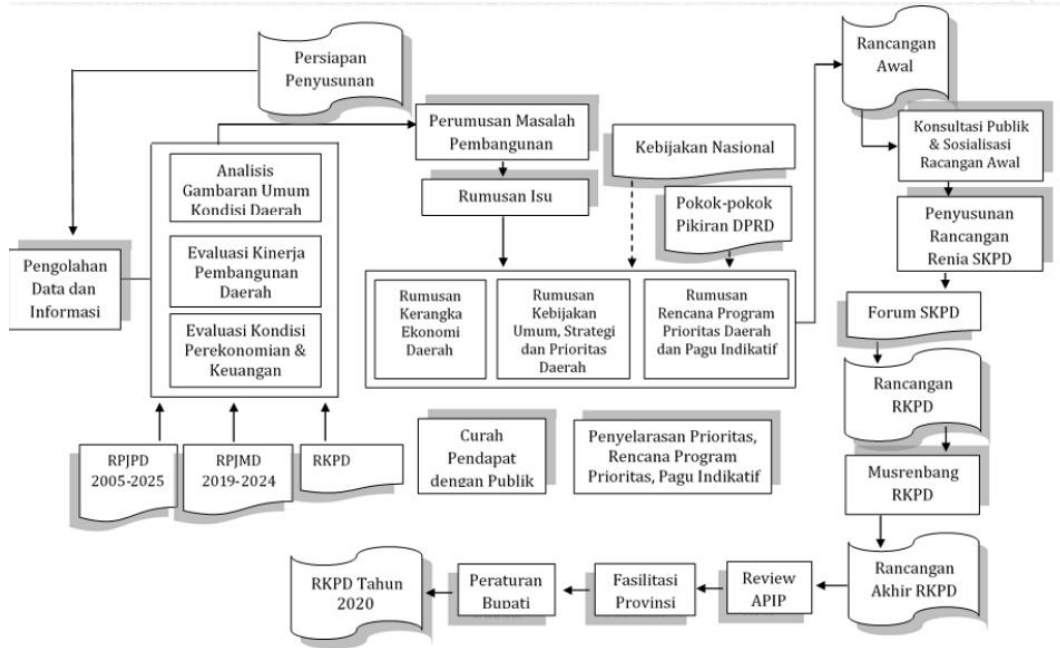
Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 ini sebagai proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

6. Penetapan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026.

- a. Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Perkada RKPD 2026 kepada Inspektorat untuk direviu.
- b. Menyampaikan Rancangan Perkada RKPD 2026 kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diharmonisasi sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 97D disebutkan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui kepala BAPPEDA Provinsi untuk difasilitasi.
- d. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi.
- e. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Secara lebih jelas alur penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026



Penyusunan RKPD Tahun 2026 ini memerlukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta dilakukan berbasis *e-planning* melalui aplikasi SIPD untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang ada, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Penyusunan RKPD ini juga mengacu pada perkembangan situasi, kondisi, dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada saat ini. Salah satu referensi utama dalam penyusunan RKPD ini adalah RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan menjadi tahun pertama dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 juga akan mengintegrasikan berbagai kebijakan nasional dan daerah yang terkait dengan penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan pembangunan Kota Padang Panjang dapat mencapai hasil yang optimal, dengan peningkatan kualitas hidup yang signifikan bagi seluruh masyarakat.

Melalui penyusunan RKPD yang berbasis pada data dan analisis kebutuhan yang komprehensif, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen



untuk mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya kesinambungan antara RKPD 2026, RPJMD 2025-2029, dan pencapaian yang telah direncanakan sebelumnya, diharapkan pembangunan Kota Padang Panjang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, partisipatif, dan berbasis data untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Berikut dijabarkan beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - k. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 - n. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - p. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - x. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
 - y. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
 - ab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 - ac. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
 - ad. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 13);



- ae. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
- af. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
- ag. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RKPD Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026.
- b. RKPD Tahun 2026 disusun berpedoman pada Agenda dan Arah Pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yaitu melalui penyelarasan Agenda dan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2026.
- c. RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun berpedoman pada RKPD Provinsi Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, yang dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Kota Padang Panjang dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- d. RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Kota Padang panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.
- e. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah perangkat daerah yang disusun sebagai turunan dari RPJMD, RKPD merupakan penjabaran prioritas



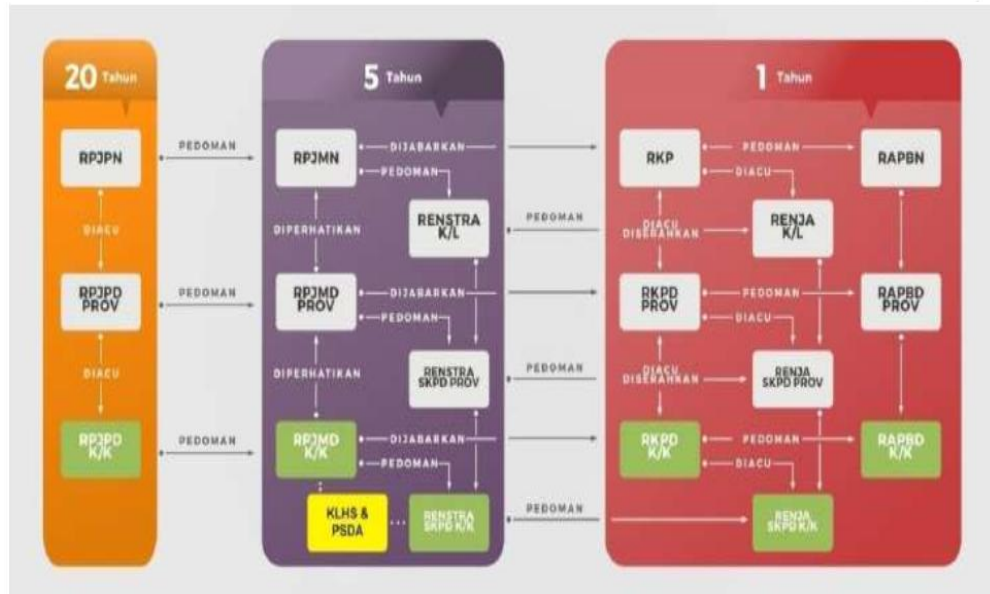
pembangunan daerah yang dihimpun dari program, kegiatan, dan target kinerja seluruh OPD yang telah dituangkan dalam Renstra masing-masing. Renstra Perangkat Daerah memberikan arah, sasaran, dan indikator kinerja yang kemudian dijabarkan secara tahunan melalui RKPD, sehingga perencanaan pembangunan daerah berjalan konsisten, terintegrasi, serta sesuai dengan tujuan jangka menengah daerah.

- f. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dimana proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan secara paralel atau bersamaan.
- g. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD dan sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padang Panjang Tahun 2026.

Sinergitas perencanaan pembangunan dimaksudkan terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang. Oleh sebab itu, maka hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan, khususnya dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 adalah bersifat saling mengisi dan melengkapi, sehingga RKPD mampu menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada Tahun 2026.

Untuk lebih jelasnya, berikut digambarkan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk mewujudkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah. RKPD merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) melalui pendekatan *money follows program* serta pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).

Adapun tujuan disusunnya RKPD adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan bersinergi baik antar pelaku pembangunan, maupun antar sektor dan bidang pembangunan.
- Menjabarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran 2026.
- Menyiapkan dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Menyediakan pedoman sebagai tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan pembangunan.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan** yang menjabarkan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD serta sistematika RKPD
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah** yang menjabarkan Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD tahun keempat, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.
- Bab III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah** yang menjabarkan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah** yang menjabarkan secara eksplisit Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 serta hubungan antara Program pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 yang mendukung pencapaian program prioritas nasional tahun 2026.
- Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah** yang menjabarkan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** yang menjabarkan Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- Bab VII Penutup**



BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

Gambaran kondisi umum daerah berfungsi sebagai landasan penting dalam merancang arah kebijakan pembangunan. Bagian ini memuat informasi menyeluruh mengenai karakteristik wilayah dari sisi geografis dan demografis. Aspek geografis mencakup letak, luas wilayah, kondisi topografi, serta potensi pengembangan wilayah, sementara aspek demografis menjelaskan dinamika jumlah penduduk, struktur dan distribusi masyarakat. Analisis terhadap kondisi umum ini sangat vital karena memberikan pijakan objektif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang realistis dan tepat sasaran. Dengan memahami kondisi faktual daerah, pemerintah dapat mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, mengenali permasalahan aktual, serta menyusun solusi dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Penyusunan bagian ini juga ditopang oleh data dan tren perkembangan indikator pembangunan selama beberapa tahun terakhir, sehingga strategi pembangunan yang dirancang menjadi lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Sumatera Barat dengan luas 2.300 Ha, mencakup 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan. Adapun rincian wilayah administrasi Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Padang Panjang

Wilayah	Luas	
	Ha	%
I. Kecamatan Padang Panjang Barat	1.151,20	48,86
Balai Balai	37,56	1,59%
Bukit Surungan	79,72	3,38%
Kampung Manggis	489,1	20,76%
Pasar Baru	8,59	0,36%
Pasar Usang	42,49	1,80%
Silaing Atas	30,03	1,27%
Silaing Bawah	212,14	9,00%
Tanah Hitam	251,59	10,68%
II. Kecamatan Padang Panjang Timur	1.204,80	51,14
Ekor Lubuk	157,25	6,67%

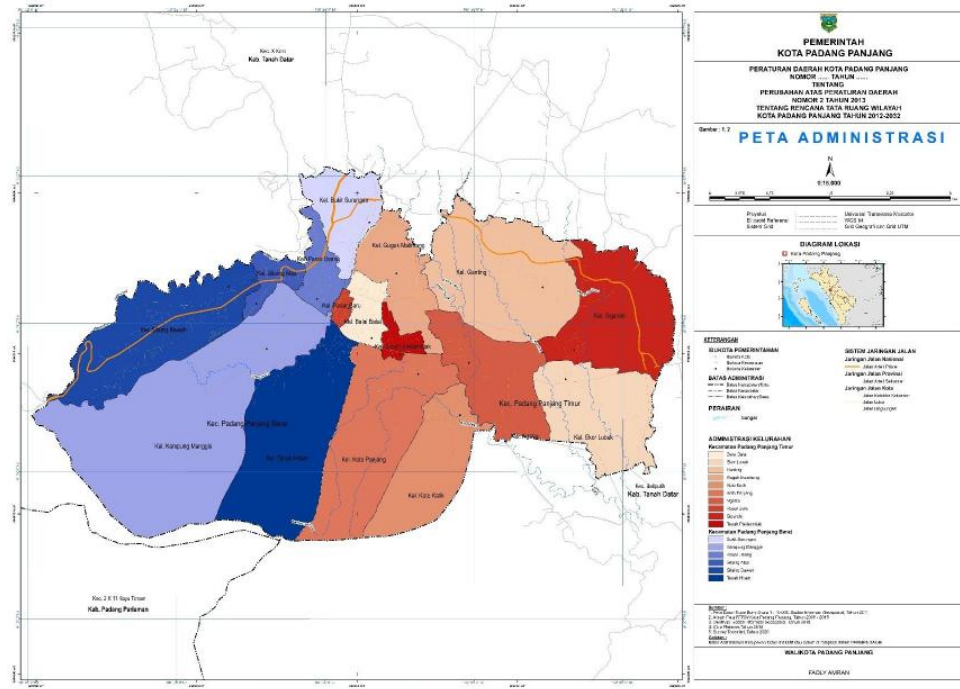
Wilayah	Luas	
	Ha	%
Ganting	242,75	10,30%
Guguk Malintang	95,76	4,06%
Koto Katik	138,95	5,90%
Koto Panjang	229,58	9,74%
Ngalau	135,41	5,75%
Sigando	185,61	7,88%
Tanah Paklambiak	19,46	0,83%
Padang Panjang	2.300	100

Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

Secara administrasi Kota Padang Panjang mempunyai batas sebagai berikut:

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar)
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)
4. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar)

Gambar 2.2
Peta Administratif Kota Padang Panjang



Sumber: KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025



B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Padang Panjang terletak antara $0^{\circ} 27' - 0^{\circ} 32'$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 20' - 100^{\circ} 30'$ Bujur Timur (BPS), atau terletak pada 0026 48,30' Lintang Selatan sampai dengan 0029' 31,94 Lintang Selatan dan 100 020' sampai dengan 1000 27' Bujur Timur (Revisi RTRW).

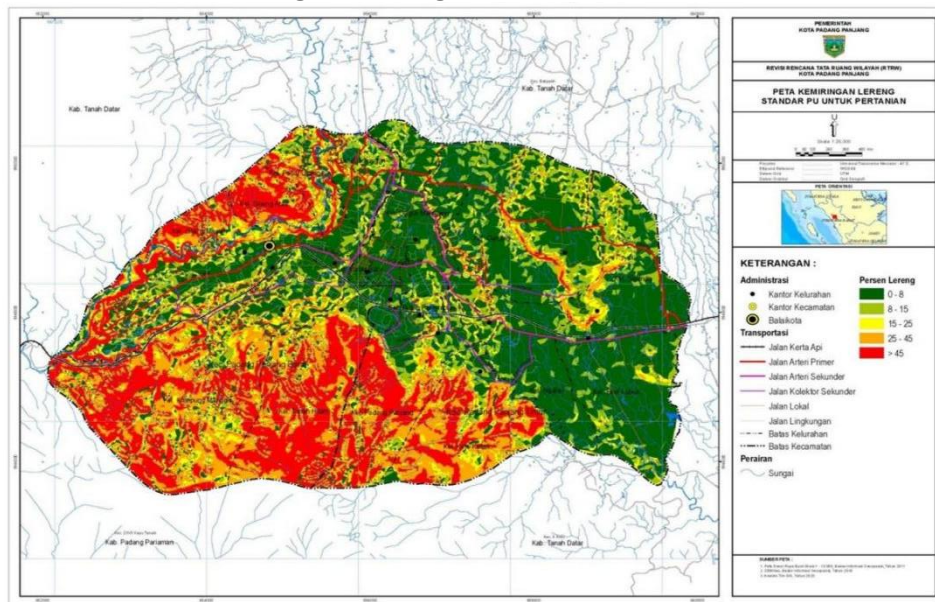
Padang Panjang terletak di jalur transportasi utama antara Padang (pusat ekonomi) dan Bukittinggi (pusat budaya), dengan jarak tempuh 72 km ke Padang dan 19 km ke Bukittinggi. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

C. Topografi

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki karakteristik topografi unik dan kompleks. Terletak pada ketinggian antara 650 hingga 850 meter di atas permukaan laut, wilayah kota ini didominasi oleh dataran tinggi bergelombang. Keistimewaan topografi Kota Padang Panjang diperkuat dengan keberadaannya yang dikelilingi oleh tiga gunung berapi aktif, yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikek. Ketiga gunung ini tidak hanya membentuk lanskap alam kota, tetapi juga memengaruhi kondisi iklim, potensi bencana, serta keberlanjutan lingkungan hidup di sekitarnya. Lanskap yang terbentuk dari keberadaan gunung-gunung ini menciptakan variasi kemiringan lereng dari datar hingga sangat curam, kondisi geografis yang demikian menjadikan banyak lahan di Padang Panjang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk permukiman.

Sekitar 20,17% dari total wilayah Kota Padang Panjang merupakan kawasan dengan kemiringan lahan di bawah 15%, yang dikategorikan sebagai daerah relatif landai. Kawasan inilah yang umumnya paling ideal untuk kegiatan pertanian maupun pembangunan permukiman. Jenis tanah di wilayah landai ini adalah tanah andosol, yang dikenal subur dan sangat mendukung aktivitas pertanian. Namun, sebagian besar wilayah kota terdiri dari lereng miring hingga curam, perbukitan, dan lembah-lembah dengan kemiringan tinggi. Permukaan tanahnya cenderung miring dari arah utara ke selatan, menciptakan pola mikro relief yang khas. Kemiringan lereng di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Standar PU untuk Pertanian



Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Berdasarkan peta kemiringan lahan, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kemiringan lahan 0-2% terdapat di bagian barat dan tengah Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 66,49 Ha atau 2,30% dari seluruh luas wilayah Kota Padang Panjang
2. Kemiringan lahan 2-15% membentang dari barat ke timur di bagian tengah Kota Padang Panjang dengan luas sekitar 479,70 Ha atau 16,13% dari seluruh luas wilayah Kota Padang Panjang.
3. Kemiringan lahan 15-40% membentang dari barat ke timur dengan luas sekitar 1.072,31 Ha atau 36,06% dari seluruh wilayah Kota Padang Panjang.
4. Kemiringan lahan >40% membentang dari utara ke selatan dengan Luas lahan sekitar 1.353, 04 Ha atau 45,50% dari seluruh wilayah Kota Padang Panjang

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kota Padang Panjang Dirinci Menurut Kemiringan Lereng

No	Kemiringan Lereng	Luas		Sebaran
		(Ha)	%	
1	0-2 %	68,49	2,30	Bagian barat dan tengah Kota Padang Panjang: Kel. Silaing Bawah, Tanah Hitam dan Kel. Kota Panjang
2	2-15 %	479,70	16,13	Membentang dari barat ke timur di bagian tengah Kota Padang Panjang: Kel. Silaing Bawah, Silaing Atas, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Tanah Pak Lambik, Ganting, Ngatau dan Kel. Ekor Lubuk
3	15-40 %	1.072,31	36,06	Membentang dari barat ke timur: Kel. Sigando, Ekor Lubuk, Ngatau, Ganting, Koto Panjang, Koto Katik, Guguk Malintang, Silaing Bawah, Kampung Manggis,



No	Kemiringan Lereng	Luas		Sebaran
		(Ha)	%	
				Tanah Hitam dan Bukit Surungan
4	> 40 %	1.353,04	45,50	Membentang dari utara ke selatan Kota Padang Panjang: Kel. Bukit Surungan, Pasar Usang, Silaing Bawah, Kampung Manggis, Tanah Hitam, Koto Panjang, Koto Katik
	Jumlah	2.973,54	100%	

Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

D. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Padang Panjang yang terbesar untuk lahan pertanian dengan luas 1.350 Ha atau 58,70 persen. Adapun rincian penggunaan lahan di Kota Padang Panjang dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.3
Luas Lahan Kota Padang Panjang Menurut Jenis Penggunaannya

Jenis Penggunaan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap Luas Kota
1. Lahan Pertanian	1350	58,70
a. Sawah/ <i>Wetland</i>	484	24,00
b. Tegal/ Kebun/ <i>Garden</i>	264	11,48
c. Ladang/ huma/ <i>Farm Land/ Bareland</i>	95	4,13
d. Hutan Rakyat/ <i>Woods Forest</i>	213	9,26
e. Kolam/ Tebet/ Empang/ <i>Water Pond/ Fish Pond</i>	87	3,78
f. Sementara Tidak Diusahakan/ <i>Not Cultivated Land</i>	139	6,04
2. Lahan Bukan Pertanian/ <i>Non Agriculture Land</i>	950	41,30
Padang Panjang	2300	100

Sumber: Kota Padang Panjang dalam Angka 2024, 2025

E. Klimatologi

Secara klimatologi, Kota Padang Panjang terletak pada kawasan pegunungan (Gunung Marapi, Singgalang dan Tandikat), sehingga udaranya sejuk dan mempunyai curah hujan yang tinggi atau sering disebut sebagai kota hujan. Selama periode 2020–2024, kondisi klimatologi di Padang Panjang menunjukkan tren perubahan yang cukup mencolok, baik dari segi suhu maupun curah hujan. Suhu rata-rata tahunan secara bertahap meningkat dari 22,7°C pada 2020 menjadi 23,0°C pada 2024, bersamaan dengan peningkatan suhu maksimum dari 27,5°C menjadi 29,8°C. Peningkatan suhu ini disertai fluktuasi kelembaban udara, di mana kelembaban rata-rata menurun pada 2022 hingga 89,0% dan kembali meningkat menjadi 90,2% pada 2024. Namun, kelembaban maksimum menunjukkan penurunan signifikan dari 98,5% (2020) menjadi hanya 81,5% (2024), yang dapat mengindikasikan penurunan intensitas hujan atau kejenuhan udara. Sementara itu, data curah hujan dan penyinaran matahari memperkuat indikasi adanya perubahan pola iklim. Curah hujan tahunan cenderung bervariasi, dengan titik tertinggi terjadi pada 2022 sebesar 384,9 mm dan menurun menjadi 317,1 mm pada 2024. Jumlah hari hujan pun sedikit



meningkat, dari 17,6 hari (2020) menjadi 20,3 hari (2024), menunjukkan hujan yang lebih sering namun mungkin dengan intensitas yang lebih rendah. Di sisi lain, durasi penyinaran matahari tetap berfluktuasi di kisaran 37–42%, menandakan potensi perubahan dalam tingkat kecerahan dan waktu efektif penyinaran yang dapat berdampak pada sektor pertanian, pariwisata, dan kesehatan masyarakat.

F. Hidrologi

Kota Padang Panjang memiliki sistem hidrologi yang dipengaruhi oleh topografi pegunungan, curah hujan tinggi, dan jaringan sungai yang kompleks. Berikut analisis komprehensif berdasarkan data terbaru:

1) Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah, baik dalam kondisi mengalir maupun diam. Contoh air permukaan meliputi sungai, danau, rawa, waduk, lahan basah, dan laut. Air ini terbentuk dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, di mana sebagian air akan menguap, sebagian lagi meresap ke dalam tanah, dan sisanya mengalir di permukaan hingga terkumpul di badan-badan air tersebut.

Secara regional (konteks Provinsi), Kota Padang Panjang termasuk dalam 2 wilayah sungai (WS) yaitu WS Akuaman pada bagian barat dan WS Indragiri pada bagian timur.

1. WS Akuaman pada bagian barat: WS akuaman terdiri dari beberapa aliran, salah satu diantaranya yang berada di wilayah Kota Padang Panjang yaitu aliran Sungai Andok.
2. WS Indragiri pada bagian timur

Adapun secara lokal, Kota Padang Panjang terbagi atas 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) meliputi:

1. DAS Batang Anai berlokasi di bagian barat: seluas $\pm 380,80$ Ha
2. DAS Sungai Andok berlokasi dibagikan tengah (barat): seluas $\pm 931,46$ Ha
3. DAS Batang Rupit berlokasi di bagian tengah (timur): seluas $\pm 939,47$ Ha
4. DAS Batang Sikakeh berlokasi di bagian timur: seluas $\pm 721,81$ Ha

Terdapat 7 sungai di Kota Padang Panjang dengan total panjang 24,99 Km dan sebagian besar berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur. Kondisi sungai di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Kondisi Sungai di Kota Padang Panjang

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Batang Sibunian	2,91	1,711	1,313	0,301	0,230	0,046



No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
2	Batang Sikakeh	4,33	3,961	3,367	0,306	0,297	0,104
3	Sungai Talang	5,12	5,094	2,433	0,309	0,858	0,037
4	Batang Sitabak	1,74	3,667	3,777	0,367	0,611	0,117
5	Batang Aia Bakarek-karek	3,63	3,073	2,507	0,299	0,684	0,062
6	Parik Rumpang	3,64	2,584	1,470	0,278	0,604	0,035
7	Sungai Andok	3,62	11,567	8,600	0,533	2,776	0,833

Sumber : DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024

Wilayah Sungai (WS) Indragiri terbagi atas 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) sebagai berikut

1. DAS Batang Anai:

Batang Anai (di bagian wilayah Indragiri Akuaman), merupakan sungai strategis dengan total panjang 52 km. Hulu sungai terdapat buangan air PLTA Singkarak dan muaranya berdekatan dengan Bandara Internasional Minangkabau dan berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tanah dan Kabupaten Pariaman. Bagian Barat Wilayah Kota Padang Panjang termasuk ke dalam DAS ini, melewati daerah perbukitan, pertanian dan permukiman di beberapa titik. DAS batang anai ini dimanfaatkan untuk irigasi serta wisata alam oleh kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah ini. Bagian hilir dari DAS ini.

2. DAS Sungai Andok:

Aliran sungai andok menerima beberapa anak aliran yang mengalir pada wilayah Barat Kota Padang Panjang seperti Batang Air Putih, Batang Air Bakarek-karek dan Parit Rumpang, sebagai berikut.

- Batang Air Putih. Sebagian besar daerah aliran sungai ini merupakan wilayah hutan dan perbukitan dengan kontur yang terjal. Tingkat kontaminasi yang masuk ke aliran ini relatif lebih kecil.
- Batang Air Bakarek-karek. Hulunya berasal dari wilayah Sungai Talang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang merupakan lahan pertanian yang cukup luas. Aliran sungai ini mengalir pada wilayah pusat kota yang merupakan kawasan padat penduduk, sehingga aliran ini menerima bahan buangan yang cukup banyak dari berbagai aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sehingga potensi terkontaminasi dengan bahan pencemar cukup tinggi pada aliran sungai ini.
- Parit Rumpang. Aliran sungai ini bersumber dari suatu aliran yang berasal dari Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah



Datar, mengalir di pusat Kota Padang Panjang mulai dari bagian timur Terminal Bus Regional Bukit Surungan ke arah Kelurahan Pasar Usang dan hilirnya bertemu dengan Batang Bakarek-karek di Kelurahan Kampung Manggis.

3. DAS Batang Rupit

DAS ini berada di wilayah tengah Kota Padang Panjang. Sungai utama yang berada pada DAS ini antara lain Sungai Talang, Batang Sitabak dan Sungai Sibunian, di samping itu ada juga anak-anak aliran sungai yang termasuk ke dalam DAS ini.

- a. Sungai Talang. Bagian hulu berasal dari wilayah Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Bantaran sungai berbentuk tebing terjal dengan aliran yang cukup panjang melewati beberapa Kelurahan di Kota Padang Panjang. Pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas air sungai ini berasal dari bahan buangan aktivitas pertanian yang cukup luas di sepanjang DAS, di samping itu kontaminan yang cukup besar juga diterima aliran air kotor yang berasal dari aktivitas manusia di sepanjang wilayah yang dilalui.
- b. Batang Sibunian. Aliran sungai ini berhulu di Kabupaten Tanah Datar, mengalir ke wilayah Kota Padang Panjang mulai dari Bukit Kandung, Kelurahan Ganting sampai ke hilirnya di wilayah Batu Tagak di Kelurahan Ekor Lubuk. Batang air ini merupakan aliran irigasi yang mengairi cukup luas lahan pertanian dan perikanan. Di samping itu juga menerima limpasan air dari sawah. Badan air ini juga menerima limbah cair yang berasal dari permukiman penduduk dan usaha/kegiatan yang ada di sepanjang sungai.
- c. Batang Sitabak mempunyai banyak anak aliran seperti aliran dari mata air bulaan, mata air pancuran karang, serta limpasan air pertanian dan irigasi. Aliran sungai ini juga menerima aliran limbah dari permukiman penduduk.

4. DAS Batang Sikakeh:

Aliran Batang Air Sikakeh dari hulu berasal dari pengairan irigasi pertanian di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, masuk ke Kota Padang Panjang di Kelurahan Sigando melalui Batang Air Solok Batuang Atas, Solok Batuang Atas, Solok Batuang Bawah dan dua aliran irigasi di Batang Arau. Bagian hilir anak-anak sungai ini berada di wilayah Guguk Kuliling Kelurahan Ekor Lubuk dan seterusnya mengalir ke arah Batipuh.



2) Air Tanah

Berdasarkan peta hidrogeologi yang disusun oleh Sukrisno (1985) ketersediaan air tanah dan produktivitas akuifer wilayah Kota Padang Panjang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Setempat Akuifer Produktif : Akuifer terdiri dari bahan pasiran, tidak menerus, agak tebal dan keterusan sedang hingga tinggi. Muka air tanah tidak tertekan umumnya terdapat pada kedalaman lebih dari 5 meter di bawah permukaan tanah setempat. Secara administrasi termasuk Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk yang meliputi areal seluas 1.433,31 Ha.
2. Produktivitas Akuifer Kecil : Aliran air tanah pada akuifer ini melalui celahan atau rekahan bermacam batupasir atau ruang antar butir dari pelapukan batuan tersebut. Meskipun secara umum produktivitasnya kecil, namun pada daerah lembah atau zona pelapukan yang tebal masih dapat diharapkan sumber air tanah yang cukup berarti. Di daerah lembah umumnya mempunyai muka air tanah dangkal. Di Wilayah Kota Padang Panjang, akuifer kecil terdapat di bagian Barat dan tengah. Secara administrasi akuifer ini berada di wilayah Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis yang meliputi areal seluas 1.303,56 Ha.
3. Daerah Air Tanah Langka : Tersebar di Elevasi tinggi dan batuan padu. Di Wilayah Kota Padang Panjang terdapat dibagian Selatan. Secara administrasi termasuk dalam Kelurahan Tanah Hitam yang meliputi areal seluas 236,67 Ha.

Tabel 2.5
Data Hidrogeologi Kota Padang Panjang

No.	Klasifikasi Air Tanah	Luas (Ha)	Persen	Sebaran (Kelurahan)
1	Setempat Akuifer Produktif	1.107,32	47%	Kelurahan Ganting, Sigando, Tanah Pak Lambik, Koto Panjang, Ngalau, Koto Katik dan Ekor Lubuk.
2	Produktivitas Akuifer Kecil	1.036,64	44%	Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam dan Kampung Manggis
3	Daerah Air Tanah Langka	188,48	8%	Kelurahan Tanah Hitam
Jumlah		2.356,01		

Sumber: Revisi RTRW Kota Padang Panjang 2024-2044



3) Mata Air

Terdapat 7 sumber mata air yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Padang Panjang sebagai sumber air baku, yaitu:

- a) Kandang di Tabek : Sumber mata air ini berlokasi di kaki Gunung Marapi pada ketinggian 960 dpl dibangun pada tahun 1913 dengan konstruksi bangunan permanen. Adapun Kapasitas terpasangnya sebesar 45 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 30 l/dt.
- b) Lubuk Mata Kucing : Ada 2 sumber mata air pada lokasi ini yaitu sumber pompa dan gravitasi. Sumber ini berlokasi di Kelurahan Pasar Usang dengan elevasi 764 dpl. Sumber pompa dibangun pada tahun 1989 dengan konstruksi permanen. Adapun kapasitas terpasangnya berkisar 120 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 90 l/dt.

Sedangkan sumber gravitasi pada tahun 2018 telah resmi diberi nama Zona Air Minum Prima (ZAMP) oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Air Minum (BPPSPAM) karena telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu kualitas, kuantitas dan kontinuitas pendistribusian air minum. Kapasitas terpasang berkisar 10 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 8 l/dt.

- c) Sungai Andok Pompa : Dibangun pada tahun 2016 berlokasi di Kelurahan Kampung Manggis, dengan Kapasitas terpasang berkisar 30 l/dt dan kapasitas produksi maksimum rata-rata 15 l/dt. Sumber air ini digunakan sebagai cadangan ketika sumber air lainnya mengalami penurunan produksi.
- d) Tungku Sadah : Sumber mata air ini dibangun tahun 1997, berlokasi di Kawasan hutan tungku saadah dengan konstruksi permanen dan kapasitas terpasang 25 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 20 l/dt.
- e) Tungku sadah (kandang kudo) : Sumber ini merupakan sumber tungku sadah 2 dengan kapasitas terpasang 15 l/dt kapasitas produksi maksimum rata-rata 10 l/dt.
- f) Sawah Liek : Sumber mata air dibangun tahun 2005 berlokasi di Kawasan hutan sawah liek dengan konstruksi permanen, kapasitas terpasang sebesar 10 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 8 l/dt.
- g) Koto katiak : Sumber ini dibangun pada tahun 2010 terletak pada elevasi 860 mdl. Kapasitas terpasang sebesar 4 l/dt dan kapasitas produksi sebesar 1 l/dt.

Selain itu, juga terdapat sumber mata air potensial yang dimanfaatkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Sumber Mata Air di Kota Padang Panjang

No	Sumber Air	Dikelola / dimanfaatkan oleh	Potensi air (m ³ /hari)	Lokasi
1	Sumur MCK RT, 09 Kelurahan Bukit Surungan	100 jiwa	12	Kelurahan Bukit Surungan
2	Sumur Al Birr	50 jiwa	6	Kelurahan Bukit Surungan
3	Bula'an Dakek	50 jiwa	6	Kelurahan Kampung Manggis
4	Sumur MCK Amanah	150 jiwa	18	Kelurahan Kampung Manggis
5	Bula'an	1300 jiwa	156	Kelurahan Sigando
6	Mata Air Timbarau	500 jiwa	60	Kelurahan Sigando
7	Sumur MCK Sampang Labuah	50 jiwa	6	Kelurahan Sigando
8	Mata Air Lubuak Gadang	500 jiwa	60	Kelurahan Ekor Lubuk
9	Mata Air Lubuak Masjid	1000 jiwa	120	Kelurahan Ekor Lubuk
10	Pincuran Gucci	100 jiwa	12	Kelurahan Ganting
11	Pincurang Guang Koto	100 jiwa	12	Kelurahan Ngalau
12	Mato Aia Sago	50 jiwa	6	Kelurahan Ngalau
13	Bula'an	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Panjang
14	Pincuran Basi	100 jiwa	12	Kelurahan Koto Panjang
15	Mato Aia Surau Anduang	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Panjang
16	Pincuran Kalimpariak	200 jiwa	24	Kelurahan Koto Katik
17	Pincuran Tarian	50 jiwa	6	Kelurahan Guguk Malintang

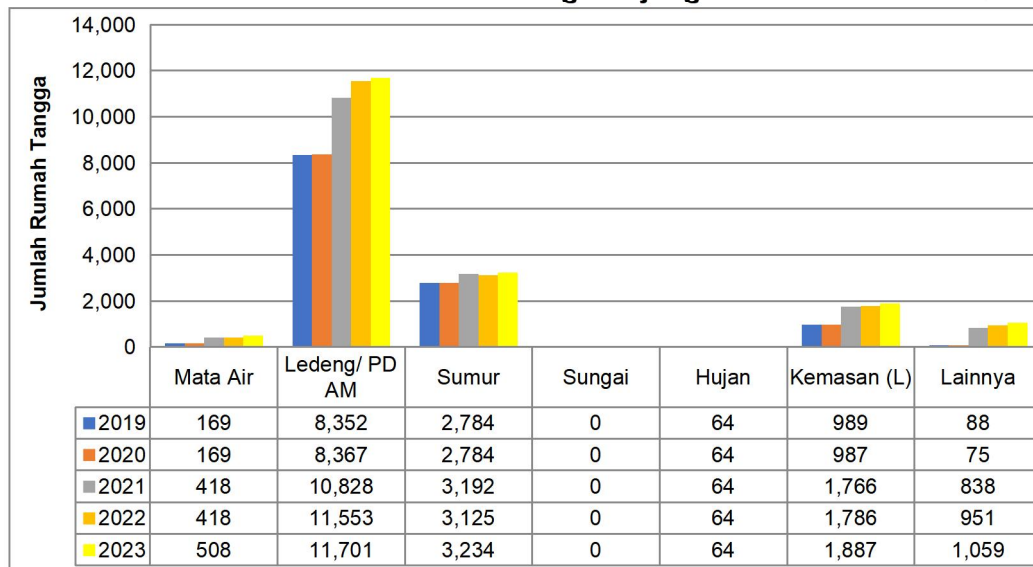
Sumber : DIKPLHD Kota Padang Panjang Tahun 2023

Selain itu juga terdapat sumber mata air yang potensial untuk dimanfaatkan, yaitu:

1. Sumber Mata Air dekat Mesjid Asasi yang berlokasi di Kelurahan Sigando.
2. Sumber Mata Air Ngalau (RT 01) di Kelurahan Ngalau.
3. Sumber Mata Air Mesjid Nurul di Kelurahan Ekor Lubuk.
4. Sumber Mata Air Pancuran Sungai Rami di Kelurahan Koto Katik.

Sumber air minum utama masyarakat Kota Padang Panjang adalah dari PDAM. Selain itu masyarakat dan pelaku usaha juga memanfaatkan air sumur dan mata air untuk memenuhi kebutuhannya di Kota Padang Panjang. Jumlah pemanfaatan sumber air minum di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Sumber Air Minum Di Kota Padang Panjang Tahun 2019 - 2023



Sumber: DIKPLHD Kota Padang Panjang, 2024

4) Kapasitas Air Baku (m³/dtk)

Kapasitas air baku menggambarkan debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Kapasitas air baku Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Kapasitas Air Baku Kota Padang Panjang
Tahun 2008, 2013, 2015, 2018, 2023

Tahun	Kapasitas Air Baku (m ³ /dtk)
2008	0,150 m ³ /dtk
2013	0,150 m ³ /dtk
2015	0,179 m ³ /dtk
2018	0,198 m ³ /dtk
2023	0,201 m ³ /dtk

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, 2024

Pada Tahun 2008 – 2013, Kapasitas air baku stabil di angka 0,150 m³/dtk. Pada Tahun 2015 terjadi peningkatan kapasitas menjadi 0,179 m³/dtk, yaitu kenaikan sekitar 19,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan pasokan. Tahun 2018 kapasitas air baku kembali meningkat menjadi 0,198 m³/dtk.(meningkat 10,6%).



Pada Tahun 2023, kapasitas air baku sedikit meningkat menjadi 0,201 m³/dtk dari Tahun 2018, yaitu sekitar 1,5%. Walaupun kecil, peningkatan ini menunjukkan upaya untuk mempertahankan atau sedikit meningkatkan kapasitas pasokan air dari Pemerintah Kota Padang Panjang.

2.1.1.2 Aspek Geologi

Bentang alam regional Kota Padang Panjang dan sekitarnya ke arah utara meliputi wilayah kaki Gunung Singgalang dan Gunung Tandikat serta Gunung Marapi, sedangkan ke arah selatan termasuk di dalamnya Lembah Anai, Komplek Bukit Jarat. Secara umum wilayah ini bentang alamnya dapat dibedakan atas Bentang Alam Lereng Kaki Bukit Bagian Tenggara Gunung Singgalang, bentang alam kerucut Gunung, dataran tinggi Padang Panjang serta Punggungan Bukit Jarat dan Lembah Batang Anai.

Bentang Alam Lereng Kaki Bukit Bagian Tenggara Gunung Singgalang di jumpai berupa punggungan yang memanjang dengan arah utara-selatan. Pada bentang alam punggungan ini secara setempat dapat diamati adanya gawir-gawir (tebing-tebing) disertai oleh kipas-kipas material Gunung Api Singgalang. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh adanya struktur sesar turun berarah utara-selatan yang membatasi bentang alam ini dengan bentang alam kerucut Gunung Marapi. bagian selatan. Bentang alam kerucut G. Marapi yang menghadap ke kota Padang Panjang merupakan bagian dari bentang alam kerucut G. Marapi bagian selatan. Secara umum bagian kerucut ini dapat dibagi atas bagian puncak, tubuh dan bagian kaki. Kota Padang Panjang dan sekitarnya terletak pada bagian kaki bentang alam kerucut Gunung Marapi bagian selatan.

Bentang alam dataran tinggi Padang Panjang merupakan bagian selatan kerucut Gunung Marapi yang dijumpai berupa dataran bergelombang dan dikontrol oleh aliran-aliran sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan. Bentang Alam Punggungan Bukit Jarat dan Lembah Anai dijumpai di sebelah selatan dan barat Kota Padang Panjang. Di antara punggungan bukit-bukit terjal tersebut dijumpai Lembah Batang Anai. Lembah sungai ini dijumpai memotong punggungan bukit dengan arah barat daya-timur laut mengikuti lajur sesar.

Tabel 2.8
Data Geologi Kota Padang Panjang

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	<i>Permian Methamorphic Rocks</i>	41,19	1,4
2	Andesit dari G. Singgalang dan Tandikat	592,17	20,3
3	Batu gamping	689,03	23,6
4	Andesit Gunung Merapi	1.595,58	54,7
	Jumlah	2.917,97	100,0

Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032



2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan analisis indeks risiko bencana (IRB) yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2024, menggambarkan bahwa dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya Provinsi Sumatra Barat, IRB Kota Padang Panjang tergolong pada kelas sedang dengan nilai IRB 113,20. Nilai IRB Kota Padang Panjang belum mengalami perubahan sejak tahun 2015.

Tabel 2.9
Indeks Risiko Bencana Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
1	Agam	193.52	204.32	204.32	157.51	205.29	Tinggi
2	Pasaman	202.50	204.50	204.50	174.46	178.00	Tinggi
3	Pasaman Barat	202.50	204.50	204.50	203.20	168.70	Tinggi
4	Kepulauan Mentawai	197.20	197.20	197.20	153.48	162.12	Tinggi
5	Solok	137.20	137.60	137.60	137.20	137.20	Sedang
6	Padang Pariaman	160.00	146.81	146.81	140.89	130.46	Tinggi
7	Kota Padang	191.00	166.99	166.99	138.90	130.21	Tinggi
8	Kota Bukittinggi	131.31	137.60	137.60	130.00	130.00	Sedang
9	Kota Pariaman	160.00	146.81	146.81	122.37	126.01	Tinggi
10	Tanah Datar	115.82	121.93	121.93	125.20	125.20	Sedang
11	Dharmasraya	137.69	137.60	137.60	125.02	119.21	Sedang
12	Lima Puluh Kota	113.61	113.61	113.61	119.20	119.00	Sedang
13	Pesisir Selatan	169.42	152.96	152.96	120.89	118.05	Tinggi
14	Kota Padang Panjang	113.00	113.10	113.10	113.20	113.20	Sedang
15	Kota Solok	115.82	121.93	121.93	95.42	111.99	Sedang
16	Solok Selatan	130.22	137.60	137.60	113.30	107.63	Sedang
17	Sijunjung	107.20	107.40	107.40	107.20	105.64	Sedang
18	Kota Payakumbuh	104.80	104.80	104.80	104.80	104.80	Sedang
19	Kota Sawahlunto	107.20	107.47	107.47	79.80	84.94	Sedang

Sumber: Inarisk, 2025

A. Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi di Kota Padang Panjang terdiri dari dua yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena Kota Padang Panjang dilalui oleh sesar Bukit Jarat dan berdekatan dengan sesar besar Sumatera (zona patahan aktif). Adapun gempa vulkanik terjadi karena di sebelah utara Kota Padang Panjang terdapat gunung Marapi yang masih aktif.

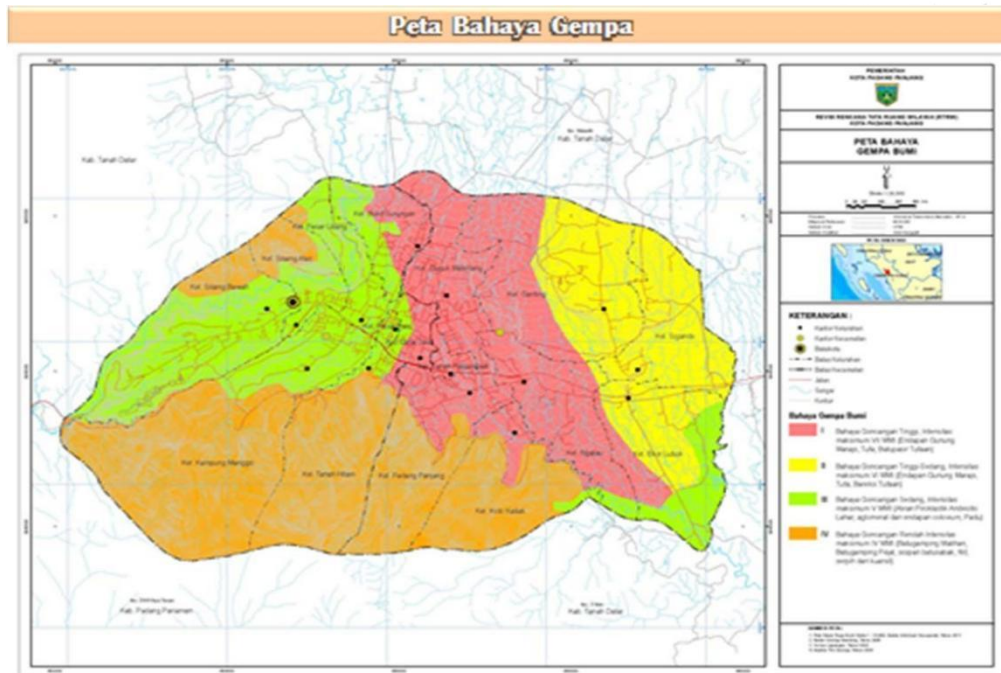


Gempa tektonik paling besar yang pernah terjadi adalah gempa tahun 1926 yang secara masif menghancurkan sebagian besar kawasan terbangun dan infrastruktur. Bahkan kejadian ini telah menjadi hikayat atau tambo yang diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat kota Padang Panjang khususnya dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat umumnya. Bencana gempa tektonik yang tercatat terakhir dan cukup besar dampaknya adalah pada tanggal 6 Maret 2007 dengan skala 6,2 skala Richter. Musibah ini memakan korban 215 orang luka – luka, meninggal dunia 4 orang, merusak Rumah Penduduk dan Fasilitas Umum sebesar 6.424 buah. Pada tahun 2007 tersebut jumlah gempa yang tercatat sebanyak 1.556 kali (jarak 0 – 100 Km dari stasiun BMKG Lubuk Mata Kucing). Hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerja sama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka terdapat lima zona kerentanan gempa bumi, yaitu:

1. Zona I (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sangat tinggi) seluas $\pm$ 281,19 Ha terdapat pada Kelurahan Silaing Bawah, Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik.
2. Zona IA (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi tinggi) seluas $\pm$ 320,02 Ha terdapat pada Kelurahan Sigando dan Ekor Lubuk.
3. Zona IB (Kerentanan risiko bahaya akan gempa bumi tinggi – sedang) seluas $\pm$ 87,21 Ha terdapat pada Kelurahan Guguk Malintang, Ganting, Sigando Ngalau.
4. Zona II (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang) seluas $\pm$ 368,90 Ha terdapat Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.
5. Zona III (Kerentanan risiko bahaya gempa bumi sedang – rendah) seluas $\pm$ 1.916,22 Ha terdapat pada hampir setiap kelurahan.

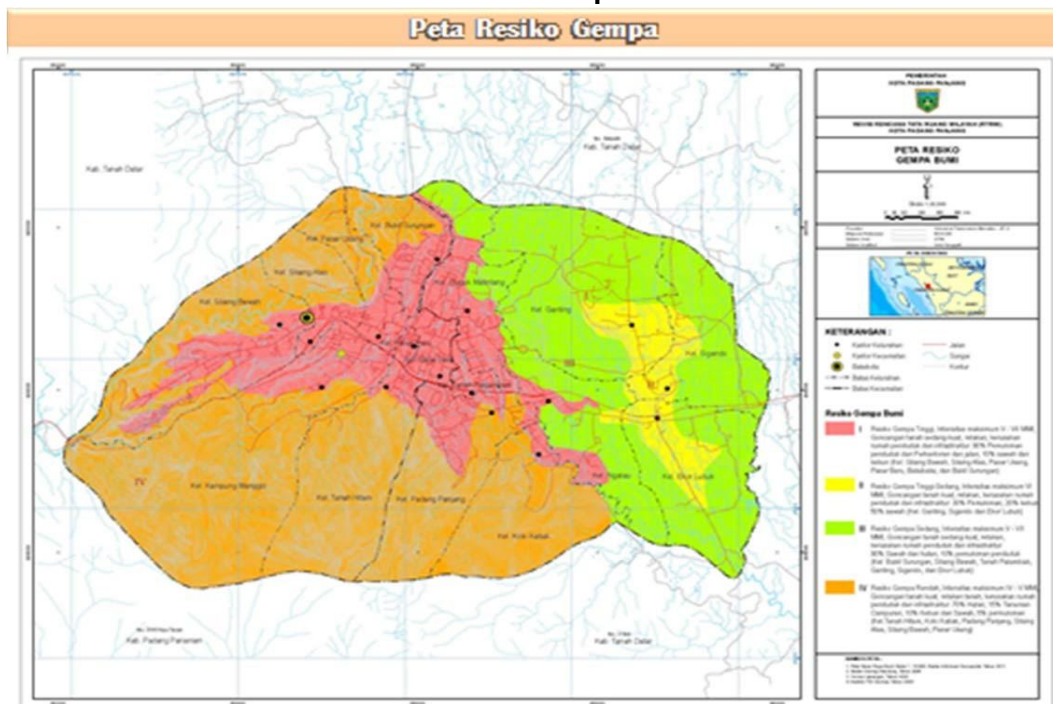
Untuk lebih jelas mengenai zona kerentanan bahaya gempa bumi di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.5
Peta Bahaya Gempa Bumi



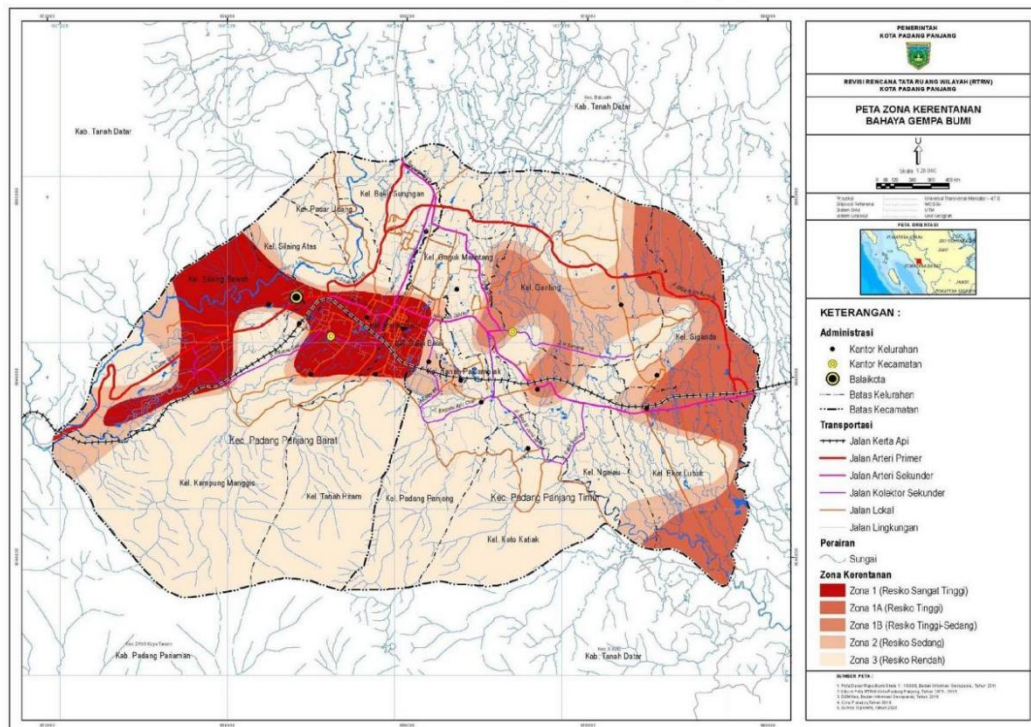
Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Gambar 2.6
Peta Risiko Gempa Bumi



Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Gambar 2.7
Peta Zona Kerentanan Bahaya Gempa Bumi



Sumber: RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

B. Bencana Letusan Gunung Api

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Kemudian hasil kajian penilaian risiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang), maka bencana yang disebabkan oleh letusan Gunung Marapi adalah berupa aliran Masa Marapi I dan Aliran Masa Marapi II serta Jatuhan Masa Marapi. Secara umum potensi letusan gunung api di Kota Padang Panjang tergolong rendah, Adapun dampak yang dirasakan di Kota Padang Panjang adalah abu vulkanik dari letusan gunung api tersebut. Beberapa wilayah di Kota Padang Panjang termasuk ke dalam KRB I, Adapun daerah tersebut adalah:

1. Kelurahan Ganting
2. Kelurahan Sigando

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi



oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah sebagai berikut:

1. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam.
2. Lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.
3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.
4. Batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.
5. Jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.
6. Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.
7. Adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah.
8. Adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum



terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah.

C. Gerakan Longsor (Gerakan Tanah)

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah sebagai berikut:

1. Hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam.
2. Lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.
3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.
4. Batuan yang kurang kuat. Batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen berukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal.
5. Jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama.
6. Getaran. Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh Gempabumi, ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak.



7. Adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah.
8. Adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah.

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan $> 40\%$. Bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur berupa fasilitas jalan bahkan merusak perumahan penduduk serta menimbulkan korban nyawa. Secara tak langsung bencana longsor juga disebabkan kegiatan manusia atau tidak sepenuhnya akibat proses alam. Seperti bencana longsor yang pernah terjadi di Bukit Tui sebagai akibat kegiatan penambangan batu kapur dan bencana longsor lainnya sebagai akibat kegiatan pertanian pada lahan berkemiringan $> 40\%$ dan kegiatan perambahan hutan pada hulu sungai. Secara umum bencana longsor di Kota Padang Panjang terjadi pada daerah bukit atau gunung dengan kemiringan $> 40\%$ dan pada daerah sepanjang lembah sungai.

Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 (dua) potensi gerakan tanah yaitu potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur.

Adapun daerah yang berpotensi tanah longsor di Kota Padang Panjang adalah:

1. Koto Panjang
2. Koto Katik
3. Tanah hitam
4. Silaing Bawah
5. Kampung Manggis
6. Sigando
7. Ganting

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mitigasi risiko longsor antara lain : melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap wilayah yang rawan longsor, reboisasi dan penanaman vegetasi, konstruksi terasering dan dinding penahan, perbaikan infrastruktur drainase, pengawasan dan peringatan dini,



penataan dan pembatasan penggunaan lahan serta evaluasi dan pemeliharaan rutin terhadap struktur penahan tanah dan drainase.

D. Banjir

Pada umumnya, banjir di Kota Padang Panjang dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi, letak geografis wilayah, kondisi topografi Kota Padang Panjang yang bergelombang, serta cuaca ekstrem seiring dengan adanya perubahan iklim sehingga menjadikan bertambahnya dataran banjir di Kota Padang Panjang. Banjir juga diperparah oleh tumpukan air yang mengalir dari Kecamatan X Koto dan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar yang letaknya berbatasan dengan Kota Padang Panjang.

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran banjir; peruntukan tata ruang di dataran banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil banjir.

Terjadinya banjir juga tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya banjir antara lain:

1. Riol atau saluran pembuangan air kotor. Kota Padang Panjang sering mengalami banjir karena tidak terawatnya saluran air, terutama saluran pembuangan air kotor.
2. Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan besar dalam banjir karena sungai merupakan tempat mengalirnya air dari air hujan. Kegiatan masyarakat yang tinggal di hulu sungai sering menyebabkan terjadinya *blocking* mata air, sehingga ketika terjadi kenaikan debit air akibat curah hujan yang tinggi, air tidak mengalir mengikuti aliran dan arus sungai melainkan menuju kawasan kota dan pemukiman warga sehingga terjadi banjir.
3. Kesadaran dan kepedulian masyarakat atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin hari kian menurun.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) KLHK, semua kelurahan di Kota Padang Panjang tidak ada yang mempunyai IKA dan IKS dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Dari 16 kelurahan, 14 diantaranya mempunyai kategori sedang dan 2 kelurahan termasuk pada kategori sangat rendah. Berikut data dan peta IKA dan IKS Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Data Kerentanan Kota Padang Panjang

No	Nama Kelurahan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
1	Silaing Bawah	0,5405	0,2725	1	1	1
2	Silaing Atas	0,5566	0,3645	3	3	3
3	Pasar Usang	0,6156	0,3635	1	1	1
4	Kampung Manggis	0,5088	0,2800	3	3	3
5	Tanah Hitam	0,4991	0,3790	3	3	3
6	Pasar Baru	0,5317	0,4960	3	3	3
7	Bukit Surungan	0,5636	0,4769	3	3	3
8	Balai-Balai	0,6470	0,4072	3	3	3
9	Koto Panjang	0,5148	0,4480	3	3	3
10	Koto Katik	0,4868	0,4347	3	3	3
11	Ngalau	0,4223	0,5144	3	3	3
12	Ekor Lubuk	0,4457	0,5248	3	3	3
13	Sigando	0,5369	0,5090	3	3	3
14	Ganting	0,5206	0,5969	3	3	3
15	Guguk Malintang	0,4702	0,3780	3	3	3
16	Tanah Pak Lambik	0,3958	0,4631	3	3	3

Sumber : SIDIK KLHK, 2024

Keterangan : IKS : Indeks Keterpaparan dan Sensitifitas

IKA : Indeks Kapasitas Adaptif

Kategori Kerentanan :

- 1 : Tidak Rentan
- 2 : Agak Rentan
- 3 : Cukup Rentan
- 4 : Rentan
- 5 : Sangat Rentan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi kerentanan wilayah di Kota Padang Panjang menunjukkan tingkat kerentanan yang relatif cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik dari aspek banjir maupun kekeringan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) di seluruh kelurahan di Kota Padang Panjang berada pada rentang 0,3958 hingga 0,6470. Nilai tertinggi terdapat di Kelurahan Balai-Balai (0,6470), menandakan kapasitas adaptif yang relatif lebih baik dibandingkan kelurahan lainnya. Sementara itu, nilai IKA terendah ditemukan di Kelurahan Tanah Pak Lambik (0,3958), yang menunjukkan kapasitas adaptif yang masih perlu ditingkatkan. Secara umum, sebagian besar kelurahan memiliki nilai IKA di kisaran 0,4–0,6,



menandakan kapasitas adaptif masyarakat dan wilayah masih dalam kategori rendah hingga sedang.

Dari aspek Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS), rentang nilai berkisar antara 0,2725 hingga 0,5900. Nilai IKS terendah terdapat di Kelurahan Silaiang Bawah (0,2725), sementara nilai tertinggi ada di Kelurahan Sigando (0,5900). Tingginya nilai IKS di beberapa wilayah menunjukkan adanya tekanan tinggi terhadap keterpaparan bahaya dan sensitivitas yang tinggi dari kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat.

Berdasarkan hasil penghitungan kerentanan, sebagian besar kelurahan di Kota Padang Panjang, yaitu 13 dari 16 kelurahan (81%), masuk ke dalam kelas kerentanan 3 (cukup rentan). Sementara itu, hanya 3 kelurahan (19%) yang masuk dalam kategori kerentanan sangat rendah (kelas 1), yaitu Kelurahan Silaiang Bawah, Pasar Usang, dan Pasar Baru.

Pada aspek risiko banjir dan risiko kekeringan, pola yang serupa juga ditemukan. Sebagian besar kelurahan masuk ke dalam kategori cukup rentan (kelas 3) baik terhadap banjir maupun kekeringan. Hanya 3 kelurahan, yaitu Silaiang Bawah, Silaiang Atas, dan Pasar Usang, yang masuk kategori tidak rentan (kelas 1) untuk kedua jenis risiko tersebut.

Berdasarkan data dokumen Padang Panjang Dalam Angka, terkait rekapitulasi kejadian bencana di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11
Data Kejadian Bencana di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banjir	-	-	-	3	12
2	Gempa Bumi	-	-	-	-	-
3	Tanah Longsor	1	2	-	8	7
4	Jumlah	1	2	-	11	19

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Secara umum potensi banjir di Kota Padang Panjang tergolong rendah, namun di beberapa lokasi tertentu sering terjadi banjir. Adapun daerah yang sering terjadi banjir :

1. Kelurahan Balai-Balai
2. Kelurahan Pasar Baru
3. Kelurahan Pasar usang

Disamping potensi banjir tersebut, Kota Padang Panjang juga beresiko terhadap potensi banjir bandang. Banjir bandang biasanya terjadi akibat sempitnya alur di hulu sungai. Penyebab lainnya adalah hujan lebat. Di Kota Padang Panjang, terjadi banjir bandang pada Mei 2024. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh aliran dari Gunung Marapi dan aliran dari sekitar Gunung



Singgalang yang menyatu dan masuk ke Kota Padang Panjang. Dapat disimpulkan bahwa banjir bandang yang terjadi di Kota Padang Panjang bukan muncul dari Kota Padang Panjang sendiri, melainkan merupakan gabungan dari peristiwa yang terjadi di wilayah administrasi lain. Adapun daerah yang terdampak akibat kejadian tersebut adalah :

1. Kelurahan Pasar Usang
2. Kelurahan Silaing Atas
3. Kelurahan Silaing Bawah

Untuk mitigasi ancaman banjir bandang tersebut, saat ini Kota Padang Panjang hanya memiliki satu peringatan dini, yaitu peringatan dini untuk bencana banjir bandang dan lahar dingin. Sistem Kerja dari Peringatan Dini atau *early warning system* (EWS) tersebut adalah dengan memasang sensor pada hulu sungai yang bertempat di wilayah Tanah Datar yaitu itu Nagari Aia Angek untuk hulu Sungai dari Gunung Marapi dan di Nagari Pandai Sikek untuk hulu Sungai dari Gunung Singgalang. Alat sensor tersebut dapat mendeteksi curah hujan dan ketinggian air Sungai, juga dilengkapi dengan kamera 360 yang mana data tersebut dikirimkan ke server yang bertempat di Kantor BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang sehingga dapat di pantau selama 24 jam. Selanjutnya Sirene di pasang di daerah yang berpotensi terdampak Banjir Bandang dan Lahar Dingin yaitu di Kelurahan Silaing Atas, Kelurahan Silaing Bawah dan Kelurahan Pasar Usang. Jika pada alat terdeteksi adanya peningkatan curah hujan dan ketinggian air, maka anggota Pusdalops akan memencet tombol peringatan dini yang diteruskan ke Masyarakat melalui sirene.

Kota Padang Panjang dengan berbagai potensi bencana telah memiliki relawan kebencanaan di setiap kelurahan dan dilakukan pembinaan oleh BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang yang dinamakan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kelurahan. Pada Tahun 2024 terdata 160 anggota KSB Kelurahan, yang mana masing-masing kelurahan memiliki 10 orang Anggota KSB Kelurahan. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang adalah:

1. Melakukan Sosialisasi terkait kebencanaan seperti: Pentingnya Relawan Bencana, jenis bencana dan mitigasinya , daerah-daerah rawan bencana dan lainnya
2. Melakukan Pelatihan kebencanaan seperti: Komunikasi Radio, Survival, Pertolongan Pertama, manajemen posko dan lainnya
3. Perpanjangan tangan kegiatan kebencanaan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan pembinaan terhadap KSB Kelurahan dilakukan setiap tahun dengan harapan dari pembinaan yang dilakukan tersebut setiap kelurahan dapat melakukan penanggulangan bencana secara mandiri di daerahnya masing-



masing sehingga membentuk Kelurahan Tangguh Bencana. Selain KSB Kelurahan, di Kota Padang Panjang juga terdapat PMI, Tagana, Orari Potensi SAR dan organisasi kebencanaan lainnya.

2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain:

1. Pusat pelayanan kota meliputi:
 - a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
 - b. Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.
2. Sub pusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi:
 - a. Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
 - b. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
 - c. Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
 - d. Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
 - e. Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.
3. Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:
 - a. Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
 - b. Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
 - c. Pusat lingkungan di Kelurahan Ekor Lubuk;
 - d. Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
 - e. Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
 - f. Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
 - g. Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;



h. Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

Berdasarkan analisa RTRW Kota Padang Panjang, potensi pengembangan perkotaan di wilayah Kota Padang Panjang secara ideal tidak terlalu besar, hanya meliputi $\pm$ 31,09 persen dari luas wilayah Kota Padang Panjang (daya dukung tinggi dan sedang). Namun dengan adanya rekayasa teknologi bangunan dan infrastruktur, maka masalah keterbatasan daya dukung fisik ini bisa diatasi, sehingga potensi pengembangan perkotaan Kota Padang Panjang cukup besar.

Di tengah tekanan urban yang makin menguat dan keterbatasan ruang di kawasan pusat kota, Padang Panjang dihadapkan pada pilihan bertahan dengan kondisi yang ada atau berani mengambil langkah besar menjemput masa depan yang membuka berbagai peluang. Dari opsi tersebut maka lahirlah sebuah harapan besar: Pembangunan Kota Baru Padang Panjang di Tanah Erfpacht seluas 41 hektar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

1. Keterbatasan Lahan: Dilema Kota Kecil yang Tumbuh

Padang Panjang, dengan topografinya yang unik dan sejarahnya sebagai kota pendidikan dan spiritual, mengalami pertumbuhan kebutuhan lahan yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang tersedia. Kawasan pusat telah dipadati oleh infrastruktur pemerintahan, permukiman padat, fasilitas publik, serta pusat pendidikan lama. Kita semakin dihipit keterbatasan lahan. Pusat kota yang dulu lapang kini makin padat dengan harga tanah yang makin tinggi, keterbatasan ini memunculkan sejumlah persoalan:

- a) Kemacetan lokal dan kepadatan fungsi di kawasan pusat.
- b) Minimnya ruang terbuka hijau dan taman interaktif.
- c) Keterbatasan ruang ekspansi untuk kampus dan inovasi pendidikan.
- d) Peluang ekonomi yang stagnan di pusat kota akibat minimnya ruang tumbuh.

Dengan demikian, pembangunan kota baru menjadi kebutuhan struktural, bukan sekadar pilihan

Tanah Erfpacht dipilih bukan hanya karena lahannya tersedia, tetapi karena letaknya yang strategis sebagai perpanjangan alamiah dari kota inti. Lokasi ini memungkinkan konektivitas mudah ke pusat kota sekaligus memiliki ruang untuk merancang tatanan baru tanpa beban tata ruang lama. Sebagai kawasan seluas 41 hektar, Kota Baru ini akan dibangun dengan pendekatan mixed-use development yang saling melengkapi antara ruang publik, fasilitas pendidikan, sarana olahraga dan budaya, wisata agro, serta kawasan ekonomi baru.

2. Elemen-elemen Utama Kota Baru

- a) Taman dan Ruang Publik



Didesain sebagai paru-paru kota sekaligus ruang rekreasi dan kontemplasi. Taman ini akan menjadi simbol inklusivitas dan kemajuan peradaban—di mana semua warga, tanpa memandang latar belakang, bisa berkumpul, bermain, dan berdialog.

b) Alun-alun Kota Baru

Sebuah ikon kebanggaan, tempat perayaan budaya, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Di sinilah ruh kebersamaan dan identitas Minangkabau akan terus disemai di tengah modernitas.

c) Kampus dan Sekolah Inovatif

Mendorong kelahiran smart city education hub. Kampus dan sekolah baru akan dikembangkan dengan pendekatan ramah lingkungan, digitalisasi pembelajaran, dan koneksi dengan dunia industri serta wirausaha lokal. Ini akan memperkuat identitas Padang Panjang sebagai Kota Pelajar Serambi Mekah.

d) Sirkuit Motor dan Arena Sport Tourism

Sirkuit ini menjadi magnet baru bagi generasi muda. Tak hanya olahraga, tetapi juga ruang untuk event otomotif, festival, dan ekonomi kreatif. Potensi ekonomi dari sport tourism bisa berkembang pesat, termasuk sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM.

e) Gelanggang Pacuan Kuda

Merawat warisan budaya Minang yang telah diakui secara nasional, pacuan kuda akan dikemas dengan modernitas tanpa kehilangan nilai historis dan filosofi. Event-event rutin akan meningkatkan kunjungan wisata dan menghidupkan denyut ekonomi lokal.

f) Kebun Buah dan Agro Edupark

Kawasan ini akan menjadi pusat agro-edukatif untuk siswa, mahasiswa, dan wisatawan. Konsep wisata petik buah, pelatihan pertanian organik, serta pemasaran produk lokal akan membentuk ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan.

3. Tata Ruang dan Konsep Kota Berkelanjutan

Kota Baru ini akan dibangun dengan prinsip tata ruang adaptif dan ekologis:

a) Zonasi yang tertata

Memisahkan dan mengintegrasikan fungsi pendidikan, publik, ekonomi, dan residensial secara harmonis.

b) Infrastruktur hijau dan drainase ekologis

Menyesuaikan dengan kontur alami dan risiko bencana geologis di kawasan perbukitan.

c) Smart energy dan manajemen pengelolaan sampah

Energi terbarukan dan pengolahan sampah mandiri akan menjadi bagian dari sistem pengelolaan kota.



4. Dampak Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Ruang publik yang luas akan meningkatkan kohesi sosial, memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap kotanya, dan menyediakan ruang aman untuk perempuan, anak-anak, dan lansia. Dengan adanya gelanggang budaya, alun-alun, dan pusat kegiatan adat, Kota Baru tidak akan menjadi kota impersonal. Justru di sinilah napas budaya lokal disematkan dalam arsitektur dan aktivitas warganya. Sedangkan secara ekonomi kehadiran Kota Baru membuka peluang:

- a) UMKM kuliner dan souvenir lokal
- b) Investasi sektor pendidikan, hospitality, dan hiburan.
- c) Peluang lapangan kerja baru.
- d) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi.

5. Prospek Investasi dan Kolaborasi

Pemerintah kota dapat mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat realisasi pembangunan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Investor dapat diarahkan untuk membangun: Asrama dan kampus pendidikan, Hotel dan wahana wisata, pusat belanja lokal dan coworking space, restoran tematik dan kedai kreatif. Dengan branding kota baru yang kuat, investor tidak hanya membeli lahan, tapi ikut menjadi bagian dari sejarah perubahan wajah kota Padang Panjang.

Pembangunan Kota Baru Padang Panjang bukan tentang menambah bangunan, tapi membangun ruang hidup yang bermartabat, terencana, dan menjanjikan masa depan. Di tanah Erfach yang dahulu sunyi dan terabaikan, akan lahir harapan baru, anak-anak kota yang berlari di taman-taman yang hijau, mahasiswa yang berdiskusi di kampus modern, dan pedagang kecil yang tersenyum menjajakan dagangannya di tengah geliat ekonomi baru. Dari sini, Padang Panjang tak hanya bertahan sebagai kota kecil di jantung Sumatera barat, tapi tumbuh menjadi pusat budaya, pendidikan, dan wisata yang layak diperhitungkan di Indonesia

2.1.1.5 Aspek Demografi

Aspek demografi merupakan aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, karena demografi menggambarkan komposisi dan distribusi penduduk, yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupan baik kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka informasi tentang aspek demografi berperan penting dalam penentuan kebijakan.

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Kota Padang Panjang mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2019, jumlah penduduknya

mencapai 53.693 orang, lalu meningkat menjadi 56.311 orang pada Tahun 2020. Tren pertumbuhan terus berlanjut, dengan jumlah penduduk mencapai 56.971 orang pada Tahun 2021. Kenaikan tersebut berlanjut hingga Tahun 2022 dan 2023, di mana jumlah penduduk berturut-turut mencapai 57.850 orang dan 58.627 orang. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Padang Panjang meningkat menjadi 59.453 orang, menunjukkan pertumbuhan yang terus berlanjut. Peningkatan angka penduduk ini mencerminkan dinamika perkembangan Kota Padang Panjang yang terus berkembang, dengan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang Timur		Padang Panjang Barat		Padang Panjang
	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk (Orang)
2020	24.151	42,89%	32.160	57,11%	56.311
2021	24.527	43,05%	32.444	56,95%	56.971
2022	25.000	43,22%	32.850	56,78%	57.850
2023	25.432	43,65%	33.195	56,97%	58.627
2024	25.888	43,54%	33.565	56,46%	59.453
Rata-rata		43,27%		56,85%	

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Kota Padang Panjang memiliki dua kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur, dengan rata-rata persentase jumlah penduduk di Padang Panjang Barat mencapai 56,85%, sedangkan di Padang Panjang Timur hanya 43,27%. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Padang Panjang Timur. Hal ini dapat dilihat dari tabel kepadatan penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2024 berikut:

Tabel 2.13
Kepadatan Penduduk di Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Orang)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (Orang/km ²)
Padang Panjang Timur	25.888	13,25	1.953
Padang Panjang Barat	33.565	9,75	3.442
Padang Panjang	59.453	23,56	2.584

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025



Namun, meskipun jumlah penduduk di Kecamatan Padang Panjang Barat lebih banyak, luas wilayahnya lebih kecil dibandingkan Kecamatan Padang Panjang Timur. Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Padang Panjang Timur mencapai 25.888 orang, dengan luas wilayah 13,25 km², menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 1.953 orang/km². Sementara itu, di Padang Panjang Barat, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 33.565 orang, dengan luas wilayah 9,75 km², menghasilkan kepadatan penduduk yang lebih tinggi, yaitu 3.442 orang/km². Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 59.453 orang, dengan total luas wilayah 23,56 km², yang menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 2.584 orang/km².

Ketimpangan terhadap kepadatan penduduk antara Kecamatan Padang Panjang Timur dengan Kecamatan Padang Panjang Barat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Pola Permukiman

Terdapat dua pola permukiman di Kota Padang Panjang yaitu membentuk pola yang mengikuti jalan (*linear*) dan pola meloncat (*nodal*) (Dewi, Y., & Chandra, D., 2025). Kombinasi dari kedua pola ini mencerminkan dinamika kompleks dalam perkembangan permukiman Kota Padang Panjang. Pola permukiman mengikuti jalan mencerminkan struktur fisik yang terikat dengan transportasi dan aksesibilitas, sementara pola meloncat mencerminkan keberadaan pusat-pusat kegiatan yang menjadi pusat pertumbuhan dan aktivitas.

2. Konsentrasi pusat kegiatan ekonomi

Kecamatan Padang Panjang Barat lebih padat karena ditunjang oleh faktor pendorong berupa konsentrasi pusat kegiatan ekonomi seperti Pasar Pusat Bukit Surungan, Terminal Bukit Surungan, dan keberadaan jalur Lintas Sumatra yang meningkatkan aksesibilitas serta daya tarik wilayah bagi aktivitas perdagangan, jasa, dan permukiman. Sebaliknya, Kecamatan Padang Panjang Timur cenderung kurang padat karena didominasi faktor penghambat berupa kondisi topografi curam dan bergelombang yang menimbulkan keterbatasan fisik untuk pengembangan permukiman, risiko bencana longsor, serta biaya pembangunan aksesibilitas yang lebih tinggi

3. Infrastruktur Layanan Perkotaan

Distribusi fasilitas publik dan layanan perkotaan yang lebih terpusat di Kecamatan Padang Panjang Barat dapat menjadi faktor yang memperkuat ketimpangan distribusi penduduk. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Timur dominan penggunaan lahan untuk lahan Pertanian

Berdasarkan dari 3 faktor di atas maka dapat disimpulkan bahwa, ketimpangan tingkat kepadatan penduduk antara Padang Panjang Barat dengan Padang Panjang Timur terjadi secara alami dan sudah sesuai dengan kondisi alam Kota Padang Panjang

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat tinggi di angka 4,88, yang mencerminkan pertumbuhan penduduk yang pesat pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan tajam dengan angka laju pertumbuhan hanya 1,17, menandakan adanya penurunan yang signifikan. Setelah itu, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2022 dan 2023, dengan angka berturut-turut 1,54 dan 1,34, namun tetap berada pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk sedikit meningkat menjadi 1,48, menunjukkan adanya pemulihan, meskipun masih belum kembali ke tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti pada tahun 2020.

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

C. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk di Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), mencapai 40.010 orang atau sekitar 67,31% dari total penduduk kota. Keadaan ini menciptakan potensi bonus demografi yang signifikan, yang bisa menjadi kekuatan utama dalam upaya pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan cara ini, penduduk usia produktif tidak hanya akan menjadi jumlah yang besar, tetapi juga produktif dan memiliki kualitas yang unggul. Strategi investasi dalam pendidikan yang baik dan akses kesehatan yang merata akan memastikan bahwa bonus demografi ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan kota, baik dari segi ekonomi



maupun kesejahteraan masyarakatnya. Kolaborasi antar stakeholder dan perencanaan kebijakan yang cermat menjadi kunci untuk mengelola dengan efektif bonus demografi ini agar Kota Padang Panjang dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total	Total per Kelompok	Proporsi	Dependency Ratio	Ket.
	Laki-laki	Perempuan					
0-4	3.010	2.880	5.890	15.580	26,21%	38,94%	Penduduk Muda
5-9	2.520	2.480	5.000				
10-14	2.440	2.250	4.690				
15-19	2.590	2.370	4.950				
20-24	2.510	2.350	4.860	40.410	67,31%	-	Usia Produktif
25-29	2.470	2.520	5.000				
30-34	2.380	2.450	4.830				
35-39	2.250	2.130	4.380				
40-44	2.010	1.940	3.940				
45-49	1.910	1.760	3.660				
50-54	1.630	1.630	3.250				
55-59	1.410	1.440	2.850				
60-64	1.120	1.170	2.290				
65-70	780	880	1.650				
70-74	480	670	1.150	3.850	6,48%	9,62%	Penduduk Tua
75+	370	680	1.050				
Total	29880	29.600	59.440	58.627	100%	48,56%	

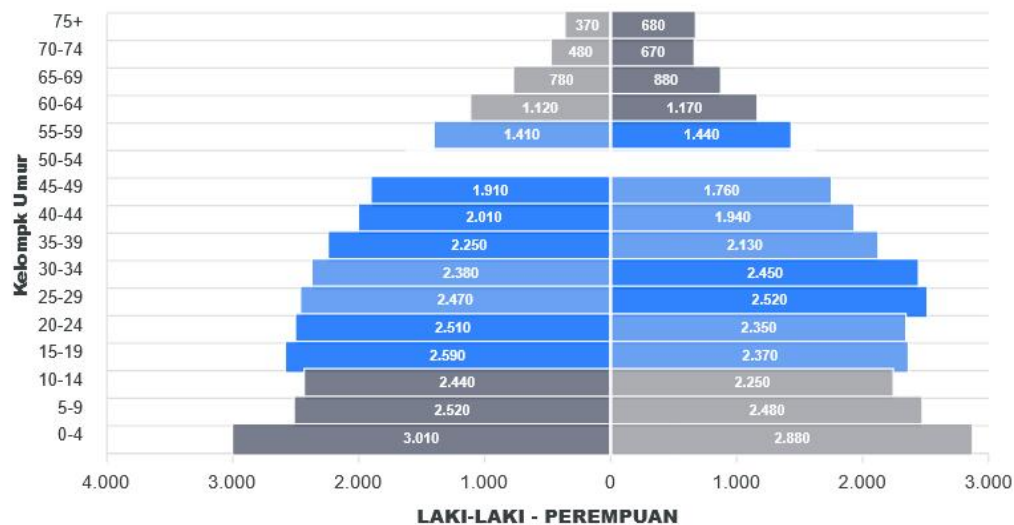
Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Rasio ketergantungan penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mencapai 48,56%. Artinya, dalam setiap 100 penduduk usia produktif, terdapat sekitar 49 orang penduduk dengan usia non-produktif yang menjadi tanggung jawab mereka. Rasio ini terdiri dari ketergantungan penduduk muda sebesar 38,94% dan ketergantungan penduduk tua sebesar 9,62%. Fakta ini menunjukkan bahwa beban tanggung jawab terhadap penduduk muda jauh lebih besar dibandingkan dengan tanggung jawab terhadap penduduk tua di Kota Padang Panjang. Adanya rasio ketergantungan yang tinggi terhadap penduduk muda mengindikasikan adanya potensi beban pada sistem pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan untuk fokus pada pembangunan keterampilan dan lapangan kerja bagi generasi muda. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu merancang kebijakan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan penduduk muda.

Meskipun demikian, perhatian juga perlu diberikan pada ketergantungan terhadap penduduk tua, dan kebijakan kesejahteraan sosial dan kesehatan yang memadai perlu diimplementasikan untuk mendukung kelompok ini. Pemahaman dan manajemen yang seimbang antara kedua kelompok ini akan menjadi kunci

untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Padang Panjang. Komposisi penduduk juga dapat diamati melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Padang Panjang pada Tahun 2024 mencerminkan karakteristik ekspansif, menandakan bahwa mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia muda. Piramida penduduk digunakan untuk memvisualisasikan distribusi usia dan jenis kelamin dalam populasi suatu wilayah, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2024



Sumber: <https://siperindu.online>, 2025

Proporsi penduduk di kelompok usia muda (0-14 tahun) terlihat lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia tua (65 tahun ke atas). Karakteristik ini dapat diartikan sebagai bonus demografi yang menunjukkan potensi pembangunan ekonomi dan sosial. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sebagai bukti, *sex ratio* penduduk di kota Padang Panjang pada Tahun 2024 adalah 101,00, yang berarti setiap 101 orang penduduk laki-laki berbanding lurus dengan 100 orang jumlah penduduk perempuan, menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.15
Sex Ratio Per Kecamatan Kota Padang Panjang Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
Padang Panjang Timur	13.171	12.717	25.888	103,57
Padang Panjang Barat	16.704	16.861	33.565	99,07
Padang Panjang	29.875	29.578	59.453	101,00

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025



Selain kelompok usia dan jenis kelamin, komposisi penduduk juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan. Menurut tingkat pendidikan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh lulusan SMA ke atas, mencapai 66,40% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, masyarakat Kota Padang Panjang didominasi oleh sektor Jasa, mencapai 22,197 orang. Informasi lebih rinci dapat ditemukan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk Kota Padang Panjang Menurut Pendidikan yang Damatkan Tahun 2024

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak Mempunyai Ijazah	3,41%	4,29%	3,86%
2	SD/Sederajat	10,64%	10,58%	10,61%
3	SLTP/Sederajat	21,38%	16,86%	19,09%
4	SMA Ke Atas	64,56%	68,26%	66,4%
Jumlah		100%	100%	100%

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian	1,425	511	1.936
2	Manufaktur	1,435	1,203	2.638
3	Jasa-jasa	12,796	9,401	22.197
Jumlah		15.656	11,115	26,771

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 4,52%, sedikit menurun sebesar 0,32 poin dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%.

Jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih baik daripada rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang hanya mencapai 4,36%,



dengan selisih sebesar 0,16 poin. Namun, jika dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,03%, angka pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang masih lebih rendah sebesar 0,51 poin.

Dalam peringkat kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang menempati posisi ke-5 tertinggi di provinsi, sejajar dengan Kota Bukittinggi yang juga memiliki angka pertumbuhan sebesar 4,52%.

Tabel 2.18
Perbandingan LPE Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang	Sumatera Barat	Nasional
2020	-1,44	-1,61	-2,07
2021	3,46	3,29	3,7
2022	4,39	4,36	5,31
2023	4,84	4,62	5,05
2024	4,52	4,36	5,03

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Turunnya LPE Kota Padang Panjang tahun 2024 ini antara lain disebabkan karena terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup.

PDRB ADHK Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 3.009,93 miliar rupiah, naik dari 2.879,85 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,19%, naik dari tahun 2023 yang sebesar 1,91%. Sedangkan pertumbuhan terendah yakni pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 0,15%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 1,87%.

Pada tahun 2024, mayoritas pertumbuhan lapangan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, akan tetapi terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kenaikan seperti lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik dari 6,52% pada tahun 2023 menjadi 7,45% di tahun 2024. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,29	4,87	5,43	1,87	0,15
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,64	2,23	2,20	4,47	2,57
C	Industri Pengolahan	-2,41	2,44	2,40	4,79	2,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,85	2,84	2,93	3,53	3,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,36	4,43	4,24	2,33	4,05
F	Konstruksi	-3,25	1,02	2,45	6,43	4,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,01	3,20	5,28	4,29	3,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-11,12	4,19	3,19	5,62	3,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-12,04	7,38	10,47	6,52	7,45
J	Informasi dan Komunikasi	8,33	5,42	6,53	7,51	5,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97	8,72	4,52	3,57	6,81
L	Real Estat	0,11	2,17	5,42	6,16	5,80
M, N	Jasa Perusahaan	-4,45	1,05	6,30	6,64	4,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,72	0,73	-1,05	1,91	8,19
P	Jasa Pendidikan	5,91	1,51	5,21	1,73	2,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,14	5,22	4,43	7,42	4,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	-9,66	6,80	11,02	8,13	7,91
Produk Domestik Regional Bruto		-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Struktur ekonomi Kota Padang Panjang dapat dilihat dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang menunjukkan lapangan usaha atau sektor perekonomian yang berperan besar dalam perekonomian Kota Padang Panjang.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB Kota Padang Panjang adalah sebesar 4.756,96 miliar rupiah, naik dari tahun 2023 yang sebesar 4.474,08 miliar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki share atau distribusi terbesar pada tahun 2024 dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,28%; Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,77%; Informasi dan Komunikasi sebesar 9,88%; Konstruksi sebesar 9,58%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 9,52%, dan Jasa Pendidikan dengan kontribusi sebesar 9,52%.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, keenam lapangan usaha tersebut selalu mendominasi perekonomian Kota Padang Panjang, meskipun lapangan usaha Konstruksi mengalami sedikit penurunan dari 9,67% pada tahun 2023 menjadi 9,58% di tahun 2024. Lapangan usaha Transportasi dan Komunikasi juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 12,20% menjadi 11,77% di tahun 2024. Kontribusi lapangan usaha Jasa Pendidikan juga mengalami penurunan dari 9,59% pada tahun 2023 menjadi



9,52% di tahun 2024. Distribusi dari masing-masing lapangan usaha yang membentuk struktur perekonomian Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Distribusi PDRB ADHB Kota Padang Panjang Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,15	5,12	5,14	5,08	4,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,27	0,26	0,26	0,25
C	Industri Pengolahan	8,43	8,48	8,31	8,34	8,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
F	Konstruksi	9,83	9,62	9,51	9,67	9,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,96	17,51	18,15	18,15	18,28
H	Transportasi dan Pergudangan	11,77	11,82	11,94	12,20	11,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,64	2,75	2,82	2,82	2,89
J	Informasi dan Komunikasi	9,52	9,65	9,78	9,88	9,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,15	4,46	4,42	4,26	4,31
L	Real Estat	3,59	3,53	3,50	3,61	3,65
M, N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,09	10,28	9,60	9,29	9,52
P	Jasa Pendidikan	10,14	9,89	9,89	9,59	9,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54	1,59	1,55	1,59	1,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,51	4,65	4,76	4,91	5,10
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

B. Inflasi

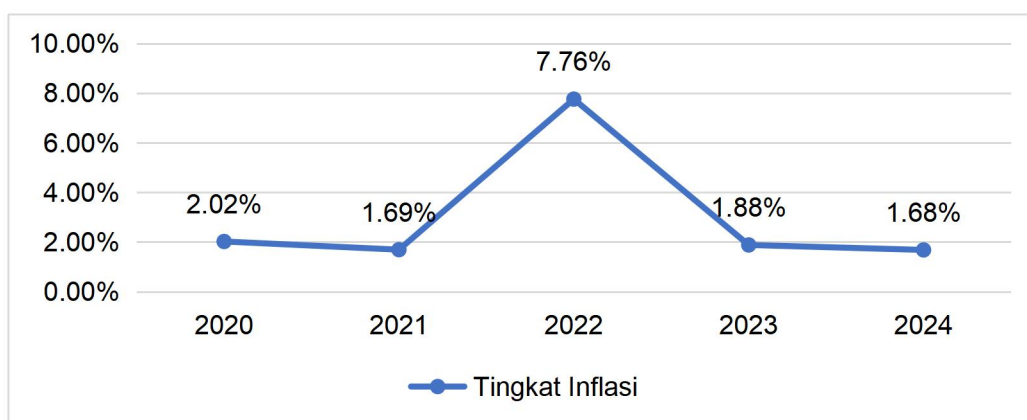
Dinamika inflasi di Kota Padang Panjang tidak terlepas dari interaksi ekonomi regional dengan wilayah sekitarnya, termasuk ketergantungan pasokan komoditas pangan dan jasa logistik dari pusat distribusi terdekat. Sebagai kota yang mengandalkan sektor pariwisata budaya dan pendidikan, fluktuasi harga kerap dipengaruhi oleh permintaan musiman—seperti lonjakan harga akomodasi dan kuliner selama festival budaya atau periode liburan—serta kebutuhan pokok harian yang stabil akibat populasi pelajar dan mahasiswa.

Keterkaitan dengan rantai pasok regional menjadikan tekanan inflasi di wilayah tetangga, seperti kenaikan harga bahan pokok atau tarif transportasi, turut berdampak pada stabilitas harga di Padang Panjang. Tantangan utama terletak pada kerentanan kelompok berpenghasilan tetap, seperti tenaga pendidik, pegawai negeri, dan pekerja informal, yang pengeluarannya didominasi kebutuhan dasar. Kenaikan harga pangan atau energi, meskipun moderat, dapat mengurangi daya beli kelompok ini secara signifikan, terutama di tengah ketiadaan mekanisme penyesuaian pendapatan yang responsif.

Untuk memitigasi risiko ini, penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian skala kecil di sekitar kota, diversifikasi sumber pasokan energi terbarukan, dan koordinasi kebijakan harga dengan wilayah penyangga menjadi langkah strategis. Dengan pendekatan ini, stabilitas harga tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi tulang punggung aktivitas harian kota.

Tingkat inflasi Kota Padang Panjang dari tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 7,76%, dan terendah pada tahun 2024 sebesar 1,68%. Perkembangan tingkat inflasi Kota Padang Panjang yang mengacu kepada Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

C. PDRB per Kapita

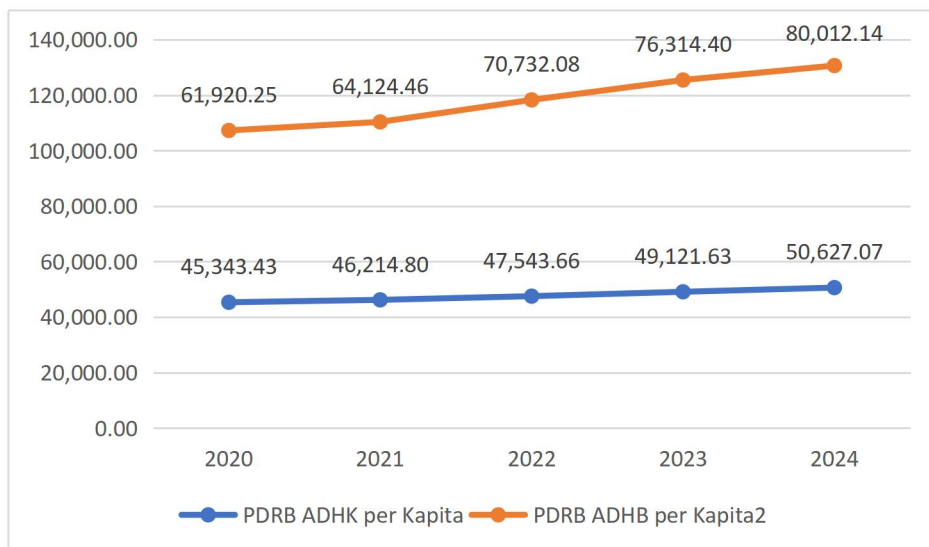


PDRB per Kapita menunjukkan rata-rata pendapatan per orang di suatu wilayah, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, yang digunakan untuk membantu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah.

PDRB per Kapita dihitung dengan menggunakan dua metode, yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas dasar Harga Berlaku (ADHB). Pada tahun 2024, PDRB ADHK per Kapita Kota Padang Panjang mencapai Rp.50,62 juta dan PDRB ADHB per Kapita mencapai Rp.80,01 juta.

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB ADHK per Kapita naik dari Rp.45,34 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.50,62 juta di tahun 2024, atau naik sebesar Rp.5,28 juta. PDRB ADHB per Kapita juga mengalami kenaikan dari Rp.61,92 juta di tahun 2020 menjadi Rp.80,01 juta di tahun 2024 atau naik sebesar Rp.18,01 juta. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

PDRB per Kapita Kota Padang Panjang tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat, dimana PDRB ADHK per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.34,16 juta dan PDRB ADHB per Kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.57,04 juta.

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat, PDRB ADHK per kapita Kota Padang Panjang Tahun 2024 berada pada posisi ke-3 setelah Kota Bukittinggi dan Kota Padang, sedangkan PDRB ADHB per



Kapita juga berada pada posisi ke-3 setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Data perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perbandingan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Padang Panjang		Sumatera Barat	
	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita	PDRB ADHK per Kapita	PDRB ADHB per Kapita
2020	45.343,43	61.920,25	30.696,21	43.825,66
2021	46.214,80	64.124,46	31.264,98	45.218,16
2022	47.543,66	70.732,08	32.166,76	50.263,83
2023	49.121,63	76.314,40	33.188,07	54.326,60
2024	50.627,07	80.012,14	34.167,59	57.047,21

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

Tabel 2.3
PDRB ADHK per Kapita dan PDRB ADHB per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Data Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	
	Harga Konstan	Harga Berlaku
Kab. Kep. Mentawai	67,335.09	67,335.09
Kab. Pesisir Selatan	35,994.91	35,994.91
Kab. Solok	44,811.95	44,811.95
Kab. Sijunjung	50,608.60	50,608.60
Kab. Tanah datar	45,066.39	45,066.39
Kab. Padang Pariaman	58,385.81	58,385.81
Kab. Agam	50,019.19	50,019.19
Kab. Lima Puluh Kota	51,985.41	51,985.41
Kab. Pasaman	38,245.84	38,245.84
Kab. Solok Selatan	38,905.35	38,905.35
Kab. Dharmasraya	58,713.54	58,713.54
Kab. Pasaman Barat	46,258.89	46,258.89
Kota Padang	88,225.31	88,225.31
Kota Solok	69,987.76	69,987.76



Kota Sawahlunto	73,597.61	73,597.61
Kota Padang Panjang	80,012.14	80,012.14
Kota Bukittinggi	93,968.08	93,968.08
Kota Payakumbuh	64,205.93	64,205.93
Kota Pariaman	69,169.90	69,169.90
Jumlah	56,915.13	56,915.13
Provinsi Sumatera Barat	57,047.21	57,047.21

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

D. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mencapai 5,31 persen, naik sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada tahun 2023. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama 5 tahun 2020-20234 menunjukkan tren yang fluktuatif, dan cenderung naik pada 2 tahun terakhir, dari 5,14% di tahun 2022, naik menjadi 5,24% di tahun 2023 dan kembali naik menjadi 5,31% di tahun 2024. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang cenderung naik dalam 2 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang tahun 2024 tetap lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan nasional, yang masing-masing tercatat sebesar 5,97% dan 8,57%. Dapat dilihat pada tabel berikut :

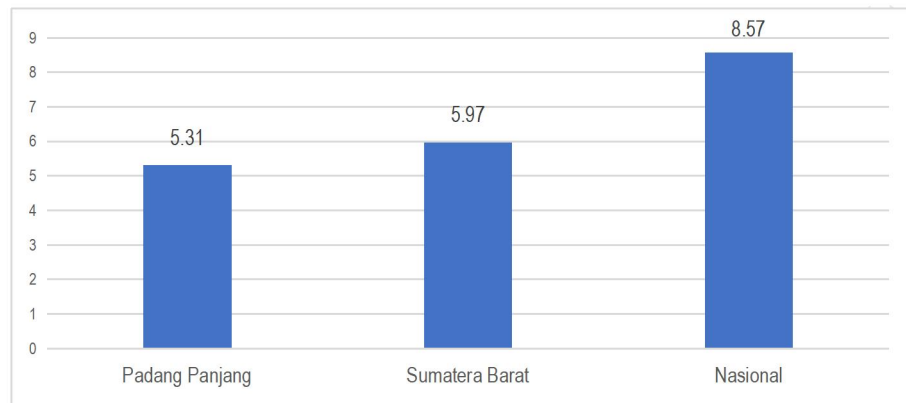
Tabel 2.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin	2.840	3.280	2.890	2.990	3.060
Tingkat Kemiskinan	5,24	5,92	5,14	5,24	5,31

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

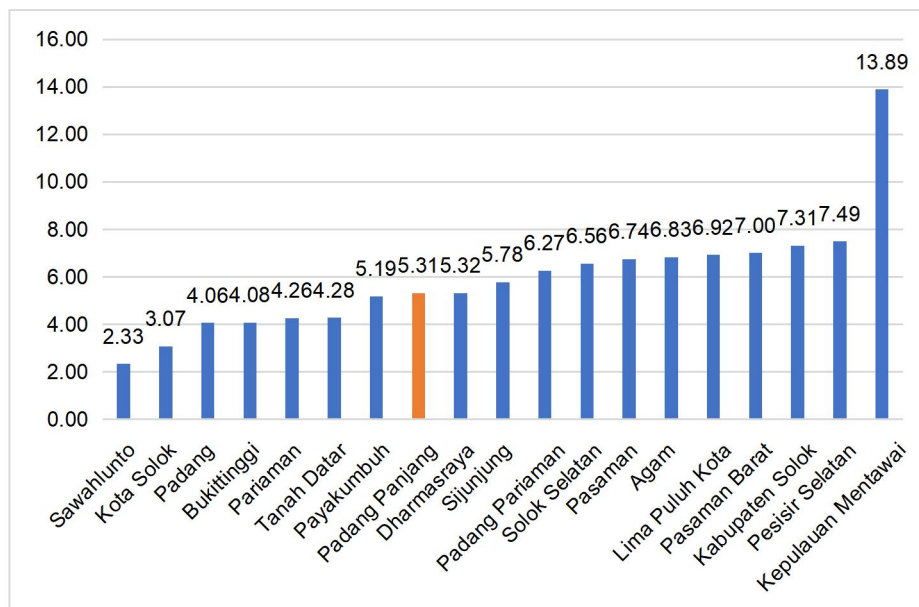
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang berada di tengah-tengah, yaitu lebih rendah dibandingkan 11 daerah, akan tetapi belum mencapai tingkat kemiskinan serendah tujuh daerah lainnya.

Gambar 2.3
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang, Provinsi
Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Gambar 2.4
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Kenaikan tingkat kemiskinan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang. Trend penduduk miskin ini dalam kurun waktu 2020-2024 fluktuatif, dan dalam 2 tahun terakhir, 2023-2024, menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Padang Panjang berjumlah 2.840 orang, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin telah mencapai 3.060 orang.

E. Indeks Gini

Gini Ratio atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, dengan kisaran nilai



antara 0-1, dimana nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi atau porsi pendapatan terbesar hanya didominasi oleh sekelompok kecil orang saja, dan Rasio Gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,266, turun sebesar 0,007 poin dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 0,273. Sejak tahun 2020, tren Indeks Gini Kota Padang Panjang terus menunjukkan penurunan, yang menandakan adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan di kota ini. Penurunan Indeks Gini mencerminkan semakin berkurangnya ketimpangan pendapatan, yang merupakan indikator positif dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, pada tahun 2024 Indeks Gini Kota Padang Panjang menempati peringkat ke-12 terendah dengan nilai 0,266. Kota ini berada di bawah beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kota Payakumbuh, dan Kota Padang. Namun, jika dibandingkan secara khusus dengan kota-kota lainnya, Padang Panjang menjadi kota dengan Indeks Gini terendah di Sumatera Barat, menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang paling kecil di antara kota-kota lain di provinsi ini.

Selain itu, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2024 lebih rendah 0,017 poin dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang tercatat sebesar 0,283. Kota ini juga menunjukkan ketimpangan pendapatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, yang berada di angka 0,381—lebih rendah sebesar 0,115 poin. Data ini menegaskan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Padang Panjang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di daerah ini. Data perbandingan indeks gini Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah:

Tabel 2.5
Perkembangan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

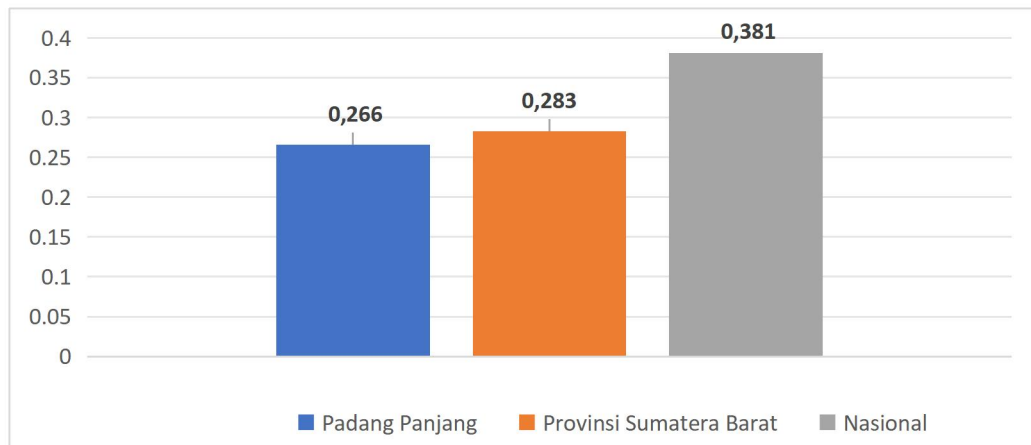
Tahun	Padang Panjang	Provinsi Sumatera Barat
2020	0.394	0.305
2021	0.306	0.306



2022	0.296	0.300
2023	0.273	0.280
2024	0.266	0.283

Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025, diolah

Gambar 2.5
Perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



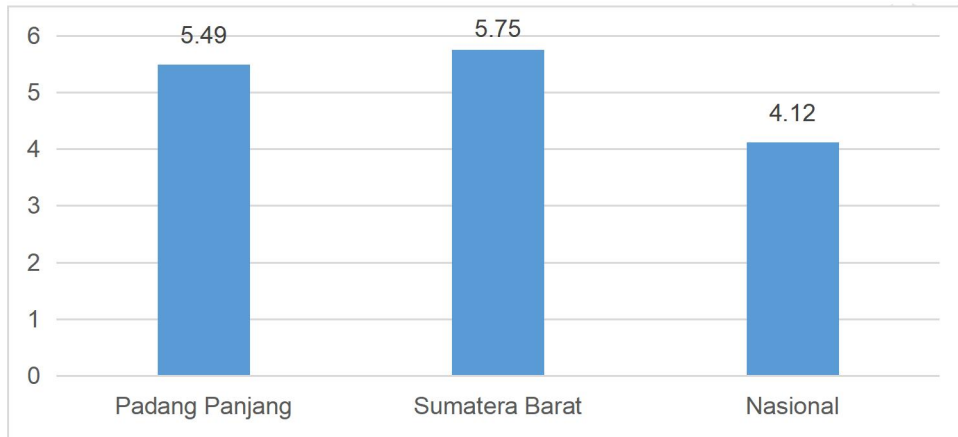
Sumber Data: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025, diolah

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasa disebut tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang adalah sebesar 4,94%, turun sebesar 0,55 poin dari tahun 2023 yang berjumlah 5,49%. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, angka ini lebih baik sebesar 0,45 poin, meskipun masih belum sebaik capaian nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut ini:

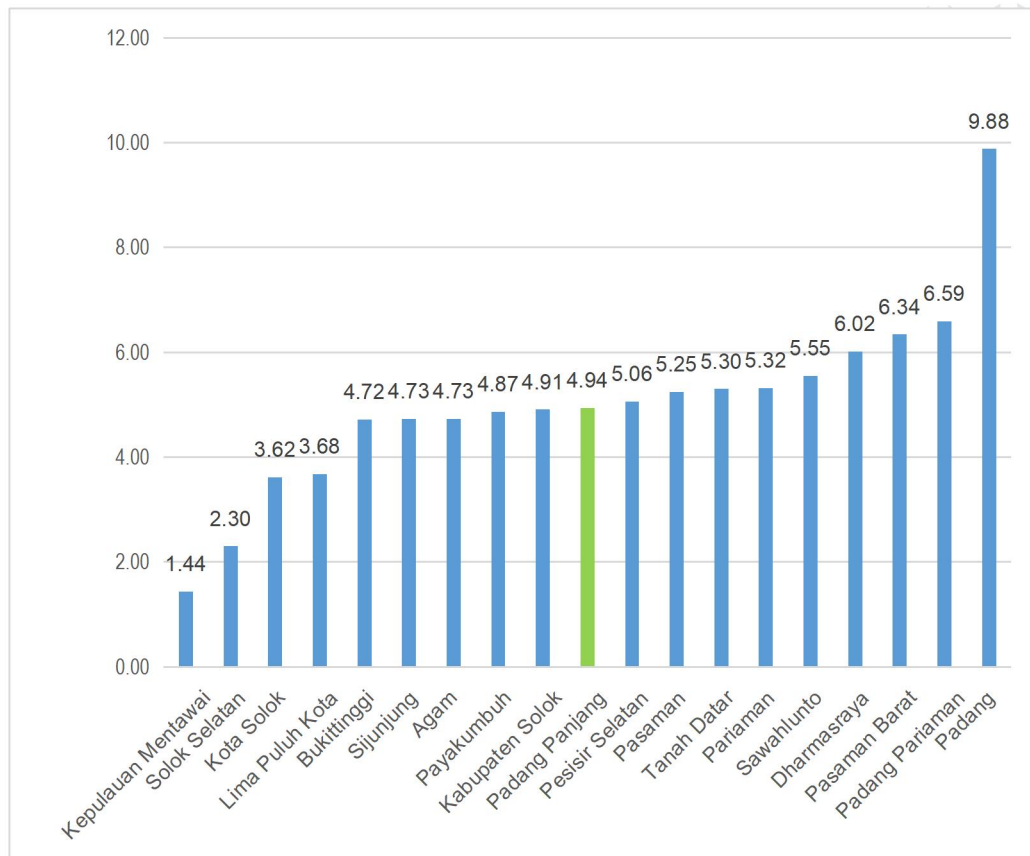
Gambar 2.10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Padang Panjang tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Namun, angka ini belum sebaik beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Bukittinggi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Solok.

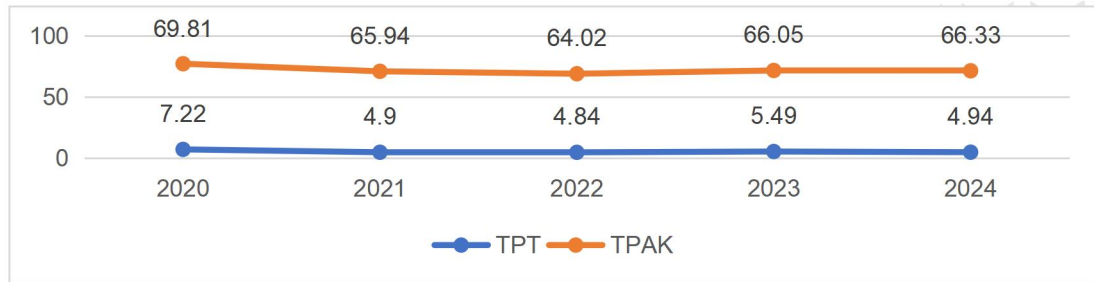
Gambar 2.11
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang Panjang dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, setelah sempat turun 7, 22% pada tahun 2020 menjadi 4,84% pada tahun 2022, tingkat pengangguran ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 5,49% di tahun 2023 dan kembali turun menjadi 4,94% di tahun 2024. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Kota Padang Panjang sempat turun dari 69,81% di tahun 2020 menjadi 64,02% di tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing 66,05% dan 66,33%.

Gambar 2.12
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

2.1.2.2 Fokus kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara material, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu hidup layak dan berkembang. Untuk mencapainya secara berkelanjutan, terdapat beberapa faktor utama yang saling mendukung:

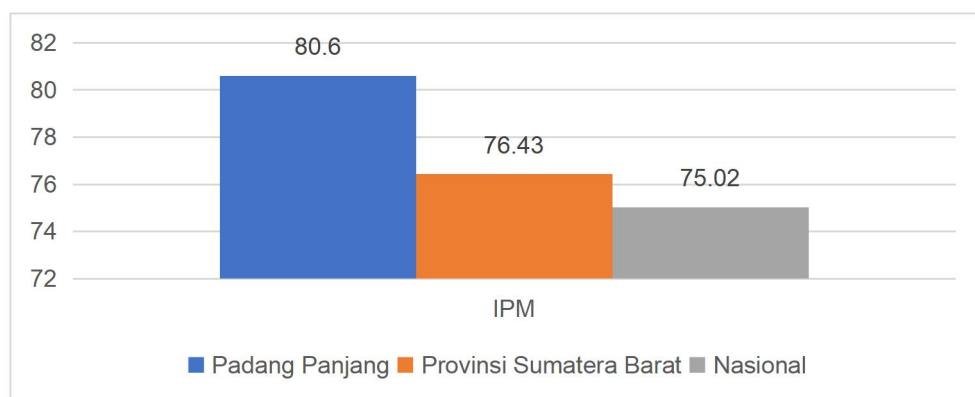
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah, dengan mempertimbangkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 80,60, naik sebesar 1,34 poin dari tahun 2023 yang berada pada angka 79,26. IPM Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini berada diatas IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 76,43 dan juga diatas IPM nasional yang sebesar 75,02. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat, maka capaian IPM Kota Padang tahun 2024 ini berada pada peringkat ke-4 tertinggi setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.

Gambar 2.13

Perbandingan IPM Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

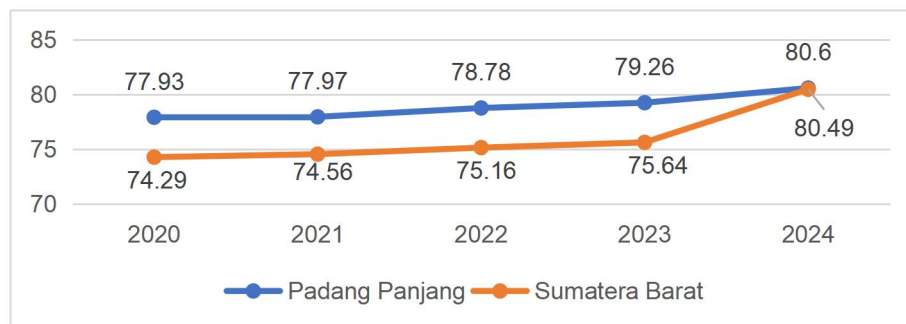




Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan tren yang terus meningkat, terlihat dari IPM tahun 2020 sebesar 77,93 kemudian naik menjadi 80,60 pada tahun 2024.

Gambar 2.14
Perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

B. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat. Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2020-2024 diukur melalui angka Usia harapan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan UHH Kota Padang Panjang. Jika dibandingkan dengan UHH pada Provinsi Sumatera Barat, maka UHH Kota Padang Panjang lebih tinggi, dimana pada tahun 2024 UHH kota Padang Panjang sebesar 74,48 tahun sedangkan Provinsi Sumatera Barat dengan 74,14 tahun.

Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Kota Padang Panjang. Pencapaian indikator ini dapat diwujudkan dengan berbagai strategi dan pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan urusan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pendekatan pemahaman terhadap 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom yaitu mulai dari gaya hidup, keturunan, lingkungan serta sistem pelayanan kesehatan menjadi pemahaman awal agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian UHH sebagai indikator derajat kesehatan masyarakat.

Di samping itu, dalam rangka pencapaian UHH, 4 (empat) faktor tersebut diatas diintegrasikan melalui pendekatan pemahaman terhadap indikator yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi agar dapat mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan sebagai upaya penurunan angka kematian dan angka kesakitan serta upaya meningkatkan



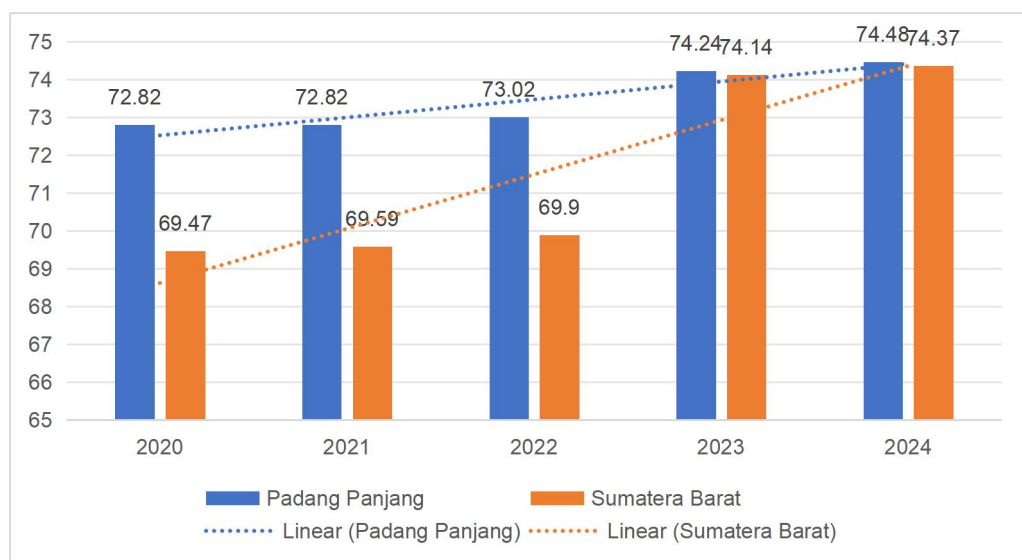
status gizi masyarakat. Perkembangan UHH di Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2.21
Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	72,82	72,82	73,02	73,23	74,48

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Gambar 2.15
Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat, 2020-2024



Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

C. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda nawacita, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadikan Puskesmas sebagai pelopor pelaksanaan dengan mengedepankan pendekatan keluarga. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, sasaran, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) juga menekankan esensi fungsi Puskesmas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dalam upaya promotif dan preventif.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kategori IKS terdiri dari:

- Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800;



- b. Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800;
- c. Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500

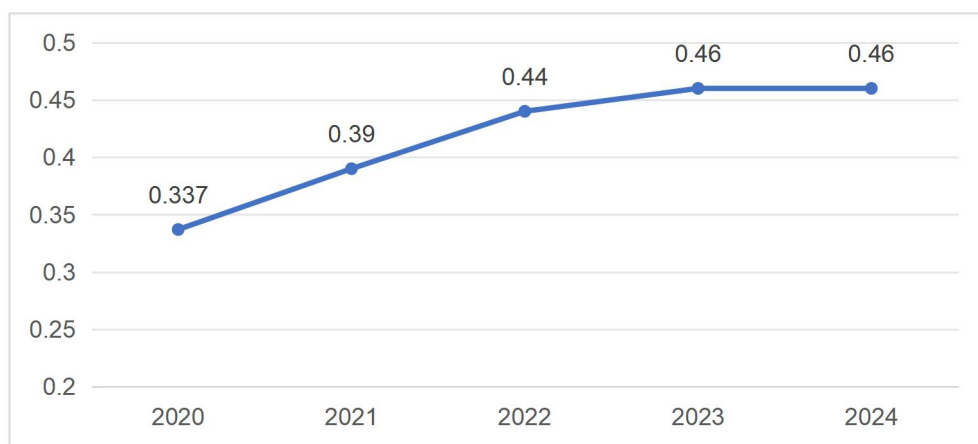
Perkembangan capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.22
Capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Padang Panjang Tahun 2020–2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat (indeks)	0,337	0,39	0,44	0,46	0,46

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, Tahun 2025

Gambar 2.16
Perkembangan Capaian IKS Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa IKS Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 0,33 indeks dan pada tahun 2024 yaitu 0,46 indeks, meskipun demikian apabila dilihat dari kategori IKS maka IKS Kota Pada Padang Panjang masih kecil dari 5,00, sehingga secara kategori masih berada pada indeks keluarga tidak sehat. Sehingga masih membutuhkan Upaya intensif dalam peningkatan indeks keluarga sehat.

D. Prevalensi Stunting

Gizi kurang masih menjadi permasalahan di Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang. Kelompok gizi kurang di antaranya adalah stunting. Prevalensi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Di Kota Padang Panjang persentase stunting dalam kurun waktu 5 (lima) tahun



terakhir cenderung menurun. Dimana terjadi penurunan balita stunting sampai tahun 2023 sampai dengan 14,09 persen. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu 19 persen. Oleh sebab itu masih dibutuhkan berbagai upaya percepatan terutama dalam meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang anak ke fasilitas kesehatan. Perkembangan stunting dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Prevalensi Stunting Kota Padang Panjang Tahun 2020–2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020*	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting (%)	17,03	20	16,8	14,09	19

Sumber: SSGI, 2025

Ket : * menggunakan perhitungan pemodelan prediktif statistik dengan metode Small Area Estimation (SAE) Lag

E. Penyakit Tuberkulosis

CNR (Case Notification Rate) adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru tuberkulosis yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk. Berikut gambaran perkembangan kasus TB di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.6
Case Notification Rate (CNR) Penyakit Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
CNR	163,36	275,28	339,13	482	429
Kasus	113	189	205	125	255

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

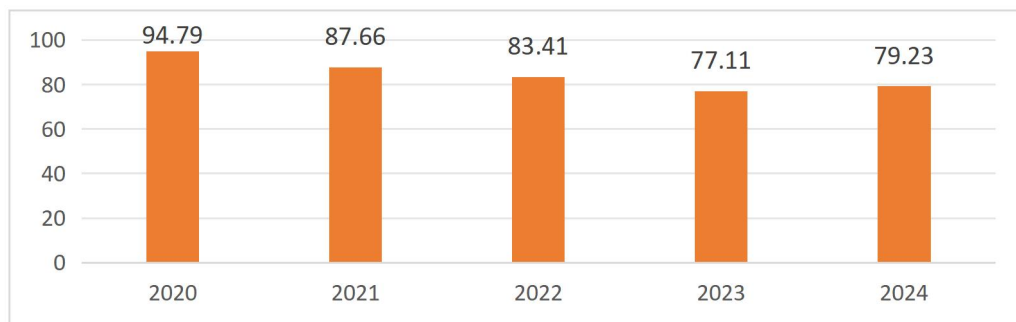
Merujuk pada tabel di atas, pada tahun 2020, CNR Kota Padang Panjang pada angka 163,36. Pada tahun 2021 dengan angka 275,28, tahun 2022 dengan angka 339,13 dan tahun 2023 dengan capaian 482 dan pada tahun 2024 terjadi penurunan yaitu 429. Secara keseluruhan, CNR mengalami tren peningkatan yang signifikan antara tahun 2020 hingga 2023, namun mulai menunjukkan penurunan pada tahun 2024, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pada tahun 2022.

Capaian ini mengindikasikan sudah terjadi peningkatan kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.

F. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Capaian pada Tahun 2020 adalah 85,5%, Capaian tahun 2021 (94,79%), pada Tahun 2022 (87,66%) pada Tahun 2023 (83,41%) dan pada Tahun 2024 (79,23%) seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2.6
Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Indikator turunan dari angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis adalah lengkap dan sembuh, artinya penanganan tuberkulosis wajib lengkap fase atau tahap berobat dan dinyatakan sembuh. Ada beberapa hal yang menyebabkan turunnya angka capaian ini, diantaranya:

1. Lose to Follow-Up

Pada umumnya penurunan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis disebabkan oleh kejadian putus obat (Lose to Follow Up) Lose Follow-up merupakan kejadian dimana pasien telah melakukan proses berobat tetapi tidak tuntas. Kondisi ini terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2021 terdapat 2 kasus, tahun 2022 terdapat 9 kasus, tahun 2023 terdapat 23 kasus dan tahun 2024 meningkat menjadi 41 kasus lose to Follow Up.

Hal ini biasanya terjadi pada bulan kedua dari fase berobat, yang disebabkan adanya gejala yang dirasakan seperti reaksi obat yang membuat pasien tidak datang lagi untuk berobat. Kasus lainnya ketika pasien yang berobat pada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tidak lagi datang ke rumah sakit, akan tetapi melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan yang lain dengan pengobatan batuk biasa.

2. Kepatuhan Pasien dalam Berobat

Kendala lainnya adalah gagal dalam pengobatan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pasien untuk menyelesaikan tahapan berobat sehingga penyelesaian kasus tuberkulosis menjadi tidak tuntas.

3. Under-Reporting



Under Reporting merupakan kondisi dimana kasus TB yang sudah ternotifikasi melalui pemeriksaan penunjang dan sudah diobati, namun tidak tercatat dan tidak dilaporkan dalam sistem surveillance TB kota Padang Panjang. Berdasarkan hasil identifikasi kasus Under Reporting terjadi pada fasilitas kesehatan Non Pemerintah yang belum melaksanakan pencatatan dan pelaporan kasus secara optimal melalui sistem pencatatan standar (SITB).

4. Kasus dari daerah lain

Kasus tuberkulosis dari daerah lain atau daerah tetangga yang berobat ke Padang Panjang, akan tetapi tahapan penyembuhan tidak dilakukan di fasilitas kesehatan di Padang Panjang. Capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis yang mengalami fluktuasi menggambarkan masih diperlukan konsistensi dalam upaya program tuberkulosis di Kota Padang Panjang.

G. Jaminan Kesehatan Nasional

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut tergambar dengan cakupan kepesertaan JKN dari Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang panjang Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,37	98,69	98,9	101,56	100,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, 2025

Cakupan Kepesertaan JKN mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN di Kota Padang Panjang sebagai bentuk besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaminan pembiayaan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan kesinambungan program



pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat di kota Padang Panjang (JKMPP) yang sudah berjalan semenjak tahun 2017 sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang dan Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang.

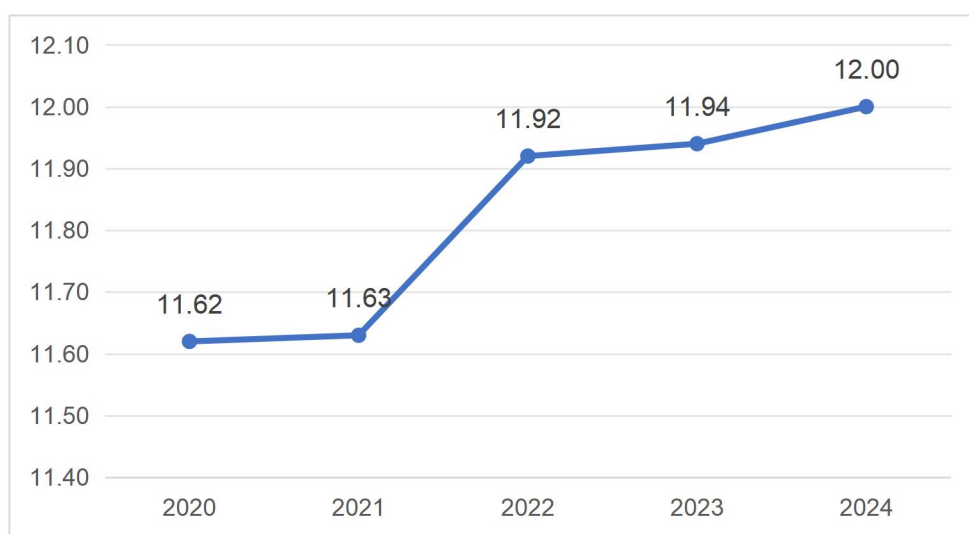
Keberadaan program JKMP ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang Panjang agar dapat menyelesaikan permasalahan kesehatannya melalui kemudahan pembiayaan dan akses pelayanan guna menjamin kecepatan dan ketepatan mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa memikirkan biaya lagi.

H. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah indikator yang mengukur durasi rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam suatu daerah untuk menempuh pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Indikator ini mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan, yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang ada. Semakin tinggi Rata-Rata Lama Sekolah, semakin banyak individu yang bersekolah lebih lama, yang umumnya terkait dengan peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan peluang kerja yang lebih baik. Perkembangan nilai rata-rata lama sekolah Kota Padang Panjang pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Gambar 2.17

Perkembangan rata-rata lama sekolah pada Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025



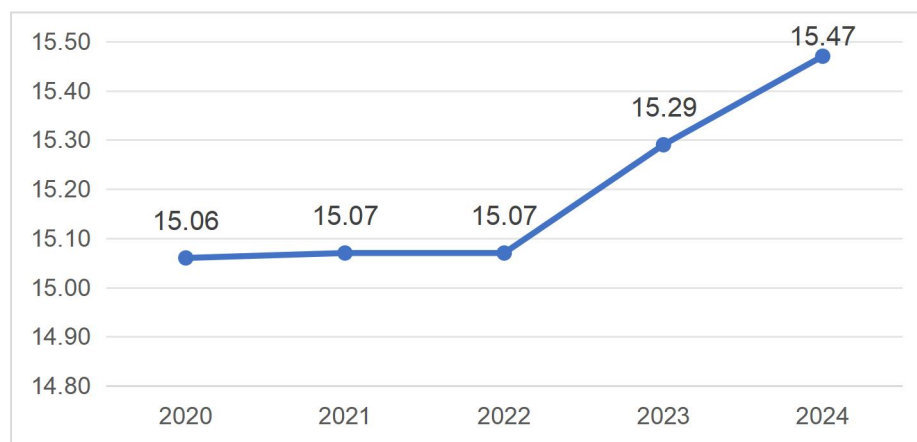
Grafik di atas menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, Rata-Rata Lama Sekolah tercatat sebesar 11,62 tahun, yang kemudian sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,63 tahun. Pada tahun 2022, RLS mengalami lonjakan signifikan menjadi 11,92 tahun. Peningkatan yang relatif stabil berlanjut hingga tahun 2023 dengan Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 11,94 tahun, dan mencapai angka 12,00 tahun pada tahun 2024.

I. Harapan Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik menyatakan angka harapan lama sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pentingnya angka harapan lama sekolah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas..

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafi di bawah ini:

Gambar 2.18
Harapan Lama Sekolah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Pada tahun 2020, nilai Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar 15,06 tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata anak di Kota Padang Panjang diharapkan dapat melanjutkan pendidikan formal mereka sedikit lebih dari 15 tahun. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan yang stabil pada tahun 2021 dan 2022, dengan masing-masing nilai 15,07 tahun, mencerminkan konsistensi dalam sistem pendidikan di Kota Padang Panjang. Namun, pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan menjadi 15,29 tahun, dan pada tahun 2024, nilai Harapan Lama Sekolah mencapai 15,47 tahun.

J. Angka Literasi/Numerasi

Kualitas hasil belajar digambarkan melalui kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kemampuan literasi merupakan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Kemampuan numerasi yaitu kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Berikut data kualitas hasil belajar di Kota Padang Panjang.

Tabel 2.24
Angka Literasi/Numerasi Kota Padang Panjang, Tahun 2022-2024

Indikator	2022		2023		2024	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
Satuan Pendidikan Dasar	89,11	71,56	89,34	71,56	89,34	76,57
Satuan Pendidikan Menengah	79,3	56,78	91,09	86,45	91,09	86,45

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Pada Satuan Pendidikan Dasar, perkembangan Indeks Literasi dan Numerasi di Kota Padang Panjang menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pada tahun 2022, angka literasi tercatat sebesar 89,11, sedangkan numerasi berada pada angka 71,56, menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan matematika siswa di tingkat dasar sudah cukup baik. Pada tahun 2023, angka literasi sedikit meningkat menjadi 89,34, sementara numerasi tetap pada angka 71,56, yang menunjukkan kestabilan dalam keterampilan membaca dan menulis, namun masih perlu perhatian pada peningkatan kemampuan numerasi. Pada tahun 2024, meskipun literasi tetap stabil di angka 89,34, terjadi peningkatan pada numerasi, yang naik menjadi 76,57. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penguasaan matematika di kalangan siswa pendidikan dasar.

Sementara itu, pada Satuan Pendidikan Menengah, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dalam Indeks Literasi dan Numerasi. Pada tahun 2022, angka literasi tercatat 79,3, dengan numerasi sebesar 56,78, yang mencerminkan kualitas pendidikan yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan yang luar biasa, dengan literasi naik menjadi 91,09 dan numerasi mencapai 86,45. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di tingkat menengah mengalami perbaikan yang pesat, baik dalam kemampuan membaca dan menulis, maupun dalam keterampilan matematika. Pada tahun 2024, angka literasi dan numerasi di tingkat pendidikan menengah tetap stabil di 91,09 dan 86,45, menunjukkan bahwa perbaikan tersebut terus terjaga. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan peningkatan



yang sangat positif dalam kualitas literasi dan numerasi di Kota Padang Panjang, dengan kemajuan yang lebih pesat di tingkat pendidikan menengah.

K. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat. IPLM terdiri dari tujuh unsur utama, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan berstandar nasional (SNP), keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi, dan jumlah anggota perpustakaan. Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan serta mendorong peningkatan kualitas hidup melalui literasi. Peningkatan IPLM mencerminkan keberhasilan program literasi yang dapat meningkatkan minat baca, keterampilan, dan daya saing masyarakat di berbagai wilayah.

Perkembangan IPLM Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024

Indikator	Capaian Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	47,2	57,06	88,22	96,78

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Padang Panjang, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai IPLM tercatat sebesar 57,06, menjadikan kota ini sebagai yang tertinggi di Sumatera Barat. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai IPLM melonjak menjadi 88,22. Lonjakan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program literasi, seperti pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), peningkatan koleksi perpustakaan, dan kegiatan literasi berbasis komunitas.

Pada tahun 2024, IPLM Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai angka 96,78. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin mendekati visi sebagai kota literasi unggulan. Upaya pemerintah kota melalui inovasi seperti "Lapak Baca," program pendidikan literasi sejak usia dini, pemanfaatan teknologi digital untuk literasi dalam bentuk beberapa inovasi yaitu Publis



(perpustakaan berbasis inklusi sosial), Kurenah, ASN Cerdas Peduli, Warung Baca, Gelita Mesra (gerakan literasi kota menuju masyarakat sejahtera), Padang Panjang Abadi (ayo baca digital), Mas Cantik (masyarakat cinta statistik) telah berkontribusi besar terhadap pencapaian ini. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi tetapi juga memperkuat budaya literasi di kota tersebut.

L. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan hari tua. Dalam konteks adaptif, program ini dapat dimodifikasi untuk menghadapi bencana atau guncangan ekonomi melalui perluasan manfaat dan relaksasi iuran. Hal ini penting untuk memastikan pekerja tetap terlindungi dalam berbagai situasi krisis.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

NO	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkatan kerja yang bekerja	24,739.00	25,625.00	24,904.00	24,904.00	27,035.00
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan (orang)	6,457.00	9,845.00	14,541.00	19,792.00	15,386.00
	<i>Jumlah pekerja sektor formal yang mendapat BPJS Ketenagakerjaan</i>	<i>4,226.00</i>	<i>4,706.00</i>	<i>5,945.00</i>	<i>6,817.00</i>	<i>7,883.00</i>
	<i>Jumlah pekerja sektor informal yang mendapat BPJS ketenagakerjaan</i>	<i>1,536.00</i>	<i>2,232.00</i>	<i>6,379.00</i>	<i>8,230.00</i>	<i>6,006.00</i>
	<i>Jumlah pekerja sektor konstruksi yang mendapat BPJS ketenagakerjaan</i>	<i>695.00</i>	<i>2,907.00</i>	<i>2,217.00</i>	<i>4,745.00</i>	<i>1,497.00</i>
3	Persentase tenaga kerja yang mendapat BPJS ketenagakerjaan (%)	26.10%	38.42%	58.39%	79.47%	56.91%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

Perkembangan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang tahun 2020-2023 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 26,1% menjadi 79,47% yang dipengaruhi oleh peningkatan kepesertaan tenaga kerja sektor informal melalui dukungan APBD. Pada tahun 2024 menurun menjadi 56,91% meski jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 27.035 jiwa. Dari tabel diatas juga terlihat bahwa kepesertaan BPJS sektor formal meningkat stabil yang menunjukkan kepatuhan perusahaan formal terhadap regulasi BPJS. Disisi lain,



kepesertaan BPJS sektor informal fluktuatif yang menunjukkan masih kurangnya kesadaran pekerja sektor informal terhadap manfaat BPJS dan ketergantungan yang tinggi terhadap program bantuan pemerintah kota untuk pembayaran jaminan kesehatan dimaksud.

M. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidang yang ditekuni, hal ini tertuang dalam Kebijakan perlindungan bagi pekerja disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun UU itu masih menggunakan istilah "penyandang cacat", istilah ini tidak lagi digunakan sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas atau *Convention on the Rights People with Disabilities* (CRPD) yang disahkan melalui UU Nomor 19/2011.

Tujuan dari perhitungan persentase disabilitas bekerja disektor formal adalah untuk mengetahui peran serta dari pemerintah dalam memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, bahwa jumlah disabilitas di Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah 307 orang yang terdiri dari 175 orang di Kecamatan Padang Panjang Timur dan 182 di Kecamatan Padang Panjang Barat. Sedangkan pada Awal Tahun 2024 jumlah disabilitas adalah di Kota Padang Panjang adalah 330 orang.

Dilihat dari sektor pekerjaan maka sebaran penyandang disabilitas berdasarkan pekerjaan pada Tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.27

Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Padang Panjang Tahun 2024

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Pelajar / Mahasiswa	93 orang
2.	Belum / Tidak Bekerja	117 orang
3.	Buruh Harian Lepas	25 orang
4.	Perdagangan	10 orang
5.	Petani/Perkebunan	9 orang
6.	Karyawan Swasta	26 orang
7.	IRT	46 orang
8.	Lainnya	4 orang
9.	Jumlah	330 orang
10.	Disabilitas Angkatan Kerja	237 orang
11.	Persentase Disabilitas Bekerja pada Sektor Formal	29,54%

Sumber: Dinas Sosial PPKBPPA, 2025

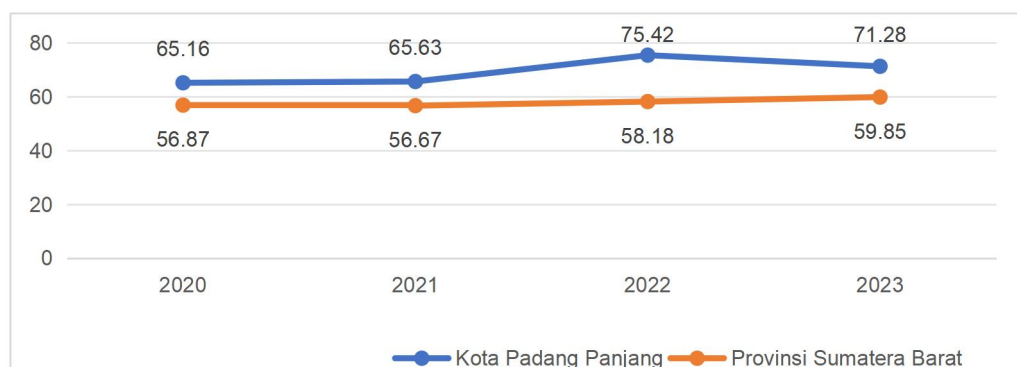
Metode perhitungan persentase disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah dengan membandingkan penyandang disabilitas angkatan kerja yang bekerja disektor formal dengan total penyandang disabilitas yang

berada pada usia produktif atau angkatan kerja, sehingga penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal adalah 29,54% atau 70 orang dari 237 orang usia kerja. Persentase ini mengindikasikan bahwa perlunya upaya lebih kuat dalam mendorong penyandang disabilitas untuk dapat meningkatkan penghasilan agar terwujud kehidupan yang lebih baik.

N. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak mengacu pada proporsi rumah tangga dalam suatu wilayah yang tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan tertentu. Standar ini biasanya mencakup beberapa kriteria seperti luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita, akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan yang sesuai dengan standar. Persentase ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas hidup dan kemajuan pembangunan suatu daerah, terutama dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan pentingnya kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.19
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023



Sumber : <https://sumbar.bps.go.id>, 2024

Berdasarkan grafik, persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak di Kota Padang Panjang menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, persentasenya tercatat sebesar 65,16%, kemudian mengalami kenaikan tipis menjadi 65,63% pada tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, mencapai puncaknya di angka 75,42%. Namun, pada tahun 2023, persentase tersebut sedikit menurun menjadi 71,28%. Meskipun terdapat fluktuasi, secara keseluruhan Kota Padang Panjang menunjukkan



peningkatan akses hunian layak dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang lebih rendah di setiap tahunnya

O. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dimana komponen penyusunnya adalah Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA digunakan sebagai ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak, sementara IPKA merupakan ukuran keberhasilan perlindungan khusus untuk anak. IPA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara termasuk Indonesia.

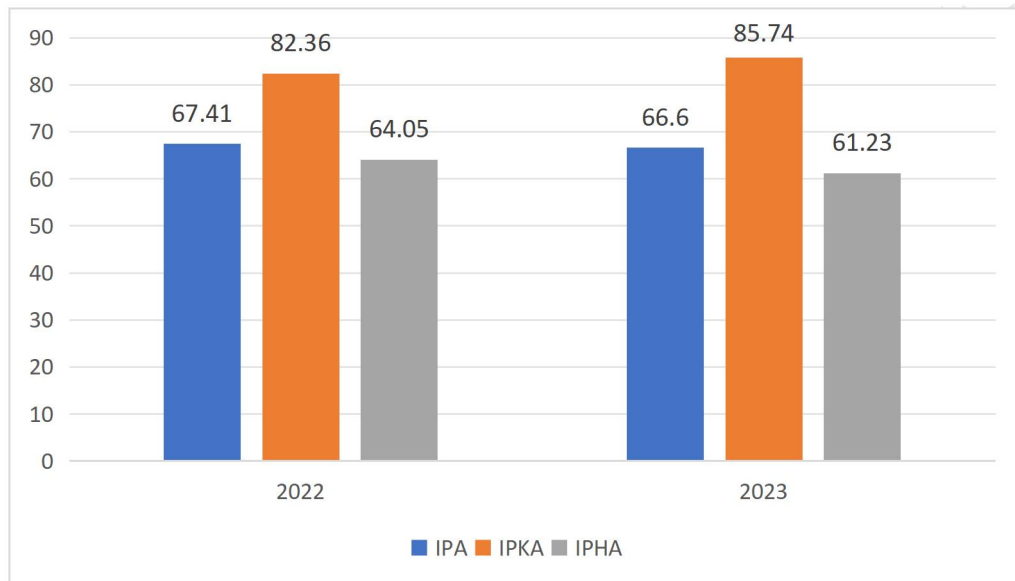
Indeks ini mencakup aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, dan perlindungan anak. IPA berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan perlindungan anak yang menyeluruh di tingkat pusat maupun daerah.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah bagian dari IPA yang secara khusus menyoroti kondisi anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak penyandang disabilitas, anak pekerja, anak terlantar, dan kelompok lainnya yang memerlukan perlindungan khusus. IPKA membantu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi kelompok anak tersebut serta mendorong penyusunan program perlindungan yang lebih spesifik dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Secara keseluruhan, IPA, IPKA dan IPHA merupakan alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi keberhasilan suatu wilayah dalam menjamin hak dan perlindungan anak, sekaligus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih terarah dan efektif.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capaian indikator IPA, IPKA dan IPHA Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.7
Capaian Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), Indeks Perlindungan Hak Anak Kota Padang Panjang, Tahun 2022-2023

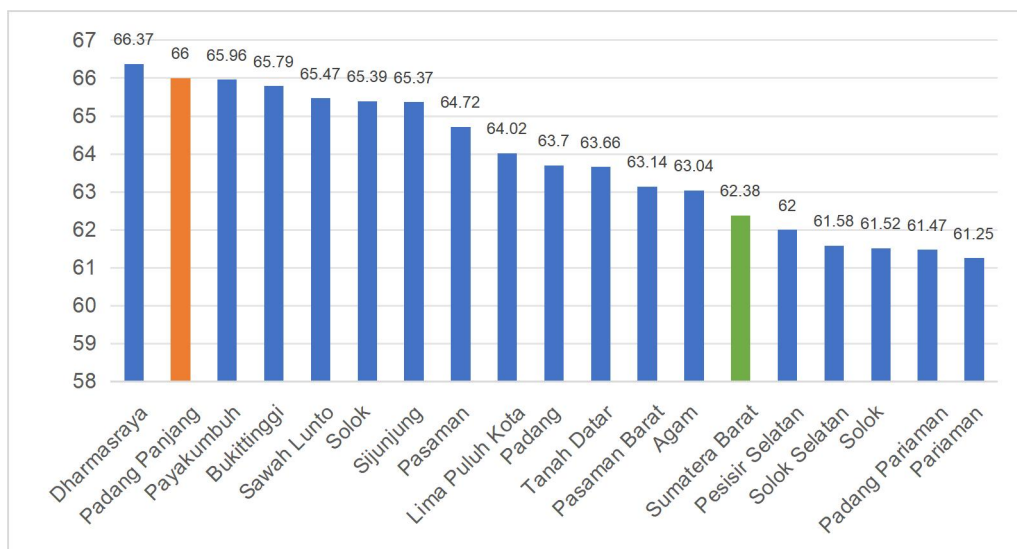


Sumber : <https://www.kemenpppa.go.id/>, 2025

Berdasarkan Gambar 2.48, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami sedikit penurunan dari 67,41 pada tahun 2022 menjadi 66,6 pada 2023. Sebaliknya, Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) justru meningkat dari 81,96 menjadi 84,22.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak dalam kondisi khusus mengalami kemajuan, sementara perlindungan anak secara umum masih perlu diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal..

Gambar 2.8
Capaian Indeks Perlindungan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : <https://www.kemenpppa.go.id/>, 2025



Secara umum, terlihat bahwa Padang Panjang menempati posisi kedua tertinggi dengan IPA sebesar 66,00, hanya terpaut sedikit dari Dharmasraya yang mencatatkan IPA sebesar 66,37. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat yang memiliki IPA sebesar 62,38, Kota Padang Panjang menunjukkan hasil yang lebih baik dan berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat.

P. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yaitu suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Hasil dari Indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori tangguh, berkembang, atau rentan.

Pengukuran iBangga meliputi dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan. Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator ; a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; dan d. keharmonisan Keluarga. Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator: a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. jaminan keuangan; c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; dan e. akses media online/daring. Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator: a. interaksi Keluarga; dan b. interaksi sosial.

Setelah dilakukan penghitungan atau pengukuran iBangga, maka akan dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Perkembangan nilai Ibangga Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) Kota Padang Panjang
Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	56,12	60,99	66,46

Sumber: <https://siperindu.online>, 2025



Nilai (Ibangga) Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, Ibangga tercatat sebesar 56,12, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 60,99 pada tahun 2023. Puncaknya tercatat pada tahun 2024 dengan nilai 66,46, yang mencerminkan kemajuan pesat dalam pembangunan kualitas keluarga di Kota Padang Panjang.

Q. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada Tahun 2010. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna. IPG mengukur kesetaraan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Kegunaan dari IPG adalah untuk melengkapi penghitungan IPM dalam mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender (indeks)	97,7	97,78	98,24	98,19	98,23

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 97,7 dan mengalami kenaikan menjadi 97,78 pada tahun 2021. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022 dengan capaian IPG sebesar 98,24, yang merupakan angka tertinggi selama periode tersebut.

Namun, pada tahun 2023, IPG sedikit menurun menjadi 98,19 dan kembali naik menjadi 98,23 pada tahun 2024 menunjukkan fluktuasi tipis



dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, capaian IPG selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan gender, dengan nilai indeks yang terus mendekati angka sempurna, menandakan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

R. Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik di suatu wilayah. IDG merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga komponen utama: (1) Keterlibatan perempuan di parlemen (politik), (2) Perempuan sebagai tenaga profesional (pengambilan keputusan), (3) Sumbangan pendapatan perempuan (ekonomi). Indeks ini dihitung dengan mengambil rata-rata dari ketiga komponen tersebut. Semakin tinggi nilai IDG (mendekati 100), semakin baik tingkat pemberdayaan gender di wilayah tersebut, yang berarti perempuan memiliki kesempatan dan peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan

Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.30
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender (indeks)	65,24	66,62	67,82	67,58	75,62

Sumber: <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IDG tercatat sebesar 65,24 dan terus meningkat menjadi 66,62 di tahun 2021, 67,82 pada 2022, serta 67,58 pada 2023. Peningkatan yang signifikan terjadi di tahun 2024, di mana IDG mencapai angka 75,62. Capaian ini mencerminkan kemajuan yang positif dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan meskipun masih ada tantangan dan fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.



Salah satu indikator pendukung IDG adalah proporsi keterwakilan perempuan di kursi DPRD, berikut adalah data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang.

Tabel 2.31

**Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024**

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	10	10	10	10	20

Sumber: Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang, 2024

Proporsi kursi yang diduduki oleh perempuan di DPRD Kota Padang Panjang menunjukkan kondisi yang stagnan selama periode 2020 hingga 2023, yaitu sebesar 10% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 20%, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam representasi politik perempuan di tingkat legislatif daerah. Kenaikan ini dapat mencerminkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam politik serta keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender yang dijalankan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Sosial P2KBP3A Kota Padang Panjang.

S. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa aspek pembangunan, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hasil pembangunan. Nilai IKG berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.



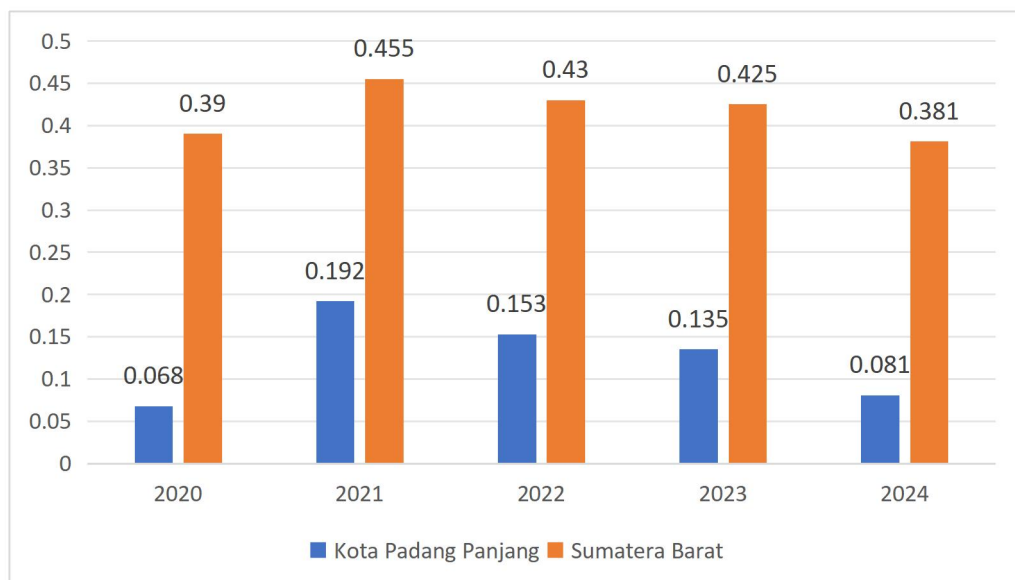
Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Padang Panjang dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Padang Panjang,
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,068	0,192	0,153	0,135	0,081

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Gambar 2.9 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Padang Panjang dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2024 IKG ini paling rendah yaitu hanya 0,081. Dibandingkan dengan IKG Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia, IKG Kota Padang Panjang jauh lebih rendah. Ini mengidentifikasi bahwa kesetaraan gender di Kota Padang Panjang cukup baik.

T. Tingkat Moderasi Beragama

Tingkat Moderasi Beragama mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang, toleran, dan tidak ekstrem. Moderasi beragama menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap perbedaan keyakinan dan praktik agama lainnya,



serta mengedepankan prinsip kedamaian, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk menyeimbangkan ketaatan terhadap ajaran agama dengan pengakuan terhadap pluralitas sosial dan budaya. Individu dengan tingkat moderasi beragama yang tinggi cenderung menghindari fanatisme dan kekerasan atas nama agama, serta lebih fokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan bersama.

Pelaksanaan tingkat moderasi beragama di Kota Padang Panjang dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) setempat. Tingkat moderasi beragama dihitung dari pembentukan Kampung Moderasi Beragama yang berada pada Kelurahan Tanah Pak Lambik dan Kelurahan Tanah Hitam, masih 12,5 persen dari 16 kelurahan. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang saling menghormati perbedaan agama, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan. Selain itu, Kankemenag juga mengadakan diskusi dan kajian khusus untuk kelompok milenial, serta pengumpulan data dan informasi terkait moderasi beragama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama yang moderat dan menghindari ekstremisme. Pendekatan inklusif dan dialog antar umat beragama juga dikedepankan, sehingga warga beragama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai dan bekerja sama dalam kegiatan sosial dan budaya

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Objek Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017, terdapat sepuluh objek pemajuan kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kesepuluh objek tersebut adalah:

1. Tradisi Lisan: Tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya.
2. Manuskrip: Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya.



3. Adat Istiadat: Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
4. Permainan Rakyat: Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri.
5. Olahraga Tradisional: Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi.
6. Pengetahuan Tradisional: Seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi.
7. Teknologi Tradisional: Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi.
8. Seni: Karya atau hasil kreativitas manusia yang memiliki nilai estetika, seperti seni rupa, seni musik, seni tari, seni sastra, dan seni pertunjukan lainnya.
9. Bahasa: Sistem komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi.
10. Ritus: Upacara atau tata cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual atau sosial.
11. Cagar Budaya: Cagar Budaya dapat berupa Benda Cagar Budaya (BCB), Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terletak di darat maupun di air.

Perkembangan objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Manuskrip	30%	30%	30%	40%	55%
2	Tradisi Lisan	30%	70%	70%	70%	70%



No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Adat Istiadat	45%	70%	70%	70%	51,67%
4	Ritus	45%	45%	45%	55%	57,22%
5	Pengetahuan Tradisional	30%	45%	100%	100%	67,27%
6	Teknologi Tradisional	30%	30%	40%	55%	53%
7	Seni	30%	70%	100%	100%	80%
8	Bahasa	30%	30%	55%	70%	72,50%
9	Permainan Rakyat	30%	55%	55%	70%	55%
10	Olahraga Tradisional	30%	30%	55%	70%	100%
11	Cagar Budaya	40%	40%	100%	100%	66,14%
	Total	34%	47%	65,45%	74,09%	66,16%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, 2025

Penghitungan indikator objek pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang baru dimulai pada Tahun 2019 dengan pencapaian baru 33%, kemudian naik menjadi 34% pada Tahun 2020, 47% di tahun 2021, 65,45% pada Tahun 2022 dan menjadi 74,09% di tahun 2023.

Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,81% dari capaian tahun 2023 menjadi 66,16%. Dibandingkan dengan tiga tahun terakhir, hingga Tahun 2024 realisasi Persentase Pemajuan Kebudayaan mengalami fluktuasi. Setelah mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, pada Tahun 2024 realisasi pemajuan kebudayaan mengalami penurunan.

Penurunan capaian kinerja pemajuan kebudayaan disebabkan karena dari 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilakukan, masih terdapat 3 langkah pengelolaan yang belum optimal pelaksanaannya, yakni langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi. Pada langkah internalisasi yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang. Selain itu, belum dimilikinya tim ahli untuk pemajuan kebudayaan Kota Padang Panjang,



menyebabkan tahapan mulai dari langkah identifikasi sampai langkah literasi belum optimal dilakukan.

B. Daya Saing Keolahragaan

Indikator ketiga rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang dari tahun 2022 - 2024 mengalami kenaikan dengan angka pada tahun 2024 sebesar 0,5 %,

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	Na	Na	0,1	0,2	0,5
2	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/ provinsi	Prestasi	8 Prestasi provinsi	10 Prestasi provinsi	10 Prestasi provinsi	8 prestasi nasional 62 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi
3	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi	Prestasi	4 prestasi provinsi	5 prestasi provinsi	6 prestasi Provinsi	6 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional	6 prestasi provinsi, 1 prestasi nasional

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, 2025

Capaian indikator keolahragaan, terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio daya saing keolahragaan yang pada tahun 2020 dan 2021 belum mulai dihitung, mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 sebesar 0,1, kemudian naik menjadi 0,2 pada 2023, dan mencapai 0,5 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan daya saing di bidang olahraga.

Untuk jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi, capaian tahun 2020 masih berada di level provinsi dengan 8 prestasi, meningkat menjadi 10 prestasi pada 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan capaian dengan 8 prestasi nasional serta 62 prestasi provinsi, walaupun pada tahun 2024 jumlahnya sedikit menurun menjadi 9 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi. Sementara itu, jumlah pemuda berprestasi juga menunjukkan peningkatan dari 4 prestasi provinsi di tahun 2020 menjadi 5 prestasi provinsi di 2021, dan 6 prestasi provinsi di 2022. Kemudian, pada 2023 dan 2024 mulai ada pencapaian di tingkat nasional dengan masing-masing 1 prestasi nasional di samping prestasi provinsi yang terus konsisten.



Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya perkembangan yang positif baik dalam peningkatan daya saing olahraga, jumlah atlet maupun pemuda berprestasi, dengan tren menuju pencapaian di tingkat nasional.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Indikator Kerja Kunci (IKK) dalam bidang pendidikan adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam sektor pendidikan. IKK ini dapat digunakan oleh kementerian, dinas pendidikan, sekolah, atau institusi lain untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dari data yang disajikan dalam tabel di bawah dapat dijelaskan bahwa terdapat 24 (dua puluh empat) Capaian IKK Bidang Pendidikan dimulai tahun 2020 s.d. tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- A. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, diawali dengan 103,33642 % pada tahun 2020, tetapi angka turun pada tahun 2021 menjadi 95,031617 % pada dan 90,4021938 % pada tahun 2022. Peningkatan partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 109,1444092 % dan 103,2891731 % pada tahun 2024;
- B. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama, Mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 104,5535449 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yakni sebesar 101,404741 % atau sebesar 3, 1518039 point;
- C. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, mencapai persentase tertinggi pada tahun 2023, dengan angka sebesar 156,7727401 % dan menjadi 140,5091312 % pada tahun 2024;
- D. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan memiliki persentase tertinggi pada tahun 132,11679 % dan menjadi 55, 2264808 % pada tahun 2024, penurunan yang signifikan yakni sebesar 76,8903092 point;
- E. Harapan Lama Sekolah di Kota Padang Panjang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai 15,06 % pada tahun 2020, 15,07 % pada tahun 2021, 15,07 % pada tahun 2022, 15,29 % pada tahun 2023 dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 15,47 %;
- F. Indeks Rata-rata lama sekolah, seperti Indeks Harapan Lama Sekolah juga mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Dimulai 11, 62 % pada tahun 2020 dan capaian tertinggi pada tahun 2024 yakni sebesar 12 %. Selama kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar 0,38 point;



- G. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, dapat dilihat mulai dari tahun 2022 yakni sebesar 99,40 % dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yakni 70,5% sebesar 28,9 point dan 62,94 % pada tahun 2024;
- H. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat, mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 dan 2024 yakni sebesar 99,05 %. Mengalami peningkatan 0,01 point dari tahun 2022. Terjadi penurunan sebesar 0,60 point dari tahun 2021 yaitu 93,90 %;
- I. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat, sesuai dengan tabel yang disajikan di bawah dapat dilihat, pada tahun 2020 sebesar 97,76 %, tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 97,29 %, tahun 2022 sebesar 97,3 %, tahun 2023 sebesar 98,53 % dan tahun 2023 tetap dengan angka 98,53 %;
- J. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud (3-6 tahun) dimulai dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami kenaikan dan mencapai capaian tertinggi pada tahun 2023 yakni 62,93 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yakni sebesar 20,65 Point atau menjadi 42,28 %;
- K. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat pada tahun 2024 sebesar 105,5 % turun sebesar 0,58 point dari tahun 2024 yaitu 106,08 %. Pada tahun 2020 dan 2022 mempunyai nilai yang sama 106,65 % dan pada tahun 2021 sebesar 108,25;
- L. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat mencapai nilai terendah pada tahun 2023 yakni sebesar 93,35 % dan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 109,31 %. Capaian yang sama terjadi pada tahun 2020 dan 2022 sebesar 107,15 % dan pada tahun 2021 sebesar 102,22 %;
- M. Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat, merupakan indikator yang bersumber dari Rapor Pendidikan yang baru dinilai semenjak tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat sebesar 2,39 % / 2,28 % / 2,1 %, dan untuk tahun 2023 73,62 % / 72,14 % / 58,13 %, serta pada tahun 2024 76.37 % / 75.38 % / 60.71%;
- N. Untuk Indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat pada tahun 2022 sebesar 2,48 % / 2,4 % / 2,07 %, tahun 2023 71,29 % / 69,61 % / 57,38 % dan tahun 2024 73.15 % / 74.71 % / 60.82 %;
- O. Seperti halnya Indeks Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas, indeks Literasi dan Numerasi SD sederajat merupakan indikator dalam Rapor Pendidikan, yang baru dihitung semenjak tahun 2022. Pada tahun 2022 indeks Literasi dan Numerasi SD sederajat 89,11 dan 71,56, tahun 2023 89,11 dan 71,56, serta tahun 2024 89.34 dan 78.57;
- P. Indeks Literasi dan Numerasi SMP sederajat pada tahun 2022 adalah 79,3 % dan 56,78 %, tahun 2023 adalah sebesar 71,56 % dan 56,78 % dan tahun 2024 sebesar 91.09 % dan 86.45 %;
- Q. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar mulai tahun 2020 s.d. 2024 di



Kota Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahun 2020 sebesar 18,94 %, tahun 2021 menurun menjadi 18,49 % atau sebesar 0,45 point dan pada tahun 2022 tetap pada 18,49 % dan pada tahun 2023 turun menjadi 5,73 % turun sebesar 6,59 point;

- R. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah pada tahun 2020 sebesar 11,62, pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 12,32 dan 2023 turun menjadi 8,69.

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
I	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	103,33642	95,031617	90,4021938	109,1444092	103,2891731	Disdikbud
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	93,164374	100	100	104,5535449	101,404741	Disdikbud
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	83,657351	102,6408451	100	156,7727401	140,5091312	Disdikbud
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum	%	132,11679	100	100	2,757675	55,2264808	Disdikbud



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan							
5.	Harapan lama sekolah	Tahun	15,06	15,07	15,07	15,29	15,47	Disdikbud
6	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,62	11,63	11,93	11,94	12	Disdikbud
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	NA	NA	99,40*	70,5	62,94	Disdikbud
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	93,79	93,90	99,4	99,05	99,05	Disdikbud
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97,76	97,29	97,3	98,53	98,53	Disdikbud
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	40,57	45	47,53	62,93	42,28	Disdikbud
12	APK SD sederajat	%	106,65	108,25	106,65	106,08	105,5	Disdikbud
13	APK SMP sederajat	%	107,15	102,22	107,15	93,35	109,31	Disdikbud
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	NA	NA	2,39/2,28/2,1	73,62 / 72,14 / 58,13	76,37 / 75,38 / 60,71	Disdikbud
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	NA	NA	2,48/2,4/2,07	71,29 / 69,61 / 57,38	73,15 / 74,71 / 60,82	Disdikbud



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	NA	NA	89,11/71,56	89,11 / 71,56	89.34 dan 78.57	Disdikbud
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	NA	NA	79,3/56,78	71,56 / 56,78	91.09 dan 86.45	Disdikbud
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	18,94	18,49	18,49*	5,73	5,73*	Disdikbud
19	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	11,62	12,32	12,32*	8,69	8,69*	Disdikbud

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari pemenuhan Sumber Daya Kesehatan serta Upaya Kesehatan. Sumber daya bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Dalam mendukung Pembangunan Bidang Kesehatan telah dilaksanakan berbagai Upaya kesehatan serta pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di Kota Padang Panjang. Untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Kesehatan dalam mencapai tujuan terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan pada RPJMD 2020-2024. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesehatan, 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
II	KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung RS	Per	2,93	2,84	3,20	3,41	2,78	Dinas



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	terhadap Jumlah Penduduk	1000						Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	94,5 %	86,03 %	81,31	91,1	100	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	89%	85,25%	82,92	100,0	100	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92,68%	90%	82,65	99,45	100	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	65,29%	63,6%	77,15	92,98	100,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,39 %	72,01%	85,60	91,21	142,42	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	20,1 %	32,8 %	61,32	100,64	118,57	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	52,32%	63,9 %	94,36	96,21	100	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	49,6%	23,8 %	30,71	35,15	100	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	81,5 %	100,00	92,13	108,71	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	98,3%	100,00	102,50	108,59	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	32,4%	60,32	99,13	116,00	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	87,7%	87.671	98,89	127,53	Dinas Kesehatan



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
15	Prevalensi Stunting	%	N	15,6	14,76	16,8	19	Dinas Kesehatan
16	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,82	72,82	73,02	73,23	74,48	Dinas Kesehatan
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,33	0,39	0,44	0,46	0,46	Dinas Kesehatan
18	Persentase Penurunan Kematian Ibu	%	4	4	33,00	100	100,00	Dinas Kesehatan
19	Persentase Penurunan Kematian Bayi	%	2	2	18,2	155%	-369	Dinas Kesehatan
20	Presentase UHC	%	98,07	101,40	98,9	101,58	100,35	Dinas Kesehatan
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
24	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	NA	NA	NA	100%	100%	Dinas Kesehatan
26	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu persatuan penduduk	Per 100.000	17,76	17,55	17,29	17,06	37,00	Dinas Kesehatan
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0,19	0,22	0,22	0,23	0,22	Dinas Kesehatan
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0,58	0,58	0,56	0,57	0,58	Dinas Kesehatan
29	Indek Keluarga Sehat	indek	0,33	0,39	0,44	0,46	0,46	Dinas Kesehatan

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:



1. Indikator Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi. Tiga indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan Sumber Daya Kesehatan dalam ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berorientasi kepada mutu. Berdasarkan data capaian tahun 2020-2025 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk, Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh WHO, yaitu standar Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 1 (satu) Tempat Tidur per 1.000 penduduk dan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu 1,4 per 100.000. Pada tahun 2024 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena penambahan pustu yang sebelumnya 6 unit, pada tahun 2024 menjadi 16 unit yang berada pada setiap kelurahan. Penambahan Pustu ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Program Integrasi Layanan Primer di Tatanan Pelayanan Tingkat pertama di Kota Padang Panjang.
2. Di Kota Padang Panjang indikator Usia harapan hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terjadi peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang. Pencapaian UHH ini didukung oleh 4 (empat) faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yaitu Angka Kematian (Mortalitas), Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi.
3. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan, salah satu program prioritas pemerintah adalah melalui pengelolaan Program tuberkulosis. Hal ini sangat penting karena tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kesakitan, kematian, dan kecacatan jika tidak ditangani dengan baik. Angka kesakitan Capaian ini mengindikasikan sudah terjadi peningkatan kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis.
4. Prevalensi stunting merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Status Gizi di Masyarakat. Prevalensi stunting merupakan salah satu ukuran dalam menilai status gizi masyarakat di suatu daerah, termasuk di Kota Padang Panjang. Prevalensi stunting mengalami penurunan sampai tahun 2023 (14,09%) . Pada Tahun 2024 (19%). Capaian ini menggambarkan sudah baiknya akses pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang, dimana salah satu strategi yang telah dilakukan adalah penguatan program pembiayaan kesehatan gratis dalam kepesertaan JKN. Pencapaian tersebut belum on track, masih membutuhkan berbagai upaya percepatan untuk terus menurunkan prevalensi stunting.



5. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK). IKS Kota Padang Panjang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 yaitu 0,33 indeks dan pada tahun 2024 yaitu 0,46 indeks, meskipun demikian apabila dilihat dari kategori IKS maka IKS Kota Padang Panjang masih kecil dari 5,00, sehingga secara kategori masih berada pada indeks keluarga tidak sehat. Sehingga masih membutuhkan Upaya intensif dalam peningkatan indeks keluarga sehat. Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi capaian IKS tersebut yaitu; masih rendahnya cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya setiap bulan, hal ini didukung dengan data rendahnya kunjungan balita ke Posyandu dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata kunjungan 62%. Capaian ini masih rendah dibanding standar yang telah ditetapkan yaitu 80%. Selain itu faktor anggota keluarga yang tidak merokok masih rendah. Dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Implementasi dari Peraturan Daerah tentang Tertib Rokok dinilai masih rendah Tingkat pemahaman masyarakat sehingga masih berperilaku mengkonsumsi rokok. Kedua indikator ini sangat penting menjadi perhatian bersama agar mampu menaikkan IKS di Kota Padang Panjang sebagai cerminan yang digunakan pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat secara komprehensif, termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan keluarga. IKS membantu menilai sejauh mana keluarga memiliki lingkungan dan akses hidup sehat yang memadai, serta digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada periode tahun 2020 hingga 2024, kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan bagian dari Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada beberapa indikator kunci, yang diukur berdasarkan indikator-indikator utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan RPJMD, dan diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi selama lima tahun terakhir terjaga stabil di angka 58,36% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan mempertahankan layanan irigasi di wilayahnya telah berjalan secara konsisten, meskipun belum menunjukkan peningkatan signifikan.

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 81,57% pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum yang layak bagi masyarakat, sesuai dengan target pembangunan infrastruktur dasar yang diamanatkan dalam RPJMD.

Pada indikator persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik, terjadi peningkatan dari 87,47% pada tahun 2020 menjadi 96,1% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Beberapa indikator lain seperti rasio kepatuhan IMB, tingkat kemantapan jalan, rasio tenaga operator bersertifikat, serta indeks kepuasan layanan (IKL kePUan) juga menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun beberapa indikator masih memerlukan perhatian lebih untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, tingkat kemantapan jalan meningkat dari 89,77% pada tahun 2020 menjadi 90,34% pada tahun 2024, sedangkan IKL KepuSan mencapai 96,71% pada tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode RPJMD menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik pada sebagian besar indikator utama, khususnya dalam perluasan akses air minum dan sanitasi. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan intervensi dan inovasi kebijakan agar target pembangunan infrastruktur dasar dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang harus terus dilanjutkan agar dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, hasil capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode RPJMD ini menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan ke depan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2020-2024



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	58,36	58,36	58,36	58,36	58,36	Dinas PUPR
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	81,57	84,89	86,00	86,4	100	Dinas PUPR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	86,47	87,87	87,21	89,55	99,1	Dinas PUPR
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio	44	45,63	45,81	46,41	46,8	Dinas PUPR
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	89,77	90,97	90,92	92,28	89,34	Dinas PUPR
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	54,98	60,75	60,75	61	61	Dinas PUPR
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	100,00	98,95	100	Dinas PUPR
8	IKLI KePUan	Indeks	1,15	22,71	0,03	96,31	96,71	Dinas PUPR
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	n/a	n/a	82	82,5	83	Dinas PUPR
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	68,69%	72,49%	72,76%	86,02%	78,96	Dinas PUPR
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	n/a	n/a	3	3	3	Dinas PUPR
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas PUPR
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	Indikator diperiode ini : % Trotoar ramah disabilitas				100	Dinas PUPR

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
14	Persentase Tenaga Konstruksi Bersertifikat	%	54,98	60,75	60,75	61	61	Dinas PUPR
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	96,66	96,78	97,88	98,94	93,19	Dinas PUPR
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	86,47	87,87	87,21	89,55	99,10	Dinas PUPR
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	81,35	74,38	77,91	79,19	81,31	Dinas PUPR
18	Luas kawasan kumuh	%	10,28	5,35	18008	na	2,14	Dinas PUPR

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada umumnya cenderung meningkat. Capaian IKK Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani ke angka 95,52 %, Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) ke angka 7,75 % , Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) ke angka 79,31%, Persentase pemukiman layak huni ke angka 99,48 % di tahun 2024 semua capaian tersebut berasal dari 2 (dua) Anggaran APBN dan APBD
2. berupa Adanya 2 (dua) program yang bersumber dari APBD berupa program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh, kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan. Dengan pelaksanaan 2 (dua) Program kegiatan tersebut maka capaian indikator kinerja dapat tercapai sesuai target.
3. Adanya 2 (dua) Kegiatan APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga oleh Kementerian PUPR pada tahun 2020-2023.
4. Sedangkan Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani yang telah mencapai 100% dikarenakan adanya program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pengembangan



dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.

5. Adapun capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
IV	PERUMAHAN RAKYAT							
1	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	5,5	56,69	73,98	81,74	95,52	Dinas Perkim LH
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,25	3,16	3,37	2,92	7,75	Dinas Perkim LH
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	83,61	83,61	84,51	75	79,31	Dinas Perkim LH
4	IKLI Perkim	Indeks	77	96,9	96,80	98,06	94,56	Dinas Perkim LH
5	Persentase pemukiman layak huni	%	89,14	95,02	97,01	97,90	99,48	Dinas Perkim LH
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100%	100%	100	100%	100	Dinas Perkim LH

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan diatas yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimana berdasarkan sasaran strategis RPD tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan Perangkat Daerah yakni : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan sasaran : 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda. 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran.

Indikator Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%.



Artinya seluruh pengaduan atau pelanggaran yang masuk dapat ditangani atau ditanggulangi 100% dari jumlah pelanggaran atau gangguan Trantibum yang terjadi. Hal ini menunjukkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menanggulangi berbagai gangguan trantibum yang terjadi di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan patroli dan pengawasan, dan tokoh masyarakat membantu dalam pengumpulan informasi, penanganan kasus, serta sosialisasi peraturan daerah terkait trantibum serta penggunaan teknologi dalam penanganan kasus trantibum.

Indikator Kinerja Persentase Penegakan Perda telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 semuanya terlayani. Hal ini dapat tercapai dengan upaya :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dan
- e. Pembentukan Tim SK4 yang melibatkan instansi terkait Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri

Indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%.

Indikator Kinerja Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan WMK penanganan kebakaran telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat Kota Padang Panjang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dari indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang ditargetkan 10 menit tercapai rata-rata 5,8 menit dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian



kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan :

- Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Kota dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah dan instansi instansi pemerintah dan swasta yang ada dalam Kota Padang Panjang;
- Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- Investigasi kejadian kebakaran, dan
- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Sementara tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Begitu juga dengan persentase Penegakan PERDA telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100. Capaian urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
2	Persentase Penegakkan Perda	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
3	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100	100	100	Satpol PP dan Damkar
6	Waktu tanggap (response time)	Menit	10 menit	10 menit	2 menit	3 menit	4 menit	Satpol PP dan Damkar

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan langsung dengan pelayanan dasar di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jenis pelayanan dasar bidang sosial antara lain: rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis baik di dalam maupun di luar panti. Beberapa capaian yang menjadi indikator kinerja kunci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
VI	SOSIAL							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	22,74	37,54	92.51	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Angka PPKS	%	6.48	19.61	5.43	4,70	3,69	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	87	92	90	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	57,16	65,54	69.82	89,12	97	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	70,43	74,15	79,17	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Terdapat penurunan angka PPKS dari 4,70 pada tahun 2023 menjadi 3,69 pada tahun 2024 , penurunan yang paling signifikan sebesar 21,49 %. Penurunan angka PPKS tersebut



merupakan hasil dari upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dan bantuan Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat Kota Padang Panjang agar memperoleh hidup layak yang memungkinkan menjalankan fungsi sosial.

PPKS yang tertangani sebanyak 97% adalah upaya mendapatkan bantuan bagi PPKS Padang Panjang dari APBN (bantuan PKH, Program Sembako, ATENSI) maupun memberikan bantuan sumber APBD (Respon Kasus, BTT Erupsi, Alat Bantu bagi Disabilitas, Bantuan Sandang dan Permakanan bagi Lansia dan Disabilitas) dan upaya bimbingan dan pemberdayaan dari pendamping sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja sudah maksimal tiap tahunnya yaitu 100%. Untuk Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) mengalami fluktuatif tiap tahunnya, sedangkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja berkisar diatas 9% pertahunnya. Pada Tahun 2024, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,75%. Menurut data dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah, mengalami persentase yang naik turun tiap tahunnya dimana untuk Tahun 2024 mencapai 47,6%. Persentase Tingkat Pengangguran diambil rata-ratanya selama lima tahun ini (Tahun 2020-2024) adalah sebesar 5,49%. Terakhir dari Indikator Kinerja bidang tenaga kerja adalah Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja yang mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan 66,33% pencapaian pada Tahun 2024 dan untuk Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin pada Tahun 2024 sebesar 1,27%. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024, Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN							



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	DENGAN PELAYANAN DASAR							
VII	TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	DPMPTSP
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	17.57	28.57	32.72	21.05	52.48	DPMPTSP
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	9.93	10.44	11.03	10,06	10,85	DPMPTSP
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	NA	NA	58.42	0,69	0,75	DPMPTSP
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	17.57	28.57	33.09	78,2	47,6	DPMPTSP
6	Tingkat Pengangguran	%	7,22	4,9	4,84	5,49	4,94	DPMPTSP
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	NA	65,94	64,02	66,05	66,33	DPMPTSP
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	NA	NA	NA	26,1	1,27	DPMPTSP

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode 2020 hingga 2024, Dinas Sosial, P2KB, dan P3A mencatat sejumlah capaian penting terkait indikator kinerja utama yang mendukung pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan partisipasi politik perempuan.

Pengarusutamaan Gender dalam APBD (ARG) :Persentase Alokasi Responsif Gender (ARG) dalam belanja langsung APBD menunjukkan fluktuasi signifikan. Setelah menurun tajam pada 2021 (0,18%), capaian meningkat drastis menjadi 34,73% pada 2023, meskipun menurun kembali di 2024 (4,83%). Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam perencanaan anggaran yang berpihak pada isu gender.



Penanganan Anak Korban Kekerasan : Persentase anak korban kekerasan yang tertangani oleh instansi terkait mengalami peningkatan drastis sejak 2022, dengan capaian 100% yang berhasil dipertahankan hingga 2024. Ini mencerminkan kinerja optimal dalam respons terhadap kekerasan terhadap anak.

Rasio Kekerasan terhadap Perempuan : Rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 penduduk perempuan mengalami lonjakan luar biasa pada 2022 (26.373), lalu menurun signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, angka 2024 masih menunjukkan peningkatan dibanding tahun awal, menandakan perlunya intervensi berkelanjutan terhadap isu kekerasan berbasis gender.

Indeks Pembangunan Gender (IDG) : Indeks ini menunjukkan tren positif secara umum, meningkat dari 6,87 (2020) menjadi 67,58 (2024). Hal ini mencerminkan kemajuan dalam pembangunan yang responsif gender, meskipun nilai IDG tahun 2024 tidak dilaporkan secara lengkap.

Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) : Predikat KLA mengalami peningkatan, dari Pratama pada 2020 menjadi Utama pada 2023. Ini mencerminkan komitmen yang terus meningkat dalam menciptakan lingkungan ramah anak.

Partisipasi Politik Perempuan di DPRD : Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan tetap stabil sebesar 20% selama lima tahun terakhir. Ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut agar representasi perempuan meningkat di lembaga legislatif daerah. Capaian IKK Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,23	4,14	8,75	34,73	15,38	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,032	0,035	100	100	100	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000	%	0,019	0,015	26373	0,03	31,54	Dinas Sosial, P2KB P3A



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	penduduk perempuan)							
4	IDG	Indeks	65,24	66,62	67,82	67,58	75,62	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Predikat KLA	Predikat	pratama	Madya	Nindya	utama	Tidak Ada penilaian	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20	20	20	20	Dinas Sosial, P2KB P3A

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indikator Kinerja kunci urusan pangan ada empat yaitu : 1) Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Tahun 2024 sebesar 108,504 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 14,018% yang disebabkan oleh adanya penambahan cadangan beras sebesar 12.778,79 kg yang sumber dana dari Dana Insentif Fiscal (DIF) pada APBD Perubahan Tahun 2024. 2) LPE Sektor Pertanian; 3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan karena belum berimbangnya pola konsumsi masyarakat; dan 4) Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk. Ketersediaan energi yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 2.400 kkal/ kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 63 gram/kapita/hari. Pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein Kota Padang Panjang sudah diatas angka yang dianjurkan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Rincian capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pangan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
IX	PANGAN							



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	N/A	N/A	13.043,00	14,018	108,504	Dinpaper
2	LPE Sektor Pertanian	%	1,29	4,87	5,43	1,87	0,15	Dinpaper
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	85,60	85,70	87,30	87,4	86,18	Dinpaper
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2855,36	2486,84	2820,34	2844,14	2844,17	Dinpaper

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan pertanahan dalam dokumen perencanaan daerah merujuk pada pengelolaan, pengaturan, dan penataan sumber daya agraria dan tata ruang yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum atas hak atas tanah, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut capaian dari urusan bidang pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pertanahan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
X	PERTANAHAN							
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	42	72	80	86,8	94,8	BPKD



Capaian indikator kinerja kunci urusan bidang pertanahan selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase sertifikat aset tanah dan bangunan milik pemerintah kota tercatat sebesar 42%. Angka ini meningkat tajam menjadi 72% pada tahun 2021, lalu terus bertambah menjadi 80% di tahun 2022. Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 86,8%, dan akhirnya mencapai 94,8% pada tahun 2024. Peningkatan capaian ini mencerminkan upaya yang konsisten dan efektif dari pemerintah daerah dalam mensertifikatkan aset tanah dan bangunan, sehingga mendukung kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan aset daerah

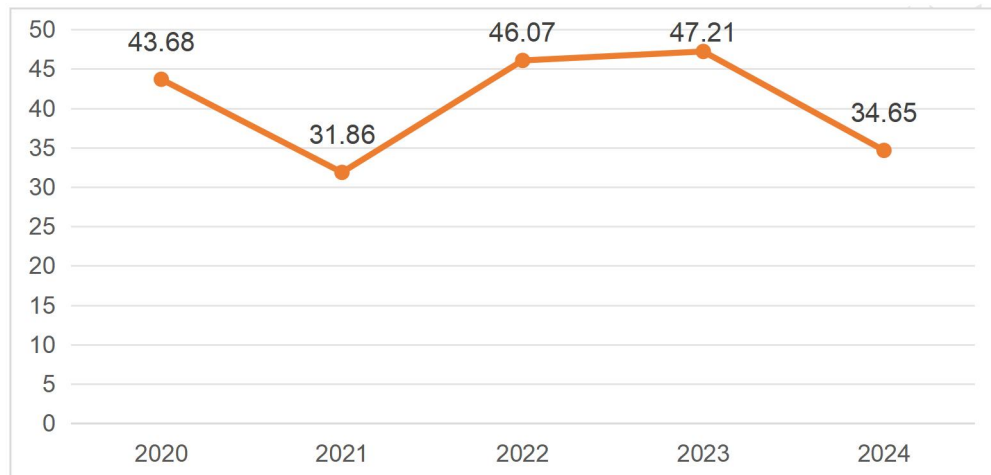
e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kota Padang Panjang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu:

1. Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air. Perhitungan IKA mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai IKA mengacu kepada 8 (delapan) parameter air, yaitu TSS, pH, DO, COD, BOD, Total Fosfat, Nitrat dan Fecal Coli. Capaian IKA Kota Padang Panjang dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.20
Nilai Kualitas Air (IKA) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat pada nilai IKA Kota Padang Panjang sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cenderung berfluktuasi, Pada Tahun 2021, nilai IKA mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir yaitu 31,86. Namun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan nilai IKA menjadi 46,07 dan Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 47,21, namun tahun 2024 kembali turun menjadi 34,65. Penurunan ini disebabkan oleh posisi geografis seluruh ruas sungai yang berada di Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai Kota Padang Panjang yang berada pada batas daerah tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air. Hal ini dibuktikan dengan sudah tercemarnya sungai di Kota Padang Panjang dari hulu. Faktor lain yang menyebabkan turunnya capaian IKA adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter fecal coli hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang. Hasil evaluasi IKA Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 yang secara umum telah melebihi baku mutu yang telah ditetapkan atau mempunyai kategori kurang.

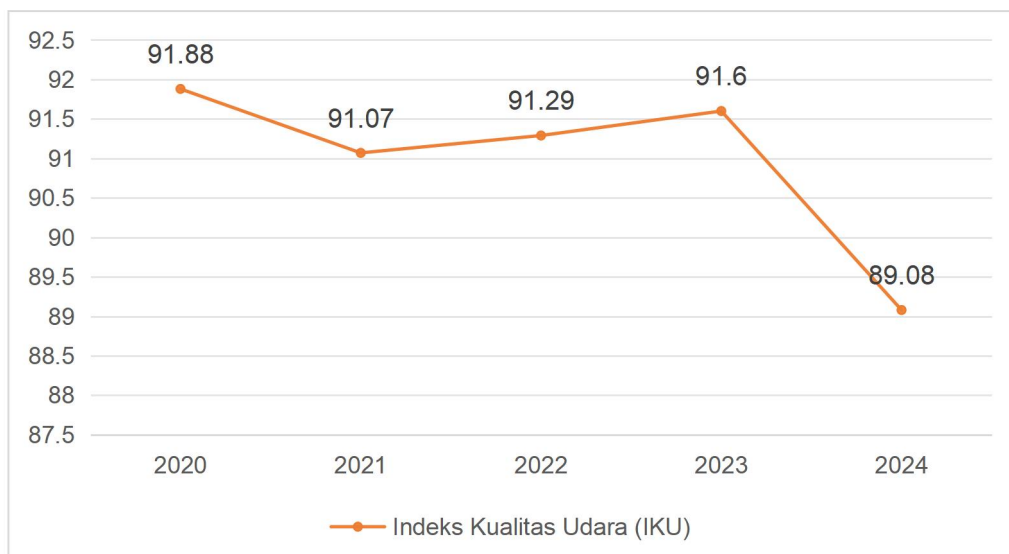
Beberapa upaya pencegahan/antisipasi yang telah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten tetangga untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan antar Kabupaten Kota, melaksanakan program peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah domestik khususnya tinja sebelum dibuang ke badan air serta melakukan pembangunan jamban sehat/tanki septik individual bagi masyarakat yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan data hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh pusat (Ditjen PPKL dan P3E), Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung terhadap udara ambien pada wilayah yang mewakili jalan utama, area pemukiman, area perkantoran dan area industri. Pengukuran dilakukan dengan metode passive sampler pada 4 (empat) titik di Kota Padang Panjang dengan frekuensi pemantauan 2 kali setahun yang masing-masing frekuensi terdiri dari 14 hari. Metode passive sampler ini dilakukan untuk 2 parameter yaitu SO_x dan NO_x. Hasil pengukuran dengan metode passive sampler ini dijadikan sebagai data dasar perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang.

Adapun hasil dari pengukuran kualitas udara di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.21
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Dari gambar di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Padang Panjang selalu berada di atas angka 91 untuk periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang mengategorikan rentang indeks kualitas udara, Kota Padang Panjang berada dalam kategori "Sangat Baik" selama periode tersebut. Namun tahun 2024 turun menjadi 89,08 dengan kategori "Baik", penurunan ini disebabkan oleh erupsi gunung merapi sepanjang tahun 2024.

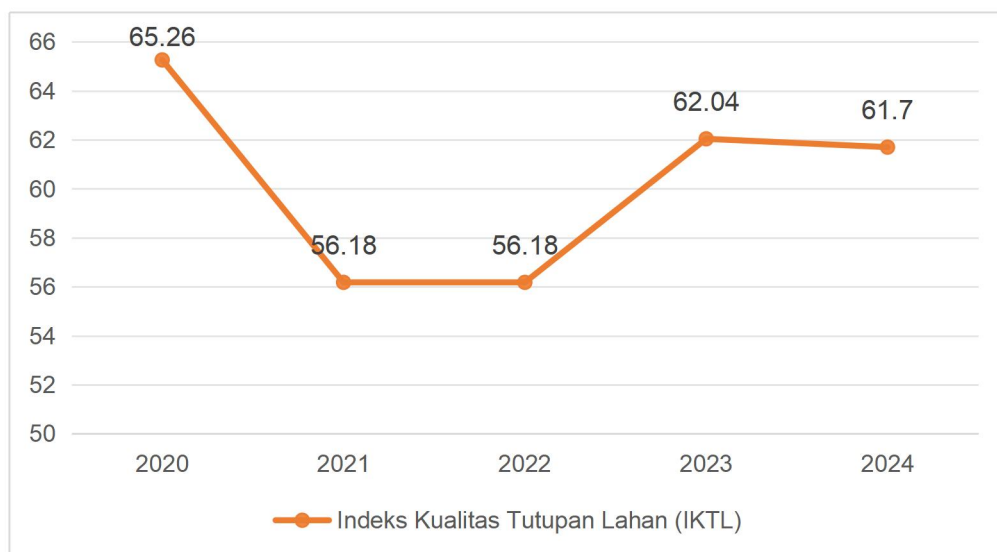
Mobilisasi kendaraan bermotor dan aktivitas rumah tangga merupakan sumber tekanan terhadap penurunan kualitas udara. Kegiatan transportasi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi yang menurunkan kualitas udara, di samping itu Kota Padang Panjang juga merupakan jalur perlintasan antar kota. Dengan demikian, kota ini menerima tekanan dalam hal peningkatan pencemaran udara oleh emisi gas kendaraan.

Jenis kendaraan di Kota Padang Panjang didominasi oleh kendaraan penumpang, pribadi dan kendaraan roda dua. Pada jam-jam tertentu dan pada ruas jalan tertentu di Kota Padang Panjang terjadi kepadatan lalu lintas yang berakibat penggunaan bahan bakar menjadi meningkat dan menghasilkan emisi dari sisa pembakaran kendaraan bermotor tersebut.

3. Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Sedangkan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut adalah nilai yang menggambarkan kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Karena di Kota Padang Panjang tidak terdapat lahan gambut maka penentuan nilai IKL didasarkan kepada nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pengukuran IKTL dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara terhadap lokasi kawasan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Data perhitungan IKTL pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 didapatkan dari perhitungan yang dikeluarkan oleh KLHK, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.22
Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024





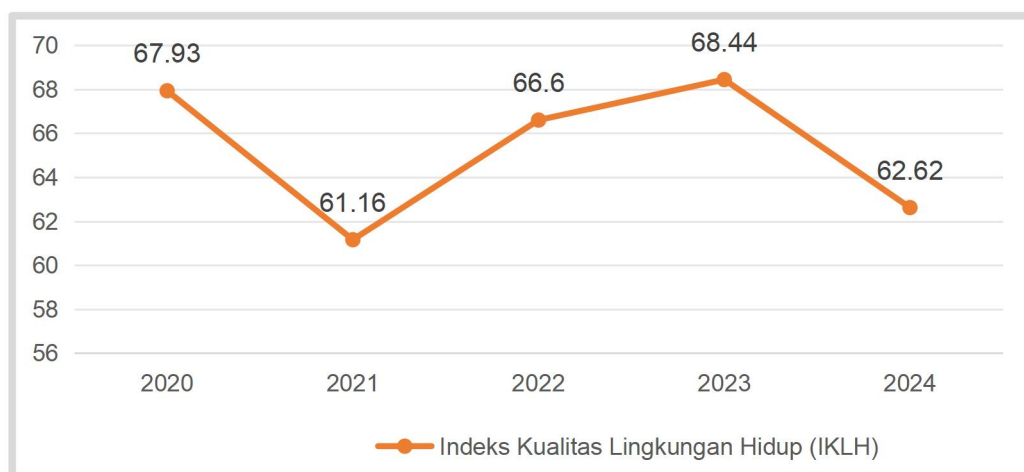
Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai IKTL Kota Padang Panjang dari Tahun 2020 sampai 2024 nilai IKTL tetap berada pada angka berfluktuatif yang berada pada kisaran 56 sampai 66, pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 menjadi 56,18 dan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 62,04, kenaikan pada Tahun 2023 ini disebabkan karena dilakukan deliniasi ulang terhadap tutupan lahan Kota Padang Panjang sehingga didapatkan kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2024 nilai IKTL Kota Padang Panjang mengalami penurunan menjadi 61,7 penurunan ini disebabkan adanya alih fungsi lahan, namun tahun 2024 Nilai IKTL kota Padang Panjang kembali turun menjadi 61,70 yang disebabkan beberapa titik RTH yang didelineasi tidak dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sementara waktu sanggah itu mengkonfirmasi hal tersebut sudah berakhir. Meskipun terjadi penurunan, secara keseluruhan nilai rata-rata IKTL masih berada pada kategori “sedang”, yang mencerminkan bahwa pengelolaan tutupan lahan di Kota Padang Panjang masih membutuhkan perhatian lebih agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas tutupan lahan di masa depan.

Berdasarkan tiga Komponen penentu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di atas, dapat dilihat nilai IKLH kota Padang Panjang pada gambar berikut:

Gambar 2.23

**Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai IKLH Kota Padang Panjang untuk Tahun 2020-2024 berada pada rentang 61 sampai 69 dengan nilai terendah dicapai pada Tahun 2021 yaitu sebesar 61,16 dan nilai tertinggi pada Tahun 2023 dengan nilai 68,44. Tahun 2024 IKLH Kota Padang Panjang adalah 62,62 lebih rendah dari nilai tahun 2023 hal ini disebabkan nilai IKLH

dihitung dari rumus yang didapatkan dari perhitungan IKA, IKU dan IKTL karena nilai IKA, IKU dan IKTL mengalami penurunan sehingga menyebabkan nilai IKLH juga mengalami penurunan.

4. Persampahan

Dalam upaya penanganan sampah, Kota Padang Panjang ditunjang oleh sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sistem pengangkutan sampah di Kota Padang Panjang menggunakan sistem wadah angkut (*Hauled Container System*, HCS) dan sistem wadah tinggal (*Stationary Container System*, SCS). Sistem HCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS berupa kontainer menggunakan alat angkut *armroll truck*, sedangkan sistem SCS digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS bak bata dan bak kayu menggunakan *dump truck*. Kapasitas alat angkut *dump truck* dan *armroll truck* masing-masing 8 m³ dan 6 m³, dengan jumlah *dump truck* sebanyak 8 unit dan *armroll truck* sebanyak 2 unit.

Upaya pengurangan sampah yang sudah ada di Kota Padang Panjang adalah sistem bank sampah dan pengomposan di TPA Sungai Andok. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, saat ini terdapat 7 unit bank sampah yang tersebar di wilayah Kota Padang Panjang. Beberapa aspek pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting*, *biodigester*, dsb; daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Tabel 2.20
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun	% Sampah Terolah	Timbulan Sampah (ton/hari)
	Timbulan Per Kapita Rumah Tangga + Timbulan Per Kapita Non Rumah Tangga	SIPSN
2020	13,21%	46,63
2021	10,95%	48,00



Tahun	% Sampah Terolah	Timbunan Sampah (ton/hari)
	Timbunan Per Kapita Rumah Tangga + Timbunan Per Kapita Non Rumah Tangga	SIPSN
2022	17,47%	48,95
2023	10,12%	49,25
2024	17,07%	50,18

Sumber : SIPSN, diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam persentase sampah yang berhasil diolah di Kota Padang Panjang. Pada tahun 2020, dari total timbunan sampah sebesar 46,63 ton/hari, sekitar 13,21% berhasil diolah. Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan, dengan 10,95% sampah terolah dari total 48,00 ton/hari.

Tren positif terjadi pada tahun 2022, di mana persentase sampah terolah meningkat signifikan menjadi 17,47% dari timbunan harian sebesar 48,95 ton. Namun, capaian ini tidak bertahan lama karena pada tahun 2023 kembali menurun ke 10,12%, meskipun timbunan sampah meningkat menjadi 49,25 ton/hari. Pada tahun 2024, pengolahan sampah kembali menunjukkan perbaikan dengan 17,07% sampah berhasil diolah dari total timbunan yang mencapai 50,18 ton/hari—angka timbunan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun volume sampah terus meningkat, upaya pengolahan sampah masih menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan sistem dan kebijakan yang berkelanjutan.

2) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah diasumsikan sebagai persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola dengan progres Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.21
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
2020	13.586	258	1,90%
2021	14.018	301	2,19%

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
2022	14.295	1307	9,14%
2023	14.383	1375	9,56%
2024	14.810	1427	9,64%

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.19, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam proporsi rumah tangga di Kota Padang Panjang yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah selama periode 2020 hingga 2024. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan ini naik dari 258 pada tahun 2020 menjadi 1.427 pada tahun 2024. Seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga secara keseluruhan, proporsi rumah tangga yang terlayani juga meningkat dari 1,90% menjadi 9,64%. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah daerah untuk memperluas cakupan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan yang cukup tajam, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah masih berada di bawah 10% pada tahun 2024. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan pengumpulan sampah yang optimal.

3) Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kota Padang Panjang berlokasi di Sungai Andok, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Jarak dari pusat kota $\pm$ 2 km. TPA ini sudah beroperasi mulai dari tahun 1988 dan melayani sampah dari dua kecamatan di Kota Padang Panjang. Adapun sistem pembuangan berupa controlled landfill dengan penutupan sampah dengan tanah dilakukan 3-6 hari, yang sebelumnya dilakukan pemerataan dan pemadatan sampah dengan alat berat. Tanah penutup didapatkan dengan membelinya. Menurut hasil pencatatan oleh pengelola TPA, sampah masuk ke TPA sekitar 113-119 m³/hari atau 40 ton/hari. TPA Sungai Andok belum dilengkapi dengan jembatan timbang, sehingga hasil perhitungan timbulan yang masuk hanya dilakukan secara visual dari truk yang masuk, sehingga tidak efektif. Luas lahan TPA sekitar 4,8 Ha dan diperkirakan penuh pada Tahun 2024.



Penanganan limbah B3 berdasarkan data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Panjang Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang mendapat izin pengelolaan limbah B3 di Kota Padang Panjang sebanyak 3 (tiga) usaha dan/atau kegiatan. Izin yang dikeluarkan berupa izin penyimpanan limbah B3 sebanyak 2 (dua) usaha dan/atau kegiatan yaitu RSUD Kota Padang Panjang dan RSI Ibnu Sina, sedangkan 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan lagi berupa izin pengangkutan Limbah B3 yaitu PT Kapur Sirih. Jumlah limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan yang berizin berkisar 20 ton/tahun. Limbah B3 dari kegiatan tersebut diolah oleh pihak ketiga.

5. Air Limbah Domestik

Air limbah domestik berasal dari rumah tangga yang mencakup limbah dari kamar mandi, dapur, toilet, dan cucian. Air limbah ini mengandung zat organik, mikroorganisme patogen, bahan kimia, dan polutan lainnya yang dapat mencemari air tanah dan permukaan jika tidak dikelola dengan baik. Cakupan pengelolaan air limbah domestik ini dapat diukur dengan menghitung jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman.

Akses terhadap sanitasi yang aman penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Capaian sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Sanitasi Kota Padang Panjang Tahun 2022-2024

No	Capaian Akses Sanitasi	2022	2023	2024
1	Akses Aman	12,49%	13,08%	13,13%
2	Akses Layak	73,69%	76,02%	76,07%
	Akses Layak Sendiri	67,19%	69,52%	69,57%



No	Capaian Akses Sanitasi	2022	2023	2024
	Akses Layak Bersama	6,50%	6,50%	6,50%
3	Akses Belum Layak	13,82%	10,90%	10,80%
4	BABS Tertutup	0,00%	0,00%	0,00%
5	BABS	0,00%	0,00%	0,00%
	Total	100,00%	100,00%	100,00%
	Akses Layak + Aman	86,18%	89,10%	89,20%

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Dari tabel di atas terlihat terjadi kenaikan jumlah sanitasi aman dari 12,49% di tahun 2022 dan menjadi 13,13% pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk terus melaksanakan pembangunan sarana prasarana sanitasi berupa IPAL dan jamban individu serta terus melakukan pemicuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi yang aman.

Salah satu elemen kunci dari sanitasi aman adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT adalah fasilitas penting untuk mengolah lumpur tinja dari septic tank agar aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lumpur yang tidak diolah dengan benar berpotensi mencemari tanah, air, dan menyebabkan penyebaran penyakit. Tanpa fasilitas ini, proses sanitasi hanya berhenti pada tingkat rumah tangga dan tidak menjamin bahwa limbah manusia benar-benar ditangani dengan aman.

Data dan informasi mengenai kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang ada di Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.23 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi SPALD-S	IPLT	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SPALD-S			
1	Nama IPLT	IPLT Sei Andok	
2	Status aset	Dalam Proses Serah Terima	
3	Kapasitas IPLT	m ³ /hari	6



4	Tahun Pembangunan	2009	
5	Tahun Rehabilitasi	-	
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	Padang Panjang Timur dan Padang Panjang barat	
7	Wilayah layanan terdekat	km	0,5
8	Wilayah layanan terjauh	km	10
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grit chamber - Gravity Thickener - Kolam anaerob-kolam aerasi-unit desinfeksi - Anaerobic digester-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan rusak	
3	Kualitas Effluen	Sudah dilakukan uji kualitas effluen	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Aspal	

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Tabel 2.24 Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	16,67%
Kapasitas penggunaan truk	50,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	66,67%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	10,46%
Kapasitas IPLT terhadap total RT	6,97%
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Pemukiman	83%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber: Laporan Monev SSK Kota Padang Panjang, 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa kapasitas penggunaan IPLT sampai saat ini baru mencapai 16,67 % dengan kata lain masih banyak kapasitas yang dapat ditampung oleh IPLT. IPLT Sungai Andok saat ini berfungsi walaupun terdapat kerusakan di terhadap pipa penghubung antara bak 1 dan bak berikutnya. Kapasitas IPLT terhadap rumah tangga yang saat ini baru 6,97% dan ditargetkan dapat mencapai 80 % tahun 2025 nanti.



Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dari Tahun 2020 s/d 2024 pada umumnya cenderung meningkat, namun terdapat beberapa indikator yang cenderung fluktuatif. Capaian IKK Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota dan indikator kualitas air. Perhitungan IKLH merupakan formulasi dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari data tahun 2020 hingga tahun 2024 angka capaian IKLH berkisar antara 61,16 sampai 68,44 sesuai dengan kondisi kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan setiap tahunnya. Dari ketiga komponen perhitungan IKLH, Indeks Kualitas Air merupakan point penting yang harus menjadi perhatian karena masih berada pada angka tergolong rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas air sungai adalah karena secara geografis seluruh ruas sungai yang melewati Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai, dimana hulu sungai berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai yang berada pada batas daerah tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan pengendalian pencemaran air. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai, sehingga menyebabkan tingginya angka parameter e-coli hampir disemua sungai di Kota Padang Panjang. Serta dengan adanya bencana erupsi gunung Merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang pada tahun 2024 juga mempengaruhi kualitas air sungai.
- b. Capaian indikator pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang berdasarkan data dari dokumen Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih tergolong tinggi dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 99,19%. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah berupa pengelolaan dan pengangkutan sampah ke TPA Sungai Andok menjadi capaian tertinggi pada indikator ini, sedangkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan masyarakat mulai dari sumbernya masih rendah. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat kondisi TPA Sungai Andok sudah dalam kondisi penuh sehingga pemerintah kota harus mencari alternatif lain untuk pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang kedepannya.
- c. Capaian indikator Persentase luas RTH Publik masih tergolong rendah karena masih jauh dari standar ideal Kementerian Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang dimana luas RTH adalah 10% dari luas wilayah. Pada tahun 2023 terjadi penurunan luas RTH dari 4,23% menjadi 4,18% dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 4,19%. Hal ini disebabkan karena beberapa titik lokasi taman dialih fungsikan ke penggunaan lain seperti akses masuk ke ruko dan rumah penduduk.

Capaian indikator ketaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota cenderung fluktuatif dan tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelaku usaha/kegiatan yang belum sepenuhnya menaati pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam dokumen izin lingkungan yang mereka miliki. Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan maka penanggung jawab usaha juga diberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2024 dari 29 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, terdapat 16 usaha/ kegiatan yang telah taat sesuai dengan dokumen izin lingkungan yang dimiliki. Beberapa indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Lingkungan Hidup,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XI	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99,37	96,99	97.89	82,20	99,19	Dinas Perkim LH
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	31,4	52,4	54.84	30,77	55,17	Dinas Perkim LH
7	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	73	77	78		85	Dinas Perkim LH
3	Persentase luas RTH	%	4,23	4,22	4,23	4,18	4,19	Dinas Perkim



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Publik							LH
4	Persentase pengelolaan sampah	%	99,37	96,99	97,89	82,2	99,19	Dinas Perkim LH
5	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	31,4	52,4	62,68	55,6	55,17	Dinas Perkim LH

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perekaman KTP-el: Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan capaian perekaman yang sangat tinggi, mendekati 100%. Ini mengindikasikan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang optimal dan strategi jemput bola dan sosialisasi yang efektif. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan yang signifikan. Tahun 2022 turun ke 97,45% dan pada tahun 2023 lebih rendah lagi menjadi 96,82%. Penurunan ini disebabkan oleh faktor teknis, yaitu ketersediaan peralatan rekam yang terbatas dan sering terjadinya gangguan jaringan SIAK serta adanya peralihan sistem pengolahan data dari diolah sendiri (oleh Dukcapil Kab/Kota) menjadi diolah Ditjen Dukcapil (Kab/Kota hanya menerima jadi). Di tahun 2024, mulai pulih kembali sehingga perekaman KTP-el naik signifikan ke 99,63%. Hal ini disebabkan adanya upaya perbaikan, evaluasi, dan percepatan layanan di tingkat Disdukcapil mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik (PILPRES, PILKADA dan PILEG) di mana validitas data KTP-el sangat dibutuhkan. Intensifikasi layanan perekaman, termasuk layanan mobile dan layanan khusus untuk pemula dimaksimalkan.

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan identitas hukum anak sejak dini. Hal ini tercermin dari tren capaian positif selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, persentase anak usia 0 hingga kurang dari 17 tahun yang telah memiliki KIA mencapai 82,41%. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 83,42% pada tahun 2021. Capaian ini kemudian melonjak signifikan pada tahun 2022 menjadi 98,24%, sebuah lompatan besar yang menunjukkan efektivitas strategi layanan jemput bola, kerja sama lintas sektor, serta dukungan



dari lembaga pendidikan dan orang tua. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing 97,35% dan 96,99%, angka ini tetap tergolong sangat tinggi dan konsisten berada di atas 95%. Penurunan kecil tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor teknis maupun dinamika data target, seperti masuknya anak usia baru atau perpindahan penduduk.

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA: Pemerintah Kota Padang Panjang senantiasa berkomitmen dalam menjamin pemenuhan hak identitas hukum bagi setiap anak, salah satunya melalui kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen dasar yang sangat penting karena menjadi dasar pengurusan dokumen lainnya, serta pengakuan hukum atas status sipil seorang anak.

Dalam lima tahun terakhir, capaian kepemilikan akta kelahiran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2020, persentase anak yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 97,86%, meningkat tajam menjadi 99,86% di tahun 2021, dan mencapai 99,91% pada 2022, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi sedikit penurunan capaian masing-masing menjadi 91,94% dan 91,61%. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dinamika data penduduk usia anak akibat kelahiran baru yang belum tercatat secara langsung,
- Mobilitas penduduk atau perpindahan keluar-masuk wilayah,
- Keterlambatan pelaporan kelahiran dari masyarakat.

Meski demikian, capaian di atas 90% tetap menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang masih tergolong sangat baik secara nasional. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan untuk memastikan setiap anak yang lahir di Kota Padang Panjang dapat segera memiliki akta kelahiran secara gratis, cepat, dan mudah. Upaya-upaya strategis seperti integrasi pelayanan akta kelahiran dengan fasilitas kesehatan, layanan online, serta kerja sama dengan sekolah-sekolah terus diperkuat untuk mendorong peningkatan kembali capaian di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.26
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun	Sumber Data



			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,93	99,97	97,45	96,82	99,62	Disdukcapi
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	82,41	83,42	98,24	97,35	96,99	Disdukcapi
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,86	99,86	99,91	91,94	91,61	Disdukcapi

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat peningkatan angka TFR dari 2,27 menjadi 2,43 yang disebabkan beberapa faktor antara lain pendidikan yang rendah, ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi yang kurang efektif dan juga terdapat penurunan angka mCPR dari angka 71 % menurun menjadi 63,38. penurunan yang menyatakan bahwa adanya penurunan keberhasilan program KB yang disebabkan belum tingginya kesadaran PUS untuk menggunakan alat kontrasepsi modern yang bisa dilihat tingginya angka unmetneed . namun demikian terdapat peningkatan dari angka Persentase PUS yang mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan 1000 HPK dari 60,15 menjadi 74%, Peningkatan Rata - rata jumlah anak dalam keluarga dari 2,76 menjadi 1,52 , Peningkatan Persentase Ratio Akseptor KB dan Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari 52,65 menjadi 66,46 yang menunjukkan kualitas keluarga sedang membaik dengan indikator -indikator seperti ketentraman , kemandirian, kebahagiaan keluarga meningkat karena meningkatnya kinerja yang merupakan hasil dari meningkatnya kualitas layanan publik, upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, jaminan kesehatan oleh pemerintah Kota Padang Panjang dan bantuan Pemerintah Pusat.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun	Sumber



			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,27	2,51	3 (2.54)	2,51	2,43	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	71	67,57	56.60	66,8	63,38	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,58	27,95	27952	13,45	20,51	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	52,65	54	54.13	65,82	66,46	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	60,15	62,44	66.73	70,12	74	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,76	2,14	2.4	2,33	1,52	Dinas Sosial, P2KB P3A
7	Ratio akseptor KB	%	50,12	50,22	56.6	58,27	63,38	Dinas Sosial, P2KB P3A

h. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dari tahun sebelumnya mengalami gelombang naik turun pada masing-masing indikator :

1. Indeks Kualitas Infrastruktur Perhubungan

Realisasi capaian IKLI Perhubungan tahun 2024 dengan nilai 95,22 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 97,50 hal ini



disebabkan ada beberapa unsur penilaian masyarakat yang bernilai rendah, diantaranya :

- Terdapat beberapa titik traffict light tidak berfungsi di area Ekor Lubuk, dan SMP 1 Padang Panjang dikarenakan persimpangan ini memiliki jarak yang pendek dan berpotensi terjadi kemacetan sehingga traffict light tidak difungsikan atau dihapus.
- Kurangnya personil pengamanan Lalu Lintas sehingga belum optimalnya pengawasan lalu lintas.
- Lahan parkir belum mencukupi, kendaraan parkir sembarangan/ditepi jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

2. Rasio Konektivitas Kota

Realisasi capaian rasio konektivitas kota Padang Panjang tahun 2024 dengan nilai 77,77 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 61,54, hal ini didukung oleh trayek angkutan kota terlayani pada 5 trayek serta beroperasinya bus sekolah di 2 (dua) kecamatan pada trayek yang tidak terlayani.

3. Kinerja Lalu Lintas

Realisasi capaian kinerja lalu lintas Kota Padang Panjang Tahun 2024 dengan nilai 0,39 mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 dengan nilai 0,45, hal ini dipengaruhi oleh faktor volume kendaraan yang cenderung berkurang dikarenakan belum pulih sepenuhnya jalan pasca longsor di Jembatan Tanjung dan jalan Lembah Anai. Capaian untuk Urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perhubungan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XIV	PERHUBUNGAN							
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0.339	0.339	0.339	0,45	0,39	Dinas Perhubungan
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38.84	38.84	38.84	84,62	61,54	Dinas Perhubungan
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	angka	71,10	97,46	96.62	97,50	95,22	Dinas



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Perhubungan							Perhubungan

i. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja kunci antara Tahun 2020-2024. Untuk Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sudah 100% dari Tahun 2020. Sedangkan Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi baru mencapai 78,6% pada Tahun 2024. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sudah 100% pada Tahun 2023 dan berkurang menjadi 98,8% pada Tahun 2024. Kota Padang Panjang telah meningkatkan Indeks domain layanan SPBE tiap tahunnya dimana Tahun 2024 mencapai 3,82. Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga telah meningkat menjadi 3,16 pada Tahun 2024. Terakhir adalah Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) sebesar 88,35% dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) sebesar 100% pada Tahun 2024. Gambaran indikator Kinerja Kunci bidang urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XX	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	54.55	54.55	54.55	54,55	78,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	73.22	52.71	42.00	100	98,8	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	3.55 (Self Assesment)	2.7	2,2	2,81	3,82	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3.01 (Self Assesment)	2.09	2,81	2,93	3,16	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	107.22	89.32	88.42	88,35	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	NA	Dinas Komunikasi dan Informatika

j. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan



masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi Koperasi yang diikuti peningkatan koperasi aktif dan sehat dapat menunjukkan bahwa gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan di suatu wilayah terus tumbuh dan berkembang sehingga mampu mendorong tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam pergerakan perekonomian daerah yang mandiri dan berdikari. Capaian persentase koperasi aktif di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, capaian tertinggi ada di tahun 2022 sebesar 77,27% dan capaian terendah ada di tahun 2020 sebesar 60%. Rendahnya koperasi kategori aktif tersebut disebabkan masih ada koperasi yang sudah tidak beroperasi namun sulit dibubarkan karena koperasi bermasalah dan rumitnya masalah pembubaran.

Indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha di Kota Padang Panjang tahun 2020-2024 mengalami trend fluktuatif, dimana capaian terendah di tahun 2020 sebesar 0,74% dan capaian tertinggi di tahun 2024 sebesar 6,38 % dikarenakan adanya program unggulan provinsi dalam menciptakan wirausaha muda, sehingga minat masyarakat Kota Padang Panjang untuk ikut berwirausaha meningkat. Lebih lanjut, persentase KSP/USP koperasi sehat tahun 2020-2024 cenderung mengalami tren kenaikan, tahun 2023 sebesar 7,80%, dan meningkat di tahun 2022 sebesar 10,75% serta di tahun 2023 sebesar 11,95%. Walaupun trendnya mengalami kenaikan, capaian persentase koperasi aktif juga berfluktuatif di tahun 2020-2024, capaian terendah di tahun 2020 sebesar 17 %, sedangkan capaian tertinggi di tahun 2023 sebesar 75, 4 % dan capaian koperasi sehat juga masih tergolong rendah namun mengalami trend kenaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih lemahnya koperasi di Kota Padang Panjang dalam hal tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan koperasi. Daya saing koperasi masih lemah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya.

Peningkatan jumlah UMKM akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan mampu mendorong pergerakan roda perekonomian daerah. Pameran promosi produk merupakan alat pemasaran yang sangat berharga bagi UMKM. Dengan perencanaan yang baik dan strategi yang efektif, UMKM dapat memanfaatkan pameran untuk meningkatkan visibilitas merek, memperluas jaringan bisnis, dan mendapatkan umpan balik yang berharga dari pasar. Meskipun terdapat tantangan, manfaat jangka panjang dari pameran dapat signifikan bagi pertumbuhan dan kesuksesan UMKM. Capaian persentase peningkatan omset usaha juga mengalami trend fluktuasi, dimana capaian tertinggi di Tahun 2022 sebesar 0.5 % dan capaian terendah di tahun 2024 0.1%.

Persentase UMKM yang telah difasilitasi bantuan usaha di Kota Padang Panjang tahun 2020- 2024 tergolong rendah, angka tertinggi ada di tahun 2020



sebesar 3,3%. Dari data tersebut Belum banyak UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha di Kota Padang Panjang dikarenakan terbatasnya APBD Kota Padang Panjang. Secara rinci capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XVI	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	60	66.66	77.27	74	75.55	Dinas Koperindag
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0.74	0.9	1.23	1	6.38	Dinas Koperindag
3	Persentase koperasi aktif	%	17.25	50	74.58	75.4	73.77	Dinas Koperindag
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	indeks	0.1	0.15	0.18	0.2	0.36	Dinas Koperindag
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada	indeks	0.44	0.48	0.75	0.44	0.24	Dinas Koperindag
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0.12	0.25	0.5142	0.34	0.1	Dinas Koperindag
7	Persentase UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha	%	3.33	2.1	0.36	0.2	0.1	Dinas Koperindag
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	7	7.3	8.2	7	9	Dinas Koperindag
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0.1	0.20	0.03	0.10	0.15	Dinas Koperindag

k. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Untuk tabel Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal Tahun

2020-2024, dapat digambarkan pada Tabel dibawah ini. Indikator tersebut terdiri dari 4 (empat) item yaitu Persentase Kenaikan Investasi yang sangat berfluktuatif tiap tahunnya dimana data Tahun 2024 terjadi kenaikan investasi sebesar 6%. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) terjadi penurunan dimana Tahun 2023 sebanyak 52 investor sedangkan pada Tahun 2024 menjadi 26 investor. Untuk Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengalami kenaikan tiap tahun dengan data Tahun 2024 sebesar 90. Indikator terakhir adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana menunjukkan kepuasan dari masyarakat dengan tingginya angka IKM yang diatas 96%.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Modal,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XVII	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	51	44	6	9	6	DPMPPTSP
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	10	24	20	52	26	DPMPPTSP
3	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	NA	3,87	85	89,26	90	DPMPPTSP
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	88	96,86	96,18	98,06	97,9	DPMPPTSP

I. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga, urusan pemuda dan olahraga merupakan urusan pemerintah non wajib non dasar, penyelenggaraan urusan ini dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu pertama Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dalam kegiatan ekonomi mandiri sangat penting dalam mewujudkan wirausaha muda di Kota Padang Panjang, capaian partisipasi dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan partisipasi dengan angka tahun 2020 senilai 0.18 % dan tahun 2024 menjadi nilai 0.89 %, hal ini dikarenakan adanya pelatihan-pelatihan berbasis ekonomi mandiri oleh OPD teknis, Bank BUMN dan perusahaan swasta.

Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2020-2024 akan menjadikan Kota Padang Panjang Kota Layak Pemuda sesuai Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang



Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Kota Layak Pemuda adalah kota yang memiliki sistem layanan pembangunan kepemudaan yang terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi pemuda dalam pembangunan kota. Dan Kota Padang Panjang Kota Layak Pemuda menjadi salah satu indikator pemerintah daerah dalam urusan kepemudaan.

Indikator kedua Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sangat penting karena memiliki dampak positif yang luas bagi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif tersebut yaitu meningkatkan pengembangan keterampilan dan kompetensi, pengembangan karakter dan moral, peluang jejaring dan hubungan sosial, pemberdayaan dan kemandirian, serta kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Padang Panjang pada tahun 2021 s/d 2024 masih tergolong rendah yaitu sebesar 0,56%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, dan kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

Indikator ketiga rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang dari tahun 2022 - 2024 mengalami kenaikan dengan angka pada tahun 2024 sebesar 0,5 %, hal ini berarti Rasio daya saing keolahragaan Kota Padang Panjang ada karena masyarakat yang melakukan olahraga memiliki aspek kompetitif yang mendorong peningkatan kemampuan, mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, dan memberikan pengalaman yang berharga. Kompetisi dalam olahraga juga memiliki manfaat kesehatan fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga berat badan yang sehat. Sehingga Indikator kinerja Pemerintah terkait jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi dan Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi dari tahun 2020-2024 meningkat dengan Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi Tahun 2024 sebanyak 9 prestasi nasional dan 33 prestasi provinsi, begitu juga Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari Tahun 2020-2024, dimana Tahun 2024 sebanyak 6 prestasi provinsi dan 1 prestasi nasional, ini menandakan bahwa pemerintah kota Padang Panjang memberikan pembinaan kepada para pemuda untuk berprestasi dan mengembangkan diri dalam pembangunan kota dan bangsa. Secara rinci capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pelayanan Kepemudaan Dan Olahraga, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun	Sumbe



			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XV III	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.1898	0.2464	0.4577	0.6766	0.8929	Dinas Porapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.5593	0.87	0.784	0.562	0,56	Dinas Porapar
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	Na	Na	0,1	0,2	0,5	Dinas Porapar
4	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	8 Prestasi provinsi	10 Prestasi provinsi	10 Prestasi provinsi	8 prestasi nasional 62 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	Dinas Porapar
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	4 prestasi provinsi	5 prestasi provinsi	6 prestasi Provinsi	6 prestasi provinsi , 1 prestasi nasional	6 prestasi provinsi , 1 prestasi nasional	Dinas Porapar
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama	Dinas Porapar

m. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024 pada urusan pemerintahan bidang persandian dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada tahun 2023 dan



terjadi penurunan pada Tahun 2024 yaitu menjadi 34% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Persandian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XX	PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	NA	56.59 (self assesment)	66,5 (self assesment)	*34 (BSSN)	Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2020, data mengenai tingkat keamanan informasi Pemerintah Kota Padang Panjang belum tersedia. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, penilaian dilakukan melalui assessment mandiri oleh pemerintah daerah. Hasil assessment menunjukkan tren positif: pada tahun 2022 tercatat nilai 56,59, yang kemudian meningkat menjadi 66,5 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, penilaian dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga otoritatif di bidang keamanan siber nasional. Hasil assessment BSSN menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dengan nilai 34. Perbedaan metode dan standar pengukuran yang lebih ketat dari BSSN dibandingkan assessment internal sebelumnya menjadi salah satu faktor penurunan ini

n. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan kebudayaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, urusan kebudayaan termasuk dalam sektor penting yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Pencapaian IKK Kebudayaan dapat dilihat dari penjabaran di bawah ini.

1. Terlestrinya Cagar Budaya pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100%, turun menjadi 78,57% pada tahun 2022 dan 2023, tetapi kembali naik pada tahun 2024 menjadi 100%;



2. Persentase objek pemajuan kebudayaan mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 73%, tetapi Kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebesar 67,24%;
3. Indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan dapat di ukur mulai tahun 2022 yaitu 78,57%, naik secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 100 % dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar 62,5%;
4. Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 30% meningkat pada tahun 2024 menjadi 54%;
5. Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 20% dan naik pada tahun 2024 menjadi 54%.

Tabel 2.34
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kebudayaan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXI	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	78,5714286	78,5714286	100	Disdikbud
2	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	34	47	65,45	73	67,24	Disdikbud
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	-	-	78,57	100	62,5	Disdikbud
4	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	-	-	30	30*	54	Disdikbud
5	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	-	-	20	20*	60	Disdikbud
6	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	-	-	40	40*	49	Disdikbud



o. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Untuk urusan Pemerintahan bidang Statistik, Indikator Kinerja Kuncinya (IKK) terdiri dari 3 (tiga) item. Yang pertama adalah Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dimana tiap tahunnya sudah menggunakannya sehingga menjadi 100%. Yang kedua adalah Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dimana sudah 100%. Dan yang terakhir adalah Indeks Pembangunan Statistik, pada Tahun 2024 sebesar 1,94. IKK bidang Statistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Statistik,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XIX	STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	NA	NA	2,61	2,61	1,94	Dinas Komunikasi dan Informatika

p. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kemajuan teknologi multimedia telah mempermudah akses terhadap data, berita, dan informasi, sehingga menuntut perpustakaan daerah untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan pemanfaatannya. Untuk tetap relevan, perpustakaan harus bertransformasi menjadi ruang interaktif yang mendukung penciptaan pengetahuan dan inovasi. Oleh karena itu, sistem



operasional perpustakaan perlu beralih dari pendekatan manual ke sistem digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kota Padang Panjang, pengembangan perpustakaan mengadopsi prinsip "Literasi Digital" untuk meningkatkan budaya membaca masyarakat melalui buku fisik dan sumber daya digital. Penerapan teknologi ini memungkinkan perpustakaan untuk secara bertahap menyamai standar perpustakaan modern yang lebih maju, sekaligus mengoptimalkan peranannya dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Kinerja bidang perpustakaan terlihat melalui dua indikator kinerja kunci, yaitu Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Sebagaimana yang terlihat dari Tabel di bawah ini, dari tahun 2022 hingga 2024, nilai indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang semakin baik, yaitu dari 58,07 pada tahun 2022 menjadi 67,81 pada tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 72,47 pada tahun 2024, atau mengalami peningkatan sebesar sekitar 24,8% selama periode tersebut.

Peningkatan yang konsisten pada tingkat kegemaran membaca menunjukkan keberhasilan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mempromosikan berbagai inisiatif budaya membaca terhadap masyarakat. Inisiatif tersebut di antaranya adalah program kampanye membaca masyarakat, dan peningkatan akses terhadap bahan bacaan.

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami peningkatan yang sangat baik pada tahun 2022 menjadi 86,54, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut menjadi 88,22 pada tahun 2023 dan 96,78 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan sebesar 105% dari tahun 2021 hingga 2024. Capaian ini menunjukkan adanya intensifikasi inisiatif literasi yang efektif, seperti lokakarya literasi masyarakat, program literasi digital, atau intervensi berbasis sekolah. Tren peningkatan yang berlanjut menunjukkan komitmen yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi, menempatkan wilayah ini sebagai pemimpin dalam pembangunan literasi masyarakat.

Bidang perpustakaan menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi dalam mempromosikan kegemaran membaca dan pembangunan literasi. Tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022 menyoroti efektivitas intervensi yang telah ditargetkan sebelumnya. Investasi berkelanjutan dalam infrastruktur perpustakaan, keterlibatan masyarakat, dan program literasi akan sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini. Capaian indikator terkait perpustakaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.36
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perpustakaan,
Tahun 2020-2024



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXII	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n/a	n/a	58,07	67,81	72,47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n/a	47,2	86,54	88,22	96,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

q. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kinerja bidang kearsipan terlihat melalui empat indikator kinerja kunci berikut ini, yaitu: Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas dan Alat Bukti, Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik, Nilai LAKE, dan Rata-rata Nilai LAKI OPD.

Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas dan Alat Bukti adalah sebesar dari 50,07% pada tahun 2021, meningkat menjadi 60,85% pada tahun 2022, melonjak menjadi 82,2% pada tahun 2023, dan sedikit menurun menjadi 81,72% pada tahun 2024. Peningkatan keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sekitar 63,2%.

Peningkatan signifikan dalam ketersediaan arsip mencerminkan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan arsip tersedia untuk akuntabilitas dan tujuan hukum. Pencapaian yang sangat signifikan pada tahun 2023 menunjukkan periode perbaikan sistem arsip yang intensif melalui digitalisasi atau praktik tata kelola arsip yang lebih baik. Penurunan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan pengelolaan arsip, seperti keterbatasan sumber daya, tetapi tren keseluruhan tetap positif.

Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik meningkat dari 69,03% pada tahun 2021 menjadi 69,33% pada tahun 2022, kemudian melonjak menjadi 83,33% pada tahun 2023, dan tetap pada nilai yang sama pada tahun 2024. Peningkatan keseluruhan dari tahun 2021 hingga 2024 adalah sekitar 20,7%. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip untuk Kepentingan Nasional dan Publik yang relatif tinggi tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga integritas arsip untuk tujuan nasional dan publik. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 mencerminkan praktik pengelolaan arsip



yang sangat baik, seperti tata kelola penyimpanan yang lebih baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Nilai LAKE meningkat secara konsisten dari 69,78 pada tahun 2021 menjadi 79,89 pada tahun 2022, 83,99 pada tahun 2023, dan 91,51 pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 31,1% selama periode 2021 sampai dengan 2024. Peningkatan berkelanjutan nilai LAKE menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan arsip yang terdiri dari kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional, termasuk organisasi, aksesibilitas, dan pelestarian. Artinya, tata kelola dan pemantauan yang efektif, menjadikan sistem kearsipan sebagai komponen yang andal dalam administrasi daerah.

Rata-rata nilai LAKI OPD meningkat dari 60,18% pada tahun 2021 menjadi 69,07% pada tahun 2022, 73,47% pada tahun 2023, dan 83,03% pada tahun 2024. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 37,9% selama periode 2021 sampai dengan 2024. Tren peningkatan nilai LAKI menunjukkan perbaikan kinerja kearsipan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini menunjukkan upaya koordinasi dan peningkatan kapasitas yang efektif oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kearsipan di berbagai OPD. Artinya ada perbaikan sistemik dalam praktik kearsipan, yang berkontribusi pada tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik. Berikut tabel capaian dari indikator bidang urusan kearsipan :

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kearsipan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXII	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	n/a	50,07	60,85	82,2	81,72	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	%	n/a	69,03	69,33	83,33	83,33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat							
3	Nilai LAKE	nilai	n/a	69,78	79,89	83,99	91,51	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	n/a	60,18	69,07	73,47	83,03	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Kelautan dan perikanan memiliki dua indikator kunci yaitu: 1) jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP). Produksi perikanan di Kota padang Panjang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya produksi perikanan di Kota Padang Panjang didukung oleh kembali bergeliatnya sektor usaha budidaya perikanan dengan komoditas utama yaitu Ikan Lele, Nila dan Mas. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga jual ikan konsumsi dipasaran dan terjadinya kenaikan konsumsi ikan perkapita pertahun pada tahun 2024 yaitu sebanyak 41,98%, sehingga memicu semangat pembudidayaan ikan di Kota Padang Panjang terutama ikan lele untuk pengembangan budidaya ikan. 2) Peningkatan Produksi Perikanan secara persentase capaian tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan dan tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan tetapi secara kuantitas produksi (ton) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 2.38

Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN							



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	647,95	705,46	735,5	750,028	751,03	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	NA	3,19	5	0,13	0,13	Dinas Pangan dan Pertanian

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi/mengaktifkan sektor produktivitas lainnya. Pariwisata dipandang sebagai industri yang kompleks karena dalam industri pariwisata terdapat industri-industri yang berkaitan seperti kerajinan tangan, cinderamata, penginapan dan transportasi lokal, hal ini senada dengan tujuan pembangunan kota Padang Panjang dimana sektor pariwisata diarahkan kepada pengelolaan potensi wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan, autentik, dan berdaya saing tinggi. Capaian persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang tahun 2024 masih 27,2 %. begitu juga capaian Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota masih fluktuatif dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 19,72 % menandakan masyarakat belum berperan aktif dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara itu tingkat hunian akomodasi di Kota Padang panjang menunjukkan kenaikan dari tahun 2020 - 2024, dengan hasil capaian pada tahun 2024 sebesar 34.17 %. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD dan PDRB menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan nilai Tahun 2024 Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku sebesar 2,89 %, Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD sebesar 2,42 %, begitu juga PAD sektor pariwisata menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024 dengan nilai tahun 2024 sebesar Rp 2.283.382.152. hal ini disebabkan karena telah adanya event-event kepariwisataan yang dilaksanakan pada destinasi wisata. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan telah dilakukan sertifikasi CHSE (Cleaning, Healthy, Safety, Environment) terhadap destinasi wisata dan akomodasi yang ada di Kota Padang Panjang. Dengan adanya sertifikasi CHSE



ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berdampak pada peningkatan PAD Kota Padang Panjang dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara rinci capaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pariwisata,
Tahun 2020-2024

N O	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXIII	PARIWISATA							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-41	-99,0	4,560	30,09	27,02	Dinas Porapar
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-78	-12,	5,044	22,19	19,72	Dinas Porapar
3	Tingkat hunian akomodasi	%	14,02	64,11	30,20	33,28	34,17	Dinas Porapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,64	2,75	2,82	2,81	2,89	Dinas Porapar
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,24	1,7	2,42	2,08	2,42	Dinas Porapar
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	-12,04	7,38	10,47	6,52	3,57	Dinas Porapar
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	Na	Na	204,50 0,000	2.110. 722.32 2	2.283. 382.15 2	Dinas Porapar
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	Na	Na	6	2,33	11,5	Dinas Porapar

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pertanian memiliki delapan indikator kunci yaitu: 1) Produktivitas pertanian per hektar per tahun meningkat setiap



tahunnya kecuali tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2 ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023 sudah melebihi target; 2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; 3) Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani mengalami kenaikan capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dikarenakan Luas Lahan yang ditangani pada sama yaitu seluas 110,3 ha melalui program bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan pelaksanaan inovasi Brigade Perlindungan Tanaman (Brilian); 4) Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian, indikator ini baru ditentukan pada RKPD TAHUN 2024-2026 pada tahun 2024; 5) Produktivitas Padi meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2 ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahanan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023 sudah melebihi target; 2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran



pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; 6) Produktivitas Susu Sapi Perah mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya; 7) Persentase penerapan inovasi teknologi, indikator baru yang adanya pada tahun 2024, indikator ini baru ditentukan pada RKPD tahun 2024-2026 pada tahun 2024; dan 8) Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 diakibatkan oleh lama pemeliharaan ternak (bansos) yang berbeda.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pertanian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXV	PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	5,8	6,3	8,04	7,2	7,2	Dinpaper
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	NA	15,17	39,92	16,98	11	Dinpaper
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	NA	52,38	70	75	75	Dinpaper
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	NA	NA	NA	NA	13,8	Dinpaper
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	5,8	6,3	8,04	7,2	7,2	Dinpaper
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter / ekor / hari	9,64	9,63	11,67	11,2	11,8	Dinpaper
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	NA	NA	NA	NA	33,3	Dinpaper
8	Persentase peningkatan pendapatan petani	%	10	20,15	20,15	20,15	8,5	Dinpaper



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	penerima bansos							



d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen. Capaian persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) di Kota Padang Panjang sudah baik, tahun 2023 sebesar 39 dan 2024 sudah mencapai 64%. Dinas Perdagangan hanya mengeluarkan rekomendasi perijinan usaha perdagangan, untuk izin yang diterbitkan kewenangan dari DPMPTSP. Sarana distribusi salah satunya berupa Alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya). Alat UTTP adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang suatu benda atau bahan yang hasil pengukurannya dapat digunakan sebagai dasar untuk transaksi perdagangan. Agar alat-alat ini dapat dipercaya dan memenuhi standar yang ditetapkan mereka harus melalui proses kalibrasi atau tera ulang dan mendapatkan tanda tera sah. Beberapa alat UTTP yang biasa diterapkan dalam proses tera ulang dan diberi tanda tera sah yaitu timbangan, takal dan meteran, alat ukur listrik, dan sebagainya. Capaian persentase alat UTTP yang di tera ulang dan bertanda tera sah di Kota Padang Panjang selama tahun 2019-2023 cukup fluktuatif, angka tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 83%, dan capaian di tahun 2024 justru menurun menjadi 43%. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran pedagang/pelaku usaha untuk mengikuti tera/tera ulang. Sementara itu indikator LPE sektor Perdagangan Kota Padang Panjang berfluktuasi dari tahun 2020 sampai 2024, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,28 %, sedangkan pada tahun 2024 terjadi penurunan angka senilai 3,98 %, Fluktuasi LPE Sektor Perdagangan disebabkan dengan daya beli masyarakat. Meningkatnya daya beli akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan. Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam menyalurkan barang dan jasa ke konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan nasional. Sektor perdagangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi, bencana yang dapat menurunkan sementara dalam pertumbuhan ekonomi, namun memiliki potensi pemulihan yang kuat setelah pandemi dan bencana berakhir, pada tahun 2024 terjadi bencana alam banjir bandang yang menyebabkan terputusnya jalan lembah anai menuju kota Padang Panjang yang menyebabkan turunnya nilai LPE perdagangan kota Padang Panjang. Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perdagangan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVI	PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	29,8	31,4	33,93	39,2	64,2	Dinas Perdagkop UKM
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	24,9	36,8	73,02	83,3	43,1	Dinas Perdagkop UKM
3	LPE sektor Perdagangan	%	-1,01	3,2	5,28	4,29	3,98	Dinas Perdagkop UKM

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Penyelenggaraan pemerintahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Industri di Kota Padang Panjang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM). Pertumbuhan Tersedianya Informasi IKM tergolong lambat, tahun 2020 sebesar 0,06%, kemudian meningkat menjadi 0,25% di tahun 2020, dan kembali menguat menjadi 0,26% di tahun 2024. Pertumbuhan IKM di tingkat daerah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan nasional. IKM diharapkan mampu mengurangi pengangguran karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya. IKM yang tumbuh dengan pesat akan menggerakkan ekonomi lokal dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Terkait Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), capaian persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri di Kota Padang Panjang tahun 2023 sebesar 6,15% atau masih sangat kecil. SIINAS merupakan sistem yang digunakan oleh Kementerian Perindustrian Indonesia untuk mendata dan



memantau aktivitas industri di seluruh Indonesia. Akun SIINAS wajib dimiliki oleh usaha industri kecil sampai besar. Industri-industri yang memiliki akun SIINAS bertujuan agar mereka mematuhi regulasi dan memastikan bahwa data industri mereka tercatat dengan baik oleh pemerintah. Akun SIINAS juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti insentif, pelatihan, dan bimbingan teknis.

Cakupan bina kelompok penyediaan makan minum termasuk kuliner merupakan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk memajukan industri kecil menengah dengan upaya yang dilakukan antara lain: Peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan. Fasilitas pengembangan kemampuan teknologi industri. fasilitas pengembangan standarisasi produk dan pengembangan pasar. Secara rinci capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perindustrian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVI	PERINDUSTRIAN							
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	Dinas Perdagkop UKM
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0.06	0.25	0.25	0.25	0.26	Dinas Perdagkop UKM
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	Na	Na	55	55	33	Dinas Perdagkop UKM
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	Na	Na	40	40	40	Dinas Perdagkop UKM
5	Persentase pengawasan alat UTTP	%	Na	Na	0	0	5	Dinas Perdagkop



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	yang bertanda tera sah							UKM
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	Na	Na	0	0	14	Dinas Perdagkop UKM
7	Kenaikan volume perdagangan	%	Na	Na	25	25	30	Dinas Perdagkop UKM
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	Na	Na	25	25	30	Dinas Perdagkop UKM

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah dan DPRD

Pemerintah Kota Padang Panjang menunjukkan capaian kinerja yang signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2020 hingga 2024. Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan mencapai angka sempurna, yakni 100% sejak tahun 2022. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2022 juga mencatat indeks yang tinggi. Capaian pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah tetap konsisten sebesar 90% dari tahun 2020 hingga 2024. Demikian pula, kualitas penyelenggaraan sektor ekonomi berhasil mencapai angka maksimum sebesar 100%. Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah juga stabil pada angka 90% selama lima tahun terakhir.

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Padang Panjang menunjukkan tren sangat baik, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 97,16, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya menjadi 96,09 pada 2022 dan 95,26 pada 2023 dan 2024. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) mengalami peningkatan bertahap dari 55,19 pada 2021 menjadi 77,66 pada tahun 2024. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah mencapai puncaknya sebesar 68,25 pada 2023, meskipun nilai tahun 2024 belum dirilis.

Aktivitas keagamaan di masjid berjalan sangat baik, dengan 100% masjid aktif setiap tahunnya. Begitu juga dengan kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan yang juga mencapai angka maksimal 100%. Pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah menunjukkan peningkatan dari 90% (2020–2023) menjadi 95% pada tahun 2024. Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat tajam dari 69,86 (kategori sedang) pada 2021 menjadi 94,46 (kategori tertinggi) pada 2024.



Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Padang Panjang Timur tercatat sebesar 38,78% pada 2024, sementara di Kecamatan Padang Panjang Barat sebesar 38,36% di tahun yang sama. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk kedua kecamatan menunjukkan hasil sangat baik, masing-masing sebesar 98,10% pada tahun 2022 di Padang Panjang Timur dan 97,75% pada tahun 2024 di Padang Panjang Barat.

Terkait persentase fasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan menunjukkan peningkatan dari 4,14% pada 2022 menjadi 68,61% pada 2024. Produksi perda juga mengalami fluktuasi, dengan persentase 8,71% pada 2022, meningkat menjadi 52,84% pada 2023, dan 52,18% pada 2024.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap DPRD mencatat angka maksimal sebesar 100% pada tahun 2020. Jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama juga mencapai angka maksimal 100% pada 2020. Pengadaan barang/jasa melalui metode kompetitif tercatat sebesar 100% pada 2020 dan sedikit menurun menjadi 93,49% dan 94,17% pada 2024. Terakhir, penggunaan Produk Dalam Negeri serta produk dari UMKM dan koperasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar 94,17%, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi lokal.

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Sekretariat Daerah dan DPRD, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
X XVI	SEKRETARIAT DAERAH DAN DPRD							
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	NA	NA	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai LPPD	indeks	NA	NA	Tinggi	NA	NA	Sekretariat Daerah
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	perekonomian							
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88.62 (Sangat Baik)	97.16 (Sangat Baik)	96.09 (Sangat Baik)	95,26 (Sangat Baik)	95,26 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
7	Nilai RB	nilai		55,19	59,4	66,54	77,66	Sekretariat Daerah
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	NA	68,25	63,35	63,4	Belum Rilis	Sekretariat Daerah
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahahtanggaan Sekretariat Daerah	%	90	90	90	90	95	Sekretariat Daerah
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai		69.86 (Sedang)	89.26 (Tertinggi)	90.72 (Tertinggi)	94,46 (Tertinggi)	Sekretariat Daerah
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	NA	NA	39	NA	38,78	Sekretariat Daerah
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	88.97 (Sangat Baik)	97.80 (Sangat Baik)	98.10 (Sangat Baik)	93.3 (Sangat Baik)	94,37 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan	%	NA	NA	39	NA	38,36	Sekretariat Daerah



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat							
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	91.75 (Sangat Baik)	97.7 (Sangat Baik)	91.83 (Sangat Baik)	93.9 (Sangat Baik)	97,75 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	NA	NA	4,14	NA	68,61	Sekretariat DPRD
19	Persentase perda yang ditetapkan/dihasilkan	%	NA	NA	52,58	NA	37,28	Sekretariat DPRD
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	NA	NA	8,71	NA	52,18	Sekretariat DPRD
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indeks	100	96,53	79,96	95,83	96,46	Sekretariat DPRD
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	100	96,67	92,08	91,67	91,88	Sekretariat Daerah
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	80	52,5	50	93,49	Sekretariat Daerah
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	96,6	86,02	93,75	94,17	Sekretariat Daerah
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	100	96,6	86,02	93,75	94,17	Sekretariat Daerah



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemerintah Daerah							

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk unsur perencanaan adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dimana berdasarkan sasaran strategis RPD tahun 2024-2026 yang menjadi tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yakni : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKK : Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota), dengan sasaran : 1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan (IKK Indeks Kualitas Perencanaan), 2) Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (IKK : Indeks Inovasi Daerah).

Indeks Kualitas Perencanaan untuk tahun 2024 ditargetkan dengan indeks 70,00 dengan realisasi 72,20 maka capaian kinerja sebesar 103,14%. Indeks Inovasi Daerah untuk tahun dari tahun 2021 sampai dengan 2024 ditargetkan dan realisasi indeks "Sangat Inovatif" dengan capaian kinerja 100%. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota untuk tahun 2024 ditargetkan 19,19 dengan realisasi 22,93 maka kinerja sebesar 119,49%. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Perencanaan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVII	PERENCANAAN							
1	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	NA	NA	NA	NA	72,2	Bappeda
2	Indeks Inovasi Daerah	indeks	NA	Sangat Inovatif (64,08)	Sangat Inovatif (62,04)	Sangat Inovatif (63,28)	Sangat Inovatif (81,35)	Bappeda
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	21,31	21,52	22,8	22,88	22,93	Bappeda



b. Keuangan

Secara umum kinerja urusan keuangan relatif sudah cukup baik, walau ada beberapa capaian indikator yang berfluktuasi. Hal ini terlihat dari realisasi capaian kinerja beberapa indikator antara lain :

- a. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2020- 2024 mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dengan laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian sistem pemerintahan. Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil penilaian penghargaan tertinggi atas Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .
- b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 15,92% naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 3.90%. Tahun 2024 Rasio PAD sebesar 18,22 % mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 18.41% , tidak tercapai target yang ditetapkan disebabkan bencana tanah longsor akibat lahar dingin erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada tahun 2024 menyebabkan kunjungan tamu yang datang ke Padang Panjang menurun drastis sehingga berdampak langsung terhadap Pajak Restaurant, Hotel dan Pajak Hiburan sehingga penerimaan PAD pada item-item tertentu secara tajam juga mengalami penurunan.
- c. Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah, pada akhir Tahun 2024 hanya memperoleh skor sebesar 63,2. Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah kita masih di bawah target yang ditetapkan hal ini disebabkan Tahun 2024 dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) dimana point yang jadi penilaiannya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk Tujuan Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarnya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD.



- d. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures). Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi belanja untuk urusan pemerintahan umum (misalnya: belanja pegawai, operasional kantor, administrasi umum) dibandingkan dengan total belanja daerah, dengan mengurangi pengeluaran yang sifatnya transfer (seperti dana bagi hasil, bantuan keuangan ke desa, hibah, dsb.). Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 84.53 % sampai tahun 2022 sebesar 89.97%, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2024 yaitu 83,98%.
- e. Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mengacu pada perbedaan antara anggaran yang direncanakan (pagu belanja dalam APBD) dengan realisasi belanja yang benar-benar dilaksanakan selama satu periode anggaran. Budget execution tahun 2020 sebesar 8.32% mengalami kenaikan sampai tahun 2022, penurunan terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 2,52% ini menunjukkan realisasi belanja melebihi anggaran sebesar 2.52% dari yang direncanakan di APBD.
- f. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD mengacu pada perbedaan atau selisih antara realisasi PAD yang sebenarnya dengan yang telah dianggarkan dalam APBD. Revenue mobilization juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tahun 2020 sebesar 18.23% dan tahun 2024 mengalami penurunan 13,9%, angka deviasi menunjukkan 13,9% PAD belum tercapai dari target yang telah ditetapkan di APBD.
- g. Manajemen Aset Ini menunjukkan capaian positif, dengan tingkat realisasi yang konsisten dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara lebih efisien dan akuntabel. Kota Padang Panjang dari tahun 2021 sampai 2024 sudah cukup baik dimana Manajemen Aset capaian nya 100%
- h. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya mengukur seberapa besar sisa anggaran yang belum digunakan dibandingkan dengan total pengeluaran pada tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2020 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja sebesar 7.57% sampai tahun 2022 mengalami kenaikan, tahun 2022 sebesar 10.565%, Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8,67%, angka ini menunjukkan sisa anggaran sebesar 8,67% tidak terserap dibandingkan dari total belanja pada tahun sebelumnya.



Meskipun kinerja layanan urusan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sudah cukup baik, namun dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan agar capaian kinerja benar-benar optimal. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Keuangan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
XXVII	KEUANGAN							
1	Rasio PAD	%	3.45	3.90	15,92	18.41	18,22	BPKD
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84.53	8807.53	89.97	86.147	83,98	BPKD
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	na	na	70,61	na	63,2	BPKD
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8.32	8831,63	9.113	8.572	2,52	BPKD
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	18.23	10492,12	7,1432	1.117	13,9	BPKD
7	Manajemen Aset	%	4	100	100	100	100	BPKD
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7.57	9.34	10.565	8.708	8,67	BPKD

c. Kepegawaian

Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah unsur kepegaiwan dilihat dari 8 (delapan) indikator kinerja kunci yakni : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Indeks



Profesionalitas ASN, Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian, Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian serta Indeks Sistem Merit.

Pada Tabel dibawah ini disajikan data kinerja kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar terus mengalami peningkatan dari 74,026% di tahun 2020, 76,01 di tahun 2021, kemudian menjadi 76,9% di tahun 2022 menjadi 78,16% di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 79,91% di tahun 2024. Rasio pegawai fungsional juga menunjukkan terus terjadinya peningkatan dari 2,684% di Tahun 2020, 18,078% di tahun 2021, 20% di tahun 2022 menjadi 22,58% di tahun 2023 dan kembali naik menjadi 22,58% di Tahun 2024. Selanjutnya terkait dengan Sertifikasi Kompetensi, Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 adalah 80,645%, menjadi 18,537% di tahun 2021 kemudian meningkat sedikit demi sedikit menjadi 20,172% di tahun 2022, 25% di tahun 2023, namun terjadi sedikit penurunan menjadi 24,42% di tahun 2023.

Sedangkan untuk Belanja Pegawai, Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan tercatat sebesar 22,012 di tahun 2020, meningkat menjadi 21, 835 di tahun 2021, kemudian menjadi 22,855% di tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 31,624 pada tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 32,872 di tahun 2024. Selanjutnya untuk Indeks profesionalitas ASN menunjukkan peningkatan dari 65,93 di tahun 2020, 70,05 di tahun 2021 dan 76,51 di tahun 2022 menjadi 84,92 di tahun 2023, namun menurun menjadi 77,59 di tahun 2024. Kemudian terkait Pelayanan dan Perlindungan ASN, berdasarkan data yang ada diketahui bahwa Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi dan perlindungan kepegawaian tetap sudah 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Serta terkait Sistem Merit, dimana penilaian Indeks Sistem Merit baru dimulai pada tahun 2021 yang sudah menunjukkan penilaian "Baik" dengan nilai 330 di tahun 2021 dan meningkat menjadi "Sangat Baik" dengan nilai 325 di tahun 2022 dan 2023. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kepegawaian,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PELAYANAN DASAR							
XXVII	KEPEGAWAIAN							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,026	76,01	76.9	78,16	79,91	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,684	18,078	20	21,03	22,58	BKPSDM
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,012	21,835	22,855	31,624	32,872	BKPSDM
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	100	100	100	BKPSDM
8	Indeks Sistem Merit	indeks	-	330 (Baik)	325 (Sangat Baik)	325 (Sangat Baik)	na	BKPSDM

d. Pendidikan dan Pelatihan

Capaian unsur pendidikan dan pelatihan diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN dan rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
XXVIII	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Indeks Profesional ASN	indeks	65,93	70,05	76,51	84,92	77,59	BKPSDM
2	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,645	18,537	20,172	25,00	24,42	BKPSDM

Capaian unsur pendidikan dan pelatihan ASN di Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Indeks Profesionalitas ASN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 65,93, meningkat menjadi 70,05 pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 76,51 di tahun 2022. Tahun 2023 angkanya mencapai 84,92, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 77,59 meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, tren ini mencerminkan adanya upaya konsisten dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, capaian rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 angkanya sangat tinggi yakni 80,64%, namun turun drastis menjadi 18,537% pada tahun 2021. Meskipun demikian, capaian ini terus mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 17,220% di tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 25,042% pada tahun 2023, dan sedikit turun menjadi 24,42% di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi jabatan fungsional masih memerlukan perhatian khusus, baik dalam peningkatan jumlah maupun pemerataan ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi.

e. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Inovasi Daerah yang menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada dalam kategori tinggi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.48 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satua	Capaian Tahun	Sumber



			2020	2021	2022	2023	2024	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
XXVIII	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Capaian Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	Angka	1964 Sangat Inovatif	64,08 Sangat Inovatif	62,04 Terinovatif	63,28 Terinovatif	81,35 Sangat Inovatif	Bappeda

Kinerja inovasi daerah Kota Padang Panjang selama periode 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menggambarkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Pencapaian nilai Indeks Inovasi Daerah dari tahun ke tahun berada dalam kategori Sangat Inovatif, mencerminkan kemampuan daerah dalam menerapkan berbagai terobosan kebijakan, tata kelola, dan pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2020, nilai indeks inovasi mencapai 1.964 dengan metode pengukuran berbasis bobot indikator. Seiring dengan penyesuaian metodologi penghitungan menjadi berbasis indeks mulai tahun 2021, capaian Padang Panjang tetap impresif dengan skor 64,08 dan predikat Sangat Inovatif. Nilai indeks ini cenderung stabil pada tahun-tahun berikutnya, yakni 62,04 pada 2022 dan 63,28 pada 2023, tetap dalam kategori Sangat Inovatif, menunjukkan keberlangsungan penerapan inovasi meskipun terdapat penyesuaian teknis dalam penilaian. Tahun 2024 menjadi tonggak penting, di mana Kota Padang Panjang mencatat peningkatan signifikan dalam nilai indeks menjadi 81,35, mengukuhkan kembali posisinya sebagai daerah dengan tingkat inovasi tinggi.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat

Fungsi penunjang terkait pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa jumlah tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sama dengan tahun sebelumnya (2023) yakni berada pada level 3, yang mana hal ini sudah meningkat dari tahun 2021

dan 2022 yang masih berada pada level 2. Sedangkan untuk Level Maturitas SPIP dan Level Kapabilitas APIP tetap berada di level 3, dimana hal ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya (2021, 2022 dan 2023). Sementara untuk Persentase OPD yang menyatakan puas atas pelayanan Inspektorat terlihat cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2021 sudah mencapai 100%, kemudian turun menjadi 95,80% pada Tahun 2022, naik menjadi 98,45% pada tahun 2023 dan turun lagi menjadi 96% di Tahun 2024. hal ini menunjukkan terjadi sedikit penurunan kinerja pelayanan Inspektorat Kota Padang Panjang di Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Capaian pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pengawasan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
D	UNSUR PENGAWASAN							
XXVII	PENGAWASAN							
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%		Level 2	Level 2	Level 3	Level 3 (3,000)	Inspektorat Kota
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,000)	Inspektorat Kota
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%		100	95,80	98,45	96	Inspektorat Kota

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan Padang Panjang Timur

Kecamatan Padang Panjang Timur telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang mencerminkan arah pembangunan yang partisipatif dan terkoordinasi dengan baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, . Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator kerja utama yang menjadi fokus pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

a. Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan

Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat selama lima tahun terakhir yakni tahun 2020 dan 2021 tingkat partisipasi berada pada 21,78%, yang



mencerminkan kondisi ideal dalam pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkat terus untuk tahun-tahun berikutnya: yaitu 22,17% (2022), 24% (2023), dan 33,2% (2024). Untuk tahun 2021 tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tidak mengalami perubahan masih sama seperti tahun 2020 ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, keterbatasan anggaran partisipatif, serta perubahan pola interaksi sosial. Namun demikian, upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terus dilakukan melalui forum musrenbang kelurahan, sosialisasi pembangunan partisipatif, dan program pemberdayaan berbasis potensi local baik itu kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat maupun melalui pokir dalam Musrenbang.

b. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ini menunjukkan tren yang lebih positif. Dimulai dari 33,93% (2020) dan 35% (2021), 2022 (37%), kemudian 2023 (38%), 38,78% di tahun 2024. Capaian ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam program pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi dan kesinambungan partisipasi dari tahun ke tahun.

c. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan

Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan menunjukkan tren sangat positif dan stabil, mencerminkan kinerja kelembagaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan mulai dari tahun 2020-2024 pencapaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan seluruh urusan yang menjadi kewenangannya dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

b. Kecamatan Padang Panjang Barat

Kecamatan Padang Panjang Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan berbagai capaian kinerja yang mencerminkan arah pembangunan yang partisipatif dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator utama yang menjadi fokus pembangunan di tingkat kecamatan, khususnya pada aspek partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



a. Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan

Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada awal periode, yakni tahun 2020, tingkat partisipasi berada pada angka 81%, yang mencerminkan kondisi ideal dalam pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya: 73% (2021), 35,57% (2022), dan 33,44% (2023), sebelum mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 menjadi 38,36%.

Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemi COVID-19, keterbatasan anggaran partisipatif, serta perubahan pola interaksi sosial. Namun demikian, upaya untuk kembali meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terus dilakukan melalui forum musrenbang kelurahan, sosialisasi pembangunan partisipatif, dan program pemberdayaan berbasis potensi local baik itu kegiatan yang berasal dari usulan aspirasi masyarakat maupun melalui pokir dalam Musrenbang.

b. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan

Indikator ini menunjukkan tren yang lebih positif. Dimulai dari 20% (2020) dan 21% (2021), partisipasi masyarakat mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2022 (35,57%), kemudian sedikit menurun di 2023 (33,44%), dan kembali naik menjadi 38,68% di tahun 2024.

Capaian ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam program pembangunan, baik secara fisik maupun non-fisik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi dan kesinambungan partisipasi dari tahun ke tahun.

c. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan

Indikator ini menunjukkan tren sangat positif dan stabil, mencerminkan kinerja kelembagaan yang baik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 78%, kemudian meningkat tajam menjadi 97,75% (2021) dan tetap berada di angka tinggi pada tahun-tahun berikutnya: 91,75% (2022), 93,90% (2023), dan 100% pada tahun 2024.

Capaian maksimal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan seluruh urusan yang menjadi kewenangannya dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah



Capaian indikator kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kewilayahan,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
D	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR							
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	21,78	21,78	22,17	24	33,2	Kecamatan PPT
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	33,93	35	37	38	38,78	Kecamatan PPT
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	Kecamatan PPT
	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT							
4	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	81	73	35,57	33,44	38,36	Kecamatan PPB
5	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	20	21	35,57	33,44	38,68	Kecamatan PPB
	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	78	97,75	91,75	93,90	100	Kecamatan PPB

8. Unsur Pemerintahan Umum
a. Kesatuan Bangsa dan Politik



Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah salah satu urusan pemerintahan yang berfokus pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ideologi Pancasila, serta menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, urusan ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kehidupan politik dan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, serta pembinaan kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, juga mencakup pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan kewaspadaan nasional, dan penanganan konflik sosial di daerah. Urusan ini diukur melalui tiga indikator yaitu; 1) Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; 2) Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah; dan 3) Persentase Konflik yang tertangani.

Capaian indikator kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan baru mulai dihitung pada 2024 sebagai indikator pengukuran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Pada Tahun 2024, capaian dari indikator ini cukup memuaskan. Namun, cakupan indikator kegiatan pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ini belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sebab masih sebatas siswa yang terlibat dalam kegiatan Paskibraka. Kedepannya, perlu disikapi dengan lebih optimal melalui pelibatan seluruh lapisan masyarakat guna mendukung tercapainya target kinerja terhadap pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

Indikator peningkatan stabilitas daerah juga baru dilaksanakan pengukurannya pada tahun 2024. Meskipun demikian, kondisi tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan terlaksananya koordinasi antara *stakeholder* para pemangku kepentingan. Capaian tersebut harus dipertahankan agar stabilitas daerah di Kota Padang Panjang tetap terjaga dengan konsisten pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, persentase konflik yang tertangani sudah bergerak menjadi lebih baik. Capaian lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah konflik yang tertangani tiap tahunnya. Hal ini tercipta karena adanya koordinasi antar *stakeholder* dan berfungsinya komunitas intelijen di daerah. Kedepannya, lebih difokuskan pada penguatan dalam mengidentifikasi isu dan potensi-potensi konflik secara lebih menyeluruh guna memitigasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu kestabilan daerah.

Capaian indikator kewliayahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun	Sumber

			2020	2021	2022	2023	2024	
A	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	80	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Konflik yang tertangani	%	70	75	90	100	100	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

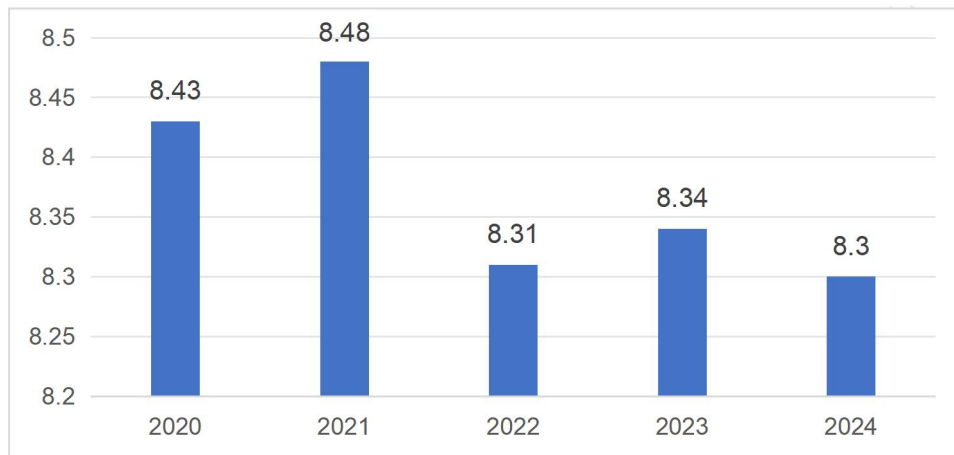
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Peningkatan rasio PDRB industri pengolahan menunjukkan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Iptek dan inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pengolahan, sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang Panjang berfluktuatif dan cenderung turun pada kisaran 8%-10% sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.24
Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang
Periode Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

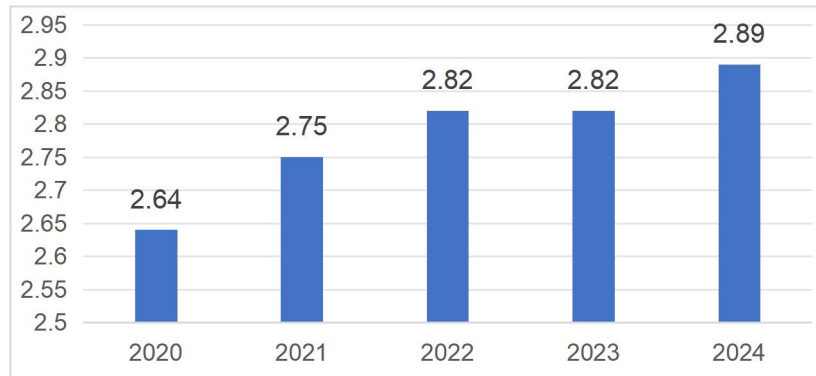
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan perkembangan kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kota Padang dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, kontribusi PDRB industri pengolahan tercatat sebesar 8,43, yang sedikit meningkat menjadi 8,48 pada tahun 2021. Namun, setelah itu kontribusi mengalami penurunan yang signifikan, dengan nilai 8,31 pada tahun 2022 dan 8,34 pada tahun 2023. Di tahun 2024, kontribusi PDRB kembali turun menjadi 8,3. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kenaikan pada tahun 2021, tren umum menunjukkan penurunan kontribusi dari tahun 2020 hingga 2024.

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor akomodasi dan makan minum berperan penting dalam industri pariwisata, yang juga dipengaruhi oleh iptek dan inovasi. Meskipun secara parsial pengaruhnya tidak signifikan terhadap PDRB, secara simultan dengan sektor lain, sektor ini dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Padang Panjang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.25
Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2025

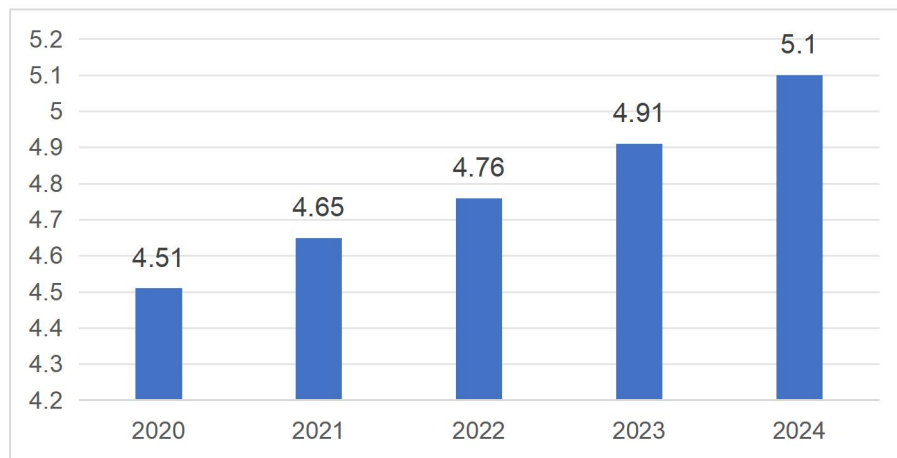
Berdasarkan grafik yang menggambarkan pertumbuhan PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren yang terus meningkat. Pada tahun 2020, sektor ini mencatatkan PDRB sebesar 2,64. Angka tersebut mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya, dengan kontribusi PDRB sebesar 2,75 pada tahun 2021. Peningkatan berlanjut di tahun 2022 dengan nilai 2,82, yang tetap dipertahankan pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024, kontribusi sektor ini tercatat mencapai 2,89. Secara keseluruhan, sektor Akomodasi, Makan, dan Minum menunjukkan kinerja yang stabil dan positif, dengan kontribusi PDRB yang terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya penguatan sektor ini sebagai pilar penting dalam perekonomian Kota Padang Panjang.

C. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aspek daya saing daerah. Ekonomi kreatif, yang mencakup aspek seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan, menawarkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan peningkatan ekspor produk-produk bernilai tambah. Peningkatan proporsi PDRB Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan produk dan jasa unik yang kompetitif di pasar global, serta memperkuat struktur ekonomi daerah dengan meningkatkan diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan yang kondusif, akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan ekonomi kreatif dalam jangka panjang.

Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.26
Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang,
Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif Kota Padang Panjang menunjukkan tren positif selama periode 2020-2024, sebagaimana terlihat pada grafik. Pada tahun 2020, PDRB Ekonomi Kreatif tercatat sebesar 4.51, kemudian mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya, yaitu menjadi 4.65 pada tahun 2021, 4.76 pada tahun 2022, dan 4.91 pada tahun 2023. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan nilai mencapai 5.1. Tren pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang.

D. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

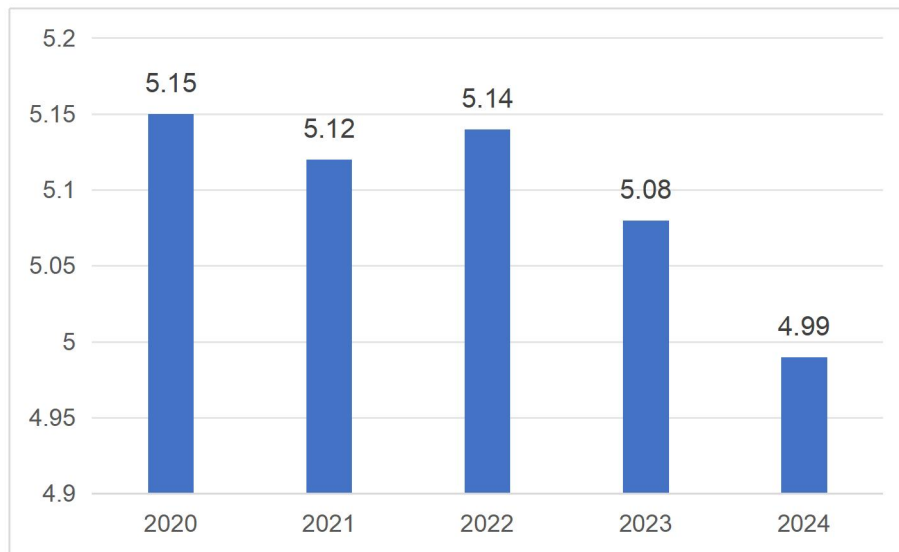
Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat menjadi faktor pendukung utama dalam penerapan ekonomi hijau di daerah. Pada ekonomi hijau, sektor pertanian dan kehutanan memainkan peran penting dalam menciptakan praktik berkelanjutan seperti pertanian organik, efisiensi sumber daya, dan konservasi hutan untuk mengurangi emisi karbon serta menjaga keseimbangan ekosistem. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan inklusi sosial dan efisiensi sumber daya melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kota Padang Panjang mengalami penurunan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio PDRB sektor ini mencapai angka tertinggi sebesar 5.15, kemudian mulai menurun menjadi 5.12 pada tahun 2021 dan 5.14 pada tahun 2022. Penurunan lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rasio sebesar 5.08, dan akhirnya mencapai titik terendah di tahun 2024 dengan nilai 4.99. Tren ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kota Padang Panjang.

selama lima tahun terakhir, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan struktur ekonomi daerah, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, atau pergeseran fokus ke sektor lain yang lebih produktif.

Perkembangan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 2.27
Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

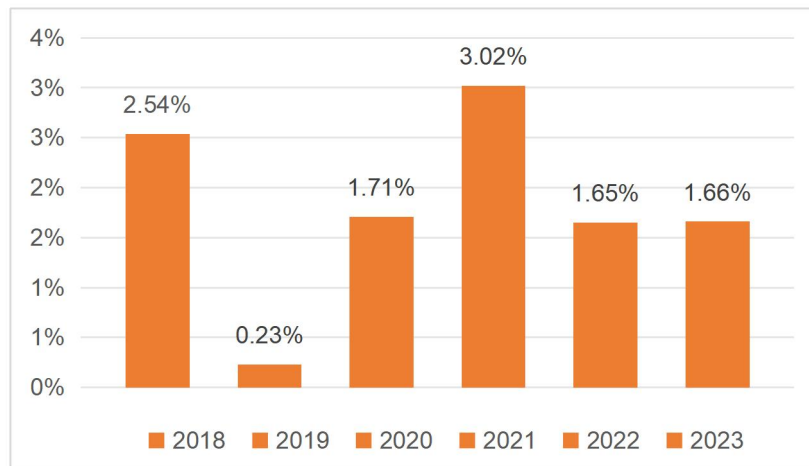


Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

E. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Indikator Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB adalah ukuran yang menunjukkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian suatu daerah dengan membandingkan volume usaha koperasi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Indikator ini penting untuk menilai kontribusi koperasi dalam perekonomian daerah. Rasio ini menghubungkan aktivitas ekonomi koperasi dengan output ekonomi wilayah yang diukur melalui PDRB, sehingga dapat digunakan untuk memantau perkembangan koperasi dan perannya dalam pembangunan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat. Gambaran Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.28
**Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**



Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan, Industri dan UKM, 2025

Dari grafik di atas terlihat fluktuasi yang cukup signifikan dari rasio volume koperasi terhadap PDRB Kota Padang Panjang. Pada Tahun 2018 rasio volume koperasi relatif cukup signifikan (2,54%) namun turun drastis pada Tahun 2019 menjadi 0,23%, hal ini disebabkan karena pendaftaran koperasi pada sistem ODS Kementerian Koperasi UKM yang beralih menjadi keanggotaan lintas kabupaten/Kota, namun pada tahun berikutnya, telah disesuaikan kembali dengan keanggotaan koperasi yang ada dalam Kota Padang Panjang. Volume usaha koperasi ini memberikan kontribusi yang baik, karena sebagai kota yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, maka keberadaan lembaga keuangan masyarakat ini sangat dibutuhkan oleh anggotanya.

F. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB sektor jasa keuangan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar sektor jasa keuangan menyumbang nilai tambah ekonomi di suatu daerah. Rasio ini penting untuk menilai peran sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Sektor jasa keuangan, melalui penyaluran kredit dan layanan keuangan lainnya, menyediakan modal dan likuiditas yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi. Peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap PDRB menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan, mengurangi risiko ketidakstabilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat daerah. Rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2020--2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Rasio Sektor Jasa Keuangan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	4,15	4,46	4,42	4,26	4,31

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

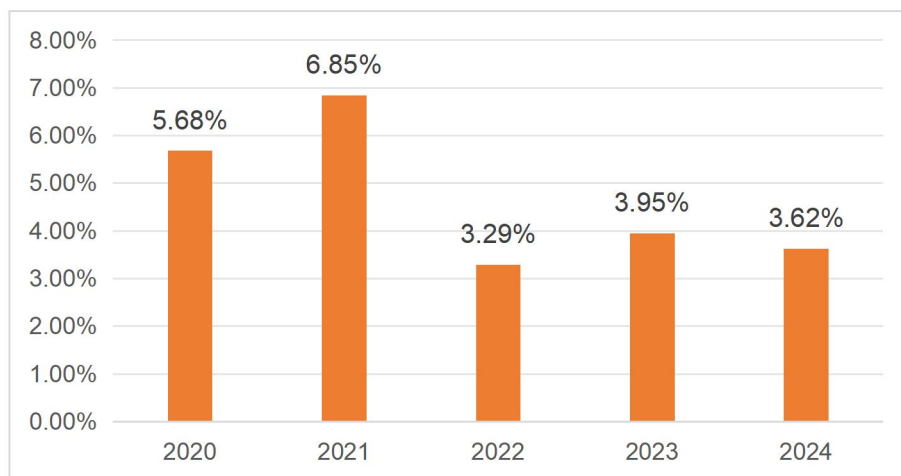
Rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 4,15%, kemudian meningkat menjadi 4,46% pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, rasio ini sedikit menurun menjadi 4,42%, dan kembali menurun menjadi 4,26% pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024, rasio ini kembali meningkat menjadi 4,31%.

G. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah adalah ukuran yang membandingkan jumlah orang yang menjalankan usaha dengan mempekerjakan buruh tetap terhadap total angkatan kerja di suatu daerah pada tahun yang sama. Orang yang termasuk dalam kategori ini adalah pengusaha yang menjalankan usahanya atas risiko sendiri dan mempekerjakan minimal satu pekerja tetap yang dibayar. Rasio ini penting karena menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan yang produktif.

Perkembangan rasio kewirausahaan Kota Padang Panjang dapat dilihat dari grafik di bawah:

Gambar 2.29
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kota Padang Panjang
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025



Berdasarkan grafik di atas, rasio kewirausahaan di Padang Panjang menunjukkan fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 5.68%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 6.85% pada tahun 2021. Kenaikan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah wirausaha yang mempekerjakan tenaga kerja di Kota Padang Panjang.

Namun, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2021, rasio kewirausahaan Padang Panjang mengalami penurunan drastis menjadi 3.29% pada tahun 2022. Meskipun terjadi sedikit kenaikan menjadi 3.95% pada tahun 2023, rasio ini kembali menurun menjadi 3.62% pada tahun 2024.

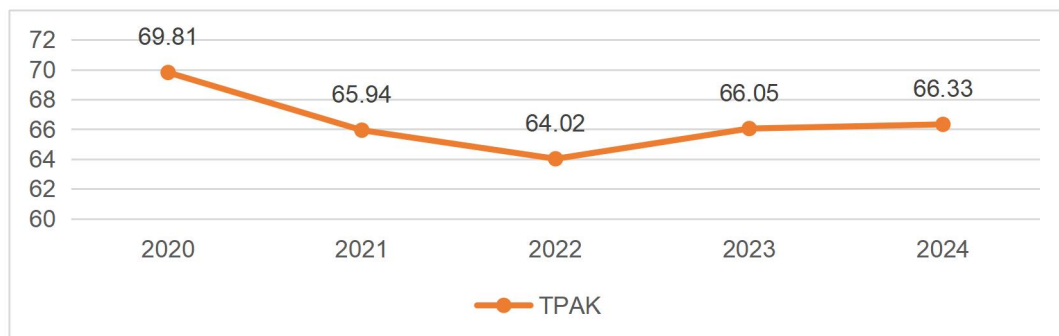
H. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Dengan kata lain, TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam dunia kerja, yang bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing suatu daerah, terutama terkait dengan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), inovasi, serta produktivitas ekonomi. Ketika TPAK tinggi, artinya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga besar, sehingga potensi sumber daya manusia yang mampu mengadopsi dan mengembangkan Iptek serta inovasi menjadi lebih besar.

Perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Padang Panjang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.30
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

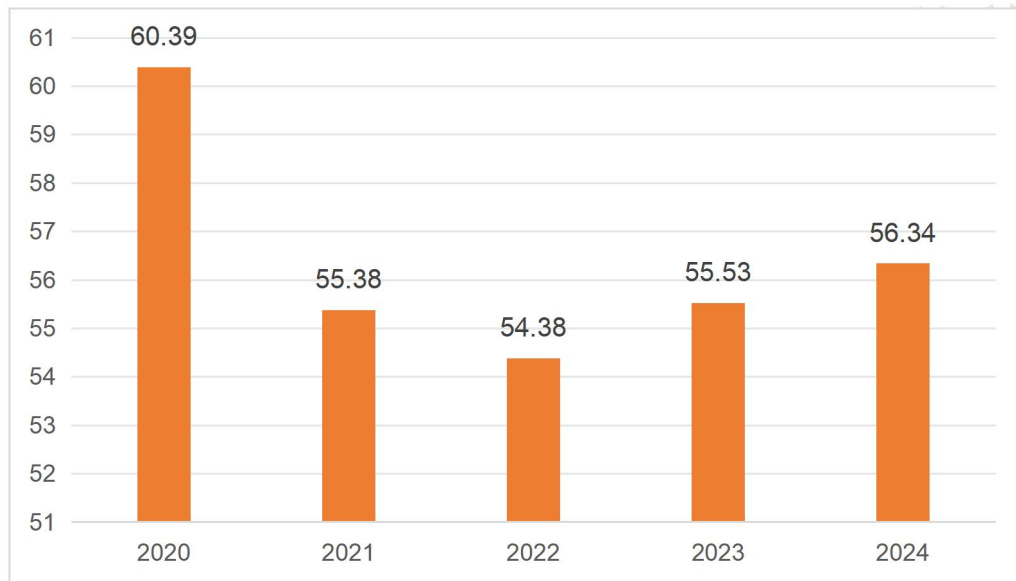


Pada tahun 2020, TPAK berada pada titik tertinggi, yaitu 69,81%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 65,94%. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana TPAK mencapai titik terendah dalam periode tersebut, yaitu 64,02%. Setelah mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, TPAK mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2023, meningkat menjadi 66,05%. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan TPAK mencapai 66,33%, meskipun belum mampu kembali ke level tertinggi pada tahun 2020. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa TPAK mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, dengan penurunan awal diikuti oleh pemulihan bertahap.

I. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah ukuran proporsi perempuan usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Secara matematis, TPAK perempuan dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja, kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. TPAK perempuan mencerminkan besarnya pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angka ini menjadi indikator penting untuk menilai peran dan keaktifan perempuan dalam kegiatan ekonomi serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Gambar 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024



Sumber: sumbar.bps.go.id, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kota Padang Panjang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK perempuan berada di angka 60,39%, menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pasar kerja yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan, masing-masing menjadi 55,38% dan 54,38%, memasuki tahun 2023 dan 2024, TPAK perempuan mengalami tren positif dengan kenaikan berturut-turut menjadi 55,53% dan 56,34%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan peran perempuan dalam dunia kerja, meskipun belum kembali ke tingkat partisipasi tertinggi pada 2020, tren ini mengindikasikan prospek yang baik bagi peningkatan keterlibatan perempuan di sektor ketenagakerjaan.

J. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengacu pada kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau nilai tambah di sektor tersebut. Secara makro, produktivitas ini dihitung sebagai rasio antara Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut, sehingga mencerminkan efisiensi dan hasil produksi rata-rata per pekerja.

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (juta rupiah)	123.840	129.880	136.930	139.490	139.690
Pekerja sektor Pertanian/ Agriculture (orang)	2.214	2.139	2.139	1.942	1.936
Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (juta/orang)	55,93	60,72	64,02	71,83	72,15

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kota Padang Panjang menunjukkan peningkatan dari 55,93 juta rupiah per orang pada tahun 2020 menjadi 60,72 juta rupiah per orang pada tahun 2021. Selanjutnya, terus meningkat menjadi 64,02 juta rupiah per orang pada tahun 2022, mencapai 71,83 juta rupiah per orang pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 72,15 juta rupiah per orang.

K. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

Upaya dan hasil kinerja pengembangan inovasi daerah diukur oleh Kementerian dalam Negeri melalui Penilaian Indeks Inovasi Daerah atau juga dikenal dengan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian indeks inovasi daerah terdiri atas bermacam variabel dengan melibatkan tim penilai dari berbagai unsur (pemerintah, akademisi, profesional, dan lain). Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri atas inovasi daerah yang

dilaporkan maka capaian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Tahun	Nomor Surat Keputusan	Jumlah Inovasi Daerah	Nilai Indeks	Peringkat dan Predikat	Keterangan
2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020	55	1.964	20 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot. Skor bobot masing-masing indikator inovasi diperkecil.
2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.5-5848 Tahun 2021, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021	89	64,08	3 (sangat inovatif)	Penghitungan nilai inovasi berubah dari bobot ke indeks.
2022	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6301 Tahun 2022, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022	117	62,04	Sangat inovatif	Penghitungan indeks berubah dengan memberikan porsi signifikan terhadap kuantitas inovasi
2023	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023	55	63,28	Sangat inovatif	-
2024	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024	154	81,35	Sangat inovatif	-

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Kota Padang Panjang telah meraih penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) kategori “Kota Sangat Inovatif” sebanyak tiga kali berturut-turut. Pada IGA 2024, Kota Padang Panjang melaporkan 154 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri yang berasal dari 23 OPD. Beberapa inovasi unggulan yang dilaporkan pada IGA tahun ini antara lain Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko), Setelah melangsungkan akad, Semua Dokumen Langsung Dibawa (Selalu Samawa) dari Dinas Dukcapil. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan (ASIG PBB) oleh BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, dan *Library Edukasi Entertainment* (Libdutainment) dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

L. Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Gross Fixed Capital Formation*)

PMTB merupakan indikator penting yang mencerminkan investasi fisik dalam perekonomian, seperti pembelian mesin, peralatan, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks integrasi ekonomi, peningkatan keterbukaan perdagangan dan investasi asing langsung (FDI) mendorong pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) karena perusahaan dan investor melakukan investasi modal untuk memanfaatkan pasar yang lebih luas dan efisiensi produksi yang dihasilkan dari integrasi tersebut. Ketika suatu daerah atau kabupaten/kota membuka diri terhadap perdagangan internasional dan menarik investasi asing, maka terjadi aliran modal yang masuk untuk membangun fasilitas produksi, infrastruktur, dan teknologi baru. Investasi ini dapat meningkatkan kapasitas produksi lokal, memperbaiki kualitas produk, dan menurunkan biaya produksi sehingga produk dapat bersaing di pasar global maupun domestik. Dengan demikian, PMTB tumbuh sebagai refleksi nyata dari investasi fisik yang dilakukan untuk mendukung ekspansi ekonomi akibat integrasi pasar global dan domestik. Berikut perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Gross Fixed Capital Formation*) Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024.

Gambar 2.32
Pembentukan Modal Tetap Bruto (*Gross Fixed Capital Formation*) Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber : <https://padangpanjangkota.bps.go.id>, 2025

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota Padang Panjang antara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 dan 2021, PMTB berada di angka sekitar 31%, dengan nilai 31,29% di tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 31,32% pada tahun 2021. Namun, mulai 2022, terjadi penurunan signifikan, dengan PMTB tercatat sebesar 30,21%. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 29,93%, dan terus menurun pada 2024 hingga



mencapai 29,55%. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam sektor investasi dan pembangunan modal tetap yang memerlukan perhatian lebih untuk mendorong kembali pertumbuhannya.

M. Ekspor Barang dan Jasa

Integrasi ekonomi domestik melibatkan kerja sama antar daerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Integrasi ekonomi global memungkinkan kabupaten/kota untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global dengan lebih efektif. Melalui integrasi ini, daerah dapat meningkatkan akses ke pasar global dan menjadi strategi efektif untuk meningkatkan ekspor dan memperkuat posisi ekonomi kabupaten/kota di pasar global. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 5 tahun dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.35
Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa	-4,42%	-3,06%	0,05%	3,23%	4,22%

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di Kota Padang Panjang menunjukkan tren yang menarik selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, ekspor mengalami penurunan menjadi -4,42%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi global. Pada tahun 2021, penurunan tersebut sedikit berkurang menjadi -3,06%, menunjukkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai terlihat. Pada tahun 2022, penurunan ekspor masih terjadi, tetapi dengan tingkat yang hampir sama, yaitu 0,05%, menandakan bahwa proses pemulihan masih berlangsung. Namun, pada tahun 2023, ekspor barang dan jasa Kota Padang Panjang mulai menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,23%, yang menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan aktivitas ekspor. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekspor meningkat lebih lanjut menjadi 4,22%, menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang telah berhasil memulihkan dan meningkatkan kinerja ekspornya secara signifikan.

N. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Kota Padang Panjang

Nilai transaksi saham adalah nilai total dari transaksi saham yang dilakukan oleh para investor yang berdasarkan domisili (kabupaten/kota).

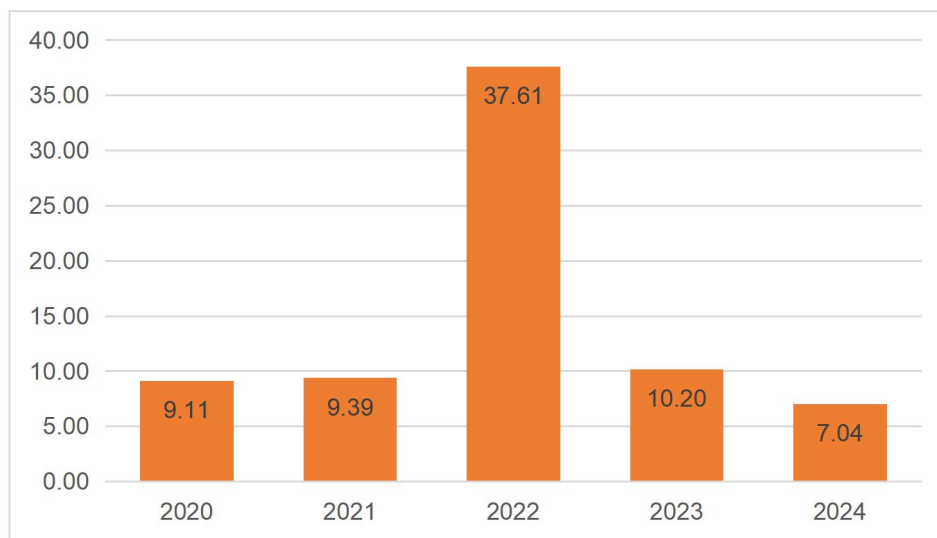


Nilai transaksi saham merupakan hasil dari jumlah atau volume saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.

Secara konkret, nilai transaksi saham per kapita mencerminkan seberapa besar rata-rata nilai perdagangan saham yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah dalam periode tertentu. Ini berkaitan erat dengan kapitalisasi pasar (*market capitalization*), yaitu nilai total pasar dari saham yang beredar, yang menjadi tolok ukur kekuatan dan potensi perusahaan di pasar modal. Integrasi ekonomi global mendorong masuknya investor asing ke pasar saham domestik, sehingga meningkatkan likuiditas dan nilai transaksi saham. Di sisi lain, peningkatan transaksi saham per kapita juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal semakin aktif dalam investasi, yang memperkuat pasar modal domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Perkembangan nilai transaksi saham Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.33
Rata-Rata Nilai Transaksi Saham Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Nilai transaksi saham di Kota Padang Panjang dalam rentang waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik dan mencerminkan respons masyarakat terhadap berbagai kondisi ekonomi, baik lokal maupun nasional. Rata-rata nilai transaksi tahunan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp9,11 miliar, meningkat sedikit menjadi Rp9,39 miliar pada 2021. Namun, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar Rp37,61 miliar, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh meningkatnya literasi keuangan digital serta antusiasme masyarakat terhadap investasi daring pasca pandemi. Sayangnya, setelah lonjakan



tersebut, terjadi penurunan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi Rp10,20 miliar dan Rp7,04 miliar. Penurunan ini perlu dilihat secara hati-hati, karena bisa jadi mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang masih mencari keseimbangan antara kebutuhan harian dan investasi jangka panjang

Sebagai kota kecil yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya di Sumatera Barat, Padang Panjang memiliki karakteristik masyarakat yang unik dan cenderung berhati-hati dalam mengelola keuangan. Hal ini dapat memengaruhi fluktuasi nilai transaksi saham secara langsung. Meskipun nilai transaksi belum sebesar kota-kota besar lainnya, pergerakan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap investasi di pasar modal sudah mulai tumbuh. Maka, ke depan diperlukan upaya berkelanjutan dalam edukasi keuangan dan penguatan ekosistem investasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, agar pertumbuhan nilai transaksi saham tidak hanya menjadi angka, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan literasi finansial warga Padang Panjang secara menyeluruh.

O. Total Kredit per PDRB

Total kredit adalah jumlah dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah. Perkembangan total kredit Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Total Kredit Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023

Tahun	Total Kredit Tahun 2019-2023 (Ribu)				PDRB (Juta)	Total Kredit / PDRB (%)
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	TOTAL		
2020	3.652.042,00	703.050,00	5.962.146,00	10.317.238,00	3.473.230,92	0,297
2021	3.907.150,00	726.502,00	5.614.610,00	10.248.262,00	3.651.118,22	0,281
2022	4.463.220,00	1.011.822,00	5.558.279,00	11.033.321,00	4.086.546,10	0,270
2023	5.114.474,00	1.376.537,00	6.038.078,00	12.529.089,00	4.474.080,00	0,280

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2023, 2024

Rasio kredit terhadap PDRB mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimulai dengan 0,297% pada Tahun 2020, lalu turun menjadi 0,281% pada 2021, 0,270% pada 2022, dan kembali ke 0,280% pada 2023. Rasio ini mencerminkan seberapa besar total kredit yang diberikan terhadap PDRB, yang menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Secara umum, peningkatan total kredit diiringi oleh peningkatan PDRB, menunjukkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh akses terhadap kredit. Meskipun ada fluktuasi, rasio kredit terhadap PDRB tetap stabil, yang bisa menjadi indikasi keseimbangan antara pertumbuhan kredit

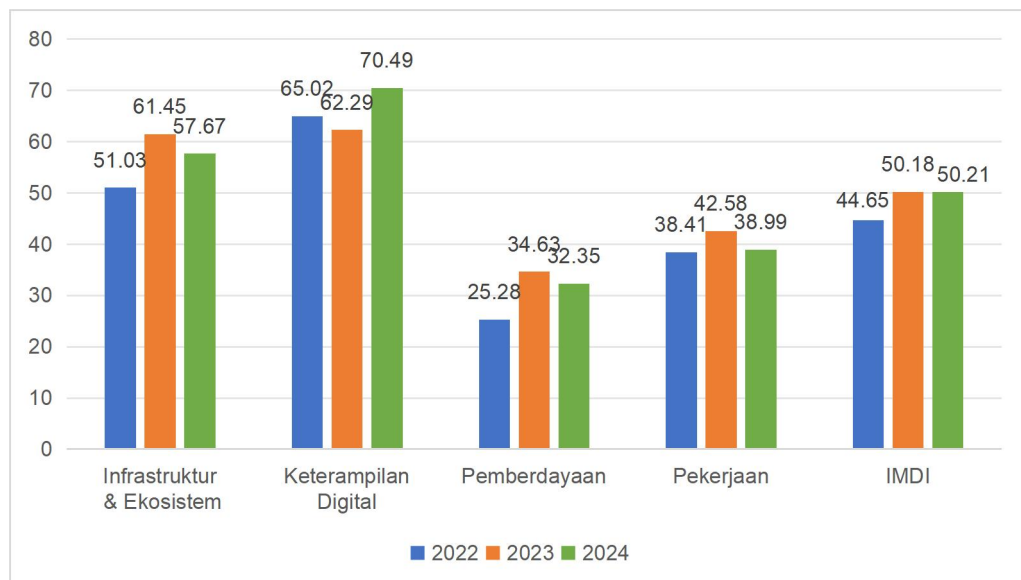
dan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang. Peningkatan terbesar dalam kredit berasal dari sektor modal kerja dan investasi pada Tahun 2023.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

A. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan. Infrastruktur dan Ekosistem adalah untuk Mengukur akses dan kualitas infrastruktur digital. Keterampilan Digital adalah untuk menilai kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Pemberdayaan mengukur kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk produktivitas, dan pekerjaan adalah untuk menilai keterampilan digital yang relevan dengan dunia. Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kota Padang Panjang sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2.34
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Padang Panjang
Tahun 2022-2024



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) untuk Kota Padang Panjang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, IMDI Kota Padang Panjang tercatat sebesar 44,65. Kemudian pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan sebesar 5,53 poin,



mencapai angka 50,18. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan yang cukup besar dalam aspek-aspek yang diukur oleh IMDI, seperti infrastruktur digital, keterampilan digital, pemberdayaan, dan pekerjaan berbasis digital. Memasuki tahun 2024, IMDI Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Indeks tersebut naik sebesar 0,03 poin menjadi 50,21. Meskipun kenaikannya relatif kecil, hal ini tetap menunjukkan adanya perkembangan positif dan konsistensi dalam upaya digitalisasi di kota tersebut.

Peningkatan IMDI Kota Padang Panjang ini sejalan dengan komitmen pemerintah kota dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi. Hal ini tercermin dari keberhasilan Padang Panjang meraih peringkat 1 indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester 1-2023 dengan skor 98,5 di Sumatera Barat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong masyarakatnya untuk semakin akrab dengan transaksi digital.

B. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Kepuasan masyarakat yang disurvei untuk pengukuran IKLI terhadap infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (layanan *website* dan layanan *wifi*), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Layanan infrastruktur Jalan, trotoar drainase, infrastruktur disabilitas), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Layanan Infrastruktur Rumah Layak Huni (Rulahu), Sampah, Jalan Lingkungan, Limbah, dan Ruang Terbuka Hijau), Dinas Perhubungan (Layanan Infrastruktur Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, *Traffic Light*, Petugas, Lampu Jalan, dan Lahan Parkir), serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (layanan infrastruktur pasar) yang mulai dihitung sejak Tahun 2019. Perkembangan capaian IKLI Kota Padang Panjang Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian IKLI Kota Padang Panjang 2019-2023

Survey	2019		2020		2021		2022		2023	
	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	81.84	Baik	72.03	Kurang Baik	85.61	Baik	80.98	Baik	87.54	Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Dinas Perhubungan	70.14	Kurang Baik	71.11	Kurang Baik	97.46	Sangat baik	96.62	sangat baik	97.5	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Jalan, Lampu Penerang jalan dan Trotoar)	76.05	Kurang Baik	77.10	Kurang Baik	96.36	Sangat baik	97.92	sangat baik	96.31	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pasar, Islamic Center dan Ruang Hijau Publik)	66.72	Kurang Baik	78.94	Baik	-	-	89.66	sangat baik	-	-
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	75.14	Kurang Baik	77	Baik	96.90	sangat baik	96.8	sangat baik	98.06	Sangat Baik
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar	70.22	Kurang Baik	68.73	Kurang Baik	78.61	Baik	86.59	Baik	84.08	Baik
Rata-Rata	73.35	Kurang Baik	74.15	Kurang Baik	90.99	Sangat baik	91.43	sangat bai	92.70	Sangat Baik

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Padang Panjang, 2024

Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kegiatan berupa layanan internet Kota, penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu dan lampu jalan, dan trotoar yang ramah disabilitas di kawasan strategis kota serta peningkatan sarana perdagangan pasar baik di pasar pusat maupun pasar kuliner.

C. ROA BUMD

Secara umum, ROA BUMD Kota Padang Panjang menunjukkan adanya tren perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dan efisiensi operasional PDAM Kota Padang Panjang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.38
ROA BUMD Kota Padang Panjang Tahun 2013, 2018, 2023

No	Indikator	CAPAIAN 2013-2023		
		2013	2018	2023
1	ROA BUMD	-4,11%	-2,57%	0,92%

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang, 2024

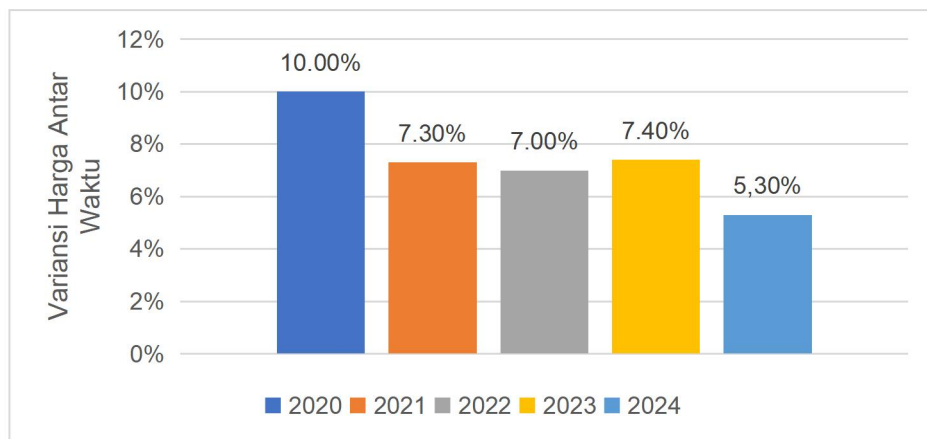
Data Return on Assets (ROA) PDAM Kota Padang Panjang dari Tahun 2013, 2018 dan 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pada 2013, ROA PDAM berada pada angka negatif yang cukup besar, yaitu -4,11%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dari sisi asetnya. Dalam konteks PDAM, kondisi ini bisa mengindikasikan adanya inefisiensi pengelolaan aset atau beban operasional yang tinggi sehingga hasil akhirnya merugi. Di Tahun 2018, ROA PDAM membaik walaupun masih berada di level negatif sebesar -2,57%. Meski demikian, perbaikan dari -4,11% ke -2,57% menunjukkan ada peningkatan efisiensi atau pengurangan kerugian. Ini bisa menandakan

bahwa PDAM telah melakukan beberapa perbaikan atau penyesuaian dalam operasional yang mengarah pada pengelolaan aset yang lebih efektif. Tahun 2023, ROA akhirnya positif di angka 0,92%, menunjukkan bahwa perusahaan sudah mulai menghasilkan laba dari penggunaan asetnya. Ini adalah perkembangan yang baik, mengindikasikan bahwa PDAM Kota Padang Panjang berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan aset, sehingga mampu menghasilkan keuntungan.

D. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang dilihat dari variansi harga antar waktu sebagaimana disajikan gambar berikut:

Gambar 2.35
Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok



Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM, 2024

Dari gambar di atas terlihat bahwa variansi harga antar waktu Kota Padang Panjang cenderung membaik (turun dari 10% pada Tahun 2020, menjadi 7,30% di Tahun 2021 dan 7% di Tahun 2022). Tahun 2023 terjadi kenaikan perubahan harga yang cukup signifikan walaupun tidak ekstrem yang sangat terkait dengan angka inflasi. Hal ini antara lain disebabkan oleh gangguan rantai pasok (akibat bencana, serangan hama, dll.), kenaikan biaya produksi dan perubahan perilaku konsumen.

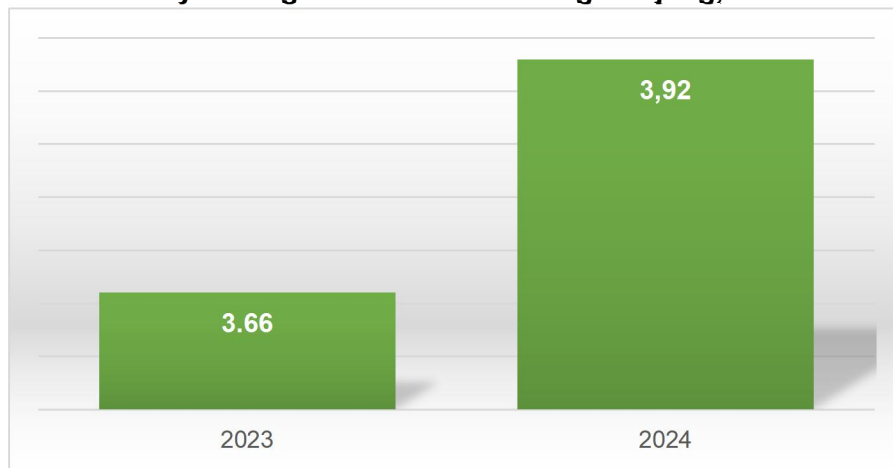
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat yang digunakan untuk memetakan keunggulan dan tantangan yang dimiliki oleh setiap daerah. IDSD mengukur daya saing daerah berdasarkan empat komponen utama, yakni lingkungan penguat, sumber daya manusia (SDM), pasar, dan

ekosistem inovasi, yang semuanya sangat relevan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial suatu daerah. Berdasarkan data IDSD Kota Padang Panjang, pada tahun 2023, Kota Padang Panjang memperoleh nilai 3,66, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan nilai 3,88. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kota Padang Panjang semakin mampu meningkatkan daya saingnya melalui penguatan sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, tenaga kerja terampil, serta sistem keuangan dan inovasi. Melalui pemanfaatan data IDSD ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berfokus pada potensi unggulan, dan memastikan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.36
Indeks Daya Saing Daerah Kota Padang Panjang, 2023-2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kota Padang Panjang berhasil memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,17 berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 659 Tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya yang signifikan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari segi kecepatan, keterjangkauan, transparansi, dan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

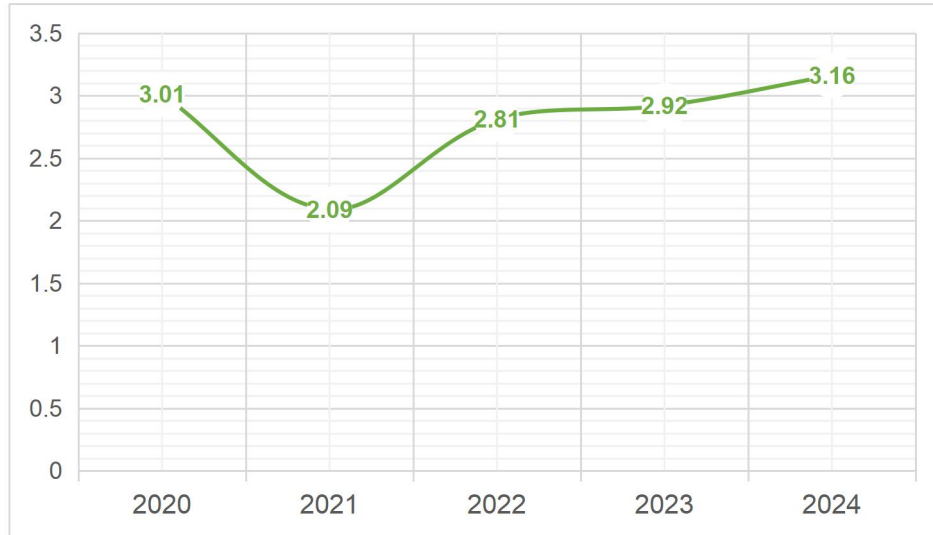
Meskipun sudah ada pencapaian yang baik, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk memperbaiki beberapa aspek layanan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta

peningkatan fasilitas layanan yang lebih ramah dan efisien. Dengan fokus berkelanjutan pada perbaikan pelayanan, Kota Padang Panjang dapat mempertahankan dan meningkatkan skor IPP tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengimplementasikan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Kota Padang Panjang telah menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam penerapan SPBE selama periode 2020 hingga 2024. Pada 2020, Indeks SPBE tercatat 3,01, namun mengalami penurunan menjadi 2,09 pada 2021. Meskipun demikian, Kota Padang Panjang berhasil meningkatkan skor tersebut menjadi 2,81 pada 2022, 2,92 pada 2023, dan akhirnya mencapai 3,16 pada 2024, yang mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam penggunaan teknologi untuk pelayanan publik.

Gambar 2.37
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, 2025

Namun, beberapa faktor penyebab belum optimalnya implementasi SPBE di Kota Padang Panjang antara lain masih terbatasnya pemahaman implementor, serta keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun manusia. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan penerapan SPBE secara menyeluruh, perlu adanya peningkatan dalam hal



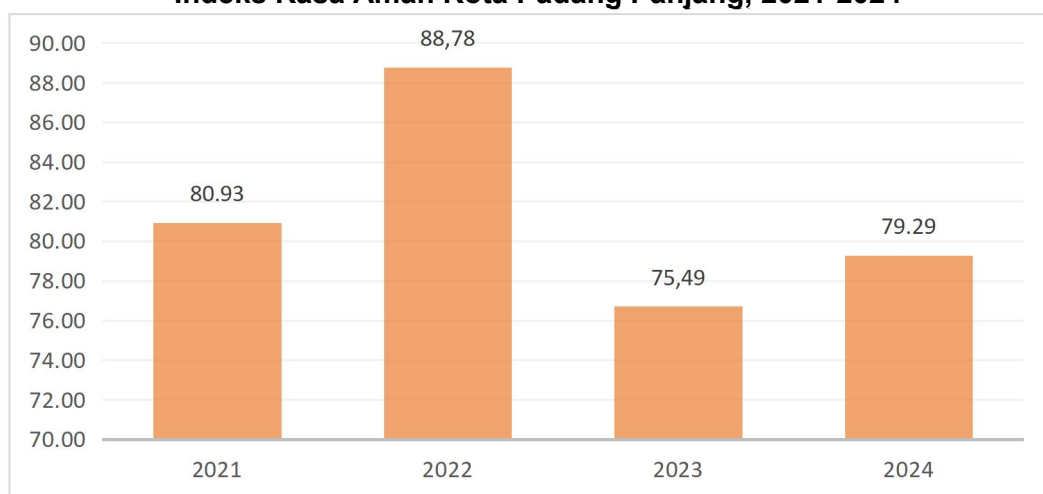
pelatihan sumber daya manusia dan pemeliharaan sistem teknologi, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pengembangan infrastruktur SPBE. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah Kota Padang Panjang dapat terus meningkat.

D. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat keamanan dan ketenteraman yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini mencerminkan sejauh mana masyarakat merasa terlindungi dari ancaman seperti kriminalitas dan gangguan lainnya. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan rasa aman dengan memperkuat sistem keamanan dan penegakan hukum.

Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika tingkat keamanan di daerah ini. Pada tahun 2021, skor Indeks Rasa Aman tercatat 80,93, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 88,78. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 76,70, sebelum kembali meningkat sedikit menjadi 79,29 pada tahun 2024. Peningkatan dan fluktuasi ini menunjukkan upaya yang konsisten dari pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan rasa aman masyarakat, meskipun masih ada tantangan dalam mempertahankan tingkat keamanan yang optimal. Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya untuk memperkuat patroli keamanan, kolaborasi dengan aparat keamanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Gambar 2.38
Indeks Rasa Aman Kota Padang Panjang, 2021-2024



Sumber: Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

E. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil menegakkan peraturan yang ada. Penegakan perda yang efektif mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan aturan diterapkan secara konsisten dan tegas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase ini, Pemerintah Kota Padang Panjang perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya, serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan penyuluhan terkait pentingnya kepatuhan terhadap perda. Selain itu, penyusunan regulasi yang relevan dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar juga menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas penegakan perda dan menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan adil.

Tabel 2.39
Persentase Penegakan Perda yang tertangani Kota Padang Panjang, Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda yang tertangani	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, 2025

F. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan reformasi hukum di Kota Padang Panjang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 dan Nomor 23 Tahun 2024, Kota Padang Panjang berkomitmen untuk melaksanakan reformasi hukum yang meliputi penyederhanaan birokrasi, peningkatan kapasitas lembaga hukum, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Hukum Kota Padang Panjang tercatat sebesar 96,66, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan. Angka ini mencerminkan pencapaian yang berhasil dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan bebas dari praktik korupsi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan transparan bagi masyarakat.

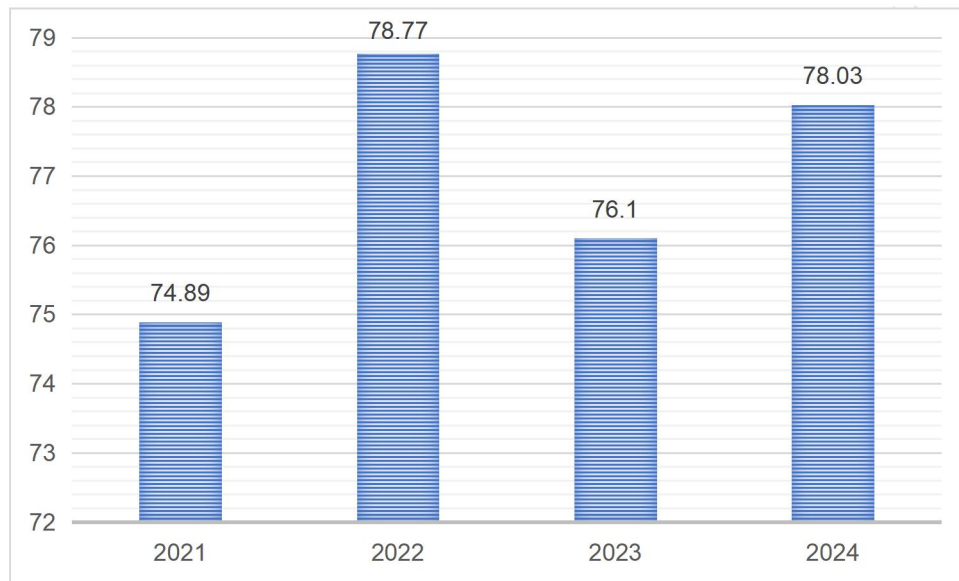


G. Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta penghindaran terhadap praktik-praktik korupsi. Untuk menilai sejauh mana implementasi integritas ini berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin melaksanakan survei penilaian integritas di berbagai instansi pemerintahan. Hasil survei ini memberikan gambaran tentang efektivitas pengawasan internal serta penerapan budaya anti-korupsi yang ada. Hasil penilaian dari KPK ini juga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan pengawasan serta penerapan nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik.

Kota Padang Panjang telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam penerapan integritas pada tingkat pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dalam Indeks Integritas Kota Padang Panjang selama periode 2021 hingga 2024, dengan nilai-nilai yang menunjukkan tren yang konsisten. Pada tahun 2021, Indeks Integritas tercatat sebesar 74,89, yang kemudian meningkat menjadi 78,77 pada 2022. Meskipun terdapat sedikit penurunan menjadi 76,1 pada 2023, Kota Padang Panjang kembali mengalami peningkatan pada 2024 dengan skor 78,03. Meskipun fluktuasi skor terjadi, pencapaian ini tetap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Peningkatan ini juga mencerminkan upaya yang lebih besar dalam memperkuat integritas internal, yang pada gilirannya memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Gambar 2.39
Indeks Integritas Kota Padang Panjang, 2021-2024



Sumber: KPK, 2025

Dengan merujuk pada hasil survei integritas yang dilakukan oleh KPK, Kota Padang Panjang dapat terus mengembangkan kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini akan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin memenuhi harapan masyarakat, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya.

H. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks persepsi anti korupsi merupakan salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani. Indeks persepsi merupakan komposit dari indeks 10 indikator persepsi anti korupsi yaitu indikator manipulasi peraturan, indikator penyalahgunaan jabatan, indikator menjual pengaruh, indikator transparansi biaya, indikator transaksi rahasia, indikator biaya tambahan, Indikator transparansi pembayaran, indikator hadiah dan Indikator pembuatan curang. Dengan analisa bobot setiap indikator dan indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang artinya data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4 dimana nilai skor 1 merupakan skor persepsi paling rendah, nilai skor 1- 2,50 dengan persepsi penilaian kurang bersih, nilai skor 2,5-3,25 dengan persepsi anti korupsi cukup bersih dan nilai skor 3,26-4 dengan skor penilaian Indeks persepsi bersih dari korupsi dan skor ini merupakan skor persepsi paling tinggi yang mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, berdasarkan Survei indeks persepsi anti korupsi di Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebesar 3,92 dengan target skor 3,94 masuk skor dengan kategori bersih dari korupsi.



I. Persentase Capaian Aksi HAM

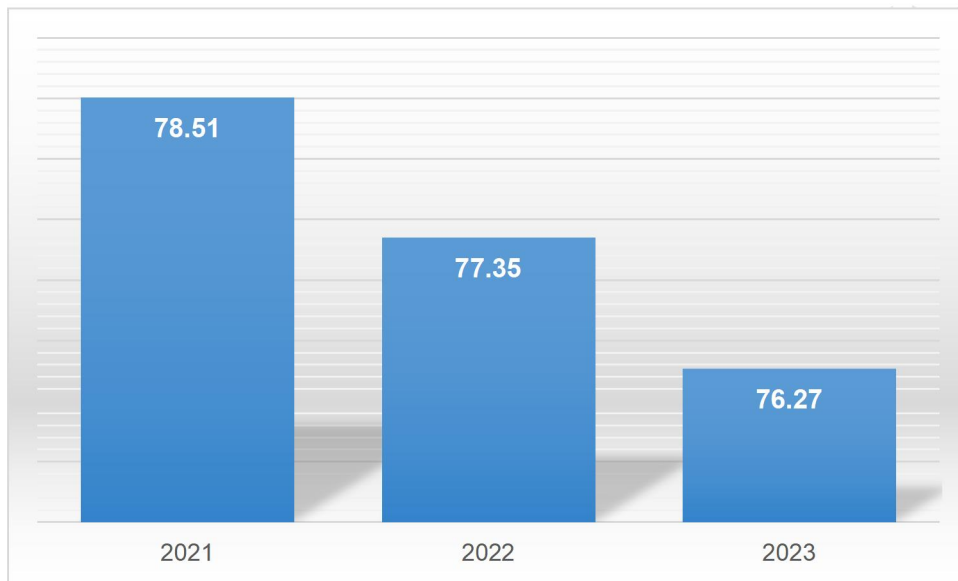
Persentase Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan dan program untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas kehidupan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan kebebasan berbicara. Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia melalui berbagai program, seperti penyuluhan tentang hak-hak masyarakat, pemberdayaan kelompok rentan, dan penanganan kasus pelanggaran HAM.

Untuk meningkatkan persentase capaian aksi HAM, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan HAM dalam setiap sektor pembangunan dan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program-program HAM. Kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil juga penting untuk memastikan pengawasan yang efektif. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia masyarakat Kota Padang Panjang dapat dipenuhi dengan lebih optimal, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

J. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas demokrasi di Indonesia, dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi. Aspek kebebasan mencakup hak-hak sipil, sementara kesetaraan lebih menekankan pada partisipasi politik yang merata, dan kapasitas lembaga demokrasi mengacu pada efektivitas lembaga-lembaga yang mendukung sistem demokrasi. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi acuan untuk Kota Padang Panjang, terlihat penurunan nilai IDI dalam beberapa tahun terakhir, dengan skor 78,51 pada 2021, 77,35 pada 2022, dan 76,27 pada 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan dan memperkuat kualitas demokrasi, yang juga mempengaruhi dinamika di Kota Padang Panjang.

Gambar 2.40
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023



Sumber: <https://sumbar.bps.go.id>, 2025

Meskipun terdapat penurunan pada tingkat provinsi, Kota Padang Panjang berupaya untuk tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang substansial melalui penguatan partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah kota fokus pada peningkatan kapasitas lembaga-lembaga demokratis dan memastikan bahwa proses politik lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui upaya ini, Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi yang ada, mengingat pentingnya demokrasi yang kuat sebagai fondasi bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan.

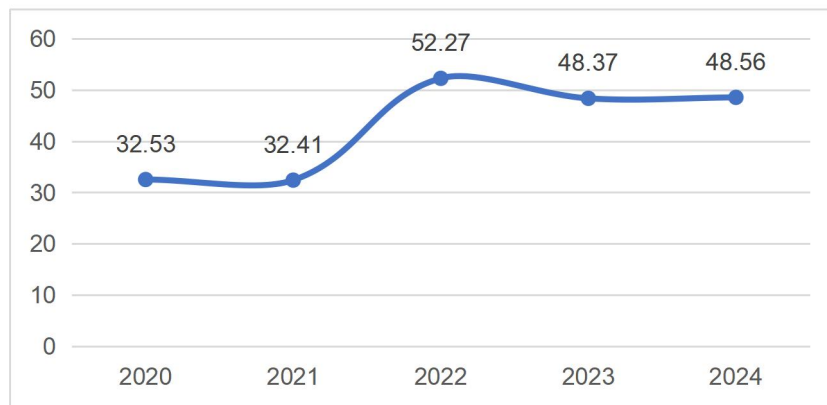
2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang, diukur melalui kemampuan SDM dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan adaptasi terhadap dinamika pasar. Indikator utama seperti Angka Ketergantungan menggambarkan proporsi penduduk non-produktif (usia muda dan lansia) terhadap penduduk usia kerja, yang secara langsung memengaruhi beban ekonomi dan kapasitas akumulasi modal manusia. Tingkat ketergantungan yang tinggi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan vokasi, serta perluasan lapangan kerja. Analisis ini juga mempertimbangkan faktor pendukung seperti akses pendidikan inklusif, program pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal, dan upaya penurunan angka stunting yang memengaruhi produktivitas jangka panjang. Dengan memadukan data kuantitatif dan kebijakan afirmatif, penguatan SDM diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif, adaptif terhadap teknologi, dan berkontribusi pada pengurangan disparitas ekonomi antarkelompok masyarakat.

A. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang dalam lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dikaji. Pada 2020 dan 2021, rasio berturut-turut sebesar 32,53% dan 32,41%, menandakan struktur penduduk yang ideal dengan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun). Namun, terjadi lonjakan signifikan pada 2022 menjadi 52,27%, sebuah peningkatan drastis yang diduga dipengaruhi oleh kombinasi faktor demografis seperti peningkatan angka kelahiran, penurunan partisipasi angkatan kerja pasca pandemi, atau migrasi keluar tenaga kerja muda. Angka ini kemudian mengalami penurunan moderat pada 2023 (48,37%) dan 2024 (48,56%), mengindikasikan upaya stabilisasi melalui perbaikan kondisi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 2.41
Angka Ketergantungan Kota Padang Panjang, 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Tingginya angka ketergantungan pasca-2022 mencerminkan beban demografis yang perlu menjadi perhatian utama. Dengan hampir setengah dari populasi bergantung pada kelompok usia produktif, tekanan pada sektor ketenagakerjaan, layanan pendidikan, dan kesehatan meningkat. Struktur ini berpotensi menghambat akumulasi modal manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Meski demikian, proporsi usia muda yang tinggi juga dapat menjadi aset jangka panjang, terutama jika disertai investasi dalam pengembangan kapasitas generasi muda melalui pendidikan vokasi dan pencegahan stunting.

B. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur

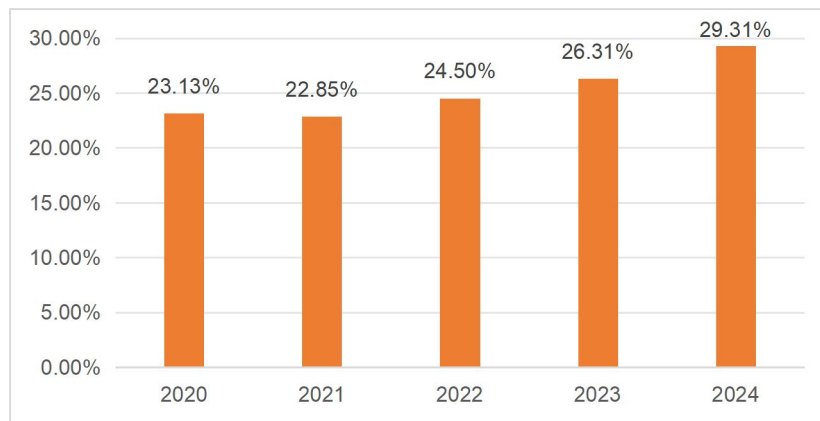


kualitas sumber daya manusia. Pendidikan tinggi tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka untuk berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan meningkatkan produktivitas kerja. Dengan semakin banyaknya penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, maka secara otomatis kualitas SDM akan meningkat, sehingga mampu memenuhi tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif dan dinamis. Hal ini menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional dan global.

Untuk menghitung proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi (D3, S1, S2 atau S3) dengan total penduduk berusia 15 tahun ke atas di wilayah tertentu.

Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.42
Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Berdasarkan data grafik, Kota Padang Panjang menunjukkan perkembangan positif dalam proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dengan angka 23.13% pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan menjadi 22.85% pada tahun 2021, namun kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 24.50% pada tahun 2022. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023 dengan angka 26.31% dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan proporsi sebesar 29.31%.



Apabila di kaji lebih dalam, berdasarkan data BPS dalam Informasi Ketenagakerjaan Padang Panjang Dalam Tahun 2024, bahwa Jumlah masyarakat Usia Produktif di Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah 43.308 jiwa, yang tersebar di dalam kelompok umur seperti tabel berikut:

Tabel 2.40
Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	Perse n	Jumlah	Perse n	Jumlah	Perse n
15-19	2.572	11,91	2.341	10,79	4.913	11,34
20-24	2.503	11,59	2.373	10,93	4.876	11,26
25-29	2.464	11,41	2.542	11,71	5.006	11,56
30-34	2.375	10,99	2.401	11,06	4.776	11,03
35-39	2.200	10,18	2.098	9,67	4.298	9,92
40-44	1.993	9,23	1.901	8,76	3.894	8,99
45-49	1.859	8,60	1.745	8,04	3.604	8,32
50-54	1.604	7,42	1.616	7,45	3.220	7,44
55-59	1.391	6,44	1.416	6,52	2.807	6,48
60+	2.643	12,23	3.271	15,04	5.914	13,66
Total	21.604	100	21.704	100	43.308	100

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

Dengan Capaian Kualifikasi Pendidikan masyarakat Tahun 2023 47,80%, hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu usaha lebih dalam peningkatan tingkat Pendidikan masyarakat, meskipun tidak seluruh masyarakat usia 15 tahun ke atas dapat menempuh jenjang pendidikan tinggi karena faktor usia dan latar belakang pendidikan awal. Akan tetapi upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga agar tidak terjadi angka putus sekolah bagi masyarakat usia sekolah.

2.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Sampai Tahun 2024

Untuk melihat keberhasilan pencapaian pembangunan Kota Padang Panjang sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKPD Tahun 2024, dapat dilihat dari tingkat capaian kinerja dari indikator makro, indikator kinerja utama (IKU), capaian dari pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas pada tahun 2024, serta capaian dari indikator kinerja daerah (IKD) yang berdasarkan dari pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan.

2.2.1.1 Indikator Makro Pembangunan Tahun 2024

Indikator makro yang tercantum dalam RKPD Perubahan Kota Padang Panjang tahun 2024 terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Sebanyak 5 (lima) indikator



mengalami perubahan target yang disebabkan karena adanya koreksi terhadap perhitungan target berdasarkan hasil capaian tahun 2023, penyesuaian dengan arahan dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai kontribusi dalam pencapaian target makro Provinsi Sumatera Barat, serta menyesuaikan dengan angka realisasi beberapa indikator yang telah diterbitkan oleh BPS.

Tabel 2.41
Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,02	80,27	80,60	100,41
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,24	4,64	5,31	87,38
3	Tingkat Pengangguran	%	4,60	4,80	4,94	97,17
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	5,20	4,52	86,92
5	PDRB ADHK per Kapita	Juta	50,87	50,87	50,62	99,51
6	PDRB ADHB per Kapita	Juta	75,58	77,31	80,01	103,49
7	Gini Rasio	Indeks	0,292	0,271	0,266	101,88
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74.20	74.20	62.62	84,34

Sumber: Kota Padang Panjang Dalam Angka 2024, 2025

2.2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan. RKPD Perubahan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, memuat 5 (lima) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator dan 15 (lima belas) sasaran dengan 32 (tiga puluh dua) indikator.

1. Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Tujuan 1 ini memiliki 1 indikator dan 4 sasaran dengan 8 indikator sasaran, dengan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	RKPD 2024



				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
T1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia		80.27	80.60	100.41
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Rata-rata Lama Sekolah	12.04	12	99.67
		2	Harapan Lama Sekolah	15.36	15.47	100.72
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	74.44	74.48	100.05
		4	Prevalensi Stunting	14	9,49	147,52
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	5	Indeks Pemberdayaan Gender	71.44	na	0.00
		6	Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama	100
4	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	7	Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100.00
		8	Rasio daya saing keolahragaan	0.2	0.50	250.00

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024, hampir seluruh indikator berhasil mencapai target kinerja, kecuali Rata-rata Lama Sekolah dengan tingkat capaian 99,67% dari target RKPD 2024. Sedangkan indikator Indeks Pemberdayaan Gender belum dirilis oleh Kementerian terkait. Sehingga tidak dapat diukur pencapaian kinerjanya.

2. Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih dan Akuntabel

Tujuan 2 ini memiliki 1 indikator tujuan dan 1 sasaran dengan 6 indikator sasaran, dengan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih dan Akuntabel Tahun 2024

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		RKPD 2024		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
T2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		67.50	77,66	115,05
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	63.98	64,22	100,38
		2	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71	63.2	89.01
		3	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (330)	-	-
		4	Maturitas SPIP	3 (3.1)	3 (3.0)	96.77
		5	Nilai	91	94,46	103.80



Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		RKPD 2024		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
			penyelenggaraan pelayanan publik		(Tertinggi)	
		7	Indeks SPBE	2.95	3.16	107.12

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024, sebanyak 3 indikator tidak berhasil mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target tujuan 2 ini antara lain:

- a. Nilai Sistem Merit Kota Padang Panjang Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Lembaga terkait. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang mengatur pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Fungsi dan tugas KASN kemudian dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024. Dengan kebijakan tersebut, hingga saat ini belum ada nilai Sistem Merit Pemerintah Kota Padang Panjang yang dirilis oleh Lembaga terkait.
 - b. Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak berhasil mencapai target dikarenakan berdasarkan 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, masih ada dimensi yang capaiannya berada di bawah target, yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran), dimana poin penting penilaian adalah kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, dan dimensi 4 yang mengukur serapan anggaran terhadap APBD yang telah dianggarkan dengan realisasi yang wajib di atas 80%.
 - c. Indikator Maturitas SPIP secara level sebenarnya telah mencapai target, yaitu Level 3, akan tetapi dari hasil simpulan entitas, skor penilaian mandiri kapabilitas APIP adalah 3,000. Skor ini diperoleh dari penilaian atas 6 elemen kapabilitas APIP yang telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus.
3. Tujuan 3: Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan

Tujuan 3 ini mempunyai 2 indikator tujuan dan 4 sasaran dengan 7 indikator sasaran, dengan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Tujuan 3: Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	RKPD 2024		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
T3 Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.20	4.52	86,92
	Indeks Gini	0.271	0.266	101.88
1 Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	1 LPE sektor Perdagangan	5.21	3.98	76.39
	2 LPE sektor pertanian	5.03	0.15	2.98
	3 LPE sektor akomodasi makan dan minum	10.92	7.45	68.22
2 Meningkatnya investasi	4 Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	38,6	643,26
3 Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	5 Tingkat kemiskinan	4.64	5.31	87.38
	6 Tingkat Pengangguran Terbuka	4.80	4.94	97.17
4 Meningkatnya pendapatan masyarakat	7 Pengeluaran per Kapita	11.328	11.840	104.52

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024, terdapat 7 indikator yang tidak berhasil mencapai target, yaitu:

- Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,52% dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 86,92% dari target 5,20%. Capaian tahun 2024 ini turun dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%.
- Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 3,98% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 76,39% dari target 5,21%. Capaian tahun 2024 ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,29%.
- Laju pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2024 sebesar 0,15% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2,98% dari target 5,03%. Capaian tahun 2024 ini turun dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai angka 1,87%. Faktor Bencana alam banjir aliran lahar dingin erupsi gunung Marapi dan serangan hama tikus ini ditengarai menjadi faktor utama yang menyebabkan melambatnya LPE Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lahan produksi sebanyak lebih kurang 21 hektar lahan sepanjang aliran sungai yang berlokasi di kelurahan Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Koto Katik, Guguk Malintang, Pasar Usang dan Silaing Bawah.



- d. Belum tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2024 sesuai target merupakan dampak negatif dari bencana alam lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024. Bencana ini menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup
 - e. Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 5,31% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai angka 5,24%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87,38%. Faktor penghambat keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang antara lain adalah perilaku dan mentalitas penduduk miskin yang kurang mendukung kemandirian ekonomi, seperti rendahnya motivasi kerja, kecenderungan memilih-milih pekerjaan, serta sikap pasif yang lebih mengandalkan bantuan dibandingkan usaha sendiri. Selain itu minimnya lapangan usaha juga berkontribusi pada rendahnya serapan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Masih belum optimalnya koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, mulai dari pendataan sasaran, penetapan penerima bantuan, realisasi program, hingga kesinambungan dan keterpaduan sektor-sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan.
 - f. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 4,94%, turun jika dibandingkan dengan tahun 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai target 4,64% dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,17%. Tidak tercapainya target tingkat pengangguran terbuka ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki pencari kerja dengan yang dibutuhkan dunia usaha, minimnya pengalaman kerja bagi lulusan baru atau *fresh graduate*, sertanya kurangnya investasi dan lapangan kerja baru untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah.
4. Tujuan 4: Terwujudnya Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tenteram Dan Agamis

Tujuan 4 ini memiliki 1 indikator dan 3 sasaran dengan 4 indikator sasaran, dengan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Tujuan 4: Terwujudnya Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Teneteram Dan Agamis Tahun 2024

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		RKPD 2024		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
T4	Terwujudnya tatahan kehidupan sosial masyarakat yang teneteram dan agamis	Indeks Rasa Aman		Aman (86,80)	79,29	91,35
1	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	1	Persentase Pemajuan Kebudayaan	74	66,16	93,18
		2	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	85	71,42	84,02
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100.00
3	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	4	Angka PPKS	4.20	3.69	126,83

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024, sebanyak 3 indikator tidak berhasil mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target tujuan 4 ini antara lain:

- Indeks Rasa Aman, dengan realisasi 79,29, belum mencapai target 86,80 (Aman) dengan tingkat capaian sebesar 91,35%. Indikator Rasa Aman ini diukur dari 4 dimensi, yaitu Persentase Pemajuan Budaya (30%), Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan (35%), Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (20%) dan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (15%). Tidak tercapainya target dari 2 dimensi, yaitu Persentase Pemajuan Budaya dan Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan, sehingga mengurangi nilai dari Indeks Rasa Aman.
- Persentase pemajuan kebudayaan pada tahun 2024 adalah 66,16 dari target yang telah ditetapkan 71.00 sehingga capaian kinerjanya 93.18%. Tidak tercapainya target tahun 2024 ini disebabkan karena dari 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilakukan, masih terdapat 3 langkah pengelolaan yang belum optimal pelaksanaannya, yakni langkah

internalisasi, dokumentasi dan literasi. Pada langkah internalisasi yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang.

- c. Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan mencapai 71,42% tidak berhasil mencapai target 85%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,02%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target ini disebabkan antara lain masih belum semua mesjid aktif melakukan kegiatan wirid remaja. Dari 49 mesjid terdapat 17 mesjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Belum maksimalnya kegiatan remaja masjid ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran.

5. Tujuan 5: Terwujudnya Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Tujuan 5 Terwujudnya Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas memiliki 2 indikator tujuan dan 3 sasaran dengan 7 indikator sasaran, dengan pencapaian tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Capaian Tujuan 5: Terwujudnya Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Tahun 2024

Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		RKPD 2024		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
T5	Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		93.2	95.50	102.47
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		74.20	62.62	84.39
1	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1	IKLI KePUan	96.81	96.71	99.90
		2	IKLI Perkim	98.56	94.56	95.94
		3	IKLI Perhubungan	98	95.22	97.16
2	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	4	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83	83	100.00
3	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan	5	Indeks Kualitas Air	72.47	34.65	47.81
		6	Indeks Kualitas Udara	78.38	89.08	113.65



Tujuan / Sasaran		Indikator Tujuan / Sasaran		RKPD 2024		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja (%)
	lahan	7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69.45	61.7	88.84

Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2024, sebanyak 6 indikator tidak berhasil mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target tujuan 5 ini antara lain:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak berhasil mencapai target dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 84,39%. Hal ini disebabkan karena 2 variabel penilaian IKLH yaitu Indeks Kualitas Air, dan Tutupan Lahan, tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga berpengaruh kepada nilai IKLH, terutama pada nilai Indeks Kualitas Air.
- IKLI KePUan tidak berhasil mencapai target dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,90%. Meskipun 13 unsur penilaian IKLI KePUan mendapatkan penilaian sangat baik, akan tetapi masih ada 3 unsur yang memiliki nilai paling rendah dibandingkan unsur-unsur lainnya, yang memerlukan peningkatan di masa mendatang yaitu kesesuaian pemanfaatan jalan arteri/beraspal, kenyamanan penggunaan trotoar di sepanjang jalan, dan ketersediaan trotoar jalan bagi penyandang disabilitas.
- IKLI Perkim tahun 2024 tidak mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,94%. Dari 17 unsur pelayanan yang dinilai, sebanyak 16 unsur mendapatkan penilaian sangat baik, dan 1 unsur mendapatkan penilaian baik, yaitu unsur ketersediaan sarana pada ruang hijau publik bagi penyandang disabilitas.
- IKLI Perhubungan tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,16%. Dari 21 unsur yang dinilai, sebanyak 19 unsur mendapatkan nilai sangat baik dan 2 unsur mendapatkan nilai baik, yaitu unsur keberadaan petugas Dishub dalam membantu masyarakat pada jam padat aktivitas publik dan kepedulian petugas Dishub di area padat aktivitas publik.
- Indeks Kualitas Air tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 47,81%. Hal ini antara lain disebabkan karena secara geografis seluruh ruas sungai yang berada di Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai Kota Padang Panjang, masih rendahnya kesadaran masyarakat yang



menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter *e coli* hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang, dan terjadinya bencana erupsi gunung merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang.

- f. Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,84%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 terjadi penambahan delineasi pada beberapa kategori RTH sesuai dengan kategori yang tercantum pada Permenlhk No. 27 Tahun 2021 tentang IKLH, yang dilakukan dengan mematuhi batasan tajuk yang terlihat pada program pemroses data, sehingga menurunkan nilai dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang.

2.2.1.3 Prioritas dan Program Pembangunan

Dalam RKPD Perubahan Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang dijabarkan ke dalam pelaksanaan 96 (sembilan puluh enam) program pembangunan yang tersebar pada masing-masing perangkat daerah.

1. Prioritas Pembangunan 1: Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah

Prioritas pembangunan 1 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah memiliki 3 indikator kinerja dengan 17 program prioritas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut. Adapun capaian kinerja dari prioritas pembangunan ini beserta program prioritasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Capaian Prioritas Pembangunan 1
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah Tahun 2024

	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
2	3	4	5	6	7	
	Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	LPE Sektor Perdagangan	5,21	3.98	76.39	
		LPE Sektor Pertanian	5,03	0.15	2.98	
		LPE Sektor Penyediaan Makan dan Minum	10,92	7,45	68.22	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	96,86%	96,88%	100,02	DPMPSTP



	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
2	3	4	5	6	7	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22%	22%	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	18%	21,66%	120,33	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	34%	36%	105,88	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar Ber-SNI	90%	90%	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	60%	52%	86,67	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang dapat Meningkatkan akses pemasaran produknya melalui digital	60%	13%	21,67	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100%	100.05%	100.05	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100%	100%	100.00	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi budidaya ikan	751 ton/tahun	751.03 ton/tahun	100.004	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah jenis produk olahan perikanan	1 jenis	1 jenis	100.00	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	77%	77%	100.00	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase pemenuhan prasarana peternakan	75%	75%	100.00	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan penyakit ternak/hewan/kasus	8.50%	11%	129.41	Dinas Pangan dan Pertanian
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio lama kunjungan wisata	1,15	1,15	100.00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	600.000 orang	170.704 orang	28.45	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		PAD sektor pariwisata	300 Juta Rupiah	228.338.215 Rupiah	76,11	



	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPd 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
2		3	4	5	6	7
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Subsektor	14 Subsektor	100.00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan	60%	60	100	Sekretariat Daerah
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (Sertifikat Halal,MD,GMPSNI dan Merk)	5%	5%	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

Program prioritas yang tidak mencapai target tahun 2024, yaitu:

- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,67%. Tidak tercapainya target program ini salah satunya disebabkan karena dibentuknya UPTD Metrologi Legal di kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Tanah Datar, sedangkan sebagian besar pedagang yang berjualan di Padang Panjang merupakan dari kabupaten tersebut, sehingga menurunkan potensi UTTP Kota Padang Panjang.
 - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan tingkat capaian sebesar 21,67% dari target 60%.
 - Program Pemasaran Pariwisata, indikator jumlah kunjungan wisata tidak mencapai target, dengan tingkat capaian sebesar 28,45%.
2. Prioritas Pembangunan 2: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas pembangunan 2 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah memiliki 2 indikator kinerja dengan 9 program prioritas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut. Adapun capaian kinerja dari prioritas pembangunan ini beserta program prioritasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Capaian Prioritas Pembangunan 2
Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2024

No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPd 2024	PD Pelaksana



			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
P2	Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Persentase Penduduk Miskin	4,64	5,31	87,38	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,80	4,94	97,17	
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	5%	10%	200,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2	Program Pengembangan UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM yang dibantu	40%	40%	100,00	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	77%	77%	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase pemenuhan sarana peternakan	75%	75%	100,00	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan inovasi teknologi pertanian	13,80%	13,80%	100,00	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	32%	18%	56,25	DPMPSTP
6	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	2,39%	0,18%	7,53	DPMPST
7	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	100%	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
8	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36%	89,36%	100,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
9	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100,00	Sekretariat Daerah

Program prioritas yang tidak mencapai target tahun 2024, yaitu:

- Program Hubungan Industrial, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 56,25%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, yang dibayarkan premi iuran jaminan kecelakaan kerja adalah peserta yang terdaftar dalam DTKS dan telah dilakukan verifikasi data di lapangan.
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, realisasi tahun 2024 sebesar 0,18% dengan tingkat capaian sebesar 7,53% dari target 2,39%.



3. Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Berkarakter dan Berdaya Saing

Prioritas pembangunan 3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah memiliki 2 indikator kinerja dengan 10 program prioritas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut. Adapun capaian kinerja dari prioritas pembangunan ini beserta program prioritasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Capaian Prioritas Pembangunan 3
Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Berkarakter dan Berdaya Saing
Tahun 2024

No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
P3	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Berkarakter dan Berdaya Saing	Rata-rata Lama Sekolah	12,04	12	99,67	
		Harapan Lama Sekolah	15,36	15,47	100,72	
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal kependidikan	100%	100%	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3.200 Orang	3.678 orang	114,94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan indikator Kota Layak Pemuda	3 indikator	3 indikator	100,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 cabang	44 cabang	100,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1 organisasi	1 organisasi	100,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100%	100%	100,00	Dinas SosialP2KBP3A
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	20%	100,00	
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	80%	80%	100,00	Dinas SosialP2KBP3
8	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT	100 BTJ	100 BTJ	100,00	Dinas SosialP2KBP3A
9	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh	100 BTJ	100 BTJ	100,00	Dinas SosialP2KBP3A



No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
		petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu				
10	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100,00	Sekretariat Daerah

4. Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Prioritas pembangunan 4 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah memiliki 2 indikator kinerja dengan 4 program prioritas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut. Adapun capaian kinerja dari prioritas pembangunan ini beserta program prioritasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Capaian Prioritas Pembangunan 4
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024

No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
P4	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,44	74,48	100,05	
		Prevalensi Stunting	14			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian kinerja UKP dan UKM pada fasilitas kesehatan	88%	97%	110,23	Dinas Kesehatan
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga	62%	62%	100,00	Dinas Sosial P2KBP3A
3	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100%	100%	100,00	Dinas Sosial P2KBP3A
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR	62%	62%	100,00	Dinas Sosial P2KBP3A

5. Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Prioritas pembangunan 5 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan memiliki 2 indikator kinerja dengan 21 program prioritas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan



tersebut. Adapun capaian kinerja dari prioritas pembangunan ini beserta program prioritasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51
Capaian Prioritas Pembangunan 5
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan Tahun 2024

No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
P5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	93,20	95,5	102,47	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,2	62,62	84,39	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	76,83%	81,31%	105,83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang sungai yang dikonservasi	22,42%	22,43%	100,04	
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	86,57%	100%	115,51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	90%	99,10%	110,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	87,34%	93,19%	106,70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan ber-IMB	46,10%	46,80%	101,52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik	85,67%	100%	116,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	88,01%	88,82%	100,92	
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat	61%	61%	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,21%	0,25%	119,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24%	79,31%	91,96	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup



No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	100%	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
11	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
12	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas RTH publik	4.23%	4.19%	99.05	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
13	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32%	32%	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
14	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55%	55%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
15	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 Jenis	100.00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
16	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98%	99%	101.21	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
17	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100.00	BPBD Kesbangpol
18	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100.00	Dinas SosialP2KBP3A
19	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang dipelihara	100%	100%	100.00	Dinas SosialP2KBP3A



No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			PD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
20	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor	68%	98.91%	145.46	Dinas Perhubungan
		Persentase layanan angkutan darat	0.06%	97.97%	163,283.33	
		Rata rata persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	85%	87%	102.35	
		Persentase penerangan jalan umum (PJU)	87%		0.00	
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,003700 angka	1.23	33,243.24	
21	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan	60%	60%	100.00	Sekretariat Daerah

Adapun program prioritas yang tidak mencapai target tahun 2024 adalah:

- a. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan tingkat capaian sebesar 91,96%.
 - b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan tingkat capaian sebesar 99,05%. Tidak tercapainya target tahun 2024 antara lain disebabkan karena beberapa titik lokasi taman dialihfungsikan ke penggunaan lain seperti jalan akses masuk ke ruko dan rumah penduduk.
6. Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Prioritas pembangunan 6 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) memiliki 1 indikator kinerja dengan 25 program prioritas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut. Adapun capaian kinerja dari prioritas pembangunan ini beserta program prioritasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Capaian Prioritas Pembangunan 6
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) Tahun 2024

No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
P6	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)	Indeks Reformasi Birokrasi	67,5	77,66	115,05	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	35%	71%	202,86	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	44%	100%	227,27	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Implementasi Layanan SPBE	2,8 Indeks	3.82 Indeks	136,43	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,60 Indeks	2.90 indeks	80,56	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	456	222	48,68	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100%	100%	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100%	100%	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen	4 Dokumen	133,33	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	50%	62,50%	125,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	82%	82%	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
12	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	85%	85%	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
13	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	100,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Penyusunan produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100,00	
14	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	2%	487%	100,00	Badan Pengelola Keuangan Daerah
15	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	330	-	0,00	BKPSDM
16	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek dan sosialisasi	7,60%	10,45%	137,50	BKPSDM
17	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pengawasan yang tuntas dilaksanakan	88%	100%	113,64	Inspektorat Daerah
18	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase capaian aksi pada aplikasi MCP	91%	94%	103,30	Inspektorat Daerah
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tingkat layanan	100%	100%	100,00	Kecamatan
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan	39,98%	38,78	97	Kecamatan
21	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kasus pelanggaran ketenteraman ketertiban umum	10 laporan	10 laporan	100	Kecamatan
22	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100,00	Kecamatan
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Tinggi (95,96)	95,26	99,27	Sekretariat Daerah
		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi (SETDAKO)	100%	100%	100,00	
23	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasnya tugas dan fungsi DPRD	90%	92%	102,09	Sekretariat DPRD



No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
		secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				
24	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	100,00	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	72%	76%	105,56	
15	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5.000 dokumen	5.996 dokumen	119,92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Adapun program prioritas yang tidak mencapai target tahun 2024 adalah:

- a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dimana capaian indikator Indeks Domain Tata Kelola SPBE tidak mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80,56%.
 - b. Program Kepegawaian Daerah, dimana indikator Nilai Sistem Merit tidak dapat dinilai karena pada tahun 2024 tidak dilakukan penilaian sistem merit oleh KASN.
 - c. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan tingkat capaian sebesar 48,68%.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97%.
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,27%.
7. Prioritas Pembangunan 7: Meningkatkan Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis

Prioritas pembangunan 7 Meningkatkan Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis memiliki 1 indikator kinerja dengan 10 program prioritas untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tersebut. Adapun capaian kinerja dari prioritas pembangunan ini beserta program prioritasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53
Capaian Prioritas Pembangunan 7



Meningkatkan Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis

No	Prioritas / Program	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja RKPD 2024			OPD Pelaksana
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7
P7	Meningkatkan Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Tenteram dan Agamis	Indeks Rasa Aman	Aman (86,80)	79,29	91,35	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100,00	Sekretariat Daerah
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	2 Objek	2 Objek	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	80%	80%	100,00	BPBD Kesbangpol
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase peningkatan stabilitas daerah	100%	100%	100,00	BPBD Kesbangpol
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik yang tertangani	100%	100%	100,00	BPBD Kesbangpol
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran Perda dan Trantibum	100%	100%	100,00	Satpol PP Damkar
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	4 menit	400,00	Satpol PP Damkar
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100%	100%	100,00	BPBD Kesbangpol
9	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	75%	75%	100,00	Dinas SosialP2KBP3A
10	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang tertangani	80%	90%	112,50	Dinas Sosial P2KBP3A

2.2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Untuk mengukur pencapaian kinerja daerah, digunakan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja daerah, dan juga sebagai perwujudan



akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Capaian indikator kinerja daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satua n	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisas i	Tingkat Capaian	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
I	PENDIDIKAN					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	75.539	103,289	137%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	104.582	101,404	97%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	154.638	140,509	91%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	55,226	55%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	99,6	62,94	63%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15.1	15.47	102.45%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11.94	12	100.50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	60	62.95	104.92%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99.6	99.05	99.45%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97.4	98.53	101.16%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	48	42.28	88.08%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	APK SD sederajat	%	106.2	105.5	99.34%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	APK SMP sederajat	%	107.5	109.31	101.68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	2,24 dan 1,88	76.37 / 75.38 / 60.71	76.37 / 75.38 / 60.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	2,49/2,41 /2,08	73.15 / 74.71 / 60.82	73.15 / 74.71 / 60.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	2,03 dan 1,73	89.34 dan 78.57	89.34 dan 78.57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	2,24 dan 1,88	91.09 dan 86.45	91.09 dan 86.45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	53	53.25	67,24%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	50	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	54	54	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	60	60	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	49	49	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	18.69	31%	31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	12.54	69%	69%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II KESEHATAN						
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	3.03	2.81	92.74%	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100%	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	83.311	100	120.03%	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	83.916	100	119.17%	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	84.651	100	118.13%	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	77.654	100.00	128.78%	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	82.598	142.42	172.43%	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	64.323	118.57	184.33%	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94.556	100	105.76%	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100%	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	108.71	108.71%	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	108.59	108.59%	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	116.00	116%	Dinas Kesehatan
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	87.871	127.53	145.13%	Dinas Kesehatan
15	Prevalensi Stunting	%	11.05	10.57	104.54%	Dinas Kesehatan
16	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.03	74.48	101.99%	Dinas



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
						Kesehatan
17	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.47	0.46	97.87%	Dinas Kesehatan
18	Persentase Penurunan Kematian Ibu	%	25	100	400%	Dinas Kesehatan
19	Persentase Penurunan Kematian Bayi	%	20	100	500%	Dinas Kesehatan
20	Persentase UHC	%	99.28	100.35	101.08%	Dinas Kesehatan
21	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan (indikator baru)	%	88	88	100%	Dinas Kesehatan
22	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (indikator baru)	%	65	65.5	100.77%	Dinas Kesehatan
23	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum (indikator baru)	%	76.66	92.1	120.14%	Dinas Kesehatan
24	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	96.25	100	103.90%	Dinas Kesehatan
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif (indikator baru)	%	96.25	100	103.90%	Dinas Kesehatan
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	%	0.27	0.023	8.52%	Dinas Kesehatan
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0.84	0.25	29.76%	Dinas Kesehatan
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1.47	1.12	76.19%	Dinas Kesehatan
29	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.47	0.46	97.87%	Dinas Kesehatan
III PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	48.311	58.36	120,80%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	86.57	100	115,51%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	90	99.1	110,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio	46.1	46.1	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	92.24	88.95	96.43%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	61	61	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	274	274%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	IKLI KePUan	Indeks	90.53	96.71	106.83%	Dinas Pekerjaan



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
						Umum dan Penataan Ruang
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	83	83	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	72.88	78.96	108.34%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	3	3	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	81	30	37.04%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	83.20	78.96	94.90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	81.20	61.00	75.12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	90	93.19	103.54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	90	99.10	110.11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	76	81.31	106.99%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Luas kawasan kumuh	%	9.05	2.14	23.65%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV	PERUMAHAN RAKYAT					
1	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	89.36	95.59	106.97%	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3.38	5.38	159.17%	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	79.31	79.31%	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
4	IKLI Perkim	Indeks	96,90	96,90	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
5	Persentase permukiman layak huni	%	98,80	99.48	100.69%	Dinas Perumahan Rakyat dan



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
						Lingkungan Hidup
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100	100%	Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup
V KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	80	100	125%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	2 menit	4 menit	200%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100%	Satuan POL PP dan Pemadam Kebakaran
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100%	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100%	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP-	%	100	100	100%	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Respon time tanggap darurat	Menit	10 menit	4 menit	250%	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
VI SOSIAL						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	92.61	100	107.97%	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100.00%	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Angka PPKS	%	5.25	3.69	70.29%	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100	100	100.00%	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	80	97	121.25%	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan	%	75	100	133.33%	Dinas Sosial, P2KB P3A



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
	kelembagaan sosial yang aktif					
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
VII	TENAGA KERJA					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100.00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	0.04	0.02	50.00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	14.58	12.56	86.15%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	58.43	0.75	1.28%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	33.1	47.6	143.81%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Tingkat Pengangguran	%	4.72	4.94	95.55%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	64.05	66.33	96.56%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	2.5	1.27	196.85%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8.751	4,83	55,2%	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100.00%	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26.273	31,54	84,65%	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	IDG	Indeks	71,44	67,58	95,59%	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Predikat KLA	Predikat	Utama	Utama	100%	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20	100.00%	Dinas Sosial, P2KB P3A
IX	PANGAN					



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	26,087	0.27	0.0010%	Dinas Pangan dan Pertanian
2	LPE Sektor Pertanian	%	5,64	*5,64	*100	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	86.10	86.18	100.09%	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapi ta/hari	2400	2844.17	118.51%	Dinas Pangan dan Pertanian
X	PERTANAHAN					
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	81	94,8	117%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
XI	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	66.16	62.62	94.65%	Dinas LH Perkim
2	Indeks kualitas air	Indeks	45.75	34.65	75.74%	Dinas LH Perkim
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	57	61.7	108.25%	Dinas LH Perkim
4	Indeks kualitas udara	Indeks	90.05	89.08	98.92%	Dinas LH Perkim
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98	99.19	101.21%	Dinas LH Perkim
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	55	55.17	100.31%	Dinas LH Perkim
7	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	85	85	100.00%	Dinas LH Perkim
8	Persentase luas RTH Publik	%	4.23	4.19	99.05%	Dinas LH Perkim
9	Persentase pengelolaan sampah	%	98	99.19	101.21%	Dinas LH Perkim
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	50	55.17	110.34%	Dinas LH Perkim
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Perekaman KTP elektronik	%	97.65	99.5	101.89%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	98.44	99.18	100.75%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	101.65	101.65%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data	%	95.83	100	104.35%	Dinas Kependudukan



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
	kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					dan Pencatatan Sipil
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2.541	2.43	95.63%	Dinas Sosial, P2KB P3A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	56.8	63,38	11,58%	Dinas Sosial, P2KB P3A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	27.932	20.51	73.43%	Dinas Sosial, P2KB P3A
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57.5	66,46	115,58%	Dinas Sosial, P2KB P3A
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	70	74	105.71%	Dinas Sosial, P2KB P3A
6	Rata rata jumlah anak per keluarga	orang	2.35	2.43	103.40%	Dinas Sosial, P2KB P3A
7	Ratio akseptor KB	%	57,5	63,38	110,22%	Dinas Sosial, P2KB P3A
XIII	PERHUBUNGAN					
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0.339	0.45	132.74%	Dinas Perhubungan
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38.84	61.54	158.44%	Dinas Perhubungan
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96.76	95.52	98.72%	Dinas Perhubungan
XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	1.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	59.55	78.6	131.99%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	44	44	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	2.8	2.9	103.57%	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3	3.16	105.33%	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
XV	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	77.67	75.55	97.27%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	1.24	6.38	514.52%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	Persentase koperasi aktif	%	75.41	73.77	97.83%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	0.22	0.36	163.64%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada	%	0.18	0.24	133.33%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0.1	0.1	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7	Persentase UMKM yang difasilitasi bantuan usaha	%	0.1	0.1	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	9	9	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0.15	0.15	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
XVI	PENANAMAN MODAL					
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	6	6	100.00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	22	24	109.09%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	90	90	100.00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96.87	97.9	101.06%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
						Pintu
XVII KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.17	0.67	394.12%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0.8	0.56	70.00%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	0,2	0.5	250	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	2 prestasi nasional 15 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	260	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	1 prestasi nasional 3 prestasi provinsi	1 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	100%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Menuju pratama	100%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
XVIII STATISTIK						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2.8	1.94	69.29%	Dinas Komunikasi dan Informatika
XIX PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	71	34	47.89%	Dinas Komunikasi dan Informatika
XX KEBUDAYAAN						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	78.58	50	63,63%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
XXI PERPUSTAKAAN						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	59	72.47	122.83%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	87	96.78	111.24%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
XXII KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	61.35	62,5	101,87%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	%	69.83	72,47	103,78%	Dinas Perpustakaan



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
	pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					dan Kearsipan
3	Nilai LAKE	nilai	80.5	83.03	103.14%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	70.5	83.03	117.77%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C URUSAN PILIHAN						
XXIII KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	751	751.03	100.00%	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0.13	0.13	100.00%	Dinas Pangan dan Pertanian
XXIV PARIWISATA						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4.572	27.02	590.92%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50.454	19.72	39.09%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
3	Tingkat hunian akomodasi	%	25.742	34.17	132.74%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.821	2.89	102.41%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2.43	2.42	99.51%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	8.09	3.98	49.20%	Olahraga dan Pariwisata
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	300,000,000	2,283,382,152	761.13%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	10	11.5	115.00%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
XXV PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	6.5	7.2	110.77%	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	8.5	11	129.41%	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	75	75	100.00%	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	13.8	13.8	100.00%	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	6.5	7.2	110.77%	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter /	11.8	11.8	100.00%	Dinas Pangan



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
		ekor / hari				dan Pertanian
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	33.3	33.3	100.00%	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	8	8.5	106.25%	Dinas Pangan dan Pertanian
XXVI	PERDAGANGAN					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	34	36	105.88%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	60	50	83.33%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	LPE sektor Perdagangan	%	4.8	3.98	82.92%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
XXVII	PERINDUSTRIAN					
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0.26	0.26	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	60	33	55.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	45	40	88.89%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5	Persentase pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	%	5	5	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	15	14	93.33%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7	Kenaikan volume perdagangan	%	30	30	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	30	30	100.00%	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
						Menengah
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
XXVIII	SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD					
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai LPPD	indeks	Sangat Tinggi			Sekretariat Daerah
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	100.00%	Sekretariat Daerah
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100	100.00%	Sekretariat Daerah
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	100.00%	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	95,70	95,26 (Sangat Baik)	99.54%	Sekretariat Daerah
7	Nilai RB	nilai	61.8	66.54	107.67%	Sekretariat Daerah
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	63.98	64.22	100.38%	Sekretariat Daerah
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	%	85	71.42	84.02%	Sekretariat Daerah
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100.00%	Sekretariat Daerah
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	95	95	100.00%	Sekretariat Daerah
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	90	94,46 (Tertinggi)	104.96%	Sekretariat Daerah
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39.2	38.78	98.93%	Sekretariat Daerah
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	97,81	94,37 (Sangat Baik)	96.48%	Sekretariat Daerah
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39.2	38.36	96.48%	Sekretariat Daerah
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	97.85	97,75 (Sangat Baik)	99.90%	Sekretariat Daerah
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	100	96.46	99.90%	Sekretariat DPRD
18	Persentase terfasilitasnya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	90	91.88	99.90%	Sekretariat DPRD
19	Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	%	75	37,28	49.70%	Sekretariat DPRD
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	75	52,18	69,57%	Sekretariat DPRD
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indeks	75	96,46	128,61%	Sekretariat DPRD
22	Persentase jumlah total	%	12,81	91,88	717,25%	Sekretariat



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun 2024			Sumber Data
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
	proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama					Daerah
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	4.15	93,49	1653.25 %	Sekretariat Daerah
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	52.59	94,17	179.06%	Sekretariat Daerah
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8.72	49.62	569.04%	Sekretariat Daerah
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
XXIX	PERENCANAAN					
1	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	70	72.2	103.14%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Indeks Inovasi Daerah	indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif (63,28)	100,00%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	22.85	22.93	100.35%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
XXX	KEUANGAN					
1	Rasio PAD	%	15,95	18,22	114,21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi expenditures) transfer	%	89,871	83,98	93,44	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	71	63.2	89,01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	9.002	2.52	27.99%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7.1214	13.9	195.19%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Manajemen Aset	%	100	100	100.00%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0.98	7.77	792.86%	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



No	Indikator Kinerja Kunci	Satua n	Tahun 2024			Sumber Data	
			Target	Realisas i	Tingkat Capaian		
E	UNSUR PENGAWASAN						
XXXI	PENGAWASAN						
1	Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	Intern	%	3 (3,1) Level	3 (3,000)	96.77%	Inspektorat Kota
2	Kapabilitas Pengawasan Pemerintah (APIP)	Aparat Intern	%	3 (3,1) Level	3 (3,000)	96.77%	Inspektorat Kota
3	Persentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat		%	96	96	96.77%	Inspektorat Kota
4	Indeks Kualitas Pengawasan		indeks	2			Inspektorat Kota
XXXII	KEPEGAWAIAN						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		%	36,87	79,91	216,73%	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		%	20,449	22,58	110,46%	BKPSDM
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		%	20,182	24,42	121,01%	BKPSDM
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		%	22,89			BKPSDM
5	Indeks Profesionalitas ASN		indeks	76.7	77,59	101.16%	BKPSDM
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian		%	100	100	100.00%	BKPSDM
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian		%	100	100	100.00%	BKPSDM
8	Indeks Sistem Merit		indeks	0.83	0	0.00%	BKPSDM
F	UNSUR KEWILAYAHAN						
XXXIII	KECAMATAN						
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan		%	26	33,2	127,69%	Kecamatan PPT dan PBB
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan		%	39,2	38,78	98,93%	Kecamatan PPT dan PBB
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		%	100	100	100%	Kecamatan PPT dan PBB
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
XXXIV	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		%	80	80	100%	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah		%	100	100	100%	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Persentase Konflik yang tertangani		%	100	100	100%	BPBD Kesatuan Bangsa dan Politik



2.2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu

Kinerja pembangunan daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 dapat diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah pada pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2024.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD tersebut dikelompokkan berdasarkan rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut.

**Tabel 2.55
Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang, artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah, artinya pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah pada tahun 2024, dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, evaluasi terhadap capaian dan predikat kinerja dari masing-masing indikator kinerja makro, indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan serta program prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024.

Secara keseluruhan capaian kinerja RKPD Tahun Kota Padang Panjang 2024 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 97,66 persen (Sangat Tinggi), dengan realisasi keuangan mencapai 625.785.134.503,60 atau sebesar 92,95 persen. Capaian kinerja berdasarkan urusan pemerintahan dan capaian kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Tahun 2024**



No	Urusan Pemerintahan	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024	Predikat Kinerja
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1.	PENDIDIKAN	98,83%	Sangat Tinggi
2	KESEHATAN	95,54%	Sangat Tinggi
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	93,73%	Sangat Tinggi
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	99%	Sangat Tinggi
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	100%	Sangat Tinggi
6	SOSIAL	97,70%	Sangat Tinggi
II. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1.	TENAGA KERJA	99,67%	Sangat Tinggi
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	93,56%	Sangat Tinggi
3	PANGAN	99,24%	Sangat Tinggi
4	LINGKUNGAN HIDUP	90,76	Tinggi
5	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100%	Sangat Tinggi
6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	86,15	Tinggi
7	PERHUBUNGAN	99,08%	Sangat Tinggi
8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	99,18%	Sangat Tinggi
9	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	89,03%	Tinggi
10	PENANAMAN MODAL	91,41%	Sangat Tinggi
11	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	99,20%	Sangat Tinggi
12	STATISTIK	99,71%	Sangat Tinggi
13	PERSANDIAN	94,20%	Sangat Tinggi
14	KEBUDAYAAN	100%	Sangat Tinggi
15	PERPUSTAKAAN	100%	Sangat Tinggi
16	KEARSIPAN	100%	Sangat Tinggi
III. URUSAN PILIHAN			
1.	PARIWISATA	99,42%	Sangat Tinggi
2	PERTANIAN	94,45%	Sangat Tinggi
3	PERDAGANGAN	95,25%	Sangat Tinggi
4	PERINDUSTRIAN	95,51%	Sangat Tinggi
IV. PENUNJANG URUSAN			
1.	PENGAWASAN	99,81%	Sangat Tinggi
2	PERENCANAAN	100%	Sangat Tinggi
3	KEUANGAN	100%	Sangat Tinggi
4	KEPEGAWAIAN	84,03%	Tinggi
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100%	Sangat Tinggi
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	100%	Sangat Tinggi
V. UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN			
1.	SEKRETARIAT DAERAH	99,28%	Sangat Tinggi
2	SEKRETARIAT DPRD	95,52%	Sangat Tinggi
VI. UNSUR KEWILAYAHAN			
1.	KECAMATAN	100%	Sangat Tinggi
VII. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	98,12%	Sangat Tinggi

Penjelasan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar 121.193.194.828,- melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan



dan 92 (sembilan puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mencapai 99,42 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan mencapai 115.444.454.614,86,- atau sebesar 95,26 persen.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar 189.641.070.463,- melaksanakan 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Kesehatan telah mencapai 95,54 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan mencapai 167.225.424.920,13 atau sebesar 88,18 persen.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar 22.170.661.719,- melaksanakan 9 (sembilan) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai 93,73 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 21.368.287.487,47 atau sebesar 96,38 persen.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar 32.916.987.291,- melaksanakan 14 (empat belas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah mencapai 94,88 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 28.988.237.175,- atau sebesar 88,06 persen.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar 12.002.203.493,- melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah mencapai 100 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 11.932.322.299,- atau sebesar 99,42 persen.



6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar 13.448.625.817,- melaksanakan 13 (tiga belas) program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan, 70 (tujuh puluh) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencapai 95,63 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 12.624.516.828,- atau sebesar 93,87 persen.

7. Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian dengan anggaran sebesar 12.746.814.330,- melaksanakan 10 (sepuluh) program, dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Pangan dan Pertanian telah mencapai 97,90 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 12.595.336.661,55 atau sebesar 98,81 persen.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan anggaran sebesar 4.057.628.019,- melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mencapai 100 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 3.912.943.036,- atau sebesar 96,43 persen.

9. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dengan anggaran sebesar 12.218.461.373,- melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Perhubungan telah mencapai 99,08 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 12.025.092.411,- atau sebesar 98,42 persen.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar 8.824.813.783,- melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah



mencapai 96,69 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 8.432.293.664,- atau sebesar 95,55 persen.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar 6.759.066.718,- melaksanakan 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mencapai 97,03 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 6.506.069.935,- atau sebesar 96,26 persen.

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran sebesar 5.251.964.679,- melaksanakan 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mencapai 100 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 5.105.101.957,- atau sebesar 97,20 persen.

13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan anggaran sebesar 32.951.289.024,- melaksanakan 8 (delapan) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah mencapai 99,31 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 30.070.947.060,13 atau sebesar 91,26 persen.

14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar 22.503.182.232,- melaksanakan 11 (sebelas) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mencapai 93,27 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 20.680.885.509,46 atau sebesar 91,90 persen.

15. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah dengan anggaran sebesar 7.031.135.623,- melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja Triwulan IV sampai dengan



Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Inspektorat Daerah telah mencapai 99,81 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 6.940.832.662,- atau sebesar 98,72 persen.

16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar 6.160.020.196,- melaksanakan 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah mencapai 100 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 6.056.879.013,- atau sebesar 98,33 persen.

17. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar 11.164.852.298,- melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah telah mencapai 100 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 10.251.420.772,- atau sebesar 91,82 persen.

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar 9.717.179.568,- melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah mencapai 92,01 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 9.333.468.956,- atau sebesar 96,05 persen.

19. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar 41.021.330.490,- melaksanakan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Sekretariat Daerah telah mencapai 99,28 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 39.414.915.957,- atau sebesar 96,28 persen.

20. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar 42.658.218.994,- melaksanakan 2 (dua) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 43



(empat puluh tiga) sub kegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Sekretariat DPRD telah mencapai 95,52 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 39.194.795.777,- atau sebesar 91,88 persen.

21. Kecamatan Padang Panjang Timur

Kecamatan Padang Panjang Timur dengan anggaran sebesar 18.749.535.312,- melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur telah mencapai 99 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 18.516.344.374,- atau sebesar 98,76 persen.

22. Kecamatan Padang Panjang Barat

Kecamatan Padang Panjang Barat dengan anggaran sebesar 19.381.125.944,- melaksanakan 5 program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat telah mencapai 100 persen (Sangat Tinggi) dengan realisasi keuangan sebesar 18.719.714.527,- atau sebesar 96,59 persen.

23. Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar 20.703.823.668,- melaksanakan 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dengan realisasi kinerja Triwulan IV mencapai 29,13 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar 3.866.903.893,50 atau sebesar 18,68 persen.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pencapaian kinerja RKPD Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan fisik sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga untuk mencapai target dilakukan adendum kontrak;
2. Masih kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah, sehingga menyebabkan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak berhasil mencapai target;
3. Masih ada sub kegiatan yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terlaksana dikarenakan adanya perubahan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan.



Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 2.103
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV							
			8	9	10	11	12									
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
TOTAL BELANJA LANGSUNG			673.273.185.861,66	20,34%	126.109.715.500,50	23,87%	144.122.798.545,84	24,03%	138.558.304.361,25	29%	216.994.316.096,01	97,65%	625.785.134.503,60	625.785.134.503,60	39,88%	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			121.193.194.828,00	9,24%	20.754.036.796,00	25,00%	25.833.055.803,75	25,00%	26.049.630.013,32	40,00%	42.807.732.001,79	99,24%	115.444.454.614,86			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100,00%	120.851.718.828,00	18,47%	20.754.036.796,00	25,00%	25.800.158.803,75	25,00%	26.036.510.013,32	30,00%	42.520.282.006,79	98,47%	115.110.987.619,86			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	77.336.003.249,00	25,00%	15.784.353.438,00	25,00%	21.037.169.626,00	25,00%	16.742.362.146,00	25,00%	22.789.453.963,00	100,00%	76.353.339.173,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90 Persen	75.183.371.653,00	25,00%	15.436.549.771,00	25%	20.610.605.322,00	25%	16.356.626.752,00	25%	21.932.165.227,00	100,00%	74.335.947.072,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580 Orang/bulan	75.183.371.653,00	580 Orang / bulan	15.436.549.771,00	580 Orang/bulan	20.610.605.322,00	580 Orang/bulan	16.356.626.752	580 Orang/bulan	21.932.165.227,00	580 Orang / bulan	74.335.947.072,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	485.825.200,00	25,00%	63.842.600,00	25%	92.959.616,00	25%	48.266.025,00	25%	214.527.461,00	100,00%	419.595.702,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.675.900,00	1 Paket	3.799.400,00	1 Paket	3.451.200,00	1 Paket	-	4 Paket	6.137.000,00	4 Paket	13.387.600,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	122.677.500,00	1 Paket	26.102.200,00	1 Paket	28.178.900,00	1 Paket	16.031.400	4 Paket	46.291.400,00	4 Paket	116.603.900,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	33.663.800,00	1 Paket	3.785.900,00	1 Paket	5.843.350,00	1 Paket	4.640.800	5 Paket	17.093.050,00	5 Paket	31.363.100,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	313.808.000,00	7 Laporan	30.155.100,00	7 Laporan	55.486.166,00	7 Laporan	27.593.825	30 Laporan	145.006.011,00	30 Laporan	258.241.102,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	304.480.500,00	25,00%	41.000.000,00	25%	0,00	25%	0,00	25%	252.970.000,00	100,00%	293.970.000,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	259.077.500,00		0,00		0,00		-	9 Unit	252.970.000,00	9 Unit	252.970.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	45.403.000,00	4 Unit	41.000.000,00	4 Unit	0,00	4 Unit	-	5 Unit	-	5 Unit	41.000.000,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	987.620.896,00	25,00%	211.003.567,00	25,00%	216.253.038,00	25,00%	238.443.619,00	25,00%	313.378.225,00	100,00%	979.078.449,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.751.200,00	1 Laporan	250.000,00	1 Laporan	5.250.000,00	1 Laporan	-	1 Laporan	250.000,00	1 Laporan	5.750.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	105.085.696,00	3 Laporan	26.697.983,00	3 Laporan	23.347.454,00	3 Laporan	25.321.495	3 Laporan	24.886.101,00	3 Laporan	100.253.033,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	876.784.000,00	3 Laporan	184.055.584,00	3 Laporan	187.655.584,00	3 Laporan	213.122.124	12 Laporan	288.242.124,00	12 Laporan	873.075.416,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	374.705.000,00	25,00%	31.957.500,00	25,00%	117.351.650,00	25,00%	99.025.750,00	25,00%	76.413.050,00	100,00%	324.747.950,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatannya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	197.065.000,00	10 Unit	29.757.500,00	10 Unit	37.686.650,00	10 Unit	31.151.750	17 Unit	54.523.050,00	17 Unit	153.118.950,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	31.130.000,00	6 Unit	2.200.000,00	6 Unit	6.844.000,00	6 Unit	4.220.000	5 Unit	11.880.000,00	6 Unit	25.144.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	146.510.000,00		0,00	1 Unit	72.821.000,00	1 Unit	63.654.000	1 Unit	10.010.000,00	1 Unit	146.485.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100 Persen	43.515.715.579,00	11,95%	4.969.683.358,00	25,00%	4.762.989.177,75	25,00%	9.294.147.867,32	35,00%	19.730.828.043,79	96,95%	38.757.648.446,86						
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	20.516.004.614,00	10,78%	2.211.525.646,00	25%	2.264.715.319,00	38 Satuan Pendidikan	4.049.885.324,31	38 Satuan Pendidikan	9.610.284.081,87	38 Satuan Pendidikan	18.136.410.371,18						
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	639.678.400,00		0,00		0,00		21.562.749	3 Ruang	471.208.773,91	3 Ruang	492.771.522,91					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	193.172.800,00		0,00		6.727.865,60		-	3 Ruang	180.990.716,40	3 Ruang	187.718.582,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	193.172.800,00		0,00		6.596.574,40		168.375.000	1 Ruang	14.279.093,60	1 Ruang	189.250.668,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	3.702.515.087,00	1 Unit	273.941.834,00		66.683.918,00		362.098.315	3 Unit	2.307.775.563,19	3 Unit	3.010.499.630,11					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	306.430.000,00		0,00		9.040.000,00		63.297.000	3 Ruang	167.237.500,00	3 Ruang	239.574.500,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	144.950.000,00		0,00		0,00		-	3 Ruang	135.582.750,00	3 Ruang	135.582.750,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	193.100.000,00		0,00		6.400.000,00		84.175.250	3 Ruang	98.761.950,00	3 Ruang	189.337.200,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Mebel Sekolah			728.635.400,00						-	14 paket	700.245.000,00	14 paket	700.245.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	5 paket	561.195.000,00		0,00		19.086.300,00	5 paket	499.875.000	5 paket	6.320.000,00	5 paket	525.281.300,00						
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 Unit	771.900.000,00	10 Unit	2.571.600,00		55.587.320,00	5 unit	54.612.576	32 Unit	566.825.505,00	32 Unit	679.597.001,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 Peserta Didik	105.565.000,00		0,00		0,00	20 Peserta Didik	39.500.000	54 Peserta Didik	59.500.000,00	54 Peserta Didik	99.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	389.373.900,00	100 Peserta Didik	2.059.050,00		29.543.280,00	100 Peserta Didik	54.712.600	1000 Peserta Didik	199.377.110,00	1000 Peserta Didik	285.692.040,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	2.704.489.200,00	104 Orang	556.253.304,00	104 Orang	599.156.902,00	104 Orang	657.192.245	104 Orang	877.775.870,00	104 Orang	2.690.378.321,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	457.013.700,00	40 Orang	42.904.850,00		153.140.650,00	100 Orang	23.589.915	400 Orang	145.724.810,00	400 Orang	365.360.225,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	63.621.950,00	38 Satuan Pendidikan	8.055.300,00	38 Satuan Pendidikan	5.567.640,00	38 Satuan Pendidikan	6.247.800	38 Satuan Pendidikan	28.469.100,00	38 Satuan Pendidikan	48.339.840,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	42 sekolah	5.712.600.000,00	42 sekolah	1.300.261.208,00	42 sekolah	1.262.155.281,00	42 sekolah	1.365.287.178	42 sekolah	1.656.080.974,00	42 sekolah	5.583.784.641,00					
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	35.200.000,00	190 Orang	15.960.000,00	190 Orang	0,00	190 Orang	-	190 Orang	12.240.000,00	190 Orang	28.200.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	815.005.595,00		0,00		17.390.592,00		102.839.680	2 Ruang	514.004.405,18	2 Ruang	634.234.677,57					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			0,00		0,00		-			-	0,00					
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen	327.119.000,00	3 Dokumen	9.518.500,00	10 Dokumen	20.517.200,00	10 Dokumen	26.836.815	38 Dokumen	180.882.240,00	38 Dokumen	237.754.755,00					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	175.757.400,00		0,00		0,00	273 Paket	173.232.150	273 Paket	-	273 Paket	173.232.150,00					
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang	1.400.000.000,00		0,00		0,00		52.089.751	7 Ruang	1.017.631.776,09	7 Ruang	1.069.721.527,09					
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	651.169.482,00		0,00		0,00		106.211.300	3 Unit	233.995.170,00	3 Unit	340.206.470,00					
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	51.239.900,00		0,00	38 Satuan Pendidikan	690.900,00	38 Satuan Pendidikan	19.520.000	38 Satuan Pendidikan	20.850.000,00	38 Satuan Pendidikan	41.060.900,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	193.100.000,00		0,00		6.430.896,00		168.630.000	4 Ruang	14.525.774,50	4 Ruang	189.586.670,50					
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	15 Satuan Pendidikan	14.144.773.915,00	7,96%	1.126.404.912,00	25%	1.304.008.064,75	15 Satuan Pendidikan	2.884.243.411,01	15 Satuan Pendidikan	6.956.151.651,92	15 Satuan Pendidikan	12.270.808.039,68					
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	800.000.000,00		0,00		0,00		-	1 Ruang	639.630.135,47	1 Ruang	639.630.135,47					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	241.920.230,00		0,00		0,00		-	1 Ruang	187.852.660,00	1 Ruang	187.852.660,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1.085.098.235,00		0,00		23.884.800,00		14.823.610	1 Ruang	848.630.853,46	1 Ruang	887.339.263,46					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	300.000.000,00		0,00		0,00		-	1 Ruang	232.582.692,91	1 Ruang	232.582.692,91					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.515.945.000,00		0,00		58.936.482,75		681.084.005	2 Unit	437.018.732,25	2 Unit	1.177.039.220,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1.085.185.000,00		0,00		35.296.224,00		216.863.249	2 Ruang	618.716.168,98	2 Ruang	870.875.641,99					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang			0,00		0,00		-		-		0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00		0,00		0,00		-	3 Ruang	229.682.043,25	3 Ruang	229.682.043,25					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	214.678.790,00		0,00		0,00		7.117.320	2 Ruang	153.177.526,92	2 Ruang	160.294.846,92					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	277.472.710,00		0,00		0,00		41.787.800	3 Unit	210.394.164,32	3 Unit	252.181.964,32					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	559.765.429,00		0,00		0,00		257.458.000	3 Paket	282.148.100,00	3 Paket	539.606.100,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	579.155.171,00		0,00		0,00		177.670.000	2 Paket	401.050.000,00	2 Paket	578.720.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	290.000.000,00	2 Unit	38.855.425,00	6 Unit	0,00	6 Unit	24.727.700	6 Unit	115.770.750,00	6 Unit	179.353.875,00					
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	350 Peserta Didik	72.500.000,00		0,00	11 Peserta Didik	24.000.000,00	11 Peserta Didik	2.000.000	32 Peserta Didik	46.500.000,00	32 Peserta Didik	72.500.000,00					
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	65.000.000,00		0,00		0,00	226 Paket	59.295.300	226 Paket	-	226 Paket	59.295.300,00					
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	207.067.000,00		0,00		0,00		-	2 Paket	183.913.303,00	2 Paket	183.913.303,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	495.105.500,00	100 Peserta Didik	3.614.550,00		45.226.200,00	100 Peserta Didik	35.964.200	1000 Peserta Didik	257.655.235,00	1000 Peserta Didik	342.460.185,00					
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	1.276.620.000,00	56 Orang	286.971.607,00	56 Orang	288.477.376,00	56 Orang	294.502.218	56 Orang	394.798.349,00	56 Orang	1.264.749.550,00					
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	393.165.600,00	45 Orang	31.526.860,00	350 Orang	36.963.750,00	350 Orang	140.029.615	350 Orang	56.506.350,00	350 Orang	265.026.575,00					
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	15 Satuan Pendidikan an	34.725.700,00	15 Satuan Pendidikan an	3.452.400,00	15 Satuan Pendidikan an	3.495.360,00	15 Satuan Pendidikan an	8.536.800	15 Satuan Pendidikan an	13.622.700,00	15 Satuan Pendidikan an	29.107.260,00					
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	15 Satuan Pendidikan an	3.801.900.000,00	15 Satuan Pendidikan an	748.834.670,00	15 Satuan Pendidikan an	787.522.072,00	15 Satuan Pendidikan an	715.095.244	15 Satuan Pendidikan an	1.410.696.945,00	15 Satuan Pendidikan an	3.662.148.931,00					
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	27.999.800,00	75 Orang	11.170.000,00	75 Orang	0,00	75 Orang	6.840.000	75 Orang	3.200.000,00	75 Orang	21.210.000,00					
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Dokumen	18.750.000,00	5 Dokumen	735.000,00	15 Dokumen	0,00	15 Dokumen	6.270.000	15 Dokumen	7.980.000,00	15 Dokumen	14.985.000,00					
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan an	16.080.000,00	15 Satuan Pendidikan an	1.244.400,00	15 Satuan Pendidikan an	205.800,00	15 Satuan Pendidikan an	10.376.000	15 Satuan Pendidikan an	1.150.000,00	15 Satuan Pendidikan an	12.976.200,00					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	250 Paket	186.639.750,00		0,00		0,00	226 Paket	183.802.350	226 Paket	-	226 Paket	183.802.350,00					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300.000.000,00		0,00		0,00		-	3 Ruang	223.474.942,36	3 Ruang	223.474.942,36					
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62 Satuan Pendidikan an	6.918.378.150,00	21,47%	1.485.062.600,00	25%	1.041.576.150,00	58 Satuan Pendidikan an	1.852.695.429,00	62 Satuan Pendidikan an	2.276.942.169,00	62 Satuan Pendidikan an	6.656.276.348,00					
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			362.744.000,00		0,00		0,00		-	2 Unit	353.906.860,00	2 Unit	353.906.860,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	50.000.000,00		0,00		950.160,00		-	2 Unit	44.990.963,00	2 Unit	45.941.123,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	292.140.000,00		0,00		4.889.840,00		-	2 Unit	134.156.037,00	2 Unit	139.045.877,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Program Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV										
			8		9		10		11		12								
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15=14/6 x 100%	16
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	28.829.600,00		0,00		0,00		-	2 Paket	27.820.000,00	2 Paket	27.820.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	53.600.000,00		0,00		0,00		-	2 Paket	35.000.000,00	2 Paket	35.000.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	194.812.000,00		0,00		0,00		26.565.020	2 Paket	162.800.000,00	2 Paket	189.365.020,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	88.437.400,00		0,00		0,00		-	500 Peserta Didik	86.957.405,00	500 Peserta Didik	86.957.405,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	3.886.100.000,00	250 Orang	621.450.000,00	250 Orang	924.200.000,00	250 Orang	1.038.250.000	250 Orang	1.302.050.000,00	250 Orang	3.885.950.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	371.009.950,00	300 Orang	177.493.600,00	300 Orang	22.190.750,00	300 Orang	106.553.900	300 Orang	38.359.750,00	300 Orang	344.598.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan	85.299.200,00	60 Satuan Pendidikan	1.749.000,00	60 Satuan Pendidikan	34.897.350,00	60 Satuan Pendidikan	1.050.000	60 Satuan Pendidikan	34.807.996,00	60 Satuan Pendidikan	72.504.346,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOP	60 Satuan Pendidikan	1.439.400.000,00	60 Satuan Pendidikan	679.393.000,00	60 Satuan Pendidikan	49.312.500,00	60 Satuan Pendidikan	659.101.759	60 Satuan Pendidikan	28.746.508,00	60 Satuan Pendidikan	1.416.553.767,00						
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 Orang	17.010.000,00	120 Orang	4.977.000,00	120 Orang	3.150.000,00	120 Orang	-	120 Orang	8.591.100,00	120 Orang	16.718.100,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	60 Dokumen	29.160.000,00		0,00		1.985.550,00	10 Dokumen	1.338.750	60 Dokumen	18.755.550,00	60 Dokumen	22.079.850,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	19.836.000,00		0,00		0,00	150 Paket	19.836.000	150 Paket	-	150 Paket	19.836.000,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	1.936.558.900,00	7,57%	146.690.200,00	25%	152.689.644,00	3 Satuan Pendidikan	507.323.703,00	3 Satuan Pendidikan	887.450.141,00	3 Satuan Pendidikan	1.694.153.688,00						
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	188.206.650,00		0,00		6.490.400,00		82.249.850	1 Unit	93.988.715,00	1 Unit	182.728.965,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	140.557.800,00		0,00		0,00	1 Paket	117.459.215	1 Paket	2.920.000,00	1 Paket	120.379.215,00						
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Orang	49.499.750,00		0,00	4 Orang	4.419.000,00	4 Orang	8.690.813	4 Orang	14.325.000,00	4 Orang	27.434.813,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
			I		II		III		IV																	
4	5	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	K	Rp.	13	K	Rp.	14=7+13	15=14/6 x 100%	K	Rp.	16		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang		19.999.750,00			0,00			0,00			-	30 Orang		11.281.750,00		30 Orang		11.281.750,00						
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan		581.100.000,00		3 Satuan Pendidikan		145.450.000,00		3 Satuan Pendidikan		112.932.500,00		3 Satuan Pendidikan		147.153.500		3 Satuan Pendidikan		164.797.000,00						
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang		3.719.000,00		30 Orang		497.700,00		30 Orang		2.375.000,00		30 Orang		777.000		30 Orang		-					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		20.000.000,00				0,00				0,00		1 Paket		16.716.000,00		1 Paket		19.992.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		50.000.000,00				0,00				1.509.600,00		1 Unit		46.699.935,00		1 Unit		48.209.535,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	60 Peserta Didik		169.888.750,00				0,00		1 Peserta Didik		3.295.500,00		60 Peserta Didik		24.717.325		60 Peserta Didik		98.082.400,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		50.000.000,00				0,00				0,00		1 Paket		-		1 Paket		40.975.600,00						
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		80.000.000,00				0,00				0,00		1 Unit		-		1 Unit		77.246.830,00						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		583.587.200,00		1 Unit		742.500,00				21.667.644,00		1 Unit		123.000.000		1 Unit		320.416.911,00						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			100,00%	341.476.000,00	0,00%		0,00	25,00%		32.897.000,00	25,00%		13.120.000,00	50,00%		287.449.995,00	100,00%			333.466.995,00						
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	2 Objek		341.476.000,00				0,00	25,00%		32.897.000,00	25%		13.120.000,00	50%		287.449.995,00	100,00%			333.466.995,00					
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	2 Objek		252.296.000,00				0,00			2 Objek		10.000.000,00	2 Objek		237.357.820,00	2 Objek			247.357.820,00						
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek		252.296.000,00				0,00			2 Objek		10.000.000	2 Objek		237.357.820,00	2 Objek			247.357.820,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3 nagari		76.700.000,00				0,00	50%		29.777.000,00	3 nagari		0,00	3 nagari		43.852.175,00	3 nagari			73.629.175,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	46.700.000,00		0,00		0,00		-	3 Objek	43.852.175,00	3 Objek	43.852.175,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	30.000.000,00		0,00	2 Laporan	29.777.000,00	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	29.777.000,00					
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	3 lembaga	12.480.000,00		0,00	25%	3.120.000,00	3 lembaga	3.120.000,00	3 lembaga	6.240.000,00	3 lembaga	12.480.000,00					
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	12.480.000,00		0,00	3 Unit	3.120.000,00	3 Unit	3.120.000	3 Unit	6.240.000,00	3 Unit	12.480.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS KESEHATAN			189.641.070.463,00	24,22%	30.870.134.576,50	21%	45.217.256.131,40	24,12%	40.528.495.040,00	27%	50.609.539.172,23	95,54%	167.225.424.920,13					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			92,85%	189.641.070.463,00	24,22%	30.870.134.576,50	20,63%	45.217.256.131,40	24,12%	40.528.495.040,00	26,57%	50.609.539.172,23	95,54%	167.225.424.920,13				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	80,00%	155.486.412.852,00	20,73%	29.305.965.752,00	21,43%	38.873.436.978,00	21,43%	35.348.367.505,00	32,84%	39.760.631.414,00	96,43%	143.288.401.649,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	76.300.782.860,00	25,00%	20.529.612.455,00	25,00%	21.529.351.175,00	25%	15.765.949.212,00	25%	18.164.370.952,00	100,00%	75.989.283.794,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	493 Orang	76.300.782.860,00	493 Orang	20.529.612.455,00	487 Orang	21.529.351.175,00	487	15.765.949.212,00	487	18.164.370.952,00	487 Orang	75.989.283.794,00					Dinas Kesehatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	245.680.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	25%	0,00	75%	237.695.000,00	100,00%	237.695.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	245.680.000,00		0,00		0,00	487	0,00		237.695.000,00	487	237.695.000,00					Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90%	413.325.900,00	22,61%	89.329.191,00	25%	58.537.268,00	25%	85.802.939,00	27,39%	162.084.177,00	100,00%	395.753.575,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	17.106.200,00	2 paket	9.899.923,00	2 paket	1.990.000,00		2.387.600,00	1 paket	2.030.000,00	5 paket	16.307.523,00					Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	93.386.000,00	2 paket	34.382.235,00	2 paket	9.845.000,00		8.668.850,00	1 paket	34.626.870,00	5 paket	87.522.955,00					Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	31.717.700,00	2 paket	6.026.567,00	2 paket	5.451.850,00		4.814.750,00	1 paket	13.912.700,00	5 paket	30.205.867,00					Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	271.116.000,00	20 laporan	39.020.466,00	20 laporan	41.250.418,00	25 laporan	69.931.739,00	35 laporan	111.514.607,00	100 laporan	261.717.230,00					Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	80%	1.462.376.600,00	25,00%	86.400.000,00	25%	1.300.270.000,00		0,00	50%	6.250.000,00	100,00%	1.392.920.000,00					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	86.400.000,00	1 Unit	86.400.000,00		0,00		0,00		-	1 Unit	86.400.000,00					Dinas Kesehatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	923.781.000,00		0,00	12 Unit	862.220.000,00		0,00		1.750.000,00	12 Unit	863.970.000,00					Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	452.195.600,00		0,00	9 Unit	438.050.000,00		0,00		4.500.000,00	9 Unit	442.550.000,00					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00%	1.364.066.151,00	25,00%	274.326.912,00	25,00%	293.466.337,00	25,00%	301.782.877,00	25,00%	398.852.113,00	100,00%	1.268.428.239,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.756.800,00	3 laporan	3.480.000,00	3 laporan	560.000,00	3 laporan	650.000,00	3 laporan	690.000,00	12 Laporan	5.380.000,00					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.544.944,00	3 laporan	39.873.053,00	3 laporan	44.556.244,00	3 laporan	40.660.501,00	3 laporan	54.642.278,00	12 Laporan	179.732.076,00					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.153.764.407,00	3 laporan	230.973.859,00	3 laporan	248.350.093,00	3 laporan	260.472.376,00	3 laporan	343.519.835,00	12 Laporan	1.083.316.163,00					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	1.079.868.200,00	22,48%	85.803.016,00	25,00%	91.540.937,00	25,00%	171.748.835,00	27,52%	508.982.393,00	100,00%	858.075.181,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	11.617.000,00	1 Unit	2.835.000,00		2.754.000,00		2.385.600,00		3.552.600,00	1 Unit	11.527.200,00					Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	437.625.200,00	10 Unit	78.088.016,00	20 Unit	86.426.937,00	34 unit	71.708.235,00	11 Unit	92.155.479,00	75 Unit	328.378.667,00					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50.090.000,00	15 Unit	4.880.000,00	15 Unit	2.360.000,00	8 unit	5.735.000,00	12 Unit	5.280.000,00	50 Unit	18.255.000,00					Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	580.536.000,00	3 Unit	0,00		0,00		91.920.000,00		407.994.314,00	3 Unit	499.914.314,00					Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	74.620.313.141,00	25,00%	8.240.494.178,00	25,00%	15.600.271.261,00	25,00%	19.023.083.642,00		20.282.396.779,00	75,00%	63.146.245.860,00					
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	5 BLUD	74.620.313.141,00	5 BLUD	8.240.494.178,00	5 BLUD	15.600.271.261,00	5 BLUD	19.023.083.642,00		20.282.396.779,00	5 BLUD	63.146.245.860,00					Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	88%	32.263.597.161,00	25,00%	1.306.274.474,50	12,50%	6.141.135.503,40	27,50%	4.654.404.548,00	22,50%	10.201.772.783,23	87,50%	22.303.587.309,13					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			8	9	10	11	12	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K		Rp.	K
4	5																		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	75,00%	16.864.005.464,00	25,00%	930.885.068,50		541.862.588,40	30%	204.887.623,00	20%	6.389.824.039,23	75,00%	8.067.459.319,13						
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		9.421.400,00	0,00%	9.421.400,00						Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	27.939.395,00	1 Unit	9.845.000,00		3.115.000,00	1 Unit	3.378.000,00		6.550.000,00	1 Unit	22.888.000,00						Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	648.668.000,00		578.400.000,00	12 Unit	0,00		0,00		45.700.000,00	12 Unit	624.100.000,00						Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	114 Unit	81.048.580,00		0,00		0,00		0,00		80.995.000,00	0,00%	80.995.000,00						Dinas Kesehatan
pengembangan rumah sakit			14.250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		5.985.997.500,00	0,00%	5.985.997.500,00						Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	1.327.291.089,00	1 Paket	342.640.068,50	2 Paket	537.210.488,40	1 Paket	194.236.623,00	1 Paket	252.492.389,23	5 Paket	1.326.579.569,13						Dinas Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	5 Paket	29.058.400,00	4 paket	0,00	2 paket	1.537.100,00	1 Paket	7.273.000,00		8.667.750,00	7 paket	17.477.850,00						Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82,00%	15.399.591.697,00	25,00%	375.389.406,00	25%	5.599.272.915,00	25%	4.449.516.925,00	25%	3.811.948.744,00	100,00%	14.236.127.990,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1129 Orang	16.779.950,00	202 Orang	0,00	182 Orang	0,00	571 orang	315.000,00	768	14.122.050,00	768 Orang	14.437.050,00						Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1077 Orang	19.999.900,00	204 Orang	0,00	194 Orang	0,00	582 orang	656.250,00	767	15.171.250,00	767 orang	15.827.500,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1026 Orang	28.597.550,00	191 Orang	0,00		6.000.000,00	527 orang	15.519.000,00	766	3.928.000,00	766 Orang	25.447.000,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3957 Orang	16.366.450,00	623 Orang	0,00		220.500,00	2033 orang	0,00	3234	14.683.500,00	3.234 Orang	14.904.000,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12241 Orang	22.238.300,00	10248 orang	0,00	10248 orang	0,00	11247 orang	19.810.450,00	18479	525.000,00	18.479 Orang	20.335.450,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV										
			8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27749 Orang	20.262.650,00	13109 Orang	0,00		0,00	12569 orang	0,00	25224	12.590.000,00	25.224 Orang	12.590.000,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4928 Orang	422.309.700,00	1801 Orang	64.888.000,00	1083 Orang	83.697.900,00	4615 orang	139.468.400,00	4695	122.200.000,00	4.695 Orang	410.254.300,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7411 Orang	31.393.900,00	999 Orang	0,00	12234 Orang	0,00	4068 orang	13.411.000,00	4624	17.205.500,00	4624	30.616.500,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	976 Orang	77.072.900,00	298 Orang	0,00	950 Orang	59.999.940,00	1101 orang	0,00	1261	16.839.250,00	1.261 Orang	76.839.190,00					Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	128 Orang	8.145.400,00	63 Orang	0,00	117 Orang	0,00	129 orang	8.036.100,00	139	-	139 Orang	8.036.100,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1400 Orang	206.162.400,00	385 Orang	0,00	2331 Orang	196.083.500,00	1180 orang	0,00	1624	8.138.250,00	1.624 Orang	204.221.750,00					Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1533 Orang	22.647.600,00	422 Orang	0,00	1533 Orang	0,00	1212 orang	0,00	1955	22.352.300,00	1.955 Orang	22.352.300,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen			0,00	6 Dokumen	0,00		0,00			-	0,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen	900.489.700,00	15 Dokumen	51.829.937,00	15 Dokumen	306.323.700,00	15 Dokumen	176.476.841,00		338.772.475,00	45 dokumen	873.402.953,00						
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	16.428.450,00	3 dokumen	1.202.000,00	1 dokumen	9.443.200,00	5 dokumen	1.228.500,00	3	4.135.500,00	12 dokumen	16.009.200,00					Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	212.845.650,00	3 dokumen	32.255.424,00	3 dokumen	149.297.500,00	3 dokumen	16.703.696,00	3	13.967.218,00	12 Dokumen	212.223.838,00						
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	194.649.850,00	1 Dokumen	3.014.800,00	2 Dokumen	700.000,00	2 Dokumen	15.970.000,00		80.642.800,00	5 Dokumen	100.327.600,00						
Pengelolaan Surveilans Kesehatan			51.736.000,00		0,00		650.000,00		0,00		7.464.700,00	2%	8.114.700,00						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	754.117.000,00	3 Dokumen	64.195.250,00	3 Dokumen	161.768.000,00	3 dokumen	108.825.500,00	3	329.009.970,00	12 Dokumen	663.798.720,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
			9		10		11		12									
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15	8.456.288.400,00	3	14.072.300,00	5	4.120.957.900,00	5	2.775.306.000,00	2	1.509.247.016,00	15 Dokumen	8.419.583.216,00					Dinas Kesehatan
pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensila KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional			3.240.000,00	1	0,00		211.000,00	3 spec	120.000,00		448.380,00	4 spec	779.380,00					
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	28.341.850,00		0,00	1	2.682.000,00	1	11.263.300,00		13.109.538,00	1 Dokumen	27.054.838,00					
Operasional Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48	2.698.527.950,00		0,00	24	298.193.231,00	12	887.246.551,00	12	881.191.493,00	48 Dokumen	2.066.631.275,00					
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8	74.783.000,00		5.659.050,00	4	32.336.300,00	2	871.500,00	2	27.050.400,00	8 Dokumen	65.917.250,00					Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	12	45.000.000,00	4 Faskes	5.269.200,00		0,00		0,00	4	29.363.950,00	12 Faskes	34.633.150,00					
Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)			9.000.000,00		0,00		0,00		7.900.000,00		-		7.900.000,00					
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	970.781.647,00	1 unit PSC	133.003.445,00	1 unit PSC	170.708.244,00	1 unit PSC	244.955.587,00	1	301.226.204,00	1 Unit	849.893.480,00					
Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria			1.985.500,00		0,00		0,00		0,00		1.704.000,00	0,00%	1.704.000,00					
pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			89.400.000,00		0,00		0,00		5.433.250,00		26.860.000,00	0,00%	32.293.250,00					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65 Indeks	1.090.900.150,00	22,29%	101.144.600,00	20,00%	26.534.300,00	21,67%	389.977.537,00	36,05%	403.710.475,00	100,00%	921.366.912,00					
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	90,00%	1.506.750,00	64,86%	0,00	10%	279.300,00	15,00%	0,00	10,14%	909.300,00	100,00%	1.188.600,00					
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37	1.506.750,00	24 Faskes	0,00	37	279.300,00		0,00		909.300,00	61 Dokumen	1.188.600,00					Dinas Kesehatan
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota		90,00%	49.472.200,00	0,00%	0,00	25%	0,00	25%	0,00	50%	38.351.300,00	100,00%	38.351.300,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokume n	49.472.200,00	0,00%	0,00	6 Dokume n	0,00	3 Dokume n	0,00	3 Dokumen	38.351.300,00	12 Dokumen	38.351.300,00					Dinas Kesehatan	
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	40,00%	1.039.921.200,00	2,00%	101.144.600,00	25%	26.255.000,00	25%	389.977.537,00	48%	364.449.875,00	100,00%	881.827.012,00						
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 orang	1.039.921.200,00	1 orang	101.144.600,00	50 orang	26.255.000,00		389.977.537,00		364.449.875,00	51 orang	881.827.012,00					Dinas Kesehatan	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	76.7 indeks	377.962.100,00	28,10%	97.418.950,00	24,21%	63.753.700,00	25,00%	90.754.700,00	16,45%	95.872.200,00	93,75%	347.799.550,00						
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85,00%	48.920.850,00	40,00%	36.041.400,00	25%	2.645.700,00	25%	7.840.250	10%	1.890.300	100,00%	48.417.650,00						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80 Dokume n	48.920.850,00	30 Dokume n	36.041.400,00	30 Dokume n	2.645.700,00	10 Dokume n	7.840.250,00	10 Dokumen	1.890.300,00	80 Dokumen	48.417.650,00					Dinas Kesehatan	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	85,00%	155.953.650,00	44,29%	61.377.550,00	14,3%	800.000,00	25%	34.833.350,00		47.933.800,00	83,57%	144.944.700,00						
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 P-IRT	155.953.650,00	31 P-IRT	61.377.550,00	10 P-IRT	800.000,00		34.833.350,00	4 P-IRT	47.933.800,00	45 P-IRT	144.944.700,00					Dinas Kesehatan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	70,00%	173.087.600,00		0,00	33,33%	60.308.000,00	25%	48.081.100,00	39,34%	46.048.100,00	97,67%	154.437.200,00						
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Sampel , 70 sasaran	173.087.600,00		0,00	10 Sampel	60.308.000,00	50 sampel	48.081.100,00	8 sampel	46.048.100,00	68 Sampel	154.437.200,00				Dinas Kesehatan		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	96,25%	422.198.200,00	25,00%	59.330.800,00	25,00%	112.395.650,00	25,00%	44.990.750,00	25,00%	147.552.300,00	100,00%	364.269.500,00						
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	5 Kegiatan	266.961.900,00	25,00%	20.530.800,00	25%	112.395.650,00	25%	21.600.000,00	25%	101.940.000,00	5 Kegiatan	256.466.450,00						
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	266.961.900,00	3 Dokumen	20.530.800,00	3 Dokumen	112.395.650,00	3 Dokumen	21.600.000,00	3 Dokumen	101.940.000,00	12 Dokumen	256.466.450,00						
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 Kelurahan	13.485.300,00	25,00%	0,00	25%	0,00	25%	9.190.750,00	25%	3.322.300,00	16 Kelurahan	12.513.050,00						
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	13.485.300,00		0,00	1 Dokumen	0,00		9.190.750,00		3.322.300,00	1 Dokumen	12.513.050,00				Dinas Kesehatan		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas	16 Kelurahan	141.751.000,00	25,00%	38.800.000,00	25%	0,00	25%	14.200.000,00	25%	42.290.000,00	16 Kelurahan	95.290.000,00						
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	141.751.000,00		38.800.000,00	1 Dokumen	0,00	2 Dokumen	14.200.000,00	1 Dokumen	42.290.000,00	4 Dokumen	95.290.000,00				Dinas Kesehatan		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			22.170.661.719,01	13,05%	2.654.533.655,00	19,81%	3.708.219.551,23	25,46%	4.583.374.171,43	35,41%	10.422.160.109,81	93,73%	21.368.287.487,47						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			65,26%	22.170.661.719,01	13%	2.654.533.655,00	20%	3.708.219.551,23	25%	4.583.374.171,43	35%	10.422.160.109,81	93,73%	21.368.287.487,47					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100,00%	7.679.798.606,00	16,67%	1.919.679.739,00	16,67%	1.938.949.857,00	29,17%	1.602.055.573,00	37,50%	2.062.426.406,00	100,00%	7.523.111.575,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan Perangkat Daerah	100,00%	6.500.432.458,00	25,00%	1.712.038.399,00	25,00%	1.793.303.856,00	25,00%	1.333.200.362,00	25%	1.608.442.745,00	100,00%	6.446.985.362,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	6.500.432.458,00	141 orang / bulan	1.712.038.399,00	141 orang / bulan	1.793.303.856,00	141 orang / bulan	1.333.200.362	658 orang / bulan	1.608.442.745,00	423 orang / bulan	6.446.985.362					Dinas PUPR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	22.750.000,00		0,00	0%	0,00		0,00	100%	20.650.000,00	100,00%	20.650.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	47 Paket	22.750.000,00		0,00		0,00		-	59 Paket	20.650.000,00	59 Paket	20.650.000					Dinas PUPR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100,00%	314.725.068,00	25,00%	38.566.246,00	25%	48.835.515,00	25%	74.076.080,00	25%	123.204.593,00	100,00%	284.682.434,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.338.100,00	0%		0%	0,00	0%	-	4 Paket	3.252.100,00	4 Paket	3.252.100					Dinas PUPR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.855.000,00	1 paket	2.600.000,00	1 paket	350.000,00		8.436.000	4 Paket	23.159.400,00	4 Paket	34.545.400					Dinas PUPR
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.612.350,00	3 paket	2.961.000,00	1 paket	340.000,00		2.515.000	12 Paket	3.997.900,00	12 Paket	9.813.900					Dinas PUPR
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	262.919.618,00	6 laporan	33.005.246,00	2 laporan	48.145.515,00	8 laporan	63.125.080	24 Laporan	92.795.193,00	24 Laporan	237.071.034					Dinas PUPR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	187.344.300,00		0,00	0%	0,00	75%	47.768.850,00	25%	106.874.000,00	100,00%	154.642.850,00					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	187.344.300,00		0,00	0%	0,00	2 unit	47.768.850	6 unit	106.874.000,00	6 unit	154.642.850					Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100,00%	305.879.780,00	25,00%	87.000.694,00	25,00%	47.345.944,00	25,00%	69.787.360,00	25%	96.267.718,00	100,00%	300.401.716,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.993.600,00	3 laporan	1.040.000,00	3 laporan	250.000,00	3 laporan	-	12 Laporan	2.450.000,00	12 Laporan	3.740.000					Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22.008.180,00	9 Laporan	5.013.994,00	7 laporan	4.405.894,00	3 laporan	5.377.310	36 Laporan	5.364.486,00	36 Laporan	20.161.684					Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	279.878.000,00	3 laporan	80.946.700,00	3 laporan	42.690.050,00	3 laporan	64.410.050	13 Laporan	88.453.232,00	13 Laporan	276.500.032					Dinas PUPR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	348.667.000,00	25,00%	82.074.400,00	25%	49.464.542,00	25%	77.222.921,00	25%	106.987.350,00	100,00%	315.749.213,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	51.680.000,00	1 unit	14.993.000,00	1 unit	5.805.000,00	1 unit	6.893.000	1 Unit	19.598.900,00	1 Unit	47.289.900					Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	271.613.000,00	8 unit	58.925.150,00	1 unit	40.503.700,00	7 unit	69.078.921	30 Unit	81.583.450,00	30 Unit	250.091.221					Dinas PUPR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	17.530.000,00	4 unit	5.462.000,00	1 unit	3.155.842,00	1 unit	1.251.000	6 Unit	3.075.000,00	6 Unit	12.943.842					Dinas PUPR
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	-	1 Unit	2.730.000,00	1 Unit	2.730.000					Dinas PUPR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.844.000,00	1 unit	2.694.250,00	1 unit	0,00	1 unit	-	1 Unit	-	1 Unit	2.694.250					Dinas PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	22,42%	3.738.737.021,00	1,07%	54.656.514,00	25,00%	321.987.970,00	25,00%	465.280.241,17	47,50%	2.837.328.253,48	98,57%	3.679.252.978,65					
	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	70,40%				25%						25,00%	0,00					
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,05 km	244.924.100,00	0,61%	1.500.000,00	0,25	235.387.970,00	25%	6.031.130,00	50%	0,00	100,61%	242.919.100,00					
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,15 KM	244.924.100,00		1.500.000,00	0.074 km	235.387.970,00		6.031.130	0.72 km	-	0.72 km	242.919.100					Dinas PUPR
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	2,5 km	3.493.812.921,00	1,52%	53.156.514,00	0,25	86.600.000,00	25%	459.249.111,17	45%	2.837.328.253,48	96,52%	3.436.333.878,65					
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,8 KM	1.648.417.481,00		1.500.000,00	0,45 km	4.500.000,00		227.417.481	1,8 KM	1.401.373.791,48	1,8 KM	1.634.791.273					Dinas PUPR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,5 KM	1.754.635.440,00		51.656.514,00	0.550 km	82.100.000,00		231.422.130	1,5 KM	1.355.696.212,00	1,5 KM	1.720.874.856					Dinas PUPR
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	90.760.000,00		0,00		0,00		409.500	1 Dokumen	80.258.250,00	1 Dokumen	80.667.750					Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	86,57%	157.960.000,00	48,00%	76.965.000,00	25,00%	3.000.000,00	25,00%	76.856.000,00	2,00%	0,00	100,00%	156.821.000,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	100 SR	157.960.000,00	48,00%	76.965.000,00	25%	3.000.000,00	25%	76.856.000,00	2%	0,00	68 SR	156.821.000,00						
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen				0,00			-		-	0,00%	-					Dinas PUPR	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	157.960.000,00		76.965.000,00	68 SR	3.000.000,00		76.856.000	68 SR	-	68 SR	156.821.000						
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi layak	90,00%	442.803.350,00	5,36%	23.737.400,00	9,02%	39.948.500,00	25,00%	31.844.400,00	60,00%	322.762.150,00	99,38%	418.292.450,00						
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20 rumah tangga	442.803.350,00	5,36%	23.737.400,00	9,02%	39.948.500,00	25%	31.844.400,00	60%	322.762.150,00	20 rumah tangga	418.292.450,00						
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5 M³/Hari	227.886.400,00		1.500.000,00		15.686.400,00		1.500.000	5 M³/Hari	204.545.000,00	5 M³/Hari	223.231.400					Dinas PUPR	
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	2,5 M³/Hari	97.960.000,00		1.500.000,00		0,00		3.000.000	2,5 M³/Hari	92.622.000,00	2,5 M³/Hari	97.122.000					Dinas PUPR	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	111.256.950,00	1 Unit	20.737.400,00		24.262.100,00	1 Unit	27.344.400	1 Unit	25.595.150,00	1 Unit	97.939.050						
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	5.700.000,00				0,00		-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-					Dinas PUPR	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,34%	3.205.192.250,00	14,02%	449.468.802,00	25,00%	1.041.779.713,00	25,00%	919.703.168,00	30,00%	667.551.955,00	94,02%	3.078.503.638,00						
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	1500 meter	3.205.192.250,00	14,02%	449.468.802,00	25%	1.041.779.713,00	25%	919.703.168,00	30%	667.551.955,00	2100 meter	3.078.503.638,00						
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	0,00				0,00				-							Dinas PUPR	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV									
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase	1.538.866.400,00	1 sistem drainase	4.500.000,00	1 sistem drainase	590.226.250,00	1 sistem drainase	716.454.025	1 Sistem Drainase	113.469.000,00	1 Sistem Drainase	1.424.649.275,00					Dinas PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase	1.666.325.850,00	1 sistem drainase	444.968.802,00	1 sistem drainase	451.553.463,00	1 sistem drainase	203.249.143	1 Sistem Drainase	554.082.955,00	1 Sistem Drainase	1.653.854.363					Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber-IMB	46,10%	466.948.000,00	0,00%	0,00	12,00%	0,00	25%	282.712.160,00	60%	164.590.840,00	97,00%	447.303.000,00					
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	50 unit	466.948.000,00	0,00%	0,00	12%	0,00	25%	282.712.160,00	60%	164.590.840,00	39 unit	447.303.000,00					
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	456.000.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	2 Bangunan Gedung	279.161.660		157.443.340,00	2 Bangunan Gedung	436.605.000					Dinas PUPR
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	10.948.000,00	0,00%	0,00	6 dokumen	0,00	6 dokumen	3.550.500	39 dokumen	7.147.500,00	50 Dokumen	10.698.000					Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	93,74%	5.915.555.842,01	1,22%	72.062.500,00	25,00%	269.420.112,23	25,00%	1.069.466.382,26	25,00%	4.160.967.031,32	76,22%	5.571.916.025,81					
	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik	85,67%				25%						25,00%	0,00					
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	2,1 km	5.915.555.842,01	1,22%	72.062.500,00	0,25	269.420.112,23	25%	1.069.466.382,26	25%	4.160.967.031,32	1,550 km	5.571.916.025,81					
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	92.970.000,00		0,00		0,00		1.433.250	1 Dokumen	80.936.000,00	1 Dokumen	82.369.250					Dinas PUPR
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,1 KM	4.824.262.155,04		1.500.000,00	0.025 km	15.073.615,00	0.53 km	723.209.160	0,1 KM	3.785.735.716,81	0,1 KM	4.525.518.492					Dinas PUPR
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	998.323.686,97		70.562.500,00	1 km	254.346.497,23		344.823.972	2 KM	294.295.314,51	2 KM	964.028.284					Dinas PUPR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV										
			8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	61,00%	52.163.250,00	16,76%	3.350.875,00	15,59%	3.064.875,00	25,00%	4.506.500,00	35,00%	35.416.250,00	92,34%	46.338.500,00						
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	30 orang	9.999.550,00	27,21%	2.720.875,00	24,51%	2.450.625,00	25%	2.711.000,00	20%	787.500,00	96,72%	8.670.000,00						
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	9.999.550,00		2.720.875,00	0%	2.450.625,00		2.711.000		787.500,00	0,00%	8.670.000					Dinas PUPR	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	45 Dokume n	32.164.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00	100%	28.878.100,00	100,00%	28.878.100,00						
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	45 Dokume n	32.164.000,00							2 Dokumen	28.878.100,00	2 Dokumen	28.878.100					Dinas PUPR	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	8 dokume n	9.999.700,00	6,30%	630.000,00	6,67%	614.250,00	25%	1.795.500,00	50%	5.750.650,00	87,97%	8.790.400,00						
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	8 Paket Pekerjaa n	9.999.700,00		630.000,00	2 paket	614.250,00	4 paket	1.795.500	2 paket	5.750.650,00	8 paket	8.790.400					Dinas PUPR	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,21%	511.503.400,00	14,35%	54.612.825,00	25,00%	90.068.524,00	25,00%	130.949.747,00	21,67%	171.117.224,01	86,02%	446.748.320,01						
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 dokume n	414.870.800,00	7,12%	29.525.625,00	25%	66.827.899,00	25%	109.656.697,00	25%	154.148.774,01	1 Dokumen	360.158.995,01						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokume n	414.870.800,00	25,00%	29.525.625,00	0,25	66.827.899,00		109.656.697		154.148.774,01	1 Dokumen	360.158.995					Dinas PUPR	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	1 dokume n	87.318.500,00	27,87%	24.334.700,00	25%	22.990.625,00	25%	16.167.300,00	20%	15.749.825,00	1 Dokumen	79.242.450,00						
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokume n	19.698.300,00	25,00%	8.560.900,00	0,25	2.729.375,00		3.192.300	1 Dokumen	1.942.775,00	1 Dokumen	16.425.350					Dinas PUPR	
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokume n	67.620.200,00	25,00%	15.773.800,00	0,25	20.261.250,00		12.975.000	1 Dokumen	13.807.050,00	1 Dokumen	62.817.100					Dinas PUPR	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	3 dokume n	9.314.100,00	8,08%	752.500,00	25%	250.000,00	25%	5.125.750,00	20%	1.218.625,00	1 Dokumen	7.346.875,00						
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokume n	9.314.100,00	25,00%	752.500,00	0,25	250.000,00		5.125.750	1 Dokumen	1.218.625,00	1 Dokumen	7.346.875					Dinas PUPR	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			32.916.987.291,00	13,93%	4.274.814.486,00	20,19%	5.584.499.454,00	25,23%	7.522.292.329,00	36%	11.606.630.906,00	94,88%	28.988.237.175,00						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		92%	18.657.231.128,00	12,50%	2.077.975.302,00	20,67%	3.162.197.974,00	27%	4.986.648.747,00	39%	7.796.807.165,00	99,00%	18.023.629.188,00						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90,00%	7.986.073.979,00	38%	2.032.444.029,00	21%	2.030.594.662,00	21%	1.669.946.536,00	21%	2.014.062.918,00	100,00%	7.747.048.145,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.381.010.174,00	25,00%	1.712.497.401,00	25,00%	1.770.013.894,00	25,00%	1.301.653.056,00	25,00%	1.502.242.186,00	100,00%	6.286.406.537,00						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	672 Orang/bulan	6.381.010.174,00	47 orang / bulan	1.712.497.401,00	47 orang / bulan	1.770.013.894,00	47 orang / bulan	1.301.653.056,00	47 orang / bulan	1.502.242.186,00	188 orang / bulan	6.286.406.537,00					Dinas Perkim LH	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	23.500.000,00	100,00%	23.500.000,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	23.500.000,00						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	23.500.000,00	48 paket	23.500.000,00		0,00		0,00		0,00	48 paket	23.500.000,00					Dinas Perkim LH	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90%	534.118.550,00	25,00%	70.525.185,00	25%	104.752.729,00	25%	152.683.762,00	25%	187.285.713,00	100,00%	515.247.389,00						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	8.496.900,00		2.289.900,00	4 paket	2.321.400,00	9 paket	2.346.000,00	21 paket	351.000,00	21 paket	7.308.300,00					Dinas Perkim LH	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	75.048.900,00		18.335.300,00	52 paket	21.501.650,00	52 paket	16.490.745,00	60 paket	13.268.050,00	60 paket	69.595.745,00					Dinas Perkim LH	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	17.929.350,00		1.193.900,00	5 paket	3.468.300,00	5 paket	6.594.500,00	15 paket	6.366.950,00	15 paket	17.623.650,00					Dinas Perkim LH	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	432.643.400,00		48.706.085,00		77.461.379,00		127.252.517,00	1 laporan	167.299.713,00	1 laporan	420.719.694,00					Dinas Perkim LH	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	140.323.100,00	25,00%	53.625.000,00	25%	0,00	25%	0,00	25,00%	79.950.000,00	100,00%	133.575.000,00						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	140.323.100	3 unit	53.625.000,00		0,00		0,00	3 unit	79.950.000,00	3 unit	133.575.000,00					Dinas Perkim LH	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	90%	586.153.155,00	25,00%	116.470.213,00	25,00%	120.677.379,00	25%	135.198.615,00	25,00%	182.898.219,00	100,00%	555.244.426,00						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	45.975.555,00	1 laporan	10.624.851,00		11.092.017,00		10.453.254,00	1 laporan	10.192.857,00	1 laporan	42.362.979,00					Dinas Perkim LH	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	540.177.600,00	1 laporan	105.845.362,00		109.585.362,00		124.745.361,00	1 laporan	172.705.362,00	1 laporan	512.881.447,00					Dinas Perkim LH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90%	320.969.000,00	25,00%	55.826.230,00	25%	35.150.660,00	25%	80.411.103,00	25%	61.686.800,00	100,00%	233.074.793,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.690.000,00	1 unit	4.441.500,00	1 unit	7.090.000,00		9.256.300,00	1 unit	7.522.600,00	1 unit	28.310.400,00					Dinas Perkim LH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	172.757.000,00	3 unit	28.277.250,00	11 unit	26.204.000,00	3 unit	27.708.650,00	10 unit	38.934.900,00	10 unit	121.124.800,00					Dinas Perkim LH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	31.750.000,00	3 unit	1.360.000,00	3 unit	1.856.660,00		3.834.000,00	2 unit	2.450.000,00	5 unit	9.500.660,00					Dinas Perkim LH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	74.772.000,00	1 unit	21.747.480,00		0,00	1 unit	39.612.153,00	2 unit	12.779.300,00	2 unit	74.138.933,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100,00%	562.552.876,00	25,00%	45.531.273,00	12,50%	224.006.773,00	12,50%	62.310.773,00	50%	103.324.173,00	100,00%	435.172.992,00					
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	104.960.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00					
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	44.960.050,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00					Dinas Perkim LH
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	59.999.950,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00					
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Laporan	457.592.876,00	25,00%	45.531.273,00	25%	224.006.773,00	25%	62.310.773,00	50%	103.324.173,00	1 Laporan	435.172.992,00					
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	457.592.876,00		45.531.273,00		224.006.773,00		62.310.773,00	1 Laporan	103.324.173,00	1 Laporan	435.172.992,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36%	98.709.750,00	0,00%	0,00	20,00%	294.000,00	25%	2.547.000,00	50%	78.621.350,00	95,00%	81.462.350,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV				15=14/6 x 100%			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	16							
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokume n	98.709.750,00		0,00	25,00%	294.000,00	1 dokume n	2.547.000,00	1 dokumen	78.621.350,00	1 dokumen	81.462.350,00			
Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisa si	1 Dokume n	98.709.750,00		0,00		294.000,00	1 Dokume n	2.547.000,00	1 Dokumen	78.621.350,00	1 Dokumen	81.462.350,00			Dinas Perkim LH
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	1 laporan	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24%	6.960.702.273,00	0,00%	0,00	25%	883.955.710,00	25%	3.220.888.350,00	50%	2.653.388.741,00	100,00%	6.758.232.801,00			
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian	2 kecamat an	6.960.702.273,00		0,00	25%	883.955.710,00	2 kecamat an	3.220.888.350,00	2 kecamata n	2.653.388.741,00	2 kecamatan	6.758.232.801,00			
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamat an	6.960.702.273,00		0,00	2 kecamat an	883.955.710,00	2 kecamat an	3.220.888.350,00	2 kecamata n	2.653.388.741,00	2 kecamatan	6.758.232.801,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	96,62%	3.049.192.250,00	0,00%	0,00	25,00%	23.346.829,00	50%	30.956.088,00	25%	2.947.409.983,00	100,00%	3.001.712.900,00			
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	144 unit	3.049.192.250,00		0,00	25,00%	23.346.829,00		30.956.088,00	144 unit	2.947.409.983,00	144 unit	3.001.712.900,00			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	144 unit	3.049.192.250,00		0,00		23.346.829,00		30.956.088,00	144 unit	2.947.409.983,00	144 unit	3.001.712.900,00			Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV									
			8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.						
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		73,92%	14.259.756.163,00	15,37%	2.196.839.184,00	19,71%	2.422.301.480,00	23,80%	2.535.643.582,00	31,89%	3.809.823.741,00	90,76%	10.964.607.987,00					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100,00%	118.244.300,00	25,00%	26.842.750,00	25,00%	47.060.700,00	25,00%	15.272.630,00	25,00%	27.216.650,00	100,00%	116.392.730,00					
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	1 dokumen	118.244.300,00	25,00%	26.842.750,00	25,00%	47.060.700,00	25%	15.272.630,00	25%	27.216.650,00	1 dokumen	116.392.730,00					
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	118.244.300,00		26.842.750,00		47.060.700,00		15.272.630,00	1 Dokumen	27.216.650,00	1 Dokumen	116.392.730,00					Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	427.000.423,00	12,50%	82.636.181,00	19,95%	60.841.251,00	37,50%	70.509.949,00	30,00%	143.080.764,00	99,95%	357.068.145,00					
Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	405.085.673,00	25,00%	81.801.181,00	14,89%	60.334.251,00	25%	62.709.324,00	35%	132.534.589,00	99,89%	337.379.345,00					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	10.265.200,00		1.596.000,00		3.348.500,00		1.060.500,00	1 Dokumen	2.463.550,00	1 Dokumen	8.468.550,00					Dinas Perkim LH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	15.406.700,00		441.000,00		2.376.045,00		7.329.525,00	1 Dokumen	4.926.375,00	1 Dokumen	15.072.945,00					Dinas Perkim LH
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	379.413.773,00		79.764.181,00	2 Jenis	54.609.706,00		54.319.299,00	2 Dokumen	125.144.664,00	2 Dokumen	313.837.850,00					Dinas Perkim LH
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	21.914.750,00		835.000,00	25%	507.000,00	50%	7.800.625,00	25%	10.546.175,00	100,00%	19.688.800,00					
Pemberian Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	21.914.750,00		835.000,00	1 kali	507.000,00	2 kali	7.800.625,00	4 Laporan	10.546.175,00	4 Laporan	19.688.800,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Luas RTH Publik	4,23%	2.072.617.850,00	17,45%	361.671.242,00	25%	415.312.502,00	25%	564.505.997,00	25%	658.161.991,00	92,45%	1.999.651.732,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
			I		II		III		IV																						
			9		10		11		12																						
4	5	8	K		Rp.		9	K		Rp.		10	K		Rp.		11	K		Rp.		12	13	K		Rp.		14=7+13	15=14/6 x 100%		16
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 kecamatan	2.072.617.850,00	25,00%	361.671.242,00	25%	415.312.502,00	25%	564.505.997,00	25%	658.161.991,00	100,00%	1.999.651.732,00																		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha	2.046.661.450,00	54 Ha	361.671.242,00	53 Ha	415.312.502,00	53 Ha	549.952.997,00	53 Ha	648.373.796,00	53 Ha	1.975.310.537,00																Dinas Perkim LH		
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang	25.956.400,00		0,00		0,00		14.553.000,00	40 Orang	9.788.195,00	40 Orang	24.341.195,00																Dinas Perkim LH		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32,00%	18.887.300,00	4,34%	819.000,00	3,48%	651.800,00	25%	8.453.910,00	60%	5.857.665,00	92,82%	15.782.375,00																		
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	24 fasyanke s	8.190.800,00		819.000,00	3,70%	303.000,00	24 fasyanke s	1.582.035,00	24 fasyankes	4.728.465,00	24 fasyankes	7.432.500,00																		
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	8.190.800,00		819.000,00		303.000,00	1 Laporan	1.582.035,00	1 Laporan	4.728.465,00	1 Laporan	7.432.500,00																Dinas Perkim LH		
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali	10.696.500,00		0,00	3,26%	348.800,00	2 kali	6.871.875,00	2 kali	1.129.200,00	2 kali	8.349.875,00																		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	10.696.500,00		0,00		348.800,00	1 Dokumen	6.871.875,00	1 Dokumen	1.129.200,00	1 Dokumen	8.349.875,00																Dinas Perkim LH		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55,00%	19.385.300,00	25,00%	1.433.250,00	25%	1.064.700,00	27%	5.664.350,00	20%	8.576.505,00	96,67%	16.738.805,00						
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100 persen	19.385.300,00	25,00%	1.433.250,00	25%	1.064.700,00	27%	5.664.350,00	20%	8.576.505,00	96,67%	16.738.805,00						
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Badan Usaha	19.385.300,00	3 badan usaha	1.433.250,00	10 badan usaha	1.064.700,00	8 badan usaha	5.664.350,00	9 badan usaha	8.576.505,00	30 badan usaha	16.738.805,00					Dinas Perkim LH	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	50,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00						
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00						
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00					Dinas Perkim LH	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100,00%	138.727.800,00	25,00%	2.047.500,00	25%	33.394.200,00	25%	42.833.725,00	25%	53.425.100,00	100,00%	131.700.525,00					
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	138.727.800,00	25,00%	2.047.500,00	25%	33.394.200,00	25%	42.833.725,00	3 jenis kegiatan	53.425.100,00	3 jenis kegiatan	131.700.525,00					
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	12.077.850,00		0,00		0,00	3 Dokumen	7.884.125,00	3 kali pendampingan	3.468.700,00	3 kali pendampingan	11.352.825,00					Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang	10.000.000,00		0,00	3 kelompok masyarakat	1.000.000,00	16 Orang	7.827.600,00	16 kelompok masyarakat	1.000.000,00	16 kelompok masyarakat	9.827.600,00					Dinas Perkim LH
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	4 Lembaga	116.649.950,00	2 lembaga	2.047.500,00	2 lembaga	32.394.200,00	1 Lembaga	27.122.000,00	4 lembaga	48.956.400,00	4 lembaga	110.520.100,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	75.340.200,00	0,00%	0,00	25%	0,00	25%	1.596.525,00	25%	69.279.225,00	75,00%	70.875.750,00					
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya	1 kelompok	75.340.200,00		0,00		0,00	1 kelompok	1.596.525,00	1 kelompok	69.279.225,00	1 kelompok	70.875.750,00					
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 kelompok	75.340.200,00		0,00		0,00	1 kelompok	1.596.525,00	1 kelompok	69.279.225,00	1 kelompok	70.875.750,00					Dinas Perkim LH
	Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup	1 dokumen					0,00				0,00	0,00%	0,00					
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100,00%	1.983.500,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	60%	427.000,00	60,00%	427.000,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen	1.983.500,00		0,00		0,00		0,00	3 dokumen	427.000,00	5 dokumen	427.000,00					
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 Pengaduan	1.983.500,00		0,00		0,00		0,00	3 Pengaduan	427.000,00	5 Pengaduan	427.000,00					Dinas Perkim LH
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	5 Perkara		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00%	0,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	11.387.569.490,00	29%	1.721.389.261,00	29%	1.863.976.327,00	25%	1.826.806.496,00	17%	2.843.798.841,00	100,00%	8.255.970.925,00					
Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	80%	11.387.569.490,00	29,00%	1.721.389.261,00	29%	1.863.976.327,00	25%	1.826.806.496,00	17%	2.843.798.841,00	100,00%	8.255.970.925,00					
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18.453 KK	63.289.500,00		0,00		0,00		0,00	11.095 KK	35.118.935,00	11.095 KK	35.118.935,00					Dinas Perkim LH
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	9.150.000,00		0,00		0,00		7.622.895,00	dokumen	1.127.700,00	1 dokumen	8.750.595,00					Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
			8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%								
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 Unit	5.284.078.900,00	21 unit	355.983.990,00		510.279.311,00	21 unit	451.992.145,00	21 unit	905.645.170,00	21 unit	2.223.900.616,00					
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton	6.031.051.090,00	3708000 ton	1.365.405.271,00	4001,18 ton	1.353.697.016,00	3888,59 ton / tahun	1.367.191.456,00	3589,53 ton	1.901.907.036,00	18508,71 ton/tahun	5.988.200.779,00					Dinas Perkim LH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			12.002.203.493,00	35,27%	3.215.771.640,00	28,40%	2.941.224.137,00	19,76%	2.422.038.683,00	16,57%	3.353.287.839,00	100,00%	11.932.322.299,00					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100,00%	12.002.203.493,00	35,27%	3.215.771.640,00	28,40%	2.941.224.137,00	19,76%	2.422.038.683,00	16,57%	3.353.287.839,00	100,00%	11.932.322.299,00				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	6.643.655.293,00	43,29%	1.728.176.868,00	20,20%	1.774.774.275,00	17,60%	1.384.741.483,00	18,91%	1.707.502.023,00	100,00%	6.595.194.649,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90,00%	5.661.317.593,00	25,78%	1.533.801.455,00	25%	1.593.557.759,00	25%	1.183.830.700,00	24%	1.343.488.837,00	100,00%	5.654.678.751,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	5.661.317.593,00	148 Orang / bulan	1.533.801.455,00	148 Orang / bulan	1.593.557.759,00	147 Orang/bulan	1.183.830.700	147 Orang/bulan	1.343.488.837,00	688 Orang / bulan	5.654.678.751,00					Satpol PP & Damkar
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	104.400.000,00	100,00%	48.450.000,00	0%	0,00		0,00		50.235.000,00	100,00%	98.685.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	221 Paket	104.400.000,00	50 paket	48.450.000,00	0%	0,00		-	171 paket	50.235.000,00	221 paket	98.685.000,00					Satpol PP & Damkar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90,00%	244.448.800,00	44,00%	61.811.408,00	31,00%	43.373.463,00	13%	18.784.600,00	12%	114.376.393,00	100,00%	238.345.864,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.971.200,00		0,00	2 paket	671.400,00	1 paket	225.000	1 paket	2.072.000,00	4 paket	2.968.400,00					Satpol PP & Damkar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	16.804.200,00	1 paket	2.901.000,00	1 paket	3.617.000,00	1 paket	1.982.000	1 paket	8.248.500,00	4 paket	16.748.500,00					Satpol PP & Damkar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	11.340.400,00	1 paket	1.848.100,00	2 paket	1.933.400,00	1 paket	508.800	1 paket	6.820.000,00	5 paket	11.110.300,00					Satpol PP & Damkar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	213.333.000,00	12 laporan	57.062.308,00	16 laporan	37.151.663,00	13 laporan	16.068.800	21 paket	97.235.893,00	41 laporan	207.518.664,00					Satpol PP & Damkar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	121.277.100,00	21,67%	25.662.505,00	25%	28.352.653,00	25%	28.881.733,00	28,33%	37.941.393,00	100,00%	120.838.284,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.064.400,00	1 Laporan	590.000,00	2 laporan	360.000,00	2 laporan	550.000	2 laporan	1.450.000,00	7 Laporan	2.950.000,00					Satpol PP & Damkar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20.741.500,00	9 Laporan	5.535.453,00	2 laporan	5.595.601,00	9 laporan	4.734.681	9 laporan	4.694.341,00	29 Laporan	20.560.076,00					Satpol PP & Damkar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	97.471.200,00	3 Laporan	19.537.052,00	1 laporan	22.397.052,00	3 laporan	23.597.052	7 laporan	31.797.052,00	14 Laporan	97.328.208,00					Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	512.211.800,00	25,00%	58.451.500,00	20%	109.490.400,00	25%	153.244.450,00	30%	161.460.400,00	100,00%	482.646.750,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	425.591.000,00	26 Unit	56.851.500,00	13 unit	98.639.400,00	12 unit	115.612.450	18 unit	126.499.400,00	69 Unit	397.602.750,00					Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	14.164.800,00	3 Unit	1.600.000,00	4 unit	2.719.000,00	3 unit	1.570.000	16 unit	8.020.000,00	26 Unit	13.909.000,00					Satpol PP & Damkar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	72.456.000,00		0,00	2 Unit	8.132.000,00	2 Unit	36.062.000	2 Unit	26.941.000,00	2 Unit	71.135.000,00					Satpol PP & Damkar
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100,00%	4.260.508.500,00	37,53%	1.064.474.872,00	20,00%	908.478.392,00	25,00%	911.616.792,00	17,47%	1.368.103.308,00	100,00%	4.252.673.364,00					
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	3 operasi	4.031.483.500,00	25,06%	1.010.209.872,00	15%	880.718.392,00	25%	882.956.792,00	35%	1.250.213.308,00	100,00%	4.024.098.364,00					
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	302.132.900,00	1 dokumen	226.909.480,00		0,00	1 dokumen	-	1 dokumen	70.753.750,00	3 dokumen	297.663.230,00					Satpol PP & Damkar
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60 laporan	3.729.350.600,00	22 laporan	783.300.392,00	10 laporan	880.718.392,00	14 laporan	882.956.792	14 laporan	1.179.459.558,00	60 laporan	3.726.435.134,00					Satpol PP & Damkar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV										
			8		9		10		11		12								
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	15=14/6 x 100%	16
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	8 laporan			0,00		0,00	5 laporan	-	3 laporan	-	8 laporan	0,00						Satpol PP & Damkar
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda	2 operasi	229.025.000,00	50,00%	54.265.000,00	25%	27.760.000,00	25%	28.660.000,00		117.890.000,00	100,00%	228.575.000,00						
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan	229.025.000,00	2 laporan	54.265.000,00	1 laporan	27.760.000,00	2 laporan	28.660.000	3 laporan	117.890.000,00	8 laporan	228.575.000,00						Satpol PP & Damkar
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 Menit	1.098.039.700,00	25,00%	423.119.900,00	45,00%	257.971.470,00	16,67%	125.680.408,00	13,33%	277.682.508,00	10 Menit	1.084.454.286,00						
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	4 kegiatan	1.037.646.400,00	50,00%	423.119.900,00	20%	218.567.170,00	25%	125.680.408,00	5%	261.650.708,00	1 kegiatan	1.029.018.186,00						
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	1.037.646.400,00	2 laporan	423.119.900,00	3 laporan	218.567.170,00	4 laporan	125.680.408	3 laporan	261.650.708,00	12 laporan	1.029.018.186,00						Satpol PP & Damkar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	2 kegiatan	53.949.300,00	0,00%	0,00	90%	33.554.300,00		0,00	10%	16.031.800,00	100,00%	49.586.100,00						
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 keluraha n	53.949.300,00		0,00	16 keluraha n	33.554.300,00		-	16 kelurahan	16.031.800,00	16 kelurahan	49.586.100,00						
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	6.444.000,00	25,00%	0,00	25%	5.850.000,00	25%	0,00	25%	0,00	100,00%	5.850.000,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ PKKB Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV										
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	6.444.000,00	30 Laporan	0,00	46 Laporan	5.850.000,00	26 Laporan	-	32 Laporan	-	134 Laporan	5.850.000,00							
DINAS SOSIAL PPKB PPPA			13.448.625.817,00	20,50%	2.976.788.260,00	25,04%	3.062.465.916,00	23,76%	3.188.553.936,00	26,33%	3.396.708.716,00	95,63%	12.624.516.828,00							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		92,00%	9.654.615.517,00	19,86%	2.554.291.560,00	27,34%	2.325.012.050,00	24,31%	2.179.483.493,00	26,19%	2.465.858.160,00	97,70%	9.524.645.263,00							
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	6.763.481.066,00	18,79%	1.836.493.682,00	39,04%	1.873.090.927,00	20,83%	1.423.881.557,00	21,33%	1.573.884.812,00	99,99%	6.707.350.978,00							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	5.502.502.956,00	23,17%	1.515.676.809,00	30,89%	1.586.206.076,00	25%	1.140.747.747,00	21%	1.243.658.403,00	100,00%	5.486.289.035,00							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	5.502.502.956,00	120 orang / bulan	1.515.676.809,00	160 orang/ bulan	1.586.206.076,00	160 orang/ bulan	1.140.747.747	160 orang/ bulan	1.243.658.403,00	560 orang / bulan	5.486.289.035,00						Dinas Sosial PPKB PPPA	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	17.850.000,00	0,00%	0,00	100%	17.850.000,00		0,00		0,00	100,00%	17.850.000,00							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	17.850.000,00	0,00%	0,00	40 Paket	17.850.000,00		-		-	40 Paket	17.850.000,00						Dinas Sosial PPKB PPPA	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	300.317.400,00	39,58%	62.203.555,00	10,42%	70.721.861,00	25%	49.225.456,00	25%	108.555.305,00	100,00%	290.706.177,00							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	5.386.300,00	5 Paket	621.000,00	5 Paket	0,00	4 Jenis	2.426.000	4 Jenis	2.307.000,00	4 Jenis	5.354.000,00						Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	42.815.100,00	7 Paket	10.105.250,00	7 Paket	2.920.000,00	7 Paket	14.784.750	7 Paket	14.895.250,00	7 Paket	42.705.250,00						Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	4 Paket	2.999.900,00	4 Paket	1.890.200,00	4 Paket	2.370.600	4 Paket	690.400,00	4 Paket	7.951.100,00						Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	242.116.000,00	3 Laporan	48.477.405,00	15 Laporan	65.911.661,00	15 Laporan	29.644.106	15 Laporan	90.662.655,00	15 Laporan	234.695.827,00						Dinas Sosial PPKB PPPA	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	67.991.400,00	0,00%	0,00	43%	29.200.000,00	25%	20.646.000,00	32%	17.200.000,00	99,95%	67.046.000,00							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	67.991.400,00	0,00%	0,00	43%	29.200.000,00		20.646.000		17.200.000,00	58,32%	67.046.000,00						Dinas Sosial PPKB PPPA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	695.760.310,00	25,00%	200.457.018,00	25,00%	136.066.204,00	25,00%	177.699.604,00	25,00%	159.923.104,00	100,00%	674.145.930,00					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	33.754.310,00	3 Laporan	11.129.018,00	3 Laporan	7.674.204,00	3 Laporan	5.757.604	3 Laporan	6.052.104,00	3 Laporan	30.612.930,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	662.006.000,00	4 Laporan	189.328.000,00	4 Laporan	128.392.000,00	4 Laporan	171.942.000	4 Laporan	153.871.000,00	4 Laporan	643.533.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	179.059.000,00	25,00%	58.156.300,00	25%	33.046.786,00	25%	35.562.750,00	25%	44.548.000,00	100,00%	171.313.836,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	111.505.000,00	21 Unit	40.455.300,00	21 Unit	20.628.386,00	21 Unit	21.682.750	21 Unit	26.991.000,00	21 Unit	109.757.436,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	35.504.000,00	27 Unit	12.435.000,00	27 Unit	9.253.400,00	27 Unit	7.696.000	27 Unit	3.915.000,00	27 Unit	33.299.400,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	12.050.000,00	55 Unit	850.000,00	15 Unit	1.285.000,00	15 Unit	1.140.000	15 Unit	5.515.000,00	55 Unit	8.790.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	20.000.000,00	6 Unit	4.416.000,00	6 Unit	1.880.000,00	6 Unit	5.044.000	6 Unit	8.127.000,00	6 Unit	19.467.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	75,00%	1.366.916.000,00	30,30%	414.127.628,00	25,00%	219.343.890,00	25%	324.086.827,00	20%	405.531.230,00	100,00%	1.363.089.575,00					
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	60 lembaga	1.366.916.000,00	30,30%	414.127.628,00	25%	219.343.890,00	60 lembaga	324.086.827,00	60 lembaga	405.531.230,00	60 lembaga	1.363.089.575,00					
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	279.979.900,00	92 Orang	73.656.150,00	92 Orang	56.927.500,00	92 Orang	96.586.000	92 Orang	52.410.000,00	92 Orang	279.579.650,00					Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	4.800.000,00	2 Orang	1.600.000,00	2 Orang	1.600.000,00	2 Orang	1.600.000	2 Orang	-	2 Orang	4.800.000,00					
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	983.942.800,00	60 Lembaga	318.254.398,00	60 Lembaga	145.733.770,00	60 Lembaga	215.286.668	60 Lembaga	302.081.312,00	60 Lembaga	981.356.148,00					
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat	98.193.300,00	0,00%	20.617.080,00	2 sertifikat	15.082.620,00	2 Sertifikat	10.614.159	2 Sertifikat	51.039.918,00	2 Sertifikat	97.353.777,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	90,00%	828.488.000,00	26,38%	219.901.800,00	25,00%	159.762.125,00	25,00%	209.660.109,00	23,62%	211.636.773,00	100,00%	800.960.807,00					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 orang	511.387.500,00	27,07%	138.419.750,00	25%	125.542.550,00	25%	99.058.396,00	23%	129.012.994,00	100,00%	492.033.690,00					
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	145.731.900,00	262 orang	63.996.750,00	283	14.862.000,00	283	39.062.000	283	26.808.794,00	283 orang	144.729.544,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	507 Orang	219.877.200,00	262 orang	63.173.000,00	497	98.897.850,00	497	15.273.000	497	39.315.750,00	497 orang	216.659.600,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	65.073.200,00	0	0,00	1 orang	5.950.000,00	1 orang	34.495.000	1 orang	22.461.500,00	3 orang	62.906.500,00					
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	37.222.000,00	12 orang	4.672.500,00	0	3.732.700,00		7.547.646		9.730.950,00	12 orang	25.683.796,00					Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	50 Orang	43.483.200,00	36 orang	6.577.500,00	0	2.100.000,00		2.680.750		30.696.000,00	36 orang	42.054.250,00						
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2628 orang	317.100.500,00	25,70%	81.482.050,00	25%	34.219.575,00	25%	110.601.713,00	24%	82.623.779,00	100,00%	308.927.117,00						
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	27.073.000,00	7 orang	4.552.500,00	11	2.650.000,00	11	9.665.463	11	9.345.750,00	40 orang	26.213.713,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	50.299.000,00	6 orang	7.169.250,00	11	2.950.000,00	11	11.334.900	11	27.888.029,00	39 orang	49.342.179,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	8.162.000,00	0	0,00	4	3.550.000,00	4	3.650.000	4	647.000,00	4 Orang	7.847.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	135.894.900,00	150 orang	46.766.700,00	30	9.542.375,00	30	59.203.750	30	18.559.700,00	30 Orang	134.072.525,00						
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokume n	95.671.600,00	0	22.993.600,00		15.527.200,00		26.747.600	2 Dokumen	26.183.300,00	2 Dokumen	91.451.700,00						
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	86,98%	488.331.100,00	14,51%	70.860.950,00	25,00%	49.594.408,00	25,00%	130.238.600,00	30,00%	212.869.945,00	94,51%	463.563.903,00						
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan	488.331.100,00	14,51%	70.860.950,00	25%	49.594.408,00	25%	130.238.600,00	30%	212.869.945,00	94,51%	463.563.903,00						
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2069 Orang	79.650.000,00	1749 orang	23.213.600,00	1749	18.230.000,00	1749	14.930.000	1749	23.175.000,00	1749 orang	79.548.600,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1034	408.681.100,00	48	47.647.350,00	1142	31.364.408,00	1142	115.308.600	1142	189.694.945,00	1142	384.015.303,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130		0	0,00	0	0,00		-		-	0,00%	0,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100,00%	182.809.351,00	4,19%	12.907.500,00	25,00%	23.220.700,00	25,00%	73.657.400,00	37,50%	55.352.400,00	91,69%	165.138.000,00						
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100%	28.610.000,00	0,00%	0,00	25%	12.903.700,00	25%	2.315.250,00	50%	10.564.000,00	100,00%	25.782.950,00						
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	17.730.000,00		0,00	460	12.903.700,00	460	2.315.250	460	-	460 orang	15.218.950,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300	6.308.000,00		0,00	100	0,00	100	-	100	6.096.000,00	300 orang	6.096.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	4.572.000,00		0,00	460	0,00	460	-	460	4.468.000,00	460 orang	4.468.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 orang	154.199.351,00	8,37%	12.907.500,00	25%	10.317.000,00	25%	71.342.150,00	25%	44.788.400,00	83,37%	139.355.050,00						
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	154.199.351,00	30 Orang	12.907.500,00	30	10.317.000,00	30	71.342.150	30	44.788.400,00	30 Orang	139.355.050,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
	Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	1 Unit			0	0,00					-	0,00%	0,00						
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100,00%	24.590.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	17.959.000,00	25,00%	6.583.000,00	100,00%	24.542.000,00						
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	24.590.000,00	25,00%	0,00	25%	0,00	25%	17.959.000,00	25%	6.583.000,00	100,00%	24.542.000,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV									
			9		10		11		12									
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	24.590.000,00	98 makam	0,00	98 makam	0,00	98 makam	17.959.000	98 makam	6.583.000,00	98 makam	24.542.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		74,86%	3.794.010.300,00	21,13%	422.496.700,00	22,74%	737.453.866,00	23,21%	1.009.070.443,00	26,48%	930.850.556,00	93,56%	3.099.871.565,00					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20,00%	171.273.750,00	25,00%	11.894.900,00	25,00%	28.395.700,00	25,00%	17.278.850,00	25,00%	103.530.712,00	100,00%	161.100.162,00					
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100,00%	0,00					
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	54.151.100,00	25,00%	0,00	25%	16.100.700,00	25%	8.481.350,00	25%	28.487.201,00	100,00%	53.069.251,00					
	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD		25,00%		25%		25%		25%		100,00%	0,00					
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah	54.151.100,00	23 Perangkat Daerah	0,00		16.100.700,00		8.481.350	23 Perangkat Daerah	28.487.201,00	23 Perangkat Daerah	53.069.251,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50%	6.894.250,00	25,00%	6.759.200,00	25%	0,00	25%	0,00	25%	0,00	100,00%	6.759.200,00					
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	26 Lembaga	6.894.250,00	26 Lembaga	6.759.200,00	26 Lembaga	0,00	26 Lembaga	-	26 Lembaga	-	26 Lembaga	6.759.200,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100%	110.228.400,00	25,00%	5.135.700,00	25%	12.295.000,00	25%	8.797.500,00	25%	75.043.511,00	100,00%	101.271.711,00					
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	110.228.400,00	15 Dokumen	5.135.700,00	15 Dokumen	12.295.000,00	15 Dokumen	8.797.500	15 Dokumen	75.043.511,00	15 Dokumen	101.271.711,00					Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu	100 BTJ	367.468.450,00	25,00%	25.774.500,00	25%	47.606.000,00	25%	44.783.625,00	25%	144.615.801,00	100,00%	262.779.926,00						
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	80.200.000,00	25,00%	6.547.000,00	25%	3.157.500,00	25%	31.956.125,00	25%	18.481.500,00	100,00%	60.142.125,00						
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	80.200.000,00	6 Dokumen	6.547.000,00	1dokumen	3.157.500,00	1dokumen	31.956.125	1dokumen	18.481.500,00	6 Dokumen	60.142.125,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100%	149.678.450,00	25,00%	19.227.500,00	25%	9.320.000,00	25%	12.827.500,00	25%	42.342.801,00	100,00%	83.717.801,00						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	149.678.450,00	10 Layanan	19.227.500,00	2 Layanan	9.320.000,00	2 Layanan	12.827.500	2 Layanan	42.342.801,00	10 Layanan	83.717.801,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layanan	137.590.000,00	25,00%	0,00	25,53%	35.128.500,00	25%	0,00	20%	83.791.500,00	95,53%	118.920.000,00						
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			38.400.000,00		0,00	91,48%	35.128.500,00		-		-	91,48%	35.128.500,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	99.190.000,00	15 Dokumen	0,00		0,00		-	15 Dokumen	83.791.500,00	15 Dokumen	83.791.500,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	80,00%	157.368.600,00	25,00%	2.068.500,00	25%	39.190.400,00	25%	40.633.890,00	25%	59.992.095,00	100,00%	141.884.885,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	40	54.612.000,00	25,00%	1.228.500,00	25%	29.270.400,00	25%	9.251.130,00	25%	9.678.220,00	100,00%	49.428.250,00					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	54.612.000,00	15 Dokumen	1.228.500,00		29.270.400,00		9.251.130		9.678.220,00	15 Dokumen	49.428.250,00				Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif	50%	102.756.600,00	25,00%	840.000,00	25,00%	9.920.000,00	25,00%	31.382.760,00	25,00%	50.313.875,00	100,00%	92.456.635,00					
	Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100,00%	0,00					
	Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100,00%	0,00					
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	102.756.600,00	1 dokumen	840.000,00	35 orang	9.920.000,00	35 orang	31.382.760	35 orang	50.313.875,00	1 dokumen	92.456.635,00				Dinas Sosial PPKB PPPA	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	453.150.400,00	16,67%	39.723.050,00	24,83%	57.673.069,00	25,00%	87.680.568,00	28,33%	72.668.700,00	94,83%	257.745.387,00					
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100,00%	135.612.100,00	25,00%	2.000.000,00	25%	27.280.140,00	25%	40.299.700,00	25%	47.815.500,00	100,00%	117.395.340,00					
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	99.812.100,00		2.000.000,00	1	18.280.140,00	1	39.740.050	1	27.573.600,00	1 orang	87.593.790,00				Dinas Sosial PPKB PPPA	
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	35.800.000,00	2 Dokumen	0,00		9.000.000,00		559.650		20.241.900,00	2 Dokumen	29.801.550,00					
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100%	263.828.300,00	25,00%	37.723.050,00	25%	17.243.900,00	25%	21.829.150,00	25%	21.653.200,00	100,00%	98.449.300,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	27.567.900,00		18.195.000,00	4	5.000.000,00	4	2.086.000	4	975.000,00	4 orang	26.256.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang	236.260.400,00	4 Orang	19.528.050,00	4	12.243.900,00	4	19.743.150	4	20.678.200,00	4 Orang	72.193.300,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			53.710.000,00	0,00%	0,00	24,48%	13.149.029,00	25,00%	25.551.718,00	35,00%	3.200.000,00	84,48%	41.900.747,00						
PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat dan Penanganan AMPK	10 orang	53.710.000,00		0,00		13.149.029,00		25.551.718	10 orang	3.200.000,00	10 orang	41.900.747,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100,00%	92.995.100,00	12,50%	3.596.000,00	25,00%	21.620.375,00	25,00%	15.468.120,00	25,00%	45.979.740,00	87,50%	86.664.235,00						
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 dokumen	15.617.500,00	0,00%	0,00	25%	8.404.150,00	25%	5.625.800,00	25%	1.250.000,00	75,00%	15.279.950,00						
Implementasi Pendidikan Kependudukan dan Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	20 Kegiatan	15.617.500,00	3 laporan	0,00		8.404.150,00		5.625.800		1.250.000,00	3 laporan	15.279.950,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Pemetaan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit	77.377.600,00	25,00%	3.596.000,00	25%	13.216.225,00	25%	9.842.320,00	25%	44.729.740,00	100,00%	71.384.285,00						
Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	20.400.000,00		0,00	3	5.400.000,00	3	-	3	14.000.000,00	9 laporan	19.400.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	24.000.000,00		3.596.000,00	2	5.186.000,00	2	4.364.480	2	7.909.240,00	6 Dokumen	21.055.720,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV		15=14/6 x 100%							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	32.977.600,00	16 Unit	0,00		2.630.225,00		5.477.840		22.820.500,00	16 Unit	30.928.565,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR	62,00%	1.482.074.000,00	18,75%	114.567.125,00	21,54%	294.820.822,00	12,50%	439.117.365,00	32,00%	323.000.847,00	84,79%	1.171.506.159,00					
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2287 orang	606.900.000,00	25,00%	49.679.875,00	26,60%	161.455.022,00	25%	159.064.615,00	23%	109.189.600,00	99,60%	479.389.112,00					
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	177.700.000,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	69.813.665,00	1 Laporan	57.773.900	1 Laporan	12.192.350,00	4 Laporan	139.779.915,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			99.200.000,00		6.537.450,00		19.933.300,00		18.079.000		25.790.200,00	0,00%	70.339.950,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)			30.000.000,00		6.951.675,00		5.958.987,00		8.701.915		6.599.250,00	0,00%	28.211.827,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Romosi Dan Kie Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang			100.000.000,00		13.057.000,00		7.510.000,00		40.800.000		27.948.000,00	0,00%	89.315.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja			200.000.000,00		23.133.750,00		58.239.070,00		33.709.800		36.659.800,00	0,00%	151.742.420,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pendayagunaan Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	252.320.000,00	25,00%	54.000.000,00	25%	53.000.000,00	25%	54.000.000,00	25%	89.449.997,00	100,00%	250.449.997,00					
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		264 Orang	48.000.000,00		0,00		17.000.000,00		-		29.200.000,00	0,00%	46.200.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 organisasi	204.320.000,00	30 organisasi	54.000.000,00	40 organisasi	36.000.000,00	40 organisasi	54.000.000	40 organisasi	60.249.997,00	40 organisasi	204.249.997,00					Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
			8		9		10		11		12			13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota			429.104.000,00		6.787.250,00	5,69%	24.414.150,00		193.452.750,00	50%	24.861.250,00	55,69%	249.515.400,00					
Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya			8.100.000,00		0,00		1.275.000,00		-		-	0,00%	1.275.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			213.574.000,00		6.787.250,00		17.539.500,00		11.102.750		21.278.000,00	0,00%	56.707.500,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			194.330.000,00		0,00		0,00		182.350.000		-	0,00%	182.350.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya			13.100.000,00		0,00		5.599.650,00		-		3.583.250,00	0,00%	9.182.900,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100%	193.750.000,00	25,00%	4.100.000,00	29%	55.951.650,00		32.600.000,00	30%	99.500.000,00	83,88%	192.151.650,00					
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	40 Organisa si		40 Organisa si	0,00		0,00		-		-	40 Organisasi	0,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB			3.750.000,00		0,00		3.543.750,00		-		-	0,00%	3.543.750,00					Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas			190.000.000,00		4.100.000,00		52.407.900,00		32.600.000		99.500.000,00	0,00%	188.607.900,00					Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan Keluarga	62,00%	1.069.680.000,00	25,00%	224.872.625,00	12,82%	248.147.500,00	25,00%	364.108.025,00	25,00%	181.062.661,00	87,82%	1.018.190.811,00						
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 kelompo k	320.796.000,00	25,00%	91.072.625,00	0,64%	2.047.500,00	25%	153.708.025,00	25%	27.628.662,00	75,64%	274.456.812,00						
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	126.616.000,00	1	91.072.625,00	1	2.047.500,00	1	1.872.025	1	27.628.662,00	3 Laporan	122.620.812,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			194.180.000,00		0,00		0,00		151.836.000		-	0,00%	151.836.000,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100,00%	748.884.000,00	25,00%	133.800.000,00	25%	246.100.000,00	25%	210.400.000,00	25%	153.433.999,00	100,00%	743.733.999,00						
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisa si	496.884.000,00		133.800.000,00	23 Organisa si	133.800.000,00	23 Organisa si	133.800.000	23 Organisasi	91.333.999,00	23 Organisasi	492.733.999,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan			0,00		0,00		-		-		0,00					Dinas Sosial PPKB PPPA	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)		120 orang	120.000.000,00		0,00		59.500.000,00		23.800.000	120 orang	35.700.000,00	120 orang	119.000.000,00					
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)		40 TPK	132.000.000,00		0,00		52.800.000,00		52.800.000	40 TPK	26.400.000,00	40 TPK	132.000.000,00					
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN			12.746.814.330,00	12,50%	2.531.802.395,00	20,34%	2.551.144.054,00	31,30%	2.328.145.450,00	33,76%	5.184.244.762,55	97,90%	12.595.336.661,55					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100,00%	8.497.273.040,00	5,39%	2.181.067.354,00	12,19%	2.217.032.304,00	43,89%	1.772.614.516,00	37,78%	2.270.030.178,00	99,24%	8.440.744.352,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi	100,00%	8.180.996.560,00	16,17%	2.167.231.630,00	33,83%	2.200.594.243,00	16,67%	1.758.575.430,00	33,33%	2.002.195.004,00	100,00%	8.128.596.307,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.898.179.146,00	25,00%	1.885.634.604,00	25,00%	1.939.064.480,00	25%	1.424.138.396,00	25%	1.628.199.904,00	100,00%	6.877.037.384,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan	6.898.179.146,00	162 Orang / bulan	1.885.634.604,00	162 Orang / bulan	1.939.064.480,00	216 Orang/ bulan	1.424.138.396	216 Orang/ bulan	1.628.199.904,00	756 Orang/bulan	6.877.037.384,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	24.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	100%	24.000.000,00	100,00%	24.000.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	24.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		-	54 Paket	24.000.000,00	54 Paket	24.000.000,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	280.130.600,00	25,00%	52.173.415,00	25,00%	46.307.769,00	25,00%	96.058.885,00	25,00%	77.800.068,00	100,00%	272.340.137,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.772.800,00	1 Paket	2.391.300,00	1 Paket	1.393.000,00	1 Paket	5.579.700	1 Paket	-	4 Paket	9.364.000,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	72.358.200,00	1 Paket	16.187.000,00	1 Paket	20.533.100,00	1 Paket	29.453.450	1 Paket	2.531.100,00	4 Paket	68.704.650,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.214.600,00	3 Paket	3.670.050,00	3 Paket	1.176.750,00	3 Paket	339.300	3 Paket	1.677.600,00	12 Paket	6.863.700,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	189.785.000,00	6 Laporan	29.925.065,00	6 Laporan	23.204.919,00	6 Laporan	60.686.435	6 Laporan	73.591.368,00	24 Laporan	187.407.787,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	39.278.200,00	0,00%	0,00	100%	35.960.000,00		0,00		0,00	100,00%	35.960.000,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	39.278.200,00	0,00%	0,00	3 unit	35.960.000,00		-		-	3 unit	35.960.000,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	608.970.114,00	25,00%	149.616.861,00	25,00%	111.125.594,00	25,00%	155.665.849,00	25,00%	188.956.082,00	100,00%	605.364.386,00						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.591.600,00	3 Laporan	1.650.000,00	3 Laporan	1.400.000,00	3 Laporan	1.750.000	3 Laporan	770.000,00	12 Laporan	5.570.000,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	158.239.634,00	9 Laporan	29.821.069,00	9 Laporan	39.476.906,00	9 Laporan	43.087.161	9 Laporan	45.054.498,00	36 Laporan	157.439.634,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	445.138.880,00	3 Laporan	118.145.792,00	3 Laporan	70.248.688,00	3 Laporan	110.828.688	3 Laporan	143.131.584,00	12 Laporan	442.354.752,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100%	330.438.500,00	22,00%	79.806.750,00	28%	68.136.400,00	25%	82.712.300,00	25%	83.238.950,00	100,00%	313.894.400,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55 Unit	278.215.000,00	28 unit	75.309.000,00	10 unit	57.491.900,00	10 unit	67.348.300	7 unit	63.935.450,00	55 unit	264.084.650,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	28.043.500,00	3 unit	4.197.750,00	4 unit	6.817.500,00	3 unit	11.924.000	5 unit	2.730.000,00	5 unit	25.669.250,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	24.180.000,00	1 unit	300.000,00	1 unit	3.827.000,00		3.440.000	1 unit	16.573.500,00	3 unit	24.140.500,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0,5 Ha		0,00%			0,00			0,5 Ha		0,5 Ha	0,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100,00%	307.086.580,00	0,00%	13.835.724,00	2,72%	8.361.086,00	25%	13.045.086,00	70%	267.835.174,00	97,72%	303.077.070,00						
	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100,00%		0,00%		2,72%		25%				27,72%	0,00						
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kkal/kap /hr	60.521.240,00	0,00%	7.630.362,00	7,84%	4.745.543,00	25%	7.389.543,00	67%	38.908.724,00	2.844.17 Kkal/ kap/hr	58.674.172,00						
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	31.582.200,00	0,00%	0,00		0,00		344.000	1 Dokumen	29.448.000,00	1 Dokumen	29.792.000,00					Dinas Pangan dan Pertanian	
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit		0,00%			0,00				-	0,00%	0,00						
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen		0,00%	0,00		0,00		-		-	0,00%	0,00						

Urusan/ Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				I		II		III		IV										
				4	5	8		9		10		11		12		13			14=7+13	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	28.939.040,00	0,00%	7.630.362,00		4.745.543,00		7.045.543	1 Dokumen	9.460.724,00	1 Dokumen	28.882.172,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	14.815 ton	192.787.500,00	0,00%	0,00	0%	0,00		0,00	100%	192.776.976,00	15.612 ton	192.776.976,00							
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14.815 ton	192.787.500,00	0,00%	0,00		0,00		-	15.612 ton	192.776.976,00	15.612 ton	192.776.976,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1852 kkal/kapita/hari	53.777.840,00	0,00%	6.205.362,00	6,72%	3.615.543,00	25%	5.655.543,00	1852 kkal/kapita/hari	36.149.474,00	1852 kkal/kapita/hari	51.625.922,00							
	Angka Kecukupan Protein (AKP)	62.9 gram/kapita/hari		0,00%						62.9 gram/kapita/hari		62.9 gram/kapita/hari	0,00							
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		0,00%	0,00		0,00		-			0,00%	0,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	53.777.840,00	0,00%	6.205.362,00		3.615.543,00		5.655.543	1 Laporan	36.149.474,00	1 Laporan	51.625.922,00							Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100,00%	9.189.900,00	0,00%	0,00	0,00%	8.076.975,00	90%	994.000,00	10%	0,00	100,00%	9.070.975,00							
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	9.189.900,00	0,00%	0,00	0,00%	8.076.975,00	90%	994.000,00	1 laporan	0,00	1 laporan	9.070.975,00							
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.189.900,00	0,00%	0,00		8.076.975,00		994.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	9.070.975,00							Dinas Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100,00%	614.336.260,00	12,50%	130.603.272,00	25,00%	109.867.908,00	25,00%	141.027.808,00	37,50%	209.030.939,55	100,00%	590.529.927,55							
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	751 ton/tahun	552.350.000,00	25,00%	123.172.910,00	25%	77.929.365,00	25%	130.729.365,00	25%	199.620.709,55	100,00%	531.452.349,55							
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	20 orang	552.350.000,00	5 orang	123.172.910,00	5 orang	77.929.365,00	5 orang	130.729.365,00	5 orang	199.620.709,55	20 orang	531.452.349,55							
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	452.350.000,00	0,00%	123.172.910,00	1 Unit	77.929.365,00	1 Unit	130.729.365	1 Unit	111.005.820,00	1 Unit	442.837.460,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	100.000.000,00	1 Unit	0,00		0,00		-	1 Unit	88.614.889,55	1 Unit	88.614.889,55							
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 jenis	61.986.260,00	0,00%	7.430.362,00	25%	31.938.543,00	25%	10.298.443,00	50%	9.410.230,00	100,00%	59.077.578,00							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
			I		II		III		IV																	
			9		10		11		12																	
4	5	8	K	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	K	Rp.	13	K	Rp.	14=7+13	K	Rp.	15=14/6 x 100%	K	Rp.	16
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	2 kali		61.986.260,00	0,00%		7.430.362,00	1 kali		31.938.543,00	1 kali		10.298.443,00	2 kali		9.410.230,00	2 kali		59.077.578,00							
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokume n		61.986.260,00	0,00%		7.430.362,00			31.938.543,00			10.298.443	1 Dokumen		9.410.230,00	1 Dokumen		59.077.578,00							Dinas Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		49,86%		3.635.205.030,00	19,61%		220.131.769,00	23,84%		224.243.842,00	25,00%		414.503.126,00	26,00%		2.705.183.645,00	94,45%		3.564.062.382,00							
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	75,00%		2.779.687.320,00	25,00%		97.582.896,00	18,75%		94.109.513,00	25,00%		287.293.676,00	25,00%		2.273.968.888,00	93,75%		2.752.954.973,00							
	Persentase Pemenuhan Sarana Pternakan	77,00%			0,00%						25%						25,00%	0,00								
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	2 jenis		383.773.250,00	25,00%		0,00	25%		7.250.550,00	2 jenis		202.757.375,00	25%		169.095.850,00	2 jenis		379.103.775,00							
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan	12 Laporan		383.773.250,00		3	0,00	3 laporan		7.250.550,00	3		202.757.375	3 laporan		169.095.850,00	12 laporan		379.103.775,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Produksi Tanaman Hias	2 kelompo k		75.897.120,00	25,00%		20.376.086,00	25%		12.966.629,00	25%		19.646.629,00	25%		22.737.172,00	2 kelompok		75.726.516,00							
	Produksi Padi	8443,5 ton			2,23%			24%			25%					8613.6 ton			0,00							
	Luas Lahan Pertanian Organik	81555 tangkai			23,99%			20%			25%					73.039 tangkai			0,00							
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokume n		75.897.120,00	0,00%		20.376.086,00			12.966.629,00			19.646.629	1 Dokumen		22.737.172,00	0,00%		75.726.516,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	8 ekor		304.833.200,00	25,00%		77.206.810,00	25%		73.892.334,00	25%		59.051.172,00	25%		78.665.916,00	8 ekor		288.816.232,00							
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan		304.833.200,00	0,00%		77.206.810,00			73.892.334,00			59.051.172	1 Laporan		78.665.916,00	1 Laporan		288.816.232,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	65 kk		2.015.183.750,00	0,00%		0,00			0,00	10%		5.838.500,00	59 kk		2.003.469.950,00	59 kk		2.009.308.450,00							
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	567 Ekor		2.015.183.750,00			0,00			0,00			5.838.500	485 Ekor		2.003.469.950,00	485 Ekor		2.009.308.450,00							Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	77,00%		113.154.300,00	25,00%		21.875.905,00	25,00%		11.318.586,00	25,00%		28.261.086,00	25,00%		47.973.448,00	100,00%		109.429.025,00							
	Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	75,00%			0,00%						25%						25,00%		0,00							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 unit	103.735.800,00	0,00%	21.875.905,00	8,67%	8.991.086,00		26.266.086,00		43.521.448,00	8,67%	100.654.525,00						
	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 unit		0,00%		1 unit		1 unit			1 unit	0,00							
	Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	1 unit		0,00%					1 unit		1 unit	0,00							
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		0,00%			0,00		-			0,00%	0,00				Dinas Pangan dan Pertanian		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	103.735.800,00	1 Unit	21.875.905,00	1 Unit	8.991.086,00	1 Unit	26.266.086	1 Unit	43.521.448,00	1 Unit	100.654.525,00						
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	60 ekor	9.418.500,00	35 ekor	0,00	14 ekor	2.327.500,00	40 ekor	1.995.000,00	38 ekor	4.452.000,00	127 ekor	8.774.500,00						
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	9.418.500,00	0,00%	0,00		2.327.500,00		1.995.000	1 Laporan	4.452.000,00	1 Laporan	8.774.500,00				Dinas Pangan dan Pertanian		
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	8,50%	364.530.100,00	23,05%	88.772.968,00	21,87%	104.491.788,00	25,00%	58.103.614,00	30,00%	102.504.791,00	99,92%	353.873.161,00						
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100%	180.839.900,00	25,00%	50.237.762,00	25%	76.893.948,00	25%	22.383.945,00	25%	24.734.604,00	100,00%	174.250.259,00						
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	111.280.000,00	0,00%	50.237.762,00		13.450.223,00		18.415.223	1 Laporan	23.466.604,00	1 Laporan	105.569.812,00				Dinas Pangan dan Pertanian		
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	69.559.900,00	0,00%	0,00		63.443.725,00		3.968.722	1 Laporan	1.268.000,00	1 Laporan	68.680.447,00						
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	100%	48.842.000,00	25,00%	12.694.120,00	25%	6.555.521,00	25%	12.668.040,00	25%	14.253.015,00	100,00%	46.170.696,00						
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	48.842.000,00	0,00%	12.694.120,00		6.555.521,00		12.668.040	1 Laporan	14.253.015,00	1 Laporan	46.170.696,00				Dinas Pangan dan Pertanian		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV										
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti	1 kali	134.848.200,00	19,16%	25.841.086,00	15,60%	21.042.319,00	25%	23.051.629,00	40%	63.517.172,00	99,77%	133.452.206,00							
	Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 sertifikat								1 sertifikat		1 sertifikat	0,00							
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	134.848.200,00	0,00%	25.841.086,00		21.042.319,00		23.051.629	1 Laporan	63.517.172,00	1 Laporan	133.452.206,00						Dinas Pangan dan Pertanian	
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha		0,00%	0,00		0,00		-		-	0,00%	0,00							
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	75,00%	54.878.250,00	0,00%	0,00	28,56%	4.779.980,00	25%	0,00	25%	45.908.000,00	78,56%	50.687.980,00							
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	40 ha	54.878.250,00	0,00%	0,00	28,56%	4.779.980,00	41.98 ha	0,00	41.98 ha	45.908.000,00	41.98 ha	50.687.980,00							
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	50.000.000,00	0,00%	0,00		0,00		-	10 Ha	45.908.000,00	10 Ha	45.908.000,00						Dinas Pangan dan Pertanian	
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	4.878.250,00	0,00%	0,00		4.779.980,00		-	1 Laporan	-	1 Laporan	4.779.980,00							
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	13,80%	322.955.060,00	25,00%	11.900.000,00	25,00%	9.543.975,00	25,00%	40.844.750,00	25,00%	234.828.518,00	100,00%	297.117.243,00							
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 keltan	322.955.060,00	5 keltan	11.900.000,00	5 keltan	9.543.975,00	5 keltan	40.844.750,00	5 keltan	234.828.518,00	20 keltan	297.117.243,00							
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	30.059.760,00	0,00%	6.900.000,00	1 Unit	3.900.000,00	1 Unit	10.798.125	1 Unit	7.900.000,00	1 Unit	29.498.125,00						Dinas Pangan dan Pertanian	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	292.895.300,00	0,00%	5.000.000,00	1 Unit	5.643.975,00	1 Unit	30.046.625	1 Unit	226.928.518,00	1 Unit	267.619.118,00							
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			4.057.628.019,00	18,12%	1.165.223.974,00	38,50%	988.742.223,00	23,17%	808.716.637,00	20,21%	950.260.202,00	100,00%	3.912.943.036,00							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100,00%	4.057.628.019,00	18,12%	1.165.223.974,00	38,50%	988.742.223,00	23,17%	808.716.637,00	20,21%	950.260.202,00	100,00%	3.912.943.036,00							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	3.577.450.519,00	20,83%	1.072.880.248,00	37,50%	894.482.783,00	20,83%	674.679.217,00	20,83%	838.499.510,00	100,00%	3.480.541.758,00							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV		12								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.590.367.489,00	25,00%	729.861.789,00	25%	751.342.801,00	25%	521.654.367,00	25%	581.906.448,00	100,00%	2.584.765.405,00							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	2.590.367.489,00	294 Orang/bulan	729.861.789,00	294 Orang/bulan	751.342.801,00	294 Orang/bulan	521.654.367	294 Orang/bulan	581.906.448,00	42 orang / bulan	2.584.765.405,00							Disdukcapil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	8.500.000,00	0,00%	0,00	100%	8.500.000,00	0%	0,00		0,00	100,00%	8.500.000,00							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	8.500.000,00		0,00	17 Paket	8.500.000,00		-	17 Paket	-	17 Paket	8.500.000,00							Disdukcapil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	262.437.250,00	25,00%	40.817.169,00	25%	32.720.148,00	25%	52.213.658,00	25%	114.876.227,00	100,00%	240.627.202,00							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.658.500,00		0,00	10 paket	555.000,00	10 paket	740.000	10 paket	-	10 paket	1.295.000,00							Disdukcapil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.023.300,00	2 paket	3.060.000,00	2 paket	3.687.950,00	2 paket	8.312.000	2 paket	4.982.500,00	2 paket	20.042.450,00							Disdukcapil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.557.450,00	2 Paket	497.100,00	2 Paket	1.322.500,00	2 Paket	2.352.600	2 Paket	2.100.800,00	2 Paket	6.273.000,00							Disdukcapil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	229.198.000,00	5 Laporan	37.260.069,00	5 Laporan	27.154.698,00	5 Laporan	40.809.058	9 Laporan	107.792.927,00	24 Laporan	213.016.752,00							Disdukcapil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	223.192.000,00	25,00%	131.250.000,00	25%	12.900.000,00	25%	28.500.000,00	25%	26.216.400,00	100,00%	198.866.400,00							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	223.192.000,00	5 unit	131.250.000,00	3 unit	12.900.000,00	3 unit	28.500.000	2 unit	26.216.400,00	13 Unit	198.866.400,00							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	192.941.780,00	25,00%	43.702.290,00	25,00%	41.464.984,00	25,00%	44.734.046,00	25,00%	53.570.535,00	100,00%	183.471.855,00							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	27.465.780,00	9 laporan	7.299.751,00	9 laporan	5.886.530,00	9 laporan	6.890.773	9 laporan	6.966.535,00	36 laporan	27.043.589,00							Disdukcapil
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	165.476.000,00	6 Laporan	36.402.539,00	6 Laporan	35.578.454,00	6 Laporan	37.843.273	6 Laporan	46.604.000,00	6 Laporan	156.428.266,00							Disdukcapil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	300.012.000,00	25,00%	127.249.000,00	25%	47.554.850,00	25%	27.577.146,00	25%	61.929.900,00	100,00%	264.310.896,00							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	208.258.000,00	9 Unit	126.626.000,00	9 Unit	22.547.250,00	9 Unit	23.278.146	9 Unit	25.664.900,00	9 Unit	198.116.296,00							Disdukcapil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				I		II		III		IV											
				4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	K		Rp.	14=7+13	K
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	30.330.000,00	2 Unit	200.000,00		0,00	9 Unit	2.150.000	8 Unit	2.775.000,00	19 Unit	5.125.000,00								Disdukcapil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	61.424.000,00	1 Unit	423.000,00	1 Unit	25.007.600,00	1 Unit	2.149.000	1 Unit	33.490.000,00	1 Unit	61.069.600,00								Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100,00%	185.961.100,00	16,67%	37.832.000,00	55,00%	21.422.000,00	20,00%	81.921.000,00	8,33%	15.500.700,00	100,00%	156.675.700,00								
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	98%	64.311.200,00	25,00%	37.832.000,00	25%	2.416.000,00	25%	2.071.000,00	25%	15.500.700,00	100,00%	57.819.700,00								
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9 Laporan	29.442.300,00	1 Laporan	7.925.000,00	5 Laporan	2.416.000,00	1 Laporan	1.760.000	2 Laporan	13.507.100,00	9 Laporan	25.608.100,00								Disdukcapil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4500 Dokume n	34.868.900,00	750 dokume n	29.907.000,00	1250 dokume n	0,00	1250 dokume n	311.000	1250 dokumen	1.993.600,00	4500 Dokumen	32.211.600,00								Disdukcapil
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana	100%	100.397.000,00	25,00%	0,00	50%	0,00	25%	79.850.000,00		0,00	100,00%	79.850.000,00								
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5500 Dokume n	100.397.000,00	410 Dokume n	0,00	2793 Dokume n	0,00	2297 Dokume n	79.850.000		-	5500 Dokumen	79.850.000,00								Disdukcapil
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk	1 jenis	21.252.900,00		0,00	90%	19.006.000,00	10%	0,00		0,00	1 jenis	19.006.000,00								
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	21.252.900,00		0,00	1 Laporan	19.006.000,00		-		-	1 Laporan	19.006.000,00								Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100,00%	122.286.800,00	25,00%	25.488.438,00	25%	29.125.285,00	25%	24.863.635,00	25%	39.576.546,00	100,00%	119.053.904,00								
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun	2000 akta	122.286.800,00	232 akta	25.488.438,00	293 akta	29.125.285,00	250 akta	24.863.635,00	242 akta	39.576.546,00	1017 akta	119.053.904,00								
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2000 Layanan	122.286.800,00	389 layanan	25.488.438,00	473 layanan	29.125.285,00	462 layanan	24.863.635	440 layanan	39.576.546,00	1764 layanan	119.053.904,00								Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	153.559.600,00	25,00%	28.449.988,00	25,00%	35.050.505,00	25,00%	26.103.035,00	25,00%	51.876.846,00	100,00%	141.480.374,00								
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan	12 laporan	153.559.600,00	25,00%	28.449.988,00	25%	35.050.505,00	25%	26.103.035,00	25%	51.876.846,00	100,00%	141.480.374,00								
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	21.401.100,00	3 Laporan	8.250.400,00	3 Laporan	3.256.650,00	3 Laporan	4.587.100	3 Laporan	3.996.050,00	12 Laporan	20.090.200,00								Disdukcapil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV								
			8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%							
4	5		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen		1.260.000,00	1 Dokumen	1.228.500,00		0,00		-		-	1 Dokumen	1.228.500,00			Disdukcapil
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Dokumen		130.898.500,00	1 Dokumen	18.971.088,00	2 Dokumen	31.793.855,00	1 Dokumen	21.515.935	1 Dokumen	47.880.796,00	5 Dokumen	120.161.674,00			Disdukcapil
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	1 laporan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00			
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan				0,00		0,00		-		-	0,00%	0,00			Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 Dokumen		18.370.000,00	3,12%		573.300,00	50%		8.661.650,00	25%	1.149.750,00	22%	4.806.600,00	100,00%	15.191.300,00	
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen		18.370.000,00			573.300,00	50%		8.661.650,00	25%	1.149.750,00	25%	4.806.600,00	100,00%	15.191.300,00	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen		18.370.000,00			573.300,00	2 Dokumen	8.661.650,00	1 Dokumen	1.149.750		4.806.600,00	3 Dokumen	15.191.300,00		Disdukcapil
DINAS PERHUBUNGAN				12.218.461.373,00	28,77%		2.819.575.606,00	24,71%		3.260.681.853,00	20,83%	2.615.382.893,00	24,77%	3.329.452.059,00	99,08%	12.025.092.411,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			93,89%	12.218.461.373,00	28,77%		2.819.575.606,00	24,71%		3.260.681.853,00	20,83%	2.615.382.893,00	24,77%	3.329.452.059,00	99,08%	12.025.092.411,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%		7.533.669.173,00	44,03%		1.988.921.919,00	16,67%		2.007.869.001,00	16,67%	1.565.777.272,00	22,53%	1.828.099.336,00	99,90%	7.390.667.528,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%		6.242.030.222,00	25,00%		1.641.545.133,00	25%		1.728.026.817,00	25%	1.287.145.992,00	25%	1.487.257.821,00	100,00%	6.143.975.763,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang/bulan		6.242.030.222,00	25,00%		1.641.545.133,00	25%		1.728.026.817,00	25%	1.287.145.992	25%	1.487.257.821,00	100,00%	6.143.975.763,00	Dinas Perhubungan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		74.430.000,00	100,00%		72.080.000,00	0%		0,00		0,00		0,00	100,00%	72.080.000,00	
Pengadaan Pakaian beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 paket		74.430.000,00	85 paket		72.080.000,00			0,00		-		-	85 paket	72.080.000,00	Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				I		II		III		IV										
				8		9		10		11		12		13		14=7+13			15=14/6 x 100%	
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	244.529.450,00	20,28%	49.597.350,00	25,00%	61.204.732,00	25%	57.368.450,00	30%	64.693.345,00	100,00%	232.863.877,00							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	8.442.600,00	3 paket	3.272.000,00		0,00	6	1.226.000	3 paket	3.739.000,00	12 paket	8.237.000,00							Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	43.914.900,00	6 paket	14.338.600,00	6	2.000.000,00	6	10.833.000		13.382.000,00	6 paket	40.553.600,00							Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.970.950,00	2 paket	14.262.000,00	2	4.714.000,00	2	3.681.500		11.433.500,00	2 paket	34.091.000,00							Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.201.000,00	12 laporan	17.724.750,00	12	54.490.732,00	12	41.627.950		36.138.845,00	12 laporan	149.982.277,00							Dinas Perhubungan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90%	51.014.100,00	78,80%	40.200.000,00	0%	0,00		0,00	21%	10.000.000,00	100,00%	50.200.000,00							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	51.014.100,00	4 unit	40.200.000,00		0,00		-	1 unit	10.000.000,00	5 unit	50.200.000,00							Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	517.618.001,00	20,72%	107.253.536,00	25,00%	115.047.402,00	25%	122.181.630,00	29%	168.140.770,00	100,00%	512.623.338,00							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 laporan	52.394.001,00	6 laporan	12.013.536,00	6 laporan	12.263.258,00	6 laporan	12.856.450		13.317.662,00	18 laporan	50.450.906,00							Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 laporan	465.224.000,00	6 laporan	95.240.000,00	6 laporan	102.784.144,00	6 laporan	109.325.180		154.823.108,00	18 laporan	462.172.432,00							Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	404.047.400,00	19,37%	78.245.900,00	25,00%	103.590.050,00	25%	99.081.200,00	30%	98.007.400,00	99,37%	378.924.550,00							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	77.641.000,00	11 unit	14.882.000,00	11 unit	16.064.500,00	11 unit	14.426.800		18.260.400,00	11 unit	63.633.700,00							Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	157.924.000,00	5 unit	33.313.600,00	5 unit	41.065.650,00	5 unit	39.836.500	15 Unit	39.661.500,00	15 Unit	153.877.250,00							Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				9		10		11		12								
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	118.092.000,00	2 unit	20.720.300,00	2 unit	38.711.400,00	2 unit	34.580.400	2	19.771.500,00	2 unit	113.783.600,00					Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	28.890.400,00	2 unit	5.805.000,00	2 unit	6.168.500,00	2 unit	9.787.500	2	4.963.500,00	6 unit	26.724.500,00					Dinas Perhubungan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	21.500.000,00	2 unit	3.525.000,00	2 unit	1.580.000,00	2 unit	450.000		15.350.500,00	2 unit	20.905.500,00					Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan Darat	87,78%	4.684.792.200,00	13,50%	830.653.687,00	32,76%	1.252.812.852,00	25,00%	1.049.605.621,00	27,01%	1.501.352.723,00	98,27%	4.634.424.883,00					
	Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	96.64%		0,00%								0,00%	0,00					
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	90.00%		0,00%								0,00%	0,00					
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik	84,30%	3.122.557.100,00	19,62%	612.721.437,00	25%	680.556.233,00	25%	665.879.616,00	25%	1.127.783.280,00	94,62%	3.086.940.566,00					
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500	2.845.377.100,00	1500 unit	607.485.737,00	1500 unit	659.845.208,00	1500 unit	657.648.666	1500 unit	896.613.804,00	1500 unit	2.821.593.415,00					Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	277.180.000,00	1 unit	5.235.700,00	4 unit	20.711.025,00	4 unit	8.230.950	2 unit	231.169.476,00	2 unit	265.347.151,00					Dinas Perhubungan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	17	6.438.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	25%	982.800,00	70%	2.987.550,00	95,00%	3.970.350,00					
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1	6.438.000,00	0,00%	0,00		0,00	1 dokume n	982.800	1	2.987.550,00	2	3.970.350,00					Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin dan Fasilitasi Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum	16 titik	450.422.000,00	25,00%	92.925.000,00	25%	108.618.456,00	25%	109.769.320,00	25%	137.802.992,00	16 titik	449.115.768,00					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	450.422.000,00	3 laporan	92.925.000,00	3 laporan	108.618.456,00	3 laporan	109.769.320	3 laporan	137.802.992,00	12 Laporan	449.115.768,00					Dinas Perhubungan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala	96,64%	128.000.000,00	0,00%	0,00	68,04%	87.094.000,00	25%	38.970.000,00	7%	1.850.000,00	100,00%	127.914.000,00					
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000	25.000.000,00	0,00	1000 dokume n	25.000.000,00	-		-	1000 dokumen	25.000.000,00							Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	103.000.000,00	0,00		62.094.000,00	10 unit	38.970.000	10 unit	1.850.000,00	10 unit	102.914.000,00						Dinas Perhubungan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Pelaksanaan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemem rekayasa lalu lintas	4 kegiatan	690.538.400,00	11,40%	78.726.000,00	37,50%	258.978.139,00	25%	186.725.655,00	26%	160.897.533,00	100,00%	685.327.327,00						
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	398.862.500,00	3 laporan	72.706.350,00	3 laporan	105.219.144,00	3 laporan	95.129.055	3 laporan	124.573.533,00	12 Laporan	397.628.082,00				Dinas Perhubungan		
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	26.515.500,00		0,00		12.100.000,00		-		14.347.500,00	2 Laporan	26.447.500,00				Dinas Perhubungan		
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokume n	210.474.900,00	1 dokume n	0,00	1 dokume n	125.135.745,00	1 dokume n	82.669.500		-	3 Dokumen	207.805.245,00				Dinas Perhubungan		
Penataan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	54.685.500,00	3 laporan	6.019.650,00	3 laporan	16.523.250,00	3 laporan	8.927.100	3 laporan	21.976.500,00	12 laporan	53.446.500,00				Dinas Perhubungan		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 unit	286.836.700,00	25,00%	46.281.250,00	40,99%	117.566.024,00	25%	47.278.230,00	9%	70.031.368,00	100,00%	281.156.872,00						
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	286.836.700,00	3 laporan	46.281.250,00	3 laporan	117.566.024,00	3 laporan	47.278.230		70.031.368,00	9 laporan	281.156.872,00				Dinas Perhubungan		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.824.813.783,00	14,70%	1.998.979.642,00	13,54%	2.048.154.200,00	25,00%	1.783.576.113,00	43,45%	2.601.583.709,00	96,69%	8.432.293.664,00					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			70,00%	8.813.853.783,00	19,39%	1.997.310.142,00	27,08%	2.047.860.200,00	25,00%	1.776.114.363,00	27,71%	2.601.183.709,00	99,18%	8.422.468.414,00					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	4.562.535.583,00	20,83%	1.267.327.338,00	33,33%	1.218.877.894,00	25,00%	942.227.216,00	20,83%	1.098.057.027,00	100,00%	4.526.489.475,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.703.106.583,00	25,00%	998.709.935,00	25%	1.042.126.631,00	25%	766.956.010,00	25%	881.017.195,00	100,00%	3.688.809.771,00						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/b ulan	3.703.106.583,00	168 orang	998.709.935,00	280	1.042.126.631,00	168 orang	766.956.010	168 orang	881.017.195,00	784 orang	3.688.809.771,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	14.000.000,00	0,00%	0,00	75%	14.000.000,00	25%	0,00		0,00	100,00%	14.000.000,00						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	14.000.000,00		0,00	28 paket	14.000.000,00		-		-	28 paket	14.000.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	289.038.000,00	25,00%	70.909.643,00	25%	49.742.607,00	25%	81.009.763,00	25%	85.929.244,00	100,00%	287.591.257,00						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.136.500,00	1 paket	1.016.000,00	1 paket	1.555.000,00	1 paket	1.441.000	1 paket	3.754.000,00	4 Paket	7.766.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.999.700,00	1 paket	6.894.500,00	1 paket	7.999.500,00	1 paket	7.632.500	1 paket	10.638.000,00	4 Paket	33.164.500,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.001.800,00	3 paket	588.400,00	3 paket	1.865.200,00	3 paket	400.000	3 paket	1.086.600,00	12 Paket	3.940.200,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	242.900.000,00	6 laporan	62.410.743,00	6 laporan	38.322.907,00	6 laporan	71.536.263	6 laporan	70.450.644,00	24 Laporan	242.720.557,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100%	42.365.000,00	25,00%	19.500.000,00	25%	0,00	25%	0,00	25%	14.750.000,00	100,00%	34.250.000,00						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	42.365.000,00	30 Unit	19.500.000,00		0,00		-	5 Unit	14.750.000,00	35 Unit	34.250.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	307.092.000,00	25,00%	67.695.760,00	25%	70.840.656,00	25%	74.212.443,00	25%	83.451.388,00	100,00%	296.200.247,00						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	107.132.000,00	9 laporan	25.772.050,00	9 laporan	26.830.091,00	9 laporan	26.121.878	9 laporan	20.873.968,00	36 Laporan	99.597.987,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	199.960.000,00	3 laporan	41.923.710,00	3 laporan	44.010.565,00	3 laporan	48.090.565	3 laporan	62.577.420,00	12 Laporan	196.602.260,00						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	206.934.000,00	25,00%	110.512.000,00	25%	42.168.000,00	25%	20.049.000,00	25%	32.909.200,00	100,00%	205.638.200,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	166.056.000,00	7 unit	107.262.000,00	7 unit	12.700.000,00	7 unit	17.699.000	7 unit	28.189.200,00	7 unit	165.850.200,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	26.908.000,00	1 unit	0,00	1 unit	26.658.000,00	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	26.658.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	13.970.000,00	30 unit	3.250.000,00	30 unit	2.810.000,00	54 unit	2.350.000	54 unit	4.720.000,00	54 unit	13.130.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45,00%	2.398.239.200,00	23,97%	395.623.548,00	25,00%	488.717.972,00	25,00%	310.635.722,00	25,00%	868.218.446,00	98,97%	2.063.195.688,00					
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	28.000 follower s	2.398.239.200,00	37.014 follower s	395.623.548,00	2.186 follower s	488.717.972,00	5.053 follower s	310.635.722,00	25%	868.218.446,00	42.067 followers	2.063.195.688,00					
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	306.107.000,00	0,00%	110.180.426,00		55.608.939,00		58.683.939	1 dokumen	80.971.502,00	1 dokumen	305.444.806,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1000 rilis		330 rilis		337 rilis	0,00	150 rilis		333		1150 rilis	0,00					
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	159.129.000,00	1 dokumen	30.395.772,00		34.331.158,00		35.631.158	1 dokumen	55.903.294,00	1 dokumen	156.261.382,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)	850 konten		300 konten		381 konten	0,00	36 konten				717 konten	0,00					
	Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	0 OPD		0,00%			0,00					0,00%	0,00					
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	1.491.017.200,00	5 layanan	255.047.350,00	5 layanan	397.139.875,00	5 layanan	216.320.625	5 layanan	617.018.650,00	5 layanan	1.485.526.500,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah pertemuan jumpa pers	8 kali		2 kali		1 kali	0,00			3 kali		6 kali	0,00					
	Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	2 edisi		0			0,00			1 edisi		1 edisi	0,00					
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	9.486.000,00	0	0,00		1.638.000,00		-	1 Dokumen	7.848.000,00	1 Dokumen	9.486.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah web KIM	2 website		0		2 website	0,00					2 website	0,00					
	Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 pelatiha n		0		1 pelatiha n	0,00					1 pelatihan	0,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV				15=14/6 x 100%			
			8	9	10	11	12	13	14=7+13	K			Rp.			
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			432.500.000,00								106.477.000,00		106.477.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,60 Indeks	1.846.011.000,00	18,06%	333.319.756,00	25,00%	340.264.334,00	25%	519.462.175,00	30%	633.648.236,00	98,06%	1.826.694.501,00			
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 aplikasi	1.846.011.000,00	18,06%	333.319.756,00	1 aplikasi	340.264.334,00	1 aplikasi	519.462.175,00		633.648.236,00	2 aplikasi	1.826.694.501,00			
	Tingkat Kematangan Layanan SPBE	Level 4										0,00%	0,00			
	Tingkat Kematangan Manajemen SPBE	Level 3										0,00%	0,00			
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.641.000,00	0	24.323.026,00		21.160.139,00		21.704.584	1 Dokumen	42.941.292,00	1 Dokumen	110.129.041,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 aplikasi		0		1 aplikasi	0,00	1 aplikasi			-	2 aplikasi	0,00			
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.735.370.000,00	0	308.996.730,00		319.104.195		497.757.591	1 Dokumen	590.706.944,00	1 Dokumen	1.716.565.460,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	7 jenis		7 jenis		7 jenis	0,00			7 jenis	-	7 jenis	0,00			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	35,00%	7.068.000,00	14,71%	1.039.500,00	25%	0,00	25%	3.789.250,00	35%	1.260.000,00	99,71%	6.088.750,00			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	7.068.000,00	0	1.039.500,00		0,00	3 dokumen	3.789.250,00	3 dokumen	1.260.000,00	3 dokumen	6.088.750,00			
	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	80%		35%								35,00%	0,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13									
			8	9	10	11	12	K	Rp.	K	Rp.	K							Rp.	K
4	5																			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokume n	7.068.000,00	0	1.039.500,00		0,00		3.789.250	1 Dokumen	1.260.000,00	1 Dokumen	6.088.750,00							Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokume n		0			0,00	2 dokume n		3 dokumen		3 dokumen	0,00							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		375 indeks	10.960.000,00	10,00%	1.669.500,00	0,00%	294.000,00	25,00%	7.461.750,00	59,20%	400.000,00	94,20%	9.825.250,00							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	375 indeks	10.960.000,00	10,00%	1.669.500,00		294.000,00	25,00%	7.461.750,00	59,20%	400.000,00	222 indeks	9.825.250,00							
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatiha n	10.960.000,00	10,00%	1.669.500,00	3%	294.000,00	1 pelatiha n	7.461.750,00		400.000,00	1 pelatihan	9.825.250,00							
	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi	II		0,00%								0,00%	0,00							
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	10.960.000,00	0,00%	1.669.500,00		294.000,00		7.461.750	1 Laporan	400.000,00	1 Laporan	9.825.250,00							Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatiha n		0,00%			0,00	1 pelatiha n				1 pelatihan								
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			6.759.066.718,00	28,89%	895.540.791,00	24,80%	2.019.325.409,00	22,22%	1.313.217.513,00	21,11%	2.277.986.222,00	97,03%	6.506.069.935,00							
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		33,45%	4.989.388.567,00	23,33%	882.840.791,00	26,33%	1.167.458.804,00	20,00%	1.165.345.212,00	30,00%	1.593.506.402,00	99,67%	4.809.151.209,00							
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	4.379.671.767,00	20,00%	859.474.791,00	39,00%	1.121.239.433,00	20,00%	1.102.811.830,00	20,00%	1.191.636.997,00	99,00%	4.275.163.051,00							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	3.119.069.767,00	25,00%	732.578.468,00	25,00%	980.247.549,00	25,00%	649.933.227,00	25%	750.661.107,00	100,00%	3.113.420.351,00							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/b ulan	3.119.069.767,00	88 Orang / bulan	732.578.468,00	176 Orang/b ulan	980.247.549,00	242 Orang/b ulan	649.933.227,00	336 Orang/bul an	750.661.107,00	336 Orang/bulan	3.113.420.351,00							DPMPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	11.000.000,00	0,00%	11.000.000,00	95%	0,00		0,00		0,00	95,00%	11.000.000,00							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	11.000.000,00	0,00%	11.000.000,00	22 Paket	0,00		-		-	22 Paket	11.000.000,00							DPMPTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi umum perangkat daerah	100,00%	433.622.950,00	25,00%	75.527.015,00	25,00%	60.587.939,00	25,00%	74.613.781,00	25,00%	169.922.852,00	100,00%	380.651.587,00							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				I		II		III		IV									
				4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.994.000,00	4 Paket	0,00	4 Paket	1.717.000,00	4 Paket	872.000,00	4 Paket	-	4 Paket	2.589.000,00						DPMPTSP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.005.000,00	4 Paket	14.918.700,00	4 Paket	8.354.200,00	4 Paket	10.479.000,00	4 Paket	3.440.000,00	4 Paket	37.191.900,00						DPMPTSP
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	52.293.650,00	12 Paket	10.071.000,00	12 Paket	0,00	12 Paket	11.285.500,00	3 Paket	29.913.100,00	3 Paket	51.269.600,00						DPMPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	329.333.000,00	24 Laporan	46.972.915,00	24 Laporan	50.516.739,00	24 Laporan	49.847.881,00	48 Laporan	134.235.602,00	48 Laporan	281.573.137,00						DPMPTSP
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	9.997.300,00	4 Dokumen	3.564.400,00	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	2.129.400,00	4 Dokumen	2.334.150,00	4 Dokumen	8.027.950,00						DPMPTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00%	228.867.800,00	25,00%	31.986.308,00	25,00%	45.238.445,00	25,00%	43.021.002,00	25,00%	90.582.373,00	100,00%	210.828.128,00						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.999.600,00	12 Laporan	1.030.000,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	920.000,00	12 Laporan	1.040.000,00	12 Laporan	2.990.000,00						DPMPTSP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	82.325.000,00	48 Laporan	7.799.308,00	48 Laporan	7.203.499,00	48 Laporan	10.413.275,00	48 Laporan	49.388.737,00	48 Laporan	74.804.819,00						DPMPTSP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	143.543.200,00	12 Laporan	23.157.000,00	12 Laporan	38.034.946,00	12 Laporan	31.687.727,00	12 Laporan	40.153.636,00	12 Laporan	133.033.309,00						DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang Milik Daerah berkondisi baik	100,00%	587.111.250,00	25,00%	8.383.000,00	25,00%	35.165.500,00	25,00%	335.243.820,00	25,00%	180.470.665,00	100,00%	559.262.985,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	130.890.600,00	11 Unit	6.933.000,00	11 Unit	32.815.500,00	11 Unit	25.655.350,00	11 Unit	48.312.248,00	11 Unit	113.716.098,00						DPMPTSP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35.280.000,00	12 Unit	1.450.000,00	12 Unit	2.350.000,00	12 Unit	5.135.000,00	5 Unit	18.405.617,00	5 Unit	27.340.617,00						DPMPTSP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	420.940.650,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	304.453.470,00	1 Unit	113.752.800,00	1 Unit	418.206.270,00						DPMPTSP
Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	0,32%	388.965.600,00	25,00%	5.100.000,00	25,00%	46.219.371,00	25,00%	61.088.382,00	25,00%	231.946.305,00	100,00%	344.354.058,00						
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan	100,00%	388.965.600,00	25,00%	5.100.000,00	25%	46.219.371,00	25%	61.088.382,00	25%	231.946.305,00	100,00%	344.354.058,00						
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 Orang	213.980.000,00	80 Orang	0,00	80 Orang	0,00	-	53 Orang	196.850.000,00	53 Orang	196.850.000,00							DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Lembaga	174.985.600,00	2 Lembaga	5.100.000,00	2 Lembaga	46.219.371,00	1 Lembaga	61.088.382,00	1 Lembaga	35.096.305,00	1 Lembaga	147.504.058,00					DPMPTSP	
Program penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0,04%	220.751.200,00	25,00%	18.266.000,00	15,00%	0,00	15,00%	1.445.000,00	45,00%	169.923.100,00	100,00%	189.634.100,00						
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	18.440.400,00	25,00%	18.266.000,00	25,00%	0,00	25%	0,00	25%	0,00	100,00%	18.266.000,00						
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	18.440.400,00	100 Orang	18.266.000,00	100 Orang	0,00	112 Orang	-	112 Orang	-	112 Orang	18.266.000,00					DPMPTSP	
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang		10 Orang	0,00	10 Orang	0,00		-			10 Orang	0,00					DPMPTSP	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan	1 Job Fair	202.310.800,00	25,00%	0,00	5,00%	0,00	5%	1.445.000,00	65%	169.923.100,00	100,00%	171.368.100,00						
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1 orang	202.310.800,00	1 orang	0,00	1 orang	0,00		1.445.000,00	781 orang	169.923.100,00	1 orang	171.368.100,00					DPMPTSP	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		32,00%	716.301.600,00	25,00%	0,00	25,00%	693.604.800,00	25,00%	0,00	25,00%	22.696.800,00	100,00%	716.301.600,00						
Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	32,00%	716.301.600,00	25,00%	0,00	25,00%	693.604.800,00	25,00%	0,00	25,00%	22.696.800,00	100,00%	716.301.600,00						
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan	8736 Orang	716.301.600,00	25,00%	0,00	25%	693.604.800,00	25%	0,00	25%	22.696.800,00	8736 Orang	716.301.600,00						
	Persentase pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100,00%		25,00%		25%		25%				75,00%	0,00						
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		10 Perkara	0,00	10 Perkara	0,00		-			10 Perkara	0,00					DPMPTSP	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	716.301.600,00	8000 Orang	0,00	8000 Orang	693.604.800,00	5127 Orang	-	6568 Orang	22.696.800,00	6568 Orang	716.301.600,00					DPMPTSP	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		98,95%	1.053.376.551,00	38,33%	12.700.000,00	23,08%	158.261.805,00	21,67%	147.872.301,00	8,33%	661.783.020,00	91,41%	980.617.126,00						
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	96,86%	479.493.900,00	25,00%	12.700.000,00	25,00%	22.712.952,00	25,00%	25.920.111,00	25,00%	390.330.831,00	100,00%	451.663.894,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100,00%	479.493.900,00	25,00%	12.700.000,00	25%	22.712.952,00	25%	25.920.111,00	25%	390.330.831,00	100,00%	451.663.894,00					
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120	378.656.100,00	100	0,00	100	0,00	262	-	262	354.256.650,00	262	354.256.650,00					DPMPTSP
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75	94.387.800,00	150	12.700.000,00	150	21.468.702,00	53	22.493.436,00	53	34.730.181,00	53	91.392.319,00					DPMPTSP
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12	6.450.000,00	12	0,00	12	1.244.250,00	12	3.426.675,00	12	1.344.000,00	12	6.014.925,00					DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	35.000.000.000	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	75,00%	0,00					
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	2	0,00	25,00%	0,00	25%	0,00	2	0,00		0,00	2	0,00					
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2		2	0,00	2	0,00		-			2	0,00					DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100,00%	573.882.651,00	65,00%	0,00	19,23%	135.548.853,00	15,00%	121.952.190,00	0,00	271.452.189,00	99,23%	528.953.232,00					
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100,00%	573.882.651,00	65,00%	0,00	19,23%	135.548.853,00	15,00%	121.952.190,00	0,00%	271.452.189,00	99,23%	528.953.232,00					
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50	87.200.000,00	138,00%	0,00	19,84%	17.296.300,00	50	-	33	39.187.200,00	33	56.483.500,00					DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			I		II		III		IV				14=7+13			15=14/6 x 100%		
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbinganTeknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko	287 pelaku usaha	312.276.651,00	57,00%	0,00	37,87%	118.252.553,00	287 pelaku usaha	111.452.190,00	359 pelaku usaha	72.633.239,00	359 pelaku usaha	302.337.982,00					DPMPTSP
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	145 kegiatan usaha	174.406.000,00		0,00		0,00	145 kegiatan usaha	10.500.000,00	188 kegiatan usaha	159.631.750,00	188 kegiatan usaha	170.131.750,00					DPMPTSP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			5.251.964.679,00	24,04%	1.293.031.436,00	27,28%	1.316.370.525,00	27,64%	1.025.957.814,00	21,04%	1.469.742.182,00	100,00%	5.105.101.957,00					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100,00%	573.906.800,00	25,00%	163.721.529,00	25,00%	99.730.036,00	25,00%	53.280.597,00	25,00%	161.079.109,00	100,00%	477.811.271,00					
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3200 Orang	573.906.800,00	25,00%	163.721.529,00	25,00%	99.730.036,00	25,00%	53.280.597,00	25,00%	161.079.109,00	100,00%	477.811.271,00					
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	31000 Orang	289.791.500,00	8250 orang	160.000.829,00	8939 orang	35.970.686,00	11716 orang	27.013.922,00	8513 orang	60.485.929,00	37418 orang	283.471.366,00					
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	500 Eksemplar	108.553.500,00	786 eksemplar	107.386.200,00		0,00		-		-	786 eksemplar	107.386.200,00					
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	181.238.000,00	786 eksemplar	52.614.629,00		35.970.686,00		27.013.922,00		60.485.929,00	786 eksemplar	176.085.166,00					
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	59,00%	284.115.300,00	26,00%	3.720.700,00	24,00%	63.759.350,00	25,00%	26.266.675,00	25,00%	100.593.180,00	100,00%	194.339.905,00					
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	165.377.300,00		819.000,00	68 Lokus	61.359.350,00	68 Lokus	2.917.950,00		92.417.825,00	68 Lokus	157.514.125,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	118.738.000,00	5 Perpustakaan	2.901.700,00	5 Perpustakaan	2.400.000,00	5 Perpustakaan	23.348.725,00	5 Perpustakaan	8.175.355,00	5 Perpustakaan	36.825.780,00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		83,33%	4.678.057.879,00	23,08%	1.129.309.907,00	29,56%	1.216.640.489,00	30,28%	972.677.217,00	17,09%	1.308.663.073,00	100,00%	4.627.290.686,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	4.449.610.129,00	20,00%	1.103.984.077,00	40,00%	1.199.268.879,00	20,00%	944.045.273,00	20,00%	1.157.097.022,00	100,00%	4.404.395.251,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%
4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	95,00%	3.494.778.994,00	25,00%	948.235.430,00	25,00%	980.431.658,00	25,00%	716.777.251,00	25,00%	845.757.714,00	100,00%	3.491.202.053,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/b ulan	3.494.778.994,00	27 Orang / bulan	948.235.430,00	26 Orang/b ulan	980.431.658,00	26 Orang/b ulan	716.777.251,00	26 Orang/bul an	845.757.714,00	26 Orang/bulan	3.491.202.053,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	13.000.000,00	0,00%	0,00	100%	13.000.000,00		0,00		0,00	100,00%	13.000.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	13.000.000,00	0,00	0,00	26 Paket	13.000.000,00		-		-	26 Paket	13.000.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90,00%	240.866.500,00	25,00%	21.620.774,00	25,00%	57.419.338,00	25,00%	62.789.047,00	25,00%	82.544.000,00	100,00%	224.373.159,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	3.987.000,00	2 Paket	1.012.400,00	2 Paket	0,00		-	4 Paket	2.611.400,00	8 paket	3.623.800,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	33.000.000,00	1 Paket	5.026.613,00	11 Paket	3.309.325,00	3 Paket	150.000,00	10 Paket	18.649.650,00	25 paket	27.135.588,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	10.401.500,00	1 Paket	1.191.100,00	3 Paket	3.775.000,00	1 Paket	1.019.000,00	2 Paket	4.251.500,00	7 paket	10.236.600,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	193.478.000,00	35 Laporan	14.390.661,00	29 Laporan	50.335.013,00	57 Laporan	61.620.047,00	79 Laporan	57.031.450,00	200 laporan	183.377.171,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	530.065.635,00	25,00%	111.921.873,00	25,00%	122.933.815,00	25,00%	124.962.975,00	25,00%	165.488.308,00	100,00%	525.306.971,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.037.600,00	0,00	0,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	250.000,00		250.000,00	2 laporan	1.000.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	25.608.035,00	15 Laporan	5.740.841,00	15 Laporan	4.539.507,00	15 Laporan	6.353.599,00	15 Laporan	8.970.475,00	60 laporan	25.604.422,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	503.420.000,00	4 Laporan	106.181.032,00	4 Laporan	117.894.308,00	4 Laporan	118.359.376,00	4 Laporan	156.267.833,00	16 laporan	498.702.549,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80,00%	170.899.000,00	25,00%	22.206.000,00	25,00%	25.484.068,00	25,00%	39.516.000,00	25,00%	63.307.000,00	100,00%	150.513.068,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Blaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya	11 Unit	130.429.000,00	2 Unit	22.206.000,00	2 Unit	23.509.068,00	3 Unit	37.487.000,00	4 Unit	35.259.750,00	11 unit	118.461.818,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	22.400.000,00	1 Unit	0,00	5 Unit	1.975.000,00	5 Unit	1.300.000,00	35 Unit	10.890.000,00	46 unit	14.165.000,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	18.070.000,00	2 Unit	0,00		0,00	1 Unit	729.000,00		17.157.250,00	3 Unit	17.886.250,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	50,00%	137.979.250,00	21,74%	2.375.200,00	33,33%	0,00	25,00%	12.512.410,00	19,93%	118.776.695,00	100,00%	133.664.305,00					
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	15 OPD	137.979.250,00	5	2.375.200,00	5	0,00	5	12.512.410,00		118.776.695,00	15 OPD	133.664.305,00					
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Laporan	137.979.250,00	5 laporan	2.375.200,00	5 laporan	0,00	13 laporan	12.512.410,00		118.776.695,00	23 laporan	133.664.305,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan (Jumlah arsip yang tersimpan pada LKD)	5000 Dokumen	90.468.500,00	27,50%	22.950.630,00	15,33%	17.371.610,00	45,83%	16.119.534,00	11,34%	32.789.356,00	100,00%	89.231.130,00					
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	50,00%	23.412.800,00	20,00%	8.000.000,00	6,67%	2.812.800,00	67%	0,00	7%	11.718.750,00	100,00%	22.531.550,00					
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	23.412.800,00	3 Arsip	8.000.000,00	1 Arsip	2.812.800,00	10 Arsip	-	6 Arsip	11.718.750,00	20 arsip	22.531.550,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75,00%	67.055.700,00	35,00%	14.950.630,00	24%	14.558.810,00	25%	16.119.534,00	16%	21.070.606,00	100,00%	66.699.580,00					
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000 Arsip	67.055.700,00	290 Arsip	14.950.630,00	300 Arsip	14.558.810,00	510 Arsip	16.119.534,00	544 Arsip	21.070.606,00	1.644 arsip	66.699.580,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			32.951.289.024,00	20,80%	2.009.354.254,00	12,21%	2.111.594.421,00	14,94%	1.654.404.340,00	51,35%	24.295.594.045,13	99,31%	30.070.947.060,13					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100,00%	31.182.499.874,00	33,93%	1.703.341.674,00	17,67%	1.907.593.731,00	17,38%	1.395.774.855,00	30,20%	23.343.280.564,13	99,20%	28.349.990.824,13					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	5.136.494.008,00	29,48%	1.149.134.824,00	33,02%	1.499.375.855,00	19,54%	1.074.967.267,00	17,07%	1.274.425.228,00	99,10%	4.997.903.174,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	4.078.419.613,00	19,95%	954.996.296,00	25%	1.266.759.760,00	25%	833.030.648,00	25%	934.888.412,00	94,95%	3.989.675.116,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/Bulan	4.078.419.613,00	81 Orang / Bulan	954.996.296,00	81 Orang/Bulan	1.266.759.760,00	81 Orang/Bulan	833.030.648,00	81 Orang/Bulan	934.888.412,00	324 Orang / Bulan	3.989.675.116,00					Disporapar

Urusan/Program Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			I		II		III		IV															
			8		9		10		11		12							13		14=7+13		15=14/6 x 100%		
4	5		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%		13.500.000,00	0,00%		0,00	93%		13.500.000,00			0,00	7%		0,00	100,00%		13.500.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket		13.500.000,00			0,00	27 Paket		13.500.000,00			-			-	27 Paket		13.500.000,00					Disporapar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100,00%		320.194.100,00	32,50%		49.467.389,00	25%		77.736.670,00	25%		93.506.689,00	18%		69.553.684,00	100,00%		290.264.432,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		14.999.500,00			0,00	2 paket		5.673.000,00	1 paket		5.750.400,00	1 paket		500.000,00	1 Paket		11.923.400,00					Disporapar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		31.012.100,00			0,00	2 paket		10.511.000,00	1 paket		11.760.100,00	1 paket		5.523.900,00	1 Paket		27.795.000,00					Disporapar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		28.362.500,00	3 Paket		1.655.800,00	3 paket		2.048.800,00	3 paket		3.844.100,00	3 paket		7.912.600,00	1 Paket		15.461.300,00					Disporapar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		245.820.000,00	36 Laporan		47.811.589,00	30 laporan		59.503.870,00	14 laporan		72.152.089,00	20 laporan		55.617.184,00	100 Laporan		235.084.732,00					Disporapar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%		54.602.000,00	77,78%		36.920.000,00	5%		10.482.285,00	17,22%		0,00			3.000.000,00	100,00%		50.402.285,00					
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4.809.300,00	2 unit		4.610.000,00			0,00	0 unit		-			-	2 unit		4.610.000,00					Disporapar
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		49.792.700,00	5 unit		32.310.000,00			10.482.285,00	5 unit		-			3.000.000,00	5 unit		45.792.285,00					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00%		447.513.395,00	26,67%		92.109.639,00	25%		106.724.290,00	25%		109.329.180,00	23%		131.901.297,00	99,67%		440.064.406,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2.998.400,00	4 laporan		1.640.000,00	0%		0,00			250.000,00	1 laporan		250.000,00	1 Laporan		2.140.000,00					Disporapar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		91.690.995,00	9 laporan		20.986.003,00	9 laporan		24.651.621,00	9 laporan		24.853.090,00	9 laporan		19.215.843,00	36 Laporan		89.706.557,00					Disporapar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		352.824.000,00	3 laporan		69.483.636,00	3 laporan		82.072.669,00	3 laporan		84.226.090,00	3 laporan		112.435.454,00	12 Laporan		348.217.849,00					Disporapar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berondisi baik	100,00%		222.264.900,00	20,00%		15.641.500,00	25%		24.172.850,00	25%		39.100.750,00	30%		135.081.835,00	100,00%		213.996.935,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		103.944.000,00	2 unit		15.641.500,00	2 unit		23.672.850,00	2 unit		32.826.000,00	1 unit		26.044.200,00	7 unit		98.184.550,00					Disporapar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		0	0,00	0%	0,00	0 unit	-	0 unit	-	0,00%	0,00					Disporapar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	18.252.700,00	2 unit	0,00	3 unit	500.000,00		6.274.750,00		8.980.000,00	5 unit	15.754.750,00					Disporapar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	100.068.200,00	0	0,00	0%	0,00		-	4 unit	100.057.635,00	4 unit	100.057.635,00					
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	3 Indikator	174.913.600,00	0,00%	6.880.364,00	25,00%	82.348.814,00	25,00%	10.820.160,00	50,00%	69.060.246,00	100,00%	169.109.584,00					
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda	2 kegiatan	174.913.600,00	0,00%	6.880.364,00	25%	82.348.814,00	25%	10.820.160,00	50%	69.060.246,00	100,00%	169.109.584,00					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	114.894.650,00		6.880.364,00	30 Orang	40.432.064,00		10.820.160,00	30 orang	52.696.746,00	30 Orang	110.829.334,00					Disporapar
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	60.018.950,00		0,00	30 Orang	41.916.750,00		-	30 orang	16.363.500,00	30 Orang	58.280.250,00					Disporapar
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	44 Cabang	25.721.092.266,00	6,25%	439.485.979,00	12,68%	325.869.062,00	25,00%	309.987.428,00	53,75%	21.999.795.090,13	97,68%	23.075.137.559,13					
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan	1 kali	23.748.777.766,00		0,00	0,01%	1.500.000,00	25%	57.015.988,00	70%	21.347.815.806,13	95,01%	21.406.331.794,13					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	23.748.777.766,00		0,00		1.500.000,00		57.015.988,00	4 Unit	21.347.815.806,13	4 Unit	21.406.331.794,13					Disporapar
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even yang diselenggarakan	3 kompetisi/ even	1.039.920.100,00		414.134.887,00	0,71%	7.430.364,00	50%	185.847.410,00	45%	152.796.746,00	95,71%	760.209.407,00					
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	414.920.100,00		5.430.364,00		7.430.364,00		185.847.410,00	1 Dokumen	152.796.746,00	1 Dokumen	351.504.884,00					Disporapar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	625.000.000,00		408.704.523,00		0,00			-	30 Orang	-	30 Orang	408.704.523,00				
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	1 cabang olahraga	119.118.000,00		0,00	25%	26.020.000,00			0,00	75,00%	76.750.000,00	1 cabang olahraga	102.770.000,00				
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	114.500.000,00		0,00	30 orang	26.020.000,00			-	30 Orang	74.500.000,00	30 Orang	100.520.000,00				Disporapar
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	4.618.000,00		0,00		0,00			-	1 Dokumen	2.250.000,00	1 Dokumen	2.250.000,00				
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	2 kegiatan	813.276.400,00	25,00%	25.351.092,00	25%	290.918.698,00	25%	67.124.030,00	25%	422.432.538,00	2 kegiatan	805.826.358,00					
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	126.261.100,00	1 Dokumen	6.600.000,00		6.000.000,00			11.400.000,00	2 Dokumen	100.967.500,00	2 Dokumen	124.967.500,00				Disporapar
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	2 Unit	687.015.300,00		18.751.092,00	2 Unit	284.918.698,00	2 Unit	55.724.030,00	2 Unit	321.465.038,00	2 Unit	680.858.858,00					Disporapar
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	150.000.000,00	100,00%	107.840.507,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 Organisasi	0,00	100,00%	107.840.507,00					
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	1 organisasi	150.000.000,00	100,00%	107.840.507,00		0,00			0,00	1 organisasi	0,00	100,00%	107.840.507,00				
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	150.000.000,00	1 Organisasi	107.840.507,00		0,00			-	1 Organisasi	-	1 Organisasi	107.840.507,00				Disporapar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARIWISATAAN		100,00%	1.768.789.150,00	7,68%	306.012.580,00	7%	204.000.690,00	12,50%	258.629.485,00	72,50%	952.313.481,00	99,42%	1.720.956.236,00					
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama kunjungan wisata	1,15 -	1.357.221.600,00	25,00%	296.012.580,00	25,00%	200.500.690,00	25,00%	227.131.985,00	25,00%	610.119.477,00	100,00%	1.333.764.732,00					
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	4 destinasi	1.357.221.600,00	25,00%	296.012.580,00	25%	200.500.690,00	25%	227.131.985,00	25%	610.119.477,00	4 destinasi	1.333.764.732,00					
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	572.035.150,00	1 lokasi	173.757.068,00	1 lokasi	109.745.818,00	1 lokasi	115.753.545,00	1 lokasi	172.732.219,00	2 Lokasi	571.988.650,00					Disporapar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	736.320.700,00	1 unit	80.255.012,00	1 unit	90.754.872,00	1 unit	108.343.940,00	1 unit	433.567.008,00	2 Unit	712.920.832,00						
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	48.865.750,00	1 Laporan	42.000.500,00		0,00		3.034.500,00		3.820.250,00	1 Laporan	48.855.250,00				Disporapar		
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	600000 orang	175.360.500,00	5,70%	10.000.000,00	2,00%	3.500.000,00	25,00%	31.497.500,00	65,00%	128.358.000,00	97,70%	173.355.500,00						
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	90,00%	175.360.500,00	5,70%	10.000.000,00	2%	3.500.000,00	25%	31.497.500,00	65%	128.358.000,00	97,70%	173.355.500,00						
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	7.997.500,00		0,00		0,00	1 dokumen	7.997.500,00		-	1 Dokumen	7.997.500,00				Disporapar		
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	59.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	1 dokumen	3.500.000,00		23.500.000,00	1 dokumen	20.750.000,00	3 Dokumen	57.750.000,00				Disporapar		
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	108.363.000,00		0,00		0,00		-		107.608.000,00	1 Kegiatan	107.608.000,00				Disporapar		
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	103.177.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	92.704.500,00	100,00%	92.704.500,00						
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan	1 Kreatif Hub	29.384.300,00		0,00		0,00		0,00	100%	25.620.000,00	1 Kreatif Hub	25.620.000,00						
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 Unit	29.384.300,00		0,00		0,00		-	10 Unit	25.620.000,00	10 Unit	25.620.000,00				Disporapar		
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	50 produk	73.792.700,00		0,00		0,00		0,00	100%	67.084.500,00	100,00%	67.084.500,00						
Fasilitasi Pemberian Insentif			49.978.800,00							10 pelaku usaha	46.980.000,00	10 pelaku usaha	46.980.000,00				Disporapar		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV										
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
4	5	8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Produk	23.813.900,00		0,00		0,00		-	30 produk	20.104.500,00	30 produk	20.104.500,00					Disporapar	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 Sub sektor	133.030.050,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	121.131.504,00	100,00%	121.131.504,00						
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina	14 sub sektor	133.030.050,00		0,00		0,00		0,00	100%	121.131.504,00	14 sub sektor	121.131.504,00						
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	57.062.700,00		0,00		0,00		-	1 Laporan	52.748.000,00	1 Laporan	52.748.000,00					Disporapar	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	75.967.350,00		0,00		0,00		-	30 Orang	68.383.504,00	30 Orang	68.383.504,00					Disporapar	
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			22.503.182.232,00	14,18%	3.244.240.389,00	30,85%	5.272.286.169,46	26,57%	4.995.007.021,00	21,67%	7.169.351.930,00	93,27%	20.680.885.509,46						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		38,00%	15.216.194.082,00	15,51%	1.952.578.719,00	18,83%	3.722.774.914,00	29,70%	3.498.452.434,00	25,00%	4.612.491.755,00	89,03%	13.786.297.822,00						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	8.664.329.082,00	25,00%	1.906.142.869,00	25%	2.283.668.514,00	25%	1.861.910.334,00	25%	2.318.023.280,00	100,00%	8.369.744.997,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	6.858.039.882,00	25,00%	1.738.367.265,00	25%	1.820.690.281,00	25%	1.385.669.557,00	25%	1.709.230.958,00	100,00%	6.653.958.061,00						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/bulan	6.858.039.882,00	144 Orang / bulan	1.738.367.265,00	240 Orang/bulan	1.820.690.281,00	240 Orang/bulan	1.385.669.557,00	146 Orang / bulan	1.709.230.958,00	770 Orang/bulan	6.653.958.061,00					Dinas Perdagkop UMKM	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	24.000.000,00	25,00%	0,00	50%	23.000.000,00		0,00	25%	1.000.000,00	100,00%	24.000.000,00						
Pengadaan Pakaian beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	24.000.000,00		0,00	46 Paket	23.000.000,00		-	2 Paket	1.000.000,00	48 Paket	24.000.000,00					Dinas Perdagkop UMKM	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100,00%	484.943.500,00	25,00%	66.211.614,00	25%	55.470.834,00	25%	180.978.376,00	25%	170.327.476,00	100,00%	472.988.300,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.878.800,00		0,00		0,00	5 Paket	-	2 paket	7.712.200,00	7 Paket	7.712.200,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.502.200,00		0,00		0,00	5 Paket	300.000,00	2 paket	35.899.200,00	7 Paket	36.199.200,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.851.500,00		0,00	12 Paket	700.000,00		1.979.650,00	2 paket	4.740.550,00	14 Paket	7.420.200,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	421.711.000,00	6 Laporan	66.211.614,00	6 Laporan	54.770.834,00	6 Laporan	178.698.726,00	6 laporan	121.975.526,00	24 Laporan	421.656.700,00					Dinas Perdagkop UMKM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100,00%	71.438.800,00		0,00	50%	15.000.000,00		0,00	50%	56.400.000,00	100,00%	71.400.000,00					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	71.438.800,00		0,00	1	15.000.000,00		-	8	56.400.000,00	9 Unit	71.400.000,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00%	577.527.500,00	25,00%	87.335.790,00	25%	146.535.099,00	25%	131.158.979,00	25%	206.290.667,00	100,00%	571.320.535,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.854.000,00	1 Laporan	250.000,00	6 Laporan	0,00		2.250.000,00		-	7 Laporan	2.500.000,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	49.937.500,00	9 Laporan	11.925.790,00	9 Laporan	10.175.099,00	9 Laporan	11.648.979,00	9 Laporan	11.161.653,00	36 Laporan	44.911.521,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	524.736.000,00	3 Laporan	75.160.000,00	3 Laporan	136.360.000,00	3 Laporan	117.260.000,00	3 Laporan	195.129.014,00	12 Laporan	523.909.014,00					Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100,00%	648.379.400,00	25,00%	14.228.200,00	25%	222.972.300,00	25%	164.103.422,00	25%	174.774.179,00	100,00%	576.078.101,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	141.200.000,00	1 Unit	3.780.000,00	1 Unit	123.714.000,00	1 Unit	5.997.600,00	1 Unit	7.564.200,00	1 Unit	141.055.800,00					Dinas Perdagkop UMKM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.				
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	27 Unit	101.590.000,00			10.448.200,00		27 Unit	22.159.600,00			22.294.100,00		27 Unit	32.026.550,00		27 Unit	86.928.450,00							Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	29.521.400,00			0,00		48%	14.190.700,00			387.600,00		20 Unit	8.356.900,00		20 Unit	22.935.200,00							Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	376.068.000,00			0,00		1 Unit	62.908.000,00			135.424.122,00		2 Unit	126.826.529,00		3 Unit	325.158.651,00							Dinas Perdagkop UMKM
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22,00%	5.659.400,00		50,00%	737.100,00		25,00%	3.759.150,00		25,00%	0,00		0,00%	734.200,00		100,00%	5.230.450,00							
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan koperasi	20 koperasi	5.659.400,00		10 Unit Usaha	737.100,00		5 Unit Usaha	3.759.150,00		5 Unit Usaha	0,00			734.200,00		20 Unit Usaha	5.230.450,00							
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	5.659.400,00		10 Unit Usaha	737.100,00		5 Unit Usaha	3.759.150,00		5 Unit Usaha	-			734.200,00		20 Unit Usaha	5.230.450,00							Dinas Perdagkop UMKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	18,00%	22.484.200,00		0,00%	0,00		20,00%	161.700,00		50,00%	11.156.100,00		25,00%	6.742.050,00		95,00%	18.059.850,00							
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina	15 koperasi	22.484.200,00			0,00		3 koperasi	161.700,00		10 Unit Usaha	11.156.100,00		Unit Usah	6.742.050,00		15 koperasi	18.059.850,00							
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	22.484.200,00			0,00		3 Unit Usaha	161.700,00		10 Unit Usaha	11.156.100,00		2 Unit Usaha	6.742.050,00		15 Unit Usaha	18.059.850,00							Dinas Perdagkop UMKM
Program Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	10,00%	1.604.114.000,00		2,39%	38.300.000,00		4,10%	65.800.000,00		25,00%	65.000.000,00		50,00%	838.843.675,00		81,49%	1.007.943.675,00							
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan omset usaha	10,00%	1.604.114.000,00		2,39%	38.300.000,00		4,10%	65.800.000,00		25%	65.000.000,00		50%	838.843.675,00		81,49%	1.007.943.675,00							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha		228.000.000,00		34.500.000,00	26%	58.900.000,00		57.400.000,00	3 Unit Usaha	73.800.000,00	3 Unit Usaha	224.600.000,00				Dinas Perdagkop UMKM	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha		1.376.114.000,00		3.800.000,00	20 Unit Usaha	6.900.000,00		7.600.000,00	75 Unit Usaha	765.043.675,00	95 Unit Usaha	783.343.675,00				Dinas Perdagkop UMKM	
Program Pengembangan UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	40,00%		4.919.607.400,00	0,15%	7.398.750,00	20,05%	1.369.385.550,00	23,48%	1.560.386.000,00	25,00%	1.448.148.550,00	68,68%	4.385.318.850,00					
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu	40,00%		4.919.607.400,00	0,15%	7.398.750,00	20,05%	1.369.385.550,00	23,48%	1.560.386.000,00	25%	1.448.148.550,00	68,68%	4.385.318.850,00					
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1661 Unit Usaha		4.919.607.400,00		7.398.750,00	333 Unit Usaha	1.369.385.550,00	390 Unit Usaha	1.560.386.000,00	410 Unit Usaha	1.448.148.550,00	1133 Unit Usaha	4.385.318.850,00				Dinas Perdagkop UMKM	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		49,75%		6.537.353.400,00	16,52%	1.212.878.470,00	23,73%	1.329.931.755,46	25,00%	1.339.217.750,00	30,00%	2.310.723.612,00	95,25%	6.192.751.587,46					
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	34,00%		77.459.300,00	25,00%	15.776.550,00	25,00%	24.048.750,00	25,00%	12.972.600,00	25,00%	15.178.350,00	100,00%	67.976.250,00					
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	150 pelaku usaha		5.563.100,00	92 pelaku usaha	0,00	34 Dokumen	286.650,00	32 Dokumen	2.720.550,00	46 Dokumen	2.306.550,00	152 Dokumen	5.313.750,00					
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150 Dokumen		5.563.100,00	30 Dokumen	0,00	34 Dokumen	286.650,00	32 Dokumen	2.720.550,00	46 Dokumen	2.306.550,00	152 Dokumen	5.313.750,00				Dinas Perdagkop UMKM	
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Junlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota	2 kali		71.896.200,00	21,94%	15.776.550,00	33,05%	23.762.100,00	25%	10.252.050,00	20%	12.871.800,00	1 kali	62.662.500,00					
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan		71.896.200,00	1 Laporan	15.776.550,00		23.762.100,00		10.252.050,00	1 Laporan	12.871.800,00	2 Laporan	62.662.500,00				Dinas Perdagkop UMKM	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	90,00%		5.624.419.650,00	19,14%	1.076.396.842,00	21,60%	1.214.709.759,46	25,00%	1.110.445.255,00	30,00%	1.990.410.119,00	95,73%	5.391.961.975,46					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16						
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola	2 unit	5.624.419.650,00	19,14%	1.076.396.842,00	21,60%	1.214.709.759,46	25,00%	1.110.445.255,00	2 unit	1.990.410.119,00	65,73%	5.391.961.975,46					
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2.845.230.000,00		380.431.910,00	20%	581.923.301,46		544.049.255,00	2 Unit	1.241.143.788,00	22,25%	2.747.548.254,46				Dinas Perdagkop UMKM	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	2.779.189.650,00		695.964.932,00	23%	632.786.458,00		566.396.000,00	1 Unit	749.266.331,00	18,60%	2.644.413.721,00				Dinas Perdagkop UMKM	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok	9,00%	184.254.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	156.785.600,00	100,00%	156.785.600,00					
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok	9,00%	184.254.400,00		0,00		0,00		0,00	100%	156.785.600,00	2 kali	156.785.600,00					
Pekaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok	1 laporan	184.254.400,00							1 laporan	156.785.600,00	1 laporan	156.785.600,00				Dinas Perdagkop UMKM	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	60,00%	189.609.050,00	1 kali	19.390.861,00	23,33%	25.555.451,00	25,00%	48.465.046,00	40,00%	44.791.897,00	88,33%	138.203.255,00					
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTTP	6 kali	189.609.050,00	1 kali	19.390.861,00	1 kali	25.555.451,00	2 kali	48.465.046,00	40%	44.791.897,00	4 kali	138.203.255,00					
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1200 Unit	189.609.050,00	215 Unit	19.390.861,00	280 Unit	25.555.451,00	130 Unit	48.465.046,00		44.791.897,00	625 Unit	138.203.255,00				Dinas Perdagkop UMKM	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	15%	461.611.000,00	21,95%	101.314.217,00	25,00%	65.617.795,00	25,00%	167.334.849,00	25,00%	103.557.646,00	96,95%	437.824.507,00					
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital	75 pelaku usaha	461.611.000,00	21,95%	101.314.217,00	25%	65.617.795,00	25%	167.334.849,00	25%	103.557.646,00	96,95%	437.824.507,00					
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	386.111.000,00	2 UMKM	91.714.217,00	5 UMKM	39.017.795,00	5 UMKM	151.134.849,00	5 UMKM	81.557.646,00	5 UMKM	363.424.507,00				Dinas Perdagkop UMKM	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
		KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	KRp.	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	75 UMKM	75.500.000,00		9.600.000,00	30 UMKM	26.600.000,00	15 UMKM	16.200.000,00	30 UMKM	22.000.000,00	75 UMKM	74.400.000,00					Dinas Perdagkop UMKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		5,00%	749.634.750,00	10,51%	78.783.200,00	50,00%	219.579.500,00	25,00%	157.336.837,00	10,00%	246.136.563,00	95,51%	701.836.100,00					
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan Merk)	5,00%	749.634.750,00	10,51%	78.783.200,00	50%	219.579.500,00	25%	157.336.837,00	10%	246.136.563,00	95,51%	701.836.100,00					
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	12 kali	749.634.750,00	10,51%	78.783.200,00	6 kali	219.579.500,00	25%	157.336.837,00	10%	246.136.563,00	6 kali	701.836.100,00					
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	666.162.950,00		78.783.200,00		170.158.000,00		152.674.837,00		230.198.563,00	0,00%	631.814.600,00					Dinas Perdagkop UMKM
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	83.471.800,00	0,00		1 Dokumen	49.421.500,00		4.662.000,00		15.938.000,00	1 Dokumen	70.021.500,00					Dinas Perdagkop UMKM
INSPEKTORAT DAERAH			7.031.135.623,00	22,70%	1.757.551.558,00	26,94%	1.819.443.136,00	27,78%	1.517.258.790,00	22,39%	1.846.579.178,00	99,81%	6.940.832.662,00					
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
INSPEKTORAT DAERAH		89,67%	7.031.135.623,00	22,70%	1.757.551.558,00	26,94%	1.819.443.136,00	27,78%	1.517.258.790,00	22,39%	1.846.579.178,00	99,81%	6.940.832.662,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90,00%	6.348.684.623,00	30,61%	1.583.039.058,00	30,83%	1.710.376.361,00	20,83%	1.348.625.690,00	17,17%	1.643.993.158,00	99,44%	6.286.034.267,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	5.080.677.823,00	25,00%	1.196.989.749,00	25,00%	1.601.894.006,00	25%	1.050.176.826,00	25%	1.219.873.608,00	100,00%	5.068.934.189,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	5.080.677.823,00	25%	1.196.989.749,00	25%	1.601.894.006,00	25%	1.050.176.826,00	25%	1.219.873.608,00	100,00%	5.068.934.189,00					Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	328.900.000,00	69,00%	76.660.000,00	0%	0,00	25,00%	132.133.750,00	6%	118.583.800,00	100,00%	327.377.550,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	15.500.000,00	100%	15.500.000,00	0%	0,00	0%	-		-	100,00%	15.500.000,00					Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				I		II		III		IV										
				4	5	8		9		10		11		12		13			14=7+13	
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	313.400.000,00	38%	61.160.000,00	0%	0,00	50%	132.133.750,00	40 Orang	118.583.800,00	40 Orang	311.877.550,00							Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90,00%	320.596.400,00	40,00%	64.153.055,00	25%	38.543.410,00	25%	79.969.842,00	10%	126.100.201,00	100,00%	308.766.508,00							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.186.400,00	60,00%	1.118.000,00	0%	0,00		-		889.000,00	1 Paket	2.007.000,00							Inspektorat
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.553.000,00	5,00%	0,00	0%	0,00	25%	510.000,00	1 Paket	1.540.000,00	1 Paket	2.050.000,00							Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.014.100,00	45,00%	17.256.500,00	25%	6.227.400,00	25%	8.920.100,00	1 Paket	8.190.900,00	1 Paket	40.594.900,00							
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.687.900,00	60,00%	5.682.250,00	25%	500.000,00	15%	1.902.100,00		4.370.100,00	2 Paket	12.454.450,00							Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	255.155.000,00	30,00%	40.096.305,00	25%	31.816.010,00	25%	68.637.642,00	83 Laporan	111.110.201,00	83 Laporan	251.660.158,00							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	172.513.200,00	0,00%	87.250.000,00	95%	0,00		0,00	5%	76.500.000,00	100,00%	163.750.000,00							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	172.513.200,00		87.250.000,00	95%	0,00		-		76.500.000,00	2 Unit	163.750.000,00							Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	80,00%	217.137.200,00	21,67%	47.104.884,00	25%	44.694.795,00	25%	59.408.922,00	25%	64.791.549,00	96,67%	216.000.150,00							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	520.000,00	5,00%	250.000,00		0,00		-	1 Laporan	250.000,00	1 Laporan	500.000,00							Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	13.082.400,00	30,00%	3.046.700,00	25%	3.262.519,00	25%	3.516.646,00	1 Laporan	3.130.727,00	1 Laporan	12.956.592,00							Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	203.534.800,00	30,00%	43.808.184,00	25%	41.432.276,00	25%	55.892.276,00	1 Laporan	61.410.822,00	1 Laporan	202.543.558,00							Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100,00%	228.860.000,00	28,00%	110.881.370,00	15,00%	25.244.150,00	25,00%	26.936.350,00	32%	38.144.000,00	100,00%	201.205.870,00							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	191.110.000,00	60,00%	106.728.370,00	25%	19.554.650,00	15%	17.748.500,00	8 Unit	20.985.650,00	8 Unit	165.017.170,00							Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV		13							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	23.700.000,00	30,00%	4.153.000,00	25%	3.554.500,00	25%	7.799.850,00	1 Unit	6.885.350,00	1 Unit	22.392.700,00					Inspektorat
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		0,00%	0,00	0%	0,00	0%	-		-		0,00					Inspektorat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	9.090.000,00	25,00%	0,00	25%	2.135.000,00	25%	1.388.000,00	20 Unit	5.370.000,00	20 Unit	8.893.000,00					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.960.000,00	25,00%	0,00	0%	0,00	0%	-	1 Unit	4.903.000,00	1 Unit	4.903.000,00					
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	88,00%	522.769.000,00	12,50%	166.440.000,00	25,00%	92.623.500,00	37,50%	114.750.000,00	25,00%	142.225.300,00	100,00%	516.038.800,00					
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditor	70,00%	465.839.000,00	25,00%	166.440.000,00	25,00%	81.023.500,00	25,00%	82.940.000,00	25%	128.705.300,00	100,00%	459.108.800,00					
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan	30.250.000,00	2 Laporan	8.745.000,00	3 Laporan	16.405.000,00	1 Laporan	5.100.000,00		-	6 Laporan	30.250.000,00					Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	120 Laporan	344.265.000,00	31 Laporan	137.855.000,00	48 Laporan	27.580.000,00	70 Laporan	72.780.000,00	45 Laporan	106.050.000,00	194 Laporan	344.265.000,00					Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	17.690.000,00	25,00%	0,00	2 Laporan	17.690.000,00	0%	-		-	2 Laporan	17.690.000,00					Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	15.365.000,00	1 Laporan	15.365.000,00	0,00%	0,00	0%	-		-	1 Laporan	15.365.000,00					Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3 Laporan	58.269.000,00	1 Laporan	4.475.000,00	2 Laporan	19.348.500,00	1 Laporan	5.060.000,00	2 Laporan	22.655.300,00	6 laporan	51.538.800,00					Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100,00%	56.930.000,00	0,00%	0,00	25,00%	11.600.000,00	50,00%	31.810.000,00	25%	13.520.000,00	100,00%	56.930.000,00					
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		0,00%	0,00	0%	0,00	0%	-		-	0,00%	0,00					Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			8	9	10	11	12	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.	K		Rp.	K
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	56.930.000,00		0,00	2 Laporan	11.600.000,00	3 Laporan	31.810.000,00	1 Laporan	13.520.000,00	6 Laporan	56.930.000,00					Inspektorat	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	91,00%	159.682.000,00	25,00%	8.072.500,00	25,00%	16.443.275,00	25,00%	53.883.100,00	25,00%	60.360.720,00	100,00%	138.759.595,00						
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	87,00%	159.682.000,00	25,00%	8.072.500,00	25,00%	16.443.275,00	25,00%	53.883.100,00	25%	60.360.720,00	100,00%	138.759.595,00						
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	23 perangk at daerah	61.940.000,00	25,00%	5.170.000,00	22%	13.340.000,00	25%	21.795.000,00	23 Perangkat Daerah	20.465.000,00	23 perangkat daerah	60.770.000,00					Inspektorat	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	23 perangk at daerah	3.885.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	25%	1.590.000,00	23 Perangkat Daerah	2.295.000,00	23 perangkat daerah	3.885.000,00					Inspektorat	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	14.375.000,00	1 Kegiatan	2.902.500,00	1 Kegiatan	3.103.275,00		4.890.500,00	1 Kegiatan	3.392.850,00	3 Kegiatan	14.289.125,00					Inspektorat	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23 perangk at daerah	79.482.000,00	5,00%	0,00	0%	0,00	25%	25.607.600,00	23 Perangkat Daerah	34.207.870,00	23 perangkat daerah	59.815.470,00					Inspektorat	
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			6.160.020.196,00	14,82%	1.278.131.468,00	19,70%	1.837.281.568,00	23,71%	1.203.424.792,00	41,77%	1.738.041.185,00	100,00%	6.056.879.013,00						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
PERENCANAAN		89,00%	6.075.652.296,00	29,63%	1.278.131.468,00	22,74%	1.823.270.468,00	22,42%	1.192.512.267,00	25,21%	1.682.771.775,00	100,00%	5.976.685.978,00						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	5.573.652.844,00	31,19%	1.131.319.918,00	18,22%	1.772.540.187,00	17,26%	1.098.306.552,00	33,33%	1.501.109.370,00	100,00%	5.503.276.027,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	4.507.364.022,00	21,43%	931.566.899,00	25%	1.580.474.716,00	28,57%	904.589.903,00	25%	1.075.527.134,00	100,00%	4.492.158.652,00						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/b ulan	4.507.364.022,00	99 Orang / bulan	931.566.899,00	264 Orang/b ulan	1.580.474.716,00	363 org/bula n	904.589.903,00	462 orang/ bulan	1.075.527.134,00	462 orang/ bulan	4.492.158.652,00					BAPPEDA	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	35.500.000,00	90,70%	19.500.000,00	9,30%	0,00		0,00	0%	15.150.000,00	100,00%	34.650.000,00						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	35.500.000,00	39 Paket	19.500.000,00		0,00		-	79 Paket	15.150.000,00	79 Paket	34.650.000,00					BAPPEDA	
Administrasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100,00%	517.358.737,00	25,00%	54.438.820,00	25%	120.821.261,00	25%	120.870.515,00	25%	205.209.816,00	100,00%	501.340.412,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.967.000,00			2 Paket	1.769.500,00	3 Paket	1.659.000,00	4 Paket	974.800,00	4 Paket	4.403.300,00					BAPPEDA	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.138.537,00	1 Paket	4.207.800,00	2 Paket	8.750.000,00	3 Paket	12.894.550,00	4 Paket	23.767.250,00	4 Paket	49.619.600,00					BAPPEDA	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.198.200,00	1 Paket	546.000,00	2 Paket	150.000,00	3 Paket	435.000,00	4 Paket	10.563.400,00	4 Paket	11.694.400,00					BAPPEDA	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	442.055.000,00	6 laporan	49.685.020,00	12 Laporan	110.151.761,00	18 Laporan	105.881.965,00	24 Laporan	169.904.366,00	24 Laporan	435.623.112,00					BAPPEDA	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100,00%	140.344.700,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	100%	127.050.000,00	100,00%	127.050.000,00						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	140.344.700,00		0,00		0,00		-	37 Unit	127.050.000,00	37 Unit	127.050.000,00					BAPPEDA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00%	174.941.385,00	25,00%	28.299.199,00	25%	50.148.173,00	25%	40.934.660,00	25%	48.320.995,00	100,00%	167.703.027,00						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.080.000,00		0,00	2 Laporan	500.000,00	3 Laporan	1.000.000,00	4 Laporan	250.000,00	4 Laporan	1.750.000,00					BAPPEDA	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	14.999.385,00	9 laporan	5.268.204,00	2 Laporan	5.209.044,00	2 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	10.477.248,00					BAPPEDA	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.862.000,00	3 laporan	23.030.995,00	6 Laporan	44.439.129,00	9 Laporan	39.934.660,00	12 Laporan	48.070.995,00	12 Laporan	155.475.779,00					BAPPEDA	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100,00%	198.144.000,00	25,00%	97.515.000,00	25%	21.096.037,00	25%	31.911.474,00	25%	29.851.425,00	100,00%	180.373.936,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	178.570.000,00	9 Unit	97.515.000,00	18 Unit	20.798.037,00	18 Unit	25.306.474,00	20 Unit	24.466.425,00	20 Unit	168.085.936,00					BAPPEDA	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	19.574.000,00		0,00	1 Unit	298.000,00	14 Unit	6.605.000,00	50 Unit	5.385.000,00	50 Unit	12.288.000,00					BAPPEDA	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			0,00		0,00		-	1 Unit		1 Unit	0,00					BAPPEDA	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	82,00%	419.184.752,00	24,38%	144.335.950,00	25,00%	44.754.031,00	25,00%	64.759.500,00	25,63%	141.599.220,00	100,00%	395.448.701,00						
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	2 dokumen	395.590.352,00	37,50%	141.693.100,00	25%	42.911.281,00	25%	58.146.050,00	12,50%	133.433.270,00	2 dokumen	376.183.701,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV				15=14/6 x 100%			
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	16							
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	-	0,00	0,00		BAPPEDA							
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	88.370.000,00	2 Berita Acara	77.267.700,00	2 Berita Acara	0,00	2 Berita Acara	-	2 Berita Acara	7.586.850,00	2 Berita Acara	84.854.550,00			BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	307.220.352,00	1 Dokumen	64.425.400,00	1 Dokumen	42.911.281,00	5 Dokumen	58.146.050,00	5 Dokumen	125.846.420,00	5 Dokumen	291.329.151,00			BAPPEDA
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	86,00%	4.266.400,00	15,00%	614.250,00	25%	0,00	25%	0,00	35%	2.560.750,00	100,00%	3.175.000,00			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	4.266.400,00		614.250,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2.560.750,00	1 Dokumen	3.175.000,00			BAPPEDA
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	12.893.000,00	30,00%	532.350,00	25%	1.023.750,00	25%	4.639.450,00	20%	3.692.100,00	4 dokumen	9.887.650,00			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	12.893.000,00	3 Laporan	532.350,00	5 Laporan	1.023.750,00	7 Laporan	4.639.450,00	10 Laporan	3.692.100,00	10 Laporan	9.887.650,00			BAPPEDA
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	6.435.000,00	15,00%	1.496.250,00	25%	819.000,00	25%	1.974.000,00	35%	1.913.100,00	5 modul	6.202.350,00			
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	6.435.000,00	2 Dokumen	1.496.250,00	41 Dokumen	819.000,00	41 Dokumen	1.974.000,00	41 Dokumen	1.913.100,00	41 Dokumen	6.202.350,00			BAPPEDA
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	85,00%	82.814.700,00	33,33%	2.475.600,00	25,00%	5.976.250,00	25,00%	29.446.215,00	16,67%	40.063.185,00	100,00%	77.961.250,00			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	85,00%	46.321.700,00	50,00%	2.047.500,00	25%	4.477.150,00	25%	19.626.390,00	0%	17.420.000,00	100,00%	43.571.040,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV											
			9		10		11		12											
4	5	8	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	K	Rp.	14=7+13	K	Rp.	15=14/6 x 100%	16
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13	13.385.350,00	13 Laporan	2.047.500,00	13 Laporan	1.899.400,00	13 Laporan	1.727.250,00	13 Laporan	7.176.600,00	13 Laporan	12.850.750,00						BAPPEDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13	32.936.350,00		0,00	13 Laporan	2.577.750,00	13 Laporan	17.899.140,00	13 Laporan	10.243.400,00	13 Laporan	30.720.290,00						BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	85,00%		25.406.400,00	25,00%	428.100,00	25%	0,00	25%	3.776.550,00	25%	20.747.110,00	100,00%	24.951.760,00						
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2	25.406.400,00		428.100,00	2 Laporan	0,00	2 Laporan	3.776.550,00	2 Laporan	20.747.110,00	2 Laporan	24.951.760,00						BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	85,00%		11.086.600,00	25,00%	0,00	25%	1.499.100,00	25%	6.043.275,00	25%	1.896.075,00	100,00%	9.438.450,00						
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8 Laporan	8	11.086.600,00		0,00	8 Laporan	1.499.100,00	8 Laporan	6.043.275,00	8 Laporan	1.896.075,00	8 Laporan	9.438.450,00						BAPPEDA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		72,00%		84.367.900	0,00%	0	16,67%	14.011.100	25,00%	10.912.525	58,33%	55.269.410	100,00%	80.193.035,00						
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	72,00%		84.367.900,00	0,00%	0,00	16,67%	14.011.100,00	25,00%	10.912.525,00	58,33%	55.269.410,00	100,00%	80.193.035,00						
	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	6 Dokume n											0,00%	0,00						
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	1 dokume n		0,00	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00						
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan				0,00		0,00		-			0,00%	0,00						BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokume n		12.566.000,00	0,00%	0,00	25%	4.947.500,00	25%	6.559.750,00	50%	350.000,00	100,00%	11.857.250,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV							
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16						
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	12.566.000,00		0,00	1 Dokumen	4.947.500,00	1 Dokumen	6.559.750,00	2 Dokumen	350.000,00	2 Dokumen	11.857.250,00			BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbang daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	14.594.000,00	0,00%	0,00		0,00	25%	1.208.025,00	75%	12.683.000,00	100,00%	13.891.025,00			
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	14.594.000,00		0,00		0,00	1 Dokumen	1.208.025,00	2 dokumen	12.683.000,00	2 dokumen	13.891.025,00			BAPPEDA
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100,00%	57.207.900,00	0,00%	0,00	25%	9.063.600,00	25%	3.144.750,00	50%	42.236.410,00	100,00%	54.444.760,00			
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	57.207.900,00		0,00	1 Dokumen	9.063.600,00	1 Dokumen	3.144.750,00	1 Dokumen	42.236.410,00	1 Dokumen	54.444.760,00			BAPPEDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			11.164.852.298,00	22,45%	2.442.761.182,00	30,06%	2.545.412.007,00	21,50%	2.048.332.310,00	25,99%	3.214.915.273,00	100,00%	10.251.420.772,00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
KEUANGAN		75,50%	11.164.852.298,00	22,45%	2.442.761.182,00	30,06%	2.545.412.007,00	21,50%	2.048.332.310,00	25,99%	3.214.915.273,00	100,00%	10.251.420.772,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	8.739.867.548,00	16,67%	2.013.319.482,00	45,24%	2.198.159.566,00	17,26%	1.680.315.410,00	20,83%	2.458.592.181,00	100,00%	8.350.386.639,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	6.802.443.016,00	25,00%	1.664.955.212,00	25,00%	1.784.535.037,00	25%	1.369.205.103,00	25%	1.727.634.710,00	100,00%	6.546.330.062,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	6.802.443.016,00	135 orang / bulan	1.664.955.212,00	225 org/bln	1.784.535.037,00	135 org/bln	1.369.205.103,00	135 org/bln	1.727.634.710,00	630 Orang/bulan	6.546.330.062,00			BPKD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	22.500.000,00	0,00%	0,00	71,43%	22.000.000,00	3,57%	0,00	25%	500.000,00	100,00%	22.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	63 Paket	22.500.000,00		45 Paket	22.000.000,00		-		500.000,00	45 Paket	22.500.000,00				BPKD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90,00%	753.533.300,00	25,00%	104.620.230,00	25,00%	195.721.831,00	25%	87.067.594,00	25%	324.779.642,00	100,00%	712.189.297,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	13.060.000,00	7 paket	7 paket	2.990.000,00	7 paket	1.787.000,00		4.540.000,00	7 Paket	9.317.000,00				BPKD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	134.849.500,00	45 paket	15.758.718,00	45 paket	40.351.300,00	45 paket	11.293.000,00	45 paket	50.293.000,00	45 Paket	117.696.018,00			BPKD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	19.434.300,00	2 paket	2.790.000,00	2 paket	4.418.800,00	2 paket	912.500,00	2 paket	9.674.800,00	8 Paket	17.796.100,00			BPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512 Laporan	586.189.500,00	115 laporan	86.071.512,00	116 laporan	147.961.731,00	115 laporan	73.075.094,00	166 laporan	260.271.842,00	512 Laporan	567.380.179,00					BPKD	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	186.147.200,00	0,00%	64.450.000,00	100%	1.000.000,00		0,00		109.890.000,00	100,00%	175.340.000,00						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	186.147.200,00		64.450.000,00	5 unit	1.000.000,00		-	21 unit	109.890.000,00	26 unit	175.340.000,00					BPKD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100,00%	662.758.332,00	25,00%	133.349.737,00	25,00%	147.473.415,00	25%	152.753.363,00	25%	211.437.816,00	100,00%	645.014.331,00						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.385.200,00	3 laporan	750.000,00	3 laporan	750.000,00	3 laporan	-	3 laporan	1.250.000,00	3 laporan	2.750.000,00					BPKD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	134.506.732,00	15 laporan	31.600.152,00	15 laporan	33.954.131,00	15 laporan	33.864.079,00	15 laporan	30.788.911,00	60 laporan	130.207.273,00					BPKD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	523.866.400,00	2 laporan	100.999.585,00	2 laporan	112.769.284,00	2 laporan	118.889.284,00	2 laporan	179.398.905,00	2 laporan	512.057.058,00					BPKD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	88,00%	312.485.700,00	25,00%	45.944.303,00	25,00%	47.429.283,00	25%	71.289.350,00	25%	84.350.013,00	100,00%	249.012.949,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	33 Unit	253.185.000,00	10 unit	44.484.303,00	5 unit	45.284.283,00	7 unit	63.176.850,00	11 unit	46.003.013,00	33 unit	198.948.449,00					BPKD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	12.790.000,00	6 unit	950.000,00	6 unit	520.000,00	7 unit	4.530.000,00	11 unit	3.000.000,00	30 unit	9.000.000,00					BPKD	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.510.700,00	-	510.000,00	1 unit	1.625.000,00		3.582.500,00		35.347.000,00	1 unit	41.064.500,00					BPKD	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	1.991.333.900,00	23,11%	378.262.450,00	25,00%	330.102.841,00	18,75%	309.024.150,00	33,14%	517.419.602,00	100,00%	1.534.809.043,00						
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	716.695.300,00	25,00%	164.127.750,00	25,00%	102.933.250,00	25%	156.547.750,00	25%	258.218.900,00	100,00%	681.827.650,00						
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	112.480.900,00				50.100.000,00		50.755.200,00	2 dokumen	5.754.450,00	2 dokumen	106.609.650,00					BPKD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokume n	109.102.700,00				0,00	2 dokume n	102.903.750,00		3.160.550,00	2 dokumen	106.064.300,00					BPKD	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 Dokume n	367.855.500,00	2 dokume n	164.127.750,00	1 dokume n	52.833.250,00		2.888.800,00	3 dokumen	129.389.950,00	6 dokumen	349.239.750,00					BPKD	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokume n	127.256.200,00				0,00	2 dokume n	-	2 dokumen	119.913.950,00	4 dokumen	119.913.950,00					BPKD	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	83,00%	27.498.000,00	25,00%	0,00	25,00%	5.000.000,00		0,00	50%	7.500.000,00	100,00%	12.500.000,00						
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokume n	27.498.000,00	1 dokume n		2 dokume n	5.000.000,00	2 dokume n	-	1 dokumen	7.500.000,00	6 dokumen	12.500.000,00					BPKD	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokume n					0,00		-			0,00%	0,00					BPKD	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	46.851.100,00	25,00%	4.634.700,00	25,00%	2.441.100,00	25%	7.976.400,00	25%	26.772.000,00	100,00%	41.824.200,00						
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	6.925.800,00	2 laporan	1.076.250,00	2 laporan	515.000,00	2 laporan	1.474.200,00	2 laporan	3.576.800,00	8 laporan	6.642.250,00					BPKD	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	30.705.600,00	7 laporan	3.558.450,00		1.088.200,00		-		22.632.400,00	7 laporan	27.279.050,00					BPKD	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	9.219.700,00	-		2 dokumen	837.900,00		6.502.200,00		562.800,00	2 dokumen	7.902.900,00					BPKD	
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	1.200.289.500,00	17,45%	209.500.000,00	25%	219.728.491,00	25%	144.500.000,00	33%	224.928.702,00	100,00%	798.657.193,00						
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.200.289.500,00		209.500.000,00	1 Laporan	219.728.491,00	1 Laporan	144.500.000,00	1 Laporan	224.928.702,00	1 Laporan	798.657.193,00					BPKD	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu -	159.645.000,00	25,00%	3.070.200,00	25,00%	0,00	25,00%	26.849.400,00	25,00%	82.903.700,00	100,00%	112.823.300,00						
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100,00%	159.645.000,00	25,00%	3.070.200,00	25,00%	0,00	25%	26.849.400,00	25%	82.903.700,00	100,00%	112.823.300,00						
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	11.946.900,00				0,00	1 dokumen	1.758.750,00	1 dokumen	4.833.100,00	2 dokumen	6.591.850,00					BPKD	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	15.194.000,00				0,00	2 Dokumen	5.755.050,00		2.997.500,00	2 Dokumen	8.752.550,00					BPKD	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	15.789.000,00	1 laporan	529.200,00		0,00	1 laporan	3.685.500,00		4.746.650,00	2 laporan	8.961.350,00					BPKD	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	94.508.000,00				0,00		13.348.500,00	1 Laporan	62.696.650,00	1 Laporan	76.045.150,00					BPKD	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	14.558.100,00	-	396.900,00		0,00	4 Dokumen	2.301.600,00		4.992.200,00	4 Dokumen	7.690.700,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	7.649.000,00	1	2.144.100,00	1	0,00		-		2.637.600,00	2 laporan	4.781.700,00					
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	2,00%	274.005.850,00	25,00%	48.109.050,00	25,00%	17.149.600,00	25,00%	32.143.350,00	25,00%	155.999.790,00	100,00%	253.401.790,00					
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Daerah dari Pajak Daerah	9,9 Milyar	274.005.850,00	25,00%	48.109.050,00	25,00%	17.149.600,00	25%	32.143.350,00	25%	155.999.790,00	100,00%	253.401.790,00					
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	100.528.700,00	2	1.611.150,00		6.912.550,00		10.842.850,00	7 Dokumen	69.062.000,00	9 dokumen	88.428.550,00				BPKD	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	35.433.000,00				0,00		-	2 Laporan	30.204.600,00	2 Laporan	30.204.600,00				BPKD	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	97.190.750,00	400	objek pajak		0,00		19.953.000,00		33.060.000,00	400 objek pajak	96.289.650,00				BPKD	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	40.853.400,00	18	3.221.250,00	18	10.237.050,00	18	1.347.500,00	18 dokumen	23.673.190,00	72 dokumen	38.478.990,00				BPKD	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			9.717.179.567,65	25,00%	1.620.843.107,00	24,31%	1.918.002.501,00	23,96%	2.480.266.495,00	18,75%	3.314.356.853,00	92,01%	9.333.468.956,00					
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
KEPEGAWAIAN		100,00%	8.475.958.367,65	25,00%	1.309.397.070,00	23,61%	1.865.073.323,00	22,92%	2.098.341.947,00	12,50%	2.928.095.580,00	84,03%	8.200.907.920,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	7.873.944.567,65	25,00%	1.296.757.415,00	22,22%	1.808.439.357,00	20,83%	1.845.398.975,00		2.682.836.861,00	68,06%	7.633.432.608,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	6.867.161.532,65	25,00%	1.121.082.452,00	25,00%	1.642.166.310,00	25%	1.587.604.187,00	25%	2.358.337.555,00	100,00%	6.709.190.504,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	6.867.161.532,65	144	1.121.082.452,00	144	1.642.166.310,00	144	1.587.604.187,00	144	2.358.337.555,00	576 Orang / bulan	6.709.190.504,00				BKPSDM	

Urusan/Program Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				I		II		III		IV										
				8		9		10		11		12		13		14=7+13			15=14/6 x 100%	
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	17.500.000,00	100,00%	17.500.000,00	0%	0,00		0,00	0%	0,00	100,00%	17.500.000,00							
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	17.500.000,00	40 paket	17.500.000,00	0%	0,00		-		-	40 paket	17.500.000,00							BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90,00%	338.155.200,00	25,00%	53.871.223,00	25,00%	93.812.601,00	25,00%	82.610.342,00	25%	76.913.669,00	100,00%	307.207.835,00							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.884.500,00	1 paket		1 paket	2.651.000,00	1 paket	350.800,00	1 paket	3.183.300,00	4 paket	6.185.100,00							BKPSDM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.049.800,00	1 paket		1 paket	12.570.500,00	1 paket	19.466.300,00	1 paket	26.244.700,00	4 paket	58.281.500,00							BKPSDM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.504.900,00	3 paket	601.250,00	3 paket	9.258.100,00	3 paket	3.075.000,00	3 paket	4.733.900,00	12 paket	17.668.250,00							BKPSDM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	234.716.000,00	6 paket	53.269.973,00	6 paket	69.333.001,00	6 paket	59.718.242,00	6 paket	42.751.769,00	24 paket	225.072.985,00							BKPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	169.087.700,00	0,00%	35.300.000,00	33,33%	5.200.000,00	25%	3.650.000,00	41,67%	118.890.000,00	100,00%	163.040.000,00							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	169.087.700,00		35.300.000,00	4 unit	5.200.000,00	1 unit	3.650.000,00	7 unit	118.890.000,00	12 unit	163.040.000,00							BKPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	239.570.135,00	25,00%	52.244.740,00	25,00%	51.095.946,00	25,00%	56.575.946,00	25,00%	65.906.082,00	100,00%	225.822.714,00							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.075.200,00	3 laporan	250.000,00	3 laporan	250.000,00	3 laporan	1.250.000,00	3 laporan	250.000,00	12 laporan	2.000.000,00							BKPSDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	89.998.935,00	6 laporan	21.452.328,00	6 laporan	21.452.328,00	6 laporan	21.452.328,00	6 laporan	21.452.328,00	24 laporan	85.809.312,00							BKPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	147.496.000,00	3 laporan	30.542.412,00	3 laporan	29.393.618,00	3 laporan	33.873.618,00	3 laporan	44.203.754,00	12 laporan	138.013.402,00							BKPSDM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	242.470.000,00	25,00%	16.759.000,00	25,00%	16.164.500,00	25,00%	114.958.500,00	25%	62.789.555,00	100,00%	210.671.555,00							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				I		II		III		IV									
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%	
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	111.270.000,00	17 unit	13.072.000,00	17 unit	10.398.500,00	17 unit	35.996.250,00	17 unit	30.178.100,00	17 unit	89.644.850,00						BKPSDM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	34.740.000,00	26 unit	3.687.000,00	26 unit	447.000,00	26 unit	16.961.250,00	26 unit	4.166.000,00	26 unit	25.261.250,00						BKPSDM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	96.460.000,00	1 unit		1 unit	5.319.000,00	1 unit	62.001.000,00	1 unit	28.445.455,00	1 unit	95.765.455,00						BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	330 Nilai	602.013.800,00	25,00%	12.639.655,00	25,00%	56.633.966,00	25,00%	252.942.972,00	25,00%	245.258.719,00	100,00%	567.475.312,00						
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 file	237.236.500,00	25,00%	10.056.430,00	25,00%	19.612.976,00	25,00%	61.064.972,00	25,00%	128.669.980,00	400 file	219.404.358,00						
	Jumlah usulan ASN Per tahun	200 orang		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		200 orang	0,00						
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	229.804.000,00	25,00%	9.470.080,00	25,00%	19.131.276,00	25,00%	58.879.022,00	25,00%	125.404.555,00	1 Dokumen	212.884.933,00						BKPSDM
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.432.500,00	25,00%	586.350,00	25,00%	481.700,00	25,00%	2.185.950,00	25,00%	3.265.425,00	1 Dokumen	6.519.425,00						BKPSDM
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100,00%	304.849.800,00	25,00%	1.678.950,00	25,00%	33.774.390,00	25,00%	187.005.050,00	25,00%	71.212.832,00	100,00%	293.671.222,00						
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	271.154.200,00	25,00%		25,00%	21.700.000,00	25,00%	183.833.000,00	25,00%	57.137.782,00	1 Dokumen	262.670.782,00						BKPSDM
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	33.695.600,00	25,00%	1.678.950,00	25,00%	12.074.390,00	25,00%	3.172.050,00	25,00%	14.075.050,00	1 Dokumen	31.000.440,00						BKPSDM
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	100,00%	59.927.500,00	25,00%	904.275,00	25,00%	3.246.600,00	25,00%	4.872.950,00	25%	45.375.907,00	100,00%	54.399.732,00						
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	7.140.000,00	25,00%		25,00%	2.312.100,00	25,00%	404.250,00	25%	3.698.100,00	100,00%	6.414.450,00						BKPSDM
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	12 Orang	52.787.500,00	4 Orang	904.275,00	2 orang	934.500,00	8 orang	4.468.700,00	1 orang	41.677.807,00	15 Orang	47.985.282,00						BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		7,60%	1.241.221.200,00	25,00%	311.446.037,00	25,00%	52.929.178,00	25,00%	381.924.548,00	25,00%	386.261.273,00	100,00%	1.132.561.036,00						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	7,60%	1.241.221.200,00	25,00%	311.446.037,00	25,00%	52.929.178,00	25,00%	381.924.548,00	25,00%	386.261.273,00	100,00%	1.132.561.036,00						
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	120 orang	579.725.200,00	1	15.221.083,00	1	28.219.678,00	53	81.189.028,00	110	385.606.273,00	165	510.236.062,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	579.725.200,00	1	15.221.083,00	1	28.219.678,00	53	81.189.028,00	65	385.606.273,00	120 orang	510.236.062,00					BKPSDM	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	20 orang	661.496.000,00	25,00%	296.224.954,00	25,00%	24.709.500,00	25,00%	300.735.520,00	25,00%	655.000,00	4 orang	622.324.974,00						
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan	1 Laporan	661.496.000,00	25,00%	296.224.954,00	25,00%	24.709.500,00	25,00%	300.735.520,00	25,00%	655.000,00	100,00%	622.324.974,00					BKPSDM	
SEKRETARIAT DAERAH			41.021.330.490,00	17,51%	9.392.661.254,00	23,94%	9.173.424.001,00	24,07%	8.055.559.021,00	33,77%	12.793.271.681,00	99,28%	39.414.915.957,00						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
SEKRETARIAT DAERAH		86,67%	41.021.330.490,00	17,51%	9.392.661.254,00	23,94%	9.173.424.001,00	24,07%	8.055.559.021,00	33,77%	12.793.271.681,00	99,28%	39.414.915.957,00						
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	28.093.102.840,00	20,38%	6.243.347.439,00	22,22%	7.076.473.417,00	22,22%	5.919.813.867,00	33,33%	7.954.812.225,00	98,15%	27.194.446.948,00						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90%	15.756.001.650,00	25,00%	4.289.792.345,00	25%	4.442.243.989,00	25%	3.232.909.266,00	25%	3.772.869.455,00	100,00%	15.737.815.055,00						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 orang/bulan	15.756.001.650,00	110 orang	4.289.792.345,00	102 orang	4.442.243.989,00	102 orang	3.232.909.266,00	101 orang	3.772.869.455,00	101 orang	15.737.815.055,00					Sekretariat Daerah	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	90%	55.000.000,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	100%	51.000.000,00	100,00%	51.000.000,00						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	107 Paket	55.000.000,00		0,00		0,00		0,00	107 Paket	51.000.000,00	107 Paket	51.000.000,00					Sekretariat Daerah	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90%	4.287.783.000,00	25,00%	716.202.862,00	25%	934.068.678,00	25%	958.870.209,00	25%	1.572.388.446,00	100,00%	4.181.530.195,00						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00		0,00		12.764.250,00	1 Paket	3.015.000,00	1 Paket	34.182.500,00	1 Paket	49.961.750,00					Sekretariat Daerah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13	K	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	17.500.000,00	3 Paket	1.800.000,00	3 Paket	160.000,00	3 Paket	5.821.700,00	3 Paket	9.714.700,00	3 Paket	17.496.400,00					Sekretariat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.372.400,00	1 Paket	17.063.900,00	1 Paket	25.664.640,00	1 Paket	32.879.420,00	1 Paket	78.576.601,00	1 Paket	154.184.561,00					Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.150.800,00	1 Paket	2.363.000,00	1 Paket	3.522.300,00	1 Paket	2.157.800,00	1 Paket	11.953.550,00	1 Paket	19.996.650,00					Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	806.900.000,00	100 Laporan	109.473.650,00	150 Laporan	200.270.675,00	150 Laporan	176.508.450,00	100 Laporan	315.400.940,00	500 Laporan	801.653.715,00					Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.184.859.800,00	1 Laporan	585.502.312,00	1 Laporan	691.686.813,00	1 Laporan	738.487.839,00	poran	1.122.560.155,00	1 Laporan	3.138.237.119,00					Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	1.912.466.980,00	25,00%	301.278.525,35	25%	393.589.680,77	25%	369.484.580,26	25%	609.464.527,68	100,00%	1.673.817.314,06					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	2.522.000,00	1 Laporan	1.500.000,00	1 Laporan	1.250.000,00	1 Laporan	3.250.000,00	1 Laporan	8.522.000,00					Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	271.250.000,00	1 Laporan	71.417.236,00	1 Laporan	63.743.701,00	1 Laporan	59.845.187,00	1 Laporan	65.375.145,00	1 Laporan	260.381.269,00					Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	694.232.980,00	1 Laporan	51.656.154,19	1 Laporan	140.016.278,02	1 Laporan	106.599.691,83	1 Laporan	272.533.115,49	1 Laporan	570.805.239,53					Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	936.984.000,00	1 Laporan	175.683.135,16	1 Laporan	188.329.701,75	1 Laporan	201.789.701,43	1 Laporan	268.306.267,19	1 Laporan	834.108.805,53					Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80,00%	2.283.865.000,00	25,00%	306.224.803,07	25%	426.497.277,86	25%	600.625.821,37	25%	716.568.485,16	100,00%	2.049.916.387,46					
Penyediaan Jasa Kendaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	1.843.537.000,00	82 Unit	299.285.903,07	82 Unit	376.916.377,86	82 Unit	415.089.571,37	82 Unit	559.633.485,16	82 Unit	1.650.925.337,46					Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	98.360.000,00	9 unit	3.598.000,00	9 unit	9.696.000,00	9 unit	34.571.450,00	9 unit	12.270.000,00	9 unit	60.135.450,00					Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	341.968.000,00	4 Unit	3.340.900,00	4 Unit	39.884.900,00	4 Unit	150.964.800,00	4 Unit	144.665.000,00	4 Unit	338.855.600,00					Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	28 Orang/Bulan	673.889.680,00	25,00%	132.575.986,00	25%	146.637.389,00	25%	119.522.859,00	25%	198.770.656,00	100,00%	597.506.890,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	12.433.346.700,00	18,10%	3.078.517.765,00	25,00%	2.027.039.530,00	25,00%	2.080.493.279,00	31,89%	4.583.382.491,00	100,00%	11.769.433.065,00						
Administrasi Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Pemerintahan	100,00%	756.504.750,00	16,11%	121.845.650,00	25%	160.875.550,00	25%	137.424.675,00	34%	314.882.281,00	100,00%	735.028.156,00						
Penataan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	112.830.600,00		0,00		245.700,00		25.680.600,00	2 Dokumen	86.770.750,00	2 Dokumen	112.697.050,00					Sekretariat Daerah	
Pengelolaan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	22.711.000,00		3.365.250,00		0,00		4.048.250,00	3 Dokumen	15.036.800,00	3 Dokumen	22.450.300,00					Sekretariat Daerah	
Fasilitasi Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	620.963.150,00		118.480.400,00		160.629.850,00		107.695.825,00	6 Dokumen	213.074.731,00	6 Dokumen	599.880.806,00					Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	11.376.902.150,00	25,66%	2.919.035.865,00	25%	1.812.840.122,00	25%	1.916.967.319,00	24%	4.129.136.830,00	100,00%	10.777.980.136,00						
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	2.446.064.500,00		686.127.710,00		374.573.476,00		339.468.089,00	7 Dokumen	872.901.293,00	7 Dokumen	2.273.070.568,00					Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1.757.484.650,00		698.827.134,00		155.577.136,00		198.956.951,00	5 Dokumen	439.539.261,00	5 Dokumen	1.492.900.482,00					Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	7.173.353.000,00		1.534.081.021,00		1.282.689.510,00		1.378.542.279,00	2 Dokumen	2.816.696.276,00	2 Dokumen	7.012.009.086,00					Sekretariat Daerah	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana	100,00%	299.939.800,00	12,55%	37.636.250,00	25%	53.323.858,00	25%	26.101.285,00	37%	139.363.380,00	100,00%	256.424.773,00						
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	54.901.150,00	5 dokume n	9.201.000,00	10 Dokumen	5.302.680,00	10 Dokumen	12.427.450,00	25 Dokumen	15.917.350,00	50 Dokumen	42.848.480,00					Sekretariat Daerah	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	216.996.550,00		27.852.500,00		46.789.178,00		9.414.535,00	3 Kasus	105.816.830,00	3 Kasus	189.873.043,00					Sekretariat Daerah	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	28.042.100,00		582.750,00		1.232.000,00		4.259.300,00	2 Dokumen	17.629.200,00	2 Dokumen	23.703.250,00					Sekretariat Daerah	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	60%	494.880.950,00	14,04%	70.796.050,00	24,58%	69.911.054,00	25,00%	55.251.875,00	36,08%	255.076.965,00	99,70%	451.035.944,00						
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian	90,00%	120.456.600,00	20,41%	24.582.250,00	25%	11.738.500,00	25%	17.206.675,00	30%	48.793.129,00	100,00%	102.320.554,00						
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	18.728.000,00		6.748.500,00		0,00		0,00	1 Dokumen	5.769.500,00	1 Dokumen	12.518.000,00					Sekretariat Daerah	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	101.728.600,00		17.833.750,00		11.738.500,00		17.206.675,00	1 Laporan	43.023.629,00	1 Laporan	89.802.554,00					Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan	95,00%	119.513.100,00	17,36%	20.743.500,00	33,33%	19.075.695,00	25%	12.902.150,00	25%	65.379.028,00	100,69%	118.100.373,00						
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	119.513.100,00		20.743.500,00	4 Laporan	19.075.695,00	4 Laporan	12.902.150,00	4 Laporan	65.379.028,00	12 Laporan	118.100.373,00					Sekretariat Daerah	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	90,00%	220.383.250,00	10,29%	22.667.800,00	25%	34.886.409,00	25%	20.541.000,00	40%	127.283.433,00	100,00%	205.378.642,00						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	9.079.300,00		824.000,00	50 Dokumen	0,00	100 Dokumen	790.000,00	100 Dokumen	5.975.750,00	250 Dokumen	7.589.750,00					Sekretariat Daerah	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	100.310.000,00		1.470.000,00	30 Dokumen	21.899.911,00	30 Dokumen	2.401.000,00	30 Dokumen	70.831.146,00	90 Dokumen	96.602.057,00					Sekretariat Daerah	

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 Orang	110.993.950,00		20.373.800,00		12.986.498,00		17.350.000,00	220 Orang	50.476.537,00	220 Orang	101.186.835,00					Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan	90,00%	34.528.000,00	8,12%	2.802.500,00	15%	4.210.450,00	25%	4.602.050,00	50%	13.621.375,00	98,12%	25.236.375,00					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	34.528.000,00		2.802.500,00		4.210.450,00		4.602.050,00	1 Dokumen	13.621.375,00	1 Dokumen	25.236.375,00					Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			42.658.218.994,00	19,98%	9.507.550.920,00	21,25%	9.098.013.763,00	23,61%	10.090.606.815,00	30,69%	10.498.624.279,00	95,52%	39.194.795.777,00					
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
SEKRETARIAT DPRD		87,50%	42.658.218.994,00	19,98%	9.507.550.920,00	21,25%	9.098.013.763,00	23,61%	10.090.606.815,00	30,69%	10.498.624.279,00	95,52%	39.194.795.777,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/ Kota	Persentase kualitas tata kelola sekretarait DPRD	100,00%	21.048.195.494,00	21,01%	3.451.243.732,00	16,67%	3.845.616.504,00	22,22%	6.284.333.475,00	39,37%	5.908.378.029,00	99,27%	19.489.571.740,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	3.417.558.094,00	25,00%	804.764.140,00	25,00%	1.072.209.784,00	25,00%	711.748.030,00	25,00%	824.256.853,00	100,00%	3.412.978.807,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	3.417.558.094,00	75 Orang/bulan	804.764.140,00	125 Orang/bulan	1.072.209.784,00	75 Orang/bulan	711.748.030,00	75 Orang/bulan	824.256.853,00	350 Orang / bulan	3.412.978.807,00					Sekretariat DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi	100,00%	12.500.000,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	100%	12.500.000,00	100,00%	12.500.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket	12.500.000,00		0,00		0,00		-	25 Paket	12.500.000,00	25 Paket	12.500.000,00					Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100,00%	787.956.550,00	31,00%	83.697.476,00	25,00%	142.857.445,00	25,00%	98.468.027,00	19,00%	259.816.510,00	100,00%	584.839.458,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.403.500,00	1 Paket	770.000,00	1 Paket	5.131.000,00	1 Paket	2.989.000,00	1 Paket	8.759.000,00	4 Paket	17.649.000,00					Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	170.700.000,00	1 Paket	17.204.600,00	1 Paket	25.680.400,00	1 Paket	30.879.600,00	1 Paket	64.850.100,00	4 Paket	138.614.700,00					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	81.114.050,00	1 Paket	7.369.800,00	1 Paket	13.043.400,00	1 Paket	4.707.900,00	1 Paket	50.414.000,00	4 Paket	75.535.100,00					Sekretariat DPRD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	146.000.000,00	23 Laporan	22.109.730,00	27 Laporan	29.376.795,00	32 Laporan	17.520.677,00	30 Laporan	40.626.810,00	112 Laporan	109.634.012,00					Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13	Rp.	14=7+13	15=14/6 x 100%	
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	361.739.000,00	6 Laporan	36.243.346,00	5 Laporan	69.625.850,00	6 Laporan	42.370.850,00	6 Laporan	95.166.600,00	24 Laporan	243.406.646,00					Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	2.652.368.200,00	22,67%	0,00		0,00	50%	1.716.700.000,00	27%	876.940.004,00	100,00%	2.593.640.004,00					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.525.490.000,00		0,00		0,00	3 Unit	1.716.700.000,00	1 Unit	753.540.000,00	4 Unit	2.470.240.000,00					Sekretariat DPRD
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.540.400,00		0,00		0,00	-	4 Unit	49.700.000,00	4 Unit	49.700.000,00						Sekretariat DPRD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	76.337.800,00		0,00		0,00	-	8 Unit	73.700.004,00	8 Unit	73.700.004,00						Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi	100,00%	1.941.859.000,00	25,00%	360.212.735,00	25,00%	386.034.708,00	25,00%	441.369.500,00	25,00%	569.946.126,00	100,00%	1.757.563.069,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.507.200,00	3 Laporan	7.750.000,00	3 Laporan	5.000.000,00	3 Laporan	5.250.000,00	3 Laporan	250.000,00	12 Laporan	18.250.000,00					Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	129.007.000,00	9 Laporan	27.222.735,00	9 Laporan	25.034.708,00	9 Laporan	31.184.567,00	9 Laporan	25.928.080,00	36 Laporan	109.370.090,00					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.794.344.800,00	3 Laporan	325.240.000,00	3 Laporan	356.000.000,00	3 Laporan	404.934.933,00	3 Laporan	543.768.046,00	12 Laporan	1.629.942.979,00					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100,00%	1.063.915.500,00	41,75%	97.615.750,00	25,00%	97.245.217,00	25,00%	220.051.265,00	8%	394.567.660,00	99,75%	809.479.892,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	401.375.000,00	4 Unit	70.432.100,00	4 Unit	59.678.322,00	4 Unit	73.872.665,00	4 Unit	87.785.950,00	4 Unit	291.769.037,00					Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	215.800.000,00	2 unit	14.678.650,00	29 unit	35.931.895,00	29 unit	15.107.600,00	29 unit	40.309.750,00	29 unit	106.027.895,00					
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 unit	59.402.500,00	15 unit	8.245.000,00	38 unit	1.635.000,00	58 unit	5.729.000,00	81 unit	11.532.500,00	239 unit	27.141.500,00					Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.338.000,00	1 Unit	4.260.000,00		0,00	1 Unit	125.342.000,00	1 Unit	254.939.460,00	1 Unit	384.541.460,00					Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00%	702.087.200,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	100%	583.234.750,00	100,00%	583.234.750,00					
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	702.087.200,00		0,00		0,00		-	1 Laporan	583.234.750,00	1 Laporan	583.234.750,00					Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100,00%	8.844.278.050,00	25,00%	1.956.434.679,00	25,00%	1.911.223.133,00	25,00%	2.567.425.198,00	25,00%	1.931.891.008,00	100,00%	8.366.974.018,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV									
			8		9		10		11		12				13			14=7+13
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 Orang/Bulan	8.225.418.050,00	80 Orang / Bulan	1.956.434.679,00	80 Orang/Bulan	1.911.223.133,00	60 Orang/Bulan	1.984.935.198,00	60 Orang/Bulan	1.923.755.008,00	280 Orang / Bulan	7.776.348.018,00					Sekretariat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	120 Paket	606.360.000,00		0,00		0,00	120 Paket	582.490.000,00	120 Paket	4.860.000,00	120 Paket	587.350.000,00					Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	12.500.000,00		0,00		0,00		-	3 Orang	3.276.000,00	3 Orang	3.276.000,00					Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100,00%	1.625.672.900,00	18,67%	148.518.952,00	25%	236.046.217,00	25%	528.571.455,00	25%	455.225.118,00	93,67%	1.368.361.742,00					
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	3 Dokumen	569.912.000,00		0,00		0,00	1 Dokumen	326.100.100,00	1 Dokumen	88.676.250,00	1 Dokumen	414.776.350,00					Sekretariat DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	218.097.600,00	3 Laporan	14.537.250,00	3 Laporan	21.136.500,00	3 Laporan	54.253.500,00	3 Laporan	84.101.250,00	12 Laporan	174.028.500,00					Sekretariat DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	837.663.300,00	3 Paket	133.981.702,00	3 Paket	214.909.717,00	3 Paket	148.217.855,00	3 Paket	282.447.618,00	12 Paket	779.556.892,00					Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legisiasi	75,00%	21.610.023.500,00	18,94%	6.056.307.188,00	25,83%	5.252.397.259,00	25,00%	3.806.273.340,00	22,00%	4.590.246.250,00	91,77%	19.705.224.037,00					
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	90,00%	86.890.400,00	0,00%	0,00		0,00	25%	5.775.000,00	50%	2.803.500,00	75,00%	8.578.500,00					
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	7.078.000,00		0,00		0,00		-	1 Dokumen	1.575.000,00	1 Dokumen	1.575.000,00					Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	8.749.900,00		0,00		0,00	1 Dokumen	5.775.000,00	1 Dokumen	1.228.500,00	1 Dokumen	7.003.500,00					Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	59.964.000,00		0,00		0,00%		-		-	0,00%	0,00					Sekretariat DPRD
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	11.098.500,00		0,00		0,00		-		-	0,00%	0,00					Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran	90,00%	185.937.050,00	0,00%	0,00	25%	2.149.000,00	25%	35.626.500,00	40%	110.186.250,00	90,00%	147.961.750,00					
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	61.864.900,00		0,00		0,00	2 Dokumen	28.869.750,00	2 Dokumen	32.234.500,00	2 Dokumen	61.104.250,00					Sekretariat DPRD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	21.000.200,00		0,00		0,00		-	2 Dokumen	14.579.250,00	2 Dokumen	14.579.250,00					Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	54.583.600,00		0,00		0,00		-	2	36.906.250,00	2	36.906.250,00					Sekretariat DPRD
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1	38.635.150,00		0,00		0,00		-	2	26.466.250,00	2	26.466.250,00					Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	9.853.200,00		0,00	1	2.149.000,00	1	6.756.750,00		-	2	8.905.750,00					Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	90,00%	21.728.300,00	10,00%	0,00	55%	20.854.750,00	25%	0,00		0,00	90,00%	20.854.750,00					
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	21.728.300,00	1	0,00	1	20.854.750,00		-		-	2	20.854.750,00					
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	90,00%	4.723.529.950,00	24,00%	1.026.285.600,00	25%	1.232.081.300,00	25%	1.095.014.200,00	25%	907.653.549,00	99,00%	4.261.034.649,00					
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	279.707.950,00		0,00		0,00	1	215.825.800,00	1	22.649.400,00	1	238.475.200,00					Sekretariat DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	3.450.137.000,00	2	939.400.600,00	3	1.003.966.300,00	2	674.509.200,00	1	527.280.049,00	8	3.145.156.149,00					
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6	180.000.000,00	5	27.000.000,00	5	45.000.000,00	5	30.000.000,00	5	60.000.000,00	5	162.000.000,00					Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1	348.761.500,00	1	44.555.000,00	1	71.195.000,00	1	70.632.200,00	1	131.057.000,00	1	317.439.200,00					Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	464.923.500,00	1	15.330.000,00	1	111.920.000,00	1	104.047.000,00	1	166.667.100,00	1	397.964.100,00					Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	90,00%	1.792.031.800,00	37,17%	506.142.000,00	25,00%	418.766.900,00	25,00%	167.352.700,00	10%	303.239.100,00	97,17%	1.395.500.700,00					
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6	1.057.652.000,00	2	321.046.400,00	2	418.766.900,00	2	167.352.700,00	1	123.536.900,00	7	1.030.702.900,00					Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60	734.379.800,00	16	185.095.600,00		0,00		-	20	179.702.200,00	36	364.797.800,00					
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggora DPRD	90	14.799.906.000,00	42,50%	4.523.879.588,00	25%	3.578.545.309,00	25%	2.502.504.940,00	7%	3.266.363.851,00	99,50%	13.871.293.688,00					
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	23	11.345.152.000,00	8	3.667.635.988,00	7	2.604.323.766,00	4	2.237.008.130,00	11	2.219.649.273,00	30	10.728.617.157,00					Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	15	3.454.754.000,00	7	856.243.600,00	7	974.221.543,00	3	265.496.810,00	8	1.046.714.578,00	25	3.142.676.531,00					Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR			18.749.535.312,00	20,20%	4.259.155.450,00	23,33%	4.752.613.407,00	23,67%	4.216.547.078,00	31,80%	5.288.028.439,00	99,00%	18.516.344.374,00					
UNSUR KEWILAYAHAN																		
KECAMATAN		87,00%	18.749.535.312,00	20,20%	4.259.155.450,00	23,33%	4.752.613.407,00	23,67%	4.216.547.078,00	31,80%	5.288.028.439,00	99,00%	18.516.344.374,00					
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	95,00%	11.725.994.112,00	25,00%	3.176.067.396,00	16,67%	3.100.587.608,00	18,33%	2.458.263.328,00	35%	2.908.435.214,00	95,00%	11.643.353.546,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,00%	9.609.222.161,00	29,00%	2.672.856.117,00	25%	2.678.186.765,00	25%	1.993.669.537,00	21%	2.252.812.903,00	100,00%	9.597.525.322,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 orang	9.609.222.161,00	215 orang	2.672.856.117,00	555 orang	2.678.186.765,00	759 orang	1.993.669.537,00	994 orang	2.252.812.903,00	994 orang	9.597.525.322,00				Kecamatan PPT	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	35.500.000,00	92,21%	35.500.000,00		0,00		0,00		0,00	92,21%	35.500.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	77 paket	35.500.000,00	71 paket	35.500.000,00		0,00		-		-	71 paket	35.500.000,00				Kecamatan PPT	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90,00%	373.728.678,00	25,00%	64.124.640,00	25,00%	63.281.821,00	25%	132.440.511,00	25%	95.848.578,00	100,00%	355.695.550,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	14.191.000,00	9 Paket	3.104.800,00	18 paket	2.460.200,00	27 paket	2.568.000,00	36 Paket	5.269.200,00	36 Paket	13.402.200,00				Kecamatan PPT	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	97.932.228,00	9 Paket	11.698.390,00	18 paket	30.024.500,00	27 paket	23.573.100,00	36 Paket	29.484.075,00	36 Paket	94.780.065,00				Kecamatan PPT	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	108 paket	27.738.450,00	27 paket	4.057.600,00	54 paket	3.880.150,00	81 paket	4.841.700,00	108 paket	10.914.100,00	108 paket	23.693.550,00				Kecamatan PPT	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	233.867.000,00	30 laporan	45.263.850,00	60 lap	26.916.971,00	90 lap	101.457.711,00	120 laporan	50.181.203,00	120 laporan	223.819.735,00				Kecamatan PPT	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	187.628.450,00	90,00%	89.700.000,00		0,00	10%	5.700.000,00		86.425.000,00	100,00%	181.825.000,00					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit (komputer pc 8, printer 8)	187.628.450,00	15 unit	89.700.000,00	12 unit	0,00	2 unit	5.700.000,00		86.425.000,00	17 unit	181.825.000,00				Kecamatan PPT	

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			I		II		III		IV								
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	1.036.561.823,00	25,00%	163.701.819,00	25%	275.751.022,00	25%	248.171.030,00	25%	326.406.133,00	100,00%	1.014.030.004,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.766.400,00	3 laporan	250.000,00	1 laporan	0,00	9 lap	510.000,00	12 laporan	2.000.000,00	12 laporan	2.760.000,00				Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	276 laporan	57.861.023,00	27 laporan	13.277.546,00	162 laporan	11.657.120,00	243 lap	12.606.950,00	276 laporan	13.692.053,00	276 laporan	51.233.669,00				Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 laporan	975.934.400,00	27 laporan	150.174.273,00	54 laporan	264.093.902,00		235.054.080,00	108 laporan	310.714.080,00	108 laporan	960.036.335,00				Kecamatan PPT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80,00%	483.353.000,00	25,00%	150.184.820,00	25,00%	83.368.000,00	25%	78.282.250,00	25%	146.942.600,00	100,00%	458.777.670,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	152.001.000,00	20 unit	29.381.000,00	30 unit	33.021.400,00	46 unit	31.999.600,00	46 unit	38.222.300,00	46 unit	132.624.300,00				Kecamatan PPT
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	27.170.000,00	4 unit	1.230.000,00	30 unit	2.530.000,00	75 unit	4.910.000,00	100 unit	15.530.000,00	100 unit	24.200.000,00				Kecamatan PPT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	304.182.000,00	3 unit	119.573.820,00	5 unit	47.816.600,00	7 unit	41.372.650,00	9 unit	93.190.300,00	9 unit	301.953.370,00				Kecamatan PPT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100,00%	3.573.679.600,00	32,50%	498.108.479,00	25,00%	953.730.324,00	25,00%	857.870.650,00	17,50%	1.220.930.200,00	100,00%	3.530.639.653,00				
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	1.687.579.000,00	25,00%	268.813.454,00	25,00%	470.916.904,00	25%	395.540.425,00	25%	535.914.125,00	100,00%	1.671.184.908,00				
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	576 dokume n	1.687.579.000,00	144 dokume n	268.813.454,00	288 dokume n	470.916.904,00	432 dok	395.540.425,00	576 dokumen	535.914.125,00	576 dokumen	1.671.184.908,00				Kecamatan PPT
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan	10 urusan	1.886.100.600,00	40,00%	229.295.025,00	25%	482.813.420,00	25%	462.330.225,00	10%	685.016.075,00	100,00%	1.859.454.745,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 laporan	1.886.100.600,00	4 laporan (pkk,karang taruna,po syandu, dasawisma)	229.295.025,00	6 urusan (pkk,karang taruna,po syandu, dasawisma,PMT, Himpaudi)	482.813.420,00	8 lap (FKKS, pokja kel.sehat , PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaudi)	462.330.225,00	8 lap (FKKS, pokja kel.sehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaudi)	685.016.075,00	8 lap (FKKS, pokja kel.sehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaudi)	1.859.454.745,00					Kecamatan PPT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	39,98%	3.174.936.900,00	25,00%	583.979.575,00	25,00%	677.783.975,00	25,00%	877.147.325,00	25,00%	951.131.675,00	100,00%	3.090.042.550,00					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	858.689.900,00	25,00%	125.623.825,00	25,00%	120.739.500,00	25%	317.044.025,00	25%	211.784.875,00	100,00%	775.192.225,00					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 lembaga	106.175.300,00	9 lembaga	103.164.825,00	9 lembaga	0,00	9 lembaga	-	9 lembaga	-	9 lembaga	103.164.825,00					Kecamatan PPT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	95.015.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	3 paket baju adat (minang, jawa, batak)	30.015.000,00	10 paket baju adat (minang, jawa, batak)	63.121.000,00	3 paket baju adat (minang, jawa, batak)	93.136.000,00					Kecamatan PPT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 pokmas/ormas	657.499.600,00	6 pokmas/ormas	22.459.000,00	6 pokmas/ormas	120.739.500,00	6 pokmas/ormas	287.029.025,00	6 pokmas/ormas	148.663.875,00	6 pokmas/ormas	578.891.400,00					Kecamatan PPT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	107 RT	2.316.247.000,00	25,00%	458.355.750,00	25,00%	557.044.475,00	25%	560.103.300,00	25%	739.346.800,00	107 RT	2.314.850.325,00					
Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga (RT)	2.316.247.000,00	1 lembaga (RT)	458.355.750,00	1 lembaga (RT)	557.044.475,00	1 lembaga (RT)	560.103.300,00	1 lembaga (RT)	739.346.800,00	1 lembaga (RT)	2.314.850.325,00					Kecamatan PPT
KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kasus pelanggaran trantibum	10 Laporan	7.750.000,00	18,52%	1.000.000,00	25,00%	1.000.000,00	25,00%	550.000,00	31%	5.200.000,00	100,00%	7.750.000,00					
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 Jenis	7.750.000,00	18,52%	1.000.000,00	25%	1.000.000,00	25%	550.000,00	31%	5.200.000,00	2 Jenis	7.750.000,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan		7.750.000,00	20 laporan	1.000.000,00	54 laporan	1.000.000,00	75 laporan	550.000,00	108 Laporan	5.200.000,00	108 Laporan	7.750.000,00					Kecamatan PPT
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100,00%		267.174.700,00	0,00%	0,00	25%	19.511.500,00	25%	22.715.775,00	50%	202.331.350,00	100,00%	244.558.625,00					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 kegiatan		267.174.700,00	0,00%	0,00	25%	19.511.500,00	25%	22.715.775,00	50%	202.331.350,00	100,00%	244.558.625,00					
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	340 orang (Tim Ramadana Kecamatan)		238.375.000,00	0,00	100 orang	17.850.000,00		-	240 orang	201.150.100,00	340 orang	219.000.100,00					Kecamatan PPT	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 dokumen		28.799.700,00	0,00	2 dokumen	1.661.500,00	4 dokumen	22.715.775,00	2 dokumen	1.181.250,00	2 dokumen	25.558.525,00					Kecamatan PPT	
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT				19.381.125.944,00	25,20%	4.400.041.268,00	25,20%	4.724.892.186,00	25,00%	4.635.459.615,00	24,60%	4.959.321.458,00	100,00%	18.719.714.527,00					
UNSUR KEWILAYAHAN																			
KECAMATAN			85,20%	19.381.125.944,00	25,20%	4.400.041.268,00	25,20%	4.724.892.186,00	25,00%	4.635.459.615,00	24,60%	4.959.321.458,00	100,00%	18.719.714.527,00					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%		11.110.850.194,00	25,00%	2.580.675.923,00	25,00%	3.336.555.906,00	25%	2.294.620.156,00	25%	2.679.478.245,00	100,00%	10.891.330.230,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	90,00%		8.875.892.682,00	25,00%	2.131.698.178,00	25%	2.815.854.885,00	25%	1.826.888.200,00	25%	2.093.488.469,00	100,00%	8.867.929.732,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1125 Orang/bulan		8.875.892.682,00	1125 Orang / bulan	2.131.698.178,00	1125 Orang/ bulan	2.815.854.885,00	1125 Orang/ bulan	1.826.888.200,00	2.093.488.469,00	1125 Orang / bulan	8.867.929.732,00					Kecamatan PPB	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	90,00%		33.180.000,00	82,67%	0,00	17%	33.180.000,00		0,00		0,00	99,67%	33.180.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket		33.180.000,00	62 Paket	0,00	62 Paket	33.180.000,00	62 Paket	-		-	62 Paket	33.180.000,00					Kecamatan PPB
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90,00%		485.762.772,00	25,00%	105.577.025,00	25%	65.796.660,00	25%	158.245.515,00	25%	84.098.330,00	100,00%	413.717.530,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket		27.798.600,00	36 Paket	7.184.700,00	36 Paket	4.562.400,00	36 Paket	3.875.300,00	36 Paket	6.331.500,00	36 Paket	21.953.900,00					Kecamatan PPB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16									
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	112.818.700,00	36 Paket	38.847.905,00	36 Paket	19.067.975,00	36 Paket	21.992.320,00	36 Paket	26.325.700,00	36 Paket	106.233.900,00					Kecamatan PPB	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	19.448.450,00	36 Paket	3.492.700,00	36 Paket	3.634.000,00	36 Paket	3.412.600,00	36 Paket	6.787.450,00	36 Paket	17.326.750,00					Kecamatan PPB	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	325.697.022,00	30 Laporan	56.051.720,00	30 Laporan	38.532.285,00	30 Laporan	128.965.295,00	30 Laporan	44.653.680,00	120 Laporan	268.202.980,00					Kecamatan PPB	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	145.558.000,00	25,00%	23.800.000,00	25%	119.180.000,00	25%	0,00	25%	0,00	100,00%	142.980.000,00						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	145.558.000,00	12 Unit	23.800.000,00	12 Unit	119.180.000,00	12 Unit	-		-	24 Unit	142.980.000,00					Kecamatan PPB	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	1.094.153.740,00	25,00%	223.412.032,00	25%	250.262.861,00	25%	239.518.924,00	25%	309.120.746,00	100,00%	1.022.314.563,00						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	1.258.400,00	50 Laporan	500.000,00	50 Laporan	500.000,00	25 Laporan	250.000,00	25 Laporan	-	150 Laporan	1.250.000,00					Kecamatan PPB	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217 Laporan	95.484.940,00	6 Laporan	26.873.374,00	12 Laporan	34.935.208,00	16 Laporan	13.650.181,00	24 Laporan	18.102.000,00	24 Laporan	93.560.763,00					Kecamatan PPB	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	997.410.400,00	3 laporan	196.038.658,00	6 laporan	214.827.653,00	9 laporan	225.618.743,00	12 laporan	291.018.746,00	12 laporan	927.503.800,00					Kecamatan PPB	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	476.303.000,00	25,00%	96.188.688,00	25%	52.281.500,00	25%	69.967.517,00	25%	192.770.700,00	100,00%	411.208.405,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	47 Unit	185.673.000,00	47 Unit	39.230.900,00	47 Unit	43.326.500,00	47 Unit	28.628.950,00	47 Unit	45.115.750,00	47 Unit	156.302.100,00					Kecamatan PPB	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	50.900.000,00	21 unit	7.395.000,00	21 unit	8.955.000,00	21 unit	6.015.000,00	21 unit	23.655.000,00	21 unit	46.020.000,00					Kecamatan PPB	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	0,00					Kecamatan PPB	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	209.730.000,00	13 Unit	49.562.788,00	13 Unit	0,00	13 Unit	35.323.567,00	13 Unit	123.999.950,00	13 Unit	208.886.305,00						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan	100,00%	4.224.074.700,00	25,00%	901.006.595,00	25,00%	805.614.480,00	25%	1.236.149.899,00	25%	1.165.026.328,00	100,00%	4.107.797.302,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV											
			8		9		10		11		12									
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	1.661.592.300,00	23,82%	328.783.970,00	12 kali	390.766.137,00	12 kali	383.728.279,00	12 kali	520.436.808,00	12 kali	1.623.715.194,00							
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 Dokumen	1.661.592.300,00	162 Dokumen	328.783.970,00	324 Dokumen	390.766.137,00	510 Dokumen	383.728.279,00	680 Dokumen	520.436.808,00	680 Dokumen	1.623.715.194,00							Kecamatan PPB
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	8 Urusan	2.562.482.400,00	25,00%	572.222.625,00	8 Urusan	414.848.343,00	8 Urusan	852.421.620,00	8 Urusan	644.589.520,00	8 Urusan	2.484.082.108,00							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	2.562.482.400,00	8 Laporan	572.222.625,00	8 Laporan	414.848.343,00	8 Laporan	852.421.620,00	8 Laporan	644.589.520,00	8 Laporan	2.484.082.108,00							Kecamatan PPB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	26,00%	3.782.219.650,00	26,00%	917.039.750,00	26,00%	576.571.250,00	25%	1.093.867.510,00	23%	894.549.460,00	100,00%	3.482.027.970,00							
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis	917.167.800,00	25,00%	221.402.750,00	3 jenis	49.411.250,00	3 jenis	153.727.510,00	3 jenis	192.656.660,00	3 jenis	617.198.170,00							
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasya rakatan	179.812.650,00	9 Lembaga Kemasya rakatan	173.938.750,00	9 Lembaga Kemasya rakatan	0,00	9 Lembaga Kemasya rakatan	-	9 Lembaga Kemasyar akatan	-	173.938.750,00								Kecamatan PPB
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	201.960.000,00	8 Unit	0,00	8 Unit	0,00	8 Unit	-	8 Unit	45.000.000,00	8 Unit	45.000.000,00							Kecamatan PPB
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	535.395.150,00	8 Pokmas / Ormas	47.464.000,00	8 Pokmas / Ormas	49.411.250,00	8 Pokmas / Ormas	153.727.510,00	8 Pokmas / Ormas	147.656.660,00	8 Pokmas / Ormas	398.259.420,00							Kecamatan PPB
Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	133 RT	2.865.051.850,00	25,00%	695.637.000,00	133 RT	527.160.000,00	133 RT	940.140.000,00	133 RT	701.892.800,00	133 RT	2.864.829.800,00							
Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasya rakatan	2.865.051.850,00	1 Lembaga Kemasya rakatan	695.637.000,00	1 Lembaga Kemasya rakatan	527.160.000,00	1 Lembaga Kemasya rakatan	940.140.000,00	1 Lembaga Kemasyar akatan	701.892.800,00	1 Lembaga Kemasyarak atan	2.864.829.800,00							Kecamatan PPB
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan tingkat pelanggaran ketertiban umum	10 laporan	22.780.800,00	25,00%	1.319.000,00	25,00%	6.150.550,00	25,00%	3.643.250,00	25%	4.311.750,00	10 laporan	15.424.550,00							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib	2 jenis	22.780.800,00	2 jenis	1.319.000,00	2 jenis	6.150.550,00	2 jenis	3.643.250,00	2 jenis	4.311.750,00	2 jenis	15.424.550,00					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	22.780.800,00	108 Laporan	1.319.000,00	108 Laporan	6.150.550,00	108 Laporan	3.643.250,00	108 Laporan	4.311.750,00	108 Laporan	15.424.550,00					Kecamatan PPB
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100,00%	241.200.600,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	7.178.800,00	25%	215.955.675,00	100,00%	223.134.475,00					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	5 Kegiatan	241.200.600,00	5 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	7.178.800,00	5 Kegiatan	215.955.675,00	5 Kegiatan	223.134.475,00					
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	170 Orang	233.713.300,00		0,00		0,00		-	170 Orang	215.955.675,00	0,00%	215.955.675,00					Kecamatan PPB
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	7.487.300,00		0,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	7.178.800,00	2 Dokumen	-	4 Dokumen	7.178.800,00					Kecamatan PPB
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL			20.703.823.668,00	21,77%	10.747.191.393,00	22,92%	2.338.696.129,00	24,31%	3.492.057.491,50	29,13%	3.866.903.893,50	98,12%	20.444.848.907,00					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		82,86%	20.703.823.668,00	21,77%	10.747.191.393,00	22,92%	2.338.696.129,00	24,31%	3.492.057.491,50	29,13%	3.866.903.893,50	98,12%	20.444.848.907,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100,00%	5.320.878.480,00	16,67%	1.389.817.446,00	37,50%	1.446.416.843,00	20,83%	1.089.679.227,00	25,00%	1.322.032.110,00	100,00%	5.247.945.626,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	4.471.457.980,00	25,00%	1.224.999.063,00	25,00%	1.276.674.164,00	25%	928.021.206,00	25%	1.034.261.015,00	100,00%	4.463.955.448,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 orang/bulan	4.471.457.980,00	87 orang	1.224.999.063,00	87 orang	1.276.674.164,00	87 orang	928.021.206,00	87 orang	1.034.261.015,00	261 orang	4.463.955.448,00					BPBD Kesbangpol
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	17.500.000,00		0,00	100,00%	17.500.000,00		0,00		0,00	100,00%	17.500.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	17.500.000,00			35 Paket	17.500.000,00		-		-	35 Paket	17.500.000,00					BPBD Kesbangpol

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			I		II		III		IV		13				14=7+13			15=14/6 x 100%	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.
4	5	8	9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90,00%	259.772.200,00	25,00%	82.411.663,00	25%	35.929.589,00	25%	47.288.350,00	25%	79.428.774,00	100,00%	245.058.376,00						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3.911.200,00				0,00	5 Jenis	2.840.100,00	5 Jenis	952.400,00	10 Jenis	3.792.500,00				BPBD Kesbangpol		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	45.684.200,00	14 Jenis	5.099.300,00	2 Jenis	400.000,00	15 jenis	10.567.500,00		18.836.400,00	31 Jenis	34.903.200,00				BPBD Kesbangpol		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.364.800,00	2 Jenis	2.736.700,00	2 Jenis	2.321.400,00	2 Jenis	1.535.900,00	2 Jenis	2.729.200,00	2 Jenis	9.323.200,00				BPBD Kesbangpol		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	199.812.000,00	71 Kali	74.575.663,00	60 Kali	33.208.189,00	58	32.344.850,00		56.910.774,00	189 Kali	197.039.476,00				BPBD Kesbangpol		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100,00%	80.402.000,00		0,00	25%	20.400.000,00	25%	20.535.000,00	50%	32.860.000,00	100,00%	73.795.000,00						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	40.871.400,00				0,00	1 Unit	20.535.000,00		15.060.000,00	1 Unit	35.595.000,00						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	39.530.600,00			4 unit	20.400.000,00		-	2 unit	17.800.000,00	6 unit	38.200.000,00						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90,00%	153.390.000,00	25,00%	30.558.221,00	25,00%	34.231.071,00	25%	36.339.871,00	25%	47.058.821,00	100,00%	148.187.984,00						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3.432.000,00	1 jenis	250.000,00	1 jenis	1.000.000,00	1 jenis	1.750.000,00	1 jenis	250.000,00	4 jenis	3.250.000,00				BPBD Kesbangpol		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	26.382.000,00	3 rekening	5.210.021,00	3 rekening	6.192.271,00	3 rekening	6.192.271,00	3 rekening	7.690.621,00	12 rekening	25.285.184,00				BPBD Kesbangpol		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	123.576.000,00	3 Orang	25.098.200,00	3 Laporan	27.038.800,00	3 laporan	28.397.600,00	3 laporan	39.118.200,00	12 Orang	119.652.800,00				BPBD Kesbangpol		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%	338.356.300,00	25,00%	51.848.499,00	25,00%	61.682.019,00	25%	57.494.800,00	25%	128.423.500,00	100,00%	299.448.818,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	299.816.000,00	20 Unit	51.093.499,00	20 Unit	56.847.019,00	20 Unit	50.697.800,00		106.604.500,00	20 Unit	265.242.818,00				BPBD Kesbangpol		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.859.700,00	4 unit	755.000,00	6 unit	4.835.000,00	5 unit	3.310.000,00	5 unit	4.739.000,00	20 unit	13.639.000,00				BPBD Kesbangpol		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.680.600,00				0,00	1 Unit	3.487.000,00	1 Unit	17.080.000,00	1 Unit	20.567.000,00				BPBD Kesbangpol		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00%	1.475.117.840,00	21,65%	168.746.050,00	25,00%	221.429.600,00	25,00%	280.801.545,00	27,06%	782.869.480,00	98,71%	1.453.846.675,00					
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	peesentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	100,00%	260.000.000,00	25,00%	1.427.300,00	25%	0,00	25%	1.332.000,00	25%	257.077.750,00	100,00%	259.837.050,00					
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokume n	260.000.000,00	1 Dokume n	1.427.300,00	1 Dokume n	0,00	1 Dokume n	1.332.000,00	1 Dokumen	257.077.750,00	1 Dokumen	259.837.050,00					BPBD Kesbangpol
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	160 Orang					0,00		-			0,00%	0,00					
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana	5,00%	913.209.100,00	16,76%	153.068.500,00	25%	181.994.000,00	25%	219.106.750,00	33%	351.684.105,00	100,00%	905.853.355,00					
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	9 unit, 22 pcs	49.958.100,00				0,00		-	9 unit, 22 pcs	47.880.000,00	9 unit, 22 pcs	47.880.000,00					BPBD Kesbangpol
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	22 orang	44.285.000,00			22 orang	0,00		-	40 orang	44.005.350,00	40 orang	44.005.350,00					BPBD Kesbangpol
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Dokume n	818.966.000,00	22 orang	153.068.500,00	22 orang	181.994.000,00	20 orang	219.106.750,00	20 orang	259.798.755,00	22 orang	813.968.005,00					BPBD Kesbangpol
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00%	65.521.000,00	19,85%	13.006.000,00	25,00%	8.897.600,00	25%	16.679.150,00	25%	23.113.800,00	94,85%	61.696.550,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
4	5	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16								
		K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	85 kejadian	65.521.000,00	10 kejadian	13.006.000,00	22 kejadian	8.897.600,00	13 kejadian	16.679.150,00	14 kejadian	23.113.800,00	59 kejadian	61.696.550,00				BPBD Kesbangpol	
	Jumlah laporan kejadian penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditangani	90 Laporan							-				0,00				BPBD Kesbangpol	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang tertangani	100,00%	236.387.740,00	25%	1.244.250,00	25%	30.538.000,00	25%	43.683.645,00	25%	150.993.825,00	100,00%	226.459.720,00					
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	236.387.740,00	1 Kegiatan	1.244.250,00	1 Kegiatan	30.538.000,00	1 Kegiatan	43.683.645,00	1 Kegiatan	150.993.825,00	1 Kegiatan	226.459.720,00				BPBD Kesbangpol	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80,00%	1.043.115.600,00	25,00%	19.714.997,00	25%	74.248.700,00	25%	579.924.857,00	25%	363.981.015,00	100,00%	1.037.869.569,00					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80,00%	1.043.115.600,00	25,00%	19.714.997,00	25%	74.248.700,00	25%	579.924.857,00	25%	363.981.015,00	100,00%	1.037.869.569,00					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	1.043.115.600,00	65 org	19.714.997,00	65 org	74.248.700,00	65 org	579.924.857,00	65 org	363.981.015,00	65 org	1.037.869.569,00				BPBD Kesbangpol	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100,00%	12.197.636.798,00	25,00%	9.111.388.300,00	25%	566.666.086,00	25%	1.411.436.333,50	25%	1.072.438.319,50	100,00%	12.161.929.039,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV								
				8		9		10		11		12		13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	23,00%	12.197.636.798,00	25,00%	9.111.388.300,00	25%	566.666.086,00	25%	1.411.436.333,50	25%	1.072.438.319,50	100,00%	12.161.929.039,00					
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 org/7 hibah	10.961.969.680,00	2 hibah	9.049.675.800,00	2 hibah	506.035.586,00	2 hibah	1.043.146.575,00	1 hibah	355.845.694,00	7 Orang	10.954.703.655,00					
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang/ 3 hibah	1.235.667.118,00	15 Orang	61.712.500,00	15 Orang	60.630.500,00	3 hibah	368.289.758,50		716.592.625,50	15 Orang/ 3 hibah	1.207.225.384,00					BPBD Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Organisasi Kemasyarakatan	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			I		II		III		IV									
			8		9		10		11		12			13		14=7+13		
4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	43 Orang			0,00		0,00		-			0,00%	0,00					BPBD Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Konflik yang tertangani		132.025.700,00	12,28%	16.218.000,00		0,00	25%	42.178.200,00	63%	65.150.900,00	100,00%	123.547.100,00					
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat		132.025.700,00	12,28%	16.218.000,00		0,00	25%	42.178.200,00	63%	65.150.900,00	100,00%	123.547.100,00					
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pertemuan FKUB dan P4GN yang di adakan	43 org	132.025.700,00	43 org	16.218.000,00		0,00		42.178.200,00		65.150.900,00	43 org	123.547.100,00					BPBD Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100,00%	535.049.250,00	30,00%	41.306.600,00	25%	29.934.900,00	25%	88.037.329,00	10%	260.432.069,00	90,00%	419.710.898,00					
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat	100,00%	535.049.250,00	30,00%	41.306.600,00	25%	29.934.900,00	25%	88.037.329,00	10%	260.432.069,00	90,00%	419.710.898,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			I		II		III		IV									
4	5	8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59 Orang	535.049.250,00		41.306.600,00	2 kali	29.934.900,00	1 Kali/43 org	88.037.329,00	43 Orang	260.432.069,00	43 Orang	419.710.898,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			I		II		III		IV										
			8		9		10		11						12				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.			
4	5		8		9		10		11		12		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	



2.2.2 Capaian Kinerja RPD

Untuk melihat capaian kinerja pelaksanaan tahun pertama RPD tahun 2024, dapat dilihat dari capaian kinerja indikator makro yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PDRB ADHK per Kapita, PDRB ADHB per Kapita, dan gini rasio, capaian kinerja dari tujuan dan sasaran pembangunan, capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama, serta capaian indikator kinerja daerah.

2.2.2.1 Capaian Kinerja Indikator Makro RPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dari 7 (tujuh) indikator makro tersebut, sebanyak 4 (empat) indikator atau sebesar 57,14% tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan, sedangkan 3 (tiga) indikator makro lainnya berhasil mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Capaian indikator makro Kota Padang Panjang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Indikator Makro Kota Padang Panjang
Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Target Akhir RPD (Tahun 2026)	RPD 2024		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79.73	79.02	80.6	102.00
2	Tingkat Kemiskinan	%	3.34	4.24	5.31	79.85
3	Tingkat Pengangguran	%	4.36	4.6	4.94	93.12
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6	5.2	4.52	86.92
5	PDRB ADHK Per Kapita	Juta	54.25	50.87	50.62	99.51
9	PDRB ADHB Per Kapita	Juta	80.53	75.58	80.01	105,86
7	Gini Rasio	Indeks	0.288	0.292	0.266	109.77

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2025

2.2.2.2 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPD

Dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ditetapkan sebanyak 5 (tujuan) dengan 15 (lima belas) sasaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Capaian kinerja dari tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja utama sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.59
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang
Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	RPD		
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
T1 <i>Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	Indeks Pembangunan Manusia	79,02	80,6	102,00
1 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	1 Rata-rata Lama Sekolah	11,94	12	100,50
	2 Harapan Lama Sekolah	15,09	15,47	102,52
2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3 Angka Harapan Hidup (AHH)	73,04	74,48	101,97
	4 Prevalensi Stunting	14,00	9,49	147,52
3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	5 Indeks Pemberdayaan Gender	71,44	na	na
	6 Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama	100
4 Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	7 Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100,00
	8 Rasio daya saing keolahragaan	0,2	0,5	250,00
T2 <i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel</i>	Indeks Reformasi Birokrasi	61,80	77,66	125,66
5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	9 Nilai SAKIP	63,98	64,22	100,38
	10 IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	71	63,2	89,01
	11 Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (330)	-	-
	12 Maturitas SPIP	3 (3.1)	3 (3,000)	96,77
	13 Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	90	94,46 (Tertinggi)	104,96
	14 Indeks SPBE	2,7	3,16	117,04
T3 <i>Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan</i>	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,20	4,52	86,92
	Indeks Gini	0,292	0,266	109,77
6 Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	15 LPE sektor Perdagangan	6,36	3,98	62,58
	16 LPE sektor pertanian	5,64	0,15	2,66
	17 LPE sektor akomodasi makan dan minum	10,95	7,45	68,04
7 Meningkatnya investasi	18 Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	38,	14,00
8 Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	19 Tingkat kemiskinan	4,24	5,31	125,24
	20 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,6	4,94	107,39
9 Meningkatnya Pendapatan masyarakat	21 Pengeluaran per Kapita	11,328	11,840	104,52
T4 <i>Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tenteram dan agamis</i>	Indeks Rasa Aman	Aman (86,39)	79,29	91,78
10 Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	22 Persentase Pemajuan Kebudayaan	71	66,16	93,18
	23 Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	85	71,42	84,02
11 Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00
12 Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	25 Angka PPKS	4,68	3,69	78,85
T5 <i>Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas</i>	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	91,36	95,50	104,53
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,6	62,62	93,74
13 Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	26 IKLI kePUan	90,06	96,71	90,46
	27 IKLI perkim	96,9	94,56	97,59
	28 IKLI perhubungan	96,76	95,22	98,41
14 Meningkatnya konsistensi penataan ruang	29 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83	83	100,00
15 Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	30 Indeks Kualitas Air	45,75	34,65	75,74
	31 Indeks Kualitas Udara	90,25	89,08	98,70
	32 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57	61,7	108,25

2.2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama RPD

Di dalam dokumen RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 terdapat 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Kota Padang Panjang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Tahun Perencanaan (2026)	RPD 2024		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
I.	Indeks Pembangunan Manusia	79,73	79,02	80,60	102,00
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,98	11,94	12	100,50
2	Harapan Lama Sekolah	15,11	15,09	15,47	102,52
3	Umur Harapan Hidup	73,06	73,04	74,48	101,97
4	Prevalensi Stunting	11,2	14,00	9,49	147,52
5	Indeks Pemberdayaan Gender	74,06	71,44	belum rilis	-
6	Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama	Utama	100
7	Status Kota Layak Pemuda	Pratama	Menuju Pratama	Menuju Pratama	100
8	Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,3	0,2	0,5	250
II.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	64,2	61,8	77,66	125,66
9	Nilai SAKIP	65,74	63,98	64,22	100,38
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72	71	63,2	89,01
11	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (330)	-	-
12	Maturitas SPIP	3 (3.3)	3 (3.1)	3 (3,000)	96,77
13	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	95	90	94,46 (Tertinggi)	104,96
14	Indeks SPBE	3	2,7	3,16	117,04
III.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,00	5,20	4,52	86,92
	Gini Rasio	0,288	0,292	0,266	109,77
15	LPE sektor Perdagangan	7,44	6,36	3,98	62,58
16	LPE sektor pertanian	5,74	5,64	0,15	2,66
17	LPE sektor akomodasi makan dan minum	11,43	10,95	7,45	68,04
18	Persentase pertumbuhan nilai investasi	100	6	38,6	643,26
19	Tingkat Kemiskinan	3,34	4,24	5,31	125,24
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,36	4,6	4,94	107,39
21	Pengeluaran per kapita	11,453	11,328	11,840	104,52
IV.	Indeks Rasa Aman	Aman (91,78)	Aman (86,39)	79,29	91,35
22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	77	71	66,16	89,41
23	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan	95	85	71,42	84,02
24	Persentase penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100
25	Angka PPKS	4,3	4,68	3,69	126,83
V.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	91,76	91,36	95,5	104,53
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,98	66,8	62,62	84,39
26	IKLI kePUan	90,46	90,06	96,71	107,38
27	IKLI Perkim	96,95	96,9	94,56	97,59
28	IKLI Perhubungan	96,9	96	95,22	99,19
29	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	84	76	83	109,21
30	Indeks Kualitas Air	47,25	45,75	34,65	75,74
31	Indeks Kualitas Udara	90,15	90,05	89,08	98,92
32	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58	57	61,7	108,25



Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) belum mencapai target dengan tingkat capaian 89,01%, disebabkan antara lain karena proses pembahasan KUA-PPAS dan APBD sangat memungkinkan terjadinya perubahan pagu indikatif pada kegiatan/subkegiatan setelah ditetapkan RKPD, masih rendahnya realisasi serapan anggaran Perangkat Daerah, dan rendahnya kapasitas fiskal daerah yang menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi belum mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,92%, begitu pula dengan LPE sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, hal ini disebabkan oleh dampak negatif dari bencana alam lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi, yang menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, gagal panen akibat erupsi, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan.
3. Indeks Rasa Aman tidak mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,35%. Hal ini disebabkan karena indikator ini diukur berdasarkan 4 dimensi, yaitu dimensi Persentase Pemajuan Kebudayaan (30%), Persentase mesjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan (35%), Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (20%) dan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (15%). Berdasarkan capaian tahun 2024, 2 dimensi tidak berhasil mencapai target sehingga mempengaruhi capaian indikator Indeks Rasa Aman, yaitu dimensi persentase pemajuan kebudayaan dengan tingkat capaian sebesar 89,41% dan dimensi persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan dengan tingkat capaian sebesar 84,02%.

2.2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal SPM

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan



Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61 Jenis Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang

NO	BIDANG SPM	JENIS PELAYANAN DASAR SPM
1.	Pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini b. Pendidikan Dasar c. Pendidikan Kesetaraan
2.	Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir d. Pelayanan kesehatan balita e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif



NO	BIDANG SPM	JENIS PELAYANAN DASAR SPM
		g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)
3.	Pekerjaan Umum	a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Perumahan Rakyat	a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban b. Pelayanan informasi rawan bencana c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6.	Sosial	a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana korban bencana

Sumber : Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2020

Pelaporan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk penilaian kinerja perangkat daerah, untuk pengembangan kapasitas daerah



dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, serta sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Capaian penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.62 Capaian Penerapan SPM Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024**

Tahun 2020-2024							
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SPM BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	2.230 orang	2.109 orang	2.193 orang	2.393 orang	2.256 orang
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	8.480 orang	9.249 orang	9.910 orang	12.189 orang	9.415 orang
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	181 orang	169 orang	407 orang	437 orang	437 orang
SPM BIDANG KESEHATAN							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas kesehatan	977 orang	929 orang	918 orang	906 orang	767 orang
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	997 orang	955 orang	893 orang	923 orang	767 orang
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan	988 orang	940 orang	848 orang	911 orang	775 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		kesehatan bayi baru lahir sesuai standar					
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita usia 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.124 orang	2.464 orang	2.611 orang	3.234 orang	3.234 orang
5	Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar di satuan pendidikan dasar	11.792 orang	9.696 orang	10.478 orang	2.896 orang	18.479 orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7.078 orang	11.587 orang	25.256 orang	33.166 orang	25.224 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	2.497 orang	3.028 orang	2.215 orang	4.340 orang	4.695 orang
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	5.706 orang	2.863 orang	3.494 orang	11.487 orang	4.624 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	0	621 orang	775 orang	726 orang	1.261 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		tahun					
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	578 orang	756 orang	1.406 orang	1.483 orang	1.624 orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	166 orang	115 orang	119 orang	123 orang	139 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	1.286 orang	1.345 orang	1.344 orang	1.516 orang	1.955 orang
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	9.187 orang	48.358 orang	51.704 orang	58.935 orang	61.559 orang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah	9.287 orang	48.529 orang	52.226 orang	53.582 orang	61.009 orang
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0
2	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0	0
SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	143 orang	1 orang	90 orang	1 orang	32 orang
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	81 orang	15 orang	37 orang	5 orang	12 orang
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Na	59.999 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na	53.618 orang	3.000 orang	1.882 orang	1.882 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	112 orang	53.618 orang	59.999 orang	0	326 orang
SPM BIDANG SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	35 orang	81 orang	259 orang	244 orang	330 orang
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15 orang	16 orang	16 orang	13 orang	10 orang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	90 orang	127 orang	324 orang	151 orang	355 orang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	0	4 orang	3 orang	67 orang	9 orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	0	123 orang	296 orang	380 orang	1.037 orang



Berdasarkan hasil pelaporan SPM melalui sistem pelaporan secara elektronik Departemen Dalam Negeri melalui aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, dapat dilihat capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Padang Panjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	BIDANG SPM	TARGET (%)	REALISASI (%)	KATEGORI
1	Pendidikan	100	100	Tuntas Paripurna
2	Kesehatan	100	100	Tuntas Paripurna
3	Pekerjaan Umum	100	99,95	Tuntas Paripurna
4	Perumahan rakyat	100	100	Tuntas Paripurna
5	Ketentraman Ketertiban	100	97,40	Tuntas Utama
6	Sosial	100	100	Tuntas Paripurna

Sumber; Laporan SPM Kota Padang Panjang 2024, 2025

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang menunjukkan capaian yang sangat baik secara umum. Dari enam bidang yang menjadi fokus pemantauan, lima bidang berhasil merealisasikan target secara penuh, yaitu mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas sektor layanan publik telah menjalankan program-programnya secara optimal sesuai dengan ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan.

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, serta Pekerjaan Umum (dengan realisasi 99,95%) seluruhnya masuk dalam kategori “Tuntas Paripurna”, yang menunjukkan pemenuhan menyeluruh terhadap indikator layanan dasar. Khusus bidang Pekerjaan Umum, meskipun terdapat sedikit selisih sebesar 0,05% dari target, capaian ini masih dianggap sangat memuaskan dan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas layanan.

Satu-satunya bidang yang belum mencapai realisasi 100% adalah Ketentraman dan Ketertiban, dengan capaian 97,40%. Meskipun masih tergolong tinggi, bidang ini dikategorikan dalam “Tuntas Utama”, yang berarti sudah mendekati pemenuhan penuh, namun masih terdapat ruang perbaikan. Beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi capaian ini antara lain faktor keamanan wilayah, keterbatasan personel lapangan, atau tantangan sosial yang dinamis.

Secara agregat, rata-rata realisasi seluruh bidang mencapai 99,56%, yang mencerminkan komitmen kuat dan keseriusan pemerintah dalam

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan SPM berjalan efektif dan efisien, dengan hasil yang mendekati sempurna.

Capaian ini juga menjadi indikasi bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program di berbagai sektor telah dikelola dengan baik. Namun demikian, tetap diperlukan evaluasi berkala, terutama untuk bidang-bidang yang belum mencapai target maksimal, agar ke depannya seluruh sektor dapat mencapai kategori Tuntas Paripurna secara menyeluruh

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan pembangunan daerah Kota Padang Panjang sebagai hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun lalu dan hal-hal lain terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dan beberapa urusan yang berpengaruh. Identifikasi permasalahan pembangunan menggunakan tiga kriteria yaitu: (a) cakupan masalah dan dampak yang ditimbulkan; (b) merupakan masalah yang terus menerus terjadi sehingga menghambat proses pembangunan dan (c) masalah tersebut terkait dengan komponen utama pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.64
Identifikasi Permasalahan di Kota Padang Panjang

Akar Masalah	Permasalahan
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFIS	
• Terjadi kenaikan suhu rata-rata dan suhu maksimum • Penurunan kelembaban maksimum • Variasi curah hujan dan fluktuasi penyinaran matahari	Perubahan Iklim membuat meningkatnya resiko bencana
• Kota ini berada di jalur lintasan regional, posisi ini memberikan peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan pengelolaan lalu lintas, urbanisasi cepat, dan tekanan pembangunan, permasalahan lingkungan	Posisi Strategis namun daya saing belum optimal
• Semakin berkurangnya lahan pertanian	Berkurangnya hasil produksi pertanian
• Kenaikan ini relatif kecil dan cenderung stagnan, dengan fluktuasi tipis setiap tahun • Ketergantungan pada Sumber Energi Konvensional	Meskipun jumlah penduduk dan listrik terjual meningkat, konsumsi listrik per kapita hanya naik sedikit
• IKP Kota Padang Panjang mengalami	• Ketahanan pangan belum stabil



Akar Masalah	Permasalahan
fluktuasi yang menunjukkan ketahanan pangan yang belum stabil dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. • Pengurangan Lahan Pertanian dan Ketergantungan pada Pasokan Luar • Jumlah produksi padi tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan penduduk	dan rentan terhadap gangguan eksternal seperti pandemi, yang berdampak pada ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan masyarakat. • Berkurangnya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk
• Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan • Pangan yang dikonsumsi masyarakat Kota Padang Panjang belum beragam dan seimbang (masih kurang mengonsumsi sayur, buah dan ubi-ubian namun berlebih padi-padian, lemak dan minyak)	Masih banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara nutrisi
• Kota Padang Panjang berada di hilir dari sistem sungai yang hulunya berada di Kabupaten Tanah Datar. • Kontaminasi air sudah terjadi sejak di wilayah hulu, sehingga Padang Panjang menerima air yang sudah tercemar sejak awal masuk ke wilayahnya.	Rendahnya mutu kualitas air akibat pencemaran Sungai
• Masih banyak masyarakat yang membuang limbah domestik langsung ke sungai, terutama limbah tinja. • Hal ini menyebabkan tingginya kadar fecal coli, yang sangat mempengaruhi nilai IKA. • Edukasi, pengawasan, dan sanksi terhadap pembuangan limbah tidak berjalan optimal.	Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Sanitasi
• Belum tersedianya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal atau tangki septik yang layak. • Permukiman padat atau di bantaran sungai mungkin tidak memiliki akses ke sistem sanitasi tertutup.	Belum memadainya Infrastruktur Pengelolaan Limbah
• Tidak ada atau minimnya pengawasan rutin terhadap kualitas air dan aktivitas pencemar. • Penegakan aturan lingkungan hidup masih lemah, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha (jika ada) yang mencemari air.	Kurangnya Monitoring dan Penegakan Hukum
• Alih fungsi lahan yang tidak terkendali	Penurunan kualitas tutupan lahan



Akar Masalah	Permasalahan
• Penurunan nilai IKTL mempengaruhi IKLH	Kualitas lingkungan hidup menurun
• Fluktuasi persentase sampah terolah akibat sistem pengelolaan yang belum optimal • Total timbulan sampah yang terus meningkat	Belum optimalnya pengelolaan timbulan sampah terolah
• Tantangan dalam pengelolaan sampah organik dan daur ulang material	Kapasitas dan efisiensi fasilitas pengolahan sampah terbatas
• Cakupan layanan pengumpulan sampah yang masih sangat rendah (di bawah 10% rumah tangga)	Sebagian besar rumah tangga belum mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah
• Keterbatasan armada dan sistem pengangkutan sampah	Pengangkutan sampah belum merata dan optimal
• Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan volume sampah. • Gaya hidup konsumtif dan penggunaan produk sekali pakai memperbanyak sampah non-organik (plastik, kemasan, dsb). • Minimnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya (reduce, reuse, recycle / 3R).	TPA sudah melebihi kapasitas daya tampung
• Pengelolaan limbah B3 masih bergantung pada pihak ketiga • Limbah B3 belum sepenuhnya terkelola secara efektif	• Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 • Masih rendahnya cakupan sanitasi aman
• Belum tersedianya Dokumen Kebencanaan (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Dokumen Rencana Kontingensi), sehingga kegiatan yang dilakukan selama ini belum terarah dengan baik. • Nilai Indeks Resiko Bencana stagnan sejak 2015 meskipun ada perubahan risiko	Belum optimalnya mitigasi bencana
• Belum optimalnya sebaran infrastruktur kewilayahan	Tingkat kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas wilayah terutama pada kec.ppb
• Proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) tinggi, dengan dependency ratio muda sebesar 38,94% • Mayoritas penduduk berada pada usia produktif (67,31%), namun lapangan kerja didominasi sektor jasa	- Beban pada sistem pendidikan dan kesehatan meningkat, kebutuhan fasilitas dan tenaga pendidik serta kesehatan bertambah - Risiko pengangguran terselubung dan kurangnya diversifikasi ekonomi, potensi bonus demografi belum optimal



Akar Masalah	Permasalahan
Ketergantungan penduduk tua mulai meningkat (9,62%)	Kebutuhan layanan sosial dan kesehatan lansia meningkat, potensi beban jangka panjang jika tidak diantisipasi
Tingkat pendidikan didominasi lulusan SMA ke atas (66,4%), namun proporsi lulusan SD dan SLTP masih signifikan	Masih ada kelompok masyarakat dengan keterampilan rendah
Komposisi pekerjaan didominasi sektor jasa (22.197 orang), pertanian dan manufaktur jauh lebih kecil	Belum optimalnya pengembangan sektor jasa untuk mendukung perekonomian
2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	
Belum optimalnya pengelolaan ekonomi lokal	laju pertumbuhan ekonomi relatif stagnan cenderung menurun
- Kurangnya diversifikasi sumber penghasilan: Ketergantungan pada sektor tertentu membuat masyarakat rentan terhadap guncangan ekonomi. - Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dan keterampilan: Masyarakat miskin seringkali memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan pelatihan keterampilan. - Mental masyarakat yang cenderung mengandalkan bantuan dari Pemerintah	Tren Kemiskinan yang Fluktuatif dan Cenderung Naik
- Banyak pencari kerja belum memiliki keahlian yang sesuai kebutuhan lapangan usaha - Meningkatnya jumlah pencari kerja - Kurang tersedianya lapangan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka fluktuatif dan cenderung naik
Masih Adanya Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat	Penurunan gini ratio relatif lambat.
- Pemenuhan 12 indikator IKS (seperti imunisasi lengkap, KB, sanitasi, dll) masih rendah - Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum membudaya - Ketersediaan air bersih dan sanitasi layak masih terbatas di beberapa wilayah - Kurangnya intervensi promotif dan preventif oleh Puskesmas	IKS Kota Padang Panjang masih berada di kategori "keluarga tidak sehat"
- Asupan gizi ibu hamil dan balita belum tercukupi - Pemantauan tumbuh kembang anak tidak	Masih ada balita yang mengalami stunting, menunjukkan masalah gizi dan pemantauan tumbuh kembang



Akar Masalah	Permasalahan
rutin - Edukasi gizi kepada keluarga belum intensif - Masih ada keluarga yang tidak memanfaatkan Posyandu secara aktif	anak belum optimal.
- Kepatuhan pasien rendah karena pengobatan lama dan efek samping obat - Sistem pelacakan dan pengawasan pasien TB (DOTS) belum kuat - Kurangnya edukasi mengenai pentingnya pengobatan tuntas - Under-reporting oleh fasilitas layanan kesehatan swasta atau mandiri	Penemuan kasus TB meningkat, namun banyak pasien tidak menyelesaikan pengobatan (lose follow-up), under-reporting, dan kepatuhan pasien rendah
Peningkatan RLS lambat, hanya naik sedikit tiap tahun.	Masih ada masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Literasi meningkat sangat lambat, numerasi stagnan	Kualitas pembelajaran numerasi dan literasi belum optimal
Komptensi dan distribusi guru belum merata	
Kurangnya infrastruktur yang memadai	Belum optimal peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat
Rendahnya minat baca	
Masih adanya kelompok rentan tetap tidak terlindungi dari risiko ekonomi, kecelakaan kerja, dan tidak memiliki jaminan hari tua	Penurunan persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan meski jumlah peserta stabil, diakibatkan bertambahnya penduduk usia kerja
Kurangnya akses dan kesempatan kerja layak bagi penyandang disabilitas di sektor formal, serta implementasi kebijakan yang belum optimal	Rendahnya persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal
Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya	Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar
Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku seni	Rendahnya tingkat partisipasi pelaku seni
Penurunan fungsi pemangku adat dan ulama akibat disrupsi teknologi	Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat pada generasi muda
Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional	Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat
Tidak tersedianya tenaga fungsional penataan cagar budaya	Banyaknya cagar budaya yang belum terdaftar
Belum optimalnya pembinaan terhadap	Rendahnya tingkat partisipasi pelaku



Akar Masalah	Permasalahan
pelaku seni	seni
• Penurunan fungsi pemangku adat dan ulama akibat disrupsi teknologi	Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan adat pada generasi muda
• Rendahnya minat generasi muda untuk melestarikan seni budaya tradisional	Belum optimalnya pelestarian seni budaya tradisional di masyarakat
• Masih adanya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi anak. • Lemahnya regulasi terkait perlindungan khusus anak • Belum adanya sistem pelaporan terintegrasi terkait permasalahan anak • Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menindak lanjuti permasalahan anak	Belum terwujudnya sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.
• Masih rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga • Akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) belum merata. • Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pola asuh • Masih terdapatnya kasus pernikahan dini • Belum optimalnya program bangga kencana	Nilai iBangga masih dalam kategori berkembang, belum mencapai kategori tangguh.
• Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan • Rendahnya pemahaman masyarakat akan kesetaraan gender	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
3 ASPEK DAYA SAING DAERAH	
• Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan vokasi	Rendahnya daya saing tenaga kerja
• Kurangnya diversifikasi produk industri pengolahan dan inovasi menyebabkan daya saing sektor ini kurang optimal dalam menghadapi persaingan pasar regional dan global • Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan industri pengolahan	Menurunnya kontribusi PDRB Industri Pengolahan
• Belum optimalnya daya tarik wisata • Belum optimalnya promosi pariwisata	Belum optimalnya kontribusi sektor akomodasi makan dan minum terhadap PDRB
• Fasilitas pendukung seperti ruang kreatif, akses teknologi, dan sarana produksi masih	Belum optimalnya perkembangan ekonomi kreatif



Akar Masalah	Permasalahan
terbatas	
• Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan	
• Kurangnya Jaringan Promosi dan Pemasaran yang Efektif	
• Keterbatasan Tenaga Kerja Kreatif dan SDM Terampil	
• Sebagian besar koperasi masih bergerak di usaha simpan pinjam, perlu mendorong hadirnya banyak koperasi berbasis produk/jasa/perdagangan (koperasi sektor riil)	Masih rendahnya kontribusi koperasi dalam perekonomian kota padang panjang
• Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Rendah • Banyak orang lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal yang dianggap lebih stabil dan bergaji tetap, sehingga minat untuk menjadi wirausaha rendah • Terbatasnya Akses Permodalan dan Pendanaan	Belum optimalnya rasio kewirausahaan
•	Tingkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja fluktuatif dan cenderung naik
• Perempuan seringkali harus membagi waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan produktif, sehingga mengurangi kesempatan bekerja di sektor formal. • Minimnya fasilitas yang mendukung perempuan bekerja, seperti tempat penitipan anak dan kebijakan ramah gender di tempat kerja.	Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
• Masih rendahnya asset dan omset industri	Belum adanya industri kecil
• Belum optimalnya pengelolaan Pasar Induk Hasil Pertanian (PIHP) Bukit Surungan. • Populasi Sapi perah yang terus menurun • Teknologi pengolahan susu belum optimal • Produksi susu tidak semuanya terserap pasar • Belum semua petani tergabung dalam kelompok tani agar berhak mendapatkan pupuk bersubsidi • Alokasi pupuk belum sesuai dengan kebutuhan yang diajukan petani pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	Rendahnya PDRB Sektor Pertanian



Akar Masalah	Permasalahan
- Masih adanya petani yang tidak melakukan penebusan pupuk sesuai dengan RDKK yang telah disusun sebelumnya - Belum meratanya kios pengecer di tiap kecamatan - Masih terjadinya penebusan pupuk diatas HET - Masih ditemui kondisi stok pupuk tidak tersedia di kios pengecer - Tidak semua jenis komoditi pertanian mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi	
Rendahnya minat masyarakat bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.	Belum optimalnya Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana produktivitas	Belum optimalnya nilai Indeks Masyarakat Digital
Masih belum terbentuknya Relawan TIK	
- Rendahnya minat investasi baru - Kurangnya insentif investasi - Keterbatasan lahan - Diversifikasi produk ekspor kurang - Daya saing produk rendah	Belum optimalnya nilai investasi dan ekspor barang dan jasa
Penyediaan dan pemeliharaan jalan dan perlengkapannya belum mencapai standar	Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur
Belum optimalnya ketersediaan/pengelolaan gedung strategis kota	
Kurangnya sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman	
Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian	masih belum optimalnya rumah tangga dengan akses hunian layak (data BPS Sumbar)
Masih cukup tingginya angka kemiskinan	
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal - Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Masih rendahnya kemandirian ekonomi
4 ASPEK PELAYANAN UMUM	
Belum optimalnya adopsi teknologi	Belum optimalnya Pelayanan publik

Akar Masalah	Permasalahan
informasi dalam pemerintahan dan pelayanan publik • Belum meratanya kualitas infrastruktur teknologi informasi • Kapasitas SDM TI belum memenuhi kompetensi	dan layanan pemerintahan
• Pengawasan internal dan budaya integritas belum sepenuhnya kuat	Indeks Integritas daerah masih fluktuatif dan belum stabil pada tren peningkatan
• Regulasi belum sepenuhnya sederhana	Belum optimalnya proses birokrasi
• Maraknya penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang • Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Masih terjadinya kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

2.3.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Belum terpenuhinya Standar Satuan Pendidikan (standar Kompetensi lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan);
- Belum terpenuhinya kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Kompetensi Literasi dan Numerasi);
- Belum terpenuhinya partisipasi dan pemerataan peserta didik (APK, APM, APS);
- Belum optimalnya kualitas dan pemerataan layanan. (Akreditasi, Iklim Keamanan, Kebinekaan dan Inklusifitas);
- Belum terpenuhi standar jumlah dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Tingginya kasus rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Rumah Sakit;
- Rendahnya capaian pelayanan kesehatan masyarakat;
- Belum tercapainya SPM Bidang Kesehatan
- Masih adanya kasus kematian ibu hamil;



- e. Masih adanya kasus kematian bayi;
- f. Tingginya angka stunting;
- g. Rendahnya indeks keluarga sehat;
- h. Belum tersedianya fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Poskeskel) yang memenuhi standar mutu;
- i. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum tercapai;
- j. Terdapatnya fasilitas dan sarana kesehatan yang belum memperpanjang izin;
- k. Pengembangan layanan dan peralatan alat kesehatan bedah sentral, instalasi diagnostik terpadu;

3. *Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

- a. Belum optimalnya layanan infrastruktur drainase;
- b. Layanan infrastruktur jalan belum memadai;
- c. layanan infrastruktur SDA masih ada yang tidak berfungsi;
- d. Belum terpenuhinya layanan infrastruktur air minum kota;
- e. Layanan infrastruktur air limbah belum optimal;
- f. Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung belum sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Kurangnya kompetensi penyedia barang/jasa dalam menyelesaikan pekerjaan bangunan;
- h. Belum optimalnya implementasi tata ruang;

4. *Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

- a. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
- b. Belum memadai ketersediaan rumah layak huni;
- c. Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman;

5. *Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

- a. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas
- b. Masih adanya kasus penyakit masyarakat
- c. Belum optimalnya penegakan perda;
- d. Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda



- e. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan terhadap bencana alam dan kebakaran;
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- g. Belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- h. Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial;
- i. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- j. Belum optimalnya pelayanan terhadap disabilitas dan lansia

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar

1. *Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja*

- a. Keterbatasan lapangan kerja di Kota Padang Panjang;
- b. Kurangnya kompetensi pencari kerja
- c. Rendahnya jiwa wirausaha masyarakat terutama kawula muda
- d. Rendahnya serapan tenaga kerja yang sudah dilatih;
- e. Belum optimalnya jalinan kerja sama dengan mitra jaringan kerja sama tenaga kerja.
- f. Belum optimalnya perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja sektor formal;
- g. Belum terlindunginya pekerja sektor informal yang masuk dalam kategori fakir dan miskin;

2. *Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

- a. Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak;
- b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan;
- c. Belum optimalnya pemenuhan terhadap hak anak;
- d. Belum optimalnya pengarusutamaan gender;

3. *Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan*

- a. Belum tercapainya Pola Pangan Harapan (Skor AKE dan AKP);
- b. Ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan utama beras masih tinggi;
- c. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan pasokan dan harga pangan;

4. *Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian*

- a. Masih rendahnya database pertanian;



- b. Masih belum optimalnya penyertifikatan Tanah Milik Daerah

5. *Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup*

- a. Belum optimalnya pengelolaan persampahan
- b. Daya tampung TPA Sungai Andok yang sudah penuh;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- d. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan;
- e. Belum adanya Kerja sama dengan daerah hinterland dalam penanganan sampah dan pencemaran sungai.
- f. Belum optimalnya pengendalian dan penegakan Perda lingkungan.

6. *Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

- a. Belum Optimalnya pengurusan dokumen kependudukan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- c. Masih rendahnya hasil penilaian tim pelayanan publik terkait sarana dan prasarana pelayanan kependudukan;

7. *Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat*

- a. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. Belum terpenuhinya SPM di tingkat kelurahan;

8. *Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan upaya pengendalian penduduk;
- b. Masih tingginya Unmeet need;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan keluarga;
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan program Pembangunan Ketahanan Keluarga;

9. *Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan*

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan kendaraan angkutan kota sebagai alat transportasi masyarakat;
- b. Belum Optimalnya layanan dan fasilitas keselamatan lalu lintas transportasi darat;
- c. Belum optimalnya pengoperasian UPTD PKB;

10. *Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika*



- a. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan layanan informasi publik;
- c. Belum optimalnya kerja sama dengan media dan mitra strategis lainnya;

11. *Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*

- a. Belum optimalnya tata kelola koperasi;
- b. Belum optimalnya produktivitas UMKM;

12. *Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal*

- a. Kurangnya informasi potensi investasi
- b. Promosi yang terbatas;
- c. Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- d. Tingkat kesadaran pelaku usaha belum sepenuhnya memahami perubahan regulasi;

13. *Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga*

- a. Belum optimalnya prestasi atlet di Kota Padang Panjang;
- b. Daya saing keolahragaan masih rendah;
- c. Belum optimalnya kapasitas daya saing kepemudaan;
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan sebagai wahana kreativitas pemuda
- e. Belum optimalnya aktivitas organisasi kepemudaan

14. *Urusan Pemerintahan Bidang Statistik*

- a. Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas;
- b. SDM bidang Statistik tidak ada yang secara khusus menguasai tentang ilmu statistik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik;
- c. Belum adanya sistem data dan informasi sektoral yang terintegrasi dan terkini dari perangkat daerah;

15. *Urusan Pemerintahan Bidang Persandian*

- a. Masih rendahnya pengamanan informasi pemerintah daerah
- b. Belum optimalnya antisipasi dalam menghadapi ancaman keamanan data dan informasi yang berkembang saat ini;

16. *Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan*

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya di Kota Padang Panjang;



- b. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
- c. Kurangnya peran lembaga adat dalam pembentukan tatanan kehidupan sosial masyarakat terutama generasi muda

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- a. Terbatasnya daya tampung ruangan untuk pengembangan perpustakaan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan e-book;

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- a. Belum efektifnya pengelolaan arsip di OPD;
- b. Masih rendahnya minat dan terbatasnya sumber daya aparatur di bidang arsiparis;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a. Rendahnya kunjungan wisata di Kota Padang Panjang
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata;
- c. Belum optimalnya pemasaran dan kemitraan pariwisata;
- d. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif;

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan;
- c. Belum Optimalnya Produktivitas Perikanan;
- d. Masih Terbatasnya Adopsi Inovasi Teknologi (Persentase Kelompok yang Menerapkan Teknologi);

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- a. Menurunnya kunjungan masyarakat ke pasar pusat;
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pasar pusat;
- c. Belum optimalnya penataan pasar sebagai pusat perdagangan;
- d. Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor perdagangan;
- e. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Perdagangan;

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- a. Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor industri;
- b. Belum optimalnya kualitas SDM pelaku industri;

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan



- a. Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Belum Optimal;
- b. Pengendalian dan Evaluasi belum Optimal;
- c. Pengelolaan data dan Informasi Pembangunan belum Optimal;

2. Keuangan Daerah

- a. Belum Optimalnya Kualitas Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran;
- b. Belum Optimalnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Peningkatan Pendapatan Daerah tidak terealisasi secara optimal;
- d. Rendahnya akurasi Laporan Barang Milik Daerah;

3. Kepegawaian

- a. Jumlah ASN baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang purna /pensiun;
- b. Belum optimalnya kapasitas, integritas dan disiplin aparatur dalam pencapaian kinerja yang maksimal;
- c. Belum optimalnya penetapan sistem tunjangan kinerja yang sesuai dengan kinerja ASN;
- d. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas aparatur;

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya;
- b. Belum tersedianya data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat;
- c. Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan masih kurang;
- b. Pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah Belum Optimal;

6. Pengawasan

- a. Belum maksimalnya Pengawasan Internal Pemerintah;
- b. Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan dan Kapabilitas APIP;

E. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

- a. Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah;



- b. Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik;
- c. Belum optimal inovasi pelayanan publik;

F. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Masih Kurangnya Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, serta Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
- c. Masih Rendahnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;

2.3.3 Penentuan Isu Strategis

2.3.3.1 Isu Pembangunan Manusia

A. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Kualitas pendidikan merupakan indikator utama dalam mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. Daerah dengan kualitas pendidikan yang tinggi cenderung memiliki daya saing yang lebih baik dalam berbagai aspek pembangunan. Oleh karena itu, penyediaan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi RPJPD Kota Padang Panjang 2025–2045 menuju PADANG PANJANG AGAMIS, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi tenaga pendidik, mutu lulusan, pemerataan siswa, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih belum meratanya distribusi guru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, terutama guru kelas di jenjang sekolah dasar dan guru mata pelajaran tertentu di tingkat lanjutan.



Selain itu, pengelolaan pendidikan yang belum optimal juga menjadi tantangan. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Kesenjangan dalam capaian hasil belajar, partisipasi peserta didik, dan kualitas layanan antar sekolah juga masih terjadi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendidikan serta pemerataan mutu dan kapasitas penyelenggara pendidikan perlu menjadi fokus kebijakan pembangunan ke depan.

Transformasi digital juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika pendidikan. Digitalisasi pembelajaran menuntut adaptasi metode mengajar dan kesiapan infrastruktur. Program “Sekolah Penggerak” dan “Guru Penggerak” serta penerapan Kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasikan pada tahun 2022 dan menyeluruh di tahun 2024, mengharuskan Kota Padang Panjang sebagai kota tujuan pendidikan untuk beradaptasi dan memastikan peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara berkelanjutan.

Di sisi lain, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu terus dievaluasi untuk menjamin akses pendidikan yang merata dan mengurangi disparitas kualitas antar sekolah. Sistem ini diharapkan mampu menghapus diskriminasi dalam memilih sekolah serta meningkatkan pemerataan mutu layanan pendidikan di berbagai wilayah.

Selain fokus pada pendidikan formal, peningkatan budaya literasi dan kreativitas masyarakat juga menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Kota Padang Panjang perlu mendorong ekosistem literasi masyarakat sebagai fondasi dalam membentuk warga yang adaptif, kritis, dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman.

B. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan merupakan salah satu sasaran prioritas pembangunan Kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2004 bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur pencapaian keberhasilan program kesehatan masyarakat dengan berbagai upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, terpadu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan, yang dapat diukur melalui umur harapan hidup (UHH). Umur harapan hidup ditentukan oleh mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka kesakitan).



Secara umum pelayanan dan pengelolaan kesehatan di Kota Padang Panjang cukup baik, namun masih perlu lebih dioptimalkan. Optimalisasi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diperlukan dalam rangka tercapainya standar pelayanan minimal bidang Kesehatan sehingga dapat menekan kasus kematian ibu hamil dan kematian bayi. Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal diindikasikan menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian bayi, ibu hamil. Di samping itu tingginya kasus gizi kurang juga menjadi penyebab perlunya penguatan pelayanan primer dan rujukan.

Isu stunting merupakan isu nasional yang merupakan program nasional yang ditargetkan dapat mencapai 14 persen pada tahun 2024. Dalam hal ini isu stunting juga merupakan isu utama di Kota Padang Panjang karena masih cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya terintegrasi antar berbagai pihak dalam penurunan stunting ini. Anak stunting akan mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, kesulitan dalam belajar, daya tahan tubuh yang lemah, berat badan cenderung turun dan sering demam atau sakit-sakitan. Penyebab stunting dapat juga terjadi sejak dari usia dalam kandungan, sangat rentan pada usia 1000 hari masa kehidupan. Bila kecukupan gizi selama masa kandungan tidak mencukupi maka rentan dengan kelahiran dengan berat badan rendah, panjang fisik di bawah rata-rata anak yang kelahirannya sehat.

Derajat kesehatan masyarakat juga dapat dilihat dari angka indeks keluarga sehat, dimana untuk Kota Padang Panjang masih tergolong kategori rendah. Kebijakan intervensi perlu dilakukan termasuk pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan terutama sekali Puskesmas dan Poskeskel yang memenuhi standar mutu dan peningkatan kualitas sumber daya Kesehatan lainnya. Upaya preventif melalui upaya promosi kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), di samping itu juga kesehatan lingkungan yang belum diterapkan masyarakat secara maksimal.

Selain itu cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang belum tercapai di Kota Padang Panjang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Padang Panjang ke depan. Relatif masih tingginya penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan salah satu akibat belum lengkapnya imunisasi dasar. Sekaitan dengan itu maka masih perlunya optimalisasi upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI).

C. Masih Adanya Kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol Dan Manfaat Yang Dialami Perempuan Dalam Merasakan Manfaat Pembangunan



Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Isu pengarusutamaan gender menjadi salah satu isu strategis di Kota Padang Panjang, dimana masih terdapatnya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam pembangunan sehingga perlunya peningkatan partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat. Masih kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen di Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa perlunya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perempuan sehingga dapat ikut andil dalam parlemen. Meskipun Kota Padang Panjang sudah meraih penghargaan Prahita Eka Praya (APE) yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG), namun keterlibatan perempuan dalam pembangunan tetap harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Di samping itu peningkatan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak perlu ditingkatkan dalam rangka pencapaian Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus kekerasan terhadap anak. Kota Padang Panjang sudah meraih Penghargaan Kota Layak Anak yang merupakan penghargaan terhadap kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak, namun masih perlu ditingkatkan upaya-upaya melalui kebijakan pemerintah daerah sehingga potensi ataupun peluang terjadinya kekerasan pada anak dapat



diminimalisir dan dapat melahirkan anak yang cerdas serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

D. Peningkatan Daya Saing Kepemudaan Dan Prestasi Keolahragaan

Daya saing kepemudaan dan prestasi olah raga sangat penting untuk ditingkatkan, hal ini merupakan salah satu isu dalam mendukung terciptanya sumber daya manusia. Melalui olahraga diharapkan mampu melahirkan karakter yang baik, jujur, disiplin, sportif, tanggung jawab dan kerja sama. Belum optimalnya kapasitas daya saing keolahragaan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari masih terdapat hambatan dan keterbatasan, seperti pembinaan terhadap bibit atlet berprestasi yang masih belum optimal, sistem rekrutmen calon atlet, pembinaan cabang olah raga serta peningkatan prestasi dalam berbagai lomba masih rendah.

Di samping itu kompetitiveness dan jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda perlu dipupuk sehingga bisa melahirkan semangat kewirausahaan dikalangan milenial di berbagai jenis usaha termasuk ekonomi kreatif. Hal ini sinergi dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.

2.3.3.2 Isu Tata Kelola Pemerintahan yang dilihat dari Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Sesuai dengan *grand design* reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional.

Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan



dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPANRB tahun 2022 Indeks Reformasi di Pemerintah Kota Padang Panjang adalah 59,40 dengan kategori 'CC' sehingga perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dari sepuluh hasil area perubahan yang diukur pelaksanaan adalah Sistem Merit, ASN yang Profesional, Implementasi SPBE, Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Kepatuhan Terhadap Standar pelayanan Publik, Kualitas Pengelolaan Arsip dan Reformasi Hukum ke semuanya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi maka untuk peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang Panjang. harus dapat melaksanakan beberapa hal :

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak hanya pada dokumen tetapi juga pelaksanaannya,
- 2) Menetapkan *Quick Win* sesuai isu strategis dan karakter organisasi
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat
- 4) Mendorong setiap ASN untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi spesifik dalam era digitalisasi;
- 5) Menyusun Penjenjangan kinerja sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.
- 6) Memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten bersih dan bebas KKN;
- 7) Melaksanakan penyederhanaan regulasi secara ideal namun tetap membawa dampak yang lebih baik;
- 8) Penguatan Pengawasan agar lebih efektif ditujukan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih;
- 9) Reformasi birokrasi harus dapat melakukan transformasi ekonomi sehingga setiap program dan kegiatan dirancang untuk kesejahteraan rakyat.



2.3.3.3 Isu Pembangunan Ekonomi

A. Peningkatan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Berdasarkan hasil analisis yang sudah disebutkan dalam Sub Bab 2.3.1 tentang Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, terdapat 3 Sektor Unggulan di Kota Padang Panjang yang perlu digenjut pertumbuhannya, yaitu: Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah Sektor utama yang selama lebih dari 5 tahun terakhir memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Padang Panjang, yaitu di atas 17,5%. Sektor ini juga menjadi sektor unggulan Kota Padang Panjang selama beberapa periode RPJMD. Pandemi Covid-19 membuat Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor terkontraksi hingga -1,01% pada tahun 2020, walaupun berhasil bangkit dan tumbuh sebesar 3,20% pada tahun 2021. Penyerapan tenaga kerja di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah yang tertinggi di Kota Padang Panjang yaitu 33%.

Sementara itu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga menjadi Sektor unggulan di Kota Padang Panjang. Meskipun kontribusi Sektor ini pada PDRB Kota Padang Panjang tidak terlalu tinggi, yaitu berada di kisaran 5,05% sampai dengan 5,4% di tahun 2017-2021, namun fakta menunjukkan bahwa hampir 60% lahan di Kota Padang Panjang adalah lahan pertanian yang digunakan untuk Sawah, Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Hutan Rakyat, Kolam/Empang. Di samping itu Kota Padang Panjang memiliki lahan yang subur dan berada pada iklim yang sejuk sehingga bagaimanapun sektor ini tetap pantas dipertimbangkan menjadi sektor unggulan. Dari sisi pertumbuhan, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi satu-satunya Sektor yang tumbuh positif di masa pandemi Covid-19, yaitu tumbuh 1,29% tahun 2020 dan 4,99% pada tahun 2020.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sektor yang menjadi ukuran dari perkembangan kepariwisataan. Dari berbagai pendekatan analisis menunjukkan bahwa sektor ini pantas diunggulkan. Berdasarkan analisis Klassen, Sektor ini termasuk sektor maju. Menurut analisis LQ, sektor ini termasuk sektor unggul, Menurut analisis KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah) atau analisis shift share, sektor ini dinilai memiliki daya saing. Pertumbuhan sektor ini juga cukup menjanjikan yaitu di kisaran 7,23% sampai dengan 7,48% kecuali tahun 2020 yang



sempat anjlok di angka -12,04% akibat pandemi. Pariwisata sendiri juga menjadi misi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yaitu misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dengan demikian peningkatan pertumbuhan sektor ini perlu ditingkatkan di Kota Padang Panjang.

B. Masih Rendahnya Nilai Investasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik Relatif rendahnya kemampuan keuangan daerah mendorong Pemerintah Kota Padang Panjang untuk berupaya melaksanakan pembangunan dengan skema investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk meningkatkan investasi ini secara nasional sudah dilaksanakan Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) pada tanggal 30 Desember 2022. Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri sebelumnya juga sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Perkembangan investasi di Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir berjalan cukup baik dan cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang dari tahun 2018 terus mengalami penambahan. Namun demikian diperkirakan sebagian dari investasi tersebut adalah investasi yang sudah berjalan sebelumnya, yang kemudian menyesuaikan diri dan mendaftarkan NIB melalui sistem OSS. Dengan demikian maka pertumbuhan investasi di Kota Padang Panjang sebenarnya masih relatif rendah.

Harapan ke depan tentunya adalah terwujudnya penambahan investasi baru dalam jumlah yang signifikan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produksi di Kota Padang Panjang dan mendorong perekonomian Kota Padang Panjang. Sebelumnya Pemerintah Kota Padang Panjang sudah melakukan beberapa upaya untuk mengundang datangnya investasi ke Kota Padang Panjang. Di antaranya adalah menyediakan sejumlah Pra Studi Kelayakan investasi yang akan dipromosikan kepada para investor yang ada, di antaranya: Kawasan Wisata Terintegrasi Silaing Bawah (Rest Area, Gedung Multi Service, Library Knowledge Center, dll), Air Minum Dalam Kemasan, Ecopark Koto Katiak). Di samping itu Kota Padang Panjang juga masih memiliki sejumlah potensi lain yang kemungkinan bisa dibangun atau dikembangkan melalui investasi, seperti: kelengkapan bangunan Sport Center, kelengkapan bangunan Islamic center, kelengkapan



bangunan RSUD, Gedung Parkir, objek wisata baru, sekolah, perguruan tinggi, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

C. Penurunan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tuntutan utama yang menjadi tantangan bagi Kota Padang Panjang sebagai kota kecil, dalam upaya pencapaiannya, diperlukan dorongan dari berbagai instrumen diantaranya pengurangan ketimpangan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan, ketahanan pangan serta peningkatan industri kreatif yang berdaya saing.

Dalam pelaksanaannya, upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini dapat lebih efektif apabila difokuskan dan dikoordinasikan tingkat Kota, oleh karenanya penguatan peran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam upaya terciptanya harmonisasi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Penurunan kemiskinan di Kota Padang Panjang adalah isu yang sangat strategis karena dalam 5 tahun terakhir persentase penduduk miskin tidak mengalami penurunan yang berarti, sehingga perlu strategi dan kolaborasi dalam penurunan angka kemiskinan ini, hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah kesamaan data, karena saat ini data DTKS tidak lagi dapat dijadikan data dalam penanganan kemiskinan karena dalam data DTKS 60 % penduduk termasuk dalam data tersebut, meskipun data kemiskinan ekstrem Kota Padang Panjang nol, namun dari data P3KE masih ada masyarakat pada desil 1 sampai dengan desil 3 yang perlu dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah dalam penurunan angka kemiskinan. Persentase Penduduk miskin di Kota Padang Panjang tahun 2022 sebesar 5,14 %, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 (5,92%), namun tidak signifikan meskipun berbagai kegiatan telah dilakukan baik itu anggarannya dari APBD, APBN dan BAZNAZ.

Oleh sebab itu penurunan angka kemiskinan ini dijadikan isu strategis kota 3 tahun ke depan, Upaya yang harus dilakukan adalah pemakaian data yang sama dalam penanganan kemiskinan, kolaborasi antar sektor baik dari segi pendanaan, edukasi dan motivasi terhadap masyarakat miskin agar keluar dari kemiskinan, penanganan pengangguran, peningkatan Pendidikan masyarakat melalui kerja sama dengan universitas terbaik sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, mendapatkan pekerjaan sehingga dapat menimbulkan Multiplier effect bagi keluarga yang tinggal di Kota Padang Panjang, bantuan rumah tidak layak huni, bantuan bibit ternak,



bantuan UMKM, Pemberian Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat Padang Panjang, peningkatan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks dan luas sehingga bersifat multi dimensional yang dipengaruhi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah daerah Kota Padang Panjang mengingat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri di samping mampu memecahkan persoalan pengangguran sekaligus dapat mendatangkan devisa bagi Negara. Untuk itu diperlukan penyaluran yang baik agar dapat meminimalisir permasalahan di negara penempatan, Pemagangan ke luar negeri memberikan banyak peluang dalam pengurangan pengangguran. Ketika kembali ke daerah asal mereka membawa modal/uang yang cukup banyak sehingga akan memberikan efek samping domino bagi terbukanya lapangan usaha baru.

Di samping itu kegiatan Padat Karya sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam perluasan lapangan melalui pembentukan kelompok usaha melalui perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK), Usaha Sektor Informal melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi dan lebih tahan terhadap krisis. Namun usaha di sektor ini mayoritas masih banyak kendala yang dihadapi. Karena itu diperlukan pembekalan tentang kewirausahaan/manajemen usaha bagi mereka, perlu pemanduan dan bimbingan usaha dari pemerintah, karena hal ini akan memberikan pengaruh yang positif dalam pengembangan usaha yang dikelola.

D. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Salah satu komponen yang diukur dalam penghitungan IPM adalah Pengeluaran per Kapita. Pengeluaran per Kapita juga lazim dipakai sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pengeluaran per kapita, berarti terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Selanjutnya, hal tersebut bisa mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat.



Tahun 2021 pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang adalah sebesar 11.153.000,- per tahun. Angka ini lebih tinggi dari pengeluaran per kapita Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 11.130.000,- per tahun. Namun demikian, dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang berada pada posisi ke delapan.

Kota Padang Panjang pernah menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi di Sumatera Barat (tahun 2004 sampai dengan 2006). Artinya pendapatan per kapita masyarakat Kota Padang Panjang adalah yang tertinggi di Sumatera Barat, atau dengan kata lain tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang adalah yang tertinggi di Sumatera Barat.

Setelah tahun 2006 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat berpacu untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pemerintah Kota Padang Panjang pada dasarnya juga melakukan hal yang serupa. Namun, dengan keterbatasan potensi yang dimiliki dan karena berbagai faktor lain yang bersifat internal maupun eksternal, maka peningkatan pendapatan masyarakat Kota Padang Panjang tidak secepat beberapa daerah lain di Sumatera Barat. Dengan demikian tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang berada di bawah beberapa Kabupaten dan Kota lain di Sumatera Barat.

Pengeluaran per kapita masyarakat merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi capaian IPM, mengacu kepada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun capaian Pengeluaran Per kapita masyarakat Kota Padang Panjang lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi apabila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain, capai pengeluaran per kapita Kota Padang Panjang masih tergolong relatif rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat merupakan isu strategis yang perlu diatasi oleh Pemerintah bersama seluruh stakeholder di Kota Padang Panjang. Peningkatan pendapatan ini dapat dilakukan dengan menstimulasi sektor-sektor penting di Kota Padang Panjang, di antaranya Perdagangan, UMKM, Pertanian dan Pariwisata.

2.3.3.4 Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat

A. Mulai Lunturnya Nilai-Nilai Adat Dan Budaya Di Tengah Masyarakat

Adat dan budaya beserta nilai-nilai dan atribut yang terkandung didalamnya merupakan identitas sebuah kelompok masyarakat, baik masyarakat dalam konteks etnis maupun bernegara. Adat budaya menjadi patron di samping agama bagi suatu kelompok masyarakat dalam menjalankan semua aspek kehidupannya. Pengikisan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat sudah menjadi fenomena yang tak terelakkan sering menguatnya arus globalisasi yang terus bergerak. Globalisasi atau



proses integrasi nasional dalam bentuk penetrasi ilmu pengetahuan, kebudayaan, nilai-nilai yang melintasi sekat-sekat dan batas negara. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi adalah faktor utama dalam mendorong arus globalisasi tersebut.

Kemajuan internet beserta piranti canggih yang mendukungnya membuat kita dapat mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain dengan sekejap. Juga tak sulit untuk mengetahui budaya dan kebiasaan yang melekat pada warga dunia lainnya hanya bermodal seperangkat gadget di telapak tangan.

Globalisasi sebagai bagian dari dinamisasi perkembangan peradaban umat manusia ibarat dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, globalisasi mempercepat arus pertukaran informasi dan transfer ilmu pengetahuan. Disisi lain penetrasi informasi yang dibawa arus globalisasi yang sangat kuat mempunyai daya rusak bagi siapa pun yang tak memiliki filter, termasuk daya rusak yang mengancam nilai-nilai budaya dan tradisi kelompok masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi informasi, remaja kita di Padang Panjang bisa lebih mengenal budaya kontemporer bernama K-Pop dari semenanjung Korea ketimbang adat budaya etnisnya sendiri yaitu budaya Minangkabau yang tak kalah unggul dan luhur berbasis kondisi masyarakat dan kearifan lokal kita. Kenapa K-Pop lebih menarik bagi remaja, karena K-Pop dikenalkan bukan Cuma sebagai sebuah budaya atau gaya hidup bangsa Korea tapi dikemas dengan serius sebagai industri untuk keuntungan ekonomi dan mempromosikan keunggulan Korea di tengah warga dunia sehingga terlihat unggul, wah dan lebih baik. Padahal nilai-nilai yang ditawarkan dalam budaya kontemporer mereka belum tentu cocok dengan kita yang menerima.

Maka, pengikisan nilai-nilai adat dan budaya di tengah masyarakat akan selalu menjadi isu strategis dalam konteks upaya membangun sumber daya manusia. Karena hal itu sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, salah satunya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal itu, mesti dipikirkan upaya-upaya berupa kebijakan, strategi yang mampu menahan proses luntarnya nilai adat budaya di tengah masyarakat melalui program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pemilik adat budaya dengan menumbuhkan sinergi disemua lini pemangku kepentingan dan sektor terkait.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Lembaga adat dalam memainkan peran edukatif di tengah masyarakat, Di samping itu penguatan peran masjid atau tempat ibadah lainnya di Kota Padang Panjang, tidak hanya sebagai tempat melaksanakan aktivitas ibadah dan keagamaan



namun diperluas sebagai *community center*, menjadi wadah beragam aktivitas sosial kemasyarakatan. Sehingga seluruh kalangan masyarakat menjadi dekat dengan tempat ibadahnya. Hal itu dapat dilakukan karena nilai adat budaya juga terkait erat dengan nilai-nilai keagamaan.

B. Masih Terbatas Pemahaman Masyarakat Dalam Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan

Agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan seorang anak manusia, karena agama akan membimbing manusia menerima dan menyempurnakan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang tercermin dalam segala ucapan, sikap dan tindak tanduk yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi panduan sikap moral, cara berpikir, menjalin interaksi sosial, dan lain-lain. Tak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang lepas dari sentuhan agama. Agama menghendaki setiap pemeluknya menjalani segala aturan dengan lurus dan taat untuk menciptakan keteraturan dan dirinya dan di tengah masyarakat.

Seperti halnya adat, budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sebuah kelompok masyarakat, maka agama juga tak lepas dari kemungkinan akan terabaikan oleh pemeluknya. Hal itu bisa saja dalam bentuk menurunnya bentuk pengamalan nilai-nilai keberagamaan yang dipeluknya. Pemeluk agama lebih cenderung menampilkan simbol daripada mengimplementasikan substansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi ini tentu menjadi sebuah isu strategis yang tak bisa diabaikan di tengah masyarakat. Karena kehidupan beragama baik individu maupun komunal mempunyai pengaruh terhadap aspek kehidupan lainnya.

Saat ini kita lihat banyak masjid yang dibangun dengan begitu megah dan mewah namun minim jamaah yang sholat atau melakukan aktivitas ibadah dalamnya. Di sisi lain, tak jarang aktivitas keagamaan lebih mengedepankan aspek seremonial duniawi daripada pada substansi. Misalnya perlombaan MTQ berlangsung setiap tahun dengan berbagai tingkatan, namun mereka yang buta huruf dan tak mampu baca Al Quran terus ada. Anak muda makin jauh dari kitab sucinya dan makin teralihkan oleh pesona budaya pop yang bisa diakses dari genggamannya.

Secara umum rendahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan di Kota Padang Panjang mungkin belum terlalu mengkhawatirkan karena masyarakat pada dasarnya masih menjalankan aktivitas keagamaan, tetapi apakah setiap individu telah mengamalkan nilai keagamaan yang dianutnya dengan baik perlu pendalaman lebih lanjut. Tetapi yang bisa dipastikan arus modernisasi



dengan segala eksesnya tentu akan mempengaruhi Sebagian orang dalam menjalankan nilai agama yang dianutnya. Maka yang perlu dilakukan adalah upaya antisipasi dengan optimalisasi peran-peran Lembaga keagamaan guna mengantisipasi ancaman penurunan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Disini pemerintah juga mesti 'hadir' dengan strategi kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya mendorong pelaksanaan pendidikan berkarakter berbasis nilai-nilai keagamaan dari berbagai jenjang usia, Termasuk melakukan upaya mendekatkan masyarakat dengan tempat ibadahnya dengan penguatan fungsi tempat ibadah sebagai pusat aktivitas sosial kemasyarakatan.

C. Belum Optimalnya Layanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah antara lain Potensi terjadinya permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat yang disebabkan oleh belum optimalnya implementasi peraturan daerah dan angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum di Kota Padang Panjang masih relatif rendah, namun penegakan perda belum optimal.

Hal yang perlu diantisipasi adalah pelaksanaan agenda Pemilu 2024, dan Pemilukada serentak 2024. Tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024 memang tidaklah berakhir setelah pemungutan suara. Masih ada banyak tahapan berikutnya yang justru krusial, mulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara, penentuan hasil pemilu, saling gugat di Mahkamah Konstitusi, bahkan tidak tertutup kemungkinan ada pilpres putaran kedua jika pasangan calon presiden-wakil presiden berjumlah lebih dari dua. Tahapan pemilu dan Pemilukada baru berakhir setelah semua yang dipilih dilantik. Pemilu dan Pemilukada serentak jika tidak disiapkan dan antisipasi akan berpotensi kurang kondusifnya ketenteraman, ketertiban umum wilayah di samping itu pelaksanaan pemilukada juga berpengaruh terhadap penganggaran APBD.

D. Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan Sosial

Peningkatan penyelenggaraan layanan Kesejahteraan Sosial (PSKS) ditujukan dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).



Dari 26 jenis PPKS, jenis PPKS berdasarkan data dari Dinas Sosial PPKB P3A masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kota Padang Panjang adalah Lanjut usia terlantar, Penyandang disabilitas dan Perempuan rawan sosial ekonomi. Pada saat program dan kegiatan yang kita laksanakan berupa bedah kamar lansia, bantuan permakanan untuk lansia terlantar dan disabilitas, bantuan UMKM dan bedah warung untuk perempuan rawan sosial. Oleh sebab itu untuk Perencanaan tiga tahun ke depan hal ini kita jadikan isu strategis supaya angka PPKS di Kota Padang Panjang mengalami penurunan.

2.3.3.5 Isu Kualitas Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup

A. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur kota dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tersedianya infrastruktur kota yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi saat ini sebagian infrastruktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam layanan infrastruktur drainase masih terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga terdapat genangan air jika terjadi hujan yang cukup lama dan berdampak terhadap pemukiman masyarakat, oleh sebab itu perlu penanganan secara tuntas, layanan infrastruktur jalan dimana pembangunan trotoar yang belum tuntas dan belum ramah disabilitas, fasilitas keselamatan lalu lintas, lampu jalan, pembukaan akses jalan lingkar selatan, layanan infrastruktur SDA dilihat dari beberapa irigasi yang mengalami kerusakan di beberapa titik, layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layan penduduk terhadap air bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,98 persen tahun 2022 sedangkan target nasional 100 persen di tahun 2024, layanan infrastruktur air limbah dengan cakupan pelayanan baru mencapai 89,05 persen, target dalam SSK yang harus dicapai 90 persen tahun 2027.

Peningkatan layanan infrastruktur dasar merupakan isu strategis yang perlu diatasi oleh Pemerintah bersama seluruh stakeholder di Kota Padang Panjang. Pemerintah kota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan layanan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh luas wilayah yang sangat kecil, penambahan penduduk



adalah sesuatu yang sulit dihindari. Untuk menyikapi hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh stakeholder kota. Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyediakan sarana dan prasarana perkotaan dan aksesibilitas yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, ke depan diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Percepatan penyelesaian Revisi Perda RTRW;
- 2) Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi pendidikan, perdagangan, pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman, serta penyusunan RDTR;
- 3) Peningkatan nilai ekonomi kota melalui pengembangan fungsi-fungsi ekonomi khusus seperti pengembangan kawasan industri kapur, kawasan industri kulit, makanan ringan, destinasi wisata baru, rest area dan sentra oleh-oleh serta pengembangan jasa pendukung pariwisata lainnya.

C. Peningkatan Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan

Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: Penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), pengelolaan persampahan karena saat ini TPA kita sudah penuh, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai salah satu upaya untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca terutama pada sektor-sektor prioritas yang berpengaruh besar yaitu sektor pertanian, Industry, pengolahan limbah dan transportasi. Oleh sebab itu untuk Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan ini menjadi isu strategis yang akan dilaksanakan tiga tahun ke depan untuk itu diperlukan rencana penanganan terpadu terkait penanganan kawasan kumuh (RP2KP), koordinasi lintas sektor dalam rangka penanganan kawasan kumuh, Pemenuhan status lahan sesuai aturan, peningkatan Kuantitas dan kualitas PSU, peningkatan penanganan dan pengurangan sampah, peningkatan sarana, prasarana pengelolaan sampah kepedulian dan peningkatan peran aktif masyarakat, bank sampah dalam pengelolaan sampah,

Di samping itu untuk Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan laboratorium, karena laboratorium belum akreditasi sehingga pengujian dilakukan di laboratorium lain yang memakan jarak dan waktu, sehingga mempengaruhi kualitas sampai yang diuji, edukasi terhadap masyarakat tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup peninjauan kerja sama dengan daerah tetangga terkait pengendalian pencemaran sungai,



pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan terbatasnya lahan untuk penambahan RTH. Oleh sebab itu Peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan menjadi isu strategis yang harus ditangani 3 tahun ke depan agar terwujudnya lingkungan yang bersih dan nyaman.

2.4 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Jenis Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang

NO	BIDANG SPM	JENIS PELAYANAN DASAR SPM
1.	Pendidikan	d. Pendidikan Anak Usia Dini e. Pendidikan Dasar f. Pendidikan Kesetaraan
2.	Kesehatan	m. Pelayanan kesehatan ibu hamil n. Pelayanan kesehatan ibu bersalin o. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir p. Pelayanan kesehatan balita q. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar r. Pelayanan kesehatan pada usia produktif s. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut t. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi u. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus v. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat w. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi x. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human immunodeficiency Virus</i>)
3.	Pekerjaan Umum	c. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari d. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Perumahan Rakyat	c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana d. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	f. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban g. Pelayanan informasi rawan bencana h. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana i. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana j. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6.	Sosial	f. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti g. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti h. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti



NO	BIDANG SPM	JENIS PELAYANAN DASAR SPM
		i. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti j. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana korban bencana

Sumber : Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2020

Pelaporan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk penilaian kinerja perangkat daerah, untuk pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, serta sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Capaian penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Capaian Penerapan SPM Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Capaian Penerimaan dan Ketahanan Gizi Rata-rata Penderita Gizi Kurang Tahun 2020-2024							
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SPM BIDANG PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	2.230 orang	2.109 orang	2.193 orang	2.393 orang	2.256 orang
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	8.480 orang	9.249 orang	9.910 orang	12.189 orang	9.415 orang
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	181 orang	169 orang	407 orang	437 orang	437 orang
SPM BIDANG KESEHATAN							
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan	977 orang	929 orang	918 orang	906 orang	767 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pelayanan K4 di fasilitas kesehatan					
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	997 orang	955 orang	893 orang	923 orang	767 orang
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	988 orang	940 orang	848 orang	911 orang	775 orang
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita usia 0– 59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.124 orang	2.464 orang	2.611 orang	3.234 orang	3.234 orang
5	Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar 7 sampai dengan 15 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar di satuan pendidikan dasar	11.792 orang	9.696 orang	10.478 orang	2.896 orang	18.479 orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung berusia 15 s.d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	7.078 orang	11.587 orang	25.256 orang	33.166 orang	25.224 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung berusia	2.497 orang	3.028 orang	2.215 orang	4.340 orang	4.695 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun					
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	5.706 orang	2.863 orang	3.494 orang	11.487 orang	4.624 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	0	621 orang	775 orang	726 orang	1.261 orang
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	578 orang	756 orang	1.406 orang	1.483 orang	1.624 orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	166 orang	115 orang	119 orang	123 orang	139 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency</i>)	1.286 orang	1.345 orang	1.344 orang	1.516 orang	1.955 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	(Human Immunodeficiency Virus)	Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan					
SPM PEKERJAAN UMUM							
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	9.187 orang	48.358 orang	51.704 orang	58.935 orang	61.559 orang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah	9.287 orang	48.529 orang	52.226 orang	53.582 orang	61.009 orang
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT							
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0
2	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	0	0	0	0	0
SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	143 orang	1 orang	90 orang	1 orang	32 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Kabupaten/Kota					
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	81 orang	15 orang	37 orang	5 orang	12 orang
3	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Na	59.999 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Na	53.618 orang	3.000 orang	1.882 orang	1.882 orang
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	112 orang	53.618 orang	59.999 orang	0	326 orang
SPM BIDANG SOSIAL							
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	35 orang	81 orang	259 orang	244 orang	330 orang
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	15 orang	16 orang	16 orang	13 orang	10 orang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	90 orang	127 orang	324 orang	151 orang	355 orang



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		di luar panti sosial					
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial	0	4 orang	3 orang	67 orang	9 orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada Saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	0	123 orang	296 orang	380 orang	1.037 orang

Berdasarkan hasil pelaporan SPM melalui sistem pelaporan secara elektronik Departemen Dalam Negeri melalui aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, dapat dilihat capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Padang Panjang tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	BIDANG SPM	TARGET (%)	REALISASI (%)	KATEGORI
1	Pendidikan	100	100	Tuntas Paripurna
2	Kesehatan	100	100	Tuntas Paripurna
3	Pekerjaan Umum	100	99,95	Tuntas Paripurna
4	Perumahan rakyat	100	100	Tuntas Paripurna
5	Ketentraman Ketertiban	100	97,40	Tuntas Utama
6	Sosial	100	100	Tuntas Paripurna

Sumber; Laporan SPM Kota Padang Panjang 2024, 2025

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang menunjukkan capaian yang sangat baik secara umum. Dari enam bidang yang menjadi fokus pemantauan, lima bidang berhasil merealisasikan target secara penuh, yaitu mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas sektor layanan publik telah menjalankan program-programnya secara optimal sesuai dengan ketentuan dan indikator yang telah ditetapkan.

Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat, Sosial, serta Pekerjaan Umum (dengan realisasi 99,95%) seluruhnya masuk dalam kategori



“Tuntas Paripurna”, yang menunjukkan pemenuhan menyeluruh terhadap indikator layanan dasar. Khusus bidang Pekerjaan Umum, meskipun terdapat sedikit selisih sebesar 0,05% dari target, capaian ini masih dianggap sangat memuaskan dan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas layanan.

Satu-satunya bidang yang belum mencapai realisasi 100% adalah Ketentraman dan Ketertiban, dengan capaian 97,40%. Meskipun masih tergolong tinggi, bidang ini dikategorikan dalam “Tuntas Utama”, yang berarti sudah mendekati pemenuhan penuh, namun masih terdapat ruang perbaikan. Beberapa kemungkinan yang dapat mempengaruhi capaian ini antara lain faktor keamanan wilayah, keterbatasan personel lapangan, atau tantangan sosial yang dinamis.

Secara agregat, rata-rata realisasi seluruh bidang mencapai 99,56%, yang mencerminkan komitmen kuat dan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan SPM berjalan efektif dan efisien, dengan hasil yang mendekati sempurna.

Capaian ini juga menjadi indikasi bahwa perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program di berbagai sektor telah dikelola dengan baik. Namun demikian, tetap diperlukan evaluasi berkala, terutama untuk bidang-bidang yang belum mencapai target maksimal, agar ke depannya seluruh sektor dapat mencapai kategori Tuntas Paripurna secara menyeluruh.

2.5 CAPAIAN SDGs TAHUN 2024

Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang berperan aktif dalam menetapkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dituangkan dalam dokumen *Transforming Our World: Program Aksi Pembangunan Berkelanjutan 2030*. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tentang pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan TPB adalah untuk tetap menjaga pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan dan pembangunan yang inklusif, serta mewujudkan pemerintahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan untuk mendukung kualitas masyarakat, kehidupan dari generasi ke generasi. TPB merupakan komitmen global dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencakup 17 tujuan, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;



5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

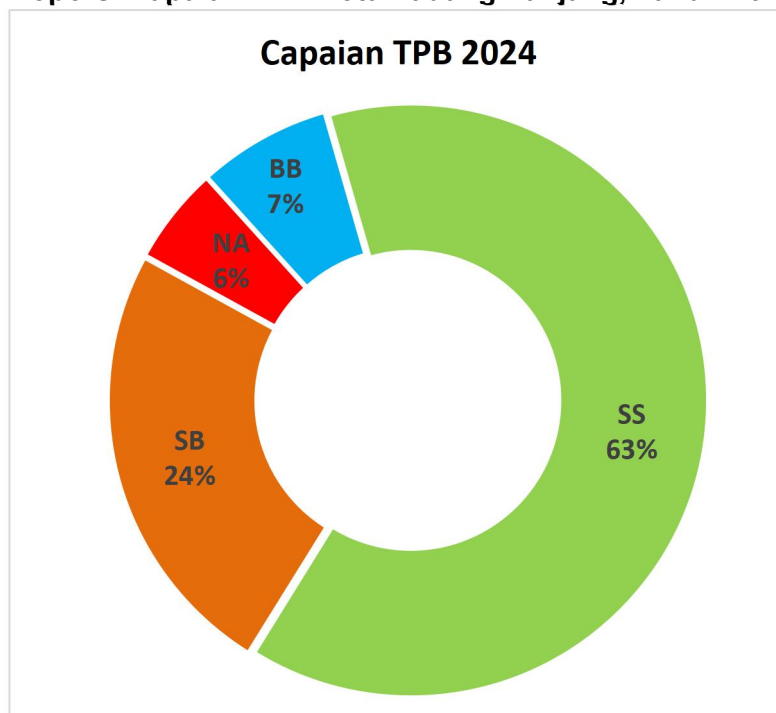
Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Kategori evaluasi capaian TPB Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);
3. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi data tidak tersedia sehingga belum dapat dievaluasi pencapaian target (NA); dan
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB);

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Padang Panjang pada periode RPJMD. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB dengan kategori SB, NA dan BB.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 63%. Bila dilihat dari 4 kategori di atas, proporsi pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang secara umum didominasi dengan kategori SS, sedangkan untuk kategori SB, NA dan BB berturut-turut adalah 25%, 5% dan 7%. Komposisi pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.43
Proporsi Capaian TPB Kota Padang Panjang, Tahun 2024



Keterangan:

SS : Sudah terlaksana dan Sudah tercapai

SB : Sudah terlaksana tetapi Belum tercapai

NA : Sudah terlaksana tetapi data tidak tersedia

BB : Belum terlaksana dan belum mencapai target

Terdapat 130 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 1 (tanpa kemiskinan) dan 3 (kehidupan sehat dan sejahtera) 16 indikator dan 24 indikator seperti terlihat pada Tabel 4.5. Sementara itu, terdapat TPB yang tidak mempunyai capaian SS yaitu TPB 7 Menjamin Akses Energi.

Terdapat 51 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini adalah TPB 3 kehidupan sehat dan sejahtera dengan 9 indikator. Rincian masing-masing indikator TPB dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.68
Ketercapaian Pelaksanaan TPB Kota Padang Panjang

No TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BB
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	24	16	6	-	2



No TPB	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BB
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	10	1	-	-
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	24	9	1	-
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	7	5	1	-
TPB 5	Kesetaraan gender	14	8	4	2	-
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	16	11	4	-	1
TPB 7	Menjamin akses energi	2	-	-	2	-
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	10	7	2	-
TPB 9	Infrastruktur, industri dan inovasi	10	6	3	1	-
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	6	6	-	-	-
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	12	6	1	-	4
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	2	-	-	2
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	1	-	-	1
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1	-	1
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	14	6	-	1
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	7	4	1	3
Total		207	130	51	10	15
Persentase			63%	25%	5%	7%

Sumber : KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, 2025

BAB III

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian regional, nasional maupun global, telaah terhadap kebijakan ekonomi nasional di daerah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kota Padang Panjang, serta arah dan kebijakan ekonomi yang direncanakan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029.

3.1.1 Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda, yaitu tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995 sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3.1

Sejarah Perekonomian Indonesia Tahun 1968, 1973, 1977, 1980 dan 1995



Namun demikian, pada awal tahun 2020, dunia dilanda *unprecedented shock* pandemi COVID-19 sehingga berdampak terhadap penurunan kinerja perekonomian global, termasuk Indonesia. Melalui berbagai kebijakan yang telah



dilakukan, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 persen.

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah dinamika global dan domestik, Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk saat pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi pada tahun 2020. langkah cepat tanggap diwujudkan sebagai respons kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif untuk meredam dampak gejolak ekonomi global dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan meskipun sempat berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Sebelum pandemi *Corona Virus Disease 2019*, pencapaian *Gross National Income* per kapita tahun 2019 menjadikan Indonesia masuk ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Namun demikian, adanya pandemi mengakibatkan penurunan *Gross National Income* per kapita sehingga Indonesia turun menjadi negara *Lower Middle Income Countries*. Berbagai upaya pemulihan yang dilakukan menyebabkan perekonomian Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif, ditandai oleh peningkatan *Gross National Income* perkapita dan menjadikan Indonesia kembali ke dalam negara *Upper-Middle Income Countries*. Pencapaian pembangunan ekonomi selama beberapa tahun terakhir turut didukung dengan berbagai capaian positif, di antaranya (1) peningkatan pola konsumsi pangan rumah tangga, (2) peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, (3) penyediaan lapangan kerja per tahun, (4) peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian, (5) pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, (6) nilai ekspor produk industri pengolahan dan realisasi investasi luar Jawa, serta (7) peningkatan penerimaan pajak.

3.1.2 Perkembangan Global

Secara umum dalam periode tahun 2025–2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian hal ini dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2
Gambaran Perekonomian Global Tahun 2025-2029



Tantangan Pembangunan Global Tahun 2026 antara lain :

1. Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mempengaruhi perekonomian global antara lain :
 - a) Peningkatan tarif impor Amerika Serikat.
 - b) Peningkatan produksi minyak AS yang mendorong penurunan harga minyak
 - c) Kebijakan suku bunga The Fed yang cenderung tinggi.
 - d) Penguatan dolar dan pelemahan nilai tukar negara lain.
2. Perekonomian China Masih Mengalami Perlambatan
 - a) Perekonomian China saat ini masih mengalami tren perlambatan. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,0 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya
 - b) Beberapa faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi China, yaitu permintaan domestik yang masih lemah dan penurunan kinerja sektor perumahan yang terus berlanjut
3. Kinerja Positif *Emerging Market*, khususnya perekonomian Vietnam
 - a) Perekonomian Vietnam terus menunjukkan kinerja positif, dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 7,09 persen.
 - b) Kinerja perekonomian Vietnam didukung oleh relokasi sebagian proses produksi dari China.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Regional

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 tumbuh melambat. Pertumbuhan pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 4,04% (yoy) melambat



dibandingkan dengan triwulan III 2024 sebesar 4,33% (yoy). Hal tersebut didorong oleh kinerja pertanian yang menurun terutama padi hingga penurunan kinerja transportasi udara seiring dengan mobilitas dan konsumsi rumah tangga yang melambat. Secara keseluruhan tahun 2024, perekonomian Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,62% (yoy). Penurunan sejalan dengan hampir seluruh Lapangan Usaha utama mengalami perlambatan. Penyumbang utamanya yaitu kinerja pertanian yang menurun akibat dampak bencana alam. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan global juga menahan kinerja PMTB sehingga melambat pada tahun 2024. Namun demikian, meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah kunjungan wisatawan yang terakselerasi menopang pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Inflasi Sumatera Barat pada triwulan IV 2024 sebesar 0,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 yang sebesar 1,52 % (yoy). Penurunan harga komoditas pangan terutama komoditas cabai merah yang didukung pasokan dari Jawa serta kembali lancarnya distribusi pangan pasca perbaikan akses jalan utama menjadi faktor stabilnya inflasi. Lebih lanjut, inflasi yang terjaga rendah juga diperkuat oleh sinergi pengendalian inflasi TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota.

Kondisi lapangan kerja Sumatera Barat membaik. Hal ini tercermin dari meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Agustus 2024, TPAK Sumatera Barat tercatat sebesar 70,28%, lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 69,61%. Sementara TPT periode Agustus 2024 sebesar 5,75%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Membaiknya kondisi ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja yang tetap terjaga.

Sejalan dengan perbaikan lapangan kerja, kesejahteraan penduduk Sumatera Barat lebih baik dibandingkan tahun 2023. Kondisi ini tercermin dari persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada September 2024 sebesar 5,42%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar 5,95%. Perbaikan tersebut terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan persentase penduduk miskin yang menurun. Kondisi penduduk miskin secara umum juga lebih baik yang ditunjukkan dengan kesenjangan yang lebih kecil antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi yang lebih baik ini juga diindikasikan merata sejalan dengan kesenjangan antar penduduk miskin yang semakin mengecil.

Proyeksi indikator makro daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2026

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Capaian 2024	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	5,70
3	PDRB ADHB Per Kapita (Juta)	57,05	69,59
4	Indeks Gini (Rasio)	0,287	0,281
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,42	5,49
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75	5,44
8	IPM	76,43	77,48
	a. Usia Harapan Hidup	74,37	74,83
	b. Harapan Lama Sekolah	14,30	14,62
	c. Rata-Rata Lama Sekolah	9,44	9,58
	d. Pengeluaran per Kapita	11.718	12.074

Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2026

Kondisi perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2026 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
Padang Panjang memiliki potensi alam yang terbatas, seperti lahan pertanian dan sumber daya alam lainnya. Hal ini membatasi ekspansi sektor industri dan pertanian, sehingga yang berkembang adalah industri skala kecil. Akibatnya sulit untuk melakukan produksi skala besar.
2. Keterbatasan Ketersediaan Lahan dan Pola Kepemilikan Lahan
Ketersediaan lahan yang terbatas dan pola kepemilikan lahan yang kompleks menjadi hambatan dalam pengembangan investasi. Hal ini mempengaruhi daya tarik Padang Panjang sebagai tujuan investasi, terutama untuk sektor industri dan pariwisata
3. Nilai tambah Produk Pertanian Rendah
Nilai tambah produk-produk pertanian di Kota Padang Panjang masih belum dimanfaatkan menjadi bahan-bahan olahan secara optimal sehingga keragaman hasil produk hortikultura belum memungkinkan memiliki nilai tambah (*added values*).
4. Tingginya angka kemiskinan dan indeks Gini



Relatif tingginya angka kemiskinan di Kota Padang Panjang membutuhkan upaya ekstra untuk pengentasannya. Ditambah lagi dengan indeks Gini yang masih tergolong tinggi membuat kesenjangan di Kota Padang Panjang masih harus menjadi perhatian serius.

5. Ketergantungan pada Sektor Tertentu

Ekonomi Padang Panjang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan pendidikan, perdagangan dan jasa. Diversifikasi sektor ekonomi perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan daya tahan ekonomi daerah.

6. Tantangan dalam Pengembangan UMKM

Meskipun UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam hal akses permodalan, pemasaran, dan manajemen usaha. Peningkatan kapasitas dan dukungan terhadap UMKM perlu menjadi prioritas.

7. Relatif lambatnya pertumbuhan pendapatan daerah

Pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini tentunya mempengaruhi pelaksanaan program prioritas daerah ke depan di tahun 2026.

8. Perubahan iklim.

Perubahan iklim akibat pengaruh pemanasan global memberikan *multiplier effect* pada dunia. Kecenderungan perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam para petani, sehingga mengganggu kerja para petani dan mengakibatkan kerugian finansial.

9. Tingkat kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Tingkat kerusakan lingkungan dan bencana alam di Kota Padang Panjang termasuk tinggi. Kerusakan itu, misalnya, terlihat dari semakin tidak subur nya lahan-lahan yang ditanami para petani. Hal ini tidak lepas dari pola tanam yang tidak bagus dan penggunaan pupuk serta obat-obatan kimia yang berlebihan. Konsekuensinya, produktivitas lahan di Kota Padang Panjang mengalami penurunan setiap tahun. Selain itu, Kota Padang Panjang termasuk bagian dari jalur yang rawan bencana alam, karena kedudukan wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan dataran tinggi menjadikan rawan terhadap bencana tanah longsor.

Selain tantangan tersebut, kita juga melihat prospek perekonomian Kota Padang Panjang Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pengembangan Sektor Pariwisata

Padang Panjang memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya tergali, seperti wisata alam dan budaya. Pengembangan sektor ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Investasi di Sektor Pendidikan dan Ekonomi Kreatif



Dengan reputasi sebagai kota pendidikan, Padang Panjang dapat menarik investasi di sektor pendidikan dan ekonomi kreatif. Pengembangan sektor ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi lokal.

3. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi
Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi informasi. Hal ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan mendukung efisiensi ekonomi.
4. Kemudahan dalam Proses Perizinan
Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses perizinan usaha, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung dan layanan perizinan online. Hal ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan mendukung pertumbuhan UMKM
5. Meningkatnya implementasi *e-commerce* yang mengubah pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi sehingga berpengaruh terhadap peran pasar tradisional. *E-commerce* juga meningkatkan persaingan produk UMKM dengan produk lain dari berbagai belahan dunia.
6. Peningkatan inovasi dan upaya mendapatkan investasi dalam pelaksanaan pembangunan.
7. Optimalisasi posisi strategis Kota Padang Panjang sebagai Kota Perlintasan dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana perdagangan dan jasa (Pendidikan, Kesehatan, MICE, kuliner, dll.).

3.1.5 Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 (KEM PPKF 2026)

KEM-PPKF 2026 memiliki makna strategis sebagai arah dan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal pertama yang disusun oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024. Dokumen ini semakin menegaskan komitmen dan harapan Pemerintah guna mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045—menjadi Bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan semangat di dalam mewujudkannya. kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk merespons lanskap perekonomian global yang tengah mengalami perubahan cepat dan penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia–Ukraina, situasi di Timur Tengah, serta dampak perubahan iklim menimbulkan risiko stagflasi dan ketimpangan ekonomi global. Globalisasi bergeser menjadi fragmentasi dan persaingan antarnegara, ditandai dengan meningkatnya proteksionisme, orientasi “*inward looking*”, dan prinsip “*my country first*”. Kerja sama bilateral dan multilateral yang dibangun sejak pasca-Perang Dunia II mulai runtuh, sementara blok perdagangan dan investasi ditinggalkan. Akibatnya, rantai

pasok global terganggu, risiko dan biaya transaksi meningkat, serta ekspor-impor melemah. Volatilitas global memicu arus ke luar modal asing, menekan nilai tukar, mendorong inflasi, dan memaksa sejumlah negara untuk mempertahankan suku bunga di level yang tetap tinggi.

Guna menghadapi ketidakpastian global sekaligus melaksanakan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah akan memperkuat stabilitas ekonomi domestik melalui penguatan diplomasi dan kolaborasi antarnegara. Pemerintah akan mendorong negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi yang lebih progresif, terbuka, dan adil, baik melalui perjanjian bilateral dan multilateral. Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan ekonomi dan fiskal yang responsif dan inklusif guna melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Insentif dan paket kebijakan fiskal, serta dukungan pembiayaan akan diberikan pada sektor-sektor prioritas dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga keberlangsungan usaha dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, program perlindungan sosial juga akan terus diperkuat melalui bantuan sosial, subsidi energi, dan jaring pengaman untuk kelompok rentan guna menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat.

Secara umum arah kebijakan ekonomi fiskal Pemerintah Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3 arah kebijakan ekonomi fiskal Pemerintah Tahun 2026



Sumber: KEM PPKE 2026 (Bappenas)

Arah kebijakan ekonomi fiskal Pemerintah Tahun 2026 telah diturunkan lebih lanjut dalam bentuk arah kebijakan perwilayah. Arah kebijakan ekonomi fiskal untuk Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)
2. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)



3. Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perikanan)
4. Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)
5. Kesehatan (Indeks Kesehatan)

3.1.6 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2026

Berdasarkan perkembangan, tantangan dan prospek ekonomi lokal dan regional serta merujuk pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2026, maka secara umum arah kebijakan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2026 adalah :

1. Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian
2. Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan strategis.
3. Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan Usaha Mikro
4. Mendorong penguatan pelaku usaha mikro dalam bentuk penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, kemudahan perizinan dan akses modal;
5. Meningkatkan target belanja modal dan belanja infrastruktur untuk peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) daerah;
6. Menjaga kepatuhan pemenuhan *earmarking* PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas
7. Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular;
8. Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;
9. Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum;
10. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban *earmarking* pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.
11. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar, peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian/perikanan;
12. Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian/perikanan;
13. Penguatan kerja sama antar daerah; Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.



14. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan
15. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRB, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.
16. Penguatan DAU *earmarked* dan evaluasi *mandatory spending* sektor pendidikan;
17. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;
18. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRB, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah;
19. Meningkatkan persentase *earmarking* pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
20. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;

Sandingan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dengan Kota Padang Panjang Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.2 berikut:



Tabel 3.2
Sandingan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dengan Kota Padang Panjang Tahun 2026

Wilayah	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)			Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)			Ketahanan Pangan						Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)			Kesehatan (Indeks Kesehatan)		
							Pertanian			Perikanan								
Kinerja																		
	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024 (NTP)	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026	2024	Target 2025	Target 2026
Sumatera Barat	4.36%	4,69%-5,19%	4,8% - 5,2%	5.97%	4,5%-5,1%	3,39%-4,39%	123.74	Diatas rata-rata Nasional	Diatas kenaikan rata-rata Nasional	95.64	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional	74.41	Diatas rata-rata Nasional	80-89	86.1	Diatas rata-rata Nasional	Diatas rata-rata Nasional
Padang Panjang							Nilai Tukar Tanaman Pangan (NTPP)			Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)			SPM Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
	4.52%	5.15%	5.95%	5.31%	4.71%	4.11%	NA	102.96%	103.06%	NA	108.27%	108.37%	77.98	82.59	84.25	74.48	76.17	77.01
Karakteristik																		
Sumatera Barat	Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran IV (Indeks Regional Wellbeing di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTP di atas rata-rata			Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTN di bawah rata-rata			Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Padang Panjang	Kuadran III (Efisien dan Kapabilitas Ekonomi Rendah) Kuadran III pertumbuhan (pertumbuhan dan belanja modal rendah)			Kuadran IV (Indeks Regional Wellbeing di atas rata-rata dan besaran APBD di bawah rata-rata)			Kuadran II (Belanja Pangan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTP di atas rata-rata			Kuadran II (Belanja Perikanan Rendah, Produktivitas Tinggi) NTN di bawah rata-rata			Kuadran IV (SPM Pendidikan Tinggi, Kapasitas Fiskal Rendah)			Kuadran III (Indeks Kesehatan Rendah, Kapasitas Fiskal Rendah)		
Dukungan Pemda																		
Sumatera Barat	Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian seperti kelapa, kelapa sawit;			Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas			Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan			Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan			Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar			Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain		



Wilayah	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
	- Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan komoditas unggulan perikanan budidaya dan tambak rakyat; - Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; - Mendorong penguatan reformasi struktural seperti kemudahan izin ekspor serta jaminan untuk pelaku UMKM; - Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuartal lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah; - Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular; - Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; - Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; - Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	lainnya.	sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNPB agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.	pendidikan; - Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. - Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan; - Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan	melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; - Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; - Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; - Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.



Wilayah	Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Ketahanan Pangan		Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	Kesehatan (Indeks Kesehatan)
			Pertanian	Perikanan		
Padang Panjang	Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; • Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian; • Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan strategis ; • Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan Usaha Mikro; • Mendorong penguatan pelaku usaha mikro dalam bentuk penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, kemudahan perizinan dan akses modal; • Meningkatkan target belanja modal dan belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.	Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa/kelurahan mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; • Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.	Penguatan fiskal daerah melalui peninjauan sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar, peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya. • Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan pertanian	Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan; • Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar, peningkatan produksi dan distribusi hasil pertanian; • Penguatan kerja sama antar daerah; • Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan;	Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRB, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan;	Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; • Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRB, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah; • Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;

Disamping arah kebijakan ekonomi secara umum, arah kebijakan ekonomi Padang Panjang secara lebih terperinci merupakan penjabaran dari arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Berikut disajikan arah kebijakan Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2026 yang telah disandingkan dengan Arah Kebijakan Ekonomi pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Tabel 3.3
Sandingan Arah Kebijakan Ekonomi RPJMD dengan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026

SASARAN RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RKPD 2026
1	2	3	4
S2.1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal	ST2.1.1 : Peningkatan kapasitas perdagangan	Peningkatan ketrampilan dan literasi digital bagi pelaku usaha perdagangan (transformasi digital)	Peningkatan ketrampilan dan literasi digital bagi pelaku usaha perdagangan (transformasi digital) melalui pelatihan/pendampingan pemasaran digital
		Pengembangan dan revitalisasi Infrastruktur pusat perdagangan	Pengembangan dan revitalisasi Infrastruktur pasar sebagai pusat perdagangan
		Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
	ST2.1.2 : Pengembangan Usaha industri	Pengembangan produktivitas usaha industri	Pengembangan produktivitas usaha industri
		Fasilitasi Pengembangan industri pertambangan rakyat	Fasilitasi Pengembangan industri pertambangan rakyat melalui pengusulan wilayah pertambangan rakyat dan fasilitasi perizinan
		Fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran industri	Fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran industri
		Meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri	Meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri
	ST2.1.3 Peningkatan daya saing dan kapasitas koperasi serta UKM dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi dan Usaha Mikro	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku koperasi dan Usaha Mikro
		Fasilitasi akses permodalan, promosi dan pemasaran hasil produk/jasa koperasi dan usaha mikro	Fasilitasi akses permodalan, promosi dan pemasaran hasil produk/jasa koperasi dan usaha mikro



SASARAN RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RKPD 2026
1	2	3	4
		Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi dan usaha mikro	Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi dan usaha mikro
S2.2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	ST2.2.1 : Peningkatan pengembangan dan promosi pariwisata	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas
		Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta event pariwisata unggulan	Meningkatkan promosi dan pemasaran destinasi serta event pariwisata unggulan
		Revitalisasi objek wisata dan pengembangan destinasi wisata baru yang berdaya saing	Revitalisasi objek wisata dan pengembangan destinasi wisata baru yang berdaya saing
		Pembinaan terhadap Pelaku usaha pariwisata	Pembinaan terhadap Pelaku usaha pariwisata
		Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
	ST2.2.2 : Pengembangan usaha ekonomi kreatif	Pengembangan ekosistem dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif	Pengembangan ekosistem dan ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha ekonomi kreatif
		Fasilitasi akses permodalan dan promosi bagi usaha ekonomi kreatif	Fasilitasi akses permodalan dan promosi bagi usaha ekonomi kreatif
S2.3 : Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	ST2.3.1 : Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan	Meningkatkan tatakelola Penanaman Modal dan perizinan	Meningkatkan tatakelola Penanaman Modal dan perizinan
		Meningkatkan fasilitasi dan promosi penanaman modal	Meningkatkan fasilitasi dan promosi penanaman modal
		Melakukan pengkajian terhadap potensi investasi yang sesuai dengan potensi daerah	Melakukan pengkajian terhadap potensi investasi yang sesuai dengan potensi daerah
S2.4 Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok	ST2.4.1 : Memperkuat stabilitas pasokan dan harga komoditas pokok	Menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat	Menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat



SASARAN RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RKPD 2026
1	2	3	4
S2.5 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat	Menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat
		Optimalisasi data dan informasi terkait harga kebutuhan pokok masyarakat	Optimalisasi data dan informasi terkait harga kebutuhan pokok masyarakat
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah
		Optimalisasi program Pelatihan Tenaga kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri	Optimalisasi program Pelatihan Tenaga kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri
	ST2.5.1 : Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi	Pengembangan Kerjasama Pendidikan tenaga kerja	Pengembangan Kerjasama Pendidikan tenaga kerja
		Fasilitasi akses Pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi	Fasilitasi akses Pendidikan vokasi di tingkat menengah dan tinggi
		Pengembangan kerjasama penempatan tenaga kerja	Pengembangan kerjasama penempatan tenaga kerja
	ST2.5.2 : Membangun jejaring global dalam peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK)	Peningkatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK)
	ST2.5.3 : Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja	Fasilitasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
		Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	ST2.6.1 : Percepatan Penanggulangan kemiskinan	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data kemiskinan
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
		Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin	Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin
		Mengurangi kantong-kantong kemiskinan	Mengurangi kantong-kantong kemiskinan



SASARAN RPJMD	STRATEGI RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN RKPD 2026
1	2	3	4
S2.7 : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	ST2.7.1 : Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan pelaku usaha perikanan (pembudidaya / pengolahan / pemasaran)	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan pelaku usaha perikanan (pembudidaya / pengolahan / pemasaran)
		Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan dan subsidi bagi petani	Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan dan subsidi bagi petani
		Kerjasama wilayah pengembangan peternakan	Kerjasama wilayah pengembangan peternakan
		Pengembangan pertanian perkotaan	Pengembangan pertanian organik dan pertanian perkotaan
		Pengembangan produk pertanian unggulan daerah	Pengembangan produk pertanian unggulan daerah
		Peningkatan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk pangan diversifikasi	Peningkatan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk pangan diversifikasi
		Penataan dan pembangunan infrastruktur sektor pertanian	Penataan dan pembangunan infrastruktur sektor pertanian
	ST2.7.2 : Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal	Pengembangan varietas tanaman pangan lokal yang memiliki potensi tinggi dan tahan terhadap kondisi iklim	Pengembangan varietas tanaman pangan lokal yang memiliki potensi tinggi dan tahan terhadap kondisi iklim
		Penerapan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman	Penerapan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman

Sinkronisasi antara kebijakan jangka menengah dan rencana tahunan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, peningkatan daya saing, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan implementasi yang konsisten, pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Padang Panjang, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien,



transparan, tertib, akuntabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Keuangan daerah disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada program (*money follow program*), penyelesaian isu strategis dan permasalahan di daerah, serta mendukung pencapaian target RPJMD. APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah, dimana kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi suatu daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar daerah lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu juga untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan pemantauan dan evaluasi guna menjaga sinergitas kebijakan fiskal nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan instrumen yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dinilai melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui belanja daerah tidak terlepas dari kapasitas fiskal yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis dapat tercapai. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun



Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan untuk mendanai defisit APBD.

Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer menempati porsi terbesar dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2 tahun terakhir dan proyeksi pendapatan sd Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi /Target Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2023-2027

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	PROYEKSI Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
PENDAPATAN DAERAH	550,509,828,782.24	583,202,667,534.88	579,795,810,447.00	593,574,833,000.00	605,550,001,000.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102,302,543,259.24	94,371,566,806.88	112,742,349,470.00	136,790,000,000.00	150,354,500,000.00
Pajak Daerah	10,351,130,237.00	9,688,742,631.00	20,372,697,142.00	24,755,000,000.00	26,958,110,000.00
Retribusi Daerah	4,951,418,406.00	64,086,171,794.00	75,740,473,872.00	101,565,000,000.00	110,679,390,000.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,345,866,623.00	7,922,888,824.00	7,991,779,256.00	8,000,000,000.00	10,000,000,000.00
Lain-lain PAD yang Sah	79,654,127,993.24	12,673,763,557.88	8,637,399,200.00	2,470,000,000.00	2,717,000,000.00
PENDAPATAN TRANSFER	444,487,283,334.00	488,770,713,144.00	467,053,460,977.00	456,784,833,000.00	455,195,501,000.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	420,531,185,089.00	459,088,864,897.00	436,422,735,880.00	436,593,787,000.00	435,004,455,000.00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10,198,228,356.00	9,855,955,000.00	8,341,473,000.00	8,355,761,000.00	8,340,000,000.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	361,286,293,107.00	375,917,415,308.00	384,916,807,880.00	385,073,571,000.00	383,500,000,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4,580,717,464.00	15,722,870,984.00	5,633,448,000.00	5,633,448,000.00	5,633,448,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	34,973,127,162.00	35,820,566,605.00	37,531,007,000.00	37,531,007,000.00	37,531,007,000.00
Insentif Daerah	9,492,819,000.00	21,772,057,000.00	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	23,956,098,245.00	29,681,848,247.00	30,630,725,097.00	20,191,046,000.00	20,191,046,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23,956,098,245.00	28,546,475,247.00	30,630,725,097.00	20,191,046,000.00	20,191,046,000.00
Bantuan Keuangan	-	1,135,373,000.00			
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3,720,002,189.00	60,387,584.00	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3,720,002,189.00	60,387,584.00	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025



Kinerja pendapatan daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2023–2024 menunjukkan tren positif meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa pos pendapatan. Secara agregat, realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mencapai Rp550,50 miliar dan meningkat menjadi Rp 583,20 miliar pada tahun 2024, atau tumbuh sekitar 5,9 persen. Namun, dalam P-APBD Tahun 2025 turun menjadi Rp579,80 miliar seiring dengan turunnya pendapatan transfer. Pendapatan ini diproyeksikan meningkat pada 2026 (Rp593,57 miliar) dan 2027 (Rp605,55 miliar) seiring dengan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada Tahun 2023, PAD terealisasi sebesar Rp102,30 miliar, namun pada tahun 2024 turun menjadi Rp94,37 miliar (turun 7,7 persen) pada tahun 2024 dan diproyeksikan naik menjadi Rp112,74 miliar pada Tahun 2025 atau tumbuh 19,5 persen dibanding realisasi 2024. Selanjutnya, proyeksi PAD terus meningkat pada 2026 sebesar Rp136,79 miliar dan Rp150,53 miliar pada 2027 yang terutama ditargetkan berasal dari pendapatan BLUD. Komponen terbesar PAD masih bersumber dari pajak daerah, yang cenderung stabil di kisaran Rp9,6–10,1 miliar pada 2023–2024, dan ditargetkan meningkat bertahap hingga Rp26,98 miliar pada 2027. Hal ini mencerminkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk penguatan basis data wajib pajak serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, retribusi daerah memiliki potensi peningkatan yang signifikan. Dari realisasi Rp4,95 miliar pada 2023, melonjak menjadi Rp66,17 miliar pada 2024, dan ditargetkan terus naik hingga Rp110,68 miliar pada 2027. Hal ini terjadi akibat pemindahan belanja BLUD yang pada tahun 2023 terletak pada komponen Lain-Lain PAD yang sah pindah ke komponen Retribusi Daerah sejak Tahun 2024.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan relatif kecil dan stagnan, yaitu hanya Rp7–8 miliar per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi BUMD terhadap PAD masih terbatas dan memerlukan langkah penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas usaha, serta diversifikasi sumber pendapatan.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama keuangan daerah. Pada 2023, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp444,49 miliar atau 80,7 persen dari total pendapatan daerah, dan meningkat menjadi Rp488,77 miliar pada 2024. Namun, pada P-APBD 2025, pendapatan transfer turun menjadi Rp467,05 miliar, dan diproyeksikan kembali turun pada 2026–2027 di kisaran Rp455 miliar sejalan dengan kerangka fiskal nasional, dimana tren stagnasi dana transfer ke daerah diprediksi akan terus berlanjut.

Komponen terbesar berasal dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang relatif stabil. DAU terus meningkat dari Rp361,27 miliar pada 2023 menjadi Rp383,5 miliar pada 2027, sedangkan DBH relatif stagnan pada kisaran Rp43–45 miliar. Di sisi lain, DAK Fisik maupun Non Fisik berfluktuasi, tergantung pada kebijakan nasional dan prioritas program. Kondisi ini menandakan tingginya ketergantungan fiskal Kota Padang Panjang terhadap transfer pusat, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal lokal.

Pendapatan dari transfer antar daerah yang berasal dari bagi hasil pajak berkontribusi lebih kecil namun cukup fluktuatif. Realisasi 2024 mencapai Rp29,68 miliar, meningkat dari Rp23,95 miliar pada 2023, namun kemudian menurun lagi dalam proyeksi 2026–2027 sebesar Rp20,19 miliar seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana sejak tahun 2025, sudah diberlakukan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Hal ini berdampak pada berpindahnya pendapatan pajak yang semula dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang masuk pada bagian Pendapatan Transfer menjadi bagian Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber pendapatan JKN dan pengembalian hibah pada Pemerintah Daerah pada 2023, tercatat Rp3,72 miliar dan meningkat menjadi Rp60,39 miliar pada Tahun 2024. Sementara untuk tahun 2025–2027, kompoen ini tidak tidak dianggarkan lagi (Rp0) karena Pendapatan JKN dan Pengembalian Hibah pada Pemerintah pindah ke Pendapatan Asli Daerah.

Secara umum, struktur pendapatan daerah Kota Padang Panjang masih sangat bergantung pada **pendapatan transfer** (lebih dari 75 persen), dengan kontribusi PAD yang mulai menunjukkan tren penguatan pasca 2025. Tantangan utama terletak pada konsistensi peningkatan PAD, khususnya dari sektor retribusi dan pajak daerah, sekaligus meminimalkan fluktuasi penerimaan insidental.

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2020–2024, maka untuk tahun 2026 pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.

Pendapatan daerah Kota Padang Panjang tahun 2026 diproyeksikan sebesar 593.574.833.000,- terdiri dari PAD sebesar 136.790.000.000,- dan Pendapatan Transfer sebesar 456.784.833.000,-. Peningkatan PAD tahun 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 24.052.764.683,- terdiri dari peningkatan dari pajak daerah sebesar 4.382.302.858,- (opsen PKB, opsen BBNKB, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan), dan peningkatan retribusi daerah sebesar 24.824.526.128,- (Peningkatan Retribusi Pelayanan Kesehatan,



Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan lainnya). Sedangkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan tetap atau sama dengan tahun 2025 yaitu sebesar 8.000.000.000,- di samping itu untuk pendapatan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan karena pada tahun 2024 pendapatan ini yang terbesar dari Pendapatan Pengembalian dan Pendapatan Denda dari proyek fisik yang dikerjakan tahun sebelumnya, sedangkan tahun 2025 untuk pekerjaan fisik yang besar tidak ada penganggarannya.

Proyeksi Pendapatan transfer tahun 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3.134.450.000,- dari pendapatan tahun 2025 yakni sebesar 459.919.283.000, hal ini karena Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dialokasikan mendasari Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat untuk TKDD tahun 2025.

Sejalan dengan misi jangka panjang Kota Padang Panjang, yaitu melakukan transformasi, maka secara umum arah kebijakan pendapatan daerah secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Kemandirian fiskal ditargetkan meningkat sebagai pijakan penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah yang diawali dengan penyusunan peta jalan kemandirian fiskal secara komprehensif yang diokuskan pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.
- 2) Reformasi kebijakan fiskal daerah melalui perbaikan basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital yang terintegrasi. Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.
- 3) Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.
- 4) Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, e- wallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat.
- 5) Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan



- memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
- 6) Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.
 - 7) Melakukan Performance-Based Revenue Targeting per OPD, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Secara lebih rinci Arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Penguatan Pajak Daerah melalui:
 - 1) Digitalisasi sistem pajak daerah (e-tax, e-BPHTB, e-PBB, dll.).
 - 2) Penyesuaian tarif dan basis pajak berdasarkan potensi riil (PBB, pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dll.).
 - 3) Ekstensifikasi wajib pajak (menambah jumlah WP melalui pendataan ulang objek/subjek pajak).
 - 4) Mendorong transparansi dan kepatuhan melalui edukasi dan insentif.
 - 5) Optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui:
 - a) Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang saat ini hanya sekitar 50-60% melalui penggunaan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.
 - b) Melaksanakan Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.
 - c) Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan.



- b. Revitalisasi Retribusi Daerah melalui :
 - 1) Evaluasi tarif retribusi secara berkala agar sesuai nilai layanan.
 - 2) Digitalisasi retribusi pasar, parkir, sampah, dan pelayanan publik.
 - 3) Minimalisasi kebocoran pungutan tunai, dorong sistem non-tunai.
 - 4) Penataan ulang unit pelayanan retribusi
- c. Optimalisasi BUMD dan Aset Daerah
 - 1) Revitalisasi BUMD yang tidak produktif, atau restrukturisasi model bisnis
 - 2) Memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga.
 - 3) Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.
 - 4) Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
 - 5) Menjalin kemitraan dengan lembaga Nasional/internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.
- d. Penguatan Lain-Lain PAD yang Sah melalui:
 - 1) Pengaturan ulang mekanisme pendapatan dari jasa giro, surplus BLUD, denda/sanksi, dan kontribusi pihak ketiga.
 - 2) Pastikan ketepatan klasifikasi pendapatan, agar tidak terjadi pencatatan dobel atau kesalahan agregasi.
- e. Digitalisasi Pendapatan Daerah Real-Time, melalui :
 - a) Pengembangan Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi secara real-time untuk mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh pemerintah daerah.
 - b) Integrasi Data Pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Hal Ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
 - c) Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan.
- f. Menerapkan (*Smart Fiscal Management*): menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien, melalui:
 - a) Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility yakni Pemerintah



Daerah harus menjaga keseimbangan antara fixed cost dan variable cost, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio fixed cost harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran variable cost, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

b) Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring, yakni sebuah sistem yang diimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara e-budgeting dan e-monitoring dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem real-time data analytics, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. Kebijakan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Kebijakan dan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi merupakan strategi yang sangat penting bagi pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kota Padang Panjang, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah yang masih cukup bergantung pada transfer pemerintah pusat. Untuk mengoptimalkan pendapatan transfer ditengah stagnasi dana transfer, maka arah kebijakan kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong efisiensi belanja daerah
- 2) Mempercepat penggalan sumber-sumber PAD baru
- 3) Memperkuat kinerja aset daerah
- 4) Membangun kerjasama kemitraan dengan sektor swasta
- 5) Menggali potensi skema pembiayaan inovatif
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kolaborasi pendanaan pembangunan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara



langsung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah perlu dilihat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah secara rinci selama beberapa tahun terakhir. Realisasi Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2023-2024 serta proyeksi sampai dengan Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun 2023 s/d 2027

URAIAN	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	PROYEKSI Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027
BELANJA DAERAH	560,604,099,846.51	625,753,832,103.60	586,247,216,116.94	583,574,833,000.00	592,550,001,000.00
BELANJA OPERASI	500,526,647,773.12	553,232,938,495.14	520,201,574,361.94	503,473,385,000.00	346,850,001,000.00
Belanja Pegawai	269,913,737,971.00	311,212,828,135.00	294,095,426,825.06	289,355,141,000.00	196,665,000,300.00
Belanja Barang dan Jasa	213,027,916,239.39	214,426,378,424.14	210,164,894,118.88	208,348,244,000.00	144,415,000,700.00
Belanja Subsidi	-	4,456,800.00	134,546,684.00	270,000,000.00	270,000,000.00
Belanja Hibah	14,925,838,562.73	17,174,049,136.00	7,432,184,916.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial	2,659,155,000.00	10,415,226,000.00	8,374,521,818.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
BELANJA MODAL	60,005,452,073.39	71,751,888,415.46	64,445,641,755.00	77,301,448,000.00	242,900,000,000.00
Belanja Modal Tanah	-	9,421,400.00	-	-	15,000,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,180,468,257.00	14,731,124,143.00	17,504,332,304.00	3,772,099,000.00	64,000,000,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41,765,626,953.65	39,342,022,232.00	24,016,356,885.00	67,529,349,000.00	123,900,000,000.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9,223,976,168.74	16,570,946,513.46	21,826,707,861.00	6,000,000,000.00	38,000,000,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	835,380,694.00	1,004,874,127.00	903,244,705.00	-	1,000,000,000.00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	93,500,000.00	195,000,000.00	-	1,000,000,000.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	72,000,000.00	769,005,193.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Belanja Tidak Terduga	72,000,000.00	769,005,193.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
BELANJA TRANSFER	-	-	600,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	0	-	600,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025



Berdasarkan tren realisasi belanja daerah tahun 2023–2024 serta proyeksi dan alokasi anggaran pada P-APBD Tahun 2025, arah kebijakan belanja daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal.

a) **Perkembangan Belanja Daerah**

Total belanja daerah mengalami fluktuasi, dari Rp560,60 miliar pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp625,75 miliar pada tahun 2024. Pada APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp586,25 miliar dan diproyeksikan mencapai Rp583,57 miliar pada tahun 2026. Kecenderungan ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi belanja dengan kemampuan fiskal daerah, agar konsistensi pembangunan tetap terjaga meskipun terdapat dinamika alokasi anggaran.

b) **Belanja Operasi**

Porsi belanja operasi masih mendominasi, yaitu Rp500,52 miliar pada 2023, naik menjadi Rp553,23 miliar pada 2024, lalu diproyeksikan Rp503,47 miliar pada 2026. Komponen terbesar adalah belanja pegawai dan belanja barang/jasa, yang masing-masing menyerap lebih dari 85% belanja operasi. Meski demikian, pada 2026 belanja pegawai diproyeksikan sedikit menurun menjadi Rp289,36 miliar (dari Rp311,21 miliar tahun 2024), sebagaimana amanat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan arah kebijakan belanja operasi difokuskan pada efisiensi belanja pegawai, rasionalisasi belanja barang/jasa, dan peningkatan efektivitas belanja sosial, hibah, serta subsidi yang lebih tepat sasaran.

c) **Belanja Modal**

Belanja modal pada 2023 hanya Rp60,05 miliar, meningkat menjadi Rp71,76 miliar pada 2024, dan diproyeksikan Rp77,30 miliar pada 2026. Lonjakan signifikan terjadi pada proyeksi 2027 yang mencapai Rp242,90 miliar sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang alokasi belanja infrastruktur minimal 40%. Peningkatan ini menunjukkan arah kebijakan belanja modal tahun 2026–2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur publik, khususnya pembangunan gedung, bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kualitas layanan publik. Belanja modal juga perlu difokuskan pada pelaksanaan program unggulan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 seperti penanganan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan fasilitas pendukung ekonomi kreatif dan pariwisata (convention hall, pembenahan Islamic Center, dll).



d) Belanja Tidak Terduga dan Transfer

Belanja tidak terduga mengalami kenaikan signifikan dari Rp72 juta pada 2023 menjadi Rp769 juta pada 2024, dan diproyeksikan Rp2 miliar pada 2026. Hal ini menunjukkan kebijakan fiskal daerah semakin mengantisipasi dinamika risiko dan kebutuhan darurat, baik akibat bencana maupun kondisi sosial-ekonomi yang mendesak. Belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pihak ketiga mulai dialokasikan Rp600 juta pada 2025 dan meningkat menjadi Rp800 juta pada 2026. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat kolaborasi pembangunan lintas sektor terutama dalam bentuk dukungan pendanaan bagi sektor pendidikan formal/siswa SLTA warga Kota Padang Panjang yang secara kewenangan merupakan kewenangan Provinsi dalam bentuk pemberian bantuan keuangan khusus.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Belanja Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer adapun kebijakan belanja daerah tahun 2026 sebagai berikut:

A. Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penataan Tenaga Honorer, mengalokasikan penganggaran belanja pegawai calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah



dengan Perjanjian Kerja) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pengurangan belanja pegawai secara bertahap dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (alokasi belanja pegawai 30% dari total belanja APBD tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa



persediaan barang tahun anggaran sebelumnya secara efisien sebagaimana Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- b. Penganggaran Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
- c. Kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja;
- d. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD;
- e. Melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC)
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - 1) Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial memedomani Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

B. Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal antara lain :

1. Belanja Modal Tanah



Penganggaran belanja modal tanah untuk kepentingan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang direncanakan pada tahun 2027

2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan yang direncanakan pada tahun 2026 adalah untuk penyelesaian pembangunan gedung sekolah sesuai standar secara bertahap, lanjutan pembangunan *convention hall*, penataan kawasan *islamic center*, sarana prasarana pasar, dll

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga antara lain :

1. Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;



2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Daerah bersumber dari :

1. SiLPA;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperkirakan surplus. Untuk Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kota Padang Panjang direncanakan pengeluaran pembiayaan sebesar 10.000.000.000,00, yang digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari.

Untuk lebih jelasnya kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023-2027

URAIAN	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	P-APBD 2025	PROYEKSI Tahun 2026	PROYEKSI Tahun 2027
PEMBIAYAAN				- 10,000,000,000.00	- 13,000,000,000.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	58,710,083,114.00	50,002,570,238.66	6,451,405,669.94	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58,710,083,114.00	48,615,812,049.66	6,451,405,669.94	-	-
Divestasi jangka pendek BLUD	-	1,386,758,189.00			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		1,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00	13,000,000,000.00
Penyertaan Modal Daerah	-	1,000,000,000.00	-	10,000,000,000.00	13,000,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	58,710,083,114.00	49,002,570,238.66	6,451,405,669.94	- 10,000,000,000.00	- 13,000,000,000.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2025

Kebijakan pembiayaan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat posisi fiskal dan mendukung kesinambungan pembangunan daerah. Berdasarkan tren tahun 2023–2025, penerimaan pembiayaan daerah cenderung menurun, terutama karena berkurangnya ketergantungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp58,71 miliar, menurun menjadi Rp50,00 miliar pada tahun 2024, dan hanya Rp6,45 miliar pada APBD 2025. Mulai tahun 2026, penerimaan pembiayaan tidak lagi dianggarkan, sebagai bagian dari strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat dan berimbang.

Dari sisi pengeluaran, kebijakan pembiayaan mulai diarahkan untuk memperkuat modal daerah. Setelah dialokasikan sebesar Rp1,00 miliar pada tahun 2024, penyertaan modal daerah meningkat signifikan menjadi Rp10,00 miliar pada tahun 2026, dan Rp13,00 miliar pada tahun 2027. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung pelayanan publik sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di masa mendatang.



Dengan demikian, arah kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2026 difokuskan pada:

- 1) Menghindari tergantungan terhadap SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan.
- 2) Meningkatkan penyertaan modal daerah sebagai instrumen investasi jangka panjang.
- 3) Mendorong BUMD dan entitas strategis daerah untuk memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi lokal.
- 4) Menjadikan pembiayaan sebagai instrumen pengungkit pembangunan, bukan semata penyeimbang APBD.

Melalui kebijakan tersebut, pembiayaan daerah diharapkan dapat berperan lebih strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal, mendukung penguatan struktur pendapatan daerah, dan memberikan multiplier effect bagi perekonomian Kota Padang Panjang.



BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional dan Provinsi, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan serta memperhatikan arahan dan direktif Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029.

Selain itu, penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan usulan-usulan Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
2. Relevansi dengan permasalahan dan isu strategis Nasional dan Provinsi yang terkait dengan permasalahan dan isu strategis Kota Padang Panjang.
3. Relevansi dan keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan RPD.
4. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil, dengan tetap difokuskan pada sektor unggulan daerah 2024-2026 yaitu perdagangan, pariwisata dan pertanian.
5. Relevansi dan keterkaitan terhadap isu strategis daerah dan isu sektoral.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis guna memastikan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, penjabaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi sebuah keharusan, yang didasarkan pada analisis kondisi, permasalahan yang ada, potensi yang tersedia, serta dinamika sosial yang tengah berlangsung di masyarakat setempat. Dalam prosesnya, dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, serta Kota Padang Panjang sendiri. Selain itu, hasil



evaluasi RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi menjadi landasan utama dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD ini merupakan pencerminan dari capaian strategis yang diharapkan, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penyusunan RKPD tidak hanya mempertimbangkan dinamika lokal, tetapi juga memperhitungkan perubahan di tingkat regional dan nasional agar program pembangunan tetap relevan dan berdaya guna. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat menjadi aspek krusial dalam memastikan keselarasan kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program.

RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan pembangunan. Penyelarasan dengan program prioritas daerah ditempatkan sebagai fokus utama agar setiap langkah pembangunan lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Arahan Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung tercapainya swasembada pangan dan energi, mendorong lahirnya berbagai terobosan teknologi beserta aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas nasional. Dengan berlandaskan arahan tersebut, serta mempertimbangkan kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu-isu strategis, dan masukan dari forum konsultasi publik, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 ditetapkan mengusung tema **“Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”**. Tema ini merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025–2029, yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 diarahkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Ketiga capaian tersebut ditunjukkan oleh berbagai indikator pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Sasaran Pembangunan Nasional



Sumber: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

1. Pertumbuhan Tinggi yang Berkelanjutan

Untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan target indikator makro sebagai berikut:

- Pertumbuhan Ekonomi Nasional ditargetkan berada pada kisaran 5,8% hingga 6,3% pada tahun 2026. Sasaran ini lebih tinggi dari capaian tahun 2024 (5,03%) dan proyeksi 2025 (5,3%), mencerminkan optimisme atas penguatan konsumsi domestik, investasi produktif, serta ekspor berbasis hilirisasi.
- Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per Kapita ditargetkan mencapai USD 5.870, meningkat dari USD 5.000 pada tahun 2024 dan USD 5.410 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan arah Indonesia menuju negara berpendapatan menengah atas yang berkelanjutan.
- Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi fokus utama dalam pembangunan hijau, dengan target penurunan emisi menjadi 37,14 pada tahun 2026, turun dari 35,53 pada 2025 dan 34,09 pada 2024.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditargetkan berada pada 76,67 di tahun 2026, mempertahankan peningkatan dari nilai 76,49 di tahun



sebelumnya. Peningkatan IKLH menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan.

2. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Komitmen terhadap pembangunan yang inklusif diwujudkan melalui sasaran pengentasan kemiskinan, baik secara umum maupun ekstrem:

- a. Tingkat Kemiskinan Nasional ditargetkan turun menjadi 6,5% hingga 7,5% pada tahun 2026, dari 8,57% di tahun 2024 dan proyeksi 7,0–8,0% di tahun 2025. Target ini diharapkan tercapai melalui perluasan perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
- b. Kemiskinan Ekstrem ditargetkan 0%, selaras dengan arahan Presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrem secara menyeluruh pada 2024, dan mempertahankan capaian tersebut hingga 2026.
- c. Rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan ditargetkan berada pada kisaran 0,377–0,380, mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia tetap menjadi prioritas utama, dengan indikator utama sebagai berikut:

- a. Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) ditargetkan meningkat menjadi 0,57 pada tahun 2026, dari 0,54 di tahun 2024 dan 0,56 pada tahun 2025. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan akses dan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dasar, serta gizi anak yang lebih baik.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan



setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
		Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
		Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar



VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
Misi	Tujuan	Sasaran
		ekonomi daerah
Misi 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
		Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur
Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
		Meningkatnya Pendapatan Daerah

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029



Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan delapan misi pembangunan daerah yang selaras dengan isu-isu strategis serta arah pembangunan dalam RPJMD 2025–2029.

Misi Pertama: **“Gerak Cepat Sumbar Unggul: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas”**. Difokuskan pada isu strategis pembangunan sumber daya manusia, melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, penyediaan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu, serta pemerataan akses kesehatan melalui program Sumbar *Universal Health Coverage*. Selain itu, peningkatan kualitas layanan kesehatan diarahkan pada pencegahan stunting dan penyakit menular, serta penyediaan jaminan sosial tenaga kerja bagi garin, guru mengaji, imam masjid, nelayan, petani, dan pekerja informal lainnya.

Misi Kedua: **“Gerak Cepat Sumbar Sejahtera: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan”**. Menitikberatkan pada isu strategis ekonomi makro dan pengangguran, melalui pengalokasian minimal 10% APBD untuk peningkatan produksi pertanian, hilirisasi, serta asuransi usaha tani. Misi ini juga mencakup pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan pelestarian lingkungan, optimalisasi energi baru terbarukan (EBT), serta pengelolaan sampah bernilai ekonomi (*circular economy*).

Misi Ketiga: **“Gerak Cepat Sumbar Berdaya: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan”**. Difokuskan pada penguatan ekonomi lokal dengan mengaktivasi Nagari *Creative Hub* untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan melalui internet gratis, Medan Nan Bapaneh, Suduik UMKM, dan Teras Nagari. Selain itu, dikembangkan pariwisata berbasis masyarakat, sarana dan prasarana kepemudaan, serta penguatan Bum-Nag sebagai penggerak ekonomi nagari.

Misi Keempat: **“Gerak Cepat Sumbar Maju: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat”**. Menjawab isu strategis infrastruktur dan lingkungan hidup melalui pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai pintu perdagangan wilayah barat Indonesia. Misi ini juga diarahkan pada penguatan UMKM agar mampu ekspor, pengembangan sentra produksi berbasis digital, akselerasi *Millennial and Women Entrepreneur Program*, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi kompetensi.

Misi Kelima: **“Gerak Cepat Sumbar Kuat: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana”**. Difokuskan pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis, pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta mewujudkan nagari/desa tangguh bencana.



Misi Keenam: **“Gerak Cepat Sumbar Harmonis: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama dan Kearifan Lokal”**. Berorientasi pada pembinaan karakter generasi muda melalui pencegahan penyakit masyarakat berbasis keluarga, kaum, dan nagari. Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dijadikan pusat pembinaan ABS-SBK. Misi ini juga mencakup penguatan pendidikan karakter berbasis agama dan budaya lokal, peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendampingan penyandang disabilitas, serta pengembangan ekonomi syariah berbasis ABS-SBK.

Misi Ketujuh: **“Gerak Cepat Sumbar Kreatif: Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM”**. Difokuskan pada pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan sertifikasi CHSE (*Clean, Health, Safety, Environment*), penguatan wisata halal, digitalisasi promosi pariwisata, penguatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif melalui sertifikasi kompetensi, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat MICE di wilayah barat Indonesia.

Misi Kedelapan: **“Gerak Cepat Sumbar Responsif: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif”**. Berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik, peningkatan keterbukaan informasi, pembangunan berbasis aspirasi masyarakat, serta birokrasi yang terbuka sebagai tempat pembelajaran bagi mahasiswa/siswa melalui program magang dan penyediaan *co-working space*. Misi ini juga diarahkan pada penguatan kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, serta inovasi daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, serta dengan memperhatikan kebutuhan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Tema Pembangunan Tahun 2026, yang juga mendukung pencapaian tema pembangunan nasional (RKP 2026). Tema pembangunan tersebut adalah::

“Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perkuatan Fondasi

Dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis, seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini



diharapkan dapat menyediakan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.

2. Transformasi Sektor Strategis

Mengubah dan memodernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional atau daerah. Seperti halnya sektor pertanian dan perikanan yang ditransformasikan dengan pendekatan berbasis teknologi (pertanian cerdas atau *smart farming*). Sektor pariwisata yang dikembangkan ke arah berbasis ekowisata dan budaya lokal. Sektor industri Kecil/UMKM yang diarahkan pada penguatan industri kecil/UMKM berbasis nilai tambah lokal dan ramah lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut di tingkat nasional maupun internasional sekaligus memastikan bahwa sektor tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hasil pembangunan.

4. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang.

- a. Aspek kelestarian lingkungan: Mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pendekatan ramah lingkungan (*green economy*).
- b. Aspek sosial: Menjaga stabilitas dan harmoni sosial melalui pemerataan manfaat pembangunan.
- c. Aspek ekonomi: Mengembangkan model bisnis dan kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Hal ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026,

dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	RPJMD	RKP	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,8 – 6,3	5,7
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	36,87	–	36,87
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	69,59	–	69,59
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,34	4,44 – 4,96	5,34
5	IPM	77,48	–	77,48
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,83	–	74,83
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,62	–	14,62
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,58	–	9,58
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	12.074	–	12.074
6	Tingkat Kemiskinan (%)	4,92	6,5 – 7,5	4,92
7	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	294,49	–	294,49
8	Gini Rasio	0,281	0,377 – 0,380	0,281
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	55,94	37,14	5

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang yang telah mengakomodir visi misi Wali Kota terpilih tahun 2025 -2029. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.



Sebagai rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah **“PADANG PANJANG, KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”** dengan sasaran visi untuk tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sasaran Visi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2026

SASARAN VISI	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2026
Peningkatan Pendapatan Per Kapita				
	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp.Juta	80,01	84,55
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	8,30	10,73
Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang				
	Tingkat Kemiskinan (%)	%	5,31	4,11
	Rasio Gini	Angka	0,266	0,259
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,52	5,95
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3.14 (Thn 2023)	3,39
Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat				
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,6	82,40
	Tingkat produktivitas tenaga kerja (Rp. Juta/ Tenaga Kerja)	%	4,94	3,93
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62,62	74,45

Sumber: RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025 - 2029

Berdasarkan rumusan visi tersebut, maka ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran
1	2
PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH	
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi	T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat S1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat S1.3 : Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	
Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal	T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan



Visi/ Misi 1	Tujuan/Sasaran 2
Pangan Daerah yang Kuat	
S2.1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal S2.2 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah S2.3 : Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah S2.4 : Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok S2.5 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah S2.7 : Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif	T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani
S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif S3.2 : Meningkatkan kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	
Misi 4 : Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat	T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya
S4.1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum S4.2 : Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan	T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan
S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak S5.2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	

Sumber: RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025 - 2029

4.2 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Penentuan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai RKP Tahun 2026
2. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat
3. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024.
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2026, yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

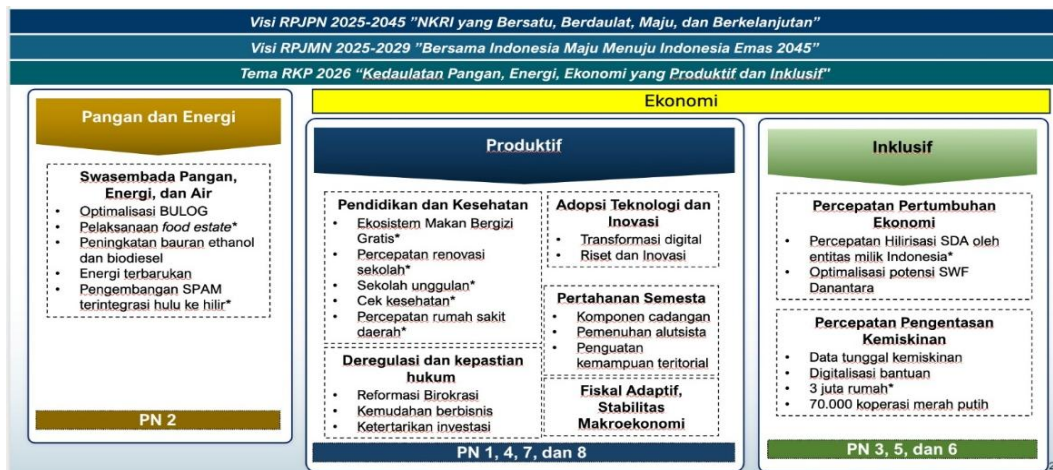
Untuk mendukung **kedaulatan pangan, energi, dan air**, pemerintah berkomitmen melaksanakan swasembada secara terpadu. Swasembada pangan diarahkan melalui pengembangan Kawasan Sentra Pangan Pertanian (KSPP)/*food estate* untuk menciptakan lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*). Intervensi strategis difokuskan pada peningkatan

produktivitas perikanan, penguatan nilai tambah dan daya saing produk, keberlanjutan ekosistem perairan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Swasembada energi ditopang oleh peningkatan bauran *ethanol*, biodiesel, dan energi terbarukan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi *biofuel*, pemanfaatan biodiesel di sektor transportasi, serta mendorong pergeseran konsumsi energi dari fosil ke energi bersih. Sementara itu, swasembada air dilaksanakan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk memperluas akses air minum aman dan sanitasi, dengan memperhatikan aspek teknis, regulasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk mewujudkan **ekonomi yang produktif dan inklusif**. Upaya ini dilakukan melalui penguatan sektor pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, investasi, birokrasi, transformasi digital, riset dan inovasi, pertahanan, serta kebijakan fiskal adaptif.

Sebagai perencanaan tahunan pelaksanaan RPJMN 2025–2029, RKP Tahun 2026 memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Kedua fokus tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Prioritas Nasional yang secara spesifik tertuang dalam gambar berikut:

Gambar 4.2
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026



Sumber: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026

Fokus utama kebijakan pembangunan tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Ekonomi Produktif dan Gizi Masyarakat

- a. Pengembangan ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah (PAUD hingga SMA/SMK sederajat) untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.



- b. Dampak kebijakan MBG diharapkan mendorong peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan beban penduduk miskin.
 - c. Renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan.
- 2. Penguatan Sektor Kesehatan
 - a. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini, pencegahan penyakit, dan edukasi kesehatan.
 - b. Percepatan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota.
 - c. Pengembangan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses.
- 3. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Penerapan pemerintahan adaptif, cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
 - b. Transformasi digital melalui:
 - 1) Pengembangan arsitektur pemerintah digital.
 - 2) Portal pelayanan publik terintegrasi.
 - 3) Implementasi Satu Data Indonesia (SDI).
- 4. Investasi dan Produktivitas
 - a. Peningkatan nilai realisasi investasi dan kualitas investasi (PMA & PMDN).
 - b. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional.
- 5. Transformasi Digital Nasional
 - a. Pemanfaatan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
 - b. Fokus pada Prioritas Nasional 2, 3, dan 7.
- 6. Riset, Inovasi, dan Iptek
 - a. Pengembangan ekosistem iptek dan inovasi (iptekin) yang adaptif dan sederhana.
 - b. Penguatan peran lembaga penelitian dan perguruan tinggi (LPPM) sebagai intermediasi.
- 7. Pertahanan Semesta



- a. Penguatan pertahanan nasional melalui komponen cadangan, pemenuhan alutsista, dan kemampuan teritorial.
- 8. Kebijakan Fiskal Adaptif
 - a. Percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).
 - b. Menjaga stabilitas fiskal melalui pengendalian defisit, utang, dan inflasi (*pro-stability*).
- 9. Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan
 - a. Percepatan hilirisasi komoditas: nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, migas, serta besi dan baja.
 - b. Operasionalisasi *smelter* untuk menambah kapasitas industri olahan nikel.
 - c. Pengentasan kemiskinan melalui:
 - 1) Penerapan data tunggal kemiskinan.
 - 2) Digitalisasi bantuan sosial.
 - 3) Program 3 juta rumah untuk MBR.
 - 4) Pengembangan 70.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat ekonomi desa.

4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

- a. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
- b. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik. Guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.



- c. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.
 - d. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
 - e. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialisasi seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.
 - f. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja difokuskan pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
 - g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi serta memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkoba/psikotropika.
 - h. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.
2. Prioritas Pembangunan 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

- a. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
- b. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi, yakni transformasi sistem produksi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan



hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.

- c. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal, mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
 - d. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk, serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
 - e. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak, melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.
 - f. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan, melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
 - g. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
 - h. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan. Langkah ini dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta pemantauan stok dan harga pangan secara digital.
3. Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:



- a. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal dilakukan dengan mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Pemerintah Provinsi mendukung melalui fasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar berbasis digitalisasi.
- b. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub akan diarahkan sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat inovasi sekaligus ruang berjejaring bagi pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.
- c. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan difokuskan pada pembangunan jalan provinsi penghubung pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, dan pengelolaan sampah berbasis nagari. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa dilakukan melalui pelatihan manajemen pembangunan berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov juga memperkuat peran Bamus, KAN, dan lembaga kemasyarakatan nagari dalam memperkuat demokrasi lokal.
- e. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa difasilitasi melalui peningkatan kapasitas pengelolaan unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan e-commerce, dan kemitraan dengan sektor swasta.
- f. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari ditempuh dengan program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa. Pemprov juga mendorong optimalisasi Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan.
- g. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasi didorong melalui pengembangan sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Program ini mendukung open data nagari untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.
- h. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah diwujudkan melalui penyusunan masterplan kawasan agropolitan dan minapolitan berbasis keterhubungan kota–nagari, guna menciptakan



integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.

4. Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

- a. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
- b. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.
- c. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai tambah dari komoditas unggulan seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.
- d. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam e-commerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
- e. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi



barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga.

- f. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK provinsi dan kerja sama dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.
 - g. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.
 - h. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley" atau "Minang Halal Hub" di kancah nasional dan internasional melalui promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi diaspora Minangkabau di luar negeri.
5. Prioritas Pembangunan 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.
- b. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.



- c. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
 - d. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
 - e. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas. Infrastruktur ini dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.
 - f. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana, dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.
 - g. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
 - h. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lain Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
6. Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas



Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

- a. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
- b. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama, adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.
- c. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan memperkuat perannya sebagai pusat pendidikan informal, kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program “Masjid Ramah Anak dan Remaja” serta “Surau Digital” akan menjadi inovasi ke depan.
- d. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan dijalankan program “Sekolah Orang Tua,” konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
- e. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
- f. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.
- g. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan



nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat yang akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.

- h. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi yang diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.
7. Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

- a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, penyediaan fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
- b. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisata Berbasis Kompetensi dan Keramahmatan dilakukan melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya. Pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata dengan program “Hospitality for Nagari Tourism” yang dilaksanakan di desa wisata.
- c. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global dijalankan dengan strategi promosi digital melalui media sosial, website pariwisata terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional maupun internasional. Branding seperti “Minang Heritage Tourism” dan “Rendang Valley” akan diperkuat.
- d. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui pengembangan UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan. UMKM akan difasilitasi dengan pelatihan, pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi juga akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.



- e. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif difasilitasi melalui dukungan kepada setiap kabupaten/kota untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan melibatkan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan kelembagaan lokal. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.
 - f. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal didorong dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film, musik, fotografi, kuliner, dan desain grafis. Pemanfaatan teknologi digital dan platform daring akan menjadi motor akselerasi inovasi bagi pelaku ekonomi kreatif muda.
 - g. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf dilaksanakan dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
 - h. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diperkuat melalui sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.
8. Prioritas Pembangunan 7 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 difokuskan pada:

- a. Transformasi Digital Pemerintahan melalui Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan membangun dan menyempurnakan sistem e-government, termasuk portal layanan terpadu, sistem informasi manajemen keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Semua layanan Perangkat Daerah ditargetkan terdigitalisasi dengan interoperabilitas data antar sektor untuk efisiensi dan akuntabilitas.
- b. Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Agile, Melayani, dan Antikorupsi, meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan kinerja berbasis output dan outcome, peningkatan kapasitas SDM ASN, dan penguatan pengawasan internal. Zona Integritas menuju Wilayah



Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan diperluas ke seluruh Perangkat Daerah.

- c. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat, dengan mengembangkan Public Service Super App yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga pengaduan secara daring, cepat, dan user-friendly. Standar pelayanan minimum (SPM) di setiap sektor akan dievaluasi dan ditingkatkan.
- d. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, melalui anggaran, kinerja, dan dokumen publik lainnya disajikan secara terbuka melalui portal transparansi antara lain Dashboard Pembangunan dan Website Sumbar2045. Forum Musrenbang, konsultasi publik, dan kanal aspirasi digital akan diperkuat agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan daerah.
- e. Penguatan Sistem Integritas, Etika Publik, dan Pencegahan Korupsi di Seluruh Level Pemerintahan, dengan memperkuat unit pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan harta kekayaan, whistleblower system, dan integrasi pendidikan antikorupsi dalam pelatihan ASN. Kerja sama dengan KPK, Ombudsman, dan BPKP akan ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif.
- f. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Digitalisasi Pajak dan Inovasi Pendapatan, dengan menerapkan sistem digitalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan secara terintegrasi. Selain itu, potensi pajak dan retribusi baru dari sektor digital, pariwisata, dan layanan publik akan dieksplorasi sesuai kewenangan provinsi.
- g. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Evidence-Based Policy, dengan membangun proses perencanaan pembangunan yang lebih mengutamakan data-driven planning, menyelaraskan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dengan indikator kinerja utama (IKU). Pemanfaatan big data dan dashboard monitoring akan dikembangkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- h. Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak serta Retribusi, dengan memperluas basis pajak melalui mendata dan memverifikasi objek pajak yang belum terdapat, seperti kendaraan tidak terdaftar, penggunaan air permukaan oleh sektor swasta, dan kegiatan pariwisata berbasis jasa. Potensi retribusi dari layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum akan diperbaharui melalui Kajian Potensi PAD (KPPAD) tahunan.



- i. Penguatan Fungsi BUMD dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Non-Pajak, dengan mendorong BUMD untuk meningkatkan kontribusi dividen dengan model bisnis yang efisien dan berbasis pasar.
- j. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan. Aset-aset milik daerah yang belum produktif akan diidentifikasi dan ditata ulang untuk disewakan, dikerjasamakan, atau dijadikan objek investasi. Digitalisasi manajemen aset (e-Asset Management) dan sistem tracking pemanfaatan aset akan menjadi alat pengawas utama.
- k. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak melalui Edukasi dan Inovasi Pelayanan, dengan cara kampanye sadar pajak, layanan Samsat Keliling Digital, pembayaran melalui QRIS, serta penghargaan bagi wajib pajak teladan akan ditingkatkan. Tujuannya adalah meningkatkan tax compliance melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang mudah serta terpercaya.
- l. Penerapan Reward and Punishment bagi OPD Pengelola PAD, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi OPD pengelola PAD, dengan skema insentif atas kinerja optimal dan penalti administratif terhadap kelalaian. Monitoring dan evaluasi berbasis data akan dilakukan per triwulan.

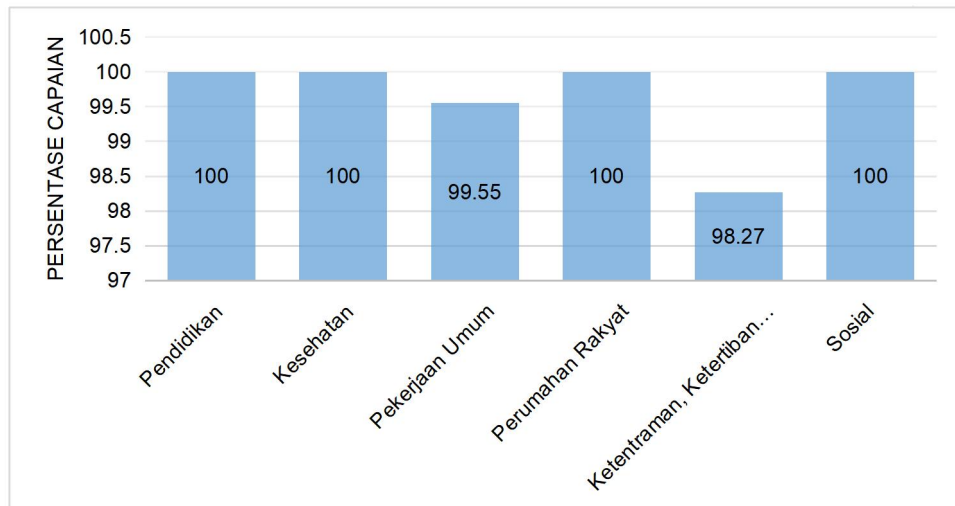
4.2.3 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Padang Panjang dan Belanja Bersifat Mengikat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pedoman dalam melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ada 6 jenis SPM pelayanan dasar yang diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Dilihat dari Capaian SPM Kota Padang Panjang Tahun 2024, maka capaian SPM Kota Padang Panjang tergolong sangat baik, dengan capaian SPM seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3
Capaian SPM Kota Padang Panjang Tahun 2024



Sumber: Laporan SPM Kota Padang Panjang, 2024

Dari 6 SPM yang di laksanakan, 4 SPM mencapai nilai maksimal yaitu 100% yaitu SPM Pendidikan, kesehatan, Perumahan Rakyat dan Sosial, sedangkan SPM untuk Pekerjaan umum hanya mencapai pada 99,55% dan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat hanya mencapai pada 98,27 %.

Capaian SPM Pekerjaan umum hanya mencapai 99,55% disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Data yang tersedia saat ini masih data yang diolah dan ditambah dari tahun sebelumnya.
2. Penghitungan kebutuhan data masih belum mencakup semua wilayah yang ada di Kota Padang Panjang.
3. Adanya pergeseran dan perubahan anggaran yang semula untuk kegiatan SPM, beralih menjadi kegiatan yang lain
4. Pelaksanaan dan perencanaan yang terlambat dari target awal.

Capaian SPM Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat hanya mencapai pada 98,27%, ada beberapa faktor yang masih perlu untuk di tingkatkan yaitu:

1. Mutu Layanan terkait Sarana, Prasarana

Belum terpenuhinya standar mutu secara kuantitas dalam penyelenggaraan SPM Bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana seperti perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis *offroad/jeep*, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional



roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional. Capaian dari penyediaan sarana dan prasarana ini hanya mencapai 16,59 %.

2. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas

Capaian Standar Jumlah dan kualitas personil/SDM dalam rangka pemenuhan SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat hanya mencapai 95,73 %, Kota Padang Panjang baru dapat menyediakan personil 606 orang dari 633 yang disyaratkan, meskipun demikian untuk penyediaan personil dengan capaian 95,73 sudah tergolong baik.

3. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

Capaian pada penyediaan sarana dan prasarana dalam penanganan kebakaran adalah 97,73 %, capaian ini sudah tergolong baik, meskipun demikian masih ada sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam penanganan korban kebakaran.

4. Jumlah SDM Pemadam Kebakaran

Standar Jumlah SDM untuk penanganan kebakaran untuk Kota Padang Panjang adalah 47 orang, sedangkan yang tersedia baru sebanyak 44 orang dan masih kurang 3 orang, sehingga capaian dari Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia adalah 93,62%.

4.2.4 Tema, Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang lebih efektif, diperlukan perumusan tema dan fokus pembangunan yang jelas sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Penekanan tema dan fokus pembangunan setiap tahun dalam periode RPJMD harus memiliki kesinambungan, sehingga mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pedoman penyusunan RPJMD, penahapan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam periodisasi Tahun 2026–2030. Dengan demikian, tema serta tahapan pembangunan Kota Padang Panjang pada periode 2026–2030 ditetapkan berlandaskan tema pembangunan lima tahunan, dengan tetap memedomani arah kebijakan serta tahapan pelaksanaan periode pertama RPJPD Tahun 2025–2045, yaitu:



**“Penguatan Transformasi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui
Perwujudan Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang Maju, Sejahtera
dan Bermarwah”**

Sejalan dengan tema pembangunan lima tahunan dalam RPJMD, maka tema pembangunan Tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

**“Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan
Infrastruktur”**

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029. Oleh karena itu, prioritas serta arah kebijakan pembangunan pada tahun tersebut diselaraskan dengan RPJMD serta visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025–2029. Secara umum, kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026

Tahap I (2026)
Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur
1. Fokus Tranformasi Sosial
Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik.
Penyediaan beasiswa dan program pendidikan inklusif.
Penyediaan perangkat digital dan pelatihan dasar literasi.
Peningkatan tenaga dan sarana kesehatan ibu dan anak.
Pemberian intervensi gizi dan makanan tambahan.
Pelaksanaan imunisasi dan edukasi kebersihan.
Kampanye perilaku sehat dan kegiatan komunitas.
Pelatihan tata kelola dan manajemen rujukan.
Penguatan logistik dan pelatihan tenaga darurat.
Pembinaan dan pelatihan atlet berjenjang.
Pelatihan dasar kepemudaan dan kewirausahaan.
Penguatan manajemen pelatihan dan kompetisi.
Peningkatan cakupan layanan KB dan kespro.
Penyediaan paket layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga kurang mampu.
Edukasi kesetaraan gender dalam masyarakat.
Pengembangan layanan pendampingan keluarga.
Pembentukan pusat layanan pengaduan dan pendampingan.
Peningkatan cakupan bantuan sosial dan pemberdayaan
2. Fokus Transformasi Ekonomi
Pelatihan usaha dagang dan penguatan manajemen.
Fasilitasi izin dan pelatihan tenaga industri.
Pelatihan dasar manajemen dan akses permodalan
Penyiapan SDM dan infrastruktur pariwisata dasar
Pelatihan dan inkubasi usaha kreatif pemula
Implementasi sistem pelayanan digital
Penguatan cadangan pangan pemerintah
Penyelenggaraan pelatihan dasar vokasi
Kemitraan dengan lembaga penyalur kerja luar negeri
Penguatan pengawasan ketenagakerjaan
Penyaluran bantuan tepat sasaran berbasis data
Penyediaan sarana produksi dan penyuluhan
Peningkatan kapasitas kelompok tani-pangan lokal
3. Fokus Transformasi Tata Kelola
Penyusunan standar pelayanan dan pelatihan petugas



Tahap I (2026)
Tema : Pembangunan Yang Kolaboratif, Penguatan SDM Ekonomi dan Infrastruktur
Pelatihan dan literasi digital ASN
Penguatan sistem pengelolaan data sektoral
Penguatan sistem pelaporan publik daring
Sistem pelaporan pengaduan masyarakat daring
Pelatihan teknis perencanaan berbasis outcome
Pelatihan teknis, kepemimpinan, dan soft skill
Digitalisasi dan penyederhanaan pemungutan PAD
Penyusunan regulasi pendukung PAD alternatif
Pelatihan dan pembinaan sadar hukum masyarakat
4. Fokus Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Kampanye budaya lokal melalui pendidikan dan media
Pembentukan forum komunikasi umat beragama
Penguatan kapasitas lembaga kebudayaan
Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas publik
Edukasi masyarakat tentang perilaku ramah lingkungan
Pembentukan dan pelatihan relawan tanggap bencana
5. Fokus Pengembangan wilayah
Perbaikan jaringan dan armada transportasi
Penegakan aturan pemanfaatan ruang
Program bantuan rumah layak dan rusunawa

4.2.5 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan kebutuhan aktual masyarakat serta dinamika pembangunan nasional dan regional. Penetapan prioritas ini didasarkan pada hasil analisis capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya, identifikasi isu strategis, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif.

Fokus pembangunan pada tahun perencanaan diarahkan pada penguatan fondasi pembangunan manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Prioritas ini juga memperhatikan prinsip inklusivitas, berkeadilan, dan berkelanjutan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
Transformasi Pendidikan Inovatif Menuju Generasi Emas	1. Penguatan kapasitas pendidik dan pengembangan kurikulum inovatif berbasis budaya lokal dan teknologi informasi. 2. Pengembangan sarana pembelajaran dan pusat edukasi interaktif melalui pembangunan Learning Knowledge Center. 3. Peningkatan peran generasi muda melalui pembangunan pusat kegiatan kepemudaan serta



Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
	pembinaan atlet berprestasi secara berjenjang.
Mewujudkan Kesehatan Unggul dan Keluarga Sehat	1. Percepatan penurunan stunting melalui program pendampingan keluarga dan penyuluhan gizi masyarakat. 2. Pengembangan layanan kesehatan unggulan, khususnya pelayanan jantung di RSUD.
Mendorong Ekonomi Kreatif dan UMKM Berdaya Saing	1. Transformasi perdagangan tradisional ke arah digital melalui pelatihan literasi digital dan pendampingan UMKM. 2. Pengembangan pusat ekonomi kreatif berbasis komunitas melalui pembangunan Creative Hub. 3. Penguatan kelembagaan koperasi dan lembaga pembiayaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Berdaya Saing	1. Peningkatan daya tarik wisata melalui pengembangan destinasi baru, promosi pariwisata, dan pembinaan pelaku usaha pariwisata. 2. Revitalisasi objek wisata unggulan di Kota Padang Panjang.
Meningkatkan Pertanian Modern dan Industri Lokal	1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan melalui pembinaan, fasilitasi sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur pendukung. 2. Pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal seperti industri kapur.
Menanggulangi Kemiskinan dan Membangun Kota Inklusif	1. Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. 2. Penyediaan bantuan sosial dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. 3. Rehabilitasi rumah tidak layak huni serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan.
Memperkuat Investasi dan Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	1. Penguatan pelayanan perizinan investasi yang mudah, cepat, dan transparan. 2. Peningkatan promosi investasi melalui pembentukan Klinik Investasi. 3. Pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dan pelaksanaan bursa kerja (job fair).
Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan strategis kota. 2. Penyediaan hunian layak melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 3. Penyediaan sarana transportasi ramah lingkungan, termasuk transportasi gratis bagi siswa dan penataan parkir di kawasan pasar. 4. Penyediaan air siap minum dan air kemasan lokal sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Mewujudkan Ekologi Hijau dan Kota Tangguh Bencana	1. Penguatan pengelolaan sampah berbasis kemitraan dengan teknologi ramah lingkungan. 2. Pembangunan Bank Sampah Induk tingkat kota dan unit bank sampah di kelurahan. 3. Revitalisasi kawasan melalui program Kali Bersih dan vertical garden. 4. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui pembinaan kelompok siaga bencana, penyediaan sarana prasarana kebencanaan, dan sistem peringatan dini.
Mewujudkan Birokrasi Profesional dan Adaptif	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Prioritas Pembangunan Daerah	Keterangan
	2. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Penguatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan berbasis sistem merit.
Mewujudkan Kota Serambi Mekah yang Religius dan Berbudaya Islami	1. Optimalisasi peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. 2. Pembangunan museum tokoh Islam dan pusat pertunjukan budaya Islami. 3. Implementasi program “Satu Rumah Satu Hafidz” dalam rangka pembinaan karakter generasi muda. 4. Pelestarian seni, permainan tradisional, dan penguatan peran lembaga adat dalam kehidupan sosial.
Membangun Kota Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan	1. Penyediaan ruang dan wadah aktivitas bagi lansia dan penyandang disabilitas. 2. Fasilitasi kegiatan rekreatif, edukatif, dan spiritual bagi kelompok rentan.

Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Padang Panjang, berbagai **Program Unggulan Kepala Daerah** diklasterkan ke dalam Prioritas Pembangunan Daerah. Setiap prioritas dirancang untuk memberikan arah yang lebih fokus dan terukur terhadap pencapaian tujuan pembangunan, dengan mengintegrasikan kegiatan lintas sektor sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Program-program unggulan yang telah disusun di bawah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan, sekaligus memperkuat identitas Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah yang Religius dan Berbudaya Islami:

Tabel 4.7
Program Unggulan Kepala Daerah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026

Program Unggulan	Keterangan	Program Prioritas
Pendidikan yang Humanis	Penataan SMP 6 (Asrama, Mobiler, Saprass Pendukung, SDM Pendukung, Ekskul); Seragam Gratis SD dan SMP; Peningkatan Saprass SD dan SMP; Pemeliharaan/Operasional SD dan SMP; Peningkatan SDM Tenaga Pendidik; Rehabilitasi dan Utilitas Sekolah; Sistem Pembelajaran Berbasis Digital; Internalisasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Adat; Transportasi Gratis; Apraisal pengadaan tanah SMA 4	Transformasi Pendidikan Inovatif Menuju Generasi Emas
Beasiswa	Beasiswa SD-SMP Miskin dan Berprestasi; Beasiswa SMA Miskin dan Berprestasi; Komite Gratis Bagi Siswa SMA Melalui BKK; Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi; Beasiswa Calon Ulama	
Atlet Berprestasi	Pembinaan Atlet dan Hibah Koni	
Padang Panjang Youth Center	Penyediaan Tempat dan sarana	
Kawal Golden Ages (1000 Hari Pertama)	Pemberian Makanan Tambahan (PMT); Pemeriksaan Kesehatan	Mewujudkan Kesehatan Unggul dan Keluarga



Program Unggulan	Keterangan	Program Prioritas
Kehidupan)/Stunting	Gratis; Pendampingan Keluarga Stunting; Pelaksanaan Sekolah Ibu	Sehat
Padang Panjang Creative Hub	Penyelenggaraan Kegiatan dan Design Produk; Rebranding senken (Konsultan dan Rehab)	Mendorong Ekonomi Kreatif dan UMKM Berdaya Saing
Tabungan Bersama	Subsidi Bunga; Pembinaan Koperasi Merah Putih; Rehab Irigasi	
TIMISAKE (Tiga Milyar Satu Kecamatan)	2 Kecamatan (Pemberdayaan Ekonomi/ Event) -> Anggaran Musrenbang; Pusat pembelajaran masyarakat kelurahan (sekolah kelurahan)	
Convention Hall	Pembangunan+MK; Perencanaan Landscape dan Taman Tematik	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Padang Panjang Semarak Festival	Stimulan penyelenggaraan event; Festival Serambi Makkah; Pacu Kudo	
Bersama PT KAI	Event Gelanggang Arang	
Revitalisasi PDIKM	Penataan taman; Rehab toilet; Perbaikan bak kompos; Pembenahan rumah pembibitan; Menambah koleksi buku; Reproduksi ulang koleksi foto; Digitalisasi Naskah Kuno dan Produk2 Kebudayaan; Display informasi digital; Pembenahan dan Rehab Sarana prasarana PDIKM	
Tungku Kapur Menyala Rakyat Sejahtera	Feasibility Study Industri Kapur; Pengurusan WUPR; Rencana Pengelolaan	Meningkatkan Pertanian Modern dan Industri Lokal
Kemiskinan	Bantuan berusaha bagi keluarga miskin	Menanggulangi Kemiskinan dan Membangun Kota Inklusif
Kota Ramah Investasi	Kajian Investasi; Promosi Investasi (Bioskop, Playground, Investor PLTS, Mikro Hidro dan angin); Klinik Investasi; Job Fair; Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; BPJS Pekerja Rentan; Kajian EBT (Surya, Mikro Hidro dan Angin)	Memperkuat Investasi dan Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja
Pendirian BUMD	Kajian potensi daerah; Studi kelayakan; Koordinasi pendirian	
Pengembangan Kota Baru (Pemanfaatan Tanah Eks Erfach)	Master Plan Pemanfaatan Tanah Erfach	Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan
Pemanfaatan Tanah TNI	Perencanaan dan Amdal Pembangunan Alun-Alun Kota	Mewujudkan Ekologi Hijau dan Kota Tangguh Bencana
Taman Kota PaPa	Penataan Wajah Kota (bibit Tanaman)	
ASN Gemilang	Peningkatan Kapasitas ASN	Mewujudkan Birokrasi Profesional dan Adaptif
Islamic Center Pusat Syiar Islam dan Wisata Religi	Pembangunan Miniatur Ka'bah; Pengawasan Miniatur Ka'bah; Genset dengan daya terintegrasi dengan CH; Pembangunan dan Pengawasan Lontar Jumrah; Sarana Prasarana (Lampu Hias Mihrab, Loker, Penyimpanan Sepatu, Kamar Mandi); Aktivitas Dakwah Islamic Center (operasional, event); Tahfiz Plus Pendidikan Calon Ulama	Mewujudkan Kota Serambi Mekah yang Religius dan Berbudaya Islami
Bersama KAN	Tokoh Adat Masuk Sekolah	



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Program Unggulan	Keterangan	Program Prioritas
Graha Disabilitas	Operasional Graha Disabilitas (permakanaan bagi disabilitas terlantar, peringatan HDI, pelatihan bagi penyandang disabilitas (10 jenis))	Membangun Kota Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan
Istana Lansia	Operasional Istana Lansia (bantuan permakanaan, wirid bulanan, pemeriksaan kesehatan gratis, studi dakwah)	

4.3 DUKUNGAN RKPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2026 TERHADAP RKP TAHUN 2026 DAN RKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

4.3.1 Dukungan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 Terhadap Prioritas RKP Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Padang Panjang melaksanakan berbagai program yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program-program tersebut tidak hanya menjadi instrumen pencapaian target pembangunan kota, tetapi juga bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional secara terpadu. Rincian program yang telah dipetakan ke dalam masing-masing Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
**Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas
Nasional Tahun 2026**

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara & kemandirian bangsa (swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, hijau, biru)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur & lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, agromaritim, koperasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA



PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
PN 4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, pemuda, disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
PN 5 Melanjutkan hilirisasi & industri berbasis SDA	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
PN 6 Membangun dari desa & dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, pemberantasan kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA



PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM
PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, pemberantasan korupsi/narkoba/judi/penyelundupan	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, budaya & toleransi	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

(*: Prioritas Nasional dalam RPJMN)

4.3.2 Dukungan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 Terhadap Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menetapkan berbagai program pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan daerah. Program-program tersebut mencakup upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kehidupan sosial kemasyarakatan, pengembangan sektor pertanian,



perikanan, perdagangan, industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif, pariwisata, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Berikut ini disajikan pemetaan program-program Kota Padang Panjang berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 4.9
Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PROGRAM
PP 1 Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PP 2 Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
PP 3 Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PP 4 Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI



PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PROGRAM
PP 5 Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
PP 6 Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KUNO
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
PP 7 Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN



PRIORITAS PROVINSI SUMATERA BARAT	PROGRAM
PP 8 Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	EKONOMI KREATIF
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

4.4 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang JMD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang selanjutnya diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.



Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Berikut adalah hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Padang Panjang.

Tabel 4.10
Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2026

No	Masalah	Telaahan	Urusan	Sub Kegiatan	
1	Sarana dan prasarana PAUD belum memenuhi standar layanan pendidikan	Perlu dukungan bantuan sarana dan prasarana pendidikan PAUD	Pendidikan	1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
				2	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
				3	Pengadaan Perlengkapan PAUD
				4	Pengadaan Mebel PAUD
2	Terdapat gedung sekolah yang terbengkalai dan tidak berfungsi optimal	Perlu peningkatan dan penyelesaian pembangunan sarana prasarana sekolah	Pendidikan	1	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				4	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
3	Warga kurang mampu kesulitan membiayai pendidikan anak	Perlu bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu	Pendidikan	1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
				2	Pengadaan Perlengkapan Siswa
				3	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	Lembaga/yayasan pendidikan kekurangan sarana prasarana penunjang	Perlu hibah sarana prasarana kepada lembaga/yayasan pendidikan	Pendidikan	1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
				2	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
				4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5	Sarana dan prasarana kelompok/organisasi sosial masyarakat masih terbatas	Perlu dukungan sarana prasarana bagi lembaga pemberdayaan masyarakat	Kebudayaan	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
				2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
				3	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
			Sosial	4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
				5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
				6	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				7	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
6	Kapasitas kader	Perlu peningkatan	Sosial	1	Peningkatan Kemampuan



No	Masalah	Telaahan	Urusan	Sub Kegiatan	
	karang taruna dan kader pemberdayaan masyarakat masih rendah	kapasitas kader pemberdayaan masyarakat			Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
7	Kesiapsiagaan bencana masih rendah sehingga korban sulit diminimalisir	Perlu peningkatan program penanggulangan bencana	BPBD	1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
				4	Respons Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Sosial	5	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
8	Relawan kebencanaan belum memiliki kapasitas yang memadai	Perlu peningkatan kapasitas relawan kebencanaan	Sosial	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			BPBD	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
9	Fasilitas penunjang wisata edukasi masih terbatas	Perlu dukungan sarana prasarana kegiatan wisata edukasi	Pariwisata	1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
10	Destinasi wisata belum berkembang optimal	Perlu peningkatan dan pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				2	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
11	Aktivitas ekonomi kreatif kurang terekspos karena minim event	Perlu penyelenggaraan event untuk mendukung ekonomi kreatif	Pariwisata	1	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
				2	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				3	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
12	Lingkungan kampung KB belum memiliki identitas visual yang menarik	Perlu pembangunan gerbang kampung KB	Pengendalian Penduduk	1	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
13	Peternak kecil dari keluarga miskin kekurangan modal usaha dan bibit	Perlu bantuan bibit ternak bagi peternak ekonomi lemah	Pertanian	1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				2	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
14	Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas	Perlu peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan	Pertanian	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
15	Kelompok tani kekurangan alat dan bahan pertanian	Perlu bantuan sarana prasarana pertanian bagi kelompok tani	Pertanian	1	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
16	Seni tradisional dan adat istiadat kurang	Perlu program dan kegiatan pelestarian	Kebudayaan	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan



No	Masalah	Telaahan	Urusan	Sub Kegiatan	
	mendapat ruang pelestarian	adat dan seni tradisional			Pranata Tradisional
				2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
17	Atlet di berbagai cabang olahraga kurang mendapatkan pelatihan profesional	Perlu peningkatan kualitas atlet melalui pelatihan	Pemuda dan Olahraga	1	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
				2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
18	Kelompok olahraga masyarakat kekurangan peralatan	Perlu bantuan peralatan olahraga bagi kelompok olahraga masyarakat	Pemuda dan Olahraga	1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
19	Garin masjid/mushalla kurang mendapatkan pembinaan	Perlu peningkatan kapasitas garin masjid dan mushalla	Sekretariat daerah	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
20	Minat generasi muda dalam mempelajari Alquran masih rendah	Perlu lomba-lomba Qur'an untuk meningkatkan minat dan bakat anak	Sekretariat daerah	1	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
21	Keterampilan public speaking pemuda di kelurahan masih rendah	Perlu pelatihan dan pembinaan keterampilan public speaking bagi pemuda	Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
22	Daerah rawan banjir belum memiliki drainase memadai	Perlu rehabilitasi drainase sebagai upaya penanggulangan banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
23	Saluran irigasi di kawasan pertanian belum memadai	Perlu perbaikan saluran irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				2	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
24	Banyak rumah masyarakat miskin tidak layak huni	Perlu program rehabilitasi rumah tidak layak huni	Perumahan dan Permukiman	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
25	Tebing di kawasan permukiman rawan longsor	Perlu peningkatan sarana prasarana penunjang lingkungan (PSU)	Perumahan dan Permukiman	1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
26	Sebagian masyarakat miskin belum memiliki akses listrik dan air bersih	Perlu bantuan instalasi listrik dan sambungan air bersih bagi keluarga miskin	Provinsi	1	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
27	Masyarakat miskin kesulitan memperoleh modal usaha	Perlu program bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin	Perdagangan	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
28	UMKM masih kekurangan sarana prasarana untuk mengembangkan usaha	Perlu dukungan sarana prasarana penunjang bagi UMKM	Perdagangan	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

4.5 INOVASI DAERAH

4.5.1 Urgensi Inovasi Daerah

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, inovasi daerah menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi daerah berfungsi untuk mendorong efektivitas, efisiensi, kreativitas, dan adaptabilitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, percepatan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan inovasi daerah telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 386, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memperjelas mekanisme, prinsip, bentuk, serta ruang lingkup inovasi daerah.

Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa inovasi daerah harus memenuhi prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan publik, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, teknis, maupun keuangan. Inovasi daerah dapat berupa inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, serta inovasi bentuk lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk mendorong tumbuhnya budaya inovasi di seluruh perangkat daerah melalui penyusunan peta jalan inovasi, pelaksanaan program dan kegiatan berbasis inovasi, serta evaluasi inovasi secara berkala. Inovasi daerah juga menjadi salah satu parameter dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, sebagaimana termuat dalam sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Dengan demikian, pengembangan inovasi daerah merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Komitmen seluruh unsur pemerintah daerah, mulai dari kepala daerah, perangkat daerah, hingga aparatur sipil negara, sangat diperlukan untuk menginternalisasi semangat inovasi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



4.5.2 Permasalahan Inovasi Daerah

Teridentifikasi dalam upaya pengembangan inovasi daerah di Kota Padang Panjang antara lain:

1. Belum Optimalnya Integrasi Inovasi dalam Perencanaan Strategis

Meskipun telah melaporkan 154 inovasi pada IGA 2024, banyak inovasi tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD atau Renstra OPD, sehingga keberlanjutannya kurang terjamin.

2. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Beberapa inovasi, seperti aplikasi "Paduko" untuk layanan administrasi kependudukan, menunjukkan keberhasilan. Namun, implementasi inovasi lainnya masih terkendala oleh keterbatasan kemampuan teknis dan manajerial ASN dalam mengelola serta mengembangkan inovasi secara berkelanjutan.

3. Kurangnya Dokumentasi dan Replikasi Inovasi

Inovasi yang telah berhasil belum terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit untuk di replikasi oleh perangkat daerah lain atau dijadikan acuan untuk pengembangan lebih lanjut.

4. Minimnya Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal

Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan komunitas masyarakat dalam pengembangan inovasi masih terbatas, menghambat pertukaran ide dan sumber daya yang dapat memperkaya inovasi daerah.

5. Terbatasnya Anggaran untuk Pengembangan Inovasi

Alokasi anggaran untuk mendukung riset, pengembangan, dan implementasi inovasi masih terbatas, sehingga beberapa inisiatif inovatif tidak dapat direalisasikan secara optimal.

6. Kurangnya Evaluasi dan Monitoring Terhadap Inovasi yang Dilaksanakan

Evaluasi terhadap efektivitas dan dampak dari inovasi yang telah diterapkan belum dilakukan secara sistematis, menyulitkan dalam mengukur keberhasilan dan menentukan langkah perbaikan.

4.5.3 Perkembangan Inovasi Daerah

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong penguatan



inovasi daerah sebagai salah satu pilar utama percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan regulasi pendukung, pembentukan kelembagaan inovasi, serta pengembangan ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

Pada tahun 2024, Kota Padang Panjang berhasil mencatatkan pencapaian yang membanggakan dalam bidang inovasi daerah dengan mendokumentasikan sebanyak 154 inovasi pada sistem penilaian *Innovation Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Atas capaian tersebut, Kota Padang Panjang kembali dianugerahi predikat sebagai Kota Sangat Inovatif, mempertahankan status yang telah diraih dalam beberapa tahun terakhir. Pencapaian ini menjadi indikator nyata bahwa inovasi telah terintegrasi ke dalam berbagai sektor pembangunan daerah, sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Sejumlah inovasi unggulan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang antara lain mencakup aplikasi layanan administrasi kependudukan daring “Paduko”, yang telah meningkatkan kecepatan dan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan dasar berbasis teknologi informasi. Di sektor kesehatan, program “Sikamek Ceting” yang dikembangkan oleh Puskesmas Busur menjadi salah satu contoh praktik baik dalam percepatan penanganan stunting berbasis kader gizi masyarakat. Selain itu, dalam bidang lingkungan hidup, Kota Padang Panjang mengimplementasikan program pengelolaan persampahan berbasis partisipasi masyarakat, yang berkontribusi terhadap pengurangan volume sampah serta peningkatan kesadaran lingkungan di tingkat komunitas.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang menyadari bahwa penguatan inovasi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Integrasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, masih perlu ditingkatkan. Kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan inovasi berbasis teknologi informasi juga memerlukan penguatan, di samping perlunya peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan perguruan tinggi dalam rangka mempercepat proses inkubasi serta replikasi inovasi. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan turut menjadi faktor penghambat yang perlu mendapatkan perhatian serius ke depan.



Pengembangan inovasi daerah di Kota Padang Panjang dilaksanakan sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menegaskan bahwa inovasi merupakan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan mengedepankan prinsip kreativitas, kebaruan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, inovasi diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan transparan.

Dengan berbagai capaian yang telah diraih, serta kesadaran terhadap tantangan yang masih dihadapi, Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus mengakselerasi pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Penguatan inovasi diyakini sebagai prasyarat penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang secara menyeluruh.

Upaya dan hasil kinerja pengembangan inovasi daerah diukur oleh Kementerian dalam Negeri melalui Penilaian Indeks Inovasi Daerah atau juga dikenal dengan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian indeks inovasi daerah terdiri atas bermacam variabel dengan melibatkan tim penilai dari berbagai unsur (pemerintah, akademisi, profesional, dan lain). Berdasarkan hasil penilaian Kemendagri atas inovasi daerah yang dilaporkan maka capaian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Capaian dan Indeks Inovasi Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tahun	Nomor Surat Keputusan	Jumlah Inovasi Daerah	Nilai Indeks	Peringkat dan Predikat	Keterangan
2018	Keputusan Kepala BPP Kemendagri Nomor: 002.6/3445/LITBANG, Tanggal 22 Agustus 2019, perihal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018		440	33 (kurang inovatif)	Menggunakan bobot
2019	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-415 Tahun 2019, tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada BPP Kemendagri Tahun 2019	93	13.050	24 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot
2020	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020	55	1.964	20 (sangat inovatif)	Menggunakan bobot. Skor bobot masing-masing indikator inovasi diperkecil.

Tahun	Nomor Surat Keputusan	Jumlah Inovasi Daerah	Nilai Indeks	Peringkat dan Predikat	Keterangan
2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.5-5848 Tahun 2021, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021	89	64,08	3 (Terinovatif)	Penghitungan nilai inovasi berubah dari bobot ke indeks.
2022	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11 – 6301.A Tahun 2022, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022	117	62,04	7 (Terinovatif)	Penghitungan indeks berubah dengan memberikan porsi signifikan terhadap kuantitas inovasi
2023	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11 – 6287 Tahun 2023, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023	55	63,28	Sangat Inovatif	Penghitungan sama dengan tahun 2022
2024	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11 – 4898 Tahun 2024, tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024	154	81,35	Sangat Inovatif	-

4.5.4 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan penguatan inovasi daerah sebelumnya, dirumuskan kerangka kerja penguatan inovasi daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan penguatan inovasi daerah sebelumnya, dirumuskan kerangka kerja penguatan inovasi daerah Kota Padang Panjang sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Digital dan Teknologi Informasi

Rencana tindak lanjut pertama adalah meningkatkan infrastruktur digital di seluruh instansi pemerintah Kota Padang Panjang. Hal ini meliputi penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, serta pengembangan jaringan yang stabil dan aman untuk mendukung implementasi sistem administrasi berbasis digital. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi terkini dalam melayani masyarakat.

2. Integrasi Inovasi dalam Perencanaan Daerah

Untuk memastikan keberlanjutan inovasi, penting bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mengintegrasikan program inovasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra). Hal ini akan memperjelas arah kebijakan dan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi inovasi yang lebih sistematis dan terukur.

3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Perguruan Tinggi

Meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan perguruan tinggi menjadi prioritas dalam rangka menciptakan ekosistem inovasi yang lebih inklusif. Dengan kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam hal penelitian, pengembangan produk inovatif, serta replikasi dan pengembangan inovasi yang telah terbukti berhasil. Hal ini juga penting untuk mempercepat proses inkubasi inovasi dan memastikan keberlanjutannya.

4. Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Riset dan Pengembangan

Pemerintah Kota Padang Panjang perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D). Hal ini akan mendukung penciptaan inovasi baru serta penyempurnaan inovasi yang sudah ada. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah juga dapat menjalin kemitraan dengan lembaga penelitian dan perusahaan teknologi yang dapat memberikan kontribusi terhadap inovasi daerah.

5. Pendidikan dan Pelatihan Inovasi untuk SDM

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam bidang inovasi menjadi kunci penting dalam pengembangan inovasi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan inovasi yang melibatkan ASN, masyarakat, serta pelaku usaha lokal untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola serta mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi daerah.

6. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan

Untuk memastikan keberhasilan implementasi inovasi, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Padang Panjang akan mengembangkan sistem evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak inovasi terhadap pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi kekurangan serta peluang perbaikan dalam setiap program inovasi yang dilaksanakan.

7. Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat



Inovasi daerah yang berhasil harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Panjang akan melaksanakan program pemberdayaan komunitas untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengusulkan dan mengembangkan inovasi yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan. Pembentukan forum inovasi daerah yang melibatkan masyarakat luas akan memperkuat kesadaran akan pentingnya inovasi untuk kesejahteraan bersama.

8. Perbaikan Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Menyusun regulasi yang mendukung pengembangan inovasi daerah adalah langkah penting dalam menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Pemerintah Kota Padang Panjang akan melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada dan melakukan pembaruan yang diperlukan untuk mendorong tumbuhnya inovasi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, ekonomi.



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan pembangunan merupakan upaya yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, memenuhi Standar Pelayanan Minimal, serta mendukung penyelenggaraan pelayanan dan urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah program dan kegiatan yang lebih konkret untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sesuai dengan bidang urusan pemerintahan daerah, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar, serta urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai target prioritas pembangunan tahun 2026, direncanakan sebanyak 122 program, 287 kegiatan, dan 672 subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang. Rekapitulasi kebutuhan dana atau pagu indikatif Kota Padang Panjang, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 berdasarkan Perangkat Daerah, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 2.52
Rekapitulasi Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	%	PAGU VALIDASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	12	73	21,41%	124.967.092.215
DINAS KESEHATAN	5	15	49	29,01%	169.303.603.570
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	18	37	8,41%	49.060.420.391
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	14	21	34	2,97%	17.346.488.668
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	4	17	42	1,71%	9.977.765.786
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	4	7	13	1,52%	8.893.284.000



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUBKEGIATAN	%	PAGU VALIDASI
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	11	23	0,93%	5.449.783.890
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	10	21	40	1,44%	8.394.979.977
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	5	5	0,45%	2.604.579.600
DINAS PERHUBUNGAN	2	10	23	1,74%	10.129.955.233
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	9	18	1,04%	6.084.899.843
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12	17	30	2,88%	16.805.160.383
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8	16	32	1,68%	9.804.378.159
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	4	12	0,80%	4.692.828.533
SEKRETARIAT DAERAH	3	16	46	5,65%	32.957.316.819
SEKRETARIAT DPRD	2	14	40	4,88%	28.487.694.743
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	14	21	2,54%	14.838.213.045
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4	11	31	1,95%	11.371.734.853
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	10	22	1,81%	10.555.337.170
INSPEKTORAT DAERAH	3	9	27	0,94%	5.500.947.300
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	5	11	21	2,50%	14.596.454.276
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	5	11	22	2,35%	13.716.423.140
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	5	8	11	1,38%	8.035.491.406
Jumlah	122	287	672	100%	583.574.833.000

Selanjutnya Rencana Program dan kegiatan Kota Padang Panjang Tahun 2026 dapat diuraikan pada Tabel 5.2 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						124.967.092.215,00							3.087.420.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						123.372.924.215,00							3.087.420.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						123.372.924.215,00							3.087.420.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						63.526.672.343,00						-	87.420.000,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	63.526.672.343,00	-	-	-	-	-	-	87.420.000,00	-
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.273.778.343,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milennial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	57.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				580 Orang/bulan	60.216.358.343,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	57.420.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		57.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	522.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	160.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	52.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	295.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	435.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				70 Unit	210.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	225.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	935.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.750.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	130.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	800.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.360.144.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	55.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	25.144.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.250.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						59.696.251.872,00						-	3.000.000.000,00	
		[Meningkatkan Partisipasi Anak Usia Sekolah]	APK Paud (3-6 tahun)	106.90	106.00	106.10	106.30	59.696.251.872,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000.000,00	-
			APK SD sederajat	107.50	107.00	107.10	107.20									
			APK SMP sederajat	59	50	51	53									
			APS PAUD (5-6 Tahun)	70	62	63	64									
			APS SD sederajat	97.55	97.50	97.51	97.52									
			APS SMP sederajat	99.75	99.70	99.71	99.72									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	-			38 Satuan Pendidikan	23.323.983.472,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	8.706.860.150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REKREASI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	463.840.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	353.400.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	254.320.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				32 Unit	350.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	320.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				90 Orang	2.573.335.050,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				363 Orang	335.360.225,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				38 Satuan Pendidikan	63.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				114 Orang	5.035.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				38 Orang	115.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				369 Paket	380.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3.161.738.047,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				38 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	850.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				284 Peserta Didik	301.930.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	29.999.748.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	13.500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	4.000.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	850.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2.500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				4 Paket	542.320.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				6 Unit	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				122 Peserta Didik	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				520 Peserta Didik	454.088.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				42 Orang	1.400.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				254 Orang	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				13 Satuan Pendidikan	36.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				39 Orang	5.029.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOS REGULER	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				13 Orang	58.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				13 Satuan Pendidikan	18.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				380 Paket	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	118.920.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	122.920.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	5.101.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	45.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				0 Orang	4.021.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	250.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				58 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				0 Orang	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				58 Orang	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta didik	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	160.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	345.400.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	65.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.270.920.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Orang	157.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10 Orang	112.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	18.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0 Orang	17.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	121.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	231.920.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	149.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	98.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	117.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket	155.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	95.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						150.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan]	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100	20	20	30	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-			-	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				50 Orang	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.594.168.000,00							0,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.594.168.000,00							0,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.594.168.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	75.55	66.16	75	75.10	1.594.168.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	880.000.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	880.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	540.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	210.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				1 Laporan	330.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	174.168.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				3 Unit	174.168.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						69.495.607.150,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						69.495.607.150,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						69.495.607.150,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						52.281.807.650,00						-	0,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	52.281.807.650,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	51.536.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				579 Orang/bulan	51.485.900.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	51.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	114.999.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.499.650,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggahan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			85 Persen	160.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	70.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	329.908.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	288.908.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			95 Persen	140.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	35.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						17.041.299.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu (AKI) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	10.93 315 8.00	0 9.49	10.93 315 9.39	10.93 315 9.39	17.041.299.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	-			85 Persen	5.901.349.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	5.071.349.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	17.041.299.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	10.93 315	0 9.49	10.93 315	10.93 315	17.041.299.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
			Angka Kematian Ibu (AKI)	8.00		9.39	9.39									
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)													
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	800.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	11.139.950.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				932 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				909 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				823 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3567 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7146 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22407 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5689 Orang	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6147 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1043 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				150 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1400 Orang	35.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1510 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	1.288.950.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	75.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				15 Dokumen	8.450.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	66.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	850.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						15.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	68	68	68	68	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan	-			92,5 Persen	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				37 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				80 Orang	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						32.500.500,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	49.3	49.3	49.3	49.3	32.500.500,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			95 persen	10.000.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				30 Dokumen	10.000.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				30 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	<i>Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga</i>	-			80 persen	17.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
			<i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i>				50 Unit	17.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						125.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	57.50	57.50	57.50	57.50	125.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	-			5 Kegiatan	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas</i>	-			16 Kelurahan	25.000.000,00			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KOTO KATIK						1.052.456.640,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.052.456.640,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.052.456.640,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						760.656.640,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	760.656.640,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-			100 persen	105.656.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	65.656.640,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			95 Persen	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-			1 BLUD	625.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	625.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						125.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	125.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						166.800.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	166.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	166.800.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KOTO KATIK
		PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS						1.708.725.780,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.708.725.780,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.708.725.780,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.481.725.780,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 persen	186.523.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	146.523.440,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			95 Persen	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-			1 BLUD	1.265.202.340,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.265.202.340,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						125.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	125.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						102.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	102.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	102.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
		PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN						1.334.787.360,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.334.787.360,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.334.787.360,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.032.787.360,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 persen	152.787.360,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	112.787.360,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			95 Persen	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan</i>	-			1 BLUD	850.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	850.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						125.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	125.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						177.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	177.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	177.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
		PUSKESMAS GUNUNG						1.137.030.640,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.137.030.640,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.137.030.640,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						859.030.640,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 persen	179.030.640,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	139.030.640,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			95 Persen	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	-			1 BLUD	650.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	650.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS GUNUNG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						125.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	-			82 Persen	125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	125.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS GUNUNG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						153.000.000,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	153.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	PUSKESMAS GUNUNG
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	153.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	PUSKESMAS GUNUNG
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						94.574.996.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						94.574.996.000,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						94.574.996.000,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						90.000.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	90.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	90.000.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						4.574.996.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.574.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-	-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	4.574.996.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						49.060.420.391,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						49.056.370.391,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						49.056.370.391,00							0,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.938.240.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	6.938.240.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.180.740.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				686 Orang/bulan	6.139.700.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41.040.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	157.750.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.250.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	226.750.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	204.750.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	373.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	55.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	OPSEN PKB	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	230.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	35.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	3.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						720.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas daerah irigasi k ewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	90.04	88.84	89.04	89.24	720.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	220.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				0,03 KM	220.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,5 KM	250.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1500 KM	250.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb angunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						250.000.000,00						-	0,00	
		[meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	89.6	88.4	88.6	88.8	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb angunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						500.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	90.8	89.6	89.8	90	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	500.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan				5 M³/Hari	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PAJAK AIR TANAH	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				2 M³/Hari	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						904.180.391,00						-	0,00	
		[meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	94.39	93.19	93.39	93.59	904.180.391,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	904.180.391,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	354.180.391,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						35.830.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	48	46.8	47	47.2	35.830.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	35.830.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				2 Bangunan Gedung	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	35.500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				40 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						2.633.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungnya yang tertata]	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	0	0	0	0	2.633.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.633.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				2 Kawasan	2.633.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						1.000.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dalam kota]	Tingkat Kemantapan Jalan	90.54	89.34	89.54	89.74	1.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				0 KM	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,1 KM	500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						60.000.000,00						-	0,00	
		[meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi	100	0	20	40	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	35.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb an gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				30 Orang	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb an gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb an gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				40 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemb an gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	10.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				30 Paket Pekerjaan	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						220.950.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Presentase Penyelesaian kasus Pelanggaran	100	72.5	75	80	220.950.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	75.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	95.950.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	45.950.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.050.000,00							0,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						4.050.000,00							0,00	
1.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						4.050.000,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	4.050.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.050.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				50 Laporan	4.050.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						16.735.477.178,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.548.406.470,00							0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						7.548.406.470,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.790.974.210,00						-	0,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90	90	90	90	6.790.974.210,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.960.400.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				658 Orang/bulan	5.908.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	51.600.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.258.750,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.758.750,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	73.569.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	73.569.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	368.991.760,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	343.991.760,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	245.754.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	139.480.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	31.330.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	22.444.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						425.166.300,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terpenuhiya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100	100	100	100	425.166.300,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	51.723.450,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	51.723.450,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	43.030.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	43.030.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	undefined	-			undefined undefined	330.412.850,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	330.412.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						132.265.960,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terpenuhiya rumah layak huni bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh]	persentase rumah layak huni	89.58	92.25	97.26	89.58	132.265.960,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	132.265.960,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				70 Unit Rumah	132.265.960,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						200.000.000,00						-	0,00	
		[meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	87.98	79.31	87.11	87.98	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	undefined	-			undefined undefined	200.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				2 Lokasi	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.187.070.708,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						9.187.070.708,00							0,00	
1.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						1.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP]	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100	100	100	100	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						84.989.800,00						-	0,00	
		[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	100	100	84.989.800,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	54.990.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	29.990.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	29.999.800,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	29.999.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						2.192.178.770,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	Persentase RTH	10.49	4.19	10.45	10.49	2.192.178.770,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	2.192.178.770,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				53 Ha	2.192.178.770,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						31.197.760,00						-	0,00	
		[Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LimbahB3)]	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola	32	32	32	32	31.197.760,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	31.197.760,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	16.406.450,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota														
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				20 Usaha	14.791.310,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						10.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	62	66.17	60	62	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				40 Badan Usaha	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						139.754.250,00						-	0,00	
		[Meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	100	100	100	139.754.250,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	139.754.250,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	17.458.550,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				16 Orang	4.899.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	117.395.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						78.454.650,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	1	1	1	78.454.650,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	78.454.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	78.454.650,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						8.536.700,00						-	0,00	
		[Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup]	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	100	100	100	8.536.700,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	8.536.700,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				5 Pengaduan	8.536.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						6.640.958.778,00						-	0,00	
		[Meningkatnya tata kelola persampahan]	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	98	99.19	98	98	6.640.958.778,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	6.640.958.778,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				7 Kelompok	45.202.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				23 Unit	914.052.838,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				15.000-20.000 Ton	5.681.703.440,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP						611.011.490,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						196.836.600,00							0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						196.836.600,00							0,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						196.836.600,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	196.836.600,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	23.958.400,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	458.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	104.835.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	74.835.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.043.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	34.045.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	3.990.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.008.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						414.174.890,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						414.174.890,00							0,00	
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						414.174.890,00						-	0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	414.174.890,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	414.174.890,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		0,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						9.977.765.786,00							10.820.630.147,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.305.634.586,00							10.109.023.147,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.305.634.586,00							10.109.023.147,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.995.720.536,00						-	6.066.393.993,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	5.995.720.536,00	-	-	-	-	-	-	6.066.393.993,00	-
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	-			90 persen	5.943.220.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	6.061.678.993,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				574 Orang/bulan	5.907.100.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		6.061.678.993,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	5.995.720.536,00	-	-	-	-	-	-	6.066.393.993,00	-
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	36.120.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	5.995.720.536,00	-	-	-	-	-	-	6.066.393.993,00	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	-			90 persen	2.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	2.715.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		2.715.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			90 persen	536,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	436,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	5.995.720.536,00	-	-	-	-	-	-	6.066.393.993,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	-			90 persen	50.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.968.423.900,00						-	3.575.469.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan PERDA]	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	-	100	100	2.968.423.900,00	-	-	-	-	-	-	3.575.469.000,00	-
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	-			5 operasi	2.603.047.400,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	3.553.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				55 laporan	2.602.980.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		3.549.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				2 Laporan	150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	250,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>				1 Unit	66.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Jumlah operasi penegakan Perda</i>	-			2 operasi	365.376.400,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	21.469.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	26.326.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		20.469.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				8 Laporan	339.050.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	-			1 kegiatan	100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						341.490.150,00						-	467.160.154,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran]	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	-	100	100	341.490.150,00	-	-	-	-	-	-	467.160.154,00	-
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	-			4 kegiatan	287.980.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	412.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				1 Orang	8.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	350,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				10 Keluarga	100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		-	-	-	-	-	-	341.490.150,00	-	-	-	-	-	-	467.160.154,00	-
	1.05.04.2.01.0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				15 Laporan	279.480.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		402.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		[Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran]	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100	-	100	100	341.490.150,00	-	-	-	-	-	-	467.160.154,00	-
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan</i>	-			2 kegiatan	49.974.700,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	50.010.154,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	17.405.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		17.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				16 Desa/Kelu rahan	32.569.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		32.610.154,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<i>Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</i>	-			100 persen	3.535.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia</i>				12 Laporan	3.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				1 Unit	35.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X	NON URUSAN						672.131.200,00							711.607.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						672.131.200,00							711.607.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						672.131.200,00						-	711.607.000,00	
		-	-	-	-	-	-	672.131.200,00	-	-	-	-	-	-	711.607.000,00	-
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 persen	100.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	1.128.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				175 Paket	100.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		1.128.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	-			90 persen	105.007.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	111.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.007.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		86.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	-			90 persen	111.744.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	147.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.004.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндu an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндu an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	82.740.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		118.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			90 persen	455.279.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	452.279.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	395.279.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		392.279.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	20.012.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	39.988.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						8.893.284.000,00							6.722.120.150,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.772.409.134,00							6.192.300.150,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.772.409.134,00							6.192.300.150,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.905.009.134,00						-	6.005.300.140,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	5.905.009.134,00	-	-	-	-	-	-	6.005.300.140,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.912.238.135,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	4.912.238.135,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4.912.238.135,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		4.912.238.135,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	147.527.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	253.062.005,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	94.527.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		205.062.005,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	682.243.499,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	677.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	37.243.499,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	645.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		645.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	163.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	163.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	35.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	8.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		8.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						333.700.000,00						-	97.000.010,00	
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100	100	100	100	333.700.000,00	-	-	-	-	-	-	97.000.010,00	-
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	333.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	97.000.010,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Lembaga	250.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		10,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	83.700.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		97.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						203.800.000,00						-	90.000.000,00	
		[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	203.800.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				459 Orang	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				22 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	153.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				12 Dokumen	88.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						294.100.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	100	100	100	294.100.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	294.100.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				2119 Orang	289.100.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1271 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						21.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana]	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	14.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	7.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a keamanan masyarakat , perлиндung an sosial, I nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	2.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	7.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	7.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						14.800.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100	100	100	100	14.800.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	14.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				98 Makam	14.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.120.874.866,00							529.820.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						82.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						52.000.000,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	52.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	2.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														
			0				10	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	8	10	7	8	52.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				26 Lembaga	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						10.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	26.17	26.17	26.17	26.17	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						10.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61.53	61.53	61.53	61.53	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						10.000.000,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				12 Orang	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2.038.874.866,00							529.820.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						46.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	Rata-rata jumlah anak per- keluarga	2.43	2.43	2.43	2.43	46.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	31.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	31.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				16 Unit	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						217.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	0	0	0	0	217.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	217.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				3 Organisasi	217.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.775.874.866,00						-	529.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	62	62	62	62	1.775.874.866,00	-	-	-	-	-	-	529.820.000,00	-	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	1.775.874.866,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	529.820.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)															
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				223 Orang	1.775.874.866,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		529.820.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						5.449.783.890,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.449.783.890,00							0,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5.089.783.890,00							0,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.674.783.890,00						-	0,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	3.674.783.890,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.972.960.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.945.600.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Balai-balai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	27.360.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	107.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	464.823.890,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	250.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	213.823.890,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	130.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						840.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	15.27	10.85	13.77	14.07	840.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	840.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	800.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Lembaga	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						175.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	84.45	54.45	59.45	64.45	175.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				1 Orang	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	150.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1 Orang	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						400.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi]	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	19883	7883	9883	11883	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				8000 Orang	400.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						360.000.000,00							0,00	
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						245.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100	-	75	80	245.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	245.000.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	245.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisata Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						100.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	25	-	3	3	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisata Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						15.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan perizinan berusaha berbasis risiko]	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	15.000.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				40 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				85 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						8.394.979.977,00							10.908.594.838,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.785.256.252,00							9.165.294.038,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						7.785.256.252,00							9.165.294.038,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.670.414.252,00						-	8.521.954.038,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	7.670.414.252,00	-	-	-	-	-	-	8.521.954.038,00	-
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	6.339.020.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian	-	6.898.179.146,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				754 Orang/bulan	6.302.900.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		6.898.179.146,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	36.120.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	183.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian	-	400.800.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		16.800.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		126.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		16.800.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		241.200.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-			100 %	45.500.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian	-	47.342.892,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		47.342.892,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		-	-	-	-	-	-	7.670.414.252,00	-	-	-	-	-	-	8.521.954.038,00	-
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	7.670.414.252,00	-	-	-	-	-	-	8.521.954.038,00	-
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	965.664.252,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian	-	715.282.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	4.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		4.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		210.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	811.664.252,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		500.782.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	-			100 %	137.230.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Dinas Pangan dan Pertanian	-	460.350.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	52.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Dinas Pangan dan Pertanian		322.350.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	24.330.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Dinas Pangan dan Pertanian		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	40.300.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		47.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		85.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0,5 Ha	100.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Dinas Pangan dan Pertanian		5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						104.842.000,00						-	608.340.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	Skor Pola Pangan Harapan	85.24	85.18	85.19	85.20	104.842.000,00	-	-	-	-	-	-	608.340.000,00	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	-			2400 kkal/kap/hari	24.842.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat, Kelompok Wanita Tani (KWT), Pedagang Besar dan Pedagang Kecil	-	88.340.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat, Kelompok Wanita Tani (KWT), Pedagang Besar dan Pedagang Kecil		55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2.202.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat, Kelompok Wanita Tani (KWT), Pedagang Besar dan Pedagang Kecil		5.700.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	12.640.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat, Kelompok Wanita Tani (KWT), Pedagang Besar dan Pedagang Kecil		27.640.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-			1 Ton	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	450.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Ton	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Angka Kecukupan Protein (AKP)	-			1851 kkal/ka pita/hari 57 gram/kapi ta/hari	60.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat	-	70.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						10.000.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan]	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	80	-	-	60	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	35.000.000,00	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-			1 laporan	10.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat	-	35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						609.723.725,00							1.743.300.800,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						164.201.725,00							574.178.800,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						89.151.725,00						-	574.178.800,00	
		[Meningkatkan produksi perikanan budidaya]	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	757	751.03	752	753	89.151.725,00	-	-	-	-	-	-	574.178.800,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang Menerapkan Teknologi Perikanan	-			20 orang	89.151.725,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	UPTD BBI, Masyarakat Pembudidaya Ikan, Kelompok Perikanan	-	574.178.800,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	73.651.725,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	UPTD BBI, Masyarakat Pembudidaya Ikan, Kelompok Perikanan		535.678.800,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	15.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	UPTD BBI, Masyarakat Pembudidaya Ikan, Kelompok Perikanan		38.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						75.050.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	Angka Konsumsi Ikan	42.92	41.98	42.16	42.35	75.050.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Tingkat Kota Padang Panjang dan Provinsi	-			2 kali	50.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	UPTD BBI, Poklahsar, Masyarakat	-	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	50.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	UPTD BBI, Poklahsar, Masyarakat		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Tingkat Kota Padang Panjang dan Provinsi	-			2 kali	75.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	75.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						445.522.000,00							1.169.122.000,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						141.854.000,00						-	423.354.000,00	
		[Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian]	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100	75 77	80	80 81	141.854.000,00	-	-	-	-	-	-	423.354.000,00	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	-			2 Jenis	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik Produksi Padi Produksi Tanaman Hias	-			2 kelompok 7444,3 ton 73039 tangkai	14.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	110.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	14.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat		110.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	-			7 ekor	62.854.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	262.854.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	62.854.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat		262.854.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	-			1 paket	35.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat	-	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	35.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	masyarakat		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	-			115 KK	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	UPTD PUSKESWAN	-	25.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				230 Ekor	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	UPTD PUSKESWAN		25.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						56.700.000,00						-	197.700.000,00	
		[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	100	75	80	80	56.700.000,00	-	-	-	-	-	-	197.700.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan</i>	-			1 unit	5.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Ternak	-	0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														
			<i>Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan</i>				1 Unit	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Kelompok Ternak		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>	-			1 unit 1 unit 1 unit	47.700.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat, UPTD RPH, Kelompok Tani	-	182.700.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat, UPTD RPH, Kelompok Tani		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	27.700.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat, UPTD RPH, Kelompok Tani		97.700.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>				1 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat, UPTD RPH, Kelompok Tani		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	-			27 ekor	4.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	UPTD PUSKESWAN	-	15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	UPTD PUSKESWAN		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						155.984.000,00						-	396.984.000,00	
		[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	13.64	11	11.11	11.62	155.984.000,00	-	-	-	-	-	-	396.984.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelayanan Medis Veteriner</i>	-			100 %	91.984.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat	-	261.984.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			<i>Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali</i>				1 Laporan	21.984.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat		131.984.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	<i>Jumlah Livestock Expo yang Diikuti</i> <i>Jumlah Sertifikasi Produk Peternakan/ Olahan</i>	-			1 kali 1 sertifikat	64.000.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat	-	135.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan														
			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi</i>				1 Unit Usaha	14.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						11.084.000,00						-	31.084.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	85	75	80	80	11.084.000,00	-	-	-	-	-	-	31.084.000,00	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	-			147 ha	11.084.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat	-	31.084.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				10 Ha	1.084.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat		16.084.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Masyarakat		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						79.900.000,00						-	120.000.000,00	
		[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	0 100	0 100	0 100	0 100	79.900.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	-			20 keltan	79.900.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Penyuluh serta Kelembagaan Tani Lainnnya	-	120.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Penyuluh serta Kelembagaan Tani Lainnnya		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				16 Unit	69.880.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Penyuluh serta Kelembagaan Tani Lainnya		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				16 Orang	20.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Penyuluh serta Kelembagaan Tani Lainnya		0,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.604.579.600,00							27.785.451.154,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.604.579.600,00							27.785.451.154,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						2.604.579.600,00							27.785.451.154,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.497.003.600,00						-	27.319.715.474,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	2.497.003.600,00	-	-	-	-	-	-	27.319.715.474,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.188.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	26.368.715.474,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				224 Orang/bulan	2.161.500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		26.333.715.474,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	27.360.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	108.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	198.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.700.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		170.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.143.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	235.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	35.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	96.143.600,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	68.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	318.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				1 0	38.300.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		243.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						0,00						-	203.778.780,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	54 67	30 96	34 62	38 63	0,00	-	-	-	-	-	-	203.778.780,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	52.145.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		52.145.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	151.633.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				10000 Dokumen	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		151.633.580,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						46.152.400,00						-	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	45 99.5	100 91.61	100 92	25 97.5	46.152.400,00	-	-	-	-	-	-	85.000.000,00	-
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	46.152.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1000 Layanan	46.152.400,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						61.423.600,00						-	151.989.900,00	
		[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	100	61.423.600,00	-	-	-	-	-	-	151.989.900,00	-
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	61.423.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	151.989.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		31.989.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	61.423.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						0,00						-	24.967.000,00	
		[Meningkatnya kualitas profil kependudukan]	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	100	100	0	0,00	-	-	-	-	-	-	24.967.000,00	-
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	24.967.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		24.967.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN						10.129.955.233,00							11.776.883.313,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.129.955.233,00							11.776.883.313,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						10.129.955.233,00							11.776.883.313,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.521.525.564,00						-	8.166.265.313,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	7.521.525.564,00	-	-	-	-	-	-	8.166.265.313,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.917.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	6.051.528.793,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				728 Orang/bulan	5.881.300.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.015.408.793,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	36.120.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		36.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	124.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	151.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		23.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	21.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		21.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		100.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.145.105.564,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.614.936.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.095.105.564,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.564.436.520,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	335.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	348.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	130.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	110.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						2.608.429.669,00						-	3.610.618.000,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	1 87	1 86.59	1 86.62	1 86.64	2.608.429.669,00	-	-	-	-	-	-	3.610.618.000,00	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	1.801.991.669,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	2.804.180.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1600 Unit	1.697.811.669,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		2.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	104.180.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		104.180.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	18.400.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	18.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				1 Dokumen	18.400.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		18.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-			-	10.500.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	10.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	60.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	35.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangun an Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan an	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	141.500.000,00			Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pembangun an Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan an	-	-	141.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	39.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan an	-		39.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	19.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		19.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	13.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	70.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	576.038.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	576.038.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	576.038.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatk an kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		576.038.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6.084.899.843,00							6.744.342.270,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.084.899.843,00							6.744.342.270,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6.064.899.843,00							6.724.342.270,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.547.545.400,00						-	5.236.987.827,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100	100	100	100	4.547.545.400,00	-	-	-	-	-	-	5.236.987.827,00	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.425.080.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	3.614.842.727,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/bulan	3.394.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		3.614.842.727,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	31.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	97.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	128.891.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		110.891.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	7.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	7.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	917.965.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.393.126.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		107.030.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	817.965.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.286.096.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	93.127.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		73.127.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	-	-	-	-	-	4.547.545.400,00	-	-	-	-	-	-	5.236.987.827,00	-
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100	100	100	100	4.547.545.400,00	-	-	-	-	-	-	5.236.987.827,00	-
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						962.234.600,00						-	962.234.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik]	Nilai keterbukaan informasi publik	92	-	87	88	962.234.600,00	-	-	-	-	-	-	962.234.600,00	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	962.234.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	962.234.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	887.515.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		887.515.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				15 Permohonan	6.552.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.552.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				2 Rekomend asi	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	68.167.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		68.167.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				300 Konten	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						555.119.843,00						-	525.119.843,00	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	indeks aspek layanan administrasi berbasis elektronik	4	-	4.00	4	555.119.843,00	-	-	-	-	-	-	525.119.843,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	555.119.843,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	525.119.843,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				3 Aplikasi	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				23 Perangkat Daerah	525.119.843,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		525.119.843,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						10.000.000,00							10.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						10.000.000,00						-	10.000.000,00	
		[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI)]	Indeks Pembangunan Statistik Domain Prinsip SDI	2.6	-	1.5	1.81	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk</i>				50 %	3.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.</i>				100 %	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				23 Orang	7.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						10.000.000,00							10.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						10.000.000,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah]	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	0	-	2	0	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						16.805.160.383,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.128.450.170,00							0,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9.128.450.170,00							0,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.563.250.170,00						-	0,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	7.563.250.170,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.214.220.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	6.168.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	45.420.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	163.423.200,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.423.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	458.276.809,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	458.276.809,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	384.236.310,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	45.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	336.736.310,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	343.093.851,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	77.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	52.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	22.935.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	175.158.651,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						40.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48.71	29.90	32.25	34.60	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	40.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				20 Unit Usaha	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
3.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						100.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya produktivitas koperasi]	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	33.00	9.09	9.09	9.09	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						350.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	23.14 32.14	15.00 16.60	19.04 25.00	20.00 26.66	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	350.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				20 Unit Usaha	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				40 Unit Usaha	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
5.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						1.075.200.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor	2.10	0.10	0.20	0.50	1.075.200.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	1.075.200.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				200 Unit Usaha	1.075.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.676.710.213,00							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						5.917.410.413,00							0,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						55.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	45	34	37	39	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	25.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						5.311.596.300,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	90	0	90	90	5.311.596.300,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	5.311.596.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2.615.919.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	2.695.677.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						32.600.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	90	100	90	90	32.600.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	32.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				250 Laporan	32.600.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						193.214.113,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya perlindungan konsumen di bidang metrologi legal]	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	90	0	90	90	193.214.113,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	193.214.113,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				780 Unit	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	93.214.113,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						325.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100	100	100	100	325.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	325.000.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				15 UMKM	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudny a Pertumbu han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut an	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				60 UMKM	125.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.759.299.800,00							0,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1.756.299.800,00						-	0,00	
		[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	60	-	60	60	1.756.299.800,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	1.756.299.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 dokumen Dokumen	350.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	600.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	806.299.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						3.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	80	80	80	80	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	3.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						9.804.378.159,00							17.303.861.130,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.824.013.809,00							7.993.861.130,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						6.824.013.809,00							7.993.861.130,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.969.418.909,00						-	5.575.861.130,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	0	0	0	0	4.969.418.909,00	-	-	-	-	-	-	5.575.861.130,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.721.280.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-	-	3.875.688.530,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				406 Orang/bulan	3.690.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangangan disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		3.844.608.530,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	31.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		31.080.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	134.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	148.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	24.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		28.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		90.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.927.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-	-	25.027.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2.419.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		4.519.100,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.507.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		20.507.900,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	985.711.909,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	1.393.645.600,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		2.200.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	90.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		115.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	893.511.909,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.276.445.600,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	133.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		52.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						739.999.900,00						-	198.000.000,00	
		[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	Rasio Wirausaha Pemuda	0	0	0	0	739.999.900,00	-	-	-	-	-	-	198.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	739.999.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-	-	198.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	64.999.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	75.000.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	600.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		48.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.014.595.000,00						-	2.120.000.000,00	
		[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	0	0	0	0	1.014.595.000,00	-	-	-	-	-	-	2.120.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				4 Unit	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdayasaing	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	49.995.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	370.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	49.995.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		370.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	400.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	400.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	364.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	1.750.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	125.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.750.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	239.600.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						100.000.000,00						-	100.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	25	0	25	25	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.950.364.350,00							9.280.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.950.364.350,00							9.280.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.680.000.350,00						-	8.680.000.000,00	
		[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0	0	0	0	1.680.000.350,00	-	-	-	-	-	-	8.680.000.000,00	-
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	1.680.000.350,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	8.680.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	1.625.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		8.430.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	20.000.050,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Lokasi	15.000.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						100.364.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata]	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	0	0	0	0	100.364.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	100.364.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	37.544.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	62.820.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						40.000.000,00						-	50.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif]	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia</i>				1 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-			-	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual														
			<i>Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif</i>				25 Produk	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						1.130.000.000,00						-	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	0	0	0	0	1.130.000.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	1.130.000.000,00			Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere- mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Meningkatk- an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing. Kep- ariwisataan Terwujudny- a Pertumbu- han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut- an	-	-	250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH- RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1.120.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere- mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Meningkatk- an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing. Kep- ariwisataan Terwujudny- a Pertumbu- han Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjut- an	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH- RAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				30 Orang	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	X	NON URUSAN						30.000.000,00							30.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						30.000.000,00							30.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						30.000.000,00						-	30.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4.692.828.533,00							4.858.956.520,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.692.828.533,00							4.858.956.520,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						4.692.828.533,00							4.858.956.520,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.692.828.533,00						-	4.858.956.520,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100	100	100	100	3.692.828.533,00	-	-	-	-	-	-	4.858.956.520,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	3.329.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	3.691.202.053,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				364 Orang/bulan	3.298.800.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		3.691.202.053,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	31.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			90 %	96.236.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	244.373.159,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		5.623.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		30.135.588,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4.236.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		15.236.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		193.377.171,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	-			90 %	171.660.683,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	694.406.422,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		30.604.422,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	146.160.683,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		662.802.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			80 %	95.051.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	228.974.886,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		58.461.818,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		118.461.818,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	6.165.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		24.165.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	8.886.250,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		27.886.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						898.622.950,00						-	0,00	
		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	79	72.47	74	75	898.622.950,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	217.074.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				50 Dokumen	48.622.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				145 Eksemplar	158.471.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustaka an	9.980.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	681.548.200,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudny a Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	39.750.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				9 Orang	463.328.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandisabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				68 Lokus	178.469.350,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						101.377.050,00						-	0,00	
		[Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	30	-	5	10	101.377.050,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	101.377.050,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				100 Orang	101.377.050,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		SEKRETARIAT DAERAH						32.957.316.819,00							46.106.535.161,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						32.957.316.819,00							46.106.535.161,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						32.957.316.819,00							46.106.535.161,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						27.286.329.340,00						-	32.126.535.161,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	27.286.329.340,00	-	-	-	-	-	-	32.126.535.161,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	-	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.717.860.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	15.440.015.161,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1540 Orang/bulan	14.523.100.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.245.015.161,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	194.760.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.935.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	4.290.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	75.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	800.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	2.000.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.655.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	2.660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	2.455.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.052.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.670.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	327.850.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	420.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		760.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.149.534.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				86 Unit	799.534.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	300.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	810.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Orang/Bulan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	3.366.360.340,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	3.580.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	2.177.447.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1.118.912.540,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	179.775.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	470.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	99.775.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	384.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	651.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				144 Laporan	206.340.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		421.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				6 Laporan	128.610.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						5.005.987.479,00						-	13.165.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat]	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	5.005.987.479,00	-	-	-	-	-	-	13.165.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	135.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	4.665.987.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	12.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				7 Dokumen	2.701.342.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	390.550.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				7 Dokumen	1.574.094.979,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		7.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	205.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	395.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				35 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				10 Kasus	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						665.000.000,00						-	815.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	60	1	60	60	665.000.000,00	-	-	-	-	-	-	815.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			-	475.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	45.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				3 Dokumen	400.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	110.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				300 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				90 Dokumen	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				230 Orang	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						28.487.694.743,00							27.014.287.280,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						12.494.103.131,00							9.670.743.490,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						12.494.103.131,00							9.670.743.490,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						41.040.000,00						-	0,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	41.040.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	41.040.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41.040.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						12.453.063.131,00						-	9.670.743.490,00	
		[Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD]	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	100	92	100	100	12.453.063.131,00	-	-	-	-	-	-	9.670.743.490,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	86.890.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	86.890.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	7.078.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		7.078.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	8.749.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		8.749.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	59.964.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		59.964.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	11.098.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		11.098.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	95.782.470,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	95.782.470,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	18.642.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		18.642.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	18.047.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		18.047.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	26.425.150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		26.425.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	19.329.420,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		19.329.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	13.337.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		13.337.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	14.579.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	14.579.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2 Dokumen	14.579.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		14.579.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	2.395.192.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	895.192.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	216.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		216.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	238.590.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		238.590.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	440.602.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		440.602.400,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	1.217.731.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	357.596.170,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				2 Laporan	469.108.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				20 Dokumen	748.623.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		357.596.170,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	8.642.886.411,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	8.220.702.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				23 Dokumen	6.488.309.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.434.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				16 Dokumen	2.154.577.411,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.786.407.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	NON URUSAN						15.993.591.612,00							17.343.543.790,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						15.993.591.612,00							17.343.543.790,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.993.591.612,00						-	17.343.543.790,00	
		-	-	-	-	-	-	15.993.591.612,00	-	-	-	-	-	-	17.343.543.790,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.312.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	3.670.467.128,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/bulan	3.312.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		3.670.467.128,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	332.686.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	340.826.644,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		20.891.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		69.443.344,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	16.411.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		16.411.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				180 Laporan	66.275.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		66.275.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	180.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		167.806.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	439.766.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	319.766.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	255.783.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		255.783.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	183.983.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		63.983.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.213.303.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.962.094.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13.303.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		13.303.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	150.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		151.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.050.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.797.090.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.229.562.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.534.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	396.392.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		396.392.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	165.590.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		165.590.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				725 Unit	67.580.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		67.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	600.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		904.728.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	330.205.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	341.893.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	330.205.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		341.893.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	8.153.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	8.149.020.606,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				280 Orang/Bulan	7.907.400.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		8.006.840.606,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				100 Paket	239.430.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		117.180.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				5 Orang	6.250.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	982.788.612,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.025.186.112,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				2 Dokumen	112.213.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		115.033.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	118.287.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		118.287.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	752.288.112,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		791.865.612,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						14.838.213.045,00							37.116.954.947,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.838.213.045,00							37.116.954.947,00	
	5.01	PERENCANAAN						14.738.213.045,00							37.016.954.947,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.708.213.045,00						-	4.886.954.947,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	4.708.213.045,00	-	-	-	-	-	-	4.886.954.947,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah undefined	-			100 % undefined undefined	4.338.380.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	4.361.010.419,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				462 Orang/bulan	4.307.300.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		4.329.930.419,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	4.708.213.045,00	-	-	-	-	-	-	4.886.954.947,00	-
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	31.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		31.080.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	4.708.213.045,00	-	-	-	-	-	-	4.886.954.947,00	-
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 %	154.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	184.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		4.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi</i>	-			100 %	110.833.045,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	157.475.779,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	2.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	108.833.045,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		155.475.779,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik	-			100 %	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	184.468.749,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	55.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		134.468.749,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	4.708.213.045,00	-	-	-	-	-	-	4.886.954.947,00	-
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	4.708.213.045,00	-	-	-	-	-	-	4.886.954.947,00	-
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						9.925.000.000,00						-	32.025.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 90	100 84	100 85	100 86	9.925.000.000,00	-	-	-	-	-	-	32.025.000.000,00	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	-			2 dokumen	9.900.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	32.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				6 Dokumen	9.850.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		31.950.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	-			88 %	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	-			4 dokumen	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan <i>undefined</i>	-			5 modul undefined	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				41 Dokumen	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						105.000.000,00						-	105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-			92 %	60.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	-			92 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				8 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan</i>	-			92 %	30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						100.000.000,00							100.000.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						100.000.000,00						-	100.000.000,00	
		[Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan]	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	80 86.00	-	75 81.00	76 82.00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	-			1 dokumen	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	-			1 dokumen	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah</i>	-			100 %	70.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						11.371.734.853,00							12.154.812.590,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.371.734.853,00							12.154.812.590,00	
	5.02	KEUANGAN						11.371.734.853,00							12.154.812.590,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.305.310.000,00						-	8.632.460.790,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	8.305.310.000,00	-	-	-	-	-	-	8.632.460.790,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.379.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	6.917.971.590,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				630 Orang/bulan	7.338.800.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.866.931.590,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	41.040.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		51.040.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	196.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	515.488.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.488.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	60.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		70.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				462 Laporan	120.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	190.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	90.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		90.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	479.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	693.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	125.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		163.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	353.470.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	160.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	316.001.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	130.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		180.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		43.490.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		92.511.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						2.899.029.550,00						-	2.776.503.900,00	
		[Meningkatkan tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan]	Penyusunan produk anggaran yg tertib efisien dan tepat waktu Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100 20 30 40	0 100	100 20 30 47	100 20 40	2.899.029.550,00	-	-	-	-	-	-	2.776.503.900,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	41.434.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	716.323.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	7.049.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		118.290.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	6.419.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		119.863.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	16.933.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		349.154.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	11.031.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		129.015.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	7.896.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	61.830.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8 Dokumen	7.896.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		61.830.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	49.699.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	98.350.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				8 Laporan	3.585.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.553.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	37.971.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		78.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	8.142.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		13.797.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	2.800.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.900.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	800.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		900.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	2.000.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						78.912.500,00						-	470.494.000,00	
		[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	Penyajian laporan barang milik daerah secara akurat dan tepat waktu Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	0 10	0 100	10 100	0 10	78.912.500,00	-	-	-	-	-	-	470.494.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	78.912.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	470.494.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		27.803.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		16.635.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		112.107.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	29.250.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		93.670.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	29.662.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		203.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		17.279.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						88.482.803,00						-	275.353.900,00	
		[Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah]	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital presentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	100 2 31.81 60	0 16.18 2	100 16.28 2 60	100 2 24.83 60	88.482.803,00	-	-	-	-	-	-	275.353.900,00	-
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	88.482.803,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	275.353.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				9 Dokumen	6.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		44.942.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	29.502.803,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		79.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				400 Obyek Pajak	23.700.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		75.931.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				72 Dokumen	29.280.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		75.480.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						10.555.337.170,00							10.217.058.809,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						10.547.837.170,00							10.209.558.809,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						9.947.837.170,00							10.109.558.809,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.753.853.320,00						-	9.915.574.959,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	9.753.853.320,00	-	-	-	-	-	-	9.915.574.959,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	9.358.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	9.358.180.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	9.327.100.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		9.327.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	31.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		31.080.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah</i>	-			90 %	97.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	118.269.324,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		11.269.324,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	-			100 %	200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	15.000.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-			90 %	203.673.120,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	269.640.535,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	90.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		89.998.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	112.673.120,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		178.641.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			90 %	95.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	154.485.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		109.485.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						193.983.850,00						-	193.983.850,00	
		[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	6	0	6	6	193.983.850,00	-	-	-	-	-	-	193.983.850,00	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun	-			400 file 200 orang	69.983.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	69.983.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	9.983.850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		9.983.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	-			100 %	90.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	-			100 %	34.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	34.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	10.935.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.935.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	11.770.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		11.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				10 Orang	11.295.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		11.295.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						600.000.000,00							100.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						600.000.000,00						-	100.000.000,00	
		[Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	6.13	10.45	7.60	3.58	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	-			120 orang	515.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				80 Orang	515.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	-			20 orang	85.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	85.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X	NON URUSAN						7.500.000,00							7.500.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.500.000,00							7.500.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.500.000,00						-	7.500.000,00	
		-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	-			90 %	7.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	7.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						5.500.947.300,00							6.014.305.981,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.500.947.300,00							6.014.305.981,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						5.500.947.300,00							6.014.305.981,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.167.115.300,00						-	5.437.473.981,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	5.167.115.300,00	-	-	-	-	-	-	5.437.473.981,00	-
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.731.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	4.858.733.245,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	4.700.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		4.827.653.245,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	31.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		31.080.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				31 Orang	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	114.136.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	167.455.236,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		701.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.798.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.798.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		24.773.936,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11.337.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		11.337.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		128.844.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.149.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	57.149.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	37.100.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		37.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	20.049.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		20.049.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	116.083.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	175.860.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	260.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		260.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.298.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	100.823.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		160.301.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	98.666.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	128.276.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	45.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		89.510.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	45.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.100.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	2.466.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.466.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.200.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						230.087.000,00						-	454.992.000,00	
		[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85	85	85	85	230.087.000,00	-	-	-	-	-	-	454.992.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	169.202.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	382.242.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	21.367.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		36.330.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				125 Laporan	87.775.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		260.710.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	7.537.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		16.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	9.170.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		16.650.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	43.352.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		51.902.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	60.885.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	72.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	8.550.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		8.550.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				6 Laporan	52.335.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		64.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						103.745.000,00						-	121.840.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peningkatan aparat Pengawasan intern pemerintahan (APIP)	3.035	3.035	3.035	3.035	103.745.000,00	-	-	-	-	-	-	121.840.000,00	-
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	103.745.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	121.840.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				23 perangkat daerah	47.215.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		62.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				23 perangkat daerah	7.830.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	22.950.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		22.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				23 perangkat daerah	25.750.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		25.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR						14.596.454.276,00							19.402.612.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						14.596.454.276,00							19.402.612.000,00	
	7.01	KECAMATAN						14.596.454.276,00							19.402.612.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.138.192.556,00						-	12.701.292.000,00	
		[Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	95	95	95	95	11.138.192.556,00	-	-	-	-	-	-	12.701.292.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.202.420.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	9.729.640.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				994 Orang/bulan	9.166.300.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		9.693.520.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	36.120.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		36.120.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	149.703.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	272.400.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.200.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		52.200.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				12 0	9.703.700,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	100.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	100.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		100.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.572.242.856,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	2.084.252.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		85.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.496.742.856,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.997.252.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	213.726.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	515.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	22.500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		22.500.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	52.500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		215.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	27.250.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		27.500.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	111.476.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		250.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						822.631.270,00						-	1.180.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan]	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100	100	100	100	822.631.270,00	-	-	-	-	-	-	1.180.000.000,00	-
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		30.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	191.474.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	225.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	191.474.270,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		225.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	631.157.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	925.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8 Laporan	631.157.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		925.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.632.230.450,00						-	4.971.320.000,00	
		[Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat]	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	40.25	39.98	39.99	40.00	2.632.230.450,00	-	-	-	-	-	-	4.971.320.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.733.430.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	2.750.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga K emasyarakat an	133.430.450,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		150.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		600.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	1.400.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	898.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	2.221.320.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga K emasyarakatat an	898.800.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.221.320.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						100.000,00						-	10.000.000,00	
		[Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100	100	100	100	100.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	undefined	-			undefined undefined	100.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudny a Tata Kelola Pem erintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	100.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		10.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						3.300.000,00						-	540.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100	100	100	100	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-	540.000.000,00	-
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	3.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	540.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang	100.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		470.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	3.200.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		70.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
		KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT						13.716.423.140,00							14.706.466.278,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						13.626.666.140,00							14.652.829.278,00	
	7.01	KECAMATAN						13.626.666.140,00							14.652.829.278,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.039.934.600,00						-	10.808.204.278,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah]	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100	100	100	100	10.039.934.600,00	-	-	-	-	-	-	10.808.204.278,00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.048.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	8.273.399.382,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1050 Orang/bulan	8.048.700.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		8.273.399.382,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	170.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	446.320.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		23.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				36 Paket	50.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		96.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				36 Paket	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		28.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		299.320.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.617.169.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.720.124.896,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				108 Laporan	1.500.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		2.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				217 Laporan	80.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		109.698.496,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				108 Laporan	1.535.669.600,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.608.426.400,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.065.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	368.360.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	47.344.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		184.640.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	40.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		66.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	1.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	116.720.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		116.720.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						944.331.000,00						-	945.325.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan]	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 97.92	100 97.85	100 97.86	100 97.88	944.331.000,00	-	-	-	-	-	-	945.325.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-			-	200.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	200.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				680 Dokumen	200.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		200.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	744.330.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	744.325.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				8 Laporan	744.330.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		744.325.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						2.616.300.540,00						-	2.872.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat]	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	28 43.00	26 39.20	28 39.50	28 39.80	2.616.300.540,00	-	-	-	-	-	-	2.872.300.000,00	-
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	1.311.211.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.229.460.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyarakatan	195.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		195.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	1.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	1.116.210.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.033.460.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.305.089.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	1.642.840.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1.305.089.540,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.642.840.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						11.000.000,00						-	11.000.000,00	
		[Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum]	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100	100	100	100	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	11.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	11.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				108 Laporan	11.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		11.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						15.100.000,00						-	16.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan umum]	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100	100	100	100	15.100.000,00	-	-	-	-	-	-	16.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	15.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				170 Orang	100.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		1.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Dokumen	15.000.000,00	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		15.000.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	X	NON URUSAN						89.757.000,00							53.637.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						89.757.000,00							53.637.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						89.757.000,00						-	53.637.000,00	
		-	-	-	-	-	-	89.757.000,00	-	-	-	-	-	-	53.637.000,00	-
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	36.120.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	36.120.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.637.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	53.637.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	53.637.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		53.637.000,00	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK						8.035.491.406,00							8.791.206.453,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.789.342.690,00							6.522.557.737,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5.789.342.690,00							6.522.557.737,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.644.847.390,00						-	5.117.077.737,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.094.580.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	4.169.504.111,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4.063.500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		4.169.504.111,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	31.080.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	130.747.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	244.440.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		7.159.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		36.882.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.747.350,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		12.901.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	100.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		187.497.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	38.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	38.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	99.188.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	181.115.216,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	1.747.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		4.945.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	25.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		32.273.716,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	72.441.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		143.896.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	282.331.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	417.017.660,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	265.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		373.428.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	13.570.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		23.301.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.761.240,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		20.287.860,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						1.144.495.300,00						-	1.405.480.000,00	
		[Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	1.144.495.300,00	-	-	-	-	-	-	1.405.480.000,00	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	69.810.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	69.810.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				160 Orang	69.810.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-		69.810.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	934.773.100,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjut an	-	-	1.195.757.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	608.964.300,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		869.949.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	260.000.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				40 Kawasan	65.808.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		65.808.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	68.330.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	68.330.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	68.330.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		68.330.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	71.582.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	-	71.582.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	71.582.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		71.582.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						2.246.148.716,00							2.268.648.716,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.246.148.716,00							2.268.648.716,00	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						695.151.750,00						-	717.651.750,00	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	80	80	80	695.151.750,00	-	-	-	-	-	-	717.651.750,00	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	695.151.750,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	717.651.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				80 Orang	695.151.750,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		717.651.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.223.154.966,00						-	1.223.154.966,00	
		[Meningkatkan etika dan budaya politik]	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100	100	100	100	1.223.154.966,00	-	-	-	-	-	-	1.223.154.966,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	1.223.154.966,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	1.223.154.966,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				45 Orang	402.370.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		402.370.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Orang	820.784.966,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		820.784.966,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
3.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						82.250.000,00						-	82.250.000,00	
		[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat]	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	82.250.000,00	-	-	-	-	-	-	82.250.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	82.250.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	82.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				43 Orang	82.250.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat , perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		82.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						245.592.000,00						-	245.592.000,00	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	100	100	100	245.592.000,00	-	-	-	-	-	-	245.592.000,00	-
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			-	245.592.000,00			Memperkok oh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudny a keamanan masyarakat , perlindung an sosial, l nternalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-	-	245.592.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				59 Orang	245.592.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat	-		245.592.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	
	J U M L A H							583.574.833.000,00							281.532.499.021,00		



BAB VI

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Selain memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator Kinerja Makro bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang periode 2025-2029. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, maka ditetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Gini Rasio, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator kinerja makro menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan Kota Padang Panjang khususnya dan menjadi dukungan keberhasilan indikator kinerja pembangunan provinsi dan nasional. Adapun target indikator



pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan, target capaian

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2026 dijabarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 6.1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2026

No.	Nama Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,60	82,40
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,31	4,11
3	Tingkat Pengangguran	%	4,94	3,93
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,52	5,95
5	PDRB ADHK Per Kapita	Juta	50,62	54,96
9	PDRB ADHB Per Kapita	Juta	80,01	97,81
7	Gini Rasio	Indeks	0,266	0,259

6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai Program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,60	82,40
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,47	15,85
3	Rata-Rata lama Sekolah	Tahun	12,00	12,30
4	Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	%	100,00	100,00
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	96,78	97,00
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,48	77,01
7	Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,67	0,19
8	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,56	0,82
9	Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	0,00	0,00
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66,60	71,00



No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
11	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,46	66,66
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,23	98,35
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,52	5,95
14	Tingkat Kemiskinan	%	5,31	4,11
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,94	3,93
16	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	87,05	89,23
17	Tingkat Inflasi	%	0,00	2,71-3,56
18	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,30	10,73
19	Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	18,28	18,43
20	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,89	3,00
21	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,10	5,60
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	29,55	30,34
23	Nilai Investasi	Milyar	39,96	75,00
24	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (Koefisien Variansi Harga Antar Waktu)	%	0	8,5
25	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	108,5	152,78
26	Tingkat kesempatan kerja	0	0	0
27	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	3060	980
28	Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	11840	12285,71429
29	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	4,99	5,5
30	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	5,33	5,2
31	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,66	90
32	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3.14 (Thn 2023)	3,41
33	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,17	4,3
34	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,66	98,9
35	Nilai SAKIP Kota	Angka	64,22	80
36	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	3,16	4,00



No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
37	Indeks Inovasi Daerah	Angka	81,35 (Sangat inovatif)	89,34 (Sangat inovatif)
38	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Angka	78,03	81
39	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	72,2	78
40	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	63,19	85,5
41	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	0	0
42	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85,1	86,9
43	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,2	0,4
44	Persentase kenaikan PAD	0	0	0
45	Indeks Rasa Aman	Angka	86,04	92
46	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	2,4	2,75
47	Indeks Harmoni	Angka	0	80
48	Angka PPKS	Angka	3,69	2,5
49	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	85	100
50	Persentase pemajuan objek kebudayaan	%	66,16	69,70-70,34
51	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	95,5	96,1
52	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,62	74,89
53	IKLI KePUan	Angka	96,71	97,31
54	IKLI Perkim	Angka	94,56	97,75
55	IKLI Perhubungan	Angka	95,22	97,23
56	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	71,28	85,35
57	Indeks Kualitas Udara	Angka	89,08	79,18
58	Indeks Kualitas Air	Angka	34,65	73,22
59	Indeks Kualitas Lahan	Angka	61,7	69,85
60	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,3	0,38

6.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau

kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

RKPD Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian pembangunan suatu daerah dibutuhkan indikator-indikator yang mampu menggambarkan hasil dari pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan sebagai salah satu bentuk informasi publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 secara rinci disajikan pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD) Kota Padang Panjang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	%	87,05	90
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	5,33	5,97
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,257	1.820,60
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	poin	62,62	74,56
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	13,67	33,75
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	9,64	33,81
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	9,64	23,6
8	Indeks Risiko Bencana	poin	113,2	0,35
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,46	1,19
10	Rasio Penduduk	%	101,53	101,56
11	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%		78,32
12	Kapasitas Air Baku	m3/detik		0,214
13	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	%	59,27	68,50
14	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	95,5	95,8
15	IKLI KePUan	Angka	96,71	97,01
16	IKLI perkim	Angka	94,56	97,15
17	IKLI Perhubungan	Angka	95,22	97,02
18	Indeks Kualitas Udara	Angka	89,08	78,88
19	Indeks Kualitas Air	Angka	34,65	72,77
20	Indeks Kualitas Lahan	Angka	61,7	69,65



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Indeks Resiko Bencana Indonesia	Angka	112	110,63 - 109,36
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,52	5,95
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,31	4,11
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	80,01	84,55
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,94	3,93
5	Indeks Gini	Angka	0,266	0,259
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,6	82,4
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,48	77,01
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,46	0,50
9	Prevalensi Stunting	%	19	12,45
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	12,14	12,30
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	15,51	15,85
12	Angka Literasi/Numerasi SD	Angka	89.34 dan 78.57	89.77 dan 79.57
13	Angka Literasi/Numerasi SMP	Angka	91.09 dan 86.45	91.50 dan 86.75
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	96,78	97
15	Indeks Literasi Digital	Angka	na	3,52
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	55,46	100
17	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	skor	na	100
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	53,25	67,22-67,72
19	Indeks Perlindungan Anak	Angka	66,46	71
20	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,081	0,073
21	Indeks Pembangunan Gender	Angka	98,23	98,35
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	na	55,87
23	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	0	0
24	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	na	100
25	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	88,2	90
26	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional			
	- Literasi membaca	Angka		84,8
	- Numerasi (matematika)	Angka		68,43
27	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	29,54	50,63
28	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,46	66,66
29	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Angka	85,74	82,992
30	Angka PPKS	%	3,69	3,21
31	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	100,35	100
32	Indeks Harmoni	Angka	na	72
33	Indeks Rasa Aman	Angka	na	86,2



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	na	88
35	Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	%	100	100
36	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	3.060	2.368
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan	%	48,58	49,48
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,3	10,734
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,89	3,06
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,1	5,82
5	Rasio Kewirausahaan	%	3,62	3,73
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,33	69,81
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	81,35 (Sangat inovatif)	84,41 (Sangat inovatif)
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	29,55	30,49
9	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	4,22	4,9
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	poin	95,5	95,8
11	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	71,28	81,6
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,2	0,33
13	Persentase kenaikan PAD	%	0	11
14	Tingkat Inflasi	%	0	2,61-3,53
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	29,31	15,24
16	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	ribu orang		75,67
17	Jumlah tamu wisatawan manca negara	%	14.919	161,2
18	Proporsi jumlah IKM non pertanian	%	na	1,89
19	Proporsi jumlah IKM	%	na	3,77
20	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	na	2,6
21	ROA BUMD	%	na	2,506
22	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	%	na	59
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,34	56,96-58,81
24	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	Angka	4,99	5,32
25	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	50,21	58,528
26	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	7,4	8,68
27	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap propinsi	%	1,43	1,434
28	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	2,88	8,28
29	Nilai transaksi saham per kapita per Kab/Kota	Rp. Juta	7,04	17.000.000
30	Total Kredit/PDRB	%	0,28	25,13



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	4,31	4,34
32	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	108,5	143,78
33	Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	0,5	0,8
34	Tingkat partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,67	0,2
35	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,56	0,83
36	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,52	58,528
37	Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	11.840	8,68
38	Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	18,28	1,434
39	Nilai Investasi	Milyar	39,96	8,28
40	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/oran g		17.000.00 0
IV ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,66	97,4
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,16	3,26
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,17	4,22
4	Persentase Penegakan Perda	%	100	100
5	Persentase Partai Politik dan Organisasi Masyarakat yang aktif	Angka	76.27*	77,482
6	Indeks Rasa Aman	Angka	86,04	86,39
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,88	3,9
8	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Angka	78,03	79
9	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	na	100
10	Angka kriminalitas per 1000 penduduk	kasus	na	1,78
11	Persentase penurunan pelanggaran trantibum	%	na	2,55
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77,66	81,78
13	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3.14 (Thn 2023)	3,39
14	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	72,2	74
15	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	63,19	73,5
16	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	0	3,45
17	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	85,1	87,2
18	Nilai SAKIP Kota	Angka	0,2	69,48
19	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	0	2,3
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	86,04	5,73
21	Indeks Zakat Nasional	Angka	2,4	0,67
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
I	PENDIDIKAN			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	103,3	85,54



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	101,4	104,98
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	140,5	155,04
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	55,22	100
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	62,94	99,7
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15,47	15,85
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12	12,30
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	62,95	62
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99,05	99,7
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	98,53	97,5
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	42,28	50
12	APK SD sederajat	%	105,5	106
13	APK SMP sederajat	%	109,31	107
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	76.37 / 75.38 / 60.71	78.37 / 77.38 / 62.71
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	73.15 / 74.71 / 60.82	74.15 / 75.71 / 62.82
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	89.34 dan 78.57	90 dan 79
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	91.09 dan 86.45	93 dan 88
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	53,25	57,95- 58,00
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	60
20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	54	60
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	60	70
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	49	65
23	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	5,73	18,91
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	8,69	12,92
II	KESEHATAN			
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100,00
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	142,42	100,00
6	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	118,56	100,00
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100,00
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100,00
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	108,7	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	108,59	100
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	116	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	127,53	100
13	Prevalensi Stunting	%	9,39	8,75
14	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,46	0.50
15	Presentase UHC	%	100,35	100
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	40	42
17	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	na	60
18	Insiden tuberkulosis	%	249	220
19	Angka Kematian Balita	per 1000	0	0
20	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	%	na	1,4
21	Cakupan Imunisasi Dasar lengkap	Angka	51,3	65,9
22	Persentase cakupan penerima PKG	%	na	55
23	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	40	42
24	Persentase Diabetes dalam pengendalian	%	30	32
25	Persentase kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	na	37,5
26	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	%	21,8	22,4
27	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	per 1000	7,4	7,7
28	Persentase Puskesmas yang memenuhi rasio Puskesmas terhadap populasi	%	100	100
29	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	na	60
30	Proporsi fasyankes terakreditasi paripurna	%	na	60



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	95,97	96,63
32	Persentase Masyarakat memiliki asuransi Kesehatan aktif	%	100,35	99,3
33	Persentase pengawasan air minum rumah tangga	%	na	22
34	Persentase sarana pengolahan pangan memenuhi syarat	%	na	30
35	Proporsi fasyankes terintegrasi SIKN	%	na	70
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	58,36	89,15
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	96,34	97
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,48	96
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	46,1	46,67
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	88,95	92,237
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	21	25
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	274	92
8	IKLI KePUan	Angka	96,71	96,9
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	83	84
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	78,96	80
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	3	3
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	30	50
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	78,96	91,96
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	61	65
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	93,19	94,5
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	99,1	100
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	81,31	82,60
18	Luas kawasan kumuh	%	2,14	2,12
IV	PERUMAHAN RAKYAT			
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	95,59	100
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,38	2,1
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan	%	79,31	100



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Utilitas Umum)			
4	IKLI Perkim	Angka	94,56	96,95
5	Persentase permukiman layak huni	%	99,48	100
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	30.000 orang	30.000 orang
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	4 menit	4 menit
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
11	Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	%	100	100
12	Respon time tanggap darurat	Menit	4 menit	4 menit
VI	SOSIAL			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100
3	Angka PPKS	%	3,69	3,21
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100	100
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	97	99
6	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	100	100
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
VII	TENAGA KERJA			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	0,02	0,12
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	120,63	140,78



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	75	58,45
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	47,6	49,00
6	Tingkat Pengangguran	%	4,94	4,64
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	66,33	68,65
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	1,27	3
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,83	8,753
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	31,54	26,07
4	IDG	Angka	67,58	75,06
5	Predikat KLA	Predikat	Utama	Utama
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20
IX	PANGAN			
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	27,00	46.522
2	LPE Sektor Pertanian	%	0,15	1,2
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	86,18	86,3
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2844,17	2400
X	PERTANAHAN			
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%		87
XI	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	62,62	74,45
2	Indek Kualitas Udara	Angka	89,08	78,78
3	Indek Kualitas Air	Angka	34,65	72,62
4	Indek Kualitas Lahan	Angka	61,7	69,58
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99,19	98
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	55,17	65
7	Persentase upaya pengelolaan	%	85	90



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	lingkungan hidup yang dilakukan			
8	Persentase luas RTH Publik	%	4,19	4,23
9	Persentase pengelolaan sampah	%	99,19	98
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	55,17	65
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,5	98,05
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	99,18	98,84
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	101,65	100
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,43	2,54
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	63,38	65
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	20,51	20,00
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	66,46	71
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	74	75
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,43	2,25
7	Ratio akseptor KB	%	63,38	73
XIII	PERHUBUNGAN			
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	Angka	0,39	0,339
2	Rasio Konektivitas Kota	%	77,77	77,77
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	Angka	95,52	96,9
XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	78,6	82
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	44	45
4	Indeks domain layanan SPBE	Angka	2,9	3,00
5	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,16	3,26
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	na	89,92



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	na	100
XV	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	75,55	78,47
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	6,38	1,26
3	Persentase koperasi aktif	%	73,77	76,19
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	36	45
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada	%	24	31,57
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0,1	0,2
7	Persentase UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha	%	0,1	0,2
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	9	8,60
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0,15	0,25
XVI	PENANAMAN MODAL			
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	38,6	45
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	24	26
3	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	90	95
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	97,9	98,5
XVII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,67	0,19
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,56	0,82
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	0,5	0,6
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi	11 prestasi nasional 35 prestasi provinsi
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	0 prestasi nasional 0 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 5 prestasi provinsi
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Pratama
XVIII	STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	1,94	3,20
XIX	PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	34	43
XX	KEBUDAYAAN			
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	70
XXI	PERPUSTAKAAN			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72,47	74
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	96,78	97
XXII	KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	81,72	62,35
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	83,33	70,83
3	Nilai LAKE	Angka	91,51	92
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	83,03	84
C	URUSAN PILIHAN			
XXIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	751,03	753
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,13
XXIV	PARIWISATA			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	27,02	4,59
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	19,72	50,47
3	Tingkat hunian akomodasi	%	34,17	37,00
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,89	2,91
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,42	2,45
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	3,98	8,57
7	PAD sektor pariwisata	juta rupiah	2.283.382 .152	400 juta
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	11,5	14
XXV	PERTANIAN			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	ton/ha	7,2	6,70
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	11	9,50
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	75	85



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang Tertangani			
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	13,8	13,8
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	7,2	6,7
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter / ekor/ hari	11,8	11,90
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	33,3	60
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	8,5	10
XXVI	PERDAGANGAN			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	36	40,00
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	50	70,00
3	LPE sektor Perdagangan	%	3,98	5,86
XXVI I	PERINDUSTRIAN			
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	26	28
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	33	70
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	40	55
5	Persentase pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	%	5	15
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	14	23
7	Kenaikan volume perdagangan	%	30	40
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	30	40
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
XXVI II	SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD			
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	100
2	Nilai LPPD	Angka		Sangat Tinggi
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95,26 (Sangat Baik)	96,50
7	Nilai RB	Angka	77,66	79
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Angka	64,22	65,74
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	71,42	95
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	95	96,5
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	94,46 (Tertinggi)	95
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	38,78	39,8
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	Angka	94,37 (Sangat Baik)	97,83
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	38,36	39,8
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	97,75 (Sangat Baik)	98
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	96,46	100
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	91,88	90
19	Persentase perda yang ditetapkan/dihasilkan	%	93,49	80
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	94,17	95
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	Angka	94,17	95
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	na	12,83
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	68,61	70
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	37,28	39
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	52,18	55
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
XXIX	PERENCANAAN			



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Angka	72,2	74
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	Sangat Inovatif (81,35)	Sangat Inovatif (81,85)
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	Angka	22,93	22,97
XXX	KEUANGAN			
1	Rasio PAD	%	18,22	18,6
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	83,98	89,67
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	63,2	72,0
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,52	8,802
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	13,9	7,0814
7	Manajemen Aset	%	100	100
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7,77	3,91
E	UNSUR PENGAWASAN			
XXXI	INSPEKTORAT			
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	Level 3	Level 3
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	Level 3	Level 3
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%	96	98
4	Indeks Kualitas Pengawasan	Angka	na	4
XXXI I	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN dan PELATIHAN			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	79,91	36,80
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,58	20,46
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,42	20,20
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	na	22,9
5	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	77,59	78,5
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100
8	Indeks Sistem Merit	Angka	325*	330
XXXI II	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	81,35 (Sangat inovatif)	82,81 (Sangat inovatif)



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
F	UNSUR KEWILAYAHAN			
XXXI II	KECAMATAN			
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	33,2	28
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	38,78	39,8
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
XXXI V	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	85
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	100	100
3	Persentase Konflik yang tertangani	%	100	100



BAB VII

Penutup

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun sebagai instrumen perencanaan tahunan yang mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029. Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prinsip keterpaduan, konsistensi, sinergi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keberlanjutan, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kaidah-kaidah pelaksanaan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
3. Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, dokumen ini menjadi pedoman dasar dalam hal penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat Pemerintah.
4. RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 menjadi pedoman bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
5. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hasil dari pengendalian dan evaluasi yang dilakukan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar jika akan dilakukan perubahan dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026.



7. Untuk memastikan pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 berjalan dengan efektif, adaptif dan berkelanjutan, maka dibutuhkan komitmen dari seluruh masyarakat, pemangku kepentingan, dan penyelenggara pemerintahan, sehingga visi pembangunan daerah dapat tercapai. pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan implementasi RKPD Tahun 2026 berjalan efektif, adaptif terhadap perubahan, dan berkelanjutan menuju pencapaian visi pembangunan daerah.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal Agustus 2025

WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS, BSBA